SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118 TAHUN 2025

TENTANG

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (6), dan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas rincian:

a. Anggaran . . .

a. Anggaran Pendapatan Negara;

b. Anggaran Belanja Negara; dan

c. Pembiayaan Anggaran.

Pasal 2

Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas rincian:

a. Penerimaan Perpajakan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Rincian Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas rincian:

a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan

b. Anggaran Transfer ke Daerah.

Pasal 4

(1) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas rincian:

   a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga; dan

   b. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian . . .

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, kecuali anggaran program pengelolaan belanja lainnya.

(4) Rincian Anggaran program pengelolaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

(1) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas rincian:

a. Dana Bagi Hasil;

b. Dana Alokasi Umum;

c. Dana Alokasi Khusus;

d. Dana Otonomi Khusus;

e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

f. Dana Desa.

(2) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Insentif Fiskal.

(3) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Dana Alokasi Khusus Fisik;

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan

c. Hibah kepada Daerah.

(4) Menteri teknis/pimpinan lembaga menetapkan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

(5) Rincian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Dana Otonomi Khusus Aceh yang terdiri atas:

1. Bagian . . .

1. Bagian program dan kegiatan bersama Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota pada Provinsi Aceh;
2. Bagian alokasi Provinsi Aceh; dan
3. Bagian alokasi kabupaten/kota pada Provinsi Aceh;

b. Dana Otonomi Khusus Papua yang terdiri atas:
1. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan
2. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya; dan

c. Dana Tambahan Infrastruktur untuk Papua.

(6) Bagian program dan kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V pada Tabel V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(8) Rincian Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Kurang Bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(9) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk setiap desa dan insentif desa yang dialokasikan pada tahun anggaran 2026 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(10) Dana Insentif Fiskal diberikan kepada daerah yang berkinerja baik yang dialokasikan pada tahun berjalan sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus miliar rupiah).

(11) Alokasi Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) untuk rincian setiap daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(12) Penyesuaian rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat dari:

a. Perubahan . . .

a. perubahan data;

b. kesalahan hitung;

c. selisih nilai alokasi dengan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;

d. selisih nilai alokasi dengan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

e. perubahan perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri dan/atau percepatan penarikan pinjaman atau hibah luar negeri;

f. kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada perhitungan Dana Alokasi Umum; dan/atau

g. kebijakan pemerintah lainnya,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

(1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk investasi pemerintah pada pos pembiayaan.

Pasal 7

(1) Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam Lampiran VII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Perubahan anggaran Belanja Negara berupa:

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan pada Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau perhitungan sisa klaim asuransi Barang Milik Negara tahun anggaran sebelumnya;

c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman baru untuk penanggulangan bencana;

d. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana;

e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;

f. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana;

g. perubahan anggaran cadangan kompensasi dalam Program Pengelolaan Belanja Lainnya;

h. pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian/lembaga atau sebaliknya dan/atau pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara);

i. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;

j. perubahan . . .

j. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian/lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2025 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2026;

k. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;

l. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

m. pergeseran anggaran antarprogram dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian/lembaga;

n. pergeseran anggaran antarprogram dalam unit eselon I yang sama;

o. perubahan anggaran belanja dalam rangka pembayaran tunggakan tahun sebelumnya/kewajiban Pemerintah;

p. perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah *closing date*;

q. perubahan anggaran Belanja Negara berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;

r. perubahan . . .

r. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan kebijakan, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;

s. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal;

t. pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; dan

u. perubahan anggaran Belanja Negara berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan proyek strategis nasional, percepatan kegiatan rehabilitasi mangrove, pengembangan kegiatan sektor pariwisata, dan/atau kegiatan penanggulangan bencana,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja kementerian/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya.

(3) Tata cara perubahan dan pergeseran anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari:

a. perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:

1. penambahan . . .

1. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
2. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2025 yang tidak terserap;
3. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/ atau
4. pengesahan atas pemberian pinjaman luar negeri yang telah *closing date*;

b. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/ badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan selisih kurs; dan/atau

c. perubahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, penarikan pinjaman tunai, penerbitan Surat Berharga Negara, dan/atau pemanfaatan saldo kas badan layanan umum sebagai akibat tambahan pembiayaan,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), rincian Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan dan pengesahan masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau perubahan kementerian/lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Penyesuaian . . .

(2) Penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran sebagai akibat pemisahan dan/atau perubahan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Rincian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pengalihan anggaran antar kementerian/ lembaga;

b. penyesuaian belanja negara secara otomatis;

c. penyesuaian Transfer ke Daerah;

d. penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik kepada penyedia barang dan jasa; dan/atau

e. *earmarking* belanja dalam rangka menghadapi ancaman terhadap perekonomian dan/atau instabilitas sistem keuangan.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.601.247.989.783
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	1.209.363.362.920
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	55.236.374.412
1.1.2	Pendapatan PPh Non-Migas	1.154.126.988.508
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	251.192.870.533
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	36.718.323.674
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	84.163.352.525
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	76.773.751.533
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22.140.110.095
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	434.420.736.470
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	91.463.621.296
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	157.006.754.944
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	247.467.438
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	995.277.404.803
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	615.170.629.640
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	352.213.036.590
1.2.3	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	8.429.567.858
1.2.4	Pendapatan PPnBM Impor	6.805.280.122
1.2.5	Pendapatan PPN/PPnBM Lainnya	12.658.890.593

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	26.138.114.575
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	3.184.263.671
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	599.620.856
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	7.406.160.719
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	14.293.451.397
1.3.5	Pendapatan PBB Panas Bumi	482.738.846
1.3.6	Pendapatan PBB Lainnya	171.879.086
1.4	Pendapatan Cukai	243.533.739.783
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	225.734.433.048
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	133.711.121
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	10.063.695.614
1.4.4	Pendapatan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan	7.601.900.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	126.935.367.702
2	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	92.466.260.217
2.1	Pendapatan Bea Masuk	49.901.699.242
2.2	Pendapatan Bea Keluar	42.564.560.975
TOTAL		**2.693.714.250.000**

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

Memorandum Item:	**JUMLAH**
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:	**10.649.892.145**
a. Komoditas Panas Bumi	3.645.004.553
b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	7.004.887.592

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
42	**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**	**459.199.942.626**
421	**PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM**	**236.614.142.236**
4211	PENDAPATAN MINYAK BUMI	80.211.970.000
42111	Pendapatan Minyak Bumi	80.211.970.000
421111	Pendapatan Minyak Bumi	80 211 970 000
4212	PENDAPATAN GAS BUMI	32.857.270.000
42121	Pendapatan Gas Bumi	32.857.270.000
421211	Pendapatan Gas Bumi	32.857 270.000
4213	PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	113.389.502.258
42132	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	755.857.380
421321	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara – Eksplorasi	25.752.460
421322	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	730.104.920
42133	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	109 133.644.878
421331	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	88.348.421.627
421332	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	4.822.413.750
421333	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	5.200.272.000
421334	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	156.667.500

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
421336	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	829.125.000
421338	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Bauksit	495.495.001
42134	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	3.500.000.000
421341	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	3.500.000.000
4214	PENDAPATAN KEHUTANAN	5.919.772.267
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	2.100.000.002
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	2.100.000.002
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.101.038.681
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.101.038.681
42143	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)	68.558.026
421435	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH)	68.558.026
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.650.175.558
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.650.175.558
4215	PENDAPATAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.663.048.854
42152	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	30.115.850
421521	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	30.057.605
421522	Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	58.245
42153	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1.186.933.004
421531	Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1.186.933.004
42154	Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi	446.000.000
421541	Pendapatan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut	446.000.000
4216	PENDAPATAN PANAS BUMI	2.572.576.857

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
42162	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.404.682.850
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.404.682.850
42163	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	33.325.559
421631	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	17.158.448
421632	Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	16.167.111
42164	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	134.570.448
421641	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	134.570.448
422	**PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)**	**1.800.000.000**
4221	PENDAPATAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN	1 800.000 000
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	900.600.000
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	900.600.000
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	899.400.000
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	899.400.000
424	**PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM**	**98.322.645.220**
4241	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM	92.787.291.229
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	50.127.578.112
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	30.242.246.610
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	14.641.761.704
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	797.895.294
424114	Pendapatan Jasa Percetakan	750.000
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhan dan Kenavigasian	522.573.459
424116	Pendapatan Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.985.000.000

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	4.846.880
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	10.564.813
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	921.939.352
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	3.125.599.215
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	2.458.402.322
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	5.459.156
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	661.737.737
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	38.689.811.603
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	1.775
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	146.219.782
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	51.332.500
424136	Pendapatan Investasi	965.000.000
424137	Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	10.332.247.500
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	26.134.400.000
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1.060.610.046
42414	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	844.302.299
424141	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	844.302.299
4242	PENDAPATAN HIBAH BADAN LAYANAN UMUM	48.822.565
42421	Pendapatan Hibah Terikat - Uang	25.401.000
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	50.000
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	151.000
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	25.200.000
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang	23.421.565
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	21.702.098
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	1.719.467

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
4243	PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA BLU	1.514.497.706
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1 514 497 706
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	56.908.887
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.254.974.705
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	202.614.114
4244	PENDAPATAN DARI ALOKASI APBN	114.171.487
42442	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	114.171.487
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	110.416.800
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang Membawahi BLU	3.754.687
4249	PENDAPATAN BLU LAINNYA	3.857.862.233
42491	Pendapatan BLU Lainnya	3.512.394.989
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.041.597.069
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	1.648.401
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	8.963.088
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	2.938.513
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	457.247.918
42492	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	345.159.041
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	16.469.600
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	69.532.985
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	93.870.957
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	101.643.476
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	54 975 471

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	8.666.552
42493	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	308.203
424933	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	200.000
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	108.203
425	**PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA**	**122.463.155.170**
4251	PENDAPATAN DARI PENJUALAN, PENGELOLAAN BMN, DAN IURAN BADAN USAHA	27.582.258.717
42511	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	20.307.705.641
425111	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	20.242.524.404
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	62.378.884
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	2.802.353
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	159.877.265
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.881.240
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	74.139.953
425123	Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	3.152.731
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	79.703.341
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	582.280.127
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	487.462.738
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	32.140.078
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	500
425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	59.553.986

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425137	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	3.038.075
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	84.750
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	777.301.200
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	89.326.200
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Pemegang IUPK	477.000.000
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	1.100.000
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	2 550.000
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	207.325.000
42515	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	58.973.203
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	58.973.203
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	4.376.164.000
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	4.311.700.000
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	64.464.000
42517	Pendapatan Iuran Badan Usaha	1.319.957.281
425171	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	1.025.000.000
425172	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	270.153.158
425174	Pendapatan Pengelolaan ADP yang Dipungut oleh Pengguna ADP	24.804.123

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN HUKUM	33.910.632.652
42521	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	10.641.740.338
425211	Pendapatan Paspor	3.219.441.850
425212	Pendapatan Visa	3.854.920.250
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.318.053.200
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	126.685.700
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	820.000.000
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	275.000.000
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	92.300.000
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	935.000.000
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	3.339.338
42522	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	446.476.788
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	79.448.020
425222	Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	162.458.503
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	105.203.252
425224	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	59.849.850
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	13.573.100
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	25.944.063
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	921.282.173
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	102.300
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.792.420
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	27.011.343
425234	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	2.066.819
425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	519.161.330

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	182.840.370
425238	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	77.896.260
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	109.411.331
42524	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.827.690.058
425241	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	96.580.644
425242	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	513.276.300
425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	1.407.821.153
425244	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	45.152.200
425245	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	466.753.350
425246	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	84.724.200
425247	Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	14.426.100
425248	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	6.607.228
425249	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	192.348.883
42525	Pendapatan Perizinan	3.039.607.533
425251	Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	1.529.775.000
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	24.431.200
425253	Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	1.840.000
425254	Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	63.585.000
425255	Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.733.085
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	1.113.243.248
42526	Pendapatan Pelayanan Kepolisian 1	13.669.695.870

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425261	Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	731.914.910
425262	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	1.030.657.835
425263	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	4.254.711.300
425264	Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	187.205.220
425265	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	3.909.402.525
425266	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	2.311.544.480
425267	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	44.793.850
425268	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	282.375.750
425269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	917.090.000
42527	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Ll	1.630.522.540
425271	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	3.738.900
425272	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	3.739.000
425273	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	372.955.105
425274	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	344.191.100
425275	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	46.739.900
425276	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	821.497.715
425279	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	37.660.820
42528	Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	730.617.352
425281	Pendapatan Akreditasi	44.887.455
425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.068.785

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425283	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	34.871.200
425284	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	14.455.959
425285	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	65.631.333
425286	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	7.083.464
425287	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	98.285.200
425288	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	274.232.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	190.101.956
4253	PENDAPATAN KESEHATAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, DAN KEAGAMAAN	6 616 496 670
42531	Pendapatan Jasa Kesehatan	2.034.918.562
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	447.670.508
425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1.028.435.773
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	402.625.135
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	67.345.435
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	71.153.511
425316	Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	17.688.200
42532	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	259.677.225
425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	259.677.225
42533	Pendapatan Jasa Karantina	314.185.000

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	310.000.000
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	4.185.000
42534	Pendapatan Jasa Agraria	3.377.083.680
425341	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	3.377.083.680
42535	Pendapatan Jasa Keagamaan	630.632.203
425351	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	586.056.600
425359	Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	44.575.603
4254	PENDAPATAN PENDIDIKAN, BUDAYA, RISET, DAN TEKNOLOGI	3.017.094.873
42541	Pendapatan Pendidikan	1.980.024.809
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	31.765.294
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	1.863.261.554
425413	Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	19.857.919
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	65.140.042
42542	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	364.393.612
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	327.969.935
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	36.423.677
42543	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	671.746.452
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	240.028.600
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	6.857.680
425433	Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	164.912.520
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	18.273
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	256.338.194
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	2.700.000
425437	Pendapatan Penelitian, Survei, dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	596.835

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	294.350
42545	Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	930.000
425451	Pendapatan Museum	930.000
4255	PENDAPATAN JASA TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.849.365.554
42551	Pendapatan Jasa Transportasi	9.032.181.233
425511	Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.165.511.995
425512	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.087.623.104
425513	Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	3.173.731.732
425514	Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	676.828.985
425515	Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	299.101.476
425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	178.568.745
425517	Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	796.913.762
425518	Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	1.415.989.398
425519	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	237.912.036
42552	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	21.705.511.756
425521	Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	20.389.036.758
425522	Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.238.276.560
425523	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	53.801.658
425524	Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	475.000
425525	Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	8.044.404
425526	Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	3.654.073
425529	Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	12.223.303
42553	Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	111.672.565
425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	23.926.024

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425533	Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	37.679.131
425534	Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	50.067.410
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA	1.353.180.574
42561	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	255.137.132
425611	Pendapatan Wisata Alam	217.684.118
425612	Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.405.714
425619	Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	10.047.300
42562	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	74.428.814
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	58.368.690
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	16.060.124
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	1.023.614.628
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	6.890.034
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	770.687.776
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	246.036.818
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	15.376.042.011
42571	Pendapatan Bunga	716.000.000
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	716.000.000
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	3.560.000.000
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	3.200.000 000
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	360.000 000
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	179.646.240
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	103.000.000
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	76.646.240

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	17.000.001
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	17.000.000
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	1
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	5.807.144
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.807.144
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	9.851.109.083
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	97.549.760
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling	302.333.051
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	9.121.226.272
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	330.000.000
42578	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	1.044.824.644
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.478.650
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	647 522.565
425783	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	184.194.234
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	175.936.170
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	35.693.025
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	1.654.899
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	1.562.599

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	92.300
4258	PENDAPATAN DENDA	1.891.670.218
42581	Pendapatan Denda I	26.537.214
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.477.214
425812	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	25.000.000
425813	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	60.000
42582	Pendapatan Denda II	1.560.800.000
425829	Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.560.800.000
42583	Pendapatan Denda III	304.333.004
425839	Pendapatan Denda Lainnya	304.333.004
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.866.413.901
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	1.625.545.239
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	100.000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	10.175.239
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	15.270.000
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	1.600.000.000
42593	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	363.500
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	350.000
425934	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	13.500
42599	Pendapatan Lain-Lain	240.505.162

RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2026
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	60.414.826
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	180.090.336

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 001

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	120.929.389	898.456.223	42.614.388		1.050.000.000	1.070.184.877	1.092.231.961	1.120.315.637
001.01	Deputi Bidang Administrasi	120.929.389	158.416.461	42.614.388		314.960.238	321.158.263	328.810.806	336.648.735
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	120.929.389	158.416.461	42.614.388		314.960.238	321.158.263	328.810.806	336.648.735
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	120.929.389	158.416.461	42.614.388		314.960.238	321.158.263	328.810.806	336.648.735
001 01 WA	Program Dukungan Manajemen	120.929.389	158.416.461	42.614.388		314.960.238	321.158.263	328.810.806	336.648.735
1101	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Gaji Jabatan		14.101.704			14.101.704	14.382.538	14.671.014	15.027.317
1102	Pengelolaan Tata Naskah Pimpinan dan Fasilitasi Protokol		27.444.169	9.131.388		36.575.557	37.307.068	38.053.209	38.974.039
1103	Pengelolaan Administrasi Pimpinan dan Pengelolaan Kesekretariatan	120.929.389	32.036.939			152.966.328	156.025.655	159.146.168	163.025.427
1104	Pengelolaan Administrasi Barang dan Fasilitasi Rumah Jabatan		84.834.449	33.482.999		118.317.448	120.683.797	123.097.473	126.091.911
9905	Pengelolaan Administrasi dan Pengembangan Internal		1.736.454			1.736.454	1.771.183	1.806.607	1.850.641
001 02	Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi		735.039.762			735.039.762	749.013.474	764.721.345	783.766.902
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		735.039.762			735.039.762	749.013.474	764.721.345	783.766.902
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		735.039.762			735.039.762	749.013.474	764.721.345	783.766.902
001 02 CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		735.039.762			735.039.762	749.013.474	764.721.345	783.766.902
1209	Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR		84.031.401			84.031.401	85.627.152	87.454.799	89.661.499

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 02

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6967	Pendampingan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MPR RI		16.909.827			16.909.827	17.344.290	17.821.429	18.073.650
	JUMLAH RM	120.929.389	696.456.223	42.614.388		1.050.000.000	1.070.184.677	1.092.831.951	1.120.815.627
	TOTAL JUMLAH	120.929.389	696.456.223	42.614.388		1.050.000.000	1.070.184.677	1.092.831.951	1.120.815.627

SK No 154199 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**								
002.01	**Sekretariat Jenderal**	**1.329.498.324**	**1.136.930.962**	**949.481.479**		**3.415.910.765**	**3.443.947.466**	**3.475.463.668**	**3.513.676.500**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**1.329.498.324**	**1.136.930.962**	**949.481.479**		**3.415.910.765**	**3.443.947.466**	**3.475.463.668**	**3.513.676.500**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**1.329.498.324**	**1.136.930.962**	**949.481.479**		**3.415.910.765**	**3.443.947.466**	**3.475.463.668**	**3.513.676.500**
002.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.329.498.324**	**1.136.930.962**	**949.481.479**		**3.415.910.765**	**3.443.947.466**	**3.475.463.668**	**3.513.676.500**
5781	Persidangan Komisi dan Paripurna		13.648.672			13.648.672	13.754.726	13.873.963	14.018.534
5782	Persidangan Badan dan Mahkamah		6.858.546			6.858.546	6.921.113	6.991.449	7.076.729
5783	Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen		4.542.867			4.542.867	4.574.331	4.609.711	4.652.611
5784	Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan		20.803.002			20.803.002	20.973.347	21.164.851	21.397.054
5785	Pemberitaan Parlemen		150.960.525	75.932.140		226.892.665	229.233.627	231.865.108	235.055.726
5786	Penyelenggaraan Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat		68.276.950			68.276.950	68.751.752	69.285.541	69.932.734
5787	Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		10.612.130			10.612.130	10.661.668	10.717.368	10.784.907
5788	Pengelolaan SDM Aparatur		41.741.185			41.741.185	42.494.646	43.341.639	44.368.601
5791	Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor		240.254.876	281.753.452		522.008.328	527.557.263	533.794.776	541.357.652
5792	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat I		2.640.608			2.640.608	2.675.251	2.714.205	2.761.442
5793	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur oleh Inspektorat II		7.465.678			7.465.678	7.531.730	7.605.990	7.696.036
5794	Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif		36.390.045			36.390.045	36.652.128	36.946.754	37.303.982
5795	Pengelolaan Teknologi Informasi		66.689.047	63.409.219		130.098.266	130.843.125	131.680.420	132.695.631
5797	Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		5.235.421			5.235.421	5.294.161	5.360.197	5.440.262
5800	Penyusunan Analisis Keparlemenan		15.196.421			15.196.421	15.341.578	15.504.778	15.702.653

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6574	Penataan Perencanaan, Organisasi, serta Pengelolaan Kinerja		14.776.243			14.776.243	14.920.282	15.082.242	15.278.613
6575	Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	1.329.498.324	15.118.896			1.344.617.220	1.351.342.728	1.358.902.827	1.368.069.309
6576	Pengelolaan Bangunan dan Wisma		383.981.601	528.386.668		912.368.269	922.370.732	933.614.394	947.247.145
6976	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukham		16.061.499			16.061.499	16.191.404	16.337.465	16.514.551
6977	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ekkuinbangkesra		10.262.308			10.262.308	10.378.811	10.509.783	10.668.586
6978	Penyusunan Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara		5.414.442			5.414.442	5.483.063	5.560.207	5.653.742
002.02	**Dewan**	**379.154.382**	**6.104.934.853**			**6.484.089.235**	**6.559.817.926**	**6.644.944.062**	**6.748.157.978**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**379.154.382**	**6.104.934.853**			**6.484.089.235**	**6.559.817.926**	**6.644.944.062**	**6.748.157.978**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**379.154.382**	**6.104.934.853**			**6.484.089.235**	**6.559.817.926**	**6.644.944.062**	**6.748.157.978**
002.02.CF	**Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan**		**5.926.757.173**			**5.926.757.173**	**5.994.994.952**	**6.071.700.648**	**6.164.704.923**
4397	Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Penegakan Etik DPR		48.471.471			48.471.471	49.376.352	50.393.537	51.626.854
5801	Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI		515.975.914			515.975.914	520.987.283	526.620.758	533.451.228
5802	Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI		45.384.375			45.384.375	46.097.912	46.900.032	47.872.584
5803	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI		560.796.980			560.796.980	567.076.499	574.135.330	582.694.030
5804	Pengelolaan Kelembagaan oleh Pimpinan DPR		96.332.307			96.332.307	98.022.098	99.921.606	102.224.718
5805	Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional		208.350.810			208.350.810	212.484.658	217.131.510	222.765.731
5806	Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat		4.418.411.533			4.418.411.533	4.467.690.502	4.523.084.331	4.590.248.387
5807	Pengelolaan Administrasi Dewan		33.033.783			33.033.783	33.259.648	33.513.544	33.821.391
002.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**379.154.382**	**178.177.680**			**557.332.062**	**564.822.974**	**573.243.414**	**583.453.055**
6573	Pengelolaan Hak Keuangan Dewan	379.154.382	178.177.680			557.332.062	564.822.974	573.243.414	583.453.055

SK No 154197 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 004

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6	7	8	9
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.444.129.598	3.002.783.308	386.067.196		6.834.980.000	6.966.485.766	7.114.335.696	7.293.809.258
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan	3.444.129.598	3.002.783.206	386.067.196		6.834.980.000	6.966.485.766	7.114.335.696	7.293.809.258
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	3.444.129.598	3.002.783.206	386.067.196		6.834.980.000	6.966.485.766	7.114.335.696	7.293.809.258
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI	3.444.129.598	3.002.783.206	386.067.196		6.834.980.000	6.966.485.766	7.114.335.696	7.293.809.258
004.01.WA	Program Dukungan Manajemen	368.802.000	687.252.030	353.802.367		1.409.856.197	1.435.210.466	1.465.598.254	1.498.047.997
0632	Kegiatan Pelayanan Dukungan Pemeriksaan Keuangan Negara	368.802.000	687.252.030	353.802.367		409.856.197	1.435.210.466	1.465.598.254	1.498.047.997
004.01.01	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.076.327.598	2.315.411.176	34.264.829		5.426.003.583	5.531.275.316	5.650.737.442	5.795.860.279
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	3.076.327.598	2.315.411.176	34.264.829		5.426.003.583	5.531.275.316	5.650.737.442	5.795.860.279
1154	Pengembangan dan Tata Kelola TI		41.456.931			41.456.931	42.301.454	43.202.540	44.304.911
1191	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	19.171.793	14.701.852	2.950.405		36.824.050	134.425.819	141.901.530	154.940.520
4630	Pemeriksaan Tanggung Jawab Pelaksanaan APBN		23.631.867			23.631.867	24.040.351	24.435.474	27.331.544
7101	Pemeriksaan Kinerja Kebijakan dan Pelaksanaan APBN		21.114.470			21.114.470	20.179.704	20.810.796	21.371.131
	JUMLAH RM	3.444.129.598	2.975.070.752	386.067.196		6.807.267.532	6.938.243.829	7.085.474.894	7.263.980.279
	JUMLAH PNBP		27.692.456			27.692.456	28.242.937	28.861.100	29.829.979
	TOTAL JUMLAH	3.444.129.598	3.002.783.206	386.067.196		6.834.980.000	6.966.486.766	7.114.335.696	7.293.809.258

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**9.864.012.448**	**3.318.622.076**	**1.571.117.616**		**14.753.752.140**	**14.805.606.602**	**14.841.618.473**	**14.885.281.559**
005.01	**Badan Urusan Administrasi**	**9.564.614.802**	**2.802.827.336**	**1.533.117.616**		**13.900.559.754**	**13.948.518.553**	**13.980.099.122**	**14.018.389.987**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**9.564.614.802**	**2.802.827.336**	**1.533.117.616**		**13.900.559.754**	**13.948.518.553**	**13.980.099.122**	**14.018.389.987**
03.04	**PERADILAN**	**9.564.614.802**	**2.802.827.336**	**1.533.117.616**		**13.900.559.754**	**13.948.518.553**	**13.980.099.122**	**14.018.389.987**
005.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**9.564.614.802**	**2.802.827.336**	**1.533.117.616**		**13.900.559.754**	**13.948.518.553**	**13.980.099.122**	**14.018.389.987**
1064	Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan		60.944.878			60.944.878	60.944.878	60.944.878	60.944.878
1065	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		8.432.096			8.432.096	8.432.096	8.432.096	8.432.096
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.908.206.925	501.912.850			4.410.119.775	4.816.709.860	4.816.709.860	4.816.709.860
1067	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung		68.212.185			68.212.185	69.252.927	69.252.927	69.252.927
1068	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		7.525.838			7.525.838	7.525.838	7.525.838	7.525.838
1069	Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya		82.388.652			82.388.652	82.388.652	82.388.652	82.388.652
1070	Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung		230.591.508			230.591.508	233.137.662	237.337.397	242.429.508
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			1.533.117.616		1.533.117.616	1.587.329.270	1.605.569.435	1.627.685.319
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5.656.407.877	1.842.819.329			7.499.227.206	7.082.797.370	7.091.938.039	7.103.020.909
005.02	**Kepaniteraan**	**188.031.865**	**34.746.023**			**222.777.888**	**223.203.734**	**223.682.455**	**224.262.897**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**188.031.865**	**34.746.023**			**222.777.888**	**223.203.734**	**223.682.455**	**224.262.897**
03.04	**PERADILAN**	**188.031.865**	**34.746.023**			**222.777.888**	**223.203.734**	**223.682.455**	**224.262.897**
005.02.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**12.410.037**			**12.410.037**	**12.653.477**	**12.927.136**	**13.258.941**

SK No 154195 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1046	Peningkatan Pelaksanaan Tertib		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
005.02.WA	Program Dukungan Manajemen	183.031.865	22.335.988			210.387.851	210.560.257	210.796.318	211.003.968
9041	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Setjen MA	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
005.03	Dirjen Badan Peradilan umum	11.090.958	147.646.097			158.735.055	159.930.185	161.323.414	163.012.235
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	11.090.958	147.646.097			158.735.055	159.930.185	161.323.414	163.012.235
03.04	PERADILAN	11.090.958	147.646.097			158.735.055	159.930.185	161.323.414	163.012.235
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		96.021.946			96.021.946	96.466.236	96.993.568	97.665.491
1045	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1047	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		93.022.946			93.022.946	93.029.936	93.971.703	94.207.001
005.03.WA	Program Dukungan Manajemen	11.090.958	51.623.182			62.714.110	63.471.949	64.329.846	65.346.734
9043	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Badan Peradilan Umum	11.090.958	34.780.299			45.871.234	50.629.000	51.480.089	52.519.895
9047	Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9048	Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum		4.029.830			4.029.830	4.029.830	4.029.830	4.029.830
005.04	Dirjen Badan Peradilan Agama	8.565.880	117.616.875			126.182.666	126.704.113	127.298.168	128.002.816
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	8.565.880	117.616.875			126.182.666	126.704.113	127.298.168	128.002.816
03.04	PERADILAN	8.565.880	117.616.875			126.182.666	126.704.113	127.298.168	128.002.816
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		77.596.924			77.596.924	78.129.462	78.767.525	79.419.185
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1057	Peningkatan Kelembagaan Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri (PN) pada Kota Administrasi		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2104	Pengelolaan Layanan Teknis Peradilan Agama		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
005.04.WA	Program Dukungan Manajemen	8.565.880	40.019.951			48.585.831	48.580.651	48.553.631	48.583.631



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1040	Pelaksanaan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag)	1.970.541	470.114			2.440.655	2.440.655	2.440.655	2.440.655
1041	Dukungan Manajemen Teknis Teknis Peradilan Agama		2.540.749			2.540.749	2.540.749	2.540.749	2.540.749
1043	Pelaksanaan Manajemen Administrasi Peradilan Agama		2.788.660			2.788.660	2.788.660	2.788.660	2.788.660
006.06	**Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)**	**8.636.467**	**30.510.631**			**39.147.098**	**39.716.834**	**40.357.766**	**41.134.787**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**8.636.467**	**30.510.631**			**39.147.098**	**39.716.834**	**40.357.766**	**41.134.787**
03.04	PERADILAN	8.636.467	30.510.631			39.147.098	39.716.834	40.357.766	41.134.787
006.06.RF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**12.594.290**			**12.594.290**	**12.795.277**	**13.023.058**	**13.286.565**
1038	Pembinaan Manajemen dan Peradilan Militer		7.093.167			7.093.167	7.205.132	7.333.241	7.481.600
1042	Pelaksanaan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara		4.494.125			4.494.125	4.565.145	4.646.114	4.740.177
006.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**8.636.467**	**17.916.341**			**26.552.808**	**26.916.557**	**27.329.710**	**27.828.222**
1045	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Baltikum)	2.636.467	15.723.014			18.359.481	18.714.790	19.142.149	19.641.135
1046	Dukungan Manajemen Teknis Teknis dan Administrasi Peradilan Militer		1.006.074			1.006.074	1.006.074	1.006.074	1.006.074
1048	Pelaksanaan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara		1.187.253			1.187.253	1.195.693	1.181.487	1.180.913
006.06	**Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan**	**27.606.142**	**148.892.445**	**38.000.000**		**214.498.587**	**214.498.587**	**214.498.587**	**214.498.587**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**27.606.142**	**148.892.445**	**38.000.000**		**214.498.587**	**214.498.587**	**214.498.587**	**214.498.587**
03.04	PERADILAN	27.606.142	148.892.445	38.000.000		214.498.587	214.498.587	214.498.587	214.498.587
006.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**27.606.142**	**148.892.445**	**38.000.000**		**214.498.587**	**214.498.587**	**214.498.587**	**214.498.587**
1073	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Peradilan		62.459.466			62.459.466	62.498.466	62.498.466	62.498.466
1074	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Peradilan		19.970.229			19.970.229	19.970.229	19.970.229	19.970.229
1077	Pelaksanaan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	27.606.142	66.462.750	38.000.000		132.068.892	132.030.177	132.030.177	132.030.177

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 005

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG

Satuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung		30.108.783			30.108.783	30.108.783	30.108.783	30.108.783
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	55.471.534	38.383.669			91.856.203	93.039.586	94.370.974	95.985.250
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	55.471.534	38.383.669			91.856.203	93.039.586	94.370.974	95.985.250
03.03	PERADILAN	55.471.534	38.383.669			91.856.203	93.039.586	94.370.974	95.985.250
005.07.WA	Program Dukungan Manajemen	55.471.534	38.383.669			91.856.203	93.039.586	94.370.974	95.985.250
10	Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan, dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Mahkamah Agung		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.9	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	8.864.912.448	3.306.978.624	1.563.973.685		14.723.864.760	14.776.476.403	14.841.104.584	14.864.304.049
	JUMLAH PNBP		82.643.452	17.943.928		29.787.380	30.131.199	30.513.578	30.977.210
	TOTAL JUMLAH	8.864.912.448	3.348.622.076	1.571.917.613		14.753.782.140	14.806.606.602	14.841.618.473	14.895.281.559

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
006	**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**	**5.695.431.816**	**1.957.564.017**	**12.597.004.167**		**20.250.000.000**	**20.456.407.688**	**20.688.439.928**	**20.969.774.243**
006.01	**Kejaksaan Republik Indonesia**	**5.695.431.816**	**1.957.564.017**	**12.597.004.167**		**20.250.000.000**	**20.456.407.688**	**20.688.439.928**	**20.969.774.243**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**5.695.431.816**	**1.957.564.017**	**12.597.004.167**		**20.250.000.000**	**20.456.407.688**	**20.688.439.928**	**20.969.774.243**
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**5.695.431.816**	**1.936.155.675**	**12.597.004.167**		**20.228.591.658**	**20.434.830.682**	**20.666.673.323**	**20.947.777.755**
006.01.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		**326.508.820**	**8.309.405.083**		**8.635.913.903**	**8.637.218.965**	**8.638.690.461**	**8.640.473.866**
1087	Operasi Intelijen di Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan di Jaksa Agung Muda Intelijen		1.723.790			1.723.790	1.723.790	1.723.790	1.723.790
1099	Operasi Inteliijen di Bidang Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.125.550			2.125.550	2.125.550	2.125.550	2.125.550
1100	Operasi Inteliijen di Bidang Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen di Jaksa Agung Muda Intelijen		3.506.682			3.506.682	3.506.682	3.506.682	3.506.682
1101	Operasi Inteliijen di Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.378.850			2.378.850	2.378.850	2.378.850	2.378.850
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		6.025.900			6.025.900	6.044.908	6.066.747	6.093.095
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		25.034.800			25.034.800	25.376.513	25.761.954	26.229.221
1104	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Intelijen		3.557.288			3.557.288	3.586.623	3.619.604	3.659.602
1109	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		3.272.420			3.272.420	3.298.389	3.327.582	3.362.977
1112	Operasi Intelijen di Bidang Pengamanan dan Pembangunan Strategis di Jaksa Agung Muda Intelijen		2.510.150			2.510.150	2.559.825	2.615.670	2.683.382
1115	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		3.212.472			3.212.472	3.212.472	3.212.472	3.212.472
1120	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		2.166.768			2.166.768	2.209.746	2.258.072	2.316.667
6579	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		14.488.580			14.488.580	14.488.580	14.488.580	14.488.580

SK No 154191 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6580	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana HAM Berat di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus		28.367.688			28.367.688	28.530.956	28.714.516	28.937.083
6581	Pertimbangan Hukum dan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara		3.521.240			3.521.240	3.591.095	3.669.630	3.764.849
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		218.902.642			218.902.642	219.374.650	219.907.807	220.553.683
6583	Penanganan Perkara Koneksitas di Jaksa Agung Muda Pidana Militer		3.053.429			3.053.429	3.111.750	3.177.334	3.256.855
6584	Dukungan Teknis Lainnya di Jaksa Agung Muda Pidana Militer		2.660.571			2.660.571	2.693.503	2.730.538	2.775.445
8010	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum			8.309.405.083		8.309.405.083	8.309.405.083	8.309.405.083	8.309.405.083
006.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**5.695.431.816**	**1.609.646.855**	**4.287.599.084**		**11.592.677.755**	**11.797.611.717**	**12.027.982.862**	**12.307.303.889**
1080	Pelayanan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Perrtimbangan Hukum, Kerja sama dan Hubungan Luar Negeri, Perwakilan Kejaksaan RI diluar negeri serta Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum dan Kerja Sama Hukum		4.775.105			4.775.105	4.865.836	4.967.839	5.091.520
1082	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kejaksaan RI	595.802.249	75.296.648			671.098.897	685.312.930	701.290.742	720.663.564
1084	Analisis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan RI		17.604.231			17.604.231	17.953.498	18.346.128	18.822.178
1085	Pelayanan Ketatausahaan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Staf Ahli, Keprotokolan dan Keamanan Pimpinan, Keamanan, Kesehatan, dan Pembinaan Rohani, serta Kerumah Tanggaan		122.800.963			122.800.963	125.488.132	127.943.340	130.920.236
1088	Pengelolaan Data, Statistik Kriminal serta Penerapan Pengembangan Teknologi		65.503.000			65.503.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	5.034.629.567	1.214.657.095			6.249.286.662	6.348.239.067	6.481.959.418	6.644.093.030
1091	Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		1.971.250	4.287.599.084		4.289.570.334	4.376.774.273	4.452.317.318	4.543.911.946

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1597	Pengawasan Kondisi Kejaksaan dan Pelaksanaan Tugas dan Kepatuhan Pegawai atas Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban		9.224.925			9.224.925	9.224.925	9.224.925	9.224.925
1598	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Terhadap Barang Milik Negara		5.720.587			5.720.587	5.763.456	5.806.787	5.850.240
2000	Kejaksaan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	95.000.000	18.909.921			103.909.921	95.577.000	100.733.465	110.047.340
[illegible]	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2010	Pengawasan Kejaksaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat		3.301.941			3.301.941	3.301.941	3.301.941	3.301.941
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA		21.408.342			21.408.342	21.677.008	21.768.606	21.996.488
008.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		21.408.342			21.408.342	21.677.008	21.768.606	21.996.488
2000	Pemulihan Keuangan Negara dan Penegakan Kepatuhan Pihak-pihak dengan Kewajiban Terhadap Negara dan Kewajiban Lainnya yang Berkaitan dengan Aset Negara melalui Pidana dan Perdata		21.408.342			21.408.342	21.677.008	21.768.606	21.996.488
	JUMLAH RM	5.695.431.816	1.825.868.538	11.247.701.992		18.589.025.341	18.767.617.869	18.909.411.759	19.228.326.783
	JUMLAH PNBP		239.274.484	494.912.825		734.187.309	735.419.193	736.804.046	738.483.146
	JUMLAH BLU		92.400.000			92.400.000	92.400.000	92.400.000	92.400.000
	JUMLAH SBSN			864.387.360		864.387.360	871.070.936	889.824.993	912.562.334
	TOTAL JUMLAH	5.695.431.816	1.957.564.017	12.607.002.167		20.260.000.000	20.466.407.998	20.628.440.798	20.969.774.263

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.083.789.881	1.357.909.287	167.889.316		2.609.587.484	3.269.419.817	3.319.620.535	3.388.786.012
007.01	Sekretariat Negara	1.026.780.534	1.256.310.720	167.646.252		2.450.737.506	3.524.128.709	3.572.904.292	2.632.043.859
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	1.026.780.534	1.256.310.720	167.646.252		2.450.737.506	2.524.128.709	2.572.904.292	2.632.043.859
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	1.026.780.534	1.256.310.720	167.646.252		2.450.737.506	2.524.128.709	2.572.904.292	2.632.043.859
007.01.QA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		205.729.284	15.236.721		220.966.005	221.163.909	221.388.877	221.656.117
1145	Penyelenggaraan Komunikasi Kerja Sama Teknis dan Hubungan Antarlembaga Pemerintah Pusat dan Daerah		1.321.114			1.321.114	1.321.114	1.321.114	1.321.114
1951	Penyelenggaraan Layanan Penyelenggara Negara dan Tamu Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Asing pada Kediaman Presiden		6.979.164	5.070		6.984.234	7.160.137	7.340.140	7.524.144
5993	Penyelenggaraan Komunikasi Kerja Sama Internasional Pada Kediaman Presiden dan Wakil Presiden		12.909.379			12.909.379	12.866.379	12.866.379	12.866.379
5997	Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Tetap Milik Negara yang Digunakan Kesekretariatan Kementerian Sumber Daya Manusia		10.719.703			10.719.703	11.014.497	11.316.963	11.626.729
5998	Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Tetap Milik Negara yang Digunakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat		570.724			570.724	760.782	760.782	760.782
5999	Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Tetap Milik Negara yang Digunakan Kementerian Perhubungan		961.719			961.719	961.719	961.719	961.719
9411	Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara yang Dipisahkan		1.201.451			1.201.451	1.201.451	1.201.451	1.201.451
9431	Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Perbendaharaan Negara		820.679			820.679	820.679	820.679	820.679
9902	Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kepada Negara Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya		949.764			949.764	949.764	949.764	949.764
9905	Penyelenggaraan Dukungan Kepada Kepala Negara Mantan Presiden dan Istri, Mantan Wakil Presiden dan Istri, dan Tamu Negara Lainnya		115.579.549	15.230.351		130.809.900	133.013.093	133.013.093	133.013.093



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		2	3	4	5	6	7	8	9
5414	Penyelenggaraan Layanan Terkait Tugas Pokok Penyelenggaraan Sidang Tahunan Lembaga Kenegaraan dan Penyelenggaraan Pengamanan Kegiatan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Sahabat di Wilayah Republik Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri		1.036.071			1.036.071	1.036.071	1.036.071	1.036.071
7160	Penyelenggaraan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Negara		649.845			649.845	581.454	581.454	543.445
7161	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian		593.887			593.887	593.850	593.850	593.850
7162	Penyelenggaraan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Masyarakat		649.845			649.845	581.454	581.454	543.445
7163	Penyelenggaraan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pertahanan Negara, Hubungan Internasional, dan Keamanan		649.845			649.845	581.454	581.454	543.445
7164	Penyelenggaraan dan Pelayanan Sekretariat Kabinet/Kementerian/Lembaga yang Menangani Urusan di Bidang Pemerintahan Umum		5.470			5.470	5.470	5.470	5.470
7165	Penyelenggaraan Teknis Kesekretariatan Pemerintahan		212.000			212.000	212.000	212.000	212.000
7166	Pengelolaan Data dan Informasi Terkait dengan Penyelenggaraan		276.276			276.276	276.276	276.276	276.276
7167	Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden/Peraturan Pengendalian, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Lainnya yang Setara, Tim Penilai Akhir		205.022			205.022	205.022	205.022	205.022
7171	Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Luar Negeri		1.097.574			1.097.574	1.097.574	1.097.574	1.097.574
007.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**1.039.750.534**	**1.080.581.439**	**172.429.531**		**2.259.771.504**	**2.302.964.800**	**2.361.517.815**	**2.410.337.738**
1125	Pendidikan Diploma Satu/Satuan Pendidikan Tinggi Kedinasan Kementerian Sekretariat Negara		75.214			75.214	75.214	75.214	75.214
1126	Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara		211.913			211.913	211.913	211.913	211.913
1202	Pengelolaan Komunikasi Publik		197.800.124	2.283.010		199.173.364	126.813.624	203.913.388	356.889.078
1203	Pengelolaan Komunikasi Digital Kanal		431.372.064	140.421.104		571.793.168	592.349.195	605.333.047	621.313.014

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6435	Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (PKASN) Kementerian Sekretariat Negara		8.683.292	165.358		8.848.650	8.848.650	8.848.650	8.848.650
6436	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Administrasi Keuangan, dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	984.308.241	11.006.281			995.314.522	1.020.693.516	1.049.221.715	1.083.811.663
6437	Penyelenggaran Keprotokolan, Ketatausahaan, Kearsipan, dan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		5.370.069			5.370.069	5.370.069	5.370.069	5.370.069
6438	Penyelenggaraan Dukungan Sarana, Prasarana, Pelayanan Umum Lainnya, serta Pengelolaan TIK di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		209.921.101	16.929.269		226.850.370	229.400.125	232.266.274	235.741.433
6439	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Presiden	24.651.029	116.704.863			141.355.892	141.355.892	141.355.892	141.355.892
6440	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Wakil Presiden	9.500.812	52.702.843	400.000		62.603.655	62.603.655	62.603.655	62.603.655
6441	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sekretariat Militer Presiden	1.185.370	8.398.245			9.583.615	9.677.785	9.783.643	9.911.993
7191	Pengelolaan Layanan Umum Sekretariat Dukungan Kabinet		27.515.375	200.000		27.715.375	27.715.375	27.715.375	27.715.375
7192	Pengelolaan Dukungan Kelembagaan, Kerja Sama, Arsip dan Ketatausahaan Sekretariat Dukungan Kabinet		10.000			10.000	10.000	10.000	10.000
7193	Pengelolaan Anggaran, Kinerja, dan Kepegawaian Sekretariat Dukungan Kabinet	7.115.082	140.000			7.255.082	7.255.082	7.255.082	7.255.082
7194	Pengelolaan Dukungan Administrasi Kedeputian di lingkungan Sekretariat Dukungan Kabinet		219.700			219.700	219.700	219.700	219.700
007.06	**Pasukan Pengamanan Presiden**		**25.844.735**			**25.844.735**	**591.540.153**	**595.141.305**	**598.797.358**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**		**25.844.735**			**25.844.735**	**591.540.153**	**595.141.305**	**598.797.358**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**		**25.844.735**			**25.844.735**	**591.540.153**	**595.141.305**	**598.797.358**
007.06.CA	**Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden**		**21.430.622**			**21.430.622**	**586.999.534**	**590.507.062**	**594.049.671**
5965	Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintah		21.430.622			21.430.622	586.999.534	590.507.062	594.049.671
007.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**4.414.113**			**4.414.113**	**4.540.619**	**4.634.243**	**4.747.687**

SK No 154185 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6443	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepaniteraan		4.414.113			4.414.113	4.642.513	4.434.249	4.247.592
007.07	Dewan Pertimbangan Presiden	715.194	11.733.730	23.084		12.471.988	12.600.121	12.838.079	13.225.687
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	715.194	11.733.730	23.084		12.471.988	12.600.121	12.838.079	13.225.687
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	715.194	11.733.730	23.084		12.471.988	12.600.121	12.838.079	13.225.687
007.07.QA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		291.944			291.944	291.944	291.944	291.944
5413	Pengelolaan Tata Usaha Pengarah Pimpinan dalam Lingkungan Kesekretariatan Dewan Pertimbangan Presiden		291.944			291.944	291.944	291.944	291.944
007.07.WA	Program Dukungan Manajemen	715.194	11.441.786	23.084		12.180.044	12.308.177	12.546.135	12.933.743
6443	Pelaksanaan Dukungan Teknis dan Administrasi Dewan Pertimbangan Presiden	715.194	11.441.786	23.084		12.180.044	12.308.177	12.546.135	12.933.743
007.10	Kantor Staf Presiden	13.830.413	22.092.342			35.922.755	36.808.463	37.799.884	39.004.346
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	13.830.413	22.092.342			35.922.755	36.808.463	37.799.884	39.004.346
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	13.830.413	22.092.342			35.922.755	36.808.463	37.799.884	39.004.346
007.10.QA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		591.174			591.174	591.174	591.174	591.174
5413	Pengelolaan Dukungan Tugas dan Tindak Lanjut Pengarahan Strategis dan Kebijakan Presiden		591.174			591.174	591.174	591.174	591.174
007.10.WA	Program Dukungan Manajemen	13.830.413	21.501.168			35.331.581	36.217.289	37.208.710	38.413.172
6444	Pelaksanaan Dukungan Manajemen Kantor Staf Presiden	13.830.413	21.501.168			35.331.581	36.217.289	37.208.710	38.413.172
007.12	DEWAN EKONOMI NASIONAL	12.114.816	21.774.951			33.889.767	34.259.784	34.869.352	35.189.590
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	12.114.816	21.774.951			33.889.767	34.259.784	34.869.352	35.189.590
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	12.114.816	21.774.951			33.889.767	34.259.784	34.869.352	35.189.590

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

17

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027.13.GA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		291.944			291.944	291.944	291.944	291.944
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
027.13.WA	Program Dukungan Manajemen	12.114.018	21.483.007			33.597.025	33.864.969	34.377.400	34.877.638
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
027.13	BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS	10.387.904	10.152.836			20.520.740	64.018.587	66.174.641	68.645.201
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	10.387.904	10.152.836			20.520.740	64.018.587	66.174.641	68.645.201
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	10.387.904	10.152.836			20.520.740	64.018.587	66.174.641	68.645.201
027.13.GA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		291.944			291.944	864.855	1.061.341	1.187.476
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
027.13.WA	Program Dukungan Manajemen	10.387.904	8.860.892			20.228.796	63.054.732	65.113.300	67.377.725
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	1.083.788.861	727.834.267	32.859.054		1.824.482.172	2.483.176.244	2.602.081.883	2.548.309.881
	JUMLAH PNBP		838.983	86.969		822.021	822.021	822.021	822.021
	JUMLAH BLU		819.263.538	154.704.904		773.968.442	789.168.619	809.221.728	826.296.069
	JUMLAH BLN		9.974.829			9.974.829	10.172.733	10.395.301	10.464.941
	TOTAL JUMLAH	1.083.788.861	1.557.908.287	187.649.316		2.609.387.464	3.283.339.617	3.318.820.933	3.386.796.912

SK No 154183 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.099.514.816	5.401.900.306	1.298.407.229		7.800.000.000	7.933.297.331	8.009.352.074	8.268.048.899
010.01	Sekretariat Jenderal	477.063.336	2.192.127.607	564.038.986		3.234.029.909	3.267.879.961	3.305.931.845	3.382.068.932
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	477.863.338	2.192.127.607	564.038.986		3.234.029.988	3.267.879.961	3.305.931.845	3.382.068.932
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	203.198.961	1.730.888.983	481.883.304		2.415.970.228	2.439.115.282	2.485.132.926	2.486.878.338
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	203.198.961	1.730.888.983	481.883.304		2.415.970.228	2.439.115.282	2.485.132.926	2.486.878.338
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.03	PELAYANAN UMUM	274.665.425	461.237.624	82.155.682		818.058.751	828.763.679	820.799.720	895.388.406
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	274.665.425	461.237.624	82.155.682		818.058.751	828.763.679	820.799.720	895.388.406
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.02	Inspektorat Jenderal	58.191.788	76.416.288	8.308.862		136.906.008	138.801.242	141.831.250	146.306.083
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	58.191.788	76.416.288	8.308.862		136.906.008	138.801.242	141.831.250	146.306.083
01.03	PELAYANAN UMUM	58.191.788	76.416.288	8.308.862		136.906.008	138.801.242	141.831.250	146.306.083
010.02.WA	Program Dukungan Manajemen	58.191.788	76.416.288	8.308.862		136.906.008	138.801.242	141.831.250	146.306.083

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- [illegible] -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.03	Ditjen Bina Bangda dan Pemberdayaan Masyarakat	47.920.056	304.285.882	7.000.000		359.205.938	366.123.476	372.373.327	381.163.639
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	47.920.056	304.285.882	7.000.000		359.205.938	366.123.476	372.373.327	381.163.639
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI		282.819.299			282.819.299	287.824.096	273.623.118	280.886.828
010.03.GR	Program Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat		282.819.299			282.819.299	287.824.096	273.623.118	280.886.828
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.03	PELAYANAN UMUM	47.920.056	41.466.583	7.000.000		96.386.639	97.499.380	98.750.209	100.268.811
010.03.WA	Program Dukungan Manajemen	47.920.056	41.466.583	7.000.000		96.386.639	97.499.380	98.750.209	100.268.811
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.01	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	55.907.351	301.333.589	4.797.022		362.037.974	369.196.940	373.298.381	383.222.448

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	55.902.363	301.313.588	4.787.022		362.092.974	300.189.869	340.268.391	343.222.448
01 06	PEMBANGUNAN DAERAH		196.394.435	900.000		199.294.535	231.123.497	265.455.315	302.081.147
010.01.GM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		196.394.435	900.000		199.294.535	231.123.497	265.455.315	302.081.147
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.01.GM.01	Penyelenggaraan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam Negeri dan Luar Negeri		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01 90	PELAYANAN UMUM LAINNYA		58.830.000			58.830.000	60.829.205	60.810.720	61.075.930
010.04.GM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		58.830.000			58.830.000	60.829.205	60.940.720	61.075.930
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01 03	PELAYANAN UMUM	55.902.363	43.168.864	3.887.022		102.958.239	108.234.278	113.899.356	120.066.478
010.04.WA	Program Dukungan Manajemen	55.902.363	43.168.864	3.887.022		102.958.239	108.234.278	113.899.356	120.066.478
010.9	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.9	[illegible]	52.902.363	37.407.481	3.887.022		97.250.946	97.032.043	102.923.873	109.804.022
010.9	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.9	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	83.414.864	226.379.288	13.349.000		323.104.953	336.003.956	340.399.299	346.700.168
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	83.414.864	226.379.288	13.349.000		323.104.953	336.003.956	340.399.299	346.700.168
01 06	PEMBANGUNAN DAERAH		166.949.776			166.949.776	169.700.314	166.983.990	168.633.144
010.05.GM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		166.949.776			166.949.776	169.700.314	166.983.990	168.633.144
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.05.GM.01	Pembinaan Kemitraan Desa		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03	PELAYANAN UMUM	93.814.044	66.691.514	13.319.000		173.824.178	176.297.372	179.102.309	183.167.084
010.03.WA	Program Dukungan Manajemen	93.814.044	66.691.514	13.319.000		173.824.178	176.297.372	179.102.309	183.167.084
0117	Layanan Perencanaan dan Urusan Bidang Pemerintahan Desa		2.300.000			2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
0118	Pengelolaan Keuangan, Aset, SDM, Data, dan Teknologi Informasi	20.474.044	2.894.000	13.319.000		36.687.044	37.881.789	39.214.217	40.842.207
0119	Dukungan Komunikasi Internal, Hubungan Masyarakat, dan Umum		9.637.514			9.637.514	9.637.514	9.637.514	9.637.514
0120	Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana, dan Aparatur Pemerintah Desa		2.757.000			2.757.000	2.757.000	2.757.000	2.757.000
010.06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	72.538.478	196.874.421	28.101.871		295.514.771	299.954.847	304.330.212	309.986.801
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	72.538.478	196.874.421	28.101.871		295.514.771	299.954.847	304.330.212	309.986.801
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		154.039.596	10.405		154.050.001	156.557.538	157.316.813	159.411.987
010.06.QM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		154.039.596	10.405		154.050.001	156.557.538	157.316.813	159.411.987
1254	Fasilitasi Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah		10.500.000			10.500.000	10.501.302	11.031.322	11.183.792
6139	Pembinaan Pelaksanaan dan Pengembangan Otonomi Daerah		143.539.596	10.405		143.550.001	146.056.236	146.285.491	148.228.195
01.03	PELAYANAN UMUM	73.538.478	42.838.825	28.091.466		144.468.769	144.077.311	147.013.909	150.574.914
010.06.WA	Program Dukungan Manajemen	72.538.478	42.838.825	28.091.466		144.468.769	144.077.311	147.013.909	150.574.914
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pemerintahan Daerah		6.700.000			6.700.000	6.939.200	7.035.840	7.021.707
6112	Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6113	Dukungan Komunikasi Internal, Hubungan Masyarakat, dan Umum	21.548.478	15.700.825	28.091.466		65.340.769	64.934.443	66.930.909	68.444.607
6114	Pengelolaan Keuangan, Aset, SDM, Data, dan Teknologi Informasi		7.567.000			7.567.000	7.611.674	7.711.674	7.711.674
6115	Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana, dan Aparatur Pemerintah Daerah		10.070.000			10.070.000	10.590.994	10.635.486	10.396.726
010.07	Ditjen Otonomi Daerah	50.764.127	95.671.693	1.315.080		147.750.900	150.958.457	153.214.974	156.058.849
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	50.764.127	95.671.693	1.315.080		147.750.900	150.958.457	153.214.974	156.058.849

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		71.757.743	366.545		72.124.288	73.426.077	74.281.411	75.340.688
010.07.GM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		71.757.743	366.545		72.124.288	73.426.077	74.281.411	75.340.688
1252	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa		27.302.100			27.302.100	28.179.041	29.105.373	29.810.100
1261	Evaluasi Kinerja dan Pemberdayaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah		10.626.268			10.626.268	10.750.200	10.782.290	10.864.040
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.03	PELAYANAN UMUM	50.766.127	23.913.960	1.448.536		76.128.612	77.443.180	78.923.663	80.718.251
010.07.WA	Program Dukungan Manajemen	50.766.127	23.913.960	1.448.536		76.128.612	77.443.180	78.923.663	80.718.251
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.08	Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54.896.952	1.828.788.877	580.145.808		2.261.606.637	2.279.028.588	2.308.114.212	2.350.681.070
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	54.896.952	1.828.788.877	580.145.808		2.261.606.637	2.279.028.588	2.308.114.212	2.350.681.070
01.03	PELAYANAN UMUM	54.896.952	1.828.788.877	580.145.808		2.261.606.637	2.279.028.588	2.308.114.212	2.350.681.070
010.08.EF	Program Tata Kelola Kependudukan		1.564.960.902	504.783.808		2.069.744.710	2.097.470.096	2.128.536.911	2.166.423.216
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(Dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
010.09.WA	Program Dukungan Manajemen	54.896.562	44.506.976	65.360.000		172.061.827	176.653.820	179.474.308	184.237.164
010.09.WA.1	Layanan Legislasi dan Litigasi yang Kelancaran dan Pengelolaan Sis		2.719.201			2.931.257	3.210.542	3.401.154	3.610.201
010.09.WA.2	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Badan Kependudukan dan Pemberdayaan Gen	24.505.800	53.409.435	25.360.000		103.275.351	105.623.377	109.073.283	113.920.345
010.09.WA.3	Terlaksananya Komunikasi dan Informasi Publik yang Kependudukan dan Pemberdayaan Eq		3.803.031			3.350.921	3.521.653	3.521.653	3.521.653
010.09.WA.4	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan		2.272.185			2.272.185	2.322.322	2.322.322	2.384.510
010.09	Dukungan Bantu Keuangan Daerah	49.848.506	138.042.286	1.500.000		189.391.793	192.895.878	195.847.530	199.199.080
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	49.848.506	138.042.286	1.500.000		189.391.793	192.895.878	195.847.530	199.199.080
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		114.313.557			114.313.557	115.689.129	117.235.389	119.110.219
010.09.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		114.313.557			114.313.557	115.689.129	117.235.389	119.110.219
010.09.CM.1	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Evaluasi		12.[illegible]			12.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
010.09.CM.2	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah, Pengelolaan Aset Daerah		102.[illegible]			102.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.03	PELAYANAN UMUM	49.848.506	23.728.729	1.500.000		75.078.236	76.506.749	78.112.134	80.088.861
010.09.WA	Program Dukungan Manajemen	49.848.506	23.728.729	1.500.000		75.078.236	76.506.749	78.112.134	80.088.861
010.09.WA.1	Layanan Legislasi dan Litigasi yang Kelancaran Daerah		1.[illegible]			1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
010.09.WA.2	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Badan Kependudukan dan Pemberdayaan	49.[illegible]	15.[illegible]	1.[illegible]		71.[illegible]	72.[illegible]	74.[illegible]	76.[illegible]
010.09.WA.3	Terlaksananya Komunikasi dan Informasi Publik yang Kependudukan Daerah		1.[illegible]			1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
010.09.WA.4	Terlaksananya Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah		1.[illegible]			1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
010.11	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	36.842.430	96.664.608	287.500		81.694.938	83.079.708	84.745.795	86.772.437
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	36.842.430	96.664.608	287.500		81.694.938	83.079.708	84.745.795	86.772.437
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		29.712.500	287.500		30.000.000	30.390.284	30.701.552	31.151.728

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010.11.QM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		29.712.500	287.500		30.000.000	30.330.284	30.701.682	31.161.726
1263	Pembinaan Kinerja Daerah		3.062.500	37.500		3.100.000	3.134.760	3.173.173	3.220.521
6142	Penguatan Sistem Keuangan Daerah Terkait Pelaksanaan Desentralisasi		25.650.000	250.000		25.900.000	26.195.524	26.518.509	26.913.122
01.03	PELAYANAN UMUM	85.842.499	25.852.459			51.564.908	62.748.424	64.047.185	65.626.711
010.11.WA	Program Dukungan Manajemen	85.842.499	25.852.459			51.564.908	62.748.424	64.047.185	65.626.711
6139	Layanan Perkantoran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		175.000			175.000	175.000	175.000	175.000
6170	Pengelolaan Keuangan BMN dan Optimalisasi Pemanfaatan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	85.842.499	24.054.714			76.477.213	61.062.960	62.310.653	63.877.635
6173	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		20.000			20.000	20.000	20.000	20.000
6181	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		1.602.745			1.792.695	1.790.464	1.541.532	1.554.076
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	109.559.153	190.427.028	110.175.000		410.161.109	418.680.813	433.905.279	432.856.273
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	109.559.153	190.427.028	110.175.000		410.161.109	418.680.813	433.905.279	432.856.273
01.03	PELAYANAN UMUM	109.559.153	106.438.341	110.175.000		326.172.504	331.296.484	338.971.736	343.901.358
010.12.QM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		24.580.582			24.580.582	25.013.184	25.585.736	26.281.559
1265	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		2.150.511			2.150.511	2.188.421	2.238.429	2.299.550
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	109.559.153	81.857.759	110.175.000		301.591.922	306.283.280	311.385.001	317.557.800
6172	Layanan Perkantoran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		70.000			70.000	71.232	72.531	73.917
6179	Pengelolaan keuangan BMN, dan Optimalisasi Barang Pengembangan Sumber Daya Manusia	109.559.153	79.660.759	110.175.000		299.394.912	304.099.648	309.109.570	314.784.533
6184	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.400.000			1.400.000	1.427.000	1.452.900	1.481.350
6185	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		727.000			727.000	685.400	750.100	765.917
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH		83.988.686			83.988.686	87.384.329	87.933.543	89.954.913

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		83.988.685			83.988.685	86.412.348	87.013.530	88.864.914
0142	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri		31.795.952			31.795.952	32.712.043	32.943.530	33.654.914
	JUMLAH RM	1.099.521.685	4.359.840.024	818.031.541		6.274.203.460	6.339.505.844	6.615.332.156	6.864.416.922
	JUMLAH PNBP		53.475.818	1.468.452		54.844.300	55.696.261	55.751.608	58.103.839
	JUMLAH PLN		944.813.045	478.687.208		1.423.500.252	1.440.721.542	1.459.742.847	1.482.805.401
	JUMLAH HLN		47.361.498			47.361.498	47.493.867	47.526.464	47.838.737
	TOTAL JUMLAH	1.099.521.685	5.401.990.385	1.298.187.201		7.800.000.000	7.993.297.354	8.080.852.874	8.252.964.899

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8.442.634.654	6.164.385.868	823.482.831		15.220.520.881	10.417.684.877	10.638.341.842	10.908.085.403
011 01	Sekretariat Jenderal	8.442.634.654	4.792.085.035	619.964.752		9.854.697.371	9.025.979.905	9.218.522.901	9.461.977.551
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	8.442.634.654	4.792.085.035	619.964.752		9.854.697.371	9.025.979.905	9.218.522.901	9.461.977.551
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI	8.442.634.654	4.578.075.068	619.964.752		9.638.677.474	8.808.268.727	8.992.810.357	9.221.000.178
011 01 AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		748.745.051			748.745.051	758.890.537	772.401.325	787.682.289
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011 01 WA	Program Dukungan Manajemen	8.442.634.654	3.829.339.017	619.964.752		7.891.938.423	8.049.388.890	8.220.209.052	8.433.417.895
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01 02	PELAYANAN UMUM		210.019.937			210.019.937	221.735.478	225.812.514	230.977.373
011 01 AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik		210.019.937			210.019.937	221.735.478	225.812.514	230.977.373
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011 02	Organisasi Asia Pasifik dan Afrika		55.283.092	114.000		56.377.092	58.417.476	57.687.214	59.005.541
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		55.283.092	114.000		56.377.092	58.417.476	57.687.214	59.005.541
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI		55.283.092	114.000		56.377.092	58.417.476	57.687.214	59.005.541
011 02 AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		51.647.693			51.647.693	52.547.172	53.607.182	54.928.041

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011.02	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Kebudayaan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.02.WA	Program Dukungan Manajemen		3.716.388	114.000		3.830.388	3.900.304	3.930.032	4.078.700
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.03	Ditjen Amerika dan Eropa		52.738.349			52.738.349	53.691.027	54.742.978	56.060.727
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		52.738.349			52.738.349	53.691.027	54.742.978	56.060.727
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		52.738.349			52.738.349	53.691.027	54.742.978	56.060.727
011.03.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		49.001.857			49.001.857	49.928.850	50.899.978	52.232.867
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.03.WA	Program Dukungan Manajemen		3.736.512			3.736.512	3.762.877	3.792.164	3.827.760
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.04	Ditjen Kerja Sama Asean		24.817.595			24.817.595	25.007.014	25.219.978	25.478.198
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		24.817.595			24.817.595	25.007.014	25.219.978	25.478.198
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		24.817.595			24.817.595	25.007.014	25.219.978	25.478.198
011.04.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		19.546.649			19.546.649	19.632.271	19.726.530	19.845.235
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.04.WA	Program Dukungan Manajemen		5.270.946			5.270.946	5.374.743	5.493.448	5.632.963
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.05	Ditjen Kerjasama Multilateral		1.051.798.644	93.000		1.051.891.644	1.074.599.029	1.098.014.778	1.126.313.176
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		1.051.798.644	93.000		1.051.891.644	1.074.599.029	1.098.014.778	1.126.313.176

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 725 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Unit : Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		1.053.738.644	83.000		1.053.858.644	1.074.659.029	1.096.014.774	1.126.203.176
011.06.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		1.040.173.754			1.040.173.754	1.060.030.066	1.092.070.910	1.120.237.096
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.06.WA	Program Dukungan Manajemen		5.424.890	83.000		5.707.890	5.888.963	5.943.856	6.085.290
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.08	Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik		22.402.208	50.000		22.533.208	22.818.547	23.142.650	23.534.418
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		22.402.208	50.000		22.533.208	22.818.547	23.142.650	23.534.418
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		22.402.208	50.000		22.533.208	22.818.547	23.142.650	23.534.418
011.06.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		18.088.443			18.088.443	18.303.058	18.533.180	18.812.121
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.06.WA	Program Dukungan Manajemen		4.393.765	50.000		4.443.765	4.588.488	4.609.470	4.722.297
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.07	Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional		19.587.772	69.030		19.656.802	20.030.949	20.449.684	20.958.484
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		19.587.772	69.030		19.656.802	20.030.949	20.449.684	20.958.484
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		19.587.772	69.030		19.656.802	20.030.949	20.449.684	20.958.484
011.07.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		15.009.087			15.009.087	15.291.401	15.608.797	15.993.832
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.07.WA	Program Dukungan Manajemen		4.578.685	69.030		4.647.716	4.738.548	4.840.887	4.964.651

SK No 154211 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.08	Ditjen Peninkol dan Konsuler		84.165.760	3.035.079		87.500.839	88.988.397	90.482.848	92.491.844
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		84.165.760	3.035.079		87.500.839	88.988.397	90.482.848	92.491.844
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		84.165.760	3.035.079		87.500.839	88.988.397	90.482.848	92.491.844
011.08.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik		79.168.713	2.936.079		82.104.792	83.483.266	85.008.289	88.619.284
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.08.WA	Program Dukungan Manajemen		5.288.047	100.000		5.388.047	5.508.132	5.629.548	5.772.650
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.09	Inspektorat Jenderal		12.008.483			12.008.483	12.841.594	12.508.315	12.885.811
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		12.008.483			12.008.483	12.841.594	12.508.315	12.885.811
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		12.008.483			12.008.483	12.841.594	12.508.315	12.885.811
011.09.WA	Program Dukungan Manajemen		12.008.483			12.008.483	12.841.594	12.508.315	12.885.811
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.10	Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan		23.808.477	150.000		23.958.477	24.256.943	24.590.325	24.985.758
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		23.808.477	150.000		23.958.477	24.256.943	24.590.325	24.985.758
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		23.808.477	150.000		23.958.477	24.256.943	24.590.325	24.985.758
011.10.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		20.908.247			20.908.247	21.206.713	21.540.095	21.945.526

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	Pemanfaatan Layanan [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.10.WA	Program Dukungan Manajemen		2.900.230	150.000		3.050.230	3.050.230	3.050.230	3.050.230
[illegible]	Pengelolaan Belanja [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.11	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri		13.330.461	26.500		13.356.961	13.600.196	13.880.080	14.216.797
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM		13.330.461	26.500		13.356.961	13.600.196	13.880.080	14.216.797
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		13.330.461	26.500		13.356.961	13.600.196	13.880.080	14.216.797
011.11.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional		10.001.885			10.001.885	10.214.718	10.420.635	10.676.090
[illegible]	Pengelolaan [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
011.11.WA	Program Dukungan Manajemen		3.298.786	26.500		3.325.286	3.385.478	3.459.644	3.540.707
[illegible]	Pengelolaan Belanja [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	3.482.534.864	6.163.481.311	384.096.528		9.990.121.497	10.181.029.560	10.398.645.376	10.662.054.514
	JUMLAH PNBP		702.452	229.398.842		230.099.314	236.664.427	239.795.471	246.013.748
	TOTAL JUMLAH	3.482.534.864	6.164.183.886	613.495.391		10.220.529.811	10.417.694.177	10.638.341.848	10.908.085.262

SK No 154209 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	58 879 437 873	54 887 025 351	75 753 847 068		187 100 000 000	190 014 158 991	193 458 397 482	197 599 481 845
012.01	Kementerian Pertahanan	813.386.841	22.088.049.611	52 382 153 474		76.339 589 926	76 532 854.177	77 914.859.258	79.590 378 974
02	FUNGSI PERTAHANAN	057 600 587	21,448 411 018	52 357 749,714		74,049 355 019	76 033 025,631	77 406,537 433	79 670 926 401
02.01	PERTAHANAN NEGARA	057 600 587	21.448 411 018	52 357 749,714		74.049 355 019	76 033 025,631	77 406,537 433	79 670 926 401
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	847 600 587	10.901 753 374	1 313 123.069		12.988 379 980	13 085 807.673	13 173.815 002	13 305 478 025
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.01.AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan		35 717 389			35 717 389			
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			
012.01.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan		141 619 241	6 400		141 619 241	144 408 360	147 548 323	151 345 481
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan		1,340,482 886	237,419,114		1,577 874 000	1 608,484,860	1,642,814,778	1,684 648 682
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTAHANAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012.01.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		9.217.067.376	50.907.207.103		60.124.274.479	61.215.515.015	62.442.183.830	63.929.454.221
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5262	Pengadaan Alat Alutsista Non Alut		[illegible]	231.303		1.705.479	1.820.683	1.992.704	1.920.980
5269	Pengadaan Barang Alutsista Strategis		[illegible]	48.030.703.201		53.324.570.010	53.974.199.955	53.293.570.237	51.694.480.503
10	FUNGSI PENDIDIKAN	66.052.894	415.457.760	10.408.760		490.184.547	498.728.648	508.921.825	519.853.579
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	66.052.894	415.457.760	10.408.760		490.184.547	498.728.648	508.921.825	519.853.579
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan		123.328.472	10.408.760		133.737.232	135.195.867	136.840.675	135.835.414
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	66.052.894	290.129.331			356.482.215	363.532.979	371.481.150	381.118.159
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
013.21	Markas Besar TNI	2.611.402.738	8.026.256.062	4.767.363.960		15.305.120.760	15.540.133.796	15.804.307.338	16.124.802.058
02	FUNGSI PERTAHANAN	2.611.402.738	8.026.256.062	4.767.363.960		15.305.120.760	15.540.133.796	15.804.307.338	16.124.802.058
02.01	PERTAHANAN NEGARA	2.611.402.738	8.026.256.062	4.767.363.960		15.305.120.760	15.540.133.796	15.804.307.338	16.124.802.058
013.21.WA	Program Dukungan Manajemen	2.611.402.738	2.201.648.096	9.217.462		4.728.268.611	4.806.365.281	4.888.455.692	5.010.586.008
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.21.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit		863.863.190	689.322.561		1.840.000.761	1.858.678.260	1.878.873.812	1.705.150.138

SK No 154207 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 0.5 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0543	Pengembangan Perumahan Daerah Lain			104.400.000		104.400.000	107.532.000	110.757.960	114.080.699
012.21.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI		4.871.941.777			4.871.941.777	4.867.142.511	5.031.674.998	5.134.168.868
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.21.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan			4.088.919.717		4.088.919.717	4.127.846.891	4.194.298.118	4.274.748.068
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.22	Markas Besar TNI AD	38.452.750.603	14.722.885.431	6.158.424.611		59.334.070.645	60.284.684.108	61.374.516.495	62.683.758.971
02	FUNGSI PERTAHANAN	38.452.750.603	14.722.885.431	6.158.424.611		59.334.070.645	60.284.684.108	61.374.516.495	62.683.758.971
02.01	PERTAHANAN NEGARA	38.452.750.603	14.722.885.431	6.158.424.611		59.334.070.645	60.284.684.108	61.374.516.495	62.683.758.971
012.22.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI		581.283.226	5.211.500		586.494.726	587.921.217	589.526.164	591.468.987
0513	Dukungan Kegiatan Operasional Matra Darat		581.283.226	5.211.500		586.494.726	587.921.217	589.526.164	591.468.987
012.22.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit		6.334.608.119	1.150.784.589		7.484.972.718	7.674.814.021	7.865.452.000	7.776.227.405
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0525	Pengembangan Perumahan Matra Darat		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154206 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.22.AF	**Program Modernisasi Alpalsita, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**		**420.961.165**	**5.981.211.012**		**6.402.162.177**	**6.431.773.208**	**6.466.060.630**	**6.506.414.734**
1621	Pemeliharaan/Perawatan/Penambahan Umur Ekonomis Mata Data		359.722.153	103.991.210		463.713.363	481.092.772	492.279.552	495.764.992
1623	Pengadaan Non Alutsista Mata Data			4.035.[illegible]		4.035.[illegible]	4.038.314.631	4.050.813.541	4.070.318.705
1624	Pemeliharaan/Perawatan Sarpras Pertahanan Mata Data			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1625	Pengembangan Mata Data		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2029	Pemeliharaan/Perawatan/Peningkatan Kinerja Mata Data		60.239.038			60.239.038	60.239.038	60.239.038	60.239.038
2030	Pemeliharaan/Perawatan/Penambahan sarpras pertahanan Mata Data		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.22.AJ	**Program Pemenuhan Sumber Daya Pertahanan**		**768.587.686**			**768.587.686**	**758.837.184**	**760.406.841**	**760.433.286**
2011	Pemulihan Tanah		768.587.686			768.587.686	758.837.184	760.406.841	760.433.286
012.22.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**38.452.760.803**	**6.500.082.707**	**12.227.606**		**44.965.070.316**	**45.848.468.855**	**46.787.185.884**	**47.958.442.812**
5424	Penyelenggaraan Operasional [illegible] Mata Data	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Penyelenggaraan Belanja PNBP dan Hibah Mata Data		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Penyelenggaraan Komunikasi dan Diseminasi Publik Mata Data		23.430.214			23.430.214	24.196.870	24.816.754	25.417.694
[illegible]	Layanan Bidang Hukum Mata Data		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Mata Data		581.745.354			581.745.354	601.[illegible]	617.[illegible]	634.[illegible]
[illegible]	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Teknologi Mata Data		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.22.KA	**Program Riset, Industri dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**		**96.382.815**			**96.382.815**	**96.774.434**	**97.237.376**	**97.795.885**
5414	Pendidikan Kedinasan/Pelatihan/Pengembangan Kemampuan Mata Data		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.23	**Markas Besar TNI AL**	**[illegible] 501.807.750**	**[illegible] 387.523.156**	**[illegible] 340.379.096**		**32.216.410.006**	**32.482.373.755**	**32.978.213.609**	**33.435.780.252**
02	**FUNGSI PERTAHANAN**	**[illegible] 501.807.750**	**[illegible] 387.523.156**	**[illegible] 340.379.096**		**32.216.410.006**	**32.482.373.755**	**32.978.213.609**	**33.435.780.252**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02	**DUKUNGAN PERTAHANAN**	8.598.507.750	5.367.623.158	8.340.879.098		22.286.410.006	22.612.573.788	22.979.213.609	23.425.755.262
012.23.AB	**Program Pelaksanaan Tugas TNI**		419.504.545			419.504.545	424.122.908	429.813.177	435.907.038
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.23.AC	**Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit**		1.388.856.234	968.329.165		2.357.185.399	2.387.284.784	2.421.076.863	2.462.077.269
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.23.AF	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan**		1.744.689.717	7.082.810.317		8.827.500.034	8.868.887.493	8.108.701.867	8.289.137.086
C513	Pengadaan Alutsista Matra Laut		425.998.700	492.132.925		921.131.625	932.343.705	905.053.514	921.049.376
C515	Pemeliharaan/Perawatan/Penggantian Alutsista Matra Laut		705.021.127	603.421.208		1.308.442.335	1.332.624.705	1.317.021.693	1.348.073.464
C516	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Pertahanan Matra Laut			197.027.693		197.027.693	205.164.220	214.074.130	220.934.629
C517	Pengadaan Non Alutsista Matra Laut		348.957.803	5.740.941.491		6.089.899.293	6.278.201.765	6.166.548.497	6.272.089.453
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.23.BA	**Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**		3.605.009	7.202.877		10.807.877	10.973.850	10.946.751	11.035.967
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.23.WA	**Program Dukungan Manajemen**	8.598.507.750	1.793.642.863	262.040.219		10.653.990.831	10.902.405.024	10.980.904.157	11.197.086.831
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : C 2
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Matra Laut		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Matra Laut		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Logistik dan Aset Matra Laut		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Pola, Tenaga dan Latihan Matra Laut		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.20.AJ	Program Pembangun Sumber Daya Pertahanan		27.423.000			27.423.000	27.821.308	28.259.056	28.692.934
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.24	Markas Besar TNI AU	5.013.409.843	4.702.301.099	6.118.119.923		14.834.830.865	16.104.910.141	15.408.606.784	15.776.812.282
02	FUNGSI PERTAHANAN	5.013.409.843	4.702.301.099	6.118.119.923		14.834.830.865	16.104.910.141	15.408.606.784	15.776.812.282
02.01	PERTAHANAN NEGARA	5.013.409.843	2.495.859.405	1.415.008.138		8.924.277.439	9.109.681.183	9.315.981.863	9.597.340.469
012.24.WA	Program Dukungan Manajemen	5.013.409.843	1.351.591.224	19.259.129		6.384.060.296	6.567.661.781	6.848.682.309	6.815.039.029
[illegible]	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Matra Laut		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.24.PG	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit		1.144.468.181	1.177.210.892		2.321.679.073	2.378.185.225	2.441.861.471	2.518.643.554
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 013
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.24.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan			210.538.117		210.538.117	222.074.127	227.736.183	233.687.859
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN		2.206.441.684	3.704.111.786		5.910.663.470	5.896.219.008	6.062.514.821	6.208.271.648
012.24.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan		24.277.600			24.277.600	24.788.198	25.300.648	25.867.161
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.24.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan		2.144.798.847	3.702.921.185		5.847.720.032	5.832.172.048	6.027.102.533	6.142.804.081
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.24.BB	Program Pelaksanaan Tugas TNI		18.707.197			18.707.197	19.091.267	19.438.164	19.807.274
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
012.24.BJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan		18.667.150	1.180.850		19.847.800	20.236.606	20.670.485	21.203.320
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH BM	65.479.427.578	42.893.257.891	30.427.880.728		138.870.545.180	140.727.103.725	152.855.938.417	165.435.782.584
	JUMLAH PNBP		1.252.094.518	164.181.878		1.416.256.392	1.442.808.948	1.472.870.218	1.508.197.668
	JUMLAH BLU		4.147.637.486	563.747.714		4.711.385.170	4.779.279.074	4.858.897.890	4.948.133.134
	JUMLAH PLN		5.701.588.088	40.799.413.902		46.500.000.000	47.422.805.453	48.459.896.953	49.717.148.970
	JUMLAH BBSN			8.914.013.439		1.914.013.439	1.961.989.428	1.994.877.891	2.048.436.417

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Satuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL JUMLAH	66.479.427.573	54.857.026.364	76.763.547.063		197.100.000.000	190.084.856.991	193.434.397.482	197.556.641.545

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	27.978.298.419	21.478.884.045	2.858.088.589		52.015.000.000	58.002.281.249	54.110.929.611	55.455.189.096
015.04	Sekretariat Jenderal	27.212.784.184	4.607.361.468	185.738.589		32.005.872.242	32.638.388.017	33.345.185.253	34.204.534.212
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	27.212.784.184	678.188.408	185.738.589		28.071.749.181	28.628.985.126	29.261.152.581	30.007.944.784
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI	27.212.784.184	678.188.408	185.738.589		28.071.749.181	28.628.985.126	29.261.152.581	30.007.944.784
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	27.212.784.184	678.188.408	185.738.589		28.071.749.181	28.628.985.126	29.261.152.581	30.007.944.784
4793	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4794	Pelaksanaan Tugas Khusus Kepala Negara		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4795	Pengelolaan Keuangan BMN [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4796	Pengelolaan Komunikasi Informasi Publik		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4797	Pengelolaan Organisasi dan SDM	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4798	Pengelolaan Riset Kerjasama dan Hubungan Internasional		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN		3.924.153.061			3.924.153.061	4.009.413.891	4.094.013.662	4.186.689.418
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN		3.924.153.061			3.924.153.061	4.009.413.891	4.094.013.662	4.186.689.418
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen		3.924.153.061			3.924.153.061	4.009.413.891	4.094.013.662	4.186.689.418
4792	Pelaksanaan Tugas Khusus Kepala Negara, Penyelesaian Data Aset Pemerintah		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.05	Inspektorat Jenderal	8.303.730	29.130.699	2.445.645		39.109.004	39.874.747	37.686.672	38.500.178
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	8.303.730	29.130.699	2.445.645		39.109.004	39.874.747	37.686.672	38.500.178
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI	8.303.730	29.130.699	2.445.645		39.109.004	39.874.747	37.686.672	38.500.178
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	8.303.730	29.130.699	2.445.645		39.109.004	39.874.747	37.686.672	38.500.178
4795	Pengelolaan Keuangan BMN [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.00	Dikyan Anggaran	7.102.320	35.384.321	2.802.246		45.287.887	46.184.153	47.180.503	48.388.564
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	7.102.320	35.384.321	2.802.246		45.287.887	46.184.153	47.180.503	48.388.564
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	7.102.320	35.383.321	2.802.246		45.287.887	46.184.153	47.180.503	48.388.564
015.01.DB	Program Pengelolaan Belanja Negara		7.440.900			7.440.900	7.661.471	7.736.530	7.991.175
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.01.DC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara		6.187.845			6.187.845	6.310.804	6.443.606	6.685.953
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.01.DE	Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi		882.880			882.880	900.394	920.685	943.959
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.102.320	20.001.696	2.802.246		30.706.261	31.391.584	32.072.282	32.097.497
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154244 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

41

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
015.04	Direktorat Jenderal Pajak	382.534.604	5.348.068.141	569.049.822		6.299.652.567	6.382.884.220	6.510.176.341	6.664.515.439
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	382.534.604	5.348.068.141	569.049.822		6.299.652.567	6.382.884.220	6.510.176.341	6.664.515.439
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	382.534.604	5.348.068.141	569.049.822		6.299.652.567	6.382.884.220	6.510.176.341	6.664.515.439
015.04.GG	Program Pengelolaan Penerimaan Negara		1.096.195.705			1.096.195.705	1.115.949.169	1.138.158.447	1.165.068.547
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	382.534.604	4.251.872.436	569.049.822		5.173.456.862	5.266.935.051	5.372.018.024	5.499.446.919
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.05	Direktorat Bea dan Cukai	137.038.277	2.199.418.536	952.609.095		3.289.065.910	3.350.576.229	3.419.721.886	3.500.559.292
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	137.038.277	2.199.418.536	952.609.095		3.289.065.910	3.350.576.229	3.419.721.886	3.500.559.292

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

Satuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	137.038.377	2.189.418.538	962.809.095		3.289.066.010	3.350.578.228	3.416.721.656	3.508.569.282
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara		889.836.421			889.836.421	909.596.428	926.659.788	948.775.005
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	137.038.377	1.299.218.802	962.809.095		2.382.867.274	2.427.100.014	2.478.823.085	2.537.111.401
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.05.CE	Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi		16.562.315			16.562.315	16.980.707	17.230.002	17.672.008
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.06	Ditjen Perimbangan Keuangan	8.424.285	47.775.512	2.594.068		58.793.865	58.643.146	58.580.374	57.756.328
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	8.424.285	47.775.512	2.594.068		58.793.865	58.643.146	58.580.374	57.756.328
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI	8.424.285	44.627.182	2.594.068		55.645.535	52.436.231	53.431.887	54.577.710

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015.06 GB	**Program Pengelolaan Belanja Negara**		16.965.899			16.965.899	17.275.487	17.823.578	18.046.692
4771	Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Belanja Negara		9.115.154			9.115.154	9.448.427	9.747.661	9.870.192
4772	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara		2.357.454			2.357.454	2.444.853	2.521.917	2.553.401
4773	Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara		2.409.114			2.409.114	2.497.414	2.576.018	2.608.141
4774	Penyusunan Kebijakan Administrasi Pengelolaan Belanja Negara		2.084.177			2.084.177	2.160.793	2.228.982	2.256.958
015.06 CE	**Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi**		3.960.886			3.960.886	3.972.852	3.986.018	4.002.334
4712	Formulasi Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi		3.960.886			3.960.886	3.972.852	3.986.018	4.002.334
015.06 WA	**Program Dukungan Manajemen**	4.424.240	23.700.697	2.593.068		30.718.061	31.238.242	31.972.006	32.639.744
4751	Pengelolaan Keuangan UMUM dan Umum		20.100.520	2.593.068		22.693.588	23.157.092	23.513.109	24.014.174
4752	Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi		600.000			600.000	602.102	641.503	655.130
4753	Pengelolaan Teknologi Informasi	4.424.240	2.999.177			7.423.417	7.535.017	7.806.270	7.969.731
4754	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Pengadaan		97.227			97.227	97.213	104.710	106.117
4755	Pengelolaan Hukum		299.353			299.353	46.629	29.164	114.592
01.03	**PELAYANAN UMUM**		3.149.330			3.149.330	3.157.015	3.166.779	3.178.518
015.06 WA	**Program Dukungan Manajemen**		3.149.330			3.149.330	3.157.015	3.166.779	3.178.518
4751	Pengelolaan Keuangan UMUM		3.149.330			3.149.330	3.157.015	3.166.779	3.178.518
015.07	**Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko**	4.004.154	87.608.246	8.822.635		98.986.985	101.111.423	102.453.048	104.096.471
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	4.004.154	87.608.246	8.822.635		98.986.985	101.111.423	102.453.048	104.096.471
01.02	**BANTUAN LUAR NEGERI**		42.670.243	343.677		43.013.920	43.185.109	43.379.671	43.684.366
015.07 WA	**Program Dukungan Manajemen**		42.670.243	343.677		43.013.920	43.185.109	43.379.671	43.684.366
4753	Pengelolaan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pengelolaan Keuangan Internasional		42.670.243	343.677		43.013.920	43.185.109	43.379.671	43.684.366

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	4.004.154	44.836.008	7.978.858		56.922.015	57.925.314	59.063.877	60.421.105
015.07.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		17.693.069			17.693.069	18.007.386	18.291.992	18.791.312
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.07.CE	Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi		580.631			580.631	580.631	580.631	580.631
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.07.WA	Program Dukungan Manajemen	4.004.154	24.562.400	7.978.858		36.435.415	38.129.887	40.087.864	41.094.251
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		733.436			1.139.405	1.815.033	1.852.337	1.893.202
[illegible]	[illegible]	4.004.154	55.510			5.059.664	5.061.754	5.070.945	5.080.035
[illegible]	[illegible]		34.000			34.000	95.853	97.999	100.500
015.08	Ditjen Perbendaharaan	78.646.148	7.025.856.308	56.650.660		7.156.458.316	7.298.588.197	7.448.184.618	7.638.019.418
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	78.646.148	6.882.057.291	45.908.860		6.890.212.297	7.128.768.448	7.280.189.549	7.466.178.881
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	78.646.148	810.309.891	45.120.860		934.076.587	952.012.272	972.181.808	988.685.403
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		45.888.813			16.888.813	46.793.007	47.728.936	48.911.109
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No (54240) C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

(Dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	70.638.148	783.820.740	45.120.860		899.187.754	905.259.280	926.853.670	947.738.256
01	PELAYANAN UMUM		5.051.717.600	4.388.000		5.056.105.600	5.174.691.876	5.307.957.941	5.462.541.578
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen		5.051.717.600	4.388.000		5.056.105.600	5.174.691.876	5.307.957.941	5.462.541.578
04	PUNGSI EKONOMI		163.799.017	1.445.000		165.244.017	166.387.869	888.045.069	169.842.427
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN		69.600.239			69.600.239	70.109.078	70.877.720	71.387.280
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen		69.600.239			69.600.239	70.109.078	70.877.720	71.387.280
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DAN UKM		94.198.778	1.445.000		95.643.778	96.483.811	97.367.341	98.475.227
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen		94.198.778	1.445.000		95.643.778	96.483.811	97.367.341	98.475.227

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.08	Badan Kebijakan Negara	27.628.486	477.684.922	208.635.818		813.849.206	827.342.578	842.512.928	860.806.464
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	27.628.486	477.684.922	208.635.818		813.849.206	827.342.578	842.512.928	860.806.464
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	27.628.486	477.684.922	208.635.818		813.849.206	827.342.578	842.512.928	860.806.464
015.08.GD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		226.660.680			226.660.680	227.967.658	229.298.271	231.641.208
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	27.628.486	451.984.982	208.635.818		688.189.846	699.874.920	713.218.656	728.266.448
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	8.762.322	133.763.784	29.464.281		372.190.390	378.578.862	386.946.326	394.845.153



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	7.679.640	270.935.733	35.564.204		313.979.577	318.514.200	324.511.000	331.702.001
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	7.679.640	270.935.733	35.564.204		313.979.577	318.514.200	324.511.000	331.702.001
015.19.WA	Program Dukungan Manajemen	7.679.560	270.935.793	35.564.294		313.979.677	318.514.206	324.511.000	331.702.001
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4272	Perusahaan Keuangan Publik (Umum)		73.269.077	35.564.294		108.140.203	109.514.211	109.511.375	111.310.240
4291	Perusahaan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain		1.234.000			1.234.000	1.234.827	1.235.031	1.235.351
4292	Perusahaan Operasional BUMN	7.679.560	196.432.662			204.112.222	207.764.168	213.764.594	219.156.297
4297	Perusahaan Badan Pengelola dan Pengembangan Modal		14.000			14.000	14.010	14.071	14.171
10	FUNGSI PENDIDIKAN	2.082.762	54.818.051	2.100.000		58.000.813	60.185.748	61.476.328	63.083.162
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	2.082.762	54.818.051	2.100.000		58.000.813	60.185.748	61.476.328	63.083.162
015.19.WA	Program Dukungan Manajemen	2.082.762	54.818.051	2.100.000		58.000.813	60.185.748	61.476.328	63.083.162
4272	Perusahaan Keuangan BUMN (Umum)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4291	Perusahaan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain		240.000			240.000	243.114	247.477	253.877
4292	Perusahaan Operasional BUMN	2.082.762	19.649.304			21.732.066	21.953.241	21.975.781	22.162.162
4297	Perusahaan Badan Pengelola dan Pengembangan Modal		5.000			5.000	5.010	5.071	5.171
05	Pendidikan Tinggi Kedinasan (Sekolah Kedinasan Pendidikan Tinggi Kedinasan Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Pascasarjana Magister dan Doktor Kedinasan)		34.924.000	2.100.000		37.024.000	38.243.854	38.543.000	39.145.951
015.12	Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal	6.830.208	40.416.168	6.384.122		53.630.498	53.549.306	54.238.500	55.077.571
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	6.830.208	40.416.168	6.384.122		53.630.498	53.549.306	54.238.500	55.077.571
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		19.280.211			19.280.211	19.638.978	20.050.560	20.574.135
015.12.OE	Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi		19.280.211			19.280.211	19.638.978	20.050.560	20.574.135

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.03	PELAYANAN UMUM	5.853.208	21.355.957	6.464.122		33.673.287	33.911.329	34.178.850	34.909.439
015.12.WA	Program Dukungan Manajemen	5.853.208	21.355.957	6.464.122		33.673.287	33.911.329	34.178.850	34.909.439
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.13	Lembaga National Single Window	6.867.261	74.402.990	2.744.985		84.015.236	85.584.200	87.389.102	89.524.145
04	FUNGSI EKONOMI	6.867.261	74.402.990	2.744.985		84.015.236	85.584.200	87.389.102	89.524.145
04.90	EKONOMI LAINNYA	6.867.261	74.402.990	2.744.985		84.015.236	85.584.200	87.389.102	89.524.145
015.13.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara		6.048.510			6.048.510	5.085.874	5.084.832	5.107.347
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
015.13.WA	Program Dukungan Manajemen	6.867.261	69.354.480	2.744.985		78.966.726	80.528.326	82.284.770	84.416.798
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[1]

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
		-	-	-	-	-	A	B	C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
016.14	DIREKTORAT JENDERAL STABILISASI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR KEUANGAN	5.837.792	76.432.400	5.760.352		57.530.544	88.243.009	90.319.027	92.108.440
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	5.837.792	76.432.400	5.760.352		57.530.544	88.243.009	90.319.027	92.108.440
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		48.772.807			48.772.807	48.447.244	50.205.449	51.124.761
016.14.DE	Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi		48.772.807			48.772.807	48.447.244	50.205.449	51.124.761
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.03	PELAYANAN UMUM	5.837.792	27.659.593	5.760.352		39.757.737	39.296.065	40.113.628	40.983.679
016.14.WA	Program Dukungan Manajemen	5.837.792	27.659.593	5.760.352		39.757.737	39.296.065	40.113.628	40.983.679
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
016.16	BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN	12.032.544	894.932.567	842.292.010		1.649.227.141	1.565.313.625	1.583.396.360	1.605.321.234
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	12.032.544	894.932.567	842.292.010		1.649.227.141	1.565.313.625	1.583.396.360	1.605.321.234
01.03	PELAYANAN UMUM	12.032.544	894.932.567	842.292.010		1.649.227.141	1.565.313.625	1.583.396.360	1.605.321.234

SK No 154235 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(a)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
015.16.WA	Program Dukungan Manajemen	12.032.546	894.932.557	642.267.010		1.549.277.111	1.568.313.675	1.583.396.303	1.605.321.236
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	27.078.299.486	11.080.041.845	2.606.482.691		51.565.803.952	52.351.964.958	43.735.927.040	44.307.714.200
	JUMLAH PNBP		29.946.860	43.405.676		73.352.536	74.459.465	76.788.311	77.316.764
	JUMLAH BLU		10.367.845.380	9.196.172		10.377.043.552	10.575.806.530	10.799.204.280	11.070.135.142
	TOTAL JUMLAH	27.078.299.486	21.477.834.045	2.658.086.839		52.016.000.000	53.002.241.249	54.110.039.631	55.455.166.106

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

51

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	9.888.182.675	32.419.703.479	737.132.846		40.145.000.000	40.500.709.057	40.823.690.839	41.428.238.537
018.01	Sekretariat Jenderal	3.367.683.868	396.132.816	9.534.560		3.773.351.244	3.830.611.654	3.906.096.862	3.997.541.478
04	FUNGSI EKONOMI	3.367.683.868	396.132.816	9.534.560		3.773.351.244	3.830.611.654	3.906.096.862	3.997.541.478
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	3.367.683.868	396.132.816	9.534.560		3.773.351.244	3.830.611.654	3.906.096.862	3.997.541.478
018.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.367.683.868	396.132.816	9.534.560		3.773.351.244	3.830.611.654	3.906.096.862	3.997.541.478
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.02	Inspektorat Jenderal	23.219.934	98.494.558	7.000.000		128.714.492	130.613.849	131.412.417	132.601.924
04	FUNGSI EKONOMI	23.219.934	98.494.558	7.000.000		128.714.492	130.613.849	131.412.417	132.601.924
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	23.219.934	98.494.558	7.000.000		128.714.492	130.613.849	131.412.417	132.601.924
018.02.WA	Program Dukungan Manajemen	23.219.934	98.494.558	7.000.000		128.714.492	130.613.849	131.412.417	132.601.924
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.03	Dirjen Tanaman Pangan	51.013.881	2.882.200.710	400.000		2.933.614.591	2.960.413.134	3.009.700.367	3.081.556.083
04	FUNGSI EKONOMI	51.013.881	2.882.200.710	400.000		2.933.614.591	2.960.413.134	3.009.700.367	3.081.556.083
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	51.013.881	2.882.200.710	400.000		2.933.614.591	2.960.413.134	3.009.700.367	3.081.556.083
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		2.800.803.417			2.800.803.417	2.834.011.742	2.882.617.832	2.950.238.281

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5J

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.03 WA	**Program Dukungan Manajemen**	51.019.951	55.397.293	400.000		106 811 274	108 279 397	109.929.698	111.980.702
[illegible]	[illegible]	51.019.951	[illegible]	[illegible]		106 811 274	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.03 BC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		6.000.000			6 000 000	6 119 025	6.253 839	6.485 090
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.01	**Ditjen Hortikultura**	33.946.093	431.524.857	3.297 972		488 733 923	474 272 728	480.498.881	498.047 988
04	**FUNGSI EKONOMI**	33.946.093	431.524.857	3.297 972		468 733 923	474 272 728	480.498.881	498.047 988
04 03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	33.946.093	431.524.857	3.297 972		468 733 923	474 272 728	480.498.881	498.047 988
018.04 BC	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		167.917.547	297 872		167 815 419	168 992 873	160.518.445	162.448 941
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.04 HI	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**		235.914.000			235 914 000	238 634 270	242.328.382	246.445.781
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.04 WA	**Program Dukungan Manajemen**	32.946.084	32.263.390	3.000.000		75 204 464	76 345 468	77.528.103	78.183.286
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.05	**Ditjen Perkebunan**	71.865.758	5.925.816.326	508.500		6.098 172 846	6 022 865.625	6.050.822.910	6.091.276.182

SK No 154232 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	FUNGSI EKONOMI	71.845.758	5.825.818.388	508.500		5.898.172.646	6.022.865.626	6.050.622.910	6.084.270.102
04.09	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	71.845.758	5.825.818.388	508.500		5.898.172.646	6.022.865.626	6.050.622.910	6.084.270.102
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		5.870.456.288			5.870.456.288	5.983.184.812	5.818.796.236	5.848.748.738
[illegible]	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Perkebunan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim untuk Tebu		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Perkebunan Tanaman Perkebunan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen	71.845.758	55.362.119	508.500		127.716.377	129.670.713	131.867.676	134.531.443
[illegible]	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Eselon Pertama	71.845.758	55.362.119	508.500		127.716.377	129.670.713	131.867.676	134.531.443
018.08	Dukungan Peternakan dan Kesehatan Hewan	177.411.286	711.071.768	311.398.830		1.199.889.882	1.214.235.161	1.230.393.341	1.248.962.754
04	FUNGSI EKONOMI	177.411.286	711.071.768	311.398.830		1.199.889.882	1.214.235.161	1.230.393.341	1.248.962.754
04.09	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	177.411.286	711.071.768	311.398.830		1.199.889.882	1.214.235.161	1.230.393.341	1.248.962.754
018.08.WA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		303.832.516	310.898.830		614.719.345	615.582.432	622.852.384	628.120.283
[illegible]	Pengelolaan Produksi Peternakan Lainnya		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Kawasan Peternakan dan Penyediaan Bibit		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Pengendalian Penyakit Hewan		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Veteriner		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen	177.411.286	382.239.251	500.000		560.150.537	570.864.010	582.484.106	596.018.532
[illegible]	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Pada Direktorat Perbibitan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.06.BC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		25.000.000			25.000.000	25.007.929	25.016.851	25.027.669

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

54

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	21.372.247	4.398.005.102	400.000		4.428.177.349	4.492.312.458	4.666.522.428	4.856.308.186
04	FUNGSI EKONOMI	21.372.247	4.398.005.102	400.000		4.428.177.349	4.492.312.458	4.666.522.428	4.856.308.186
04.08	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	21.372.247	4.398.005.102	400.000		4.428.177.349	4.492.312.458	4.666.522.428	4.856.308.186
018.08.WA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		4.367.440.831			4.367.440.831	4.421.852.458	4.592.792.001	4.681.252.978
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	21.372.247	28.564.271	400.000		70.736.518	71.860.028	73.730.427	74.028.187
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.09	Badan Pemikiran dan Modernisasi Pertanian	330.477.299	1.077.539.113	106.029.333		1.514.045.745	1.518.529.731	1.523.783.127	1.530.031.185
04	FUNGSI EKONOMI	330.477.299	1.077.539.113	106.029.333		1.514.045.745	1.518.529.731	1.523.783.127	1.530.031.185
04.08	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	330.477.299	1.077.539.113	106.029.333		1.514.045.745	1.518.529.731	1.523.783.127	1.530.031.185
018.09.WA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		181.010.934	7.414.968		188.433.902	188.433.902	188.433.902	188.433.902
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	330.477.299	425.917.730	3.580.164		759.935.213	765.519.199	770.672.595	776.920.963
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.09.EG	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		468.602.449	95.074.161		564.676.600	564.676.600	564.676.600	564.676.600
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	2.898.168.918	882.687.887	298.805.751		4.058.662.537	4.129.842.447	4.216.192.088	4.307.498.410

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERTANIAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	FUNGSI EKONOMI	2.889.103.818	840.908.744	280.309.479		3.820.322.041	3.887.295.858	3.962.658.176	4.050.827.028
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	2.889.103.818	840.908.744	280.309.479		3.820.322.041	3.887.295.858	3.962.658.176	4.050.827.028
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		225.665.237	274.577.505		500.462.842	516.656.472	524.740.799	524.544.129
121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	2.889.103.818	615.243.507	731.972		3.510.859.198	3.370.639.184	3.437.918.378	3.518.282.997
121	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN		229.738.323	18.436.373		330.230.456	357.656.788	247.612.933	253.686.304
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		229.738.323	18.436.373		330.230.456	357.656.788	247.612.933	253.686.304
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		229.738.323	18.436.373		330.230.456	357.656.788	247.612.933	253.686.304
121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.10	Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian	11.589.489	15.657.270.102	1.800.000		15.670.767.591	15.736.002.360	15.814.459.420	15.909.587.191
04	FUNGSI EKONOMI	11.589.489	15.657.270.102	1.800.000		15.670.767.591	15.736.002.360	15.814.459.420	15.909.587.191
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	11.589.489	15.657.270.102	1.800.000		15.670.767.591	15.736.002.360	15.814.459.420	15.909.587.191
018.10.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		15.617.199.312	200.000		15.617.399.312	15.682.233.620	15.760.230.473	15.854.028.326
221	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
421	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	11.589.489	39.970.790	1.600.000		53.359.279	53.768.740	54.228.947	54.758.793
521	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	4.908.143.575	31.645.537.785	332.845.500		36.886.647.860	39.336.338.013	39.662.474.812	40.167.039.197
	JUMLAH PNBP		42.813.517	8.917.480		71.731.397	72.006.011	72.304.186	72.671.824

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam Rupiah / ribu)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
	JUMLAH BLU		81.793.016			81.793.016	82.444.118	83.176.008	84.083.485
	JUMLAH PLN		709.455.761	92.797.181		802.852.942	803.800.442	804.811.792	806.844.252
	JUMLAH BLSN			302.871.788		302.571.788	306.815.857	310.824.094	318.926.781
	TOTAL JUMLAH	8.588.188.575	32.419.703.479	737.132.948		40.145.000.000	40.500.700.087	40.823.690.858	41.459.838.507

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1 000 965 033	1 328 090 778	92 734 674		2 501 788 503	2 539 217 971	2,580,717 403	2,630 296 412
019.01	Sekretariat Jenderal	09 002 888	105,098,401	14 681 518		290 180 656	285 227 400	300 888 684	307 755 096
04	FUNGSI EKONOMI	89 002 888	186,896,481	14 681 618		290 180 855	286 227 400	300 888 684	307 755 096
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	89 002 888	186,896,481	14 681 618		290 180 855	286 227 400	300 888 684	307 755 096
019.01.WA	Program Dukungan Manajemen	89 002 888	145,383,738	2 683 938		240 630 332	241 680 888	249 165 700	254 880 483
521	Pengelolaan Legislasi, Advokasi, dan Layanan Hukum		2 714 174			2 714 174	1 [illegible]	2 [illegible]	[illegible]
525	Pengelolaan Pengawasan Internal dan Penilaian atas Efektivitas Manajemen Risiko		11 217 219	2 683 938		13 901 157	11 [illegible]	12 [illegible]	13 [illegible]
994	Pengelolaan Dukungan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian		3 777 [illegible]			3 777 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	4 [illegible]
994.7	Pengelolaan Keuangan dan BMN	52 064 [illegible]	41 612 439			93 676 [illegible]	94 776 [illegible]	78 734 [illegible]	77 [illegible]
994.8	Pengelolaan Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama		4 664 279			4 664 279	4 [illegible]	4 [illegible]	5 [illegible]
994.9	Pengelolaan Sistem Pengawasan Internal	3 [illegible]	5 [illegible]	1 [illegible]		9 [illegible]	7 [illegible]	8 [illegible]	9 [illegible]
994.A	Pengelolaan Kerja Sama Kesekretariatan Jenderal		5 [illegible]			5 [illegible]	5 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]
994.B	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Jenderal, Pusat Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, dan Unit di Luar Negeri	1 [illegible]	2 [illegible]	1 [illegible]		10 [illegible]	10 [illegible]	11 [illegible]	11 [illegible]
994.C	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Jenderal dan Layanan Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Perindustrian	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]		3 [illegible]	3 [illegible]	3 [illegible]	[illegible]
019.01.EG	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		37,532,743	12,127,580		49 660 323	50,938,537	54,733 994	63 084 632
001	Pengembangan Sistem Informasi Industri		6 [illegible]	1 [illegible]		15 [illegible]	14 [illegible]	14 [illegible]	15 [illegible]
003	Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri		17 915 239			17 915 239	18 [illegible]	13 [illegible]	15 [illegible]
005	Pengembangan Kompetensi Industri		13 614 282	131 [illegible]		13 745 [illegible]	14 [illegible]	14 [illegible]	14 [illegible]
019.02	Unjen Industri Agro	81 106.842	56,567,293	981 000		88 554.836	100,477,697	102,538,914	105 291 629
04	FUNGSI EKONOMI	81 106.842	56,567,293	981 000		88 554.836	100,477,697	102,538,914	105 291 629

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SK

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	31.106.342	66.587.293	881.000		98.554.635	100.497.697	102.629.944	106.281.529
019.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		56.200.000	200.000		56.030.000	57.110.374	58.328.243	59.798.210
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.02.WA	Program Dukungan Manajemen	31.106.342	10.737.293	681.000		42.524.635	43.387.323	44.314.671	45.463.319
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.03	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	38.219.081	64.638.508	500.000		103.357.589	105.345.320	107.679.949	110.289.342
04	FUNGSI EKONOMI	38.219.081	64.638.508	500.000		103.357.589	105.345.320	107.679.949	110.289.342
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	38.219.081	64.638.508	500.000		103.357.589	105.345.320	107.679.949	110.289.342
019.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		64.687.786			64.687.786	66.018.627	67.177.322	68.592.340
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**39.219.081**	**9.650.722**	**500.000**		**49.369.803**	**49.326.798**	**50.803.597**	**51.707.007**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.04	**Ditjen Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika**	**35.364.306**	**71.464.001**	**376.000**		**107.204.306**	**109.285.062**	**111.577.601**	**114.383.810**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**35.364.306**	**71.464.001**	**376.000**		**107.204.306**	**109.285.062**	**111.577.601**	**114.383.810**
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**35.364.306**	**71.464.001**	**376.000**		**107.204.306**	**109.285.062**	**111.577.601**	**114.383.810**
019.04.EG	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**		**62.578.315**			**62.578.315**	**63.747.852**	**65.068.352**	**66.869.472**
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**35.364.306**	**8.850.468**	**376.000**		**44.590.981**	**45.515.210**	**46.509.249**	**47.764.438**
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.05	**Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka**	**48.849.728**	**186.480.645**	**5.650.000**		**238.880.389**	**248.602.635**	**258.850.437**	**270.536.106**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**48.849.728**	**186.480.645**	**5.650.000**		**238.880.389**	**248.602.635**	**258.850.437**	**270.536.106**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(x)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	46.848.723	188.480.616	5.650.000		235.850.339	248.902.436	260.650.437	270.636.108
019.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		169.483.246	3.800.000		173.283.246	184.818.981	190.420.408	200.362.406
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.06.WA	Program Dukungan Manajemen	46.848.723	16.997.369	1.850.000		65.697.092	68.983.554	69.430.029	70.183.701
5240	Pengelolaan Manajemen Kebijakan dan Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Perindustrian	46.848.723	16.997.369	1.850.000		65.697.092	68.983.554	69.430.029	70.183.701
019.06	Inspektorat Jenderal	20.332.269	18.983.893	1.709.600		42.005.862	42.806.493	43.706.841	44.736.475
04	FUNGSI EKONOMI	20.332.269	18.983.893	1.709.600		42.005.862	42.806.493	43.706.841	44.736.475
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	20.332.269	18.983.893	1.709.600		42.005.862	42.806.493	43.706.841	44.736.475
019.06.WA	Program Dukungan Manajemen	20.332.269	18.983.893	1.709.600		42.005.862	42.806.493	43.706.841	44.736.475
1241	Pengawasan Internal dan Penegakan Integritas pada Kementerian Perindustrian		1.451.207			1.451.207	1.479.215	1.497.311	1.532.572
1242	Pengawasan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Perindustrian		1.451.207			1.451.207	1.479.215	1.497.311	1.532.572
1243	Pengawasan Internal dan Penegakan Integritas pada Kementerian Perindustrian		1.451.207			1.451.207	1.479.215	1.497.311	1.532.572
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7241	Pengawasan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Perindustrian		1.451.207			1.451.207	1.479.215	1.497.311	1.532.572
019.07	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	351.953.913	339.201.507	54.394.146		745.549.566	748.559.566	748.559.566	748.559.566
04	FUNGSI EKONOMI	351.953.913	339.201.507	54.394.146		745.549.566	748.559.566	748.559.566	748.559.566
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	351.953.913	339.201.507	54.394.146		745.549.566	748.559.566	748.559.566	748.559.566



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

lu

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		2	3	4	5	6	7	8	9
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		160.834.829	44.301.169		205.135.998	205.135.998	205.135.998	205.135.998
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	381.985.312	376.467.521	19.092.987		840.524.481	840.524.481	840.524.481	840.524.481
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.08	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	32.804.840	147.249.160	1.027.645		181.081.445	184.839.064	185.627.118	190.482.559
04	FUNGSI EKONOMI	32.804.840	147.249.160	1.027.645		181.081.445	184.839.064	185.627.118	190.482.559
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	32.804.840	147.249.160	1.027.645		181.081.445	184.839.064	185.627.118	190.482.559
019.08.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		127.719.160			127.719.160	130.283.377	131.101.452	135.531.670
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.08.WA	Program Dukungan Manajemen	32.804.840	19.486.000	1.027.645		53.318.485	54.555.687	55.518.666	54.840.891
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	431.722.101	249.535.316	13.496.067		694.752.484	707.186.823	721.186.518	738.148.829
10	FUNGSI PENDIDIKAN	431.722.101	249.535.316	13.496.067		694.752.484	707.186.823	721.186.518	738.148.829
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		61.507.036	11.367.487		72.874.552	74.200.850	75.888.656	77.499.481
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		61.507.036	11.367.487		72.874.552	74.200.850	75.888.656	77.499.481
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

62

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	451.722.101	136.411.669	1.470.000		588.603.870	579.888.459	690.708.664	804.905.704
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen	451.722.101	136.411.669	1.470.000		588.603.870	579.888.459	690.708.664	804.905.704
0963	Layanan Dukungan Manajemen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian	451.722.101	136.411.669	1.470.000		588.603.870	579.888.459	690.708.664	804.905.704
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		27.935.430	672.600		28.608.030	28.897.347	29.547.845	30.214.827
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		27.935.430	672.600		28.608.030	28.897.347	29.547.845	30.214.827
0963	Pendidikan Menengah Kejuruan Industri		27.935.430	672.600		28.608.030	28.897.347	29.547.845	30.214.827
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		16.945.000			16.945.000	16.070.735	16.212.217	16.383.746
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		16.945.000			16.945.000	16.070.735	16.212.217	16.383.746
0963	Pendidikan Vokasi Industri		16.945.000			16.945.000	16.070.735	16.212.217	16.383.746
10.06	PENDIDIKAN KEDINASAN		8.738.232	85.000		8.823.232	8.829.487	8.028.642	8.145.089
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen		8.738.232	85.000		8.823.232	8.829.487	8.028.642	8.145.089
0963	Pendidikan Kedinasan Industri		8.738.232	85.000		8.823.232	8.829.487	8.028.642	8.145.089
	JUMLAH RM	1.080.966.003	978.748.847	29.799.832		2.089.513.012	2.124.854.458	2.184.228.581	2.211.107.487
	JUMLAH PNBP		85.981.454	3.895.359		89.876.887	70.454.852	71.052.484	71.823.048
	JUMLAH BLU		353.366.933	58.039.851		342.406.784	343.828.958	345.428.748	347.364.827
	TOTAL JUMLAH	1.080.966.003	1.328.096.774	92.734.878		2.501.796.683	2.539.217.871	2.599.717.603	2.630.295.412

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.404.180.148	3.327.896.586	4.385.580.747		10.117.657.481	10.260.672.538	10.421.055.868	10.616.517.708
020.01	Sekretariat Jenderal	278.476.710	287.400.896	1.124.632		566.202.327	576.291.357	588.781.098	603.878.013
04	FUNGSI EKONOMI	278.476.710	287.400.896	1.124.632		566.202.327	576.291.357	588.781.098	603.878.013
04.90	EKONOMI LAINNYA	278.476.710	287.400.896	1.124.632		566.202.327	576.291.357	588.781.098	603.878.013
020.01.WA	Program Dukungan Manajemen	278.476.710	287.400.896	1.124.632		566.202.327	576.291.357	588.781.098	603.878.013
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.02	Inspektorat Jenderal	99.053.527	38.909.781	2.758.000		138.721.308	141.483.656	144.645.217	148.289.888
04	FUNGSI EKONOMI	99.053.527	38.909.781	2.758.000		138.721.308	141.483.656	144.645.217	148.289.888
04.90	EKONOMI LAINNYA	99.053.527	38.909.781	2.758.000		138.721.308	141.483.656	144.645.217	148.289.888
020.02.WA	Program Dukungan Manajemen	99.053.527	38.909.781	2.758.000		138.721.308	141.483.656	144.645.217	148.289.888
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.04	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	255.284.848	520.771.840	3.246.942.702		4.022.979.388	4.080.412.661	4.144.973.854	4.223.252.341
04	FUNGSI EKONOMI	255.284.848	520.771.840	3.246.942.702		4.022.979.388	4.080.412.661	4.144.973.854	4.223.252.341
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	255.284.848	520.771.840	3.246.942.702		4.022.979.388	4.080.412.661	4.144.973.854	4.223.252.341
020.04.AA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		423.473.333	3.246.973.651		3.670.246.984	3.725.209.686	3.785.981.064	3.861.800.829
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154221 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020.04.WA	Program Dukungan Manajemen	256.264.548	96.598.507	889.051		352.752.604	356.204.075	357.982.600	361.361.612
1501	Pengelolaan Manajemen Kepatuhan dan Pengawasan Internal	256.264.548	96.598.507	889.051		353.752.604	356.204.075	357.982.600	361.361.612
020.05	Ditjen Ketenagalistrikan	153.870.054	510.924.993	968.848.707		1.731.743.754	1.746.237.698	1.762.530.354	1.782.284.851
04	FUNGSI EKONOMI	153.870.054	510.924.993	968.848.707		1.731.743.754	1.746.237.698	1.762.530.354	1.782.284.851
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	153.870.054	510.924.993	968.848.707		1.731.743.754	1.746.237.698	1.762.530.354	1.782.284.851
020.05.AA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		368.341.293	964.898.707		1.533.240.000	1.548.808.448	1.566.873.501	1.570.068.130
7051	Pengelolaan Ketenagalistrikan		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.05.WA	Program Dukungan Manajemen	153.870.054	42.583.700	1.950.000		198.503.754	202.438.281	208.656.853	212.216.721
1501	Pengelolaan Manajemen Kepatuhan dan Pengawasan Internal	153.870.054	42.583.700	1.950.000		198.503.754	202.438.281	208.656.853	212.216.721
020.06	Ditjen Mineral dan Batubara	511.660.242	156.630.809	12.468.310		679.759.361	680.182.535	706.272.934	726.569.405
04	FUNGSI EKONOMI	511.660.242	156.630.809	12.468.310		679.759.361	680.182.535	706.272.934	726.569.405
04.06	PERTAMBANGAN		42.341.210	10.908.761		53.249.979	54.300.252	56.480.922	58.912.451
020.06.AB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara		42.341.218	10.908.761		53.249.979	54.300.252	56.480.922	58.912.451
6252	Pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6254	Pengelolaan Pembinaan Usaha Mineral dan Batubara		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	511.660.242	113.288.881	1.559.549		626.508.882	626.082.283	649.792.012	667.656.954
020.06.WA	Program Dukungan Manajemen	511.660.242	113.288.881	1.559.549		626.508.882	626.082.283	649.792.012	667.656.954
1501	Pengelolaan Manajemen Kepatuhan dan Pengawasan Internal	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.07	Dewan Energi Nasional	52.329.020	24.095.387	1.176.746		77.600.153	79.020.721	80.444.299	82.546.476
04	FUNGSI EKONOMI	52.329.020	24.095.387	1.176.746		77.600.153	79.020.721	80.444.299	82.546.476
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	52.329.020	24.095.387	1.176.746		77.600.153	79.020.721	80.444.299	82.546.476

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

65

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
020.07.JR	Program Energi dan Ketenagalistrikan		4.726.033			4.726.033	4.726.033	4.726.033	4.726.033
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.07.WA	Program Dukungan Manajemen	52.328.020	18.368.364	1.178.748		72.877.120	74.294.668	75.888.264	77.820.843
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.08	Ditjen Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral		66.945.700	3.054.300		70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
04	FUNGSI EKONOMI		66.945.700	3.054.300		70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI		66.945.700	3.054.300		70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
020.08.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		37.228.768			37.228.768	37.228.768	37.228.768	37.228.768
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.08.WA	Program Dukungan Manajemen		29.716.932	3.054.300		32.770.232	32.770.232	32.770.232	32.770.232
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	248.163.618	468.267.452	20.040.000		736.471.070	743.635.928	788.647.182	778.036.188
04	FUNGSI EKONOMI	180.518.187	370.256.684	13.500.000		564.274.871	575.226.544	587.538.178	602.465.718
04.90	EKONOMI LAINNYA		226.256.896	13.500.000		239.756.896	305.440.904	341.873.163	319.847.859
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	244.155.907	13.500.000			257.655.907	262.758.068	280.494.731	275.449.043
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen		42.099.988			42.099.988	42.701.835	43.378.832	44.198.810
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	180.518.187	60.999.788			241.517.975	248.785.440	256.466.016	262.817.864
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	180.518.187	60.999.788			241.517.975	248.785.440	256.466.016	262.817.864

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 685 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	Pengelolaan Manajemen Keselamatan Energi Pengembangan Sumber Daya Mineral ESDM	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN	80.885.431	87.850.768	6.540.000		165.166.199	168.429.384	172.109.904	176.570.470
10.08	PENDIDIKAN TINGGI	80.885.431	87.850.768	6.540.000		165.166.199	168.429.384	172.109.904	176.570.470
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		76.398.320	6.540.000		82.938.320	84.580.296	86.426.241	88.564.441
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	80.885.431	21.552.448			82.217.879	83.849.088	85.682.799	87.936.129
[illegible]	Pengelolaan Manajemen Keselamatan Energi Pengembangan Sumber Daya Mineral ESDM	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.13	Badan Geologi	495.474.750	218.570.848	112.347.488		788.293.084	809.823.459	824.808.758	842.778.075
04	FUNGSI EKONOMI	495.474.750	218.570.848	112.347.488		788.293.084	809.823.459	824.808.758	842.778.075
04.08	PERTAMBANGAN	495.474.750	218.570.848	112.347.488		788.293.084	809.823.459	824.808.758	842.778.075
020.13.FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi		102.947.720	106.744.705		208.692.425	210.738.059	213.029.088	216.802.062
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.13.WA	Program Dukungan Manajemen	495.474.750	115.623.128	6.602.781		587.600.659	588.892.400	611.585.670	625.976.013
[illegible]	Pengelolaan Manajemen Keselamatan Energi Pengembangan Sumber Daya Geologi	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.14	BPH Migas	105.465.835	205.853.908	9.070.000		320.389.741	329.713.835	336.818.703	345.487.728
04	FUNGSI EKONOMI	105.465.835	205.853.908	9.070.000		320.389.741	329.713.835	336.818.703	345.487.728
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	105.465.835	205.853.908	9.070.000		320.389.741	329.713.835	336.818.703	345.487.728
020.14.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		85.302.868			85.302.868	90.045.672	92.001.681	94.380.321
[illegible]	Pengelolaan Pembelanjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM dan Kegiatan Lainnya Pengembangan dan Sumber Manusia ESDM	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020.16.WA	Program Dukungan Manajemen	108.445.035	117.581.040	9.070.800		235.096.875	238.858.163	246.004.042	258.037.607
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.16	Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	176.606.148	696.010.497	7.857.874		880.474.519	888.680.875	893.879.048	902.152.089
04	FUNGSI EKONOMI	176.606.148	696.010.497	7.857.874		880.474.519	888.680.875	893.879.048	902.152.089
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	176.606.148	696.010.497	7.857.874		880.474.519	888.680.875	893.879.048	902.152.089
020.16.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		841.731.221	27.972		841.759.193	845.265.047	844.935.108	848.974.366
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.16.WA	Program Dukungan Manajemen	176.606.148	54.278.678	7.829.902		238.714.728	243.485.825	248.742.940	256.177.701
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.16	Badan Pengelola Migas Aceh	85.746.418	16.646.087			102.390.505	104.377.312	106.810.712	108.388.677
04	FUNGSI EKONOMI	85.746.418	16.646.087			102.390.505	104.377.312	106.810.712	108.388.677
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	85.746.418	16.646.087			102.390.505	104.377.312	106.810.712	108.388.677
020.16.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan		16.757.082			16.757.082	16.089.627	16.421.064	16.847.173
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
020.16.WA	Program Dukungan Manajemen	85.746.418	20.638.064			88.633.473	88.307.875	90.189.648	92.471.504
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	2.286.884.314	2.526.868.138	2.860.074.857		7.682.806.307	7.760.153.013	7.846.986.801	7.982.277.778
	JUMLAH PNBP	108.445.835	231.807.478	1.482.965.852		1.823.219.263	1.878.510.602	1.936.414.756	2.009.047.678
	JUMLAH BLU		569.322.982	42.549.635		611.872.921	624.609.023	637.651.279	654.192.256
	TOTAL JUMLAH	2.404.410.149	3.327.998.595	4.385.590.747		10.117.997.491	10.263.672.635	10.421.052.859	10.645.517.708

SK No 154266 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
022	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**	4.840.012.416	17.052.885.839	6.886.437.157		28.489.404.712	30.069.889.018	30.705.894.682	31.447.188.584
022.01	**Sekretariat Jenderal**	168.089.282	357.925.985	50.712.373		576.627.620	586.848.636	589.448.116	594.733.288
04	**FUNGSI EKONOMI**	168.089.282	357.925.985	50.712.373		576.627.620	586.848.636	589.448.116	594.733.288
04.08	**TRANSPORTASI**	168.089.282	357.925.985	50.712.373		576.627.620	586.848.636	589.448.116	594.733.288
022.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	168.089.282	357.925.985	50.712.373		576.627.620	586.848.636	589.448.116	594.733.288
054	Layanan Umum		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
051	Pengelolaan Digitalisasi SDM		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
052	Layanan Sistem Informasi Kepegawaian Pada Unit Eselon I		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
053	Pengembangan Sistem Kesejahteraan Pegawai		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
054	Pengelolaan Sistem Pengembangan Kompetensi		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
055	Pengelolaan Data dan Informasi SDM		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
056	Pengelolaan Kompetensi dan Manajemen Talenta		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
057	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai, Purna Bakti, dan Hubungan Industrial	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
058	Pengelolaan Kepemimpinan Kelembagaan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.02	**Inspektorat Jenderal**	51.413.965	43.140.288	2.632.234		97.186.487	98.058.278	100.743.983	103.026.668
04	**FUNGSI EKONOMI**	51.413.965	43.140.288	2.632.234		97.186.487	98.058.278	100.743.983	103.026.668
04.08	**TRANSPORTASI**	51.413.965	43.140.288	2.632.234		97.186.487	98.058.278	100.743.983	103.026.668
022.02.WA	**Program Dukungan Manajemen**	51.413.965	43.140.288	2.632.234		97.186.487	98.058.278	100.743.983	103.026.668
054	Pelaksanaan Pengawasan Internal		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
051	Pengelolaan Digitalisasi SDM Pengawasan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
052	Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai, Purna Bakti dan Hubungan Pengawasan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(6)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022.03	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.00	Dirjen Perhubungan Darat	920.920.036	1.901.540.799	668.482.302		1.890.873.137	4.961.120.803	5.047.843.831	5.152.998.138
04	FUNGSI EKONOMI	920.920.036	1.901.540.799	668.482.302		1.890.873.137	4.961.120.803	5.047.843.831	5.152.998.138
04.08	TRANSPORTASI	920.920.036	3.404.560.799	668.482.302		4.893.873.137	4.961.120.803	5.047.843.831	5.152.998.138
022.08.0A	Program Infrastruktur Konektivitas		3.175.692.864	668.482.302		3.834.185.166	3.892.168.287	3.957.822.864	4.038.335.770
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.00.WA	Program Dukungan Manajemen	920.920.036	228.867.935			1.049.787.971	1.068.952.536	1.090.021.247	1.114.650.368
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.04	Dirjen Perhubungan Laut	1.913.388.798	3.878.924.548	3.780.689.629		9.572.842.970	9.800.680.681	9.943.002.788	10.116.292.921
04	FUNGSI EKONOMI	1.913.388.798	3.878.924.548	3.780.689.629		9.572.842.970	9.800.680.681	9.943.002.788	10.116.292.921
04.08	TRANSPORTASI	1.913.388.798	3.878.924.548	3.780.689.629		9.572.842.970	9.800.680.681	9.943.002.788	10.116.292.921
022.04.0A	Program Infrastruktur Konektivitas		2.665.278.820	3.780.689.629		6.445.968.449	6.516.216.821	6.595.185.297	6.690.358.364
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TC

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4561	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4562	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	1.813.828.750	1.813.847.728			3.226.976.521	3.280.864.070	3.847.867.481	9.425.368.617
4561	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4562	[illegible]	1.813.828.750	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4563	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4564	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.06	**Ditjen Perhubungan Udara**	1.196.034.714	3.006.856.807	609.225.108		4.812.116.629	4.019.376.083	4.244.105.482	6.687.700.274
06	**FUNGSI EKONOMI**	1.196.034.714	3.006.856.807	609.225.108		4.812.116.629	4.019.376.083	4.244.105.482	6.687.700.274
06.00	**TRANSPORTASI**	1.196.034.714	3.006.856.807	609.225.108		4.812.116.629	4.019.376.083	4.244.105.482	6.687.700.274
022.06.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**		1.385.417.033	533.994.940		1.919.411.963	2.227.399.282	2.270.156.892	2.332.003.109
4561	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4562	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4564	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4567	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	1.196.034.714	1.621.538.734	8.231.168		2.812.804.668	3.790.962.821	3.973.950.590	4.165.696.867
4561	[illegible]	1.196.034.714	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4562	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4563	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4564	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.08	**Ditjen Perkeretapian**	206.857.860	2.869.848.801	1.416.262.087		5.481.366.278	5.683.411.867	5.896.980.914	6.848.229.936

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN C22

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(Dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
04	FUNGSI EKONOMI	206.857.890	5.859.848.501	1.415.362.087		5.481.958.278	6.588.411.887	5.888.680.514	5.853.220.538
04.08	TRANSPORTASI	206.857.890	5.859.848.501	1.415.362.087		5.481.958.278	6.588.411.887	5.888.680.514	5.853.220.538
022.08.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		3.205.731.783	1.294.701.887		4.500.033.460	4.532.960.826	4.677.231.298	4.788.656.340
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	206.857.890	861.836.738	121.079.380		881.824.818	1.000.481.181	1.021.289.218	1.046.864.938
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.09	Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	41.625.172	120.409.857	9.630.045		174.665.804	174.564.004	174.564.004	174.665.804
04	FUNGSI EKONOMI	41.625.172	120.409.857	9.630.045		174.665.804	174.564.004	174.564.004	174.665.804
04.08	TRANSPORTASI	41.625.172	120.409.857	9.630.045		174.564.884	174.564.884	174.564.884	174.564.884
022.08.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		85.244.910	7.870.045		93.114.955	93.114.955	93.114.955	93.114.955
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	41.625.172	35.164.787	1.760.000		58.449.829	81.449.829	81.449.829	58.449.829
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		990.000			990.000	990.000	990.000	990.000
022.11	Badan Kebijakan Transportasi	47.678.438	72.821.950	1.488.370		121.988.758	124.139.160	126.646.546	129.463.271
04	FUNGSI EKONOMI	47.678.438	72.821.950	1.488.370		121.988.758	124.139.160	126.646.546	129.463.271
04.08	TRANSPORTASI	47.678.438	72.821.950	1.488.370		121.988.758	124.139.160	126.646.546	129.463.271
022.11.QA	Program Infrastruktur Konektivitas		13.800.674			13.800.674	14.021.377	14.269.561	14.570.475
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen	47.678.438	58.021.276	1.488.370		108.188.084	110.117.783	112.376.985	114.892.796
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	47.678.438	30.024.424	1.488.370		32.231.232	32.490.716	32.497.531	32.235.371
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	402.184.846	2.218.697.684	58.204.049		2.678.985.949	2.722.303.596	2.771.059.240	2.830.179.809
10	FUNGSI PENDIDIKAN		1.226.722.805	50.694.974		1.877.417.579	1.905.894.862	1.937.273.164	1.978.652.448
10.05	PENDIDIKAN KEBENASAN		173.980.656	1.219.408		175.190.064	175.842.162	182.314.055	188.879.959
022.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		132.187.693	573.408		132.761.001	135.248.852	136.079.500	141.581.356
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen		41.871.043	646.000		42.358.061	43.289.536	44.234.545	46.348.143
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		1.052.741.849	49.475.566		1.702.219.515	1.727.046.474	1.754.959.109	1.788.802.449



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
022.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		1.662.741.948	39.476.568		1.702.218.516	1.727.048.473	1.764.869.108	1.788.902.189
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	FUNGSI EKONOMI	402.164.348	291.844.879	7.509.046		801.518.370	819.708.936	833.786.078	854.491.381
04.08	TRANSPORTASI	402.164.348	291.844.879	7.509.046		801.518.370	819.708.936	833.786.078	854.491.381
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	402.164.348	291.844.879	7.509.046		801.518.370	819.708.936	833.786.078	854.491.381
[illegible]	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi		20.159.450			20.159.450	20.600.647	20.956.732	20.977.331
[illegible]	[illegible]	317.414.348	203.266.128	7.117.127		727.817.603	737.141.081	633.751.206	823.531.335
[illegible]	[illegible]		67.413			67.413	114.100	147.766	172.140
[illegible]	[illegible]		261.165			261.165	261.615	330.142	317.331
[illegible]	[illegible]		297.323			297.323	251.612	254.427	272.282
	JUMLAH RM	4.840.012.416	12.294.642.520	2.588.861.770		19.723.516.706	21.156.888.000	21.948.049.854	22.214.952.998
	JUMLAH PNBP		1.570.827.409	2.328.277.853		3.899.105.262	3.941.960.695	3.890.115.774	3.848.514.978
	JUMLAH BLU		2.122.283.083	92.591.157		2.228.474.140	2.256.973.303	2.292.364.022	2.328.316.740
	JUMLAH PLN		1.064.602.207	1.696.916.207		2.761.518.504	2.515.107.060	2.875.345.212	2.948.352.870
	TOTAL JUMLAH	4.840.012.416	17.052.955.199	6.586.437.157		28.479.404.712	30.068.928.058	30.705.894.862	31.447.169.584

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	7.356.989.633	44.438.449.744	5.745.561.373	55.464.000.000	111.005.000.000	116.206.485.874	108.481.521.661	121.701.916.599
024.01	Sekretariat Jenderal	1.781.521.633	3.292.722.604	84.290.508	55.464.000.000	61.804.534.745	62.535.081.380	64.218.343.752	65.885.513.188
07	FUNGSI KESEHATAN	1.781.521.633	3.292.722.604	84.290.508	55.464.000.000	61.804.534.745	62.535.081.380	64.218.343.752	65.885.513.188
07.80	KESEHATAN LAINNYA	1.781.521.633	3.260.788.419	84.290.508	55.464.000.000	61.672.810.961	62.392.758.291	64.085.646.758	65.752.196.165
024.01.01	Program Sumber Daya Kesehatan		2.604.300.000		55.464.000.000	58.068.300.000	60.138.278.091	61.453.430.439	63.048.032.229
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.781.521.633	656.488.419	84.290.508		2.604.300.561	2.656.480.200	2.732.916.330	2.814.129.837
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07.09	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		31.924.185			31.924.185	32.035.087	32.796.980	33.357.026
024.01.02	Program Sistem Ketahanan Kesehatan		31.924.185			31.924.185	32.035.087	32.796.980	33.357.026
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.02	Inspektorat Jenderal		16.762.678			16.762.678	17.084.953	17.416.026	17.841.690
07	FUNGSI KESEHATAN		16.762.678			16.762.678	17.084.953	17.416.026	17.841.690
07.80	KESEHATAN LAINNYA		16.762.678			16.762.678	17.084.953	17.416.026	17.841.690
024.02.WA	Program Dukungan Manajemen		16.762.678			16.762.678	17.084.953	17.416.026	17.841.690
2053	Peningkatan Pengawasan Internal dan Penerapan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal		7.805.760			7.805.760	7.950.543	8.103.000	8.304.205

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2073	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Kependudukan		7.305.873			7.305.873	7.530.899	7.883.009	7.890.530
024.03	Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	220.849.806	2.400.907.212	314.679.355		2.936.166.372	2.891.462.836	3.059.674.261	3.122.224.389
07	FUNGSI KESEHATAN	220.849.806	2.400.907.212	314.679.355		2.936.166.372	2.891.462.836	3.059.674.261	3.122.224.389
07.90	KESEHATAN LAINNYA	220.849.806	207.073.011	1.751.165		429.473.881	438.539.707	444.482.715	454.113.436
024.03.DA	Program Sumber Daya Kesehatan		26.057.090			26.057.090	26.057.090	26.057.090	26.057.090
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.03.WA	Program Dukungan Manajemen	220.849.806	181.016.921	1.751.165		403.416.891	410.482.617	418.425.626	428.056.346
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		2.193.834.201	312.928.190		2.506.762.391	2.453.133.226	2.606.191.536	2.661.180.963
024.03.DA	Program Pelayanan Kesehatan Primer		2.193.834.201	312.928.190		2.506.762.391	2.453.133.226	2.606.191.536	2.661.180.963
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2052	Pemenuhan upaya kesehatan kesehatan komunitas		12.721.220			12.721.220	13.097.220	13.297.220	13.297.220
2053	Pengelolaan kesehatan masyarakat perkotaan		7.275.211			7.275.211	7.510.211	7.511.211	7.511.211
2054	Penyelenggaraan Laboratorium kesehatan masyarakat		25.764.224	2.127.170		27.891.394	27.997.394	27.997.394	27.997.394
024.04	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	3.468.776.720	25.150.364.701	5.084.886.746		33.684.127.190	34.316.993.782	35.057.338.828	35.832.063.755
07	FUNGSI KESEHATAN	3.468.776.720	25.150.364.701	5.084.886.746		33.684.127.190	34.316.993.782	35.057.338.828	35.832.063.755
07.90	KESEHATAN LAINNYA	3.468.776.720	25.150.364.701	5.084.886.746		33.684.127.190	34.316.993.782	35.057.338.828	35.832.063.755
024.04.DA	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan		24.835.818.504	5.082.277.864		29.887.796.788	30.272.433.096	30.818.374.711	31.701.987.885
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.458.778.725	514.845.897	22.707.812		3.996.330.432	4.080.480.988	4.168.563.915	4.230.486.069
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.05	DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT	587.007.328	534.115.872	17.959.928		1.139.083.128	1.158.539.896	1.168.344.069	1.182.222.848
07	FUNGSI KESEHATAN	587.007.328	534.115.872	17.959.928		1.139.083.128	1.158.539.896	1.168.344.069	1.182.222.848
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		334.825.617	7.824.008		342.459.625	348.191.394	354.614.803	362.414.828
024.05.02	Program Sistem Kesehatan Kesehatan		183.966.417	7.824.008		191.600.425	193.837.289	198.283.097	199.402.558
[illegible]	[illegible]		91.751.000	7.824.008		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		92.165.417			92.165.417	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.05.03	Program Pelayanan Kesehatan Primer		150.859.200			150.859.200	154.344.018	158.281.805	162.811.360
[illegible]	[illegible]		11.725.770			11.725.770	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
07.90	KESEHATAN LAINNYA	587.007.328	199.290.255	10.135.920		396.623.503	810.358.681	814.629.456	819.807.723
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	587.007.328	199.290.255	10.135.920		396.623.503	810.358.681	814.629.456	819.807.723
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.07	Ditjen Farmasi dan Alat Kesehatan	32.859.390	9.430.784.397	45.431.118		9.559.011.905	9.740.548.720	9.944.529.497	10.191.155.053
07	FUNGSI KESEHATAN	32.859.390	9.430.784.397	45.431.118		9.559.011.905	9.740.548.720	9.944.529.497	10.191.155.053
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		9.307.913.156			9.307.913.156	9.481.867.144	9.684.403.724	9.925.374.259
024.07.02	Program Sistem Kesehatan Kesehatan		9.307.913.156			9.307.913.156	9.481.867.144	9.684.403.724	9.925.374.259
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154257 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
07.90	KESEHATAN LAINNYA	82.359.290	122.681.241	45.426.118		261.166.649	265.556.576	260.496.783	268.480.784
024.07.DZ	Program Sistem Kelanaan Kesehatan		65.079.477	41.006.638		106.086.115	107.810.070	109.560.464	112.446.575
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.07.WA	Program Dukungan Manajemen	82.359.290	57.601.764	4.421.480		145.082.534	147.846.506	150.535.270	154.034.219
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.11	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		220.098.278	381.126		220.479.404	235.003.735	240.038.852	246.264.277
07	FUNGSI KESEHATAN		220.098.278	381.126		220.479.404	235.003.735	240.038.852	246.264.277
07.90	KESEHATAN LAINNYA		220.098.278	381.126		220.479.404	235.003.735	240.038.852	246.264.277
024.11.D1	Program Sumber Daya Kesehatan		212.000.000			212.000.000	216.188.548	220.896.089	226.509.303
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen		18.098.278	381.126		18.479.404	18.814.188	19.190.582	19.645.974
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.12	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.214.176.804	3.376.863.004	215.836.569		5.806.774.877	6.034.852.188	6.093.835.610	6.113.949.590
10	FUNGSI PENDIDIKAN		2.295.368.470	215.836.569		2.511.205.039	2.656.272.572	2.926.835.643	2.648.142.268
10.09	PENDIDIKAN TINGGI		2.295.368.470	215.836.569		2.511.205.039	2.656.272.572	2.926.835.643	2.648.142.268
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		2.295.368.470	215.836.569		2.511.205.039	2.656.272.572	2.926.835.643	2.648.142.268
[illegible]	[illegible]		1.008.697.134	215.836.569		1.804.633.703	1.920.736.452	1.970.919.804	1.911.830.313
[illegible]	[illegible]		709.471.316			709.471.316	735.476.120	736.219.793	705.309.455
07	FUNGSI KESEHATAN	8.214.176.804	1.081.304.534			2.286.479.838	2.388.689.816	2.567.048.967	2.446.807.322
07.90	KESEHATAN LAINNYA	8.214.176.804	1.081.304.534			2.286.479.838	2.388.689.816	2.567.048.967	2.446.807.322

SK No 154256 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

(Dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.214.176.104	416.347.597			1.630.522.701	1.659.806.674	1.693.838.788	1.735.224.473
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.12.DB	Program Sumber Daya Kesehatan		267.828.141			267.828.141	211.818.048	216.356.468	221.746.387
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		458.080.796			458.080.796	486.865.096	476.796.740	488.536.492
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	7.356.989.583	12.926.501.681	1.070.212.451	56.464.000.000	53.828.704.905	55.464.077.959	57.262.598.548	59.699.636.931
	JUMLAH PNBP		290.432.861	53.693.737		347.126.448	351.871.087	357.650.348	363.900.853
	JUMLAH BLU		20.411.889.993	2.732.074.891		23.143.964.887	23.991.982.257	24.093.517.696	24.706.045.471
	JUMLAH PLN		4.738.983.755	1.887.779.441		6.626.763.206	6.734.893.515	6.858.288.545	7.062.509.870
	JUMLAH HLN		85.370.654			85.370.654	84.361.026	87.474.323	88.824.164
	TOTAL JUMLAH	7.356.989.583	43.436.448.744	5.743.661.373	56.464.000.000	114.000.000.000	116.208.686.574	118.691.521.481	121.701.915.689

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
025	KEMENTERIAN AGAMA	56.238.858.209	24.608.020.241	4.349.280.737	3.701.961.200	88.897.720.387	89.590.425.136	90.896.099.702	92.634.400.110
025.01	Sekretariat Jenderal	41.149.065.329	1.480.153.515	196.709.556	3.492.576.500	46.520.334.900	49.096.652.790	49.714.492.146	50.629.904.041
09	FUNGSI AGAMA	8.084.893.568	1.028.834.175	190.775.566		9.314.503.284	9.418.487.792	9.535.268.636	9.678.858.848
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1.092.000	102.564.343	1.008.058		104.662.401	104.854.385	104.658.615	104.659.819
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.092.000	102.564.343	1.008.058		104.662.401	104.854.385	104.658.615	104.659.819
2033	Pengelolaan Pelayanan Kerukunan Umat dan Kehidupan Beragama	792.000	6.636.000			7.428.000	7.578.000	7.731.000	7.884.000
9600	Dukungan Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		95.928.343	1.008.058		96.936.401	97.276.385	96.927.615	96.775.819
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	8.083.901.568	926.147.832	189.638.968		9.209.867.368	9.303.570.257	9.428.346.871	9.566.906.479
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.083.901.568	926.147.832	189.638.968		9.209.867.368	9.303.570.257	9.428.346.871	9.566.906.479
2030	Pengelolaan Administrasi Kementerian/Lembaga		9.700.000			9.700.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000
2031	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		40.405.000	32.540		40.437.540	40.437.540	40.437.540	40.437.540
2032	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.000.000.000	31.241.000	1.425.000		1.032.666.000	1.032.666.000	1.032.666.000	1.032.666.000
2034	Pengelolaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		16.750.000	29.000		16.779.000	16.779.000	16.779.000	16.779.000
2035	Pengelolaan Administrasi Perlengkapan		33.631.000	140.000		33.771.000	33.771.000	33.771.000	33.771.000
2036	Pengelolaan Administrasi [illegible]		757.596.000	187.267.000		944.863.000	950.000.000	956.777.000	963.063.000
2038	Pengelolaan Administrasi Pimpinan Kementerian/Lembaga		5.401.000	148.000		5.549.000	5.607.000	5.667.000	5.727.000
7617	Pengelolaan Administrasi Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama		7.455.000	13.000		7.468.000	7.468.000	7.468.000	7.468.000
7618	Pengelolaan Administrasi Inspektorat Jenderal		5.405.000			5.405.000	5.405.000	5.405.000	5.405.000
09.93	LITBANG AGAMA		5.132.810	130.540		5.263.350	5.263.350	5.263.350	5.263.350
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		5.132.810	130.540		5.263.350	5.263.350	5.263.350	5.263.350
7620	Penyelenggaraan Layanan Bidang Agama, Lektur dan Layanan Keagamaan		5.132.810	130.540		5.263.350	5.263.350	5.263.350	5.263.350

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NJ

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
10	FUNGSI PENDIDIKAN	35.054.561.778	463.319.940	4.974.000	3.892.575.800	39.265.730.718	39.878.168.081	40.209.225.480	40.653.125.893
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	35.054.561.778	415.510.955	3.369.000		35.473.240.734	35.915.788.185	36.413.246.837	37.016.409.294
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	35.054.561.778	415.510.955	3.369.000		35.473.240.734	35.915.788.185	36.413.246.837	37.016.409.294
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.98	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	810.000	23.004.382			23.814.382	23.814.382	23.814.382	23.814.382
025.01.BH	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	810.000	23.004.382			23.814.382	23.814.382	23.814.382	23.814.382
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN		8.485.000	505.000	2.102.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200
025.01.BF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		8.485.000	505.000	2.102.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200	2.111.425.200
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.08	PENDIDIKAN TINGGI		8.000.000	1.100.000	1.690.150.400	1.697.250.400	1.827.140.294	1.690.739.081	1.701.477.017
025.01.BK	Program Pendidikan Tinggi		8.000.000	1.100.000	1.690.150.400	1.697.250.400	1.827.140.294	1.690.739.081	1.701.477.017
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
025.02	Inspektorat Jenderal	71.738.054	129.049.385	8.000.000		207.837.740	208.819.708	211.610.342	214.098.744
10	FUNGSI PENDIDIKAN		78.965.329			78.965.329	78.965.329	78.965.329	78.965.329
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA		78.965.329			78.965.329	78.965.329	78.965.329	78.965.329
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen		78.965.329			78.965.329	78.965.329	78.965.329	78.965.329
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154253 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
09	FUNGSI AGAMA	71 708 354	61 083 057	0 000 000		130,072 411	132 688 819	134,644,813	137 065 415
09 90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	71 708 354	61 083 057	0 000 000		130,072 411	132 688 819	134,644,813	137 065 415
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	71 788.354	51,084 057	8 000 000		130.872 411	182 645,819	134,844,813	137,065 415
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		9 000 000			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	56 831 740	1 893 892 016	486 709 380		3 017 433 136	2 031 883 078	2 048 151 816	2,067 885 450
09	FUNGSI AGAMA	56 831 740	1 893 892 016	486 709 380		3 017 433 136	2 031 883 078	2 048 151 816	2,067 885 450
09 90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA		661 113 060	462 201 380		1 023,314 440	1 028 531 083	1 034 396,427	1,041 506 917
025.03.DG	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		661,113,060	462 201 380		1,023,314 440	1,028 531,083	1,034,396,427	1,041,506 917
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		182 279 60	5 251 000		189 229 60	182 326 000	189 426 863	189 575 100
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09 01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA		378,557,721	805 000		378,385 721	376 530 796	376,718,387	376,941 348
025.03 DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		378 557 721	805 000		378,385 721	376 530 796	376,718,387	376 941 348
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		225 281 000	28 000		225 309 000	225 309 000	225 309 000	225 309 000
09 02	LITBANG AGAMA	56 831 740	556,921 285	4 000 000		617,762 975	626 831,199	637,040,082	649,418 185
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	56 831 740	556,921 285	4 000 000		617,762 975	626 831,199	637,040,082	649,418 185
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	11 324 366 879	18 634 629 712	2 822 301 352	1 200 000	34,182,378 049	34,587 823,705	35 001,428,581	35,527,293 426

SK No 154252 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SJ

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
10	FUNGSI PENDIDIKAN	11.824.346.878	19.534.529.712	2.823.301.362	1.200.000	34.182.378.048	34.567.933.705	36.001.495.881	36.577.393.426
10.02	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		11.428.134.681	1.280.412.815		12.838.547.396	12.867.105.359	13.087.819.967	13.311.182.820
025.04.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		11.428.134.681	1.280.412.815		12.838.547.396	12.867.105.359	13.087.819.967	13.311.182.820
2129	Fasilitasi dan Pembinaan Pendidikan Madrasah		11.428.134.681	1.280.412.815		12.838.547.396	12.867.105.359	13.087.819.967	13.311.182.820
10.60	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	10.972.886.046	2.334.220.193	3.890.480		12.709.998.688	12.901.635.141	12.905.115.635	13.030.693.184
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.466.781.097	1.551.248.007	2.100.460		5.020.140.564	5.123.660.514	5.225.784.684	5.348.607.856
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
025.04.QI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4.803.093.838	771.974.188	1.790.000		7.576.768.126	7.577.974.827	7.478.330.951	7.469.975.228
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	890.909.818	4.735.896.858	1.558.038.097	1.200.000	6.826.090.769	6.792.298.920	6.908.304.985	7.048.975.821
025.04.EK	Program Pendidikan Tinggi	890.909.818	4.735.896.858	1.558.038.097	1.200.000	6.826.090.769	6.792.298.920	6.908.304.985	7.048.975.821
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2438	Pendidikan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Vokasi		37.044.000			37.044.000	40.044.000	40.044.000	40.044.000
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	1.060.555.123	1.037.278.082			2.097.831.205	2.106.796.285	2.120.848.671	2.138.563.705
025.04.QI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.060.555.123	262.227.782			1.322.782.905	1.324.092.411	1.326.584.409	1.327.248.181
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
025.04.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		775.050.300			775.050.300	782.703.874	794.264.562	809.315.524
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	437.462.226	638.222.660	95.569.141		1.171.281.016	1.171.281.016	1.171.281.016	1.171.281.016
09	FUNGSI AGAMA	29.408.028	254.164.569	5.908.408		289.480.005	289.480.005	289.480.005	289.480.005
09 01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA		214.658.000			214.658.000	214.658.000	214.658.000	214.658.000
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		214.658.000			214.658.000	214.658.000	214.658.000	214.658.000
2131	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen		214.658.000			214.658.000	214.658.000	214.658.000	214.658.000
09 90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	29.408.028	39.506.569	5.908.408		74.822.005	74.822.005	74.822.005	74.822.005
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	29.408.028	39.506.569	5.908.408		74.822.005	74.822.005	74.822.005	74.822.005
2129	Layanan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen Kristen	29.408.028	39.506.569	5.908.408		74.822.005	74.822.005	74.822.005	74.822.005
10	FUNGSI PENDIDIKAN	406.059.197	374.058.681	89.689.733		871.801.011	871.801.011	871.801.011	871.801.011
10 08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	194.764.197	335.492.231	89.681.733		619.938.761	619.938.761	619.938.761	619.938.761
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	167.764.197	80.260.328	4.883.435		252.907.960	252.907.960	252.907.960	252.907.960
5131	Pengembangan Sistem Pendidikan Keagamaan Kristen	167.764.197	80.260.328	4.883.435		252.907.960	252.907.960	252.907.960	252.907.960
025.05.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		52.108.630	22.217.260		74.325.790	74.325.790	74.325.790	74.325.790
2135	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen		52.108.630	22.217.260		74.325.790	74.325.790	74.325.790	74.325.790
025.05.DK	Program Pendidikan Tinggi	27.000.000	203.033.973	62.381.045		292.915.018	292.915.018	292.915.018	292.915.018
5131	Pengembangan Sistem Pendidikan Keagamaan Kristen pada Perguruan Tinggi Agama Kristen	27.000.000	203.033.973	62.381.045		292.915.018	292.915.018	292.915.018	292.915.018
10 90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	211.295.000	38.565.260	8.000		251.962.260	251.962.260	251.962.260	251.962.260
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	211.295.000	38.565.260	8.000		251.962.260	251.962.260	251.962.260	251.962.260
2134	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	211.295.000	38.565.260	8.000		251.962.260	251.962.260	251.962.260	251.962.260
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	212.540.228	310.875.468	55.074.612	8.475.800	586.966.108	586.966.202	590.977.401	583.743.629
09	FUNGSI AGAMA	15.563.921	163.407.497	1.103.526		180.074.944	180.797.729	181.610.626	182.596.219

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA		136.798.988	8.880		136.803.866	136.803.866	136.803.866	136.803.866
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		136.798.988	8.880		136.803.866	136.803.866	136.803.866	136.803.866
2140	Peningkatan Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		136.798.988	8.880		136.803.866	136.803.866	136.803.866	136.803.866
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	15.589.931	26.810.511	1.068.648		43.271.090	43.893.868	44.806.782	46.782.365
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	15.589.931	26.810.511	1.068.648		43.271.090	43.893.868	44.806.782	46.782.365
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	15.589.931	26.810.511	1.068.648		43.271.090	43.893.868	44.806.782	46.782.365
10	FUNGSI PENDIDIKAN	196.978.292	147.447.971	53.971.084	8.175.600	406.500.947	407.897.473	409.368.473	411.147.610
10.05	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	21.881.492	116.564.217	53.971.084	8.175.600	200.992.393	201.856.899	203.076.524	204.799.007
025.06.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		26.238.600	21.183.000	8.175.600	49.547.200	50.054.920	50.826.642	51.387.685
2144	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Agama Katolik		5.131.800	21.183.000	8.175.600	34.490.400	34.854.120	35.405.842	35.827.085
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	13.420.276	38.378.174	32.338.084		83.132.534	83.784.568	83.317.988	83.137.988
2145	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Agama Katolik	7.461.216	7.461.174	5.138.084		20.060.474	20.215.411	20.407.474	20.607.474
025.06.DK	Program Pendidikan Tinggi	8.281.216	59.961.343	600.000		68.712.663	69.896.410	70.102.943	70.353.106
2151	Penyelenggaraan Kerja Sama, Kesejahteraan, dan Layanan Pendidikan Tinggi Agama Katolik	8.281.216	59.961.343	600.000		68.712.663	69.896.410	70.102.943	70.353.106
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	175.294.800	30.908.764			206.198.564	206.244.574	206.288.949	206.348.603
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	175.294.800	30.908.764			206.198.564	206.244.574	206.288.949	206.348.603
2147	Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Katolik	175.294.800	30.908.764			206.198.564	206.244.574	206.288.949	206.348.603
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	187.372.508	342.597.688	118.514.209		648.384.456	652.609.053	657.347.307	663.092.340
09	FUNGSI AGAMA	16.288.278	146.165.197	1.570.000		164.023.475	164.528.999	165.052.551	165.742.222
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA		122.930.121	42.000		122.972.121	122.983.529	123.096.352	123.081.902
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		122.930.121	42.000		122.972.121	122.983.529	123.096.352	123.081.902

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

lxS

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.80	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	16.238.278	23.235.076	1.528.000		41.051.354	41.538.470	42.088.199	42.750.320
026.07.WA	Program Dukungan Manajemen	16.238.278	23.235.076	1.528.000		41.051.354	41.538.470	42.088.199	42.750.320
[illegible]	[illegible]	16.238.278	23.235.076	1.528.000		41.051.354	41.538.470	42.088.199	42.750.320
10	FUNGSI PENDIDIKAN	171.084.201	198.342.441	116.844.356		484.370.998	488.087.054	492.284.756	497.356.118
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	150.497.228	153.455.883	116.844.356		400.897.618	404.516.575	408.585.196	413.618.290
026.07.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		40.398.750			40.398.750	40.382.555	40.296.807	40.401.950
[illegible]	[illegible]		40.398.750			40.398.750	40.382.555	40.296.807	40.401.950
026.07.WA	Program Dukungan Manajemen	127.822.725	39.888.744	6.459.000		174.200.469	177.312.696	180.211.124	185.053.020
[illegible]	[illegible]	127.822.725	39.888.744	6.459.000		174.200.469	177.312.696	180.211.124	185.053.020
026.07.DK	Program Pendidikan Tinggi	3.674.501	73.170.869	110.455.300		187.300.669	188.011.495	187.377.270	188.063.320
[illegible]	[illegible]	3.674.501	73.170.869	110.455.300		187.300.669	188.011.495	187.377.270	188.063.320
10.80	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	40.837.006	42.886.458			83.473.463	83.670.479	83.679.690	83.811.828
026.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	40.837.006	42.886.458			83.473.463	83.670.479	83.679.690	83.811.828
[illegible]	[illegible]	40.837.006	42.886.458			83.473.463	83.670.479	83.679.690	83.811.828
026.08	Dayan Pembinaan Masyarakat Buddha	64.837.627	288.910.345	53.116.132		398.858.104	358.044.780	338.602.891	341.492.042
09	FUNGSI AGAMA	17.507.041	92.710.612	1.368.123		111.575.976	112.151.106	112.711.847	113.429.896
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA		78.168.000			78.168.000	78.168.971	78.201.714	78.223.847
026.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		78.168.000			78.168.000	78.168.971	78.201.714	78.223.847
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09.80	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	17.507.041	14.542.612	1.368.123		33.410.976	33.837.234	34.308.832	35.203.649

SK No 154248 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

85

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	17.907.041	14.542.512	1.381.123		33.410.676	33.937.234	34.509.933	35.203.842
2148	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Satker Pusat	17.907.041	14.542.512	1.381.123		33.410.676	33.937.234	34.509.933	35.203.842
10	FUNGSI PENDIDIKAN	47.130.686	126.199.833	51.750.009		225.080.528	225.872.456	226.891.584	230.065.057
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	23.198.306	98.430.978	51.750.009		173.579.292	174.380.647	175.101.287	175.317.409
025.08.OF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		52.332.787			52.332.787	52.335.888	52.339.334	52.343.537
4212	Pengelolaan dan Pemberian Pendidikan Agama Buddha		52.332.787			52.332.787	52.335.888	52.339.334	52.343.537
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	20.676.806	22.556.288	2.825.053		46.058.147	46.453.080	47.258.868	48.231.982
5116	Pengelolaan dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Satker Pusat	20.676.806	22.556.288	2.825.053		46.058.147	46.453.080	47.258.868	48.231.982
025.08.OK	Program Pendidikan Tinggi	2.522.400	23.741.225	49.126.956		75.390.581	75.581.619	76.705.802	75.242.884
5125	Pengelolaan Aset, Mutu, Kerjasama dan Sinergi Pendidikan Tinggi Agama Buddha	2.522.400	23.741.225	49.126.956		75.390.581	75.581.619	76.705.802	75.242.884
10.80	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	23.932.381	27.568.855			51.501.136	51.543.038	51.590.252	51.647.433
025.08.OI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	23.932.381	27.568.855			51.501.136	51.543.038	51.590.252	51.647.433
4937	Pengelolaan Hibah dan Beasiswa Pendidikan Agama Buddha	23.932.381	27.568.855			51.501.136	51.543.038	51.590.252	51.647.433
025.09	Dilijen Penyelenggaraan Haji dan Umrah		21.074.275	502.195.870		523.270.145	39.341	39.442	39.543
09	FUNGSI AGAMA		21.074.275	502.195.870		523.270.145	39.341	39.442	39.543
09.03	LITBANG AGAMA		21.074.275	13.310.507		34.384.782	39.341	39.442	39.543
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen		21.074.275	13.310.507		34.384.782	39.341	39.442	39.543
2103	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		21.074.275	13.310.507		34.384.782	39.341	39.442	39.543
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA			488.885.363		488.885.363			
025.09.OC	Program Penyelenggaraan Umrah dan Layanan Kehidupan Beragama			488.885.363		488.885.363			

SK No 154247 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGAMA

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	Pelayanan ke Luar Negeri			[illegible]		[illegible]			
025.11	Badan Moderasi Beragama Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	233.443.220	437.813.236	32.008.375		703.374.831	1.033.771.588	1.230.811.380	1.426.579.877
09	FUNGSI AGAMA	238.653.220	291.141.803	10.385.985		535.180.808	786.276.842	986.485.730	1.188.028.416
0960	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	238.653.220	238.675.020	8.717.785		480.046.025	605.486.058	724.616.252	845.443.614
025.11 DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		122.980.404	7.879.508		130.859.810	249.841.099	382.289.823	474.828.428
7893	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7894	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kerukunan		60.411.411			60.411.411	64.611.411	69.171.113	73.990.283
025.11 WA	Program Dukungan Manajemen	238.653.220	118.714.918	2.838.279		249.406.415	265.486.959	382.926.829	970.617.188
7896	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09 03	LITBANG AGAMA		52.466.503	670.200		55.144.703	190.046.884	241.089.478	293.494.802
025.11 DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		64.468.683	670.200		55.144.783	190.846.884	241.889.478	293.494.802
7893	Pemenuhan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Layak Pemerintah Vertikal di Ce [illegible]		5.151.351	670.200		15.654.05	45.045.977	52.913.721	62.019.552
7895	Pengembangan Strategi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama		59.317.332			0.474.711	145.824.911	188.977.757	231.443.270
10	FUNGSI PENDIDIKAN		148.671.833	21.612.390		188.284.022	237.494.756	283.825.650	295.858.461
1008	PENDIDIKAN KEAGAMAAN		148.671.833	21.612.390		188.284.022	237.494.756	283.825.650	295.858.461
025.11 DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		148.671.833	21.612.390		180.314.023	237.494.756	283.825.650	295.858.461
7898	Pengembangan Strategi Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7901	Pengembangan Kompetensi Manajemen Pengelolaan [illegible] dan Materials Pendidikan Lembaga Pendidikan		47.337			047.337	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7908	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	56.238.458.202	20.238.112.848	1.026.078.248	8.701.951.209	31.299.690.487	32.505.201.783	33.690.252.089	35.095.832.367

SK No 154246 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

86

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
	JUMLAH PNBP		964 145 889	275 822 510		1.239.489.379	1 295 845.308	1.256.448.782	1.289.385.580
	JUMLAH BLU		3.310.788.523	669.851.734		3.980.600.257	4.047.658.850	4.122.822.177	4.214.249.350
	JUMLAH SBSN			2 379 028 247		2.379 028 247	1 906 778.533	1 925 478 732	1.948 182 305
	TOTAL JUMLAH	58 238,480 202	24,600 020 241	4 349 269 737	3 701,651 200	40,091 720 300	58 690 425,385	90 985 099 762	92,538 100 810

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	735.452.484	3.488.655.112	186.549.455		3.960.657.031	3.917.817.132	3.881.848.364	4.058.485.067
026.01	Sekretariat Jenderal	156.297.562	207.734.005	6.991.140		401.022.707	459.782.243	480.504.451	478.079.208
10	FUNGSI PENDIDIKAN	8.103.895	12.108.387	2.882.241		22.894.484	23.288.714	23.727.717	24.282.426
10.09	PENDIDIKAN TINGGI		3.986.793	2.882.241		6.869.034	6.739.371	6.813.498	6.914.445
026.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		3.986.793	2.882.241		6.869.034	6.739.371	6.813.498	6.914.445
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL	8.103.895	8.121.594			16.225.489	16.547.343	16.908.219	17.367.981
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.103.895	8.121.594			16.225.489	16.547.343	16.908.219	17.367.981
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	FUNGSI EKONOMI	147.193.718	276.629.418	5.308.896		429.128.030	436.496.389	444.778.446	458.816.830
04.02	TENAGA KERJA	147.193.718	276.629.418	5.308.896		429.128.030	436.496.389	444.778.446	458.816.830
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	147.193.718	238.309.789	5.308.896		389.812.401	396.810.380	404.677.006	414.215.181
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2159	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kerja Sama Internasional dan Hubungan Luar Negeri		19.320.429			19.320.429	9.900.204	20.269.254	20.244.273
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2160	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	14.300.000	14.710.000	707.000		29.717.000	30.207.807	30.729.211	31.302.043
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(c)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
026.01 ON	Program Pembinaan Ketenagakerjaan		39.816.638			39.816.638	39.685.169	40.089.440	40.601.736
6510	Pembinaan Pengawasan Pada Kerja		39.816.638			39.816.638	39.685.169	40.089.440	40.601.736
026.02	Inspektorat Jenderal	25.096.409	16.119.829	200.000		42.416.338	42.541.188	42.492.648	42.864.034
04	FUNGSI EKONOMI	25.096.409	16.119.829	200.000		42.416.338	42.541.188	42.492.648	42.864.034
04.02	TENAGA KERJA	25.096.409	16.119.829	200.000		42.416.338	42.541.188	42.492.648	42.864.034
026.02 WA	Program Dukungan Manajemen	25.096.409	16.119.829	200.000		42.416.338	42.541.188	42.492.648	42.864.034
2127	Pengawasan Inspektorat		1.612.300			1.612.300	1.644.577	1.693.933	1.725.642
2128	Pengawasan Inspektorat		1.644.742			1.644.742	1.677.637	1.727.966	1.760.510
2129	Pengawasan Inspektorat		1.644.570			1.644.570	1.677.461	1.727.785	1.760.329
2130	Pengawasan Inspektorat		1.612.300			1.612.300	1.644.577	1.693.933	1.725.642
2131	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	25.096.409	9.772.457	200.000		35.068.866	35.072.370	35.073.078	35.072.930
026.04	Direktorat Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja dan Norma Kesehatan Kerja	67.001.595	207.497.227	600.000		275.098.822	280.144.235	286.518.003	292.692.868
04	FUNGSI EKONOMI	67.001.595	207.497.227	600.000		275.098.822	280.144.235	286.518.003	292.692.868
04.02	TENAGA KERJA	67.001.595	207.497.227	600.000		275.098.822	280.144.235	286.518.003	292.692.868
026.04 ON	Program Pembinaan Ketenagakerjaan		171.196.916			171.196.916	174.223.660	177.837.802	181.777.138
2127	Pengawasan Tenaga Kerja		15.920.249			15.920.249	16.195.475	16.563.274	16.979.706
2131	Pengawasan Ketenagakerjaan		25.997.108			25.997.108	26.578.271	27.410.571	28.326.430
2132	Pengawasan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		8.078.730			8.078.730	8.218.973	8.407.492	8.617.714
2133	Pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja		5.265.510			5.265.510	5.361.541	5.484.171	5.621.276
2134	Pengawasan Tenaga Kerja Asing		115.934.329			115.934.329	118.069.714	120.971.894	124.032.412
026.04 WA	Program Dukungan Manajemen	67.001.595	36.300.311	600.000		103.901.906	105.920.575	108.680.201	110.915.730

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

93

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(UNIT: RUPIAH)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9221 Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	67.001.000	39.310.311	810.000		107.121.311	109.302.372	109.178.331	110.910.744
026.05	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	38.424.879	1.281.200.737	70.500		1.329.696.116	1.344.040.648	1.370.281.367	1.402.089.092
04	FUNGSI EKONOMI	38.424.879	1.281.200.737	70.500		1.329.696.116	1.344.040.648	1.370.281.367	1.402.089.092
04.02	TENAGA KERJA	38.424.879	1.281.200.737	70.500		1.329.696.116	1.344.040.648	1.370.281.367	1.402.089.092
026.05.OH	Program Pembinaan Ketenagakerjaan		1.287.542.237			1.287.542.237	1.299.898.770	1.317.128.975	1.348.965.213
	2173 [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	2181 [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5205 Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja		1.179.060.135			1.179.060.135	1.203.039.242	1.229.109.400	1.255.420.557
	5.B5 [illegible]		12.128.554			12.128.554	12.128.554	12.128.554	12.128.554
	5.B [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen	38.424.879	13.658.500	70.500		52.153.879	52.153.879	52.153.879	52.153.879
	9221 Dukungan Manajemen Direktorat Pengembangan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	38.424.879	13.658.500	70.500		52.153.879	52.153.879	52.153.879	52.153.879
026.06	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	88.581.803	106.026.353	500.000		195.108.156	208.748.794	212.828.088	217.772.171
04	FUNGSI EKONOMI	88.581.803	106.026.353	500.000		195.108.156	208.748.794	212.828.088	217.772.171
04.02	TENAGA KERJA	88.581.803	106.026.353	500.000		195.108.156	208.748.794	212.828.088	217.772.171
026.06.OH	Program Pembinaan Ketenagakerjaan		70.550.038	500.000		71.050.038	72.036.189	73.185.387	74.856.830
	5.B [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5.B [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	9251 Pengembangan Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		35.476.315	500.000		35.976.315	36.712.605	37.642.701	38.915.341

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9501 Pendidikan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan		555.247			555.247	710.123	878.542	1.045.794
	9502 Pengujian Kesehatan dan Keselamatan Kerja		1.484.192			1.484.192	1.702.573	1.920.954	2.139.335
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen	88.891.803	39.475.517			128.367.320	136.690.975	139.638.701	143.216.341
	9555 Dukungan Manajemen Biaya Tambahan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	88.891.803	39.475.517			128.367.320	136.690.975	139.638.701	143.216.341
026.11	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	26.790.636	108.901.163	1.443.822		138.135.641	138.135.641	138.135.641	138.135.641
04	FUNGSI EKONOMI	26.790.636	108.901.163	1.443.822		138.135.641	138.135.641	138.135.641	138.135.641
04.02	TENAGA KERJA	26.790.636	108.901.163	1.443.822		138.135.641	138.135.641	138.135.641	138.135.641
026.11.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan		53.896.228	1.043.822		54.940.050	54.940.050	54.940.050	54.940.050
	9761 Perjanjian Kerja dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan		52.753.737	313.822		53.067.559	53.067.559	53.067.559	53.067.559
	9762 Pengembangan Kompetensi Ketenagakerjaan		1.142.491			1.142.491	1.142.491	1.142.491	1.142.491
	9763 Pengembangan Pelatihan Tenaga Kerja		1.037.014			1.037.014	1.037.014	1.037.014	1.037.014
026.11.WA	Program Dukungan Manajemen	26.790.636	55.004.935	400.000		82.195.591	83.195.591	83.195.591	83.195.591
	9751 Dukungan Manajemen Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	26.790.636	54.004.935	400.000		81.195.591	82.195.591	82.195.591	82.195.591
026.13	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Pendidikan Tinggi	312.450.900	800.174.078	478.733.667		1.591.358.645	1.484.826.781	1.483.602.158	1.485.851.005
10	FUNGSI PENDIDIKAN		448.691.327	341.444.209		791.135.536	786.154.856	801.831.643	808.715.104
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		448.691.327	341.444.209		791.135.536	786.154.856	801.831.643	808.715.104
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		445.191.327	340.944.209		786.135.536	781.067.776	796.648.788	803.411.047
	4651 Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Kurikulum Dan Modul Pendidikan		540.000			540.000	97.000	74.000	97.000
	4652 Pendidikan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Vokasi		11.000.000			11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	4653 Penyelenggaraan Kerjasama Kemitraan Pendidikan Vokasi Dan Industri Bidang Vokasi		1.000.000	99.944.000		100.944.000	97.000.000	94.000.000	97.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
026.18.WA	Program Dukungan Manajemen		4.500.000	600.000		5.100.000	5.087.178	5.186.205	5.304.057
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	**FUNGSI EKONOMI**	342.450.529	158.513.551	135.289.779		636.253.909	646.271.826	661.770.211	678.136.784
04 02	TENAGA KERJA	342.450.530	158.513.551	135.289.779		636.253.909	646.271.826	661.770.211	678.136.784
026.18.WA	Program Dukungan Manajemen	342.450.530	118.474.075			460.924.605	469.451.867	479.041.381	490.695.609
7555	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas	342.450.530	118.474.075			460.924.605	469.451.867	479.041.381	490.695.609
026.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		10.039.476	135.289.778		175.329.254	176.819.159	180.728.830	187.179.375
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	756.882.464	1.828.587.882	18.345.075		2.404.895.411	2.442.839.788	2.486.821.060	2.537.967.481
	JUMLAH PNBP		768.288.677	10.314.716		778.603.393	792.173.974	807.426.812	825.927.200
	JUMLAH PLN		218.788.553	456.889.664		677.668.217	682.803.766	688.587.682	695.600.876
	TOTAL JUMLAH	756.882.464	2.818.585.112	485.549.456		3.860.887.021	3.917.817.432	3.981.848.584	4.059.495.557

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

01

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027	KEMENTERIAN SOSIAL	5.882.826.318	1.897.268.224	843.318.204	73.006.545.420	84.440.058.166	86.026.683.273	87.817.634.025	89.689.130.808
027.01	Sekretariat Jenderal	1.726.876.896	3.841.641.023	843.318.204		6.410.836.113	6.474.537.618	6.548.140.983	6.632.868.484
10	FUNGSI PENDIDIKAN	820.352.953	3.491.888.528	838.770.869		4.950.990.350	4.990.709.898	5.035.358.872	5.089.490.457
10.02	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	820.352.953	3.459.050.521	838.770.869		4.937.174.343	4.976.619.774	5.020.959.936	5.074.721.612
027.01.DD	Program Perlindungan Sosial		3.092.673.881	838.770.869		3.929.444.750	3.948.696.325	3.970.780.584	3.997.271.246
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
027.01.WA	Program Dukungan Manajemen	820.352.953	387.378.640			1.007.728.593	1.027.723.549	1.050.189.342	1.077.450.366
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.06	PENDIDIKAN TINGGI		13.818.007			13.818.007	14.090.094	14.398.236	14.771.845
027.01.DD	Program Perlindungan Sosial		13.818.007			13.818.007	14.090.094	14.398.236	14.771.845
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL	1.805.526.833	347.778.495	8.548.335		1.459.868.763	1.493.537.781	1.530.792.681	1.583.483.027
11.60	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	1.805.526.833	296.181.088	8.548.335		1.407.255.356	1.439.891.780	1.467.481.682	1.489.676.937
027.01.GG	Program Perlindungan Sosial		74.500.000			74.500.000	76.720.279	77.091.687	78.755.158
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
027.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.805.526.833	220.681.088	8.548.335		1.332.756.356	1.358.171.520	1.380.389.995	1.410.921.779
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
027.01.EE	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi		3.413.000			3.413.000	3.522.000	3.592.000	3.669.000
027.01.FF	Pengelolaan Organisasi dan SDM		3.413.000			3.413.000	3.522.000	3.592.000	3.669.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.68	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL		49.298.387			49.298.387	48.570.487	48.382.045	50.259.792

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial		49.293.397			49.293.397	46.570.467	49.682.048	50.258.792
5697	Pemberian Jaminan dan Bantuan Sosial Melalui Kelembagaan Sosial		49.293.397			49.293.397	46.570.467	49.682.048	50.258.792
11.06	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		3.300.000			3.300.000	3.385.464	3.458.063	3.528.298
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial		3.300.000			3.300.000	3.385.464	3.458.063	3.528.298
5697	Pemberian Jaminan dan Bantuan Sosial Melalui Kelembagaan Sosial Penyandang Disabilitas		3.300.000			3.300.000	3.385.464	3.458.063	3.528.298
027.02	Inspektorat Jenderal	26.037.301	22.278.798			48.316.099	42.829.264	43.463.298	44.880.790
11	FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL	26.037.301	12.269.118			38.306.419	32.315.027	33.021.758	33.878.595
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	26.037.301	12.269.118			38.306.419	32.315.027	33.021.758	33.878.595
027.02.WA	Program Dukungan Manajemen	26.037.301	12.269.118			38.306.419	32.315.027	33.021.758	33.878.595
5697	Pemberian Jaminan dan Bantuan Sosial Melalui Kelembagaan Sosial		4.731.371			4.731.371			
5697	Pengelolaan Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Jenderal		134.111			134.111	78.111	79.674	81.267
5697	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Jenderal	26.037.301	7.403.636			33.440.937	32.236.916	32.941.084	33.797.328
5697	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana Inspektorat Jenderal		247.500			247.500	230.000	234.600	239.292
5697	Layanan Umum Inspektorat Jenderal		752.500			752.500	225.000	229.500	234.210
10	FUNGSI PENDIDIKAN		10.009.850			10.009.850	10.209.297	10.431.490	10.702.165
10.02	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		10.009.850			10.009.850	10.209.297	10.431.490	10.702.165
027.02.WA	Program Dukungan Manajemen		10.009.850			10.009.850	10.209.297	10.431.490	10.702.165
5697	Pemberian Jaminan dan Bantuan Sosial Melalui Kelembagaan Sosial Pusat		10.009.850			10.009.850	10.209.297	10.431.490	10.702.165
027.03	Ditjen Pemberdayaan Sosial	328.557.494	148.640.460		100.875.000	578.072.954	538.164.091	589.807.526	613.261.287
11	FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL	328.557.494	148.640.460		100.875.000	578.072.954	538.164.091	589.807.526	613.261.287

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(9)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		2	4	5	6	7	8	9	0
11 03	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS KEMERDEKAAN		8.284.589		300.000	8.584.589	8.700.030	8.529.817	8.987.178
027.03.DD	Program Perlindungan Sosial		8.284.589		300.000	8.584.589	8.700.030	8.529.817	8.987.178
	9.7x								
11 90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	328.557.494	110.385.851		100.576.000	539.185.358	579.961.061	580.677.709	604.274.083
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		120.077.649		100.576.000	220.652.649	223.966.378	227.689.318	232.204.640
	9274								
	927x								
	9.9x								
027.04.WA	Program Dukungan Manajemen	328.557.494	90.278.321			418.835.815	368.466.636	362.988.391	372.069.443
	9.9x								
	9297								
	9299								
	929x								
027.04	Dhjen Rehabilitasi Sosial	648.377.568	587.187.738		328.062.400	1.563.627.641	1.586.739.648	1.598.985.984	1.623.277.568
11	FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL	648.377.568	587.187.738		328.062.400	1.563.627.641	1.586.739.648	1.598.985.984	1.623.277.568
11 90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	648.377.568	330.792.457		99.818.000	1.078.988.025	1.090.780.348	1.104.038.416	1.120.813.779
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		136.981.000		99.818.000	236.777.000	238.142.300	239.477.273	231.838.395
	9277								
	927x								
027.04.WA	Program Dukungan Manajemen	648.377.568	359.891.482			962.208.865	982.838.048	974.382.143	988.677.376
	9.9x								

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	5304 Pendek dan Pendampingan Keluarga PMN dan Lansia Rehabilitasi Sosial	643.977.577	137.525.313			347.503.507	555.204.305	360.054.643	357.527.072
	5305 Pengelolaan Pendampingan Sosial Lingkungan		3.717.177			3.717.760	3.977.042	4.150.324	4.354.491
	5306 Layanan Sosial Lanjut Usia Terlantar		1.037.110			1.037.110	1.110.008	1.158.067	1.215.117
11.01	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT**		**98.881.478**		**93.047.200**	**809.926.678**	**192.232.169**	**194.021.185**	**197.961.875**
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		98.881.478		93.047.200	809.926.678	192.232.169	194.021.185	197.961.875
	5301 Asistensi Penyandang Sosial Terlantar Disabilitas		95.911.478		93.047.200	785.529.078	186.465.164	188.160.979	192.042.919
11.04	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA**		**82.782.800**		**68.371.200**	**851.164.000**	**152.727.584**	**164.495.255**	**156.818.203**
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		82.782.800		68.371.200	851.164.000	152.727.584	164.495.255	156.818.203
	5302 Asistensi Keluarga Sosial ABK		82.782.800		68.371.200	851.164.000	152.727.584	164.495.255	156.818.203
11.07	**PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA**		**78.731.000**		**45.320.000**	**683.659.000**	**144.998.207**	**145.615.830**	**140.581.720**
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial		78.731.000		45.320.000	683.659.000	144.998.207	145.615.830	140.581.720
	5303 Asistensi Penyandang Sosial Lanjut Usia		78.731.000		45.320.000	683.659.000	144.998.207	145.615.830	140.581.720
027.05	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.884.074.134	297.508.295		72.577.608.020	75.889.190.388	77.340.718.661	78.028.585.454	81.075.052.529
11	FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL	2.884.074.134	297.508.295		72.577.608.020	75.889.190.388	77.340.718.661	78.028.585.454	81.075.052.529
11.08	**BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**202.400.881**		**28.777.600.020**	**28.980.000.901**	**29.552.181.200**	**30.195.211.014**	**30.974.097.729**
027.05.DQ	Program Perlindungan Sosial		202.400.881		28.777.600.020	28.980.000.901	29.552.181.200	30.195.211.014	30.974.097.729
	5307 Pencegahan dan Penanganan Korban Bencana		132.106.252		28.777.600.020	28.909.706.272	29.477.776.641	30.109.973.013	30.941.411.131
	5308 Penyaluran Bantuan Sosial Produktif Keluarga Harapan		70.294.629		29.710.000.000	29.780.294.629	29.900.547.214	30.001.472.357	30.772.450.391
11.80	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**	2.884.074.134	96.618.854		43.800.000.000	46.868.091.488	47.788.557.461	48.833.365.420	50.100.154.800
027.05.DQ	Program Perlindungan Sosial		70.145.217		43.800.000.000	43.870.145.217	44.740.379.589	45.718.595.812	46.904.871.580
	5309 Pendampingan Akses Keuangan Sosial		1.031.714			1.031.760	1.042.062	1.054.154	1.080.471

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
027.05.WA	Program Dukungan Manajemen	2.964.074.154	24.874.197			2.988.948.271	3.048.377.862	3.114.757.108	3.196.483.299
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0309	Pendidikan Dan Pelatihan SDM Pelaksanaan Jaminan Sosial		1.303.000			1.303.000	327.100	327.200	326.300
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	5.692.925.310	4.091.726.407	840.319.204	73.006.545.420	84.433.716.549	86.020.322.027	87.011.030.053	89.882.172.008
	JUMLAH PNBP		6.940.617		300.000	6.340.617	6.460.448	6.896.172	6.758.620
	TOTAL JUMLAH	5.692.925.310	4.897.268.224	840.319.204	73.006.545.420	84.440.056.166	86.026.683.273	87.017.834.025	89.888.180.608

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.331.147.384	9.216.748.069	1.450.104.537		83.000.000.000	13.205.619.841	12.436.753.630	13.716.988.831
032.01	Sekretariat Jenderal	180.380.841	452.143.873	78.028.048		640.680.863	651.168.642	663.096.325	677.565.007
04	FUNGSI EKONOMI	180.380.841	452.143.873	78.028.048		640.680.863	651.168.642	663.096.325	677.565.007
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	180.380.841	452.143.873	78.028.048		640.680.863	651.168.642	663.096.325	677.565.007
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	180.380.841	452.143.873	78.028.048		640.680.863	651.168.642	663.096.325	677.565.007
2032	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2033	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2034	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2035	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor		27.856.736	33.956.731		55.813.467	56.930.736	58.119.615	59.382.000
2453	Pengadaan Mobil Unit Kesekretariatan Perikanan		20.851.499	234.000		21.085.499	21.889.705	22.815.179	23.815.950
9901	Analisis Kebijakan Sekretariat Kelautan dan Perikanan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.02	Inspektorat Jenderal	41.126.185	53.720.406	4.032.123		98.878.699	99.911.736	101.072.993	102.480.990
04	FUNGSI EKONOMI	41.126.185	53.720.406	4.032.123		98.878.699	99.911.736	101.072.993	102.480.990
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	41.126.185	53.720.406	4.032.123		98.878.699	99.911.736	101.072.993	102.480.990
032.02.WA	Program Dukungan Manajemen	41.126.185	53.720.406	4.032.123		98.878.699	99.911.736	101.072.993	102.480.990
2035	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		23.690.737			23.690.737	23.690.737	23.690.737	23.690.737
2036	Dukungan Manajemen Internal Inspektorat Jenderal	41.126.185	6.529.669	4.032.123		51.687.977	52.174.089	52.779.345	53.484.340
032.08	Ditjen Perikanan Tangkap	289.909.943	5.897.916.310	58.803.350		6.256.629.603	6.382.232.142	6.489.634.241	6.646.792.864
04	FUNGSI EKONOMI	289.909.943	5.897.916.310	58.803.350		6.256.629.603	6.382.232.142	6.489.634.241	6.646.792.864
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	289.909.943	5.897.916.310	58.803.350		6.256.629.603	6.382.232.142	6.489.634.241	6.646.792.864



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1(a)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		6.781.949.389	72.135.171		6.854.085.560	5.937.529.292	6.053.810.260	6.194.798.737
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2339	Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan		8.350.000			8.350.000	8.350.000	8.433.500	8.517.835
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan		4.316.000	65.027		4.381.027	4.417.316	4.461.489	4.506.104
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	269.908.943	135.986.641	16.863.179		422.584.953	430.702.950	439.874.641	450.893.987
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	269.908.943	135.986.641	16.863.179		422.584.953	430.702.950	439.874.641	450.893.987
032.04	Ditjen Perikanan Budidaya	234.572.709	868.239.544	53.057.146		1.156.889.399	1.170.886.844	1.187.726.059	1.208.167.450
04	FUNGSI EKONOMI	234.572.709	868.239.544	53.057.146		1.156.889.399	1.170.886.844	1.187.726.059	1.208.167.450
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	234.572.709	868.239.544	53.057.146		1.156.889.399	1.170.886.844	1.187.726.059	1.208.167.450
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		745.909.709	51.057.146		797.966.934	806.928.307	817.003.690	829.285.371
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7033	Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Umum		41.941.900	1.200.120		43.093.013	43.447.009	43.943.009	44.483.013
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.04.WA	Program Dukungan Manajemen	234.572.709	121.329.755	2.000.000		357.902.464	363.958.537	370.723.011	378.881.079
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	234.572.709	121.329.755	2.000.000		357.902.464	363.958.537	370.723.011	378.881.079
032.05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	247.546.905	747.901.068	52.835.399		1.048.983.372	1.048.983.372	1.048.983.372	1.048.983.372
04	FUNGSI EKONOMI	247.546.905	747.901.068	52.835.399		1.048.983.372	1.048.983.372	1.048.983.372	1.048.983.372

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LII

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
03.00	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	247,545,906	737,101,068	62,335,398		1,046,982,372	1,046,982,372	1,046,982,372	1,046,982,372
032.06.NB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		678,983,640	61,025,398		731,009,038	731,009,039	731,009,038	731,009,038
3301	Dukungan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sistem Pangan		330,075,310	57,100,000		387,175,310	387,175,310	387,175,310	387,175,310
3302	Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		348,908,330			348,908,330	348,908,330	348,908,330	348,908,330
3303	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.06.WA	Program Dukungan Manajemen	247,545,906	67,117,428	1,310,000		315,973,334	315,973,333	315,973,333	315,973,333
[illegible]	Dukungan Manajemen Internal Unit Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.08	Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	56,378,910	159,303,846	341,487		276,024,243	279,305,484	282,994,069	287,466,438
04	FUNGSI EKONOMI	56,378,910	159,303,846	341,487		276,024,243	279,305,484	282,994,069	287,466,438
03.00	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	80,370,910	159,303,846	341,487		276,026,243	279,305,484	282,994,069	287,466,438
032.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		157,008,513	291,487		157,300,000	158,358,715	159,570,183	161,026,836
3307	Pemasaran, Akses Pasar, Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan		29,010,000	200,000		29,210,000	29,752,992	29,730,133	29,922,331
3308	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		11,000,000			11,000,000	11,013,549	11,028,[illegible]	11,047,152
[illegible]	Dukungan Manajemen Pengembangan Nilai Tambah dan Daya Saing		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Pascapanen dan Pengembangan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.06.WA	Program Dukungan Manajemen	80,370,910	32,295,333	50,000		118,726,243	120,936,749	123,423,936	126,438,643
[illegible]	Dukungan Manajemen Internal Unit Pelaksana Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.07	Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	118,812,996	364,315,850	819,500,000		1,398,428,486	1,422,710,128	1,453,077,629	1,490,561,569

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

[illegible]

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

[illegible]

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	FUNGSI EKONOMI	119.012.806	320.135.650	910.740.000		1.350.080.456	1.377.437.074	1.407.209.302	1.443.464.064
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	119.012.806	320.135.650	910.740.000		1.350.080.456	1.377.437.074	1.407.209.302	1.443.464.064
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen	119.812.806	32.615.650			144.428.456	147.137.531	150.182.662	153.875.640
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			144.428.456	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		287.720.000	918.740.000		1.206.460.000	1.230.299.543	1.257.087.390	1.289.588.924
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		43.950.000	590.000		44.540.000	45.273.054	46.097.307	47.096.705
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM		43.950.000	590.000		44.540.000	45.273.054	46.097.307	47.096.705
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		43.950.000	590.000		44.540.000	45.273.054	46.097.307	47.096.705
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
032.08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	50.000.000	130.808.583	11.155.759		189.960.342	200.065.153	206.580.858	210.772.827
04	FUNGSI EKONOMI	50.000.000	130.804.583	11.155.759		189.960.342	200.065.153	206.648.856	210.772.827
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	50.000.000	130.804.583	11.155.759		189.960.342	200.065.153	206.648.856	210.772.827
032.08.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		98.771.583	3.838.759		103.610.342	106.116.989	109.304.079	103.849.685
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154274 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LD.1

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
032.08.WA	Program Dukungan Manajemen	56.000.000	39.033.000	7.317.000		95.350.000	97.848.187	98.744.776	101.923.142
7347	Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Direktorat Jenderal [illegible]	56.000.000	39.033.000	7.317.000		95.350.000	97.848.187	98.744.776	101.923.142
032.12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	972.938.000	367.553.192	58.516.575		1.399.007.768	1.424.908.215	1.450.671.740	1.498.585.426
10	FUNGSI PENDIDIKAN		139.135.600	33.686.307		172.821.907	176.167.604	178.928.882	184.489.314
10.08	PENDIDIKAN TINGGI		139.135.600	33.686.307		172.821.907	176.167.604	178.928.882	184.489.314
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		139.135.600	33.686.307		172.821.907	176.167.604	178.928.882	184.489.314
2575	Pendidikan Kelautan dan Perikanan		139.135.600	33.686.307		172.821.907	176.167.604	178.928.882	184.489.314
04	FUNGSI EKONOMI	972.938.000	228.417.592	25.130.268		1.226.485.858	1.248.739.611	1.272.742.887	1.314.096.114
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	972.938.000	228.417.592	25.130.268		1.226.485.858	1.248.739.611	1.272.742.887	1.314.096.114
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen	972.938.000	159.501.229	200.000		1.132.639.229	1.153.052.378	1.176.999.258	1.205.921.887
7179	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2575	Pendidikan Kelautan dan Perikanan		13.915.963			13.915.963	14.167.174	14.457.717	14.917.227
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		68.916.363	24.930.268		93.846.629	95.687.233	97.743.629	100.244.227
2575	Pendidikan Kelautan dan Perikanan		34.673.163	24.030.268		58.703.431	60.271.869	61.935.336	63.976.220
7523	Pengelolaan Kelautan dan Perikanan		33.443.200	100.000		33.543.200	33.907.241	34.444.312	34.913.032
7.48	[illegible]		17.450.000	800.000		18.250.000	18.481.136	18.772.211	19.251.175
032.13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	206.471.015	139.648.638	184.238.612		530.357.165	538.474.245	547.599.528	558.683.786
04	FUNGSI EKONOMI	206.471.015	139.648.638	184.238.612		530.357.165	538.474.245	547.599.528	558.683.786
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	206.471.015	139.648.638	184.238.612		530.357.165	538.474.245	547.599.528	558.683.786
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		47.363.388	179.938.612		227.302.000	231.066.732	236.298.985	240.491.715

SK No 154273 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3503	Penegakan Hukum dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		22.103.230	178.939.012		201.100.000	202.049.100	212.951.101	217.525.042
7111	Manajemen Mutu		22.103.230			22.103.230	22.548.294	22.948.948	23.421.457
032.13.WA	**Program Dukungan Manajemen**	206.471.015	97.266.150	4.300.000		308.037.165	307.488.513	312.300.543	318.232.081
7112	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Unit Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	206.471.015	93.216.150	4.300.000		303.987.165	307.488.513	312.300.543	318.232.081
	JUMLAH RM	2.331.847.894	8.777.474.067	1.232.958.497		12.341.576.662	12.536.302.451	12.755.159.210	13.020.598.531
	JUMLAH PNBP		55.773.426	19.153.697		74.926.423	75.978.958	77.142.730	78.597.906
	JUMLAH BLU		209.336.137	8.206.541		217.542.678	221.439.152	225.818.285	231.130.103
	JUMLAH PLN		150.877.440	99.322.560		250.000.000	253.831.565	258.149.067	263.588.124
	JUMLAH HLN		25.488.000	2.512.000		28.000.000	28.396.864	28.778.629	29.278.575
	JUMLAH SBSN			87.954.402		87.954.402	89.589.123	91.640.781	94.039.294
	TOTAL JUMLAH	2.331.847.894	9.218.748.068	1.450.104.537		13.000.000.000	13.205.619.841	13.438.753.830	13.716.998.531

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	136,073,671	340,920,774	10,220,000		485,214,445	492,857,120	501,448,021	511,066,017
035.01	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	136,073,671	340,920,774	10,220,000		485,214,445	492,857,120	501,448,021	511,066,017
04	FUNGSI EKONOMI	136,073,671	340,920,774	10,220,000		485,214,445	492,857,120	501,448,821	511,066,017
04.60	EKONOMI LAINNYA	136,073,671	340,920,774	10,220,000		485,214,445	492,857,120	501,448,821	511,066,017
035.01.GL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		217,442,208			217,442,208	218,870,184	222,589,885	225,869,568
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4543	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis		2.662.500			2.662.500	2.712.390	2.768.488	2.836.508
4544	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		2.500.000			2.500.000	2.540.064	2.585.111	2.639.741
4545	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan		3.500.000			3.500.000	3.534.540	3.573.376	3.620.464
4546	Koordinasi Kebijakan Percepatan Investasi Dan Hilirisasi		3.000.000			3.000.000	3.058.239	3.123.722	3.203.115
4550	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja		5.000.000			5.000.000	5.099.197	5.210.713	5.345.923
5032	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi		37.155.708			37.155.708	37.515.918	37.920.855	38.411.827
5266	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis		12.500.000			12.500.000	12.736.564	13.002.514	13.324.963
6920	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Umum Pengembangan dan Pembentukan KEK		3.300.000			3.300.000	3.309.525	3.320.235	3.333.220
6921	Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK		3.612.500			3.612.500	3.612.500	3.612.500	3.612.500
6922	Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerjasama, Komunikasi dan Sistem Informasi KEK		3.300.000			3.300.000	3.346.786	3.399.384	3.463.155
6923	Peningkatan Pelayanan Investasi dan Pengendalian pembangunan KEK		7.545.000			7.545.000	7.557.832	7.572.263	7.589.761
6924	Koordinasi Peraturan Perundang-undangan, Hukum, Organisasi Ketatalaksanaan dan Kepegawaian		3.212.500			3.212.500	3.212.500	3.212.500	3.212.500
7701	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata		3.500.000			3.500.000	3.538.628	3.582.056	3.634.711
7702	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka		3.500.000			3.500.000	3.555.008	3.616.856	3.691.844
7703	Peningkatan Layanan Koordinasi Kebijakan Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata		4.000.000			4.000.000	4.068.609	4.145.743	4.239.265
7704	Peningkatan Layanan Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital		4.000.000			4.000.000	4.074.127	4.157.476	4.258.523
7706	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi		2.500.000			2.500.000	2.543.968	2.593.415	2.653.356
7707	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara		3.000.000			3.000.000	3.048.462	3.102.952	3.169.013
7708	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi		2.500.000			2.500.000	2.545.659	2.597.002	2.659.254

SK No 154270 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
035.01.WA	Program Dukungan Manajemen	134.073.671	128.478.556	10.220.000		287.772.237	272.888.868	278.548.836	286.956.464
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	134.073.671	343.920.774	10.220.000		488.214.445	482.857.120	501.448.821	511.868.017
	TOTAL JUMLAH	134.073.671	343.920.774	10.220.000		488.214.445	482.857.120	501.448.821	511.868.017

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 030

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
030	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	85.689.547	136.618.385	16.500.000		236.706.832	240.528.676	244.824.971	250.092.824
030.01	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	85.689.547	135.618.385	16.500.000		236.706.832	240.528.676	244.824.971	250.092.824
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	85.689.547	135.618.385	16.500.000		236.706.832	240.528.676	244.824.971	250.092.824
01.00	PELAYANAN UMUM	85.689.547	136.618.385	16.500.000		236.706.832	240.528.676	244.824.971	250.092.824
030.01.GL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		50.146.820			50.146.820	50.677.236	51.562.868	61.661.305
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
030.01.WA	Program Dukungan Manajemen	85.689.547	85.478.765	16.500.000		186.563.312	189.852.441	193.762.273	188.381.624
6333	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	85.689.547	85.478.765	16.500.000		186.563.312	189.852.441	193.762.273	188.381.624
	JUMLAH RM	85.689.547	136.618.385	16.500.000		236.706.832	240.528.676	244.824.971	250.092.824
	TOTAL JUMLAH	85.689.547	135.618.385	16.500.000		236.706.832	240.528.676	244.824.971	250.092.824

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 dari

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 04

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	81.431.444	185.661.718	3.317.898		280.311.060	286.872.411	292.124.189	298.704.362
041.01	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	81.431.444	185.661.718	3.317.898		280.311.060	286.872.411	292.124.189	298.704.362
04	FUNGSI EKONOMI	81.431.444	185.661.718	3.317.898		280.311.060	286.872.411	292.124.189	298.704.362
04.90	EKONOMI LAINNYA	81.431.444	185.661.718	3.317.898		280.311.060	286.872.411	292.124.189	298.704.362
041.01.B	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN		91.187.426	1.317.898		92.486.324	94.121.769	95.961.427	98.181.882
4B.7	Pengembangan BUMN Sektor Industri Energi, Material dan Jasa		648.264			648.264	662.624	676.957	694.228
4B.8	Pengembangan BUMN Sektor Industri Manufaktur dan Jasa		840.936			840.936	859.234	877.227	899.157
4B.9	Pengembangan BUMN Sektor Industri Keuangan		647.264			647.264	661.352	675.557	692.946
4B.A	Pengembangan BUMN Sektor Industri Pariwisata		647.264			647.264	661.352	675.557	692.946
4B.B	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Konstruksi		1.372.523			1.372.523	1.402.435	1.432.365	1.467.486
4B.C	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Lainnya		994.264			994.264	1.015.944	1.036.644	1.061.941
4B.D	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun		648.264			648.264	662.384	676.557	693.228
4B.E	Pengembangan BUMN Sektor Industri Perkeretaapian dan Pelabuhan		1.111.100			1.111.100	1.135.321	1.158.421	1.186.743
4B.G	Pengembangan BUMN Sektor Jasa Pendukung Pertambangan		647.264			647.264	661.352	675.557	692.111
4B.H	Pengawasan Pengelolaan Aset BUMN		1.297.534			1.297.534	1.325.850	1.354.122	1.388.522
4B.I	Pengawasan Kepatuhan Hukum BUMN		2.250.000			2.250.000	2.299.107	2.348.192	2.407.896
4B.J	Pengawasan Tata Kelola dan Pengelolaan Pengetahuan Internal BUMN		1.620.264			1.620.264	1.655.612	1.690.922	1.733.974
4B.K	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Kawasan BUMN		14.259.523			14.259.523	14.570.835	14.881.745	15.260.775
4B.M	Pengembangan BUMN Sektor Industri Perbankan dan Jasa		1.296.264			1.296.264	1.324.564	1.352.864	1.387.392
4B.N	Pengelolaan Aset BUMN		5.051.793			5.051.793	5.161.971	5.272.147	5.406.687
4B.O	Pengembangan Teknologi dan Layanan BUMN serta Industri Pendukung		41.974.510	1.317.898		43.292.408	44.236.174	45.179.924	46.331.974

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LIV

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 041

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	91.431.444	186.581.718	3.317.898		281.331.060	285.872.411	292.124.199	299.704.382
041.01	Program Kepemimpinan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	91.431.444	104.386.292	2.000.000		197.825.736	201.780.552	206.162.772	211.512.370
041.01.WA	Program Dukungan Manajemen	91.431.444	104.386.292	2.000.000		197.825.736	201.780.552	206.162.772	211.512.370
041.01.WA.2027	Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan, Dukungan, dan Koordinasi	91.431.444	15.355.603			106.787.047	98.650.283	101.206.010	104.152.313
041.01.WA.2028	Pelaksanaan Layanan dan Pelaksanaan Kerja Sama Tanggung Jawab Administrasi dan Keuangan		76.211.117	1.400.111		84.211.228	92.011.541	94.211.447	97.111.111
041.01.WA.2029	Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset dan Barang Milik Negara		5.171.572			5.171.572	5.118.728	5.118.728	5.118.728
041.01.WA.2030	Penyelenggaraan Layanan Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis Lainnya		19.648.347	150.000		19.798.347	20.150.241	20.136.867	21.172.359
	JUMLAH RM	91.431.444	186.581.718	3.317.898		281.331.060	285.872.411	292.124.199	299.704.382
	TOTAL JUMLAH	91.431.444	186.581.718	3.317.898		281.331.060	285.872.411	292.124.199	299.704.382

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 047

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Satuan : Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	102.039.166	112.073.651			214.112.817	219.306.602	223.021.424	228.737.999
047.01	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	102.039.166	112.073.651			214.112.817	219.306.602	223.021.424	228.737.999
11	FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL	102.039.166	112.073.651			214.112.817	219.306.602	223.021.424	228.737.999
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	99.078.034	74.737.583			173.815.617	177.184.884	180.896.046	185.604.913
047.01.WA	Program Dukungan Manajemen	99.078.034	41.637.583			140.715.617	143.488.428	146.501.377	150.286.198
2764	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2765	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
047.01.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak		33.100.000			33.100.000	33.766.456	34.484.718	35.339.775
2767	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2768	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2769	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2770	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2771	[illegible]		2.700.000			2.700.000	2.753.520	2.812.200	2.885.760
2772	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2773	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2774	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA	2.961.132	37.336.068			40.298.180	41.111.708	42.026.228	43.133.086
047.01.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak		35.970.000			35.970.000	36.686.676	37.449.858	38.399.583
2775	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2776	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

112

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 047

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(DALAM RUPIAH)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
2811	Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan		8.400.000			8.400.000	8.305.620	8.793.372	8.981.129
2812	Pemenuhan Hak Sipil Perempuan dan Perlindungan Anak		2.447.000			2.447.000	2.447.681	2.591.111	2.646.210
2813	Pemenuhan Hak Anak dan Kesejahteraan Keluarga		2.172.000			2.172.000	2.172.617	2.300.221	2.351.140
6571	Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak		1.920.000			1.920.000	1.904.211	1.997.001	1.770.504
6572	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak		470.000			470.000	456.445	348.457	451.121
6573	Layanan Profesional dan Pelaksanaan Kebijakan		15.300.000			15.300.000	15.750.215	15.948.332	15.949.215
047.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	2.960.132	1.369.060			4.329.190	4.445.122	4.575.804	4.733.490
7074	Penyelenggaraan Kesekretariatan ARKI	2.470.132	1.369.060			3.839.192	3.845.702	3.975.804	4.233.490
	JUMLAH RM	**102.038.166**	**112.073.681**			**214.112.847**	**218.306.602**	**223.021.424**	**228.737.899**
	TOTAL JUMLAH	**102.038.166**	**112.073.681**			**214.112.847**	**218.306.602**	**223.021.424**	**228.737.899**

SK No 154305 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 048

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	156.593.944	187.602.108	46.884.075		392.980.127	399.302.026	406.408.778	415.025.582
048.01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	156.593.944	187.602.108	49.884.075		392.980.127	399.302.026	406.408.778	415.025.582
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	156.593.944	187.602.108	49.884.075		392.980.127	399.302.026	406.408.778	415.025.582
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	156.593.944	187.602.108	49.884.075		392.980.127	399.302.026	406.408.778	415.025.582
048.01.QD	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN		94.970.000	44.550.000		139.520.000	141.209.456	143.108.245	145.411.791
4932	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik		690.000	4.450.000		5.140.000	5.370.000	5.490.000	5.700.000
5181	Penyusunan Kebijakan ASN di Bidang		11.270.000			11.270.000	11.770.000	11.970.000	12.170.000
6151	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Evaluasi Pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Tata Laksana		15.657.000			15.657.000	16.177.000	16.712.000	17.211.000
6152	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana		13.197.044			13.197.044	13.784.000	13.466.000	13.974.000
6154	Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan Pengadaan ASN		14.000.000	41.500.000		55.500.000	58.000.000	58.440.000	61.000.000
6157	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Layanan Pelayanan Publik		13.000.000	1.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
7205	Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah		23.727.045	300.000		24.727.045	24.727.045	24.727.045	24.727.045
048.01.WA	Program Dukungan Manajemen	156.593.944	92.632.108	5.134.075		253.460.127	258.092.541	263.300.533	269.613.791
2515	Pelaksanaan Data dan Pelaporan Kepatuhan PAT dan PS		793.000			793.000	779.412	794.601	813.933
5151	Pengelolaan Keuangan Negara		874.000			874.000	898.000	914.000	931.000
5171	Pengelolaan Komunikasi Informasi Publik		4.791.064	134.000		4.925.064	5.011.129	5.107.089	5.208.711
5172	Pengelolaan Keuangan Umum	156.593.944	50.411.044	1.000.000		208.004.988	212.608.000	216.917.229	221.707.417
5181	Pengelolaan Kepegawaian Internal		5.241.000	4.000.075		9.241.075	9.478.000	9.671.000	9.871.000
5182	Pengelolaan Organisasi SDM		11.054.000			11.054.000	11.129.512	11.259.613	11.459.460
5183	Pengelolaan Tata Laksana dan Pengembangan Sistem		5.668.000			5.668.000	5.808.000	5.936.000	6.102.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- [ ] -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 046

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(RINCIAN DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	JUMLAH BM	156.580.844	187.602.108	48.684.075		392.840.127	398.302.028	406.408.776	415.026.582
	TOTAL JUMLAH	156.580.844	187.602.108	48.684.075		392.840.127	398.302.028	406.408.776	415.026.582

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 050

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN INTELIJEN NEGARA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.127.973.393	7.918.814.551	7.623.212.056		16.670.000.000	16.960.821.998	17.287.731.278	17.664.103.089
050.01	Badan Intelijen Negara	1.127.973.393	7.918.814.551	7.623.212.056		16.670.000.000	16.960.821.998	17.287.731.278	17.664.103.089
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.127.973.393	7.918.814.551	7.623.212.056		16.670.000.000	16.960.821.998	17.287.731.278	17.664.103.089
03.50	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	1.127.973.393	7.918.814.551	7.623.212.056		16.670.000.000	16.960.821.998	17.287.731.278	17.664.103.089
050.01.BA	Program Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara		5.672.102.134	8.322.782.056		13.994.884.190	13.235.112.592	13.506.172.583	13.832.615.880
2554	Operasional Intelijen		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2555	Operasional Diplomasi		2.035.022.203			2.035.022.203	2.077.721.505	2.009.909.497	2.047.520.651
2556	Operasional Siber		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2557	Operasional Sandi		420.193.814			420.193.814	428.135.203	433.286.330	441.221.024
2558	Operasional Teknologi		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2559	Operasional Komunikasi dan Informasi		229.103.371			229.103.371	233.972.197	239.979.341	244.853.020
2560	Operasional Siber		197.371.214	800.000.000		1.047.077.204	1.069.221.439	1.092.551.244	1.093.450.758
2561	Analisis Intelijen		140.435.107			140.435.107	143.403.100	146.535.357	147.620.126
2562	Operasional Intelijen Lainnya		146.412.424			146.412.424	149.504.535	152.764.911	153.913.071
050.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.127.973.393	1.246.712.417	1.300.450.000		3.675.135.810	3.725.709.407	3.782.560.695	3.831.487.209
2564	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2565	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		180.164.957	120.000		180.284.957	137.939.457	141.781.273	145.650.046
2566	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		24.967.930			24.967.930	24.994.700	25.405.200	25.467.029
	JUMLAH RM	1.127.973.393	7.918.814.551	6.928.348.220		13.975.136.164	14.213.608.243	14.490.337.247	14.809.961.693
	JUMLAH PLN			2.694.863.836		2.694.863.836	2.747.312.755	2.807.394.031	2.880.241.486
	TOTAL JUMLAH	1.127.973.393	7.918.814.551	7.623.212.056		16.670.000.000	16.960.821.998	17.287.731.278	17.664.103.089

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
051	**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**
051.01	**Badan Siber dan Sandi Negara**	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**298.652.690**	**442.104.937**	**2.754.789.453**		**3.495.547.080**	**3.552.195.309**	**3.615.872.859**	**3.693.080.797**
051.01.BO	**Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara**		**305.901.665**	**2.754.789.453**		**3.060.691.118**	**3.109.130.717**	**3.163.581.019**	**3.229.601.066**
3121	Pengembangan SDM Keamanan Siber dan Sandi		9.300.889			9.300.889	9.300.889	9.300.889	9.300.889
3123	Pendidikan Profesional di Bidang Siber dan Sandi		25.470.484			25.470.484	25.470.484	25.470.484	25.470.484
3124	Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik		11.660.559			11.660.559	11.831.769	12.024.224	12.257.572
6653	Perumusan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi		5.342.987			5.342.987	5.342.987	5.342.987	5.342.987
6654	Penyelenggaraan Operasi Keamanan Siber dan Sandi		14.121.611	2.749.642.194		2.763.763.805	2.810.270.855	2.862.548.801	2.925.934.903
6655	Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		14.344.894			14.344.894	14.344.894	14.344.894	14.344.894
6656	Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Sandi Sektor Perekonomian		13.981.782			13.981.782	13.981.782	13.981.782	13.981.782
6895	Pemeliharaan Peralatan Keamanan Siber dan Sandi		208.384.427	5.147.259		213.531.686	215.293.025	217.272.926	219.673.523
6994	Penyelenggaraan Sertifikasi Teknologi Keamanan Siber dan Sandi		3.294.032			3.294.032	3.294.032	3.294.032	3.294.032
051.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**298.652.690**	**136.203.272**			**434.855.962**	**443.064.592**	**452.291.840**	**463.479.731**
3075	Penyelenggaraan Perencanaan dan Keuangan	298.652.690	6.898.160			305.550.850	311.524.617	318.239.665	326.381.545
3076	Penyelenggaraan Organisasi dan SDM		4.690.000			4.690.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
3077	Penyelenggaraan Hukum dan Komunikasi Publik		14.408.676			14.408.676	14.609.006	14.834.205	15.107.264
3078	Penyelenggaraan Dukungan Administratif Bidang Kerumahtanggaan, Pengelolaan BMN, dan Layanan Pengadaan		89.933.548			89.933.548	91.675.866	93.634.390	96.009.069
3079	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Siber dan Sandi Negara		1.264.090			1.264.090	1.264.090	1.264.090	1.264.090

SK No 154301 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 051

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
015	Pendeteksian dan Lalu lintas Informasi Kriptografi		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7455	Pengembangan Cyber Security Perbankan dan Transaksi Elektronik		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	286.852.890	442.104.837	410.892.248		1.161.559.975	1.181.701.056	1.178.100.869	1.186.822.485
	JUMLAH PLN			2.343.907.204		2.343.907.204	2.289.894.250	2.442.772.200	2.506.158.302
	TOTAL JUMLAH	286.852.890	442.104.837	2.754.799.453		3.485.547.080	3.652.195.306	3.616.872.859	3.693.080.787

SK No 154300 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 264

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	BADAN PUSAT STATISTIK	3.442.739.855	3.805.732.696	178.512.696		6.926.985.046	7.054.832.085	7.188.583.256	7.372.902.804
264.01	Badan Pusat Statistik	3.442.739.855	3.805.732.696	178.512.696		6.926.985.046	7.054.832.085	7.188.583.256	7.372.902.804
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	3.442.739.855	3.805.732.696	178.512.696		6.926.985.046	7.054.832.085	7.188.583.256	7.372.902.804
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	3.442.739.855	3.805.732.696	178.512.696		6.926.985.046	7.054.832.085	7.188.583.256	7.372.902.804
264.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik		2.986.456.464	148.966.881		3.135.423.345	3.193.340.823	3.280.741.401	3.342.454.442
2936	Penyelenggaraan Sensus Statistik		46.233.807	33.033		46.270.837	47.105.487	48.045.576	49.170.491
2937	Penyelenggaraan Penyebarluasan Diseminasi Informasi Statistik		24.137.774	341.000		24.478.774	24.935.746	24.934.746	25.974.491
2938	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Sektoral Lainnya		11.915.471			11.915.471	11.904.991	12.175.307	12.457.307
2939	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Sektoral		6.756.211			6.756.211	6.770.152	6.917.152	7.077.152
2940	Penyelenggaraan Manajemen Pengelolaan Data Statistik		1.715.595			1.715.595	1.747.953	1.772.470	1.870.509
2941	Penyelenggaraan Sensus Ekonomi Statistik		11.429.607	148.241.881		159.671.488	160.809.923	164.045.401	168.610.332
2942	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Distribusi		2.141.571.934	70.000		2.141.641.934	2.192.570.371	2.237.920.811	2.296.842.264
2943	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Harga		123.643.971			123.643.971	123.679.477	126.611.443	129.861.243
2944	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Industri Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi		41.946.695			41.946.695	41.[illegible]	43.[illegible]	44.[illegible]
2945	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Angkutan dan Pariwisata		75.502.172			75.502.172	80.117.666	81.873.317	84.013.670
2946	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Harga Antar Daerah		247.313.770			247.313.770	253.009.684	258.461.741	265.067.483
2947	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Sektoral Lainnya		41.254.641			41.254.641	41.824.884	41.824.884	41.824.884
2948	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Perempuan		57.177.479			57.177.479	58.498.892	59.753.924	61.287.924
2949	Penyelenggaraan Pengembangan Statistik Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Kebudayaan		23.874.302			23.874.302	24.345.494	24.878.387	25.523.414

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

119

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 054

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PUSAT STATISTIK

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.142.739.856	818.278.201	31.545.816		3.793.861.701	3.861.481.272	3.937.886.866	4.030.448.362
054.01.WA.997	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Program dan Anggaran		16.811.000			16.811.000	17.151.156	17.501.339	17.917.514
054.01.WA.998	Pelayanan Public Bidang Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kerja Sama		6.097.643			6.097.643	6.097.643	6.097.643	6.097.643
054.01.WA.999	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kerja Sama		15.776.400			15.776.400	15.776.400	15.776.400	15.776.400
054.01.WA.EBA	Layanan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Kerja Sama	646.5[illegible]11	75.758.615			722.[illegible]126	[illegible]	[illegible]	[illegible]
054.01.WA.EBB	Layanan Manajemen Keuangan		71.145.478	11.[illegible]5		71.[illegible]3	72.[illegible]780	73.[illegible]21	74.[illegible]75
054.01.WA.EBC	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Pusat	2.496.697.328	607.497.950	19.800.150		3.123.995.428	3.190.[illegible]050	3.258.[illegible]10	3.333.[illegible]31
054.01.WA.EBD	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan Lainnya BPS	19.207.730	43.903.254			63.[illegible]984	64.[illegible]347	64.[illegible]405	64.[illegible]595
054.01.WA.EBE	Penyelenggaraan Layanan Teknis Pengelolaan [illegible]	27.[illegible]4	21.[illegible]27	4[illegible]4		49.[illegible]4	4[illegible]43	44.[illegible]61	45.[illegible]41
054.01.WA.EBF	Pelaksanaan Sistem Pengadaan Aktivitas Sub Prioritas Nasional		1.[illegible]6			1.[illegible]6	1.[illegible]63	1.[illegible]63	1.[illegible]63
054.01.WA.EBG	Pelaksanaan Sistem Pengadaan Aktivitas Sub Prioritas Nasional I		1.114.[illegible]4			1.114.[illegible]4	1.114.[illegible]4	1.114.[illegible]4	1.114.[illegible]4
054.01.WA.EBH	Pelaksanaan Sistem Pengadaan Aktivitas Sub Prioritas Nasional II		1.[illegible]41			1.[illegible]41	1.[illegible]41	1.[illegible]41	1.[illegible]41
	JUMLAH RM	3.142.739.855	3.594.391.675	177.829.903		6.914.960.433	7.042.888.120	7.196.067.099	7.360.036.413
	JUMLAH PNBP		11.341.618	682.784		12.024.413	12.282.876	12.531.167	12.868.321
	TOTAL JUMLAH	3.142.739.855	3.605.732.685	178.512.686		6.926.985.048	7.054.582.085	7.188.586.256	7.372.902.804

SK No 154298 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

[illegible]

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	819.424.287	1.908.927.602	68.648.131		2.687.000.000	2.813.999.816	2.833.109.568	2.856.279.778
055.01	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	819.424.287	1.908.927.602	68.648.131		2.687.000.000	2.813.999.816	2.833.109.568	2.856.279.778
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	819.424.287	1.908.927.602	68.648.131		2.597.000.000	2.813.999.816	2.833.109.568	2.856.279.778
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	819.424.287	1.908.927.602	68.648.131		2.597.000.000	2.813.999.816	2.833.109.568	2.856.279.778
055.01.GK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional		1.084.684.569	4.602.028		1.089.286.597	1.078.773.468	1.081.581.869	1.105.856.303
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6063	Penyelenggaraan Tata Kelola Kesekretariatan		38.250.302			38.250.302	39.021.897	38.827.577	39.169.237
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7255	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Keluarga Berencana		15.150.302			15.150.302	15.255.330	15.521.251	15.791.595
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7256	Perencanaan Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri, Aparatur Negara, Pertahanan dan Keamanan		22.250.302			22.250.302	22.735.472	22.256.021	23.049.434
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7272	Fasilitasi Pemanfaatan Hasil Perencanaan Pembangunan		97.253.709			101.303.709	119.033.752	21.092.782	122.529.035
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
055.01.WP	Program Dukungan Manajemen	819.424.287	244.243.033	64.046.103		1.527.713.403	1.534.226.357	1.541.547.599	1.550.424.475
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1251	Lembaga Administrasi Negara		7.000.000			7.000.000	8.400.000	9.240.000	9.702.000
1254	Badan Kepegawaian Negara		14.250.000			14.250.000	16.200.000	17.820.000	18.711.000
2202	Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan	618.424.287	699.190.502	42.649.078		1.360.263.867	1.360.263.867	1.496.290.254	1.571.104.767
4251	Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah		24.000.000			24.000.000	27.600.000	30.360.000	31.878.000
4254	Program Pengembangan Sistem Manajemen		39.000.000			39.000.000	51.480.000	56.628.000	59.459.400
4255	Program Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Kepegawaian Negara		30.000.000	5.000.000		35.000.000	40.250.000	44.275.000	46.488.750
5251	Program Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan		18.000.000	1.000.000		19.000.000	21.850.000	24.035.000	25.236.750
	JUMLAH RM	618.424.287	1.702.227.827	67.649.101		2.389.296.035	2.493.888.738	2.629.601.883	2.440.528.387
	JUMLAH PLN		29.425.439			29.425.439	29.834.304	27.400.109	28.025.544
	JUMLAH HLN		180.274.536	1.000.000		181.279.536	153.128.773	165.207.476	157.727.567
	TOTAL JUMLAH	618.424.287	1.908.927.802	68.649.101		2.597.000.000	2.676.851.815	2.822.209.468	2.626.279.778



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.076.991.527	3.016.751.668	406.691.772		9.499.344.965	9.671.303.314	9.071.165.916	10.109.776.513
056.01	Sekretariat Jenderal	5.076.991.527	3.631.457.745	307.007.121		8.914.456.393	9.080.586.098	8.267.398.124	8.469.896.247
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	5.076.991.527	3.631.457.745	307.007.121		8.914.456.393	9.080.586.098	8.267.398.124	8.469.896.247
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	5.076.991.527	3.631.457.745	307.007.121		8.914.456.393	9.080.586.098	8.267.398.124	8.469.896.247
056.01 QS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	1.808.344.969	810.390.021			1.918.735.001	1.950.260.042	1.954.609.940	2.026.262.205
6211	Pengelolaan Kinerja dan Administrasi Umum Kementerian Negara/Lembaga	1.101.920	11.105.101			12.207.021	12.717.716	13.257.015	13.772.817
6212	Pelaksanaan Urusan Hukum	1.906.240				1.906.240	1.983.144	2.075.485	2.163.276
6213	Pengelolaan Data Pertanahan Nasional	1.049.336.157				1.049.336.157	1.092.816.516	1.138.492.540	1.187.260.332
6214	Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan	56.949.054				56.949.054	59.307.533	61.801.071	64.451.229
6215	Penyelenggaraan Kesekretariatan Badan	11.441.601				11.441.601	11.915.451	12.415.131	12.945.451
6216	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat Kementerian/Lembaga	107.650.616				107.650.616	112.121.233	116.819.343	121.821.726
6217	Pengelolaan Kasus Pertanahan Strategis dan Penanganan Konflik Pertanahan	39.147.044				39.147.044	40.772.415	42.477.017	44.294.397
6218	Pengelolaan Pengawasan Internal Lingkup Kementerian Negara/Lembaga	24.511.941				24.511.941	25.529.577	26.597.145	27.735.111
6219	Pengelolaan Tanah dan Ekonomi Pertanahan	306.547	8.583.219			8.889.766	9.258.536	9.645.135	10.057.705
6220	Pengembangan Kompetensi Teknis dan Pengendalian Pertanahan	3.400.209				3.400.209	3.541.602	3.689.484	3.847.326
6221	Pengelolaan dan Pelaksanaan Pertanahan	1.101.920				1.101.920	1.147.703	1.195.594	1.246.676
6222	Pemeliharaan Pengelolaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5.511.016				5.511.016	5.740.211	5.979.970	6.235.376
6223	Pengelolaan dan Pengawasan Aset Pertanahan	9.631.928				9.631.928	10.032.826	10.451.702	10.898.977
6224	Pengelolaan Pengadaan Tanah	21.630.240				21.630.240	22.531.845	23.473.648	24.475.206
6225	Pengelolaan Aset Pertanahan	43.921.920				43.921.920	45.749.762	47.657.163	49.687.452
6226	Pengelolaan Tanah Negara dan Ruang Bawah Tanah	439.911.840				439.911.840	458.210.160	477.341.908	497.697.019

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
056.01 IG	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		33.629.877	18.389.711		51.971.588	62.997.613	64.158.487	65.669.439
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
056.01 WA	Program Dukungan Manajemen	3.075.991.827	1.688.381.753	176.263.382		4.940.746.704	7.077.338.405	7.238.632.887	7.412.067.809
4201	Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan dan Aparatur Mahkamah		69.224.260	1.913.200		71.137.460	67.244.042	69.093.091	69.974.070
5017	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN	2.101.097.512	87.450.700	617.0		2.189.548.212	2.035.430.355	2.084.015.698	2.115.280.277
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5211	Penyelenggaraan Administrasi Umum		1.184.[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5222	Pengembangan Data dan Informasi		140.033.500	34.900.[illegible]		203.[illegible]	241.472.333	249.825.423	259.[illegible]
5223	Koordinasi Kebijakan Hukum yang Berkaitan dengan Hak atas Tanah dan Hukum		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5229	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan STPN	22.700.358	18.997.214	1.509.189		43.206.761	44.109.701	45.074.412	46.244.630
5237	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Umum)	2.043.193.957	1.302.032.948	68.213.269		3.413.440.174	4.907.288.319	4.963.265.613	5.003.280.127
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
056.02	Inspektorat Jenderal		27.253.171	946.500		28.199.671	28.700.539	29.270.437	29.961.432
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		27.253.171	946.500		28.199.671	28.700.539	29.270.437	29.961.432
05 05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		27.253.171	946.500		28.199.671	28.700.539	29.270.437	29.961.432
056.02 WA	Program Dukungan Manajemen		27.253.171	946.500		28.199.671	28.700.539	29.270.437	29.961.432

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 036

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0087	Pengembangan Wilayah dan Penyelesaian Masalah Kebijakan Strategis		16.043.506			16.043.506	16.543.312	16.003.303	17.003.000
056.03	Direktorat Jenderal Tata Ruang		187.766.351	16.500.000		204.266.351	206.177.497	208.226.940	210.930.895
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		187.766.351	16.500.000		204.266.351	206.177.497	208.226.940	210.930.895
05 05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		187.766.351	16.500.000		204.266.351	206.177.497	208.226.940	210.930.895
056.03 IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		162.771.734	16.500.000		179.271.734	181.019.958	182.985.260	185.358.158
5039	Penetapan Tata Ruang Wilayah		6.307.500	16.500.000		22.807.500	22.807.500	22.807.500	22.807.500
5040	Sosialisasi Tata Ruang dan Pola Ruang		1.860.067			1.860.067	1.860.067	1.860.067	1.860.067
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
056.03 WA	Program Dukungan Manajemen		24.994.617			24.994.617	26.157.538	26.240.680	25.562.737
5016	Dukungan Manajemen Direktorat TP		24.994.617			24.994.617	26.157.538	26.240.680	25.562.737
056.04	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang		60.313.817	23.182.353		83.496.970	84.729.189	86.109.150	87.785.980
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		60.313.817	23.182.353		83.496.970	84.729.189	86.109.150	87.785.980
05 05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		60.313.817	23.182.353		83.496.970	84.729.189	86.109.150	87.785.980
056.04 CS	Program Pengukuran dan Pelayanan Pertanahan		49.762.357	14.065.991		63.828.348	64.668.286	66.612.886	66.757.844
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5045	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral		30.647.304			30.647.304	31.504.423	32.254.713	33.058.672
056.04 WA	Program Dukungan Manajemen		10.651.260	9.116.362		19.667.622	20.057.823	20.466.464	21.028.316
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
056.05	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah		23.818.755	330.000		24.249.785	24.724.725	25.288.726	25.906.229

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

125

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 066
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		23.918.785	330.000		24.248.785	24.724.725	25.258.727	25.906.229
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		23.918.785	330.000		24.248.785	24.724.725	25.258.727	25.906.229
066.05.QS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		16.328.886			16.328.886	16.648.612	17.007.869	17.441.808
5049	Penetapan Hak Tanah dan Ruang		3.224.734			3.224.734	3.264.307	3.140.342	3.151.799
5051	Pemeliharaan Tanah dan Ruang Pasca Hak		5.414.251			5.414.251	5.617.705	5.814.301	5.951.197
7557	Pengelolaan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan		2.127.737			2.127.737	2.181.205	2.218.271	2.254.456
7577	Pengaturan Tanah Terlantar, Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		5.161.164			5.161.164	5.401.117	5.834.955	6.084.344
066.05.WA	Program Dukungan Manajemen		7.590.870	330.000		7.920.870	8.076.213	8.250.858	8.462.823
5048	Dukungan Manajemen dan Operasional Pertanahan		7.590.870	330.000		7.920.870	8.076.213	8.250.858	8.462.823
066.06	Direktorat Jenderal Penataan Agraria		26.700.009	777.276		26.477.284	28.975.388	27.535.374	28.214.381
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		26.700.009	777.276		26.477.284	28.975.388	27.535.374	28.214.381
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		26.700.009	777.275		26.477.284	28.975.388	27.535.374	28.214.381
066.06.QS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		18.647.917	811.975		19.459.892	19.538.482	20.256.041	20.762.399
5051	Penanganan Akses Reforma Agraria (Pasca Reform)		7.472.801	190.000		7.472.801	7.630.730	7.797.471	7.945.010
5052	Penanganan Konflik Tanah		7.074.446	97.975		7.441.810	8.000.000	8.181.000	8.471.000
5057	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		4.291.341			4.291.341	4.647.652	4.757.917	4.846.511
066.06.IG	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		1.979.681			1.979.681	2.008.729	2.036.828	2.073.644
7575	Info Tata Guna Tanah		1.979.681			1.979.681	2.008.729	2.036.828	2.073.644
066.06.WA	Program Dukungan Manajemen		4.872.831	157.800		5.030.481	5.180.216	5.242.407	5.378.441
5053	Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal		4.872.831	157.800		5.030.481	5.180.216	5.242.407	5.378.441
066.07	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan		17.577.072	65.366.701		72.943.773	74.390.925	76.013.735	77.999.340

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		17.677.072	55.368.701		72.843.773	74.390.928	76.017.775	77.980.340
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		17.677.072	55.368.701		72.843.773	74.390.928	76.017.775	77.980.340
056.07.GS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		5.056.668	54.446.982		82.602.828	83.742.653	85.138.636	86.326.842
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
056.07.WA	Program Dukungan Manajemen		9.620.406	820.739		10.441.145	10.648.275	10.881.139	11.103.482
[illegible]	[illegible]		9.620.406	820.739		10.441.145	10.648.275	10.881.139	11.103.482
056.08	Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Penetapan Tanah dan Ruang		80.388.745			80.388.745	82.158.574	84.160.125	86.583.042
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		80.388.745			80.388.745	82.158.574	84.160.125	86.583.042
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		80.388.745			80.388.745	82.158.574	84.160.125	86.583.042
056.08.GS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		24.898.513			24.898.513	26.894.857	28.061.988	28.727.389
[illegible]	[illegible]		13.000.513			13.000.513	14.220.782	14.913.863	15.726.882
[illegible]	[illegible]		11.898.000			11.898.000	12.674.075	13.148.125	13.000.507
056.08.IK	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		48.894.872			48.894.872	49.348.814	50.417.218	51.715.085
[illegible]	[illegible]		25.894.872			25.894.872	27.715.935	27.972.029	28.956.257
[illegible]	[illegible]		23.000.000			23.000.000	21.632.879	22.445.189	22.758.828
056.08.WA	Program Dukungan Manajemen		18.875.560			18.875.560	17.312.313	17.680.918	18.149.367
[illegible]	[illegible]		18.875.560			18.875.560	17.312.313	17.680.918	18.149.367
056.09	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan		22.777.838	816.807		23.594.645	24.184.562	24.696.024	25.333.789
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		22.777.838	816.807		23.594.645	24.184.562	24.696.024	25.333.789

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

127

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 035
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
035.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		22.777.636	916.907		23.694.543	24.164.582	24.693.024	25.233.749
035.09.GS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan		16.021.701			16.021.701	16.338.635	16.695.870	17.130.110
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
035.[illegible]	Dukungan Substansi Pertanahan		3.379.231			3.379.231	4.098.470	4.147.352	4.224.644
035.[illegible]	Dukungan Petugas Pertanahan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
035.09.WA	Program Dukungan Manajemen		6.755.935	916.907		7.672.842	7.825.947	7.996.154	8.203.529
035.[illegible]	Dukungan Manajemen [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
035.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		29.629.685	1.570.915		31.200.480	31.763.864	32.397.239	33.165.211
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		29.629.685	1.570.915		31.200.480	31.763.864	32.397.239	33.165.211
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN		29.629.685	1.570.915		31.200.480	31.763.864	32.397.239	33.165.211
035.10.WA	Program Dukungan Manajemen		29.629.685	1.570.915		31.200.480	31.763.864	32.397.239	33.165.211
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen dan Kepemimpinan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7031	Penyelenggaraan Pendidikan Kompetensi		4.159.315	350.000		4.509.315	4.535.634	4.572.442	4.627.431
[illegible]	Dukungan Manajemen Internal		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	5.075.991.527	1.399.594.084			6.475.585.591	6.809.632.545	6.748.998.842	6.920.786.069
	JUMLAH PNBP		1.737.504.295	186.689.079		1.924.193.374	1.958.596.540	1.993.763.884	2.036.819.393
	JUMLAH PLN		882.685.207	226.902.893		1.109.588.000	1.116.085.240	1.130.104.390	1.180.181.051
	TOTAL JUMLAH	5.075.991.527	4.019.783.586	408.681.772		9.489.346.965	9.874.343.324	9.871.186.316	10.109.776.513

SK No 154290 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 057

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	213.814.514	158.401.880	6.453.343		377.669.537	409.270.222	428.975.582	440.382.038
057.01	Perpustakaan Nasional	213.814.514	158.401.880	6.453.343		377.669.537	409.270.222	428.975.582	440.382.038
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	213.814.514	92.203.148	284.202		306.682.864	328.036.113	344.415.902	357.690.401
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	213.814.514	92.203.148	284.202		306.402.864	328.036.113	344.415.902	357.690.401
057.01 WA	Program Dukungan Manajemen	213.814.514	92.262.148	284.202		306.682.864	328.036.113	344.415.902	357.690.401
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN		66.119.532	6.197.141		72.316.673	81.234.109	81.960.680	82.791.636
10 06	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		66.119.532	6.197.141		72.316.673	81.234.109	81.960.680	82.791.636
057.01 OM	Program Perpustakaan dan Literasi		66.119.532	6.197.141		72.316.673	81.234.109	81.960.680	82.791.636
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 057

KEMENTERIAN/LEMBAGA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5072	Perpustakaan Terdaftar dan Terstandar Berkualitas		7.320	16.741		24.061	24.773	25.514	26.284
	JUMLAH RM	213.114.614	158.259.261	6.181.000		377.554.775	408.817.680	426.915.187	439.809.868
	JUMLAH PNBP		142.419	302.343		444.762	452.582	461.395	472.068
	TOTAL JUMLAH	213.114.614	158.401.680	6.483.343		377.999.537	409.270.222	428.376.582	440.352.038



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	778.390.047	7.429.845.658	419.106.141		8.627.310.746	17.923.959.588	17.953.684.235	8.497.887.658
059.01	Sekretariat Jenderal	128.106.849	286.111.824	5.826.544		420.045.017	434.883.846	439.855.447	446.156.408
04	FUNGSI EKONOMI	128.106.849	286.111.824	5.826.544		420.045.017	434.883.846	439.855.447	446.156.408
04.09	TELEKOMUNIKASI	128.106.849	286.111.824	5.826.544		420.045.017	434.883.846	439.855.447	446.156.408
059.01.WA	Program Dukungan Manajemen	128.106.849	281.314.824	5.826.544		415.048.017	429.883.846	434.855.447	441.156.408
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4400	Penyediaan Dana Pengembangan SDM		6.250.000			6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4520	Penyediaan Layanan Perkantoran		2.297.000			2.297.000	2.297.000	2.297.000	2.297.000
4531	Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		7.000.000	[illegible]		[illegible]	11.000.000	11.000.000	11.000.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.01.GH	Program Komunikasi Publik dan Media		14.797.000	200.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4531	Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		7.000.000			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.02	Inspektorat Jenderal	28.276.807	20.400.863			48.677.670	47.504.481	48.434.011	49.561.059
04	FUNGSI EKONOMI	28.276.807	20.400.863			48.677.670	47.504.481	48.434.011	49.561.059
04.09	TELEKOMUNIKASI	28.276.807	20.400.863			48.677.670	47.504.481	48.434.011	49.561.059
059.02.WA	Program Dukungan Manajemen	28.276.807	20.400.863			48.677.670	47.504.481	48.434.011	49.561.059

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.08	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	116.250.348	131.489.013	542.870		247.282.025	620.371.388	621.371.388	622.371.388
04	FUNGSI EKONOMI	85.268.867	104.360.711			189.627.578	620.371.388	621.371.388	622.371.388
04.09	TELEKOMUNIKASI	85.268.867	104.360.711			189.627.578	620.371.388	621.371.388	622.371.388
059.08.GK	Program Pengembangan dan Pengujian Ekosistem dan Ruang Digital		31.611.089			31.611.089	421.289.250	422.288.250	423.288.250
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.08.WA	Program Dukungan Manajemen	86.268.867	72.749.612			159.018.479	199.102.116	199.102.116	199.102.116
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN	29.983.476	97.139.302	542.670		37.664.448			
10.05	PENDIDIKAN TINGGI	29.983.476	97.139.302	542.670		37.664.448			
059.08.GK	Program Pengembangan dan Pengujian Ekosistem dan Ruang Digital		15.552.457	542.670		16.095.127			
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
059.08.WA	Program Dukungan Manajemen	29.983.476	11.586.845			41.569.321			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			
059.07	Dewan Informasi dan Komunikasi Publik	53.468.329	886.129.242	4.074.160		342.686.731	344.247.354	346.024.102	348.178.459
04	FUNGSI EKONOMI	53.468.329	886.129.242	4.074.160		342.686.731	344.247.354	346.024.102	348.178.459
04.09	TELEKOMUNIKASI	53.468.329	288.129.242	4.074.160		342.686.731	344.247.354	346.024.102	348.178.459

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059.07.GH	Program Komunikasi Publik dan Media		260.081.679	4.674.160		262.967.731	262.967.731	262.967.731	262.967.731
7431	Penyelenggaraan Kegiatan Komunikasi Publik Nasional		93.930.319	3.045.000		92.883.319	110.294.940	110.294.940	110.294.940
7432	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyebarluasan Informasi Publik		76.151.360	1.629.160		76.780.520	74.672.791	74.672.791	74.672.791
059.07.WA	Program Dukungan Manajemen	53.469.329	25.229.679			78.699.008	81.278.402	83.056.408	85.210.728
7402	Pelayanan Kesekretariatan Unit Organisasi Eselon I Lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital	53.469.329	25.229.679			78.699.008	81.278.402	83.056.408	85.210.728
059.08	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	11.004.322	4.431.485.269	3.975.000		4.446.464.591	12.542.584.387	13.000.623.488	4.824.277.624
04	FUNGSI EKONOMI	11.004.322	4.431.485.269	3.975.000		4.446.464.591	12.542.584.387	13.000.623.488	4.824.277.624
04.09	TELEKOMUNIKASI	11.004.322	4.431.485.269	3.975.000		4.446.464.591	12.542.584.387	13.000.623.488	4.824.277.624
059.08.GL	Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital		4.196.712.718			4.196.712.718	12.224.118.275	12.712.655.408	4.657.346.507
7441	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Digital Nasional		4.196.712.718			4.196.712.718	12.224.118.275	12.712.655.408	4.657.346.507
059.08.WA	Program Dukungan Manajemen	11.004.322	238.772.551	3.975.000		249.751.873	318.466.084	318.454.080	267.031.117
7490	Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi BAKTI	11.004.322	234.772.551	3.975.000		249.751.873	318.466.084	318.454.080	267.031.117
059.09	Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital	309.653.192	764.678.758	77.927.965		1.152.259.908	1.161.751.821	1.185.722.165	1.214.786.550
04	FUNGSI EKONOMI	309.653.192	764.678.758	77.927.965		1.152.259.908	1.161.751.821	1.185.722.165	1.214.786.550
04.09	TELEKOMUNIKASI	309.653.192	764.678.758	77.927.965		1.152.259.908	1.161.751.821	1.185.722.165	1.214.786.550
059.09.GL	Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital		288.649.838	51.860.787		338.696.766	344.512.682	351.170.137	368.242.224
7433	Pengelolaan Jaringan Infrastruktur Digital		24.636.138	420.000		25.353.138	25.066.134	25.072.302	25.529.775
7434	Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Digital		203.575.700	1.440.787		205.016.487	214.415.548	224.041.451	241.548.436
7435	Pengembangan Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital		21.437.000	1.000.000		22.437.000	20.030.000	20.797.000	21.278.000
7436	Layanan Publik Badan Layanan Umum Pengelola Infrastruktur Digital		39.113.000	49.000.000		88.113.000	85.000.000	81.259.384	79.885.813

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.09.WA	Program Dukungan Manajemen	309.563.182	478.037.783	25.877.198		807.568.163	817.239.239	834.651.878	856.543.329
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.10	Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital	29.092.918	774.781.421	104.195.685		908.080.024	908.985.185	909.962.312	911.170.134
04	FUNGSI EKONOMI	29.092.918	774.781.421	104.195.685		908.080.024	908.985.185	909.962.312	911.170.134
04.09	TELEKOMUNIKASI	29.092.918	774.781.421	104.195.685		908.080.024	908.985.185	909.962.312	911.170.134
059.10.GK	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital		741.357.739	104.195.685		845.553.424	845.553.424	845.553.424	845.553.424
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.10.WA	Program Dukungan Manajemen	29.092.918	33.423.682			62.526.540	63.412.682	64.408.628	65.616.550
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.11	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital	68.254.239	506.577.954	25.805.598		597.637.791	602.024.995	606.956.677	612.938.256
04	FUNGSI EKONOMI	68.254.239	506.577.954	25.805.598		597.637.791	602.024.995	606.956.677	612.938.256
04.09	TELEKOMUNIKASI	68.254.239	506.577.954	25.805.598		597.637.791	602.024.995	606.956.677	612.938.256
059.11.GK	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital		330.224.696	21.630.690		341.755.154	342.100.770	342.809.309	343.980.401
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
[illegible]	Pengembangan sistem pengendalian pengelolaan [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.11.WA	Program Dukungan Manajemen	68.254.299	885.353.388	4.275.000		956.882.687	268.884.228	364.487.388	289.875.855
[illegible]	Pengelolaan anggaran [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.12	Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital	46.752.448	216.877.121	196.767.519		459.197.088	461.845.412	464.833.630	488.456.892
04	FUNGSI EKONOMI	46.752.448	216.877.121	196.767.519		459.197.088	461.845.412	464.833.630	488.456.892
04.09	TELEKOMUNIKASI	46.752.448	216.877.121	196.767.519		459.197.088	461.845.412	464.833.630	488.456.892
059.12.QK	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital		180.755.926	196.767.519		377.513.504	378.688.029	379.769.417	381.180.852
[illegible]	Pengelolaan [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
059.12.WA	Program Dukungan Manajemen	46.752.448	35.821.138			81.673.584	83.277.383	85.080.213	87.266.120
[illegible]	Pengelolaan [illegible]	46.752.448	35.821.138			81.673.584	83.277.383	85.080.213	87.266.120
	JUMLAH RM	778.890.047	2.483.844.004	310.953.908		3.783.679.959	5.926.152.348	5.835.740.434	5.367.117.730
	JUMLAH PNBP		1.082.454.864	104.278.233		1.186.733.787	1.184.778.442	1.202.488.827	1.223.884.392
	JUMLAH BLU		3.850.025.000	8.975.000		3.854.000.000	10.114.028.758	10.605.432.578	8.906.805.536
	TOTAL JUMLAH	778.890.047	7.426.343.868	419.105.141		8.824.313.746	17.125.959.548	17.653.663.839	15.497.887.658

SK No 154323 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 050

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
050	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	80.160.738.683	33.768.061.280	52.130.210.037		146.059.000.000	147.163.680.007	148.384.327.583	149.898.612.409
050.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia	80.160.738.683	33.768.061.280	52.130.210.037		146.059.000.000	147.163.680.007	148.384.327.583	149.898.612.409
08	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	80.160.738.683	33.768.061.280	52.130.210.037		146.059.000.000	147.163.680.007	148.384.327.583	149.898.612.409
08.01	KEPOLISIAN	80.160.738.683	33.768.061.280	52.130.210.037		146.059.000.000	147.163.680.007	148.384.327.583	149.898.612.409
050.01.BF	Program Modernisasi Alutsista dan Sarana Prasarana Polri		2.197.060.844	52.130.210.037		54.327.270.881	54.387.811.751	54.456.442.287	54.527.686.141
054	Pengembangan [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
054	Penyediaan PLN		7.494.071			7.494.071	7.523.093	7.552.837	7.582.927
055	Dukungan Manajemen dan Tata Kelola		1.189.694.313			1.189.694.313	1.192.202.701	1.194.858.835	1.197.303.513
056	Pengembangan Pusat Pelatihan Polri		5.347.673			5.347.673	5.403.574	5.461.964	5.520.166
057	Pengembangan Teknologi Polri		464.310.010			464.310.010	469.463.742	474.738.021	479.974.403
058	Pengembangan Intelijen Kepolisian		1.140.054	7.436.880.547		7.441.481.154	7.446.884.274	7.452.212.910	7.457.511.116
050.01.WA	Program Dukungan Manajemen	80.160.738.683	13.833.021.388			73.019.758.951	73.901.124.086	74.813.196.751	75.819.087.302
3003	Pengelolaan Administrasi Keuangan Polri		33.757.723			41.757.723	41.345.949	42.106.004	42.253.359
3004	Pengelolaan Manajemen		8.313.963.665			8.313.963.665	8.401.007.003	8.488.012.700	8.574.953.049
3007	Pengelolaan Teknologi Informasi		6.017.877			6.017.877	5.947.603	6.026.775	6.076.214
3008	Pengelolaan Kesehatan Polri		3.103.464.124			3.103.464.124	3.167.604.403	3.230.466.476	3.293.477.154
3011	Pengelolaan Pengadaan, Barang, Jasa dan Pemeliharaan Polri	80.160.738.683	1.372.913.999			73.533.652.682	73.856.214.428	74.178.514.218	74.501.015.526
3012	Pengelolaan Perawatan Polri		1.401.000.000			1.401.000.000	1.401.000.000	1.401.000.000	1.401.000.000
3013	Pengelolaan Pengembangan Material Polri		33.334.931			33.334.931	33.600.532	33.400.796	34.015.220
3014	Pengelolaan Pengembangan Aset Polri		27.000.000			27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
3021	Pengelolaan Pembangunan Perumahan Polri		31.047.201			31.047.201	33.033.739	34.084.163	35.087.342



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3196	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3114	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3115	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4839	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4840	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5451	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5922	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6004	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6013	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6027	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6047	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
060.01.BI	**Program Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**		**3.535.736.259**			**3.535.736.259**	**3.594.056.809**	**3.659.652.708**	**3.728.144.426**
2117	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4101	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2111	[illegible]		42.646.261			42.646.261	43.527.371	44.731.440	46.373.230
2112	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2113	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2114	[illegible]		647.636.525			647.636.525	657.815.345	670.362.312	687.376.286
2117	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

137

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0131	[illegible]	[illegible]	70.793.047			70.793.047	72.033.209	73.503.333	75.361.265
0141	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0142	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9002	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9004	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9034	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9035	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9036	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
060.01.BD	**Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**	**13.708.042.463**				**13.708.042.463**	**13.870.169.750**	**14.068.530.365**	**14.269.330.357**
0113	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0114	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Orang Pribadi	218.477.617				218.477.617	220.923.753	223.955.184	226.957.302
0115	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Orang Asing	199.903.944				199.903.944	203.024.580	207.029.721	210.981.965
0116	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0117	Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	224.910.109				224.910.109	228.418.042	232.971.142	237.472.106
0118	Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Antar K/L	41.963.114				41.963.114	42.617.117	43.470.459	44.316.757
0122	Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri	18.938.529				18.938.529	19.233.923	19.618.602	19.991.027
0124	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0133	Penyelenggaraan Fungsi Sumpah Palu	303.437.819				303.437.819	308.169.915	314.333.313	320.323.272

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.08

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2112	Pelaksanaan Fasilitasi Anggota DPR		14.273.080			14.273.080	14.640.476	14.646.482	15.312.636
7054	[illegible]		6.[illegible]			6.[illegible]	6.[illegible]	6.[illegible]	7.[illegible]
7154	[illegible]		5.[illegible]			5.[illegible]	6.[illegible]	5.[illegible]	6.[illegible]
7210	[illegible]		5.[illegible]			5.[illegible]	5.[illegible]	5.[illegible]	5.[illegible]
5071	Sarana Sistem Penjaminan Simpanan		30.265.600			30.265.600	30.265.600	30.265.600	30.265.600
7071	Pengelolaan BMN		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	80.160.738.483	22.223.642.677	47.186.832.838		129.571.214.998	130.803.763.927	131.652.121.522	132.223.209.826
	JUMLAH PNBP		6.968.250.082	2.040.480.811		10.978.710.893	11.074.404.680	11.181.981.684	11.312.416.709
	JUMLAH BLU		2.568.958.521	135.184.926		2.702.143.447	2.725.259.931	2.772.485.972	2.817.621.885
	JUMLAH BBBN			686.864.899		686.864.899	686.864.899	686.864.899	686.864.899
	JUMLAH RMP			1.476.332.207		1.476.332.207	1.709.593.318	1.748.979.551	1.792.310.977
	TOTAL JUMLAH	80.160.738.483	32.768.051.280	52.130.210.037		136.060.000.000	147.151.560.007	148.394.327.681	148.888.612.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I-10

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.050.074.969	885.428.226	301.538.963		2.247.043.158	2.285.988.589	2.328.788.475	2.382.850.792
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.050.074.969	885.428.226	301.538.963		2.247.043.158	2.285.988.589	2.328.788.475	2.382.850.792
07	FUNGSI KESEHATAN	1.050.074.969	885.428.226	301.538.963		2.247.043.158	2.285.988.589	2.328.788.475	2.382.850.792
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	1.050.074.969	885.428.226	301.538.963		2.247.043.158	2.285.988.589	2.328.788.475	2.382.850.792
063.01.WR	Program Pengawasan Obat dan Makanan		411.876.267	296.892.963		708.769.230	714.603.193	731.725.615	750.356.531
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2117	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2113	[illegible] Obat dan Makanan		4.729.902			4.729.902	4.729.902	4.729.902	4.729.902
2115	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan		5.250.330			5.250.330	5.250.330	5.250.330	5.250.330
4121	Pengawasan Produksi Pangan Olahan		7.401.300	69.000		7.470.300	7.511.000	7.600.000	7.600.300
4121	[illegible]		3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121	Pengawasan Keamanan Pangan Olahan		1.197.214	1.000.000		2.197.214	2.197.214	2.197.214	2.197.214
4121	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121	Pengawasan Obat		7.000.000	69.000		7.069.000	7.101.000	7.201.000	7.201.000
4121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1-11

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 085
KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4032	Pengawasan Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik		9.852.000	30.000		9.882.000	10.376.100	10.894.905	11.439.650
4033	Pengawasan Obat dan Makanan		14.300.000	1.200.000		15.500.000	16.275.000	17.088.750	17.943.188
4034	Pengawasan Produk Pangan Olahan dan Suplemen Kesehatan		2.000.000			2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250
4035	Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		1.000.000	20.000		1.020.000	1.071.000	1.124.550	1.180.778
4036	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan		5.000.000			5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.125
4037	Pengembangan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergi		5.025.000			5.025.000	5.276.250	5.540.063	5.817.066
085.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.050.074.989	485.851.959	4.847.000		1.538.773.948	1.571.586.406	1.650.165.690	1.652.494.281
0001	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)		1.850.000			1.850.000	1.942.500	2.039.625	2.141.606
0051	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengelolaan Unit Organisasi, Anggaran, Keuangan, dan Barang Milik Negara		2.701.959	270.000		2.971.959	3.120.557	3.276.585	3.440.414
4031	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan		5.025.000			5.025.000	5.276.250	5.540.063	5.817.066
4032	Pengelolaan Sumber Daya Manusia		4.750.000			4.750.000	4.987.500	5.236.875	5.498.719
4033	Penyelenggaraan SDM Pusat dan Unit di BPOM	1.050.074.989	11.001.000	4.000		1.061.079.989	1.114.133.989	1.169.840.689	1.228.332.723
4034	Penyelenggaraan Teknologi Informasi, Komunikasi, Jaringan, Internet, dan Aplikasi	9.000.000	91.000.000	4.573.000		104.573.000	109.801.650	115.291.733	121.056.319
4035	Pengelolaan Kelembagaan Organisasi dan Tata Laksana Aparatur	9.000.000	5.000.000			14.000.000	14.700.000	15.435.000	16.206.750
4036	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Aparatur		2.000.000			2.000.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250
6324	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1.035.987.000	417.300.000	270.000		1.453.557.000	1.480.800.900	1.517.820.900	1.560.695.900
	JUMLAH RM	1.050.074.989	788.317.400	295.725.074		2.142.117.463	2.180.121.584	2.222.843.678	2.274.642.142
	JUMLAH PNBP		98.110.826	5.814.889		104.925.715	108.987.005	108.925.287	108.208.650
	TOTAL JUMLAH	1.050.074.989	886.428.226	301.539.963		2.247.043.178	2.289.988.589	2.329.768.475	2.382.850.792

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 064

KEMENTERIAN/LEMBAGA LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	88.533.971	120.242.829	3.253.184		212.029.784	261.072.129	275.087.740	286.128.720
064.01	Lembaga Ketahanan Nasional RI	88.533.971	120.242.829	3.253.184		212.029.784	261.072.129	275.087.740	286.128.720
02	FUNGSI PERTAHANAN	88.533.971	120.242.829	3.253.184		212.029.784	261.072.129	275.087.740	286.128.720
02.04	LITBANG PERTAHANAN	88.533.971	120.242.829	3.253.184		212.029.784	261.072.129	276.087.740	286.128.720
064.01.AU	Program Pembinaan Ketahanan Nasional		58.127.571	2.902.256		59.029.828	99.176.581	109.684.202	126.093.858
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2151	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Pemerintah Lainnya		3.990.315			3.990.315	21.370.700	23.208.920	20.401.536
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		24[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2197	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lainnya		1.700.000			1.700.000	3.370.300	3.110.600	3.644.010
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2199	Penyusunan Rencana dan Pengelolaan Strategi dan Bidang Pertahanan		571.755			571.755	4.790.378	5.467.942	5.208.513
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 243 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 064

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0131	Perumusan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Nasional		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
064.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**88.533.871**	**84.118.080**	**350.929**		**173.002.880**	**181.653.024**	**190.735.675**	**200.272.459**
0144	Pengelolaan Layanan Umum		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0145	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0146	Pengelolaan Pengembangan Kapasitas Aparatur		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0148	Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0197	Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Pusat dan Pelaksanaan Tugas Lembaga	88.533.871	33.790.216			122.324.187	134.970.297	142.801.327	151.333.217
0199	Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kewenangan Lembaga		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	**88.533.871**	**120.242.628**	**3.253.184**		**212.029.784**	**281.072.129**	**275.067.740**	**296.128.720**
	TOTAL JUMLAH	**88.533.871**	**120.242.628**	**3.253.184**		**212.029.784**	**281.072.129**	**275.067.740**	**296.128.720**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 | 4

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
065	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	327.266.387	398.608.181	49.218.721		776.082.289	790.213.843	807.223.664	827.847.884
065.01	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	327.266.387	398.608.181	49.218.721		776.082.289	790.213.843	807.223.664	827.847.884
04	FUNGSI EKONOMI	327.266.387	398.608.181	49.218.721		776.082.289	790.213.843	807.223.664	827.847.884
04.80	EKONOMI LAINNYA	327.266.387	398.608.181	49.218.721		776.082.289	790.213.843	807.223.664	827.847.884
065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	327.266.387	148.545.427	2.782.833		478.593.647	488.027.709	495.843.901	508.585.838
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5016	Penyelenggaraan Sub Bagian Yayasan		1.700.972			1.700.972	1.772.339	1.811.700	1.858.200
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5774	Penyelenggaraan Pusat Unggulan Pengelolaan Pengetahuan Penanaman Modal		1.037.847			1.037.847	1.081.776	1.104.471	1.133.136
5775	Peningkatan Fasilitasi Implementasi dan Hubungan Masyarakat		20.666.403			20.666.403	21.539.048	21.997.401	22.562.992
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5777	Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan dan Perizinan Berusaha		555.154			555.154	578.716	590.877	606.412
065.01.EO	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	252.062.754		46.435.888		298.498.642	304.895.134	310.679.883	318.332.175
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5814	Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal di Daerah		1.000.000			1.000.000	1.042.500	1.064.400	1.092.300
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5822	Pengelolaan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.130.642			3.130.642	3.263.304	3.332.207	3.420.630

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3226	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I		8.137.039			8.137.039	8.298.183	8.479.340	8.698.986
3227	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II		6.145.795			6.145.795	6.267.334	6.403.971	6.569.637
3228	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III		4.468.576			4.468.576	4.557.075	4.656.576	4.777.217
3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV		3.680.119			3.680.119	3.752.749	3.834.410	3.933.424
3230	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal		7.000.000			7.000.000	7.031.029	7.065.910	7.108.203
3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur		2.800.000			2.800.000	2.838.561	2.881.914	2.934.488
3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan		5.200.000			5.200.000	5.298.375	5.408.979	5.543.079
3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		600.000			600.000	611.800	625.072	641.164
5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta		800.000			800.000	815.750	833.464	854.941
5264	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat		500.000			500.000	509.919	521.070	534.591
5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur		2.700.000			2.700.000	2.753.130	2.812.868	2.885.302
6481	Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha		500.000			500.000	509.916	521.068	534.587
6482	Kerja Sama Bilateral di Bidang Penanaman Modal		5.125.125			5.125.125	5.225.103	5.337.500	5.473.791
6483	Kerja Sama Regional dan Multilateral di Bidang Penanaman Modal		7.917.121			7.917.121	8.073.099	8.248.477	8.461.108
6777	Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		10.000.000			10.000.000	10.198.409	10.421.439	10.691.859
6778	Promosi Wilayah Amerika dan Eropa		14.114.327			14.114.327	14.394.287	14.709.000	15.090.584
6779	Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika		7.440.135			7.440.135	7.587.660	7.753.507	7.954.590
6780	Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik		11.259.703			11.259.703	11.483.099	11.734.219	12.038.707
6781	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V		4.745.214			4.745.214	4.839.196	4.944.850	5.072.962
6782	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri		1.000.000			1.000.000	1.019.837	1.042.139	1.069.181
6783	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri		1.500.000			1.500.000	1.529.557	1.562.787	1.603.081

SK No 154312 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 005

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Unit : Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	Pengelolaan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Pertahanan dan Keamanan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0750	Pemrakarsaan Kebijakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		2.241.693	30.959.931		33.201.624	33.201.624	54.134.479	55.097.093
[illegible]	Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		28.716.439	16.777.767		45.494.206	46.931.487	47.403.961	48.058.646
[illegible]	Pengembangan Pengelolaan Data Penanaman Modal		2.131.144			2.131.144	2.131.144	2.131.144	2.131.144
[illegible]	Pengelolaan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Migas dan Energi Baru		1.210.000			1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
7500	Pemrakarsaan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Mineral dan Batubara		2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
[illegible]	Pengembangan Sistem Perizinan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Investasi Baru di Bidang Hilirisasi Pertanian dan Kehutanan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi		420.000			420.000	420.000	504.000	504.000
	JUMLAH RM	927.256.557	392.608.181	49.218.721		776.082.289	790.283.845	807.223.854	827.847.814
	TOTAL JUMLAH	927.256.557	392.608.181	49.218.721		776.082.289	790.283.845	807.223.854	827.847.814

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 066

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	872.729.420	645.640.187	347.700		1.518.517.307	1.518.619.400	1.518.621.760	1.518.624.620
066.01	Badan Narkotika Nasional	872.729.420	645.640.187	347.700		1.518.517.307	1.518.619.400	1.518.621.760	1.518.624.620
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	872.729.420	643.640.187	347.700		1.516.517.307	1.516.619.400	1.516.621.760	1.516.624.620
03.01	KEPOLISIAN	872.729.420	643.640.187	347.700		1.516.517.307	1.516.619.400	1.516.621.760	1.516.624.620
066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		144.788.809			144.788.809	140.384.126	140.396.438	140.389.346
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5233	Pengawasan Kepatuhan Substansi Hukum TAPI		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5237	Pengembangan Rehabilitasi Pengguna Narkotika		7.954.747			20.948.143	7.954.747	7.954.747	20.948.143
5239	Pengembangan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba		95.274.062			95.274.062	91.902.121	91.902.121	91.902.121
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	872.729.420	388.761.378	347.700		1.371.838.498	1.378.235.274	1.378.225.322	1.378.235.274
5247	Pengawasan dan Pembinaan Aparatur dan Aparatur		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5248	Pengembangan Kapasitas Aparatur BNN		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5251	Penyelenggaraan Layanan Dukungan Operasional dan Manajemen Perkantoran	872.729.420	386.761.378	347.700		1.259.838.498	1.376.235.274	1.376.225.322	1.376.235.274
	JUMLAH RM	872.729.420	627.121.378	347.700		1.500.198.498	1.500.198.498	1.500.198.498	1.500.198.498
	JUMLAH PNBP		18.418.809			18.418.809	18.420.902	18.423.262	18.426.122
	TOTAL JUMLAH	872.729.420	645.640.187	347.700		1.518.517.307	1.518.619.400	1.518.621.760	1.518.624.620



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

J 19

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		1	4	5	6		8	9	10
068	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.084.627.302	546.783.821	26.564.116		3.657.975.239	3.702.147.790	3.774.286.393	3.861.760.937
068.01	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.084.627.302	546.783.821	26.564.116		3.657.975.239	3.702.147.790	3.774.286.393	3.861.760.937
07	FUNGSI KESEHATAN	3.084.627.302	546.783.821	26.564.116		3.657.975.239	3.702.147.790	3.774.286.393	3.861.760.937
07.04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	3.084.627.302	546.783.821	26.564.116		3.657.975.239	3.702.147.790	3.774.286.393	3.861.760.937
068.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.084.627.302	889.127.310	24.918.985		3.778.669.891	3.941.936.333	3.813.055.085	3.488.385.284
7220	Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Kehumasan Kependudukan dan Keluarga Berencana Melalui Media Massa		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5111	Pengelolaan Belanja Pegawai Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7212	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7211	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7211	Penyelenggaraan Perencanaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5207	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	3.805.956.000	194.900.510	12.360.000		3.991.916.869	3.952.552.510	3.437.511.092	3.005.990.800
7246	Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tanah dan Perkantoran Serta Pengembangan Kapasitas Pengelolaan BMN	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7240	Pengadaan Perlengkapan dan Pemeliharaan Peralatan		3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.131.000	3.268.000
7252	Pemberdayaan Potensi Kependudukan Masyarakat dan Mitra Kerja		500.000			1.000.000	516.000	1.000.000	1.000.000
7201	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu		3.926.000			3.926.000	3.842.000	4.009.000	4.187.000
068.01.EJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana		357.656.511	1.645.130		359.301.641	360.211.460	361.230.324	362.165.653
7212	Pembinaan Advokasi Kependudukan		400.000			400.000	413.000	427.000	439.000
7211	Pembinaan Kelembagaan Keluarga Sakinah dan Anak		2.000.000			2.000.000	2.065.000	2.137.000	2.204.000
7219	Pembinaan Kelembagaan Remaja		2.000.000			2.000.000	2.065.000	2.137.000	2.204.000

SK No 154346 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3320	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi		680.000			680.000	688.493	698.059	709.654
3322	Peningkatan Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus		520.000			520.000	530.308	541.905	555.968
3323	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		500.000			500.000	509.913	521.064	534.586
3324	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan		1.850.000			1.850.000	1.885.376	1.925.158	1.973.392
3325	Pengelolaan Kerjasama Pendidikan Kependudukan		450.000			450.000	455.910	462.574	470.649
3326	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk		450.000			450.000	458.917	468.953	481.120
3327	Pembinaan Kualitas Pelayanan KB		450.000			450.000	458.640	468.364	480.159
3328	Analisis Dampak Kependudukan		500.000			500.000	507.928	516.853	527.668
3329	Perencanaan Pengendalian Penduduk		450.000			450.000	458.923	468.955	481.127
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi		312.620.000			312.620.000	312.800.611	313.004.038	313.250.672
7552	Penguatan Kualitas Kebijakan Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana		400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
7553	Penguatan Kualitas Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk		400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
7554	Penguatan Kebijakan Kualitas Akses Pembangunan dan Pelayanan Keluarga		450.000			450.000	450.000	450.000	450.000
7555	Penguatan Kebijakan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana		400.000			400.000	406.126	413.021	421.384
7556	Peningkatan peran serta masyarakat dan mitra kerja terhadap program Bangga Kencana		2.900.000			2.900.000	2.952.785	3.012.129	3.084.081
7557	Peningkatan Kualitas Data dan Teknologi Informasi Program Bangga Kencana		5.850.840	1.649.160		7.500.000	7.619.021	7.752.838	7.915.078
7558	Peningkatan Pendayagunaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemangku Kebijakan dalam Penguatan Program Bangga Kencana		11.850.000			11.850.000	12.004.811	12.178.849	12.389.862
7559	Peningkatan Kualitas Penggerak Lini Lapangan Program Bangga Kencana		450.000			450.000	457.931	466.849	477.668

SK No 154345 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

150

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 058

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		400.000			400.000	407.644	415.548	423.676
	JUMLAH RM	3.064.627.302	538.886.853	26.564.116		3.629.578.071	3.698.658.917	3.766.578.593	3.852.842.185
	JUMLAH PNBP		79.188			79.188	80.709	82.446	84.550
	JUMLAH HLN		8.310.000			8.310.000	8.463.107	8.625.354	8.824.272
	TOTAL JUMLAH	3.064.627.302	546.781.821	26.564.116		3.637.975.259	3.707.202.733	3.774.286.381	3.861.750.837

SK No 154344 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

151

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 074

KEMENTERIAN/LEMBAGA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	73.867.106	83.969.576	3.888.043		161.824.725	164.826.665	167.989.280	172.089.781
074.01	Komisi HAM	73.867.106	83.969.576	3.888.043		161.824.725	164.826.665	167.989.280	172.089.781
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	73.867.106	83.969.576	3.888.043		161.824.725	164.826.665	167.989.280	172.089.781
03.03	PEMBINAAN HUKUM	73.867.106	83.969.576	3.888.043		161.824.725	164.826.665	167.989.280	172.089.781
074.01.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		28.980.783	200.000		30.180.783	30.979.997	31.241.313	31.921.612
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
074.01.WA	Program Dukungan Manajemen	73.867.106	53.978.793	3.688.043		131.443.942	133.846.668	136.747.967	140.167.849
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	73.867.106	83.969.576	3.888.043		161.824.725	164.826.665	167.989.280	172.089.781
	TOTAL JUMLAH	73.867.106	83.969.576	3.888.043		161.824.725	164.826.665	167.989.280	172.089.781

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LSO

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 075

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

dalam ribuan rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	970.811.418	1.087.177.160	617.450.325		2.675.438.903	2.873.030.238	2.924.930.640	2.987.858.092
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	970.811.418	1.087.177.160	617.450.325		2.675.438.903	2.873.030.238	2.924.930.640	2.987.858.092
04	FUNGSI EKONOMI	970.811.418	1.087.177.160	617.450.325		2.675.438.903	2.873.030.238	2.924.930.640	2.987.858.092
04.60	EKONOMI LAINNYA	970.811.418	1.087.177.160	617.450.325		2.675.438.903	2.873.030.238	2.924.930.640	2.987.858.092
075.01.GJ	Program Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika		752.438.210	617.455.325		1.368.894.535	1.481.278.643	1.513.716.501	1.540.926.400
3744	Pengelolaan Data Informasi Iklim (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3745	Pengelolaan Gempabumi, Tsunami (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3746	Pengelolaan Informasi Meteorologi (BMKG)		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3747	Pengelolaan Informasi Meteorologi Penerbangan (BMKG)		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3748	Pengelolaan Sistem Jaringan Komunikasi (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3749	Pengelolaan Meteorologi Penerbangan (BMKG)		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3750	Pengelolaan Meteorologi Publik (BMKG)		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3751	Pengelolaan Kualitas Air (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3752	Pengelolaan Sistem Informasi Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3754	Pengelolaan Gempabumi dan Tsunami (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3771	Pengelolaan Meteorologi Maritim (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3772	Pengelolaan Gempabumi dan Tsunami (BMKG)		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3773	Pengelolaan Observasi Klimatologi, Kualitas Udara (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
075.01.WA	Program Dukungan Manajemen	970.811.418	334.737.950	185.000		1.305.549.368	1.391.751.895	1.411.213.139	1.446.932.692
3997	Pengelolaan Layanan Perkantoran (Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) (BMKG)	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3999	Pengelolaan Layanan Umum - Kantor dan Rumah Dinas (BMKG)		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154342 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7031	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Organisasi BMKG		1.320.000			1.320.000	1.320.144	1.320.307	1.320.484
7032	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.475.997	1.757.580	795.000		4.028.577	3.946.134	4.026.610	4.107.401
	JUMLAH RM	**970.611.410**	**1.003.064.069**	**195.000**		**1.973.871.007**	**2.107.511.023**	**2.144.119.946**	**2.180.507.761**
	JUMLAH PNBP		**82.242.909**	**22.250.000**		**104.492.909**	**166.587.747**	**168.572.654**	**160.667.211**
	JUMLAH PLN			**475.073.057**		**475.073.057**	**484.498.981**	**496.094.585**	**507.941.481**
	JUMLAH SBSN		**1.389.682**	**120.132.268**		**122.001.850**	**124.422.487**	**127.148.485**	**130.442.899**
	TOTAL JUMLAH	**970.611.410**	**1.087.677.660**	**617.650.325**		**2.675.438.903**	**2.873.030.238**	**2.934.935.640**	**2.987.559.092**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

154

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 075

KEMENTERIAN/LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
075	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.212.534.024	8.327.053.917			3.639.587.941	10.394.592.712	22.365.215.448	29.442.242.582
075.01	Komisi Pemilihan Umum	2.212.534.024	8.327.053.917			3.639.587.941	10.394.592.712	22.365.215.448	29.442.242.582
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	2.212.534.024	8.327.053.917			3.639.587.941	10.394.592.712	22.365.215.448	29.442.242.582
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	2.212.534.024	8.327.053.917			3.639.587.941	10.394.592.712	22.365.215.448	29.442.242.582
075.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		87.308.002			87.308.002	5.081.476.936	10.773.921.294	14.778.153.393
075	Pengelolaan Layanan Perkantoran Lingkup Komisi Pemilihan Umum		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
075	Pelaksanaan Audit Atas Pelaporan Pelaksanaan Anggaran		7.005.900			7.005.900	7.345.772	7.447.872	7.093.121
075	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan Tugas		3.345.033			3.345.033	3.412.818	3.467.344	3.617.527
075	Layanan Perkantoran Pusat Komisi Pemilihan Umum		6.401.871			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
075	Pendidikan Dan Pelatihan Pemilihan Umum Tingkat Pusat		67.403.000			67.403.000	67.707.171	70.024.414	71.015.116
075.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.212.534.024	6.238.748.915			3.452.283.939	3.613.046.867	3.681.284.154	3.851.079.189
075	Belanja Pegawai	2.212.534.024	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
075	Manajemen Perencanaan dan Organisasi		10.400.200			10.400.200	10.642.208	10.879.228	11.151.722
075	Pengelolaan Layanan Umum		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
075	Pelaksanaan Operasional Kantor dan Dukungan Sarana Prasarana		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
075	Pengembangan Sistem TIK		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
075	Penyelesaian Pengaduan Tenaga Kesekretariatan Barang Milik Negara		5.113.500			[illegible]	5.113.500	5.113.500	5.113.500
075	Pendidikan Dan Pelatihan		3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
075	Pengembangan Sumber Daya Manusia		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
075	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		5.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
075	Pendukung SDM Penyelenggara		14.000.000			14.000.000	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 076

KEMENTERIAN/LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	JUMLAH RM	2.212.634.024	1.327.053.917			3.539.587.941	10.384.692.712	22.355.285.448	28.442.242.682
	TOTAL JUMLAH	2.212.634.024	1.327.053.917			3.539.587.941	10.384.692.712	22.355.285.448	28.442.242.682

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 077

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	120.470.482	243.041.850	15.823.210		379.335.542	338.713.606	385.007.305	405.063.272
077.01	Mahkamah Konstitusi RI	120.470.482	243.041.850	15.823.210		379.335.542	338.713.606	385.007.305	405.063.272
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	120.470.482	243.041.850	15.823.210		379.335.542	338.713.606	385.007.305	405.063.272
03.04	**PERADILAN**	120.470.482	243.041.850	15.823.210		379.335.542	338.713.606	385.007.305	405.063.272
077.01.BJ	**Program Penanganan Perkara Konstitusi**		188.889.340	4.860.000		201.618.340	236.388.382	208.737.642	216.010.872
[illegible]	Penanganan Perkara Konstitusi, Pengelolaan Administrasi Kepaniteraan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pembinaan Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara dan Budaya Sadar MK		350.000			350.000	407.000	449.000	497.674
[illegible]	Penyelenggaraan Pelatihan Perkara dan Pengelolaan Kepaniteraan Mahkamah		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Sistem Informasi Kepaniteraan		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Data Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
077.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	120.470.482	48.972.510	11.273.210		177.816.202	181.325.224	186.289.743	190.062.400
[illegible]	Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Kepegawaian, Pengelolaan Pengelolaan Perlengkapan, Pengelolaan Aset, Pengelolaan Barang Milik Negara		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5238	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi		2.632.500			2.632.500	2.767.635	2.910.770	3.059.192
	JUMLAH RM	120.470.482	243.041.850	15.823.210		379.335.542	338.713.606	385.007.305	405.063.272
	TOTAL JUMLAH	120.470.482	243.041.850	15.823.210		379.335.542	338.713.606	385.007.305	405.063.272

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 078

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	200.479.730	123.747.842	9.350.000		333.577.060	339.216.467	345.666.271	351.242.905
078.01	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	200.479.730	123.747.842	9.350.000		333.577.060	339.216.467	345.666.271	351.242.905
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	200.479.238	123.747.842	9.350.000		333.577.080	339.216.467	345.666.271	351.242.905
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	200.479.238	123.747.842	9.350.000		333.577.080	339.216.567	345.666.271	351.242.905
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme		77.085.202	5.000.000		82.085.202	83.450.359	85.087.485	86.925.452
2070	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2072	Pengembangan Database dan Pelaporan PPATK		1.317.220			1.317.220	1.339.252	1.345.151	1.359.709
2082	Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri dan Internasional TPPU, TPPT dan PPSPM		3.700.200			3.700.200	3.842.222	3.969.053	4.116.779
2151	Pengembangan Teknologi Informasi PPATK		15.272.442	1.300.000		16.572.442	17.279.479	17.982.010	18.922.464
2156	Penyusunan Data Transaksi dan Pengelolaan Intelijen Tindak Pidana PPATK		5.146.842			5.146.842	5.227.145	5.314.864	5.414.674
2164	Pembinaan Analisis Transaksi dan Pemeriksaan PPATK		3.045.454			3.045.454	3.140.134	3.697.649	3.813.749
2165	Penyusunan Produk Hukum Kerjasama, APU, PPT dan PPSPM		5.646.370			5.646.370	5.716.725	5.795.015	5.881.735
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	200.479.730	46.662.640	4.350.000		251.401.070	255.736.108	260.618.705	266.317.423
2071	Pengawasan Internal PPATK		421.411			421.411	421.539	501.212	474.114
2076	Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian PPATK	200.479.730	850.247			201.329.977	204.976.017	207.975.210	211.971.579
2150	Pengembangan Sistem Pelaporan Terpadu dan Pengelolaan Data PPATK		3.148.972			3.148.972	3.197.201	3.242.647	3.299.737
2077	Pengelolaan Kelembagaan, Sistem Manajemen dan Pengelolaan PPATK		41.092.480	4.350.000		45.092.480	47.972.711	49.987.758	45.909.741
2084	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemberantasan Korupsi TPPU, TPPT dan PPSPM		1.914.000	31.000		1.994.370	1.583.050	1.601.557	1.636.373
	JUMLAH RM	200.479.730	123.747.842	9.350.000		333.577.060	339.216.467	345.666.271	351.242.905
	TOTAL JUMLAH	200.479.730	123.747.842	9.350.000		333.577.060	339.216.467	345.666.271	351.242.905

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 083
KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Rupiah (dalam ribuan)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	117.913.042	177.298.434	1.976.041.886		2.271.253.362	2.316.280.932	2.366.895.981	2.429.265.835
083.01	Badan Informasi Geospasial	117.913.042	177.298.434	1.976.041.886		2.271.253.362	2.316.280.932	2.366.895.981	2.429.265.835
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	117.913.042	177.298.434	1.976.041.886		2.271.253.362	2.316.280.932	2.366.895.981	2.429.265.835
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	117.913.042	177.298.434	1.976.041.886		2.271.253.362	2.316.280.932	2.366.895.981	2.429.265.835
083.01.GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial		142.448.686	1.976.041.886		2.118.731.872	2.160.732.978	2.207.945.239	2.265.181.684
6115	Penyelenggaran Bidang Pelayanan Geospasial Indonesia		27.519.056	2.692.314		30.417.900	31.779.891	31.149.918	32.255.721
6446	Pengembangan Sistem Informasi Geospasial		16.691.094	1.973.349.572		1.990.040.667	1.750.000.000	1.806.784.447	1.874.701.417
6447	Pembinaan Penyelenggaraan Data dan Penyebaran Informasi Geospasial		8.116.811	1.411.176		9.527.987	11.000.000	14.121.756	14.649.454
6448	Pengembangan Sistem Informasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial		70.121.725	1.078.824		71.200.549	104.952.211	110.140.171	114.237.994
6449	Pengembangan Jaringan Informasi Geospasial		12.260.097			13.260.097	14.130.761	14.481.212	14.760.249
7033	Pengembangan Sistem Informasi Tematik		6.739.714	7.594.954		14.334.668	5.418.097	5.418.724	5.617.101
083.01.WA	Program Dukungan Manajemen	117.913.042	34.849.748			152.671.790	155.548.041	159.949.751	163.074.350
6211	Penyelenggaran Kesekretariatan	117.913.042	34.849.748			152.671.790	155.548.041	159.949.751	163.074.350
	JUMLAH RM	117.913.042	82.028.808	2.832.264		212.672.116	216.798.848	221.530.487	227.278.700
	JUMLAH PNBP		1.962.020			1.962.020	1.999.336	2.041.220	2.092.022
	JUMLAH PLN		93.308.445	1.973.209.642		2.066.518.087	2.097.484.963	2.143.324.255	2.199.895.112
	TOTAL JUMLAH	117.913.042	177.298.434	1.976.041.886		2.271.253.362	2.316.280.932	2.366.895.981	2.429.265.835

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 084
KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

(Dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)	102.859.057	86.559.636	584.534		190.003.227	193.706.105	197.856.386	202.911.068
084.01	Badan Standarisasi Nasional	102.859.057	86.559.636	584.534		190.003.227	193.706.105	197.856.386	202.911.068
04	FUNGSI EKONOMI	102.859.057	86.559.636	584.534		190.003.227	193.706.105	197.856.386	202.911.068
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	102.859.057	86.429.636	584.534		189.873.227	193.575.105	197.726.386	202.781.068
084.04.EJ	Program Standardisasi Nasional		43.829.066	554.534		44.183.600	45.009.209	45.937.385	47.052.560
3038	Pemenuhan Cakupan Pelayanan Standar dan Penilaian Kesesuaian		6.101.850			6.101.850	6.101.850	6.101.850	6.101.850
3055	Pemenuhan Cakupan Layanan Sistem Tata Kelola Standardisasi Penilaian Kesesuaian		2.850.450			2.850.450	2.850.450	2.850.450	2.850.450
3072	Peningkatan Kolaborasi		31.474.350	479.000		31.953.350	32.775.909	33.704.085	34.829.260
3077	Peningkatan [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
084.04.WA	Program Dukungan Manajemen	102.859.057	42.800.570	30.000		145.689.627	148.696.896	151.799.101	155.719.308
3041	Pemenuhan Pelayanan Sarana Pusat Data Informasi Hukum dan Pemenuhan Kebutuhan		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3050	Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Umum	102.859.057	41.615.499			144.474.556	146.324.756	148.642.946	151.447.006
3051	Pemenuhan Layanan Internal		1.185.071	30.000		1.215.071	1.372.140	1.156.155	1.272.302
3079	Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana		954.744			954.744	954.744	954.744	954.744
04.10	LITBANG EKONOMI		130.000			130.000	130.000	130.000	130.000
084.04.WA	Program Dukungan Manajemen		130.000			130.000	130.000	130.000	130.000
3051	Peningkatan Pelayanan Perkantoran Pendukung Internal BSN		130.000			130.000	130.000	130.000	130.000
	JUMLAH RM	102.859.057	41.290.000			144.149.057	148.966.809	150.213.859	154.111.448
	JUMLAH PNBP		45.279.636	584.534		45.864.170	48.705.202	47.652.747	48.809.417
	TOTAL JUMLAH	102.859.057	86.559.636	584.534		190.003.227	193.706.105	197.856.386	202.911.068

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 085

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	82.014.185	35.605.875	121.600		117.741.640	119.840.881	122.413.172	125.410.787
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	82.014.185	35.605.875	121.600		117.741.640	119.840.881	122.413.172	125.410.787
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	82.014.185	35.605.875	121.600		117.741.640	119.840.881	122.413.172	125.410.787
01 01	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	82.014.185	35.605.875	121.600		117.741.640	119.840.881	122.413.172	125.410.787
085.01.WA	Program Dukungan Manajemen	82.014.185	22.131.569			104.145.754	106.318.560	108.761.018	111.722.440
3850	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Internal	82.014.185	22.131.569			104.145.754	106.318.560	108.761.018	111.722.440
085.01.WB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		13.474.306	121.600		13.595.780	13.522.321	13.652.155	13.688.327
3858	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kualitas Perizinan dan Inspeksi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir		12.900.000	121.600		13.021.600	13.000.000	13.000.000	13.000.000
3859	Peningkatan Sistem Kelembagaan dan Kerjasama Bidang Pengawasan Tenaga Nuklir		574.306			574.306	522.321	652.155	688.327
3877	Penyusunan dan Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Ketenaganuklirran		500.000			500.000	500.000	500.000	500.000
	JUMLAH RM	82.014.185	24.070.569			106.084.754	107.284.096	110.756.386	113.753.981
	JUMLAH PNBP		11.535.306	121.600		11.656.886	11.556.785	11.656.786	11.656.786
	TOTAL JUMLAH	82.014.185	35.605.875	121.600		117.741.640	119.840.881	122.413.172	125.410.787



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1/1

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 086

KEMENTERIAN/LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	173.228.047	119.495.135	698.200		293.949.382	286.959.124	285.286.874	812.947.057
086.01	Lembaga Administrasi Negara	173.228.047	119.495.135	698.200		293.949.382	286.959.124	285.286.874	812.947.057
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	173.228.047	100.680.040	698.200		274.894.287	279.866.238	285.780.900	292.975.554
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	173.228.047	100.680.040	698.200		274.894.287	279.866.238	285.780.900	292.975.554
086.01.QD	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN		28.186.880			28.464.810	28.940.785	29.514.844	30.190.176
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
086.01.WA	Program Dukungan Manajemen	173.228.047	72.213.880	698.200		246.127.867	250.564.514	256.274.434	262.785.379
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN		18.755.095			18.755.095	18.100.825	18.495.974	18.971.463
10 05	PENDIDIKAN KEDINASAN		18.755.095			18.755.095	18.100.825	18.495.974	18.971.463
086.01.QD	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN		18.755.095			18.755.095	18.100.825	18.495.974	18.971.463

SK No 154332 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 095

KEMENTERIAN/LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
095.1	Pelaksanaan Dukungan Teknis Terkait Reformasi Birokrasi, Manajemen Talenta, dan SPIPA (Rupiah Murni)		18.750.029			18.750.029	17.123.825	16.644.674	13.771.491
	JUMLAH RM	173.228.047	66.035.629			239.266.876	245.869.971	249.044.681	285.316.862
	JUMLAH PNBP		53.399.506	858.200		54.082.706	55.099.153	56.242.223	57.628.155
	TOTAL JUMLAH	173.228.047	119.435.135	858.200		293.349.582	298.969.124	305.286.904	342.947.017

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	190.167.692	83.366.422	85.801.268		279.335.383	282.859.378	284.868.385	285.241.771
087.01	Arsip Nasional	190.167.692	83.366.422	85.801.268		279.335.383	282.859.378	284.868.385	285.241.771
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	190.167.692	83.366.422	85.801.269		279.335.383	282.859.378	284.868.385	285.241.771
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	190.167.692	83.366.422	85.801.269		279.335.383	282.859.378	284.868.385	285.241.771
087.01.GH	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional		20.543.845	82.724.988		93.268.433	56.849.341	54.165.696	50.468.797
3 04	Pengelolaan Arsip Nasional		20.543.845	82.724.988		93.268.433	56.849.341	54.165.696	50.468.797
4075	Pelestarian Arsip Nasional		4.158.101	40.000		4.198.101	3.000.000	2.000.000	1.000.000
5075	Pelayanan Arsip Nasional		5.054.173			5.054.173	6.731.435	5.251.021	4.957.293
5077	Pengembangan dan Pembinaan SDM Kearsipan		1.057.152			1.057.152	2.455.131	2.005.045	2.502.507
7754	Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih		1.541.191			1.541.191	1.460.131	2.005.053	2.502.506
7755	Pelaksanaan Pengawasan Internal		5.175.040			5.175.040	11.315.845	11.010.158	11.010.158
7756	Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Advisory Pengawasan		1.272.647	1.000		1.273.647	2.516.174	2.010.158	2.010.158
7760	Pengelolaan Anggaran Internal		75.000			75.000	2.150.000	2.000.000	1.000.000
7761	Pelaksanaan Arsip Internal		2.175.200	40.000.000		42.175.200	31.120.000	31.000.000	31.000.000
7840	Pengelolaan Keuangan Negara		543.037	2.132.010		2.675.047	2.370.833	2.370.833	2.370.833
7841	Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Internal		1.100.000			1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
087.01.WA	Program Dukungan Manajemen	190.167.692	62.822.577	3.076.279		186.066.948	231.504.038	230.702.689	235.772.974
5 1	Pengelolaan Internal		221.597			221.597	220.000	221.597	221.597
7042	Pelayanan Pengelolaan Kinerja, Keuangan, dan Pengadaan	190.167.692	1.260.280			191.050.972	193.350.979	190.000.000	92.029.557
7043	Pelayanan Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat		1.260.440			1.260.440	1.709.401	1.260.101	1.602.209
7044	Pelayanan Kepegawaian dan Umum		46.467.947	1.344.179		47.812.126	31.340.731	34.685.740	76.819.611

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

164

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 037

KEMENTERIAN/LEMBAGA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	130.167.692	68.748.302	4.451.670		201.388.664	280.434.319	262.371.288	263.084.040
	JUMLAH PNBP		66.305.120	1.761.899		67.966.019	21.008.010	23.440.001	23.125.207
	JUMLAH SBSN		412.000	59.688.000		60.000.000	57.250	19.091	19.524
	TOTAL JUMLAH	130.167.692	69.366.422	65.901.269		279.325.303	302.353.379	284.830.380	286.241.771

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

167

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 08H

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08H	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	354.822.044	183.803.289	18.842.490		638.467.823	650.784.557	663.606.239	676.931.066
08H 01	Badan Kepegawaian Negara	354.822.044	183.803.289	18.842.490		638.467.823	650.784.557	663.606.239	676.931.066
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	354.822.044	183.803.289	18.842.490		638.467.823	650.784.557	663.606.239	676.931.066
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	354.822.044	183.803.289	18.842.490		638.467.823	650.784.557	663.606.239	676.931.066
088.01.GO	Program Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN		19.413.322			19.413.322	19.488.572	19.570.188	19.875.778
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
088 01 WA	Program Dukungan Manajemen	354.822.044	123.959.967	18.842.490		520.064.501	531.295.985	543.933.053	556.256.279
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	354.822.044	123.959.967			370.612.011	380.009.011	392.610.830	417.003.282
	JUMLAH PNBP		19.413.322	4.799.741		24.213.063	24.060.897	21.257.480	24.815.044
	JUMLAH SBSN			36.842.749		36.842.749	36.842.749	36.842.749	36.842.749
	TOTAL JUMLAH	354.822.044	183.803.289	18.842.490		638.467.823	650.784.557	663.606.239	676.931.066

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LIV-6

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 069

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
069	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	1.277.334.742	490.689.803	403.914.008		2.371.938.553	2.419.556.150	2.468.712.576	2.530.526.283
069.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.277.334.742	490.689.803	403.914.008		2.371.938.553	2.419.556.150	2.468.712.576	2.530.526.283
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	1.277.334.742	693.689.803	403.914.008		2.374.938.553	2.419.556.150	2.468.712.576	2.530.526.283
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	1.277.334.742	693.689.803	403.914.008		2.374.938.553	2.419.556.150	2.468.712.576	2.530.526.283
069.01.EH	Program Pengawasan Pembangunan		381.511.044	14.023.017		395.535.061	402.979.490	411.330.827	421.478.672
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4216	Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi		1.872.027			1.872.027	1.908.950	1.950.474	2.000.825
4217	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah		4.406.331			4.406.331	4.487.143	4.577.998	4.688.165
4218	Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah		1.794.292			1.794.292	1.828.978	1.867.977	1.915.273
4219	Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa		1.743.009			1.743.009	1.762.955	1.785.389	1.812.592
4220	Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah		2.851.424			2.851.424	2.898.036	2.950.444	3.013.987
4221	Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis dan Infrastruktur		1.676.179			1.676.179	1.709.413	1.746.791	1.792.107
4222	Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata		1.773.785			1.773.785	1.807.780	1.846.005	1.892.353
4223	Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur		1.983.174			1.983.174	2.022.143	2.065.960	2.119.102
4224	Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan		1.735.385			1.735.385	1.765.109	1.798.535	1.839.059
4225	Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Desa		1.591.228			1.591.228	1.616.780	1.645.517	1.680.353
4226	Pengawasan Investigasi I		1.729.985			1.729.985	1.738.287	1.747.621	1.758.938
4227	Pengawasan Investigasi II		2.471.009			2.471.009	2.499.506	2.531.547	2.570.396
4228	Pengawasan Investigasi III		2.748.338			2.748.338	2.793.478	2.844.226	2.905.757
4229	Pengawasan Investigasi IV		5.320.648			5.320.648	5.418.220	5.527.906	5.660.903
5237	Koordinasi Perencanaan Kebijakan Pengawasan Intern Nasional dan Pengembangan Metodologi Pengawasan		33.827.760			33.827.760	34.498.923	35.253.384	36.168.151
7070	Pengawasan Forensik Digital dan Analitika Data		3.060.881	2.483.812		5.544.693	5.601.155	5.664.625	5.741.580
7988	Pengawasan Bidang Sosial dan Pelindungan Pekerja Migran		2.055.534			2.055.534	2.055.534	2.055.534	2.055.534
7989	Pengawasan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		2.251.205			2.251.205	2.251.205	2.251.205	2.251.205
7990	Pengawasan Bidang Pangan		2.257.436			2.257.436	2.257.436	2.257.436	2.257.436
7991	Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		1.976.295			1.976.295	1.976.295	1.976.295	1.976.295

SK No 154366 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 099

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.277.334.742	312.177.959	389.890.186		1.979.402.887	2.016.581.460	2.058.374.449	2.109.047.721
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	1.277.334.742	528.588.842	89.025.123		1.890.228.807	1.927.251.889	1.969.671.628	2.019.334.448
	JUMLAH PNBP		56.681.001	22.349.035		79.030.036	79.672.191	81.318.497	83.459.558
	JUMLAH PLN		111.188.880	285.539.850		408.679.710	412.725.870	419.522.550	427.753.252
	TOTAL JUMLAH	1.277.334.742	696.458.803	403.914.008		2.378.938.553	2.419.656.150	2.469.712.676	2.530.626.263

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
090	**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**	700.098.105	684.105.955	12.359.470		1.396.564.530	1.415.881.315	1.426.504.333	1.438.257.014
090.01	**Sekretariat Jenderal**	698.708.105	490.735.572	8.073.000		1.203.516.677	1.210.033.370	1.217.359.272	1.226.248.056
04	**FUNGSI EKONOMI**	698.708.105	498.735.572	8.073.000		1.203.516.677	1.210.033.370	1.217.359.272	1.226.248.056
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**	698.708.105	498.735.572	8.073.000		1.203.516.677	1.210.033.370	1.217.359.272	1.226.248.056
090.01.EE	**Program Perdagangan Luar Negeri**		70.343.886			70.343.886	71.483.423	72.786.878	74.352.497
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	698.708.105	424.905.427	8.073.000		1.129.716.532	1.138.074.025	1.141.096.892	1.145.328.148
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5009	Pembinaan Pengembangan Ekspor Hasil Barang Perdagangan		3.041.143	992.000		3.033.143	3.034.572	3.036.572	3.013.201
5010	Pengawasan Mutu Barang		7.842.329	178.000		8.020.329	8.043.396	8.068.427	8.099.063
5011	Pengembangan Jejaring Bisnis Perdagangan Internasional di Luar Negeri	1.027.981	60.177.319	50.000		37.209.967	37.378.148	37.630.277	37.939.417
5019	Pengelolaan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Lainnya pada Kementerian/Lembaga		8.209.119	1.010.000		10.019.119	10.072.892	10.093.015	10.917.344
5049	Pengembangan Sistem Informasi Perdagangan		30.161.773	3.230.000		33.30.0.773	40.092.536	40.630.245	41.743.877
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

170

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090.02.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri		3.455.150			3.455.150	3.465.923	3.475.907	3.490.218
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.03	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		20.923.439			20.923.439	21.145.184	21.384.617	21.696.020
01	FUNGSI EKONOMI		20.923.439			20.923.439	21.145.184	21.384.617	21.696.020
01.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		20.923.439			20.923.439	21.145.184	21.384.617	21.696.020
090.02.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri		10.710.007			10.710.007	10.821.013	10.937.641	11.077.051
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.02.WA	Program Dukungan Manajemen		10.204.652			10.204.652	10.323.081	10.455.876	10.618.969
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.03	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		14.282.144			14.282.144	14.282.904	14.432.484	14.525.972
04	FUNGSI EKONOMI		14.282.144			14.282.144	14.282.904	14.432.484	14.525.972
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		14.282.144			14.282.144	14.282.904	14.432.484	14.525.972
090.03.WA	Program Dukungan Manajemen		11.087.384			11.087.384	11.128.382	11.273.869	11.328.221
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154363 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

171

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Satuan : Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
090.03.EE	Program Perlindungan Luar Negeri		3.194.200			3.194.200	3.224.606	3.258.616	3.299.767
3731	Pengelolaan Layanan Pengaduan dan Informasi		475.000			475.000	479.750	484.548	489.393
3732	Pengelolaan Bantuan Hukum dan Pemberdayaan		635.000			635.000	641.635	648.051	654.532
3736	Pengelolaan Fasilitasi Ekspor Impor		365.000			365.000	368.650	372.336	376.059
3737	Pengelolaan Impor		525.000			525.000	530.250	535.553	540.908
3745	Pengelolaan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar		574.200			574.200	579.971	585.771	591.954
090.04	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional		17.263.078			17.263.078	25.222.880	25.385.858	26.582.906
04	FUNGSI EKONOMI		17.263.078			17.263.078	25.222.880	25.385.858	26.582.906
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		17.263.078			17.263.078	25.222.880	25.385.858	26.582.906
090.04.EE	Program Perdagangan Luar Negeri		10.496.960			10.496.960	18.322.146	18.322.146	18.322.146
3741	Pengelolaan Perundingan Perdagangan Internasional		6.791.000			6.791.000	6.854.910	6.917.419	6.982.040
3742	Pengelolaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Negosiasi Teknis		775.000			775.000	1.451.950	1.451.950	1.451.950
3743	Pengelolaan Hubungan Kelembagaan Perdagangan Luar Negeri		970.000			970.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
3744	Pengelolaan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN		960.960			960.960	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3746	Pengelolaan Perdagangan Regional		1.000.000			1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3747	Pengelolaan Perdagangan Lintas Kawasan dan Organisasi Perdagangan Internasional		760.000			760.000	1.365.286	1.202.276	1.397.756
090.04.WA	Program Dukungan Manajemen		6.766.118			6.766.118	6.900.934	7.063.513	7.280.760
3748	Pengelolaan Layanan Perkantoran, Teknis Fungsional, Dan Perencanaan Pembangunan Direktorat Jenderal		6.766.118			6.766.118	6.900.934	7.063.513	7.280.760
090.05	Inspektorat Jenderal		9.264.414			9.264.414	9.077.669	9.616.012	9.893.575
04	FUNGSI EKONOMI		9.264.414			9.264.414	9.077.669	9.616.012	9.893.575
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		9.264.414			9.264.414	9.077.669	9.616.012	9.893.575

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**		9.254.414			9.254.414	9.877.560	9.516.012	8.883.873
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3747	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah I		400.000			400.000	400.000	400.000	400.000
3748	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah II		412.128			412.128	412.128	412.128	412.128
3749	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah III		575.018			575.018	575.018	575.018	575.018
3751	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Wilayah V		529.764			529.764	529.764	529.764	529.764
090.08	**Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional**		18.441.474			18.441.474	18.849.100	18.882.729	18.188.081
04	**FUNGSI EKONOMI**		18.441.474			18.441.474	18.849.100	18.882.729	18.188.081
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM**		18.441.474			18.441.474	18.849.100	18.882.729	18.188.081
090.08.EE	**Program Perdagangan Luar Negeri**		10.281.360			10.281.360	10.402.394	10.561.381	10.758.508
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3752	Pengembangan Pasar Ekspor dan Fasilitasi Ekspor		3.130.000			3.130.000	3.130.240	3.103.269	3.171.792
[illegible]	Pengembangan Ekspor Jasa dan Tenaga Kerja		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Ekspor Produk Pertanian		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.05.WA	**Program Dukungan Manajemen**		8.160.114			8.160.114	8.246.706	8.328.642	8.482.502
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.07	**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi**		8.553.077			8.553.077	8.634.238	8.705.510	8.836.176
04	**FUNGSI EKONOMI**		8.553.077			8.553.077	8.634.238	8.705.510	8.836.176

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

17.1

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		8.558.677			8.558.677	8.684.288	8.726.510	8.838.178
090.07.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri		2.600.000			2.600.000	2.620.659	2.643.766	2.671.771
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Bidang Kebijakan dan Pelayanan Hukum		535.000			535.000	537.653	539.530	540.673
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.07.WA	Program Dukungan Manajemen		5.958.677			5.958.677	6.063.629	6.082.744	6.166.407
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.08	Badan Kebijakan Perdagangan		9.135.481			9.135.481	9.182.053	9.203.172	9.253.024
04	FUNGSI EKONOMI		9.135.481			9.135.481	9.182.053	9.203.172	9.253.024
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		9.135.481			9.135.481	9.182.053	9.203.172	9.253.024
090.08.WA	Program Dukungan Manajemen		9.135.481			9.135.481	9.182.053	9.203.172	9.253.024
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		53.596.851	3.894.460		57.491.151	59.735.648	59.073.502	60.007.490
04	FUNGSI EKONOMI		53.596.851	3.894.460		57.491.151	59.735.648	59.073.502	60.007.490
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		53.596.851	3.894.460		57.491.151	59.735.648	59.073.502	60.007.490
090.09.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri		17.278.683	3.835.480		21.114.163	21.402.748	21.726.534	22.125.990

SK No 154360 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
096.09.WA	Program Dukungan Manajemen		38.819.988	59.000		38.878.988	39.882.788	37.342.988	37.991.688
[illegible]	[illegible]		36.810.988	59.000		36.870.988	39.832.788	37.342.988	37.991.688
096.11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	7.190.700	33.960.615	391.980		41.543.295	41.985.883	42.532.381	43.178.870
10	FUNGSI PENDIDIKAN	7.190.700	5.359.300			12.550.000	12.862.870	12.859.044	13.047.485
10.08	PENDIDIKAN TINGGI	7.190.700	5.359.300			12.550.000	12.862.870	12.859.044	13.047.485
096.11.WA	Program Dukungan Manajemen	7.190.700	5.359.300			12.550.000	12.862.870	12.859.044	13.047.485
[illegible]	[illegible]	7.190.700	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	FUNGSI EKONOMI		28.601.315	391.980		28.993.295	29.305.883	29.670.337	30.132.975
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM		28.601.315	391.980		28.993.295	29.305.883	29.670.337	30.132.975
096.11.WA	Program Dukungan Manajemen		24.697.419	391.980		25.089.399	25.621.797	25.996.441	26.448.479
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
090.11.EE	Program Perdagangan Luar Negeri		3.683.896			3.683.896	3.683.896	3.683.896	3.683.896
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	703.888.806	642.970.648	8.864.880		1.355.634.334	1.372.884.716	1.382.184.880	1.383.617.317
	JUMLAH PNBP		41.135.406	3.394.590		44.529.996	43.956.599	44.309.453	44.739.697
	TOTAL JUMLAH	703.888.806	684.106.055	12.259.470		1.400.164.330	1.416.811.315	1.426.504.333	1.428.357.014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	188.502.164	960.517.824	6.980.212		1.156.000.000	1.244.718.082	1.270.266.890	1.301.220.048
092.01	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	188.502.164	960.517.824	6.980.212		1.156.000.000	1.244.718.082	1.270.266.890	1.301.220.048
10	FUNGSI PENDIDIKAN		243.812.733			243.812.733	313.163.098	319.091.395	327.481.821
10 10	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		243.812.733			243.812.733	313.163.098	319.091.395	327.481.821
092.01.DA	Program Keolahragaan		187.312.733			187.312.733	254.482.640	260.003.011	266.875.181
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5221	Pelaksanaan Olahraga Pendidikan		30.215.939			30.215.939	31.241.904	31.901.031	32.885.023
5222	Pembinaan Olahraga Masyarakat		31.251.000			31.251.000	35.520.735	36.095.392	36.659.557
5223	Pembinaan Olahraga Prestasi		109.244.195			109.244.195	129.979.845	132.006.592	135.930.452
092.01.DB	Program Kepemudaan		56.500.000			56.500.000	57.680.454	58.007.484	60.616.480
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	188.502.164	165.027.836	3.020.000		357.550.000	364.114.647	371.483.680	380.441.136
01 03	PELAYANAN UMUM	188.502.164	165.027.836	3.020.000		357.550.000	364.114.647	371.483.680	380.441.136
092.01.WA	Program Dukungan Manajemen	188.502.164	165.027.836	3.020.000		357.550.000	364.114.647	371.483.680	380.441.136
1720	Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemuda dan Olahraga		1.069.292			1.069.292	6.369.293	6.385.297	6.415.629
1721	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3026	Pembangunan Pendidikan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Pemuda dan Olahraga			3.000.000		3.000.000	3.018.540	3.042.140	3.050.184
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		891.348			891.348	918.948	942.148	950.184
[illegible]	[illegible]		1.411.728			1.411.728	1.455.348	1.491.120	1.504.140
OH	**FUNGSI PARIWISATA**		**551.677.055**	**2.960.212**		**554.637.267**	**558.640.411**	**579.670.735**	**583.287.291**
09.02	**PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		**551.677.055**	**2.960.212**		**554.637.267**	**558.640.411**	**579.670.735**	**583.287.291**
022.01.BA	**Program Keolahragaan**		**551.677.055**	**2.960.212**		**554.637.267**	**558.640.411**	**579.670.735**	**583.287.291**
[illegible]	[illegible]		-			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
092	092 Kementerian Pemuda dan Olahraga	188.502.184	930.477.836	3.020.000		1.122.000.000	1.211.082.853	1.285.927.990	1.268.040.050
	JUMLAH RM	188.502.184	930.477.836	3.020.000		1.122.000.000	1.211.082.853	1.285.927.990	1.268.040.050
	JUMLAH BLU		30.039.788	2.960.212		33.000.000	33.635.129	34.327.900	35.179.998
	TOTAL JUMLAH	188.502.184	960.517.624	5.980.212		1.155.000.000	1.244.718.082	1.320.255.890	1.303.220.048

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

179

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 093

KEMENTERIAN/LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	980.497.704	626.001.818	75.361.130		1.681.860.653	1.843.437.982	1.708.484.185	1.778.508.481
093.01	Komisi Pemberantasan Korupsi	980.497.704	626.001.818	75.361.130		1.681.860.653	1.843.437.982	1.708.484.185	1.778.508.481
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	980.497.704	626.001.818	75.361.130		1.681.860.653	1.843.437.982	1.708.484.185	1.778.508.481
03.03	PEMBINAAN HUKUM	980.497.704	626.001.818	75.361.130		1.681.860.653	1.843.437.982	1.708.484.185	1.778.508.481
093.03.BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi		258.809.490	61.361.345		320.170.835	332.828.260	338.883.351	337.957.713
	3045 Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi		29.150.127			29.150.127	31.471.312	32.002.635	34.954.450
	3046 Penindakan Tindak Pidana Korupsi		3.934.204			3.934.204	3.934.204	3.934.204	3.934.204
	3048 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya		1.514.116			1.514.116	1.514.116	1.514.116	1.514.116
	3049 Pengelolaan Aset Rampasan Negara dan Benda Sitaan Eksekusi		17.204.543	11.481.345		28.685.888	28.685.888	28.685.888	28.685.888
	3051 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi		6.000.000			6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	3052 Penelitian dan Pengembangan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		3.786.650			3.786.650	3.786.650	3.786.650	3.786.650
	3053 Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi		21.264.250			21.264.250	31.464.250	31.464.250	31.464.250
	3055 Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi		9.710.417			9.710.417	11.045.834	11.045.834	11.045.834
	3057 Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi		12.045.741			12.045.741	12.045.741	12.045.741	12.045.741
	3058 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Penelusuran, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi		29.454.291			29.454.291	29.454.291	29.454.291	29.454.291
	3059 Pencegahan Korupsi melalui Sistem		2.949.270			2.949.270	1.490.274	2.150.441	2.150.441
	3060 Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan		22.747.016			22.747.016	22.958.545	22.958.545	22.958.545
	3070 Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi		5.756.945			5.756.945	9.021.945	9.223.945	9.426.945
	3071 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi		101.229.520			101.229.520	101.229.520	101.229.520	101.229.520
093.03.WA	Program Dukungan Manajemen	980.497.704	257.582.329	12.999.784		1.251.079.817	1.510.614.702	1.371.590.832	1.438.540.768

SK No 154354 C

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 050

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1854	Penyelenggaraan Tugas dan Pelayanan Bantuan Hukum		1.400.000			1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
1855	Penyelenggaraan Umum		894.040	70.040		964.080	994.081	1.024.084	1.055.088
1856	Penyelenggaraan Hal Keprotokolan dan Humas		294.960			294.960	294.960	294.960	294.960
1857	Manajemen Sumber Daya Manusia	880.497.704	12.857.540			893.355.244	1.149.105.420	1.034.615.021	1.146.054.672
1858	Penyelenggaraan Operasional Antar Unit (KPK)		270.011.279	75.041.090		345.052.369	491.031.782	297.139.240	297.139.240
1859	Penyelenggaraan Dukungan Internal Kesekretariatan		5.990.000			5.990.000	9.019.324	9.019.324	9.019.324
1860	Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Internal		7.003.276			7.003.276	9.454.918	7.003.276	7.003.276
1861	Pengelolaan Barang Milik K/L		111.179			111.179	211.179	111.179	111.179
6353	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Kewenangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK		1.025.951			1.025.951			
	JUMLAH RM	880.497.704	525.001.819	75.341.130		1.481.840.653	1.643.437.962	1.706.484.185	1.776.503.481
	TOTAL JUMLAH	880.497.704	525.001.819	75.341.130		1.481.840.653	1.643.437.962	1.706.484.185	1.776.503.481

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LR1

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 095

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	576.838.572	1.222.610.428	800.000		1.800.000.000	1.827.690.818	1.858.813.226	1.886.558.771
095.01	Sekretariat Jenderal DPD RI	188.378.875	116.131.484	800.000		316.311.359	321.645.859	328.554.309	337.061.894
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	188.378.875	116.131.484	800.000		316.311.359	321.645.859	328.554.309	337.061.894
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	188.378.875	116.131.484	800.000		316.311.359	321.645.859	328.554.309	337.061.894
095.01 WA	Program Dukungan Manajemen	188.378.875	116.131.484	800.000		316.311.359	321.645.859	328.554.309	337.061.894
3629	Pengelolaan Organisasi Dan Sumber Daya Manusia		369.000			369.000	100.917	419.815	130.635
3631	Pengelolaan Perencanaan Dan Keuangan	188.378.875	24.057.170			204.227.251	205.492.192	208.473.807	208.927.294
3632	Pengelolaan Sistem Dan Teknologi		3.152.670	431.351		3.584.021	3.815.617	3.779.814	3.747.021
3633	Pengelolaan Layanan Umum, Barang Dan Hasadana Di Kantor Pusat		38.152.644			38.152.644	41.991.218	45.819.864	47.470.171
3634	Pengelolaan Dukungan Administrasi Di Daerah Terpencil		51.399.999			51.399.999	50.845.917	50.845.811	50.785.227
095.02	Dewan Perwakilan Daerah	377.309.697	1.107.378.944			1.484.688.641	1.506.144.959	1.530.259.917	1.556.507.877
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	377.309.697	1.107.378.944			1.484.688.641	1.506.144.959	1.530.259.917	1.556.507.877
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	377.309.697	1.107.378.944			1.484.688.641	1.506.144.959	1.530.259.917	1.556.507.877
095.02 GF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan		1.052.240.817			1.052.240.817	1.103.687.035	1.127.816.098	1.157.050.053
3627	Pemberitahuan Fungsi Legislasi DPD RI		209.015.970			209.015.970	210.642.791	215.615.369	221.195.712
3634	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPD RI		69.309.070			69.309.070	69.630.933	68.103.429	69.985.036
3637	Penyelenggaraan Sidang Paripurna Dan Rapat DPD RI		28.824.778			28.824.778	31.643.459	32.647.521	33.749.624
3638	Pemberitahuan Fungsi Hubungan DPD RI		71.149.211			71.149.211	70.215.233	70.246.179	72.241.212
095.02 WA	Program Dukungan Manajemen	377.309.697	25.139.127			402.447.824	402.447.824	402.447.824	402.447.824
3629	Pengelolaan Keuangan Kesekretariatan Umum Dan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kantor Pusat	377.309.697	25.139.127			402.447.824	402.447.824	402.447.824	402.447.824

SK No 154352 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	576.689.572	1.222.510.428	800.000		1.800.000.000	1.827.690.010	1.858.818.228	1.896.559.771
	TOTAL JUMLAH	576.689.572	1.222.510.428	800.000		1.800.000.000	1.827.690.010	1.858.818.228	1.896.559.771

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 100

KEMENTERIAN/LEMBAGA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	66.640.375	125.159.659	4.453.120		196.253.154	196.854.440	202.902.915	207.311.635
100.01	Komisi Yudisial RI	66.640.375	125.159.659	4.453.120		196.253.154	196.854.440	202.902.915	207.311.635
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	66.640.375	125.159.659	4.453.120		196.253.154	196.854.440	202.902.915	207.311.635
03.03	PEMBINAAN HUKUM	66.640.375	125.159.659	4.453.120		196.253.154	196.854.440	202.902.915	207.311.635
100.01.RH	Program Penegakan Integritas Hakim		38.937.241			38.937.241	40.004.012	40.973.306	41.926.459
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	66.640.375	85.927.418	4.453.120		157.020.913	157.643.528	162.029.549	166.385.176
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3995	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		17.660.778	300.000		17.960.778	18.946.411	19.969.003	19.999.382
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	66.640.375	125.159.659	4.453.120		196.253.154	196.854.440	202.902.915	207.311.635
	TOTAL JUMLAH	66.640.375	125.159.659	4.453.120		196.253.154	196.854.440	202.902.915	207.311.635

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LP I

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 103

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	157.242.676	83.720.281		250.000.000	490.962.957	500.658.414	511.662.762	524.764.390
103.01	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	157.242.676	83.720.281		250.000.000	490.962.957	500.658.414	511.662.762	524.764.390
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	157.242.676	83.720.281		250.000.000	490.962.957	500.658.414	511.662.762	524.764.390
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	157.242.676	83.720.281		250.000.000	490.962.957	500.658.414	511.662.762	524.764.390
103.01.FA	Program Kebahanan Bencana				250.000.000	250.000.000	254.918.069	260.435.787	267.134.888
3601	Pelaksanaan dan Pengembangan Kebijakan Teknis Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Dan Lintas Bidang				250.000.000	250.000.000	254.918.069	260.435.787	267.134.888
103.01.WA	Program Dukungan Manajemen	157.242.676	83.720.281			240.962.957	245.740.345	251.226.975	257.629.502
3672	Pelaksanaan Layanan Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana	157.242.676	21.478.001			178.720.677	182.231.345	186.135.975	191.124.414
3673	Pengelolaan Anggaran dan Barang Badan Penanggulangan Bencana		59.303.001			59.303.001	60.455.032	61.777.226	63.438.172
3674	Pengelolaan Data dan Teknologi Penanggulangan Bencana		2.939.279			2.939.279	3.053.968	3.312.774	3.066.916
	JUMLAH BM	157.242.676	83.060.281		250.000.000	490.302.957	500.900.500	509.089.019	521.017.101
	JUMLAH PNBP		1.435.900			1.435.900	1.457.326	1.703.743	1.747.289
	TOTAL JUMLAH	157.242.676	83.720.281		250.000.000	490.962.957	500.658.414	511.662.762	524.764.390

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LRS

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Satuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
104	KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	260.213.190	282.106.011	4.014.767		546.334.168	555.812.093	565.677.844	575.729.631
104.01	SEKRETARIAT JENERAL	260.213.190	282.106.011	4.014.767		546.334.168	555.812.093	565.677.844	575.729.631
01	FUNGSI EKONOMI	260.213.190	282.106.011	4.014.767		546.334.168	555.812.093	565.677.844	575.729.631
01.02	TENAGA KERJA	260.213.190	282.106.011	4.014.767		546.334.168	555.812.093	565.677.844	575.729.631
104.01.DP	Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia		67.943.684	1.842.483		69.786.167	70.743.241	71.819.682	73.124.880
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7592	Pemberdayaan Keluarga Pekerja Migran Indonesia		700.000			700.000	712.600	725.702	740.100
7593	Pemberdayaan Kemandirian Pekerja Migran Indonesia		700.000			700.000	712.600	725.702	740.100
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154348 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(194)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(Dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Unit Kementerian/Lembaga		30.000			30.000	30.000	30.000	30.000
015	Unit Eselon I Kementerian/Lembaga		30.000			30.000	30.000	30.000	30.000
01	Kegiatan Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7317	Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		750.000			750.000	750.000	750.000	750.000
7318	Koordinasi dan Perumusan Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		750.000	175.000		750.000	750.000	750.000	750.000
104.06.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**260.210.390**	**214.142.327**	**2.174.284**		**476.550.001**	**508.498.053**	**494.057.462**	**504.504.751**
994	Layanan Manajemen Kementerian/Lembaga Negara/Komisi/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	260.210.390	214.142.327	2.174.284		476.550.001	508.498.053	494.057.462	504.504.751
5091	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Program Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		1.500.000	175.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
5092	Pelaksanaan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Kelembagaan		750.000			750.000	750.000	750.000	750.000
5093	Pelaksanaan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pengawasan, Pengadaan, Manajemen Kinerja, dan Kehumasan		30.000			30.000	30.000	30.000	30.000
5094	Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia		11.250.000			11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
8100	Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran		750.000			750.000	750.000	750.000	750.000
8101	Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Timur Tengah dan Afrika		1.500.000	175.000		1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
8102	Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Asia Pasifik		30.000			30.000	30.000	30.000	30.000
8103	Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah Eropa, Amerika, dan Afrika		5.250.000			5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
8104	Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah I		500.004			500.004	500.004	500.004	500.004
8105	Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Wilayah II		500.004			500.004	500.004	500.004	500.004
8106	Pelaksanaan Manajemen Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri		1.500.000	65.000		1.565.000	1.565.000	1.565.000	1.565.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dalam ribuan rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8004	Dukungan Manajemen [illegible]		[illegible]	240.000		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	280.213.390	279.686.011	4.016.767		543.916.168	553.342.192	561.050.948	577.026.288
	JUMLAH PNBP		2.620.000			2.620.000	2.688.892	2.626.196	2.684.343
	TOTAL JUMLAH	280.213.390	282.106.011	4.016.767		546.536.168	556.012.084	566.677.144	579.720.631

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 105

KEMENTERIAN/LEMBAGA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam Ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
105	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**	75.302.562	134.673.267	6.291.125		216.266.954	220.281.845	224.795.248	230.267.640
105.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	75.302.562	134.673.267	6.291.125		216.266.954	220.281.845	224.795.248	230.267.640
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	75.302.562	134.673.267	6.291.125		216.266.954	220.281.845	224.795.248	230.267.640
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	75.302.562	134.673.267	6.291.125		216.266.954	220.281.845	224.795.248	230.267.640
105.01.EJ	**Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional**		74.258.680	1.868.000		76.127.680	78.987.580	82.100.652	84.649.787
105.01.EJ.WA	Penyelenggaraan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa		74.258.680			74.258.680	77.387.580	80.500.652	83.049.787
105.01.EJ.WB	Penyelenggaraan Sistem Informasi PBJ		1.868.000	1.868.000		3.736.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
105.01.EJ.WC	Pengembangan Kapasitas SDM PBJ		14.652.549	423.000		15.075.549	17.812.612	18.207.864	18.419.278
105.01.EJ.WD	Penyelenggaraan Pengelolaan Data		8.693.219	39.000		8.732.219	8.972.487	9.172.787	9.192.972
105.01.EJ.WE	Penyelenggaraan Kerjasama Internasional PBJ		4.257.168			4.257.168	4.581.364	4.681.212	4.781.141
105.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	75.302.562	60.414.779	4.423.125		136.139.466	140.294.257	142.694.596	146.618.123
105.01.WA.WA	Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen		1.791.910			1.791.910	1.791.910	1.791.910	1.791.910
105.01.WA.WB	Pengembangan Sistem Pengawasan Manajemen Organisasi dan Pelaksanaan Pengawasan Internal		5.142.715			5.142.715	5.142.715	5.142.715	5.142.715
105.01.WA.WC	Pembinaan, Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi	75.302.562	3.814.109			79.116.671	72.610.743	81.230.210	83.320.243
105.01.WA.WD	Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Sistem Informasi dan Kearsipan Organisasi Pelaksanaan		48.953.105			48.953.105	44.954.911	45.979.281	46.211.847
105.01.WA.WE	Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Infrastruktur TIK		1.710.940	2.132.125		3.843.065	5.794.080	5.549.480	5.151.407
	JUMLAH RM	75.302.562	134.673.267	6.291.125		216.266.954	220.281.845	224.795.248	230.267.640
	TOTAL JUMLAH	75.302.562	134.673.267	6.291.125		216.266.954	220.281.845	224.795.248	230.267.640

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	**BADAN SAR NASIONAL**	578.364.190	910.140.289	85.181.490		1.573.685.969	1.581.278.849	1.612.302.537	1.649.929.270
107.01	**Badan SAR Nasional**	578.364.190	910.140.289	85.181.490		1.573.685.969	1.581.278.849	1.612.302.537	1.649.929.270
04	**FUNGSI EKONOMI**	578.364.190	910.140.289	85.181.490		1.573.685.969	1.581.278.849	1.612.302.537	1.649.929.270
04.08	**TRANSPORTASI**	578.364.190	910.140.289	85.181.490		1.573.685.969	1.581.278.849	1.612.302.537	1.649.929.270
107.01.BM	**Program Penanganan dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana**		633.185.536	52.000.000		685.185.536	696.187.000	708.854.561	725.548.605
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
107.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	578.364.190	276.954.753	33.181.490		888.490.433	885.089.849	903.747.976	924.381.665
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(50)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 107
KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN SAR NASIONAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	JUMLAH RM	573.354.190	809.196.448	66.181.490		1.662.732.128	1.580.343.774	1.441.318.929	1.448.912.139
	JUMLAH PNBP		943.840			943.840	982.566	983.617	1.009.140
	TOTAL JUMLAH	573.354.190	810.140.288	66.181.490		1.663.676.968	1.581.278.340	1.442.302.547	1.449.921.279

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 108
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	48.000.000	110.182.898	5.316.000		163.498.898	166.435.315	167.612.096	170.251.404
108.08	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	48.000.000	110.182.898	5.316.000		163.498.898	166.435.315	167.612.096	170.251.404
04	FUNGSI EKONOMI	48.000.000	110.182.898	5.316.000		163.498.898	166.435.315	167.612.096	170.251.404
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	48.000.000	110.182.898	5.316.000		163.498.898	166.435.315	167.612.096	170.251.404
108.08.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan		56.000.898	316.000		56.316.898	56.550.456	56.813.031	57.131.405
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
108.08.WA	Program Dukungan Manajemen	48.000.000	54.182.000	5.000.000		107.182.000	109.884.859	110.799.065	113.119.999
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	48.000.000	99.182.898	5.316.000		152.498.898	154.435.417	156.537.011	159.109.407
	JUMLAH PNBP		11.000.000			11.000.000	11.999.898	11.075.085	11.141.997
	TOTAL JUMLAH	48.000.000	110.182.898	5.316.000		163.498.898	166.435.315	167.612.096	170.251.404

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 v 2

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 110

KEMENTERIAN/LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	138.563.918	119.750.712	663.543		251.978.173	368.996.950	387.321.173	408.789.719
110.01	Ombudsman Republik Indonesia	138.563.918	119.750.712	663.543		251.978.173	368.996.950	387.321.173	408.789.719
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	138.563.918	119.750.712	663.543		251.978.173	368.996.950	387.321.173	408.789.719
01 01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA URUSAN LUAR NEGERI	138.563.918	119.750.712	663.543		251.978.173	368.996.950	387.321.173	408.789.719
110.01 QS	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		37.022.641			37.022.641	58.318.056	65.948.581	76.874.470
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110.01 WA	Program Dukungan Manajemen	138.563.918	74.728.171	663.543		214.955.632	311.580.394	321.372.592	332.913.249
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	138.563.918	119.750.712	663.543		251.978.173	368.996.950	387.321.173	408.789.719
	TOTAL JUMLAH	138.563.918	119.750.712	663.543		251.978.173	368.996.950	387.321.173	408.789.719

SK No 154387 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 111

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	76.812.190	180.746.282	210.053.403		469.610.875	474.042.838	479.024.824	485.066.188
111.01	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	76.812.190	180.746.282	210.053.403		469.610.875	474.042.838	479.024.824	485.066.188
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	76.812.190	180.746.282	210.053.403		469.610.875	474.042.838	479.024.824	485.066.188
01.08	PEMBANGUNAN DAERAH		34.892.805	988.403		35.281.008	35.459.127	35.681.898	35.952.012
111.01.AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan		34.892.805	988.403		35.281.008	35.459.127	35.681.898	35.952.012
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01 BO	PELAYANAN UMUM LAINNYA	76.812.190	145.853.477	209.065.000		431.730.667	438.583.711	443.342.926	449.113.176
111.01.WA	Program Dukungan Manajemen	76.812.190	145.853.477	209.065.000		431.730.667	438.583.711	443.342.926	449.113.176
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengelolaan Organisasi, SDM dan Kerjasama		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	76.812.190	180.746.282	210.053.403		469.610.875	474.042.838	479.024.824	485.066.188
	TOTAL JUMLAH	76.812.190	180.746.282	210.053.403		469.610.875	474.042.838	479.024.824	485.066.188

SK No 154386 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

Satuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)**		1.598.738.868	929.209.662		2.627.948.530	2.559.222.765	2.581.683.359	2.616.080.688
112.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)		1.598.738.868	929.209.662		2.627.948.530	2.559.222.765	2.581.683.359	2.616.080.688
04	FUNGSI EKONOMI		1.598.738.868	929.209.662		2.627.948.530	2.559.222.765	2.581.683.359	2.616.080.688
04.90	EKONOMI LAINNYA		1.598.738.868	929.209.662		2.627.948.530	2.559.222.765	2.581.683.359	2.616.080.688
112.01.EH	**Program: Pengembangan Kawasan Strategis**		588.810.208	840.801.271		1.429.920.479	1.437.248.478	1.448.603.562	1.457.960.065
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- [illegible] -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 113

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

[illegible]

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	100.896.523	69.896.346	1.551.884.619		1.719.777.488	970.276.169	899.462.732	1.029.525.923
113.08	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	100.896.523	69.896.346	1.551.884.619		1.719.777.488	970.276.169	899.462.732	1.029.525.923
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	100.896.523	69.896.346	1.551.884.619		1.719.777.488	970.276.169	899.462.732	1.029.525.923
03.60	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	100.896.523	69.896.346	1.551.884.619		1.719.777.488	970.276.169	899.462.732	1.029.525.923
113.08.BA	Program Penanggulangan Terorisme		5.818.400	1.491.229.728		1.497.048.128	9.803.992	4.052.001	4.178.581
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
113.08.WA	Program Dukungan Manajemen	100.896.523	63.158.946	120.654.891		284.720.360	960.041.197	895.410.731	1.025.362.362
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	100.896.523	69.896.346			167.852.869	170.276.169	175.462.732	180.805.923
	JUMLAH PLN			1.491.229.728		1.491.229.728			
	JUMLAH SBSN			120.654.891		120.654.891	800.000.000	824.000.000	848.720.000
	TOTAL JUMLAH	100.896.523	69.896.346	1.551.884.619		1.719.777.488	970.276.169	899.462.732	1.029.525.923

SK No 154381 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 115

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.308.800.704	1.163.630.765	500.000		2.472.934.469	8.183.887.351	80.747.162.885	81.111.229.568
115.01	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	1.308.800.704	1.163.630.765	500.000		2.472.934.469	8.183.887.351	80.747.162.885	81.111.229.568
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	1.308.800.704	1.163.630.765	500.000		2.472.934.469	8.183.887.351	80.747.162.885	81.111.229.568
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	1.308.800.704	1.163.630.765	500.000		2.472.934.469	8.183.887.351	80.747.162.885	81.111.229.568
115.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.308.808.704	1.121.472.928			2.430.276.632	2.882.842.497	2.980.260.117	3.089.385.553
4000	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal		120.000			120.000	120.000	120.000	120.000
4006	Tenaga Ahli Eksternal		120.000			120.000	120.000	120.000	120.000
6000	Pengelolaan Keuangan Pada Unit [illegible]	1.308.800.704	1.000.000.705			2.308.800.409	2.760.367.497	2.858.760.117	2.968.317.553
6050	Pengelolaan Organisasi Dan SDM		121.287.223			121.287.223	122.230.000	122.240.000	122.060.000
115.01.GQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		42.157.837	500.000		42.657.837	1.270.023.887	7.766.872.768	8.044.844.015
4000	Tenaga Pendukung Pemilu		3.000.837			3.000.837	1.000.000.141	7.737.000.152	8.000.000.546
6000	[illegible]		37.264.000			37.264.000	31.962.997	31.962.997	31.962.997
6013	[illegible]		4.400.000			4.400.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
6014	Penyelenggaraan Pemilu di [illegible]		2.440.000			2.440.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
6016	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemilu Pemerintah Pusat		40.000.000	500.000		40.500.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
	JUMLAH RM	1.308.800.704	1.163.630.765	500.000		2.472.934.469	8.183.887.351	80.747.162.885	81.111.229.568
	TOTAL JUMLAH	1.308.800.704	1.163.630.765	500.000		2.472.934.469	8.183.887.351	80.747.162.885	81.111.229.568

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

158

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 119

KEMENTERIAN/LEMBAGA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	611.240.964	386.464.991			997.705.955	1.008.283.017	1.024.014.428	1.047.210.826
119.01	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	611.240.964	386.464.991			997.705.955	1.008.283.017	1.024.014.428	1.047.210.826
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	611.240.964	386.464.991			997.705.955	1.008.283.017	1.024.014.428	1.047.210.826
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	611.240.964	386.464.991			997.705.955	1.008.283.017	1.024.014.428	1.047.210.826
119.01.QC	Program Penyiaran Publik		16.859.345			16.859.345	16.082.061	16.370.491	16.780.725
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	497.874	[illegible]
119.01.WA	Program Dukungan Manajemen	611.240.964	370.396.646			981.637.610	992.200.956	1.007.643.937	1.030.430.101
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	611.240.964	370.396.646			981.637.610	992.200.956	1.007.643.937	1.030.430.101
	JUMLAH PNBP		16.859.345			16.859.345	16.082.061	16.370.491	16.780.725
	TOTAL JUMLAH	611.240.964	386.464.991			997.705.955	1.008.283.017	1.024.014.428	1.047.210.826

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 117

KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	847.784.774	477.917.282	34.021.004		1.159.703.060	1.182.317.201	1.207.738.821	1.238.581.984
117.01	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	847.784.774	477.917.282	34.021.004		1.159.703.060	1.182.317.201	1.207.738.821	1.238.581.984
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	847.784.774	477.917.282	34.021.004		1.159.703.060	1.182.317.201	1.207.738.821	1.238.581.984
01.99	PELAYANAN UMUM LAINNYA	847.784.774	477.917.282	34.021.004		1.159.703.060	1.182.317.201	1.207.738.821	1.238.581.984
117.01.GC	Program Penyiaran Publik		187.744.945	26.241.933		182.986.881	187.297.907	191.020.872	195.534.131
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
117.01.WA	Program Dukungan Manajemen	847.784.774	320.872.934	7.776.071		975.719.179	995.019.294	1.016.718.249	1.043.027.853
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	847.784.774	481.745.842	8.895.218		1.089.606.832	1.110.570.368	1.134.248.785	1.162.990.627
	JUMLAH PNBP		46.171.440	24.025.786		70.197.226	71.746.833	73.489.036	75.591.457
	TOTAL JUMLAH	847.784.774	477.917.282	34.021.004		1.159.703.060	1.182.317.201	1.207.738.821	1.238.581.984

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 118

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

Satuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)		34.580.707	1.895.036		36.475.743	36.598.123	36.735.689	36.902.607
118.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)		34.580.707	1.895.036		36.475.743	36.598.123	36.735.689	36.902.607
04	FUNGSI EKONOMI		34.580.707	1.895.036		36.475.743	36.598.123	36.735.689	36.902.607
04.90	EKONOMI LAINNYA		34.580.707	1.895.036		36.475.743	36.598.123	36.735.689	36.902.607
118.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis		3.374.609	1.895.036		5.269.645	5.383.991	5.481.193	5.625.420
5[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5[illegible]	Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5[illegible]	Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha di Kawasan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5[illegible]	Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Lahan		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5732	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		43.220			43.220	45.000	46.000	46.000
5733	Pelaksanaan Manajemen Pelabuhan Bebas dan Internasional		3.330.201			3.330.201	3.565.705	3.650.015	3.810.924
118.01.WA	Program Dukungan Manajemen		31.216.198			31.216.198	31.234.232	31.254.608	31.279.087
5[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH BM		24.800.173			24.800.173	24.818.207	24.838.481	24.861.062
	JUMLAH BLU		9.780.534	1.895.036		11.675.570	11.779.916	11.897.208	12.039.545
	TOTAL JUMLAH		34.580.707	1.895.036		36.475.743	36.598.123	36.735.689	36.902.607

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

201

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 119

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN KEAMANAN LAUT

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	BADAN KEAMANAN LAUT	140.780.891	247.085.181	1.384.161.821		1.751.987.893	2.290.287.689	2.309.687.609	2.368.630.638
119.01	Badan Keamanan Laut	140.780.891	247.085.181	1.384.161.821		1.751.987.893	2.290.287.689	2.309.687.609	2.368.630.638
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	140.780.891	247.085.181	1.384.161.821		1.751.987.893	2.290.287.689	2.309.687.609	2.368.630.638
03.50	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	140.780.891	247.085.181	1.384.161.821		1.751.987.893	2.290.287.689	2.309.687.609	2.368.630.638
119.01.BA	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia		140.741.113	1.384.161.821		1.524.902.934	1.984.787.076	2.007.951.911	2.060.067.047
119.01.BA.WA	Penyelenggaraan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut		89.977.940	1.291.961.125		1.381.939.065	1.784.291.481	2.001.655.671	2.054.067.047
119.01.BA.WA.0007	Pengembangan Pos Pengamatan Laut Nasional Dan Infrastruktur Keamanan Dan Keselamatan Laut		5.661.273	230.364.291		1.330.026.324	265.315.935	5.396.240	9.001.000
119.01.WA	Program Dukungan Manajemen	140.780.891	106.324.068			247.084.959	295.480.611	301.845.798	309.583.592
119.01.WA.0003	Layanan Umum	140.780.891	106.324.068			247.084.959	295.480.611	301.845.798	309.583.592
	JUMLAH BM	140.780.891	247.085.181			387.866.072	1.969.807.395	2.309.687.609	2.368.630.638
	JUMLAH PLN			1.092.805.186		1.092.805.186	261.480.181		
	JUMLAH SBSN			271.656.635		271.656.635			
	TOTAL JUMLAH	140.780.891	247.085.181	1.384.161.821		1.751.987.893	2.290.287.689	2.309.687.609	2.368.630.638

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2026

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 122

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	104.623.359	278.338.663	2.000.000		384.962.022	390.477.904	396.790.889	404.444.782
122.01	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	104.623.359	278.338.663	2.000.000		384.962.022	390.477.904	396.790.889	404.444.782
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	104.623.359	278.338.663	2.000.000		384.962.022	390.477.904	396.790.889	404.444.782
01.03	PELAYANAN UMUM	104.623.359	278.338.663	2.000.000		384.962.022	390.477.904	396.790.889	404.444.782
122.01.AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila		184.885.000			184.885.000	197.607.858	200.455.210	204.931.021
9035	Pengelolaan Hubungan [illegible] Pembinaan Ideologi Pancasila		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9037	[illegible]		14.931.347			14.931.347	14.930.371	14.943.274	14.955.913
9038	Pengelolaan Alat Kelengkapan Pembinaan Ideologi Pancasila		12.424.229			12.424.229	12.666.357	21.663.254	21.278.041
9039	Penyelenggaraan Kerjasama dan Kemitraan Pembinaan Ideologi Pancasila		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9040	Pengembangan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila		12.224.726			12.224.726	12.364.242	12.464.274	12.505.003
122.01.WA	Program Dukungan Manajemen	104.623.359	82.453.663	2.000.000		189.077.022	192.870.035	196.335.679	200.413.761
9036	Pengelolaan Dukungan Manajemen	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	104.623.359	278.338.663	2.000.000		384.962.022	390.477.904	396.790.889	404.444.782
	TOTAL JUMLAH	104.623.359	278.338.663	2.000.000		384.962.022	390.477.904	396.790.889	404.444.782

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

203

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 123

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	64.434.954	186.907.257	8.880.000		259.222.211	264.072.074	269.624.026	276.134.410
123.01	Sekretariat Jenderal	64.434.954	186.907.257	8.880.000		259.222.211	264.072.074	269.624.026	276.134.410
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	64.434.954	186.907.257	8.880.000		259.222.211	264.072.074	269.624.026	276.134.410
03.50	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	64.434.954	186.907.257	8.880.000		259.222.211	264.072.074	269.624.026	276.134.410
123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		113.483.377	8.730.000		122.213.377	126.496.822	127.063.853	130.179.538
6222	Pelindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban		83.110.265	5.730.000		88.840.265	89.021.012	104.600.000	101.019.729
001	Penyelenggaraan Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban		83.110.265	5.730.000		88.840.265	89.021.012	104.600.000	101.019.729
123.01.WA	Program Dukungan Manajemen	64.434.954	72.423.980	150.000		137.008.934	138.575.252	142.480.074	145.857.872
994	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran [illegible]	64.434.954	72.423.980	150.000		137.008.934	138.575.252	142.480.074	145.857.872
7012	Penyelenggaraan Layanan Hukum Kehumasan Protokol Organisasi dan Tata Laksana serta Reformasi Birokrasi		2.950.000			2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
	JUMLAH RM	64.434.954	186.907.257	8.880.000		259.222.211	264.072.074	269.624.026	276.134.410
	TOTAL JUMLAH	64.434.954	186.907.257	8.880.000		259.222.211	264.072.074	269.624.026	276.134.410

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 124

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124	**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**	**3.030.879.245**	**1.608.931.066**	**1.504.751.880**		**6.144.562.191**	**6.767.679.565**	**7.291.987.403**	**7.945.301.071**
124.01	**Badan Riset dan Inovasi Nasional**	**3.030.879.245**	**1.608.931.066**	**1.504.751.880**		**6.144.562.191**	**6.767.679.565**	**7.291.987.403**	**7.945.301.071**
01	**FUNGSI PELAYANAN UMUM**	**3.015.380.795**	**1.602.463.206**	**1.498.751.880**		**6.116.595.881**	**6.739.158.393**	**7.262.842.498**	**7.915.399.905**
01.04	**PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK**	**3.015.380.795**	**1.602.463.206**	**1.498.751.880**		**6.116.595.881**	**6.739.158.393**	**7.262.842.498**	**7.915.399.905**
124.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**3.015.380.795**	**843.929.551**			**3.859.310.346**	**3.935.435.033**	**4.021.005.834**	**4.124.758.940**
6676	Dukungan Manajemen Iptek	3.015.380.795	842.929.551			3.858.310.346	3.934.435.033	4.020.005.834	4.123.758.940
6677	Pengawasan dan Audit Kinerja Internal		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
124.01.KB	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**		**758.533.655**	**1.498.751.880**		**2.257.285.535**	**2.803.723.360**	**3.241.836.664**	**3.790.640.965**
6680	Manajemen Sumber Daya Manusia Iptek		170.097.508	200.000		170.297.508	327.935.665	473.160.413	629.851.783
6681	Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi		164.539.147	1.482.551.880		1.647.091.027	1.866.385.035	1.994.428.698	2.287.067.921
6682	Fasilitasi Riset dan Inovasi		214.897.000	16.000.000		230.897.000	388.231.362	549.328.789	644.505.447
6683	Pemanfaatan Riset dan Inovasi		200.000.000			200.000.000	200.291.298	200.618.764	201.015.814
6684	Manajemen Riset dan Inovasi Daerah		3.000.000			3.000.000			
6685	Perumusan Kebijakan Pembangunan		3.000.000			3.000.000	8.700.000	10.500.000	12.540.000
6686	Perumusan Kebijakan Riset dan Inovasi		3.000.000			3.000.000	12.180.000	13.800.000	15.660.000
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**15.498.450**	**6.467.860**	**6.000.000**		**27.966.310**	**28.521.172**	**29.144.905**	**29.901.166**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**15.498.450**	**6.467.860**	**6.000.000**		**27.966.310**	**28.521.172**	**29.144.905**	**29.901.166**
124.01.KB	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**		**6.467.860**	**6.000.000**		**12.467.860**	**12.715.223**	**12.993.293**	**13.330.448**
6860	Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir		6.467.860	6.000.000		12.467.860	12.715.223	12.993.293	13.330.448
124.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**15.498.450**				**15.498.450**	**15.805.949**	**16.151.612**	**16.570.718**
6996	Dukungan Manajemen Pendidikan Teknologi Nuklir	15.498.450				15.498.450	15.805.949	16.151.612	16.570.718

SK No 154373 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

205

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 124

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	3.030.879.246	1.448.601.087	1.030.917.204		5.510.397.536	6.117.730.146	6.787.798.324	7.428.711.825
	JUMLAH PNBP		130.902.662	100.896.176		230.808.729	236.746.847	249.231.208	246.843.843
	JUMLAH PLN		10.567.640	222.888.500		238.486.146	247.110.140	248.431.774	262.826.209
	JUMLAH HLN		16.758.778			16.758.778	17.082.304	17.468.087	17.919.814
	JUMLAH SBSN			150.000.000		150.000.000	150.000.000		
	TOTAL JUMLAH	3.030.879.246	1.606.931.066	1.504.751.880		6.144.582.181	6.787.679.555	7.291.897.403	7.945.301.071

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

206

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 125

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN PANGAN NASIONAL

dalam ribuan rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
125	BADAN PANGAN NASIONAL	74.160.617	154.447.432	4.716.554		233.284.603	236.749.965	240.636.138	245.345.609
125.01	Badan Pangan Nasional	74.160.617	154.447.432	4.716.554		233.284.603	236.749.965	240.636.138	245.345.609
04	FUNGSI EKONOMI	74.160.617	154.447.432	4.716.554		233.284.603	236.749.965	240.636.138	245.345.609
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	74.160.617	154.447.432	4.716.554		233.284.603	236.749.965	240.636.138	245.345.609
125.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		87.232.831	1.863.500		89.196.331	90.776.840	92.552.215	94.706.834
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5877	Pengembangan Kerjasama Pangan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Pangan		20.149.974	750.500		20.219.474	21.282.872	21.712.095	22.222.171
5879	Pengembangan Pengelolaan Kelembagaan Ketahanan Pangan		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
125.01.WA	Program Dukungan Manajemen	74.160.617	67.184.601	2.763.054		144.088.272	145.974.125	148.082.923	150.638.775
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	74.160.617	154.447.432	4.716.554		233.284.603	236.749.965	240.636.138	245.345.609
	TOTAL JUMLAH	74.160.617	154.447.432	4.716.554		233.284.603	236.749.965	240.636.138	245.345.609

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 126
KEMENTERIAN/LEMBAGA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Dalam rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	423.000.000	893.748.945	4.855.299.925		6.262.048.870	15.083.837.273	7.262.048.870	8.262.048.870
126.01	Otorita Ibu Kota Nusantara	423.000.000	893.748.945	4.855.299.925		6.262.048.870	15.083.837.273	7.262.048.870	8.262.048.870
01	FUNGSI EKONOMI	423.000.000	893.748.945	4.855.299.925		6.262.048.870	15.083.837.273	7.262.048.870	8.262.048.870
01.99	EKONOMI LAINNYA	423.000.000	893.748.945	4.855.299.925		6.262.048.870	15.083.837.273	7.262.048.870	8.262.048.870
126.01.WA	Program Dukungan Manajemen	423.000.000	258.700.709	12.388.161		844.088.870	844.088.870	844.088.870	844.088.870
5643	Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan Non Formal		0			0	0	0	0
5646	Pelaksanaan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Asistensi Perpajakan	422.000.000	8.039.000	112.843		430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000
5647	Pelaksanaan Administrasi Perpajakan		0	0		0	0	0	0
5648	Pelaksanaan Kehumasan, PPID, dan Publikasi Perpajakan		0			0	0	0	0
5651	Layanan Pengelolaan Pajak Nasional		0			0	0	0	0
126.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis		776.048.236	4.842.911.764		5.617.960.000	14.449.779.403	5.617.960.000	7.617.960.000
5634	Pelaksanaan Jalan Penghubung Pelabuhan		600.000.000	300.000.000		900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
5641	Pengelolaan Kerjasama		0	0		0	0	0	0
5657	Pengembangan Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat		0			0	0	0	0
5660	Pengembangan Transformasi Digital		0	0		0	0	0	0
5661	Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam		0	0		0	0	0	0
5662	Pengelolaan Kemitraan Strategis		0			0	0	0	0
5667	Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Strategis		0	0		0	0	0	0
	JUMLAH RM	423.000.000	893.748.945	4.855.299.925		6.262.048.870	15.083.837.273	7.262.048.870	8.262.048.870
	TOTAL JUMLAH	423.000.000	893.748.945	4.855.299.925		6.262.048.870	15.083.837.273	7.262.048.870	8.262.048.870

SK No 154370 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 127
KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN KARANTINA INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127	BADAN KARANTINA INDONESIA	860.923.370	579.840.546	322.201.995		1.796.065.911	1.812.687.191	1.831.372.151	1.854.027.215
127.01	Badan Karantina Indonesia	860.923.370	579.840.546	322.201.995		1.796.065.911	1.812.687.191	1.831.372.151	1.854.027.215
04	FUNGSI EKONOMI	860.923.370	579.840.546	322.201.995		1.796.065.911	1.812.687.191	1.831.372.151	1.854.027.215
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	860.923.370	579.840.546	322.201.995		1.796.065.911	1.812.687.191	1.831.372.151	1.854.027.215
127.01.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		282.445.076	322.201.995		604.647.071	608.540.853	608.870.314	611.262.041
7001	Pengawasan Kesehatan Tumbuhan		14.100.000			14.100.000	14.811.453	14.824.731	15.041.141
7002	Pengawasan Kesehatan Hewan		13.204.457			13.204.457	13.869.680	13.882.120	9.647.092
7003	Pengawasan Keamanan Pangan Tumbuhan		17.482.904			17.482.904	17.742.996	18.134.234	19.308.092
7004	Pengawasan Keamanan Pangan Hewan		106.657.715	322.201.995		428.859.710	450.116.724	451.219.013	467.265.491
127.01.WA	Program Dukungan Manajemen	860.923.370	297.395.470			1.191.418.840	1.208.146.338	1.222.791.837	1.242.775.174
9500	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Badan Karantina Indonesia	860.923.370	297.395.470			1.191.418.840	1.208.146.338	1.222.791.837	1.242.775.174
	JUMLAH RM	860.923.370	400.054.749	140.000.000		1.433.978.119	1.448.705.617	1.465.261.118	1.485.334.453
	JUMLAH PNBP		179.885.797	102.378.973		282.264.770	284.158.852	286.252.019	288.889.740
	JUMLAH SBSN			79.823.022		79.823.022	79.823.022	79.823.022	79.803.022
	TOTAL JUMLAH	860.923.370	579.840.546	322.201.995		1.796.065.911	1.812.687.191	1.831.372.151	1.854.027.215



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2026 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 128

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	**BADAN GIZI NASIONAL**	**7.193.784.571**	**259.323.978.128**	**1.482.227.301**		**268.000.000.000**	**272.216.432.930**	**279.080.164.061**	**286.889.814.938**
128.01	**Badan Gizi Nasional**	**7.193.784.571**	**259.323.978.128**	**1.482.227.301**		**268.000.000.000**	**272.216.432.930**	**279.080.164.061**	**286.889.814.938**
04	**FUNGSI EKONOMI**	**7.193.784.571**	**11.038.672.734**	**1.482.227.301**		**19.714.684.606**	**20.004.998.195**	**20.338.112.791**	**20.726.642.398**
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**7.193.784.571**	**11.038.672.734**	**1.482.227.301**		**19.714.684.606**	**20.004.998.195**	**20.338.112.791**	**20.726.642.398**
128.01.DT	**Program Pemenuhan Gizi Nasional**		**5.678.035.025**	**1.418.592.585**		**7.254.927.910**	**7.425.546.162**	**7.572.372.702**	**7.750.397.291**
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

210

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 128
KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN GIZI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6		8	9	10
	7069 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Organisasi Eselon I Lainnya di Lingkup Badan Gizi Nasional		7.115.200	69.000		7.184.200	7.540.416	7.906.236	7.969.693
	7070 Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Unit Eselon I Lainnya di Lingkup Badan Gizi Nasional		7.203.000			7.203.000	7.562.427	7.927.230	7.990.791
	7071 Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Unit Eselon I Lainnya di Lingkup Badan Gizi Nasional		1.200.000			1.200.000	1.260.405	1.321.205	1.331.799
	7069 Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Badan Gizi Nasional		7.203.000			7.203.000	7.562.427	7.927.230	7.990.791
	7071 Pelaksanaan Tugas dan Pemberian Dukungan Administrasi Inspektorat Utama		11.274.291			11.274.291	11.837.506	12.404.504	12.505.275
10	FUNGSI PENDIDIKAN		223.558.960.490			223.558.960.490	227.994.583.822	232.980.629.318	239.026.110.728
10 07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN		223.558.960.490			223.558.960.490	227.994.583.822	232.980.629.318	239.026.110.728
128.01.DT	Program Pemenuhan Gizi Nasional		223.558.960.490			223.558.960.490	227.994.583.822	232.980.629.318	239.026.110.728
	7072 Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Bagi Penerima Manfaat Program Pemenuhan Gizi Nasional		223.558.960.490			223.558.960.490	227.994.583.822	232.980.629.318	239.026.110.728
07	FUNGSI KESEHATAN		24.728.344.904			24.728.344.904	25.216.840.313	25.788.411.982	26.437.061.802
07 03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		24.728.344.904			24.728.344.904	25.216.840.313	25.788.411.982	26.437.061.802
128.01.DT	Program Pemenuhan Gizi Nasional		24.728.344.904			24.728.344.904	25.216.840.313	25.788.411.982	26.437.061.802
	7073 Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Bagi Penerima Manfaat Program Pemenuhan Gizi Nasional		24.728.344.904			24.728.344.904	25.216.840.313	25.788.411.982	26.437.061.802
	JUMLAH RM	7.180.794.571	258.323.978.128	1.482.227.301		268.000.000.000	273.216.432.330	278.089.164.081	286.189.814.938
	TOTAL JUMLAH	7.180.794.571	258.323.978.128	1.482.227.301		268.000.000.000	273.216.432.330	278.089.164.081	286.189.814.938

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

211

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**	**99.165.929**	**238.841.814**	**20.000.000**		**357.897.743**	**364.504.116**	**371.819.758**	**380.409.492**
129.01	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**	**99.165.929**	**238.841.814**	**20.000.000**		**357.897.743**	**364.504.116**	**371.819.758**	**380.409.492**
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**99.165.929**	**238.841.814**	**20.000.000**		**357.897.743**	**364.504.116**	**371.819.758**	**380.409.492**
03.90	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA**	**99.165.929**	**238.841.814**	**20.000.000**		**357.897.743**	**364.504.116**	**371.819.758**	**380.409.492**
129.01.GL	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**		**103.000.000**			**103.000.000**	**105.042.281**	**107.240.075**	**110.125.406**
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**99.165.929**	**135.841.814**	**20.000.000**		**254.897.743**	**259.461.835**	**264.579.683**	**270.284.087**
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154408 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

212

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH RM	98.155.929	238.841.814	20.000.000		357.997.743	364.504.415	371.019.768	380.489.482
	TOTAL JUMLAH	98.155.929	238.841.814	20.000.000		357.997.743	364.504.415	371.019.768	380.489.482

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 130

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	56.591.227	109.084.495	56.258.800		221.934.522	237.591.649	253.967.675	271.482.300
130.01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	56.591.227	109.084.495	56.258.800		221.934.522	237.591.649	253.967.675	271.482.300
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	56.591.227	109.084.495	56.258.800		221.934.522	237.591.649	253.967.675	271.482.300
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	56.591.227	109.084.495	56.258.800		221.934.522	237.591.649	253.967.675	271.482.300
130.01.GL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		53.784.957			53.784.957	57.581.417	40.481.417	40.781.417
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
130.01.WA	Program Dukungan Manajemen	56.591.227	75.299.938	56.258.800		188.149.965	200.000.232	213.506.258	227.720.883
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	56.591.227	109.084.495	56.258.800		221.934.522	237.591.649	253.967.675	271.482.300
	TOTAL JUMLAH	56.591.227	109.084.495	56.258.800		221.934.522	237.591.649	253.967.675	271.482.300

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 131

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

(Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	RPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	62.953.845	143.433.704	700.000		206.987.149	210.231.266	211.078.178	210.299.977
131.01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	62.953.845	143.433.704	700.000		206.987.149	210.231.266	211.078.178	210.299.977
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	62.953.845	143.433.704	700.000		206.987.149	210.231.266	211.078.178	210.299.977
01.03	PELAYANAN UMUM	62.953.845	143.433.704	700.000		206.987.149	210.231.266	211.078.178	210.299.977
131.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		50.000.000			50.000.000	50.367.152	50.780.606	51.210.573
	456 [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	457 [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	461 [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	491 [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
131.01.WA	Program Dukungan Manajemen	62.953.845	93.433.704	700.000		156.987.149	159.864.113	161.068.173	167.019.404
	45 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	62.953.845	143.433.704	700.000		206.987.149	210.231.266	211.078.178	210.299.977
	TOTAL JUMLAH	62.953.845	143.433.704	700.000		206.987.149	210.231.266	211.078.178	210.299.977

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 132

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
132	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	78.607.425	171.164.426	12.795.520		262.567.371	266.796.953	271.660.887	277.338.275
132.01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	78.607.425	171.164.426	12.795.520		262.567.371	266.796.953	271.660.887	277.338.275
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	78.607.425	171.164.426	12.795.520		262.567.371	266.796.953	271.660.887	277.338.275
01.03	PELAYANAN UMUM	78.607.425	171.164.426	12.795.520		262.567.371	266.796.953	271.660.887	277.338.275
132.01.EA	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		72.944.890			72.944.890	73.979.537	75.142.005	76.660.234
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
132.01.WA	Program Dukungan Manajemen	78.607.425	98.219.536	12.795.520		189.612.481	192.816.416	196.518.882	200.785.041
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	78.607.425	171.164.426	12.795.520		262.567.371	266.796.953	271.660.887	277.338.275
	TOTAL JUMLAH	78.607.425	171.164.426	12.795.520		262.567.371	266.796.953	271.660.887	277.338.275

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

216

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 134

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Satuan Dalam Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97.791.674	223.647.433	12.246.473		333.685.580	338.031.074	345.131.469	352.540.181
134.01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	97.791.674	223.647.433	12.246.473		333.685.580	338.031.074	345.131.469	352.540.181
01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	97.791.674	223.647.433	12.246.473		333.685.580	338.031.074	345.131.469	352.540.181
01.03	PELAYANAN UMUM	97.791.674	223.647.433	12.246.473		333.685.580	338.031.074	345.131.469	352.540.181
134.01.GL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan		52.708.482			83.705.482	54.227.682	84.832.878	58.584.607
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		17.000.000			17.000.000	17.791.780	18.614.220	19.475.342
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		16.708.302			16.708.302	16.708.302	16.708.302	16.708.302
134.01.WA	Program Dukungan Manajemen	97.791.674	169.030.951	12.246.473		278.877.098	283.783.392	290.288.591	296.815.574
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	97.791.674	223.647.433	12.246.473		333.685.580	338.031.074	345.131.469	352.540.181
	TOTAL JUMLAH	97.791.674	223.647.433	12.246.473		333.685.580	338.031.074	345.131.469	352.540.181

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
135	KEMENTERIAN HUKUM	2.694.783.889	1.079.860.528	456.770.860		4.231.215.291	4.284.320.977	4.365.254.898	4.441.261.203
135.01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.830.385.873	347.800.087	188.982.380		2.367.628.360	2.408.860.749	2.457.659.177	2.515.492.740
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.830.385.873	347.800.087	188.982.380		2.367.628.360	2.408.860.749	2.457.659.177	2.515.492.740
03.03	PEMBINAAN HUKUM	1.830.385.873	347.800.087	188.982.380		2.367.628.360	2.408.860.749	2.457.659.177	2.515.492.740
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.830.385.873	347.800.087	188.982.380		2.367.628.360	2.408.860.749	2.457.659.177	2.515.492.740
7092	[illegible]		9.552.640			9.552.640	9.709.791	9.922.624	9.947.667
7093	[illegible]		22.672.307			22.672.307	22.672.307	22.672.307	22.672.307
7111	[illegible]		5.[illegible]			5.[illegible]	5.[illegible]	5.[illegible]	5.[illegible]
994	[illegible]		1.[illegible]			1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
995	[illegible]		5.[illegible]			5.[illegible]	5.[illegible]	5.[illegible]	5.[illegible]
[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	[illegible]	[illegible]		1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.03	INSPEKTORAT JENDERAL	15.311.860	15.229.247	147.350		31.688.257	32.210.529	32.791.009	33.494.566
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	15.311.860	15.229.247	147.350		31.688.257	32.210.529	32.791.009	33.494.566
03.03	PEMBINAAN HUKUM	15.311.860	15.229.247	147.350		31.688.257	32.210.529	32.791.009	33.494.566
135.02.WA	Program Dukungan Manajemen	15.311.860	15.229.247	147.350		31.688.257	32.210.529	32.791.009	33.494.566
7017	[illegible]		1.[illegible]			1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
7018	[illegible]		1.[illegible]			1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
7019	[illegible]		1.[illegible]			1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]
7020	[illegible]		1.[illegible]			1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]	1.[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 135

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.03	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20.852.718	55.646.400	17.545.874		94.044.992	85.426.888	86.889.882	88.886.082
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	20.852.718	55.646.400	17.545.874		94.044.992	85.426.888	86.889.882	88.886.082
03.03	PEMBINAAN HUKUM	20.852.718	55.646.400	17.545.874		94.044.992	85.426.888	86.889.882	88.886.082
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi		40.041.839			40.041.839	40.765.876	41.679.548	42.588.719
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.03.WA	Program Dukungan Manajemen	20.852.718	15.604.561	17.545.874		54.003.153	54.661.012	55.401.318	56.298.043
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.04	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	53.630.268	536.053.563	187.894.923		777.686.754	781.107.078	784.953.088	788.615.944
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	53.630.268	536.053.563	187.894.923		777.686.754	781.107.078	784.953.088	788.615.944
03.03	PEMBINAAN HUKUM	53.630.268	536.053.563	187.894.923		777.686.754	781.107.078	784.953.088	788.615.944

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM

Dalam Ribuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
135.04.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		312.342.334	110.911.316		423.253.649	425.296.106	427.480.155	430.128.259
135.04.WA	**Program Dukungan Manajemen**	58.598.286	222.711.228	72.981.868		354.828.105	355.811.272	357.472.834	359.467.595
135.05	**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**	87.078.586	468.366.678	42.300.029		597.744.303	607.686.079	618.607.839	631.895.858
03	**FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	87.078.586	468.366.678	42.300.029		597.744.303	607.686.079	618.607.839	631.895.858
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	87.078.586	468.366.678	42.300.029		597.744.303	607.686.079	618.607.839	631.895.858
135.05.BF	**Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**		259.057.189	22.887.540		281.944.729	286.773.798	292.203.272	298.738.486

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 320 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.06.WA	Program Dukungan Manajemen	87.078.588	209.368.483	19.412.485		345.789.674	320.782.275	328.404.597	333.208.382
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.11	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	21.343.977	101.811.509	1.919.772		125.075.258	127.382.612	129.978.759	133.122.243
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	21.343.977	101.811.509	1.919.772		125.075.258	127.382.612	129.978.759	133.122.243
03.01	PEMBINAAN HUKUM	21.343.977	101.811.509	1.919.772		125.075.258	127.382.612	129.978.759	133.122.243
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi		8.864.945			8.864.945	7.131.232	7.268.771	7.477.181
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		74.866.182			74.866.182	76.336.070	77.987.749	79.891.663
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.11.WA	Program Dukungan Manajemen	21.343.977	19.861.102	1.919.772		43.216.151	43.914.310	44.700.264	45.863.189
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.12	BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	10.496.274	19.858.513	480.630		30.835.417	34.081.070	34.506.170	35.045.880
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	10.496.274	19.858.513	480.630		30.835.417	34.081.070	34.506.170	35.045.880
03.01	PEMBINAAN HUKUM	10.496.274	19.858.513	480.630		30.835.417	34.081.070	34.506.170	35.045.880
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	10.496.274	19.858.513	480.630		30.835.417	34.081.070	34.506.170	35.045.880
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM

[illegible]

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135.13	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM**	41.196.823	135.068.514	17.619.810		193.781.847	196.808.700	199.780.073	203.628.920
03	FUNGSI KEAMANAN DAN KEAMANAN	26.516.400	75.340.990	16.735.810		117.693.000	119.106.228	120.807.408	122.870.090
03.03	PEMBINAAN HUKUM	26.516.400	75.340.990	16.735.810		117.693.000	119.106.228	120.807.408	122.870.090
135.13.WA	Program Dukungan Manajemen	26.516.400	75.340.990	16.735.810		117.693.000	119.106.228	120.807.408	122.870.090
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN	16.680.123	59.724.624	784.300		76.188.947	77.499.474	78.872.666	80.768.690
10.06	PENDIDIKAN KEDINASAN	16.680.123	59.724.624	784.300		76.188.947	77.499.474	78.872.666	80.768.690
135.13.WA	Program Dukungan Manajemen	16.680.123	59.724.624	784.300		76.188.947	77.499.474	78.872.666	80.768.690
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	2.084.783.889	734.338.487	226.475.939		3.045.598.315	3.089.101.892	3.158.238.843	3.252.154.240
	JUMLAH PNBP		845.321.025	290.294.951		1.135.615.976	1.165.219.286	1.199.016.040	1.208.109.963
	TOTAL JUMLAH	2.084.783.889	1.579.660.522	516.770.890		4.221.216.291	4.254.320.877	4.355.254.883	4.441.261.203

SK No 154397 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 136
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	278.057.640	439.071.992			718.129.472	721.780.168	725.905.841	730.899.685
136.01	SEKRETARIAT JENDERAL	278.057.640	188.993.747			468.051.287	468.640.168	471.550.553	475.078.364
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	278.057.640	188.993.747			468.051.287	468.640.168	471.550.553	475.078.364
03.03	PEMBINAAN HUKUM	278.057.640	188.993.747			468.051.287	468.640.168	471.550.553	475.078.364
136.01.WA	Program Dukungan Manajemen	278.057.640	188.993.747			468.051.287	468.640.168	471.550.553	475.078.364
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.02	INSPEKTORAT JENDERAL		9.000.000			9.000.000	9.040.290	9.085.597	9.140.525
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN		9.000.000			9.000.000	9.040.290	9.085.597	9.140.525
03.03	PEMBINAAN HUKUM		9.000.000			9.000.000	9.040.290	9.085.597	9.140.525
136.02.WA	Program Dukungan Manajemen		9.000.000			9.000.000	9.040.290	9.085.597	9.140.525
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.03	DIREKTORAT JENDERAL INSTRUMEN DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA		152.278.406			152.278.406	152.731.628	153.240.181	153.856.821
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN		152.278.406			152.278.406	152.731.628	153.240.181	153.856.821
03.03	PEMBINAAN HUKUM		152.278.406			152.278.406	152.731.628	153.240.181	153.856.821

SK No 154396 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
136.02.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		142.279.408			142.279.408	142.875.063	143.120.001	143.859.524
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.03.WA	Program Dukungan Manajemen		4.000.000			4.000.000	4.056.575	4.120.180	4.197.397
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.04	DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA		90.796.778			90.796.778	91.378.084	92.029.506	92.819.285
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN		90.796.778			90.796.778	91.378.084	92.029.506	92.819.285
03.03	PEMBINAAN HUKUM		90.796.778			90.796.778	91.378.084	92.029.506	92.819.285
136.04.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		86.796.778			86.796.778	87.368.946	87.988.834	88.762.727
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.04.WA	Program Dukungan Manajemen		4.000.000			4.000.000	4.019.085	4.040.671	4.068.605
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	279.057.640	439.071.932			718.129.472	721.790.188	725.905.841	730.868.035
	TOTAL JUMLAH	279.057.640	439.071.932			718.129.472	721.790.188	725.905.841	730.868.035



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 137

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	7.822.585.823	8.678.768.821	2.347.414.737		18.848.674.681	19.134.838.860	18.468.294.958	19.845.816.912
137.01	SEKRETARIAT JENDERAL	760.239.701	312.820.643			1.073.060.344	1.183.607.855	1.265.175.348	1.388.445.186
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	760.239.701	312.820.643			1.073.060.344	1.183.607.855	1.265.175.348	1.388.445.186
03.80	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	760.239.701	312.820.643			1.073.060.344	1.183.607.855	1.265.175.348	1.388.445.186
137.01.WA	Program Dukungan Manajemen	760.239.701	312.820.643			1.073.060.344	1.183.607.855	1.265.175.348	1.388.445.186
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
137.02	INSPEKTORAT JENDERAL	23.239.247	13.858.090			37.197.337	37.718.604	38.304.573	39.015.060
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	23.239.247	13.858.090			37.197.337	37.718.604	38.304.573	39.015.060
03.80	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	23.239.247	13.858.090			37.197.337	37.718.604	38.304.573	39.015.060
137.02.WA	Program Dukungan Manajemen	23.239.247	13.858.090			37.197.337	37.718.604	38.304.573	39.015.060
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
137.03	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1.566.632.619	3.985.956.263	1.577.514.737		7.110.102.619	7.188.538.422	7.238.356.216	7.317.371.522
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.566.632.619	3.985.956.263	1.577.514.737		7.110.102.619	7.188.538.422	7.238.356.216	7.317.371.522
03.80	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	1.566.632.619	3.985.956.263	1.577.514.737		7.110.102.619	7.188.538.422	7.238.356.216	7.317.371.522
137.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.764.185.809	285.164.113		3.049.350.113	3.079.733.020	3.100.281.287	3.149.906.159
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 157

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(Dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
137.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.560.682.810	1.187.468.224	1.291.650.694		4.039.752.488	4.099.796.388	4.139.094.928	4.174.456.168
137.04	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	6.587.368.286	4.281.979.170	789.600.000		10.618.981.356	10.754.252.707	10.900.389.903	11.090.869.370
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6.587.368.286	4.281.979.170	789.600.000		10.618.981.356	10.754.252.707	10.900.389.903	11.090.869.370
03.06	LEMBAGA PEMASYARAKATAN		2.723.000.000			2.723.000.000	2.773.017.436	2.828.244.838	2.887.418.471
137.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.723.000.000			2.723.000.000	2.773.017.436	2.828.244.838	2.887.418.471
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	6.587.368.286	1.558.979.170	789.600.000		7.895.981.356	7.981.235.272	8.077.155.065	8.193.449.889
137.04.WA	Program Dukungan Manajemen	6.587.368.226	1.558.979.170	789.600.000		7.895.981.396	7.981.235.272	8.077.155.065	8.193.449.889
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
137.11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	5.326.139	4.453.755			9.779.894	9.906.282	10.048.325	10.220.574
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5.326.139	4.453.755			9.779.894	9.906.282	10.048.325	10.220.574
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	5.326.139	4.453.755			9.779.894	9.906.282	10.048.325	10.220.574
137.11.WA	Program Dukungan Manajemen	5.326.139	4.453.755			9.779.894	9.906.282	10.048.325	10.220.574
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3.1)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 157

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	7.923.096.923	6.321.787.181	769.600.000		14.814.283.104	14.456.320.012	14.726.269.840	15.054.790.474
	JUMLAH PNBP		3.068.966.740	1.677.814.737		4.634.781.477	4.678.649.038	4.790.014.918	4.791.125.298
	TOTAL JUMLAH	7.923.096.923	9.570.753.921	2.347.414.737		19.449.064.581	19.134.969.050	19.456.284.758	19.845.915.772



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	16.098.717.289	28.682.360.155	220.374.456	13.789.878.100	58.682.130.000	67.831.198.508	58.380.218.287	58.648.518.424
138.01	SEKRETARIAT JENDERAL	14.370.282.848	2.851.216.609	103.096.688	13.763.906.100	31.118.209.845	31.702.094.128	32.368.442.819	33.154.254.484
10	FUNGSI PENDIDIKAN	14.370.282.848	2.851.216.609	103.096.688	13.763.906.100	31.118.209.845	31.702.094.128	32.368.442.819	33.154.254.484
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	14.370.282.848	2.851.216.609	103.096.688	13.763.906.100	31.118.209.845	31.702.094.128	32.368.442.819	33.154.254.484
138.01.WA	Program Dukungan Manajemen	278.419.009	1.115.528.707	118.485.697		1.510.433.413	1.638.301.540	1.589.628.856	1.607.813.629
7292	Pelayanan Perpustakaan Layanan Perpustakaan Satuan Kerja Sarana Pendukung Pendidikan		1.178.000			1.178.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7297	Pelayanan Perkantoran Layanan Listrik, Telepon, Air, Gas, Pengelolaan Kebersihan, dan Pengamanan Satuan Kerja	13.000.000	27.450.000	450.000		40.900.000	42.945.000	45.092.250	47.346.863
7491	Pengembangan Layanan Prima di Bidang Pelayanan Kepemerintahan dan Pelayanan Umum	1.000.000	64.118.000	1.000.000		66.118.000	69.423.900	72.895.095	76.539.850
7496	Pengembangan Kerjasama Internasional di Bidang Pendidikan Kebudayaan, Penelitian, dan Pengembangan Satuan Kerja	1.485.000	141.351.187	2.150.000		144.987.187	152.236.546	159.848.373	167.840.792
7499	Pengembangan Layanan Prima di Bidang Pelayanan Kepemerintahan dan Pelayanan Umum Kementerian dan Lembaga Satuan Kerja	179.341.000	2.111.116.720	70.000.000		470.457.720	493.980.606	518.679.636	544.613.618
7994	Pengembangan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Informasi	9.000.000	1.339.000	40.000.000		50.339.000	52.855.950	55.498.748	58.273.685
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7997	Pelayanan Perkantoran Pengelolaan Sarana dan Prasarana Internal Satuan Kerja	5.000.000	15.000.000			20.000.000	21.000.000	22.050.000	23.152.500
7998	Pelayanan Perkantoran Pengelolaan Keuangan Internal	8.000.000	5.000.000	10.000.000		23.000.000	24.150.000	25.357.500	26.625.375
7999	Layanan Perkantoran Pendidikan	9.026.000	27.267.000	1.226.000		37.519.000	39.394.950	41.364.698	43.432.933
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138.01.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		484.210.575	12.921.991	13.763.906.100	14.260.741.666	14.535.735.445	14.648.851.666	15.218.850.143

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	11.081.843.438	1.251.473.027	1.688.900		16.347.026.588	16.823.067.143	16.943.981.564	18.326.990.212
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2996	[illegible]		82.8xx.x7[illegible]			82.8xx.x7[illegible]	x1.321.30x	86.3[illegible].x6	x8x.21.347
2551	[illegible]		345.251.510			345.251.510	358.275.304	359.057.312	377.201.192
[illegible]	[illegible]		55[illegible]			[illegible]	[illegible]	5x[illegible]	[illegible]
2557	[illegible]		39x.27[illegible]	[illegible]		[illegible]	398.2x7.132	372.9[illegible].370	3x2.176.497
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139.02	INSPEKTORAT JENDERAL	34.659.303	88.862.370	6.342.790		129.864.463	130.849.984	132.251.568	133.973.104
10	FUNGSI PENDIDIKAN	34.659.303	88.862.370	6.342.790		129.864.463	130.849.984	132.251.568	133.973.104
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	34.659.303	88.862.370	6.342.790		129.864.463	130.849.984	132.251.568	133.973.104
139.02.WA	Program Dukungan Manajemen	34.659.303	88.862.370	6.342.790		129.864.463	130.849.984	132.251.568	133.973.104
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2992	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139.03	DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU	645.212.226	3.802.470.217	9.469.303		4.457.139.746	4.230.040.943	4.312.023.082	4.411.424.701
10	FUNGSI PENDIDIKAN	645.212.226	3.802.470.217	9.469.303		4.457.139.746	4.230.040.943	4.312.023.082	4.411.424.701
10.50	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	645.212.226	3.802.470.217	9.469.303		4.457.139.746	4.230.040.943	4.312.023.082	4.411.424.701
139.03.WA	Program Dukungan Manajemen	645.212.226	315.708.957	9.469.303		970.377.186	992.288.785	995.879.021	1.011.914.428

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 136

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		3.188.781.560			3.188.781.560	3.247.752.168	3.316.344.081	3.398.510.273
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.04	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH	606.461.181	14.173.960.091		9.072.000	14.791.513.272	14.594.374.982	14.884.562.677	15.048.784.540
10	FUNGSI PENDIDIKAN	606.461.181	14.173.960.091		9.072.000	14.791.513.272	14.594.374.982	14.884.562.677	15.048.784.540
10 00	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	606.461.181	568.269.493			1.176.731.674	1.194.061.230	1.213.520.983	1.237.127.688
136.04.WA	Program Dukungan Manajemen	606.461.181	568.269.493			1.176.731.674	1.194.061.230	1.213.520.983	1.237.127.688
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10 02	PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		9.274.875.736		6.072.000	9.280.950.736	9.127.959.982	9.226.711.674	9.346.221.212
136.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		918.080.868			918.080.868	667.141.882	696.914.533	708.763.046
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.04.QF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		8.268.497.962		6.072.000	8.362.569.868	8.440.628.060	8.528.797.141	8.636.458.166
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH		2.284.885.889		2.000.000	2.286.885.889	2.336.028.246	2.377.828.925	2.429.921.984
136.04.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		2.142.765.610		2.000.000	2.144.765.610	2.191.301.390	2.222.397.500	2.272.189.413
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		152.119.279			152.119.279	156.726.855	156.569.425	167.732.571
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		2.036.243.879		1.000.000	2.037.243.879	2.037.316.595	2.037.399.115	2.037.482.746
136.04.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		1.873.838.321		1.000.000	1.874.838.321	1.874.838.321	1.874.838.321	1.874.838.321
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		162.405.562			162.405.562	162.477.274	162.757.794	162.955.425
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.05	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS	251.266.359	4.376.433.868	25.904.153	17.000.000	4.670.594.208	4.627.147.328	4.690.718.352	4.787.799.324
10	FUNGSI PENDIDIKAN	251.266.359	4.376.433.868	25.904.153	17.000.000	4.670.594.208	4.627.147.328	4.690.718.352	4.787.799.324
10.99	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	251.266.359	744.375.251	25.904.153		1.021.535.763	1.039.083.719	1.040.486.930	1.085.147.903
136.05.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		426.860.319	24.844.163		451.704.482	468.871.902	487.428.281	478.487.743
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.05.WA	Program Dukungan Manajemen	251.266.359	281.265.792	960.000		533.492.151	533.031.012	533.571.607	545.964.995
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		57.149.120			57.149.120	57.810.775	58.787.032	59.805.342
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 132
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 03	PENDIDIKAN MENENGAH		2.701.648.030			2.701.648.030	2.726.681.414	2.756.246.081	2.788.537.691
132.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		82.241.833			82.241.833	82.372.116	82.518.578	82.688.171
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
132.06.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		2.619.406.197			2.619.406.197	2.644.309.298	2.673.727.452	2.705.941.520
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10 04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL		199.782.029			199.782.029	200.770.191	201.851.085	203.227.985
132.05.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		139.966.662			139.966.662	139.914.621	139.958.238	140.033.595
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
132.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		59.815.367			59.815.367	60.855.570	61.912.798	63.194.340
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10 01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		630.828.386		17.000.000	647.828.386	659.832.004	673.126.348	688.485.775
132.06.DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun		630.828.386		17.000.000	647.828.386	659.832.004	673.126.348	688.485.775
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
132.11	BADAN STANDAR, KURIKULUM DAN ASESMEN PENDIDIKAN	73.251.432	1.144.980.190	16.504.000		1.234.735.622	1.255.074.369	1.277.926.188	1.305.633.144
10	FUNGSI PENDIDIKAN	73.251.432	1.144.980.190	16.504.000		1.234.735.622	1.255.074.369	1.277.926.188	1.305.633.144
10 09	LITBANG PENDIDIKAN	73.251.432	1.144.980.190	16.504.000		1.234.735.622	1.255.074.369	1.277.926.188	1.305.633.144
132.11.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		1.048.889.003			1.048.889.003	1.066.725.979	1.086.766.331	1.111.042.634
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 138
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011	Pengelolaan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138.18.WA	Program Dukungan Manajemen	77.261.432	88.081.157	16.504.300		185.846.889	139.348.384	891.160.787	194.670.760
7917	Layanan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138.12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	205.574.130	344.698.000	30.070.414		580.342.744	891.616.755	704.293.581	718.463.927
10	FUNGSI PENDIDIKAN	205.574.130	344.698.000	30.070.414		580.342.744	891.616.755	704.293.581	718.463.927
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	205.574.130	344.698.000	30.070.414		580.342.744	891.616.755	704.293.581	718.463.927
138.12.WA	Program Dukungan Manajemen	205.574.130	107.853.320	27.960.614		341.088.064	317.469.095	355.110.331	368.108.486
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138.12.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran		140.847.597	109.000		141.026.597	142.216.687	143.756.018	146.501.119
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138.12.DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan		196.296.953	1.921.000		198.217.953	201.510.985	205.427.214	210.054.282
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7997	Pengembangan Bahasa dan Sastra Nasional		93.452.247	1.921.000		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7998	Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Satuan Kerja		41.150.501			41.150.501	41.724.317	41.744.200	42.175.260
	JUMLAH RM	16.088.717.288	28.312.436.412	220.374.448	13.789.678.100	58.611.206.248	57.156.982.688	58.462.112.806	59.388.798.757
	JUMLAH PNBP		9.487.353			9.487.353	9.675.472	9.886.868	10.143.404
	JUMLAH BLU		181.437.388			181.437.388	164.430.339	868.219.488	172.671.243
	TOTAL JUMLAH	16.088.717.288	28.503.360.153	220.374.448	13.789.678.100	58.802.130.989	57.331.188.509	59.330.219.287	59.571.613.424

SK No 154422 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	20 835 772 207	20 804 352 990	5 827 045 085	15 303 699 708	61 971 870 000	62 843 197 522	63 205 585 587	64 207 842 680
139.01	SEKRETARIAT JENDERAL	113 821 621	827 740 086	35 437 190	15 303 699 708	16 280 698 605	16 801 130 557	16 961 323 924	17 388 052 125
10	FUNGSI PENDIDIKAN	113 821 621	827 740 086	35 437 190	15 303 699 708	16 280 698 605	16 801 130 557	16 961 323 924	17 388 052 125
10.05	PENDIDIKAN TINGGI	113 821 621	827 740 086	35 437 190	15 303 699 708	16 280 698 605	16 801 130 557	16 961 323 924	17 388 052 125
139.01.WA	Program Dukungan Manajemen	113 821 621	239 915 080	35 437 190		389 173 891	392 628 949	398 508 585	408 215 001
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139.01.DK	Program Pendidikan Tinggi		587 825 006		15 303 699 708	15 891 524 714	16 408 501 608	16 564 814 339	16 980 837 124
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139.02	INSPEKTORAT JENDERAL	28 601 160	57 284 610	954 201		86 839 961	88 117 749	89 564 136	91 295 732
10	FUNGSI PENDIDIKAN	28 601 160	57 284 610	954 201		86 839 961	88 117 749	89 564 136	91 295 732
10.05	PENDIDIKAN TINGGI	28 601 160	57 284 610	954 201		86 839 961	88 117 749	89 564 136	91 295 732
139.02.WA	Program Dukungan Manajemen	28 601 160	57 284 610	954 201		86 839 961	88 117 749	89 564 136	91 295 732
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139.03	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI	20 063 149 231	19 224 617 447	4 823 447 270		41 891 212 948	41 413 812 182	41 776 826 589	42 208 700 725
10	FUNGSI PENDIDIKAN	20 063 149 231	19 224 617 447	4 823 447 270		41 891 212 948	41 413 812 182	41 776 826 589	42 208 700 725
10.05	PENDIDIKAN TINGGI	20 063 149 231	19 224 617 447	4 823 447 270		41 891 212 948	41 413 812 182	41 776 826 589	42 208 700 725
139.03.DK	Program Pendidikan Tinggi	2 704 297 197	19 196 700 545	4 610 429 141		22 413 451 973	22 823 270 880	22 859 129 819	23 145 164 382
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154421 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7227	Pengelolaan Kerja Sama Internasional		677.436.661			677.436.661	678.647.611	680.647.113	681.981.751
7228	Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan		271.131.751			271.131.751	271.131.751	271.131.751	271.131.751
7229	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Pengelolaan Tenaga Pendidik Akademik		3.513.726.247	721.771.551		4.235.497.798	5.235.110.237	5.253.575.719	5.330.209.425
7230	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan Pengelolaan Tenaga Pendidik		1.781.647.669	2.121.449.810		3.903.097.479	3.903.097.479	3.903.097.479	3.903.097.479
7231	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Pengelolaan Tenaga Pendidik Vokasi		5.911.217.317	95.167.613		6.006.384.930	6.006.384.930	6.006.384.930	6.006.384.930
7232	Pengelolaan Kualitas dan Akreditasi Pendidikan Tinggi Vokasi		1.417.209.693	261.251.277		1.678.460.970	2.016.194.362	2.450.011.715	2.609.711.305
7235	Pengelolaan Pendidikan Tinggi	2.701.297.787	291.180.037	150.142		2.992.627.966	3.005.313.245	2.920.927.539	2.909.126.875
139.03.WA	Program Dukungan Manajemen	17.648.861.044	1.028.988.802	10.023.129		18.687.740.975	18.795.641.292	18.814.897.083	19.043.598.344
7241	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Pendidikan Tinggi	17.614.229.044	972.218.134	10.023.129		18.596.470.307	18.704.370.626	18.723.626.417	18.952.327.678
7245	Pengelolaan Pendidikan Tinggi Lainnya	34.632.000	56.770.668	0		91.402.668	91.270.666	91.270.666	91.270.666
139.04	DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN	21.634.320	3.243.561.969	4.633.782		3.269.730.071	3.298.660.385	3.333.293.612	3.374.063.064
10	FUNGSI PENDIDIKAN	21.634.320	3.243.561.969	4.633.782		3.269.730.071	3.298.660.385	3.333.293.612	3.374.063.064
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	21.634.320	3.243.561.969	4.633.782		3.269.730.071	3.298.660.385	3.333.293.612	3.374.063.064
139.01.DK	Program Pendidikan Tinggi		3.211.312.175	4.633.782		3.215.945.958	3.245.829.654	3.278.896.747	3.318.463.760
7224	Pengelolaan Sistem Penelitian dan Pengembangan		2.211.193.793	1.633.491		2.212.827.284	2.231.231.227	2.251.219.116	2.274.501.107
7225	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Science and Technology Park		1.000.118.382	3.000.291		1.003.118.673	1.014.598.427	1.027.674.631	1.043.962.129
7235	Pengelolaan Pendidikan Tinggi Lainnya		142.119.000	0.000		142.119.000	143.000.000	143.403.865	143.599.812
9005	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal		708.000.293			708.000.293	54.000.000	705.000.000	705.000.000
139.04.WA	Program Dukungan Manajemen	21.634.320	32.249.793			53.784.113	53.000.000	54.396.865	55.599.304
7224	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan	21.634.320	32.249.793			53.784.113	53.000.000	54.396.865	55.599.304

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139.06	DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI	29.869.386	161.948.878	962.672.862		1.135.383.416	1.135.438.686	1.135.687.116	1.135.731.002
10	FUNGSI PENDIDIKAN	29.869.386	161.948.878	962.672.862		1.135.383.416	1.135.438.686	1.135.687.116	1.135.731.002
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	29.869.386	161.948.878	962.672.862		1.135.383.416	1.135.438.686	1.135.687.116	1.135.731.002
139.06.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi		135.323.360	964.176.700		1.002.500.000	1.002.500.000	1.002.500.000	1.002.500.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139.06.WA	Program Dukungan Manajemen	29.869.386	24.625.676	6.396.862		62.889.416	62.939.686	63.087.116	63.231.002
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	20.638.772.207	14.126.196.548	1.870.860.252	15.308.689.703	48.639.638.656	49.230.258.451	48.884.292.449	50.656.422.028
	JUMLAH PHLN		731.607.564	269.840.568		881.451.232	898.492.166	1.008.367.390	1.020.191.218
	JUMLAH BLU		7.442.731.560	1.708.100.052		9.228.049.612	9.290.185.281	9.359.093.125	9.442.646.400
	JUMLAH PLN		5.148.696.678	267.364.955		1.406.061.633	1.418.148.281	1.425.245.898	1.438.271.082
	JUMLAH HLN		47.652.757			47.652.757	48.590.232	49.851.033	50.849.469
	JUMLAH BBSN		3.937.752	1.546.868.368		1.550.806.101	1.550.806.101	1.550.806.101	1.550.806.101
	JUMLAH RMP		7.530.000			7.530.000	7.530.000	7.530.000	7.530.000
	TOTAL JUMLAH	20.638.772.207	26.504.362.990	5.527.046.096	15.308.689.703	81.273.870.993	82.649.197.522	83.285.585.667	84.207.842.649

SK No 154419 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 140
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	326 570 702	1 017 273 864	60.547 135		1 507 391 821	1 525 583 781	1 546 842 230	1.572 166 383
140.01	SEKRETARIAT JENDERAL	30 963 540	197 737 210	4.559 420		233 260 198	237 479 371	242 223.166	247 972 705
10	FUNGSI PENDIDIKAN	30 963 540	197 737 210	4.559 420		233 260 198	237 479 371	242 223.166	247 972 705
10.11	PENGEMBANGAN BUDAYA	30 963 540	197 737 238	4.559 620		233 260 398	237 479 371	242 223.166	247 972 705
140.01.WA	Program Dukungan Manajemen	30.963 540	157 737.238	4.559.620		193.260.398	196 284 166	200.937.548	205.597 827
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140.01.DV	Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		40 000.000			40 000 000	40 536 227	41 284 140	42 076 578
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140.02	INSPEKTORAT JENDERAL	10.918 190	15 034.248			25.950.438	26 485 202	27.043.958	27.745 744
10	FUNGSI PENDIDIKAN	10.918 190	15 034.248			25.950.438	26 485 202	27.043.958	27.745 744
10.11	PENGEMBANGAN BUDAYA	10.918.190	15.034.248			25.950.438	26.485.202	27.043.958	27.745.744
140.02.WA	Program Dukungan Manajemen	10.918 190	15 034.248			25.950.438	26 485 202	27.043.958	27.745 744
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140.03	DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI	326 179 862	619 829 150	30.984 268		976 993 283	831 587 761	889 146.900	897 971 617
10	FUNGSI PENDIDIKAN	326 179 862	619 829 150	30.984 268		976 993 283	831 587 761	889 146.900	897 971 617

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 140
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
10.11	PENGEMBANGAN BUDAYA	326.178.962	518.629.150	30.584.288		875.392.399	881.887.754	889.145.500	897.971.817
140.03.DV	Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		314.805.862	30.584.288		345.488.817	348.188.406	354.736.638	361.183.658
001	Dukungan Kepengurusan Indonesia Dalam [illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
040a	Pemajuan Kebudayaan [illegible]		22.3[illegible]			30.240.045	29[illegible]	21.3[illegible]	[illegible]
041	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
042	Pelindungan Kebudayaan [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
043	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7115	Pelaksanaan Manajemen Cagar Budaya		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140.03.WA	Program Dukungan Manajemen	326.178.962	206.523.288			532.702.249	532.440.380	534.809.911	536.788.159
005	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140.04	DIREKTORAT JENDERAL DIPLOMASI PROMOSI DAN KERJASAMA KEBUDAYAAN	18.964.892	60.855.779			79.820.671	81.461.968	83.285.826	85.609.334
10	FUNGSI PENDIDIKAN	18.964.892	60.855.779			79.820.671	81.461.968	83.285.826	85.609.334
10.11	PENGEMBANGAN BUDAYA	18.964.892	60.855.779			79.820.671	81.461.968	83.285.826	85.609.334
140.04.WA	Program Dukungan Manajemen	18.964.892	11.875.228			31.140.120	31.753.782	32.443.617	33.280.037
7111	Dukungan Manajemen Jenderal Diplomasi Promosi dan Kerjasama Kebudayaan	18.964.892	11.875.228			31.140.120	31.753.782	32.443.617	33.280.037
140.04.DV	Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		48.980.551			48.680.551	49.708.186	50.842.208	52.329.297
040	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
041	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7117	Pelaksanaan Kerja Sama Kebudayaan		5.119.320			5.302.000	5.000.172	5.210.956	5.345.202

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 140

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140.06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN	42.548.128	225.017.568	25.403.227		292.968.923	298.689.495	305.143.781	312.967.383
10	FUNGSI PENDIDIKAN	42.548.128	225.017.568	25.403.227		292.968.923	298.689.495	305.143.781	312.967.383
10 11	PENGEMBANGAN BUDAYA	42.548.128	225.017.568	25.403.227		292.968.923	298.689.495	305.143.781	312.967.383
140.06.DV	Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		196.920.093	26.403.227		223.323.320	226.636.021	230.484.890	236.389.688
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140.06.WA	Program Dukungan Manajemen	42.548.129	28.097.655			71.645.883	72.053.175	74.658.891	76.583.695
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	429.570.702	982.160.696	53.355.385		1.445.117.098	1.483.428.617	1.494.014.099	1.598.973.744
	JUMLAH BLU		85.083.479	7.191.250		92.274.729	92.535.266	92.828.137	93.183.239
	TOTAL JUMLAH	429.570.702	1.067.271.994	60.547.135		1.537.391.831	1.575.963.783	1.586.843.236	1.692.156.983

SK No 154416 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 141
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
141	KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH	38.863.176	523.788.541	18.800.000		579.038.717	581.406.457	584.488.718	588.006.687
141.01	SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH	38.863.176	523.788.541	18.800.000		579.038.717	581.406.457	584.488.718	588.006.687
09	FUNGSI AGAMA	38.863.176	523.788.541	18.800.000		579.038.717	581.406.457	584.488.718	588.006.687
09.80	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	38.863.176	523.788.541	18.800.000		579.038.717	581.406.457	584.488.718	588.006.687
141.01.DC	Program Kemitraan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		388.884.328	18.800.000		481.864.328	485.471.883	486.486.970	487.431.182
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3166	Dukungan Layanan Akomodasi Penyelenggaraan Ibadah Haji		13.287.041			13.287.041	13.450.396	13.484.633	13.963.127
7.99	Pelayanan Perjalanan Ibadah Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji		14.373.520			14.373.520	14.813.092	14.930.207	14.970.220
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7902	Dukungan Pelayanan Evaluasi Ibadah Haji		17.918.000			17.909.000	17.913.192	17.901.623	17.936.714
7903	Pelayanan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji		12.457.000			12.457.000	12.590.223	12.527.287	12.571.347
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
141.01.WA	Program Dukungan Manajemen	38.863.176	57.604.213			96.047.389	96.933.764	98.031.735	100.575.515
3164	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyelenggara Ibadah Haji	38.863.176	57.604.213			96.047.389	96.933.764	98.031.735	100.575.515
	JUMLAH RM	38.863.176	523.788.541	18.800.000		579.038.717	581.406.457	584.488.718	588.006.687
	TOTAL JUMLAH	38.863.176	523.788.541	18.800.000		579.038.717	581.406.457	584.488.718	588.006.687

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2026 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 142

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(Dalam Ribuan Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	45.462.524	449.587.782	38.517.924		651.648.230	682.224.734	573.888.942	588.091.611
142.01	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	45.462.524	449.587.782	38.517.924		651.648.230	682.224.734	573.888.942	588.091.611
09	FUNGSI AGAMA	45.462.524	449.587.782	38.517.924		651.648.230	682.224.734	573.888.942	588.091.611
09.60	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	45.462.524	449.587.782	38.517.924		651.648.230	682.224.734	573.888.942	588.091.611
142.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		391.021.081			391.021.081	386.606.989	406.829.268	417.185.222
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
142.01.WA	Program Dukungan Manajemen	45.462.524	78.566.701	38.517.924		160.827.169	183.714.745	166.940.704	170.906.389
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	45.462.524	411.876.899	38.517.924		485.659.314	600.151.918	510.548.981	526.287.686
	JUMLAH BLU		37.938.916			37.988.916	38.052.821	63.270.011	61.733.712
	TOTAL JUMLAH	45.462.524	449.587.782	38.517.924		651.648.230	682.224.734	573.888.942	588.091.611



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.026.449.832	2.836.294.769	79.540.667		6.038.285.268	6.222.819.407	6.351.656.680	6.508.588.726
143.01	SEKRETARIAT JENDERAL	264.560.970	310.151.351	10.721.193		579.533.524	590.059.911	603.590.337	619.026.934
04	FUNGSI EKONOMI	264.560.970	310.151.351	10.721.193		579.533.524	590.059.911	603.590.337	619.026.934
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	255.860.978	310.151.351	10.721.193		576.733.526	590.059.911	603.590.337	619.026.934
143.01.WA	Program Dukungan Manajemen	255.860.978	307.502.751	10.193.147		573.556.884	587.619.685	600.890.702	615.691.980
7201	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan		7.731.177			7.731.177	7.731.177	7.731.177	7.731.177
7202	Pelaksanaan Dukungan Manajemen Kementerian		52.125.377	1.657.970		53.783.347	53.452.970	53.827.347	53.827.350
7203	Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian		40.118.427			40.118.427	39.499.518	39.154.213	41.470.427
7204	Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah	255.860.978	150.084.950	7.048.973		412.994.901	434.732.241	464.176.229	469.961.776
7205	Pengelolaan Data, Informasi, dan Pelaporan Sektor Kehutanan		5.179.434			5.179.434	5.402.179	5.240.775	5.721.369
7206	Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan		11.321.494	956.050		12.277.544	12.452.979	12.359.781	12.974.811
7207	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kehutanan		4.191.914	1.530.154		5.722.068	4.267.146	4.178.016	4.199.770
7208	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pengelolaan Hubungan Masyarakat		6.701.015	721.011		7.422.026	7.274.016	7.418.274	7.715.017
7209	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis		4.191.914	756.000		4.947.914	4.452.146	4.707.716	4.714.000
143.01.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		2.618.600	555.032		3.176.632	3.239.226	3.308.635	3.335.001
7202	Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi		763.137	345.357		1.108.494	1.127.774	1.150.503	1.161.153
7301	Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		735.137	80.000		815.137	728.536	815.027	851.103
7302	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Hutan		940.326	129.675		1.070.001	981.916	1.113.105	1.121.944
143.02	INSPEKTORAT JENDERAL	25.889.874	28.308.181	1.015.000		55.006.055	54.055.448	55.234.278	56.683.586
04	FUNGSI EKONOMI	25.889.874	28.308.181	1.015.000		55.006.055	54.055.448	55.234.278	56.683.586
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	25.889.874	28.308.181	1.015.000		55.006.055	54.055.448	55.234.278	56.683.586

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2026 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KEHUTANAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
143.02.WA	Program Dukungan Manajemen	25.883.674	26.306.181	1.015.000		53.006.585	84.065.468	85.234.272	88.685.896
[illegible]	[illegible]	25.883.674	[illegible]	1.015.000		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.03	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN	224.442.817	186.082.505	208.020		410.732.842	494.882.141	505.895.348	518.789.680
04	FUNGSI EKONOMI	224.442.817	186.082.505	208.020		410.732.842	494.882.141	505.895.348	518.789.680
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	224.442.817	186.082.505	208.020		410.732.842	494.882.141	505.895.348	518.789.680
143.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		125.067.548	208.020		125.275.568	193.589.617	197.784.429	202.903.184
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.03.WA	Program Dukungan Manajemen	224.442.817	61.014.957			285.457.774	301.301.523	307.870.918	315.938.496
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.04	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.262.683.329	899.998.208	26.171.316		1.877.752.853	2.012.988.466	2.063.348.812	2.102.288.483
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		307.799.687	23.181.316		330.980.983	334.494.837	339.210.297	344.927.545
05.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		307.799.687	23.181.316		330.980.983	334.494.837	339.210.297	344.927.545
143.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		307.799.687	23.181.316		330.980.983	334.494.837	339.210.297	344.927.545
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154412 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	FUNGSI EKONOMI	1.253.583.329	392.190.541	2.010.000		1.646.791.870	1.670.493.809	1.714.131.725	1.757.341.888
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	1.252.583.329	392.198.541	2.010.000		1.646.791.870	1.670.493.809	1.714.131.725	1.757.341.888
143.04.WA	Program Dukungan Manajemen	1.253.583.329	392.190.541	2.010.000		1.646.791.870	1.670.493.809	1.714.131.725	1.757.341.888
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.05	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	845.072.208	757.388.888	8.884.879		1.111.133.856	1.128.488.831	1.151.259.395	1.178.884.841
05	FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		847.408.961	8.407.879		855.816.860	884.428.071	877.385.834	883.085.840
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM		847.408.961	8.407.879		855.816.860	884.428.071	877.385.834	883.085.840
143.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		847.408.961	8.407.879		855.816.860	884.428.071	877.385.834	883.085.840
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	FUNGSI EKONOMI	845.072.208	109.957.887	287.000		455.316.896	464.040.880	473.848.281	485.739.601
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	845.072.208	109.957.887	287.000		455.316.896	464.040.880	473.848.281	485.739.601
143.05.WA	Program Dukungan Manajemen	845.072.208	109.957.887	287.000		455.316.896	464.040.880	473.848.281	485.739.601

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
	7311 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	347.372.200	105.977.007	397.397		453.746.604	154.510.700	172.745.261	126.490.643
143.08	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	173.518.679	150.446.062	1.903.965		327.135.686	333.440.525	340.545.100	349.151.705
04	FUNGSI EKONOMI	173.518.679	150.638.062	1.903.965		327.135.686	333.440.525	340.545.100	349.151.705
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	173.518.679	150.695.062	1.903.965		327.135.686	333.440.525	340.545.100	349.151.705
143.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		100.820.125	1.535.400		102.355.525	104.329.454	106.549.204	109.240.639
7311	Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Hutan Produksi Lestari		13.000.000			13.000.000	13.715.000	14.125.317	14.602.050
7312	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung		17.000.000	700.000		17.700.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
7313	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Perhutanan Sosial		2.000.125	835.400		2.835.525	2.914.454	3.000.887	3.090.589
7314	Pengelolaan Pengelolaan Perhutanan Sosial		38.000.000	0		38.000.000	39.000.000	39.523.000	40.048.000
7315	Pengelolaan Pengelolaan Perhutanan Sosial		30.820.000			30.820.000	31.800.000	32.800.000	33.800.000
143.08.WA	Program Dukungan Manajemen	173.518.679	50.564.937	368.565		224.783.181	229.110.071	233.995.896	239.911.656
7311	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari	173.518.679	50.564.937	368.565		224.783.181	229.110.071	233.995.896	239.911.656
143.07	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL	139.222.397	345.886.435	1.359.838		486.447.670	491.544.458	500.647.043	514.685.853
04	FUNGSI EKONOMI	139.222.397	345.886.435	1.359.838		486.447.670	491.544.458	500.647.043	514.685.853
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	139.222.397	345.886.435	1.359.838		486.447.670	491.544.458	500.647.043	514.685.853
143.07.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		302.192.888	610.879		302.703.838	307.093.838	312.029.206	318.013.888
7311	Pelaksanaan Kebijakan Perhutanan Sosial		14.000.000	50.000		14.050.000	14.200.000	14.400.000	14.600.000
7312	Pengelolaan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung		23.000.000	210.000		23.210.000	23.500.000	23.700.000	24.000.000
7313	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7314	Pengelolaan Perhutanan Sosial		13.000.000			13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

245

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
143.07.WA	Program Dukungan Manajemen	539.222.397	43.672.598	348.869		583.743.822	187.450.610	198.517.887	198.670.467
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.08	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN	462.814.316	278.706.521	18.736.660		760.057.497	764.631.111	770.901.389	790.529.095
04	FUNGSI EKONOMI	462.814.316	278.706.521	18.736.660		760.057.497	764.631.111	770.901.389	790.529.095
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	462.814.316	278.706.521	18.736.660		760.057.497	764.631.111	770.901.389	790.529.095
143.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		171.708.107	18.238.660		189.946.107	194.838.268	200.791.378	205.926.680
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.08.WA	Program Dukungan Manajemen	462.814.316	103.997.674	500.000		567.311.990	567.991.853	570.910.523	584.704.975
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.11	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	354.853.938	100.130.838	5.700.000		353.484.774	359.141.437	367.628.297	376.699.239
04	FUNGSI EKONOMI	184.858.938	110.430.838	2.400.000		277.484.774	282.858.918	288.466.445	295.511.721
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	184.858.938	110.430.838	2.400.000		277.484.774	282.858.918	288.466.445	295.511.721
143.11.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		36.140.750	300.000		36.348.750	36.006.614	37.319.605	37.947.725
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

Jumlah Unit : 3.0

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
143.11.WA	Program Dukungan Manajemen	164.663.998	63.812.689	2.250.000		230.686.925	295.199.896	240.298.048	248.474.910
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.11.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan		10.469.089			10.469.089	10.843.308	10.849.792	11.084.686
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN		68.700.000	5.300.000		78.000.000	77.487.618	79.158.852	81.187.515
10.03	PENDIDIKAN KEMENGAN		68.700.000	5.300.000		78.000.000	77.487.618	79.158.852	81.187.515
143.11.QL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		68.700.000	5.300.000		78.000.000	77.487.618	79.158.852	81.187.515
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	3.028.449.832	1.674.511.881	50.723.606		4.751.685.319	4.881.879.113	4.952.806.227	5.078.724.886
	JUMLAH PNBP		1.061.070.667	19.929.433		1.071.000.000	1.161.400.692	1.172.698.439	1.196.187.015
	JUMLAH HLN		240.712.311	5.887.539		246.599.850	280.039.597	225.180.958	230.407.185
	TOTAL JUMLAH	3.028.449.832	2.936.294.759	79.640.987		6.038.285.298	6.223.319.402	6.351.686.800	6.506.599.728

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	378 246.171	870 617 603	48 510 469		1 396 394 243	1 429 903 535	1,417,181 501	1,479 770 609
144.01	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	378 268.171	870 617 603	48 510 469		1 396 394 243	1 429 903 535	1,417,181 501	1,479 770 609
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP		513 583 510	38 132 896		555 556 414	557 156 190	570 982 905	583 160 890
05.06	LITBANG LINGKUNGAN HIDUP		5 526 334	1 460 000		7 986 334	7 990 382	8 038 300	8 070 061
144.01.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		5 526 334	1 460 000		7 986 334	7 990 382	8 038 300	8 070 061
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA		316.102.087	37.000.752		353.150.038	359.791.088	347.282.282	368.246.813
144.01.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		244.637.125	8.241.240		252.878.366	258.010.661	264.780.280	270.775.846
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

216

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144.01.FB	**Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**		**60.287.166**	**8.450.012**		**68.780.177**	**68.914.870**	**81.179.494**	**82.782.689**
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
144.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**		**21.886.047**	**268.500**		**21.464.547**	**21.635.447**	**22.252.458**	**22.758.086**
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05.02	**MANAJEMEN AIR LIMBAH**		**157.522.087**	**3.710.000**		**161.232.087**	**163.704.987**	**165.484.951**	**168.955.601**
144.01.FD	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**		**157.522.087**	**3.710.000**		**161.232.087**	**163.704.987**	**165.484.951**	**168.955.601**
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154446 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 144
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Satuan : Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI		42.481.124	1.832.144		44.313.268	46.487.036	46.897.161	48.407.430
144.01.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		42.481.124	1.832.144		44.313.268	46.487.036	46.897.161	48.407.430
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		9.901.636	150.000		10.051.636	10.203.453	10.374.091	10.580.983
144.01.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup		9.901.636	150.000		10.051.636	10.203.453	10.374.091	10.580.983
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	FUNGSI EKONOMI	376.268.171	436.054.085	25.377.573		839.697.829	853.148.089	868.268.696	886.601.819
04.90	EKONOMI LAINNYA	376.268.171	436.054.085	25.377.573		839.697.829	853.148.089	868.268.696	886.601.819
144.01.WA	Program Dukungan Manajemen	376.268.171	436.054.085	25.377.573		839.697.829	853.148.089	868.268.696	886.601.819
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Ribuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
7044	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		37.142.000	4.777.000		41.919.000	43.214.157	44.170.444	46.107.765
7045	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Kebudayaan Lingkungan Hidup		70.477.249	241.000		70.718.249	71.464.018	73.113.854	74.806.150
7046	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun		70.049.649	241.000		70.290.649	71.031.194	72.677.994	74.367.444
7047	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pusat Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		77.400.000	1.200.000		78.600.000	79.396.000	81.220.000	83.081.000
7070	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Pengendalian Perubahan Iklim		5.031.000	10.000		5.041.000	5.094.000	5.211.000	5.330.000
7075	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Sarana Pengelolaan Lingkungan Hidup		15.041.000	7.800.000		22.841.000	23.081.000	23.611.000	24.151.000
7081	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Penanganan Pencemar Lingkungan Hidup		6.213.000	577.000		6.790.000	6.863.000	7.020.000	7.181.000
7082	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pusat Penanganan Pencemar Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup		13.710.000			13.710.000	13.710.000	13.710.000	13.710.000
	JUMLAH RM	378.298.871	958.884.200	49.510.488		1.386.793.559	1.408.441.228	1.435.051.780	8.457.508.881
	JUMLAH HLN		11.933.400			11.933.400	11.862.357	12.119.741	82.491.818
	TOTAL JUMLAH	378.298.871	970.817.600	49.510.488		1.398.384.243	1.420.303.585	1.447.181.501	8.478.770.509

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-251-

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	5.149.336.828	38.249.060.436	73.110.612.736		116.509.000.000	126.319.192.638	130.985.215.296	135.487.643.130
145.01	SEKRETARIAT JENDERAL	183.836.804	378.104.266	16.914.126		578.857.195	583.726.925	591.449.439	600.812.786
04	FUNGSI EKONOMI	183.836.804	378.104.266	16.914.126		578.857.195	583.726.925	591.449.439	600.812.786
04.90	EKONOMI LAINNYA	183.836.804	378.104.266	16.914.126		578.857.195	583.726.925	591.449.439	600.812.786
145.01.WA	Program Dukungan Manajemen	183.836.804	378.104.266	16.914.126		578.857.195	583.726.925	591.449.439	600.812.786
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145.02	INSPEKTORAT JENDERAL	51.835.641	54.249.301	1.930.080		107.014.926	109.530.649	112.219.098	115.046.454
04	FUNGSI EKONOMI	51.835.641	54.249.301	1.930.080		107.014.926	109.530.649	112.219.098	115.046.454
04.90	EKONOMI LAINNYA	51.835.641	54.249.301	1.930.080		107.014.926	109.530.649	112.219.098	115.046.454
145.02.WA	Program Dukungan Manajemen	51.835.641	54.249.301	1.930.080		107.014.926	109.530.649	112.219.098	115.046.454
[illegible]	[illegible]	51.835.641	51.957.241	1.930.080		105.722.962	108.236.962	110.923.000	113.722.970
[illegible]	[illegible]		2.292.060			1.291.964	1.293.687	1.296.098	1.323.484
145.03	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	1.388.078.085	11.081.638.428	21.765.823.010		34.735.539.521	40.574.738.644	43.439.912.505	47.273.948.056



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 143

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
04	FUNGSI EKONOMI	1.888.078.085	11.091.638.428	21.755.073.010		34.735.539.521	40.874.736.014	43.889.812.605	47.273.943.056
04 04	PENGAIRAN		10.218.414.208	21.692.332.620		31.910.746.886	37.701.773.419	40.562.602.326	44.251.179.284
143.03.PG	Program Kebahanan Sumber Daya Air		10.218.414.208	21.692.332.620		31.910.746.886	37.701.773.419	40.562.602.326	44.251.179.284
7087	Layanan Koordinasi dan Dukungan Sumber Daya Air Lintas Wilayah DSDAN		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7088	Pengelolaan Perlindungan Pelestarian dan Evaluasi		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7090	Layanan Teknis SDA		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7091	Pengembangan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7092	Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan dan Pengembangan Kinerja		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7093	Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7094	Pengembangan Jaringan Air Baku dan Air Bersih		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7095	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan, Jaringan Air Baku, dan Jaringan Air Bersih		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04 90	EKONOMI LAINNYA	1.888.078.085	873.224.220	63.480.390		2.824.782.695	2.872.962.595	2.927.110.479	2.992.763.802
143.03.RC	Program Kebahanan Sumber Daya Air		152.985.184	31.632.000		184.617.184	184.617.605	184.617.643	184.617.992
7096	Pengembangan Layanan Substansi		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7097	Koordinasi dan Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan Sumber Daya Air		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.99.WA	Program Dukungan Manajemen	1.888.078.085	720.239.036	32.058.390		2.640.375.441	2.688.345.220	2.742.892.836	2.808.345.870
7099	Dukungan Manajemen Unit Sumber Daya Air	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143.01	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	2.263.870.406	14.772.129.829	28.580.221.097		45.616.221.132	46.314.882.855	46.117.233.296	47.031.551.074
04	FUNGSI EKONOMI	2.263.870.406	14.772.129.829	28.580.221.097		45.616.221.132	46.314.882.855	46.117.233.296	47.031.551.074
04 08	TRANSPORTASI		14.035.067.575	28.581.514.082		42.606.502.957	46.314.882.855	46.117.233.296	47.031.551.074

SK No 154442 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
145.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		14.045.087.575	28.581.514.682		42.806.582.257	46.914.682.965	48.117.233.298	47.041.561.674
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]			
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]			
04.BO	EKONOMI LAINNYA	2.253.870.408	727.082.064	28.706.416		3.009.658.876			
145.04.WA	Program Dukungan Manajemen	2.253.870.408	727.082.064	28.706.416		3.009.658.876			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			
145.06	DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	1.028.374.848	9.559.497.927	1.344.015.318		12.031.888.091	13.119.440.736	14.281.316.826	15.548.571.824
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.028.374.848	8.559.697.527	1.344.015.318		12.031.888.091	13.119.440.736	14.281.316.826	15.548.571.824
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM		3.241.142.988	323.376.389		3.564.519.377	3.898.814.589	3.987.763.130	4.059.533.740
145.06.JA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.241.142.988	323.376.389		3.564.519.377	3.898.814.589	3.987.763.130	4.059.533.740
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06.BO	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	1.028.374.848	5.318.554.541	1.020.638.927		8.467.478.714	9.220.626.147	10.293.553.696	11.488.038.084
145.06.JA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		5.162.712.983	967.086.578		7.129.801.162	8.061.388.083	8.031.780.000	10.085.171.183
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145.06.WA	Program Dukungan Manajemen	1.028.374.848	256.792.358	53.550.348		1.337.677.552	1.350.437.004	1.301.773.130	1.810.066.921
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145.08	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA STRATEGIS	185.277.247	2.849.254.395	21.343.000.017		24.108.532.159	24.905.058.582	24.510.501.408	24.718.949.087
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	185.277.247	863.727.695	200.571.544		1.100.626.486	1.320.383.994	1.478.427.637	1.618.134.485

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

25-I

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Rupiah (Dalam Ribuan)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	116.277.247	863.777.695	208.571.544		1.188.626.486	1.329.353.294	1.478.427.637	1.616.124.485
145.06.GM	Program Prasarana Strategis		738.710.875	204.110.506		880.821.181	1.070.777.181	1.174.526.107	1.248.008.585
[illegible]	[illegible]		641.289.692	204.110.506		845.300.198	925.323.288	1.029.101.221	1.101.283.792
[illegible]	[illegible]		135.131.787			135.131.787	145.453.893	145.424.886	146.724.793
145.06.WA	Program Dukungan Manajemen	116.277.247	77.067.020	4.461.038		197.805.305	249.606.113	303.901.530	368.115.920
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN		1.795.477.200	21.134.428.475		22.919.905.675	22.884.875.268	23.032.073.772	23.109.818.562
10.00	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA		1.795.477.200	21.134.428.475		22.919.905.675	22.884.875.268	23.032.073.772	23.109.818.562
145.06.GM	Program Prasarana Strategis		1.795.477.200	21.134.428.475		22.919.905.675	22.884.875.268	23.032.073.772	23.109.818.562
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145.07	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	353.741.694	243.733.606	3.064.910		600.540.190	607.504.000	617.029.828	620.579.710
04	FUNGSI EKONOMI	353.741.694	201.223.586	3.064.910		555.030.190	566.504.000	576.029.828	587.579.710
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	353.741.694	201.223.586	3.064.910		555.030.190	566.504.000	576.029.828	587.579.710
145.07.WA	Program Dukungan Manajemen	353.741.694	201.223.586	3.064.910		555.030.190	566.504.000	576.029.828	587.579.710
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	FUNGSI PENDIDIKAN		42.000.000			42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000

SK No 154440 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2001 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
10 00	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA		41.000.000			41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
145.07.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		41.000.000			41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145 OH	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	67.397.460	79.841.268	800.000		147.138.728	147.283.887	147.404.621	147.575.271
04	FUNGSI EKONOMI	67.397.460	79.841.268	800.000		147.138.728	147.283.887	147.404.621	147.575.271
04 90	EKONOMI LAINNYA	67.397.460	79.841.268	800.000		147.138.728	147.283.887	147.404.621	147.575.271
145.08.WA	Program Dukungan Manajemen	67.397.460	79.841.268	800.000		147.138.728	147.283.887	147.404.621	147.575.271
[illegible]	[illegible]	67.397.460	26.662.206	800.000		94.859.726	94.969.729	94.969.729	94.969.729
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		46.[illegible]			46.[illegible]	46.[illegible]	46.[illegible]	46.[illegible]
145.1H	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	59.624.697	110.810.779	2.500.000		172.936.476	175.741.455	179.896.748	182.720.266
04	FUNGSI EKONOMI	59.624.697	110.810.779	2.500.000		172.936.476	175.741.455	179.896.748	182.720.266
04 90	EKONOMI LAINNYA	59.624.697	110.810.779	2.500.000		172.936.476	175.741.455	179.896.748	182.720.266
145.19.WA	Program Dukungan Manajemen	59.624.697	110.810.779	2.500.000		172.936.476	175.741.455	179.896.748	182.720.266
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
145 12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	138.497.945	216.080.458	52.344.177		402.922.580	411.149.015	419.262.290	428.969.072
04	FUNGSI EKONOMI	138.497.945	160.441.592	8.344.177		304.283.714	308.603.835	315.654.778	322.536.483
04 90	EKONOMI LAINNYA	138.497.945	160.441.592	8.344.177		304.283.714	308.603.835	315.654.778	322.536.483
145.12.WA	Program Dukungan Manajemen	138.497.945	160.441.592	8.344.177		304.283.714	308.603.835	315.654.778	322.536.483
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154439 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Buku

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Satuan Rupiah

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3771	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program Dana Alokasi	136.437.340	100.740.977	6.344.177		243.522.494	250.828.169	258.353.014	266.103.604
3774	Dukungan Manajemen Pengelolaan Pelabuhan		7.765.333			7.765.333	7.998.293	8.238.242	8.485.389
10	FUNGSI PENDIDIKAN		55.438.944	44.000.000		99.438.944	101.626.077	103.677.598	106.282.579
10 06	PENDIDIKAN TINGGI		55.848.856	44.000.000		99.848.856	101.845.477	103.877.598	106.282.579
145.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		55.848.856	44.000.000		99.848.856	101.845.477	103.877.598	106.282.579
3161	Dukungan manajemen pendidikan [illegible]		55.848.856	44.000.000		99.848.856	101.845.477	103.877.598	106.282.579
	JUMLAH RM	6.149.336.828	38.132.405.886	52.799.837.020		96.081.379.553	107.333.101.166	111.251.236.006	116.033.937.803
	JUMLAH PNBP		11.241.127			11.241.127	11.469.852	11.707.481	12.008.742
	JUMLAH PLN		2.783.196.807	10.691.284.976		13.374.481.683	11.675.237.592	11.782.853.841	12.037.674.104
	JUMLAH HLN		889.589			889.589	868.812	908.238	929.761
	JUMLAH SBSN		312.347.419	5.969.731.104		8.282.078.523	2.125.385.853	2.140.378.287	2.154.000.031
	JUMLAH RMP			744.695.756		744.695.756	195.229.378	195.229.378	195.229.378
	TOTAL JUMLAH	6.149.336.828	38.240.059.438	72.910.612.734		116.500.000.000	126.349.192.533	130.485.216.269	136.687.849.140

SK No 154438 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	826.626.312	10.028.133.303	240.747.629		10.895.807.244	10.028.206.870	11.086.088.008	11.208.422.006
146.01	SEKRETARIAT JENDERAL	826.626.312	255.737.897	11.384.780		891.748.989	908.167.845	928.803.878	952.813.080
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	826.626.312	255.737.897	11.384.780		891.748.989	908.167.845	928.803.878	952.813.080
06 90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	826.626.312	253.737.897	11.384.780		891.748.989	908.167.845	928.803.878	952.813.080
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	826.626.312	253.737.897	11.384.780		891.748.989	908.167.845	928.803.878	952.813.080
7971	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Lokasi		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7991	Penyelenggaraan Evaluasi Pelaporan Perencanaan dan Penganggaran		1.250.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7992	Dukungan Manajemen Kementerian/Lembaga	826.626.312	240.737.897	11.384.780		878.748.989	894.917.845	917.553.878	940.563.080
7993	Pelaksanaan Administrasi Satker		7.987.000			7.987.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
7994	Penyelenggaraan Layanan Perkantoran		1.650.000	400.000		2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7995	Pemutakhiran Data dan Teknologi Informasi		1.600.000			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
7996	Pelaporan Keuangan		1.250.000			1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7997	Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7998	Penyelenggaraan Pengembangan Teknologi		1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7999	Penyelenggaraan Layanan SDM		2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
146.02	INSPEKTORAT JENDERAL		23.073.082	3.804.265		26.877.347	27.282.837	27.894.778	28.218.344
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		23.073.082	3.804.265		26.877.347	27.282.837	27.894.778	28.218.344
06 90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		23.073.082	3.804.265		26.877.347	27.282.837	27.894.778	28.218.344
146.02.WA	Program Dukungan Manajemen		23.073.082	3.804.265		26.877.347	27.282.837	27.894.778	28.218.344
7972	Dukungan Manajemen Evaluasi Pengawasan Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		19.773.082	3.804.265		23.577.347	23.782.837	23.994.778	24.018.344
7975	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.300.000			3.300.000	3.500.000	3.900.000	4.200.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146.03	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		2.937.678.482	644.400		2.938.322.882	2.941.076.793	2.944.172.588	2.947.928.281
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		2.937.678.482	644.400		2.938.322.882	2.941.076.793	2.944.172.588	2.947.928.281
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN		2.917.587.664			2.917.587.664	2.920.035.872	2.922.776.827	2.926.100.192
146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		2.917.587.664			2.917.587.664	2.920.035.872	2.922.776.827	2.926.100.192
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		20.090.818	644.400		20.735.218	21.040.921	21.396.761	21.828.089
146.03.WA	Program Dukungan Manajemen		20.090.818	644.400		20.735.218	21.040.921	21.396.761	21.828.089
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
146.04	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		3.922.289.375	1.162.514		3.923.451.889	3.931.939.082	3.941.879.720	3.952.947.412
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		3.922.289.375	1.162.514		3.923.451.889	3.931.939.082	3.941.879.720	3.952.947.412
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN		3.907.759.003			3.907.759.003	3.916.127.500	3.925.511.935	3.936.596.453
146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.907.759.003			3.907.759.003	3.916.127.500	3.925.511.935	3.936.596.453
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		14.530.372	1.162.514		15.692.886	15.811.582	15.967.803	16.181.189
146.04.WA	Program Dukungan Manajemen		14.530.372	1.162.514		15.692.886	15.811.582	15.967.803	16.181.189
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
146.05	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN		2.850.877.819	223.051.860		3.073.929.679	3.183.854.145	3.201.216.561	3.252.890.062
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		2.850.877.819	223.051.860		3.073.929.679	3.183.854.145	3.201.216.561	3.252.890.062
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN		2.835.091.242	222.344.748		3.057.735.990	3.117.388.109	3.184.444.773	3.235.748.588
146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		2.835.091.242	222.344.748		3.057.735.990	3.117.388.109	3.184.444.773	3.235.748.588
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2058 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(Rincian dalam Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		15.486.277	706.912		16.193.189	16.486.037	16.770.778	17.141.474
146.06.WA	Program Dukungan Manajemen		15.486.277	706.912		16.193.189	16.486.037	16.770.778	17.141.474
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
146.06	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		40.476.848	700.000		41.176.848	41.907.857	42.728.381	43.725.647
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		40.476.848	700.000		41.176.848	41.907.857	42.728.381	43.725.647
06.00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		40.476.848	700.000		41.176.848	41.907.857	42.728.381	43.725.647
146.06.IR	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		30.443.519			30.443.519	31.043.108	31.717.421	32.536.960
[illegible]	[illegible]		30.443.519			[illegible]	31.043.108	[illegible]	32.536.960
146.06.WA	Program Dukungan Manajemen		10.033.329	700.000		10.733.329	10.864.749	11.011.960	11.188.687
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	528.626.312	10.028.133.309	240.747.629		10.795.507.244	10.985.206.870	11.088.096.906	11.208.422.006
	TOTAL JUMLAH	528.626.312	10.028.133.309	240.747.629		10.795.507.244	10.985.206.870	11.088.096.906	11.208.422.006

SK No 154435 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(2/2)

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PARIWISATA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	KEMENTERIAN PARIWISATA	441.196.822	1.281.256.305	129.301.158		1.851.694.286	1.887.223.200	1.927.883.244	1.976.589.825
147.01	KEMENTERIAN PARIWISATA	441.196.822	1.281.256.305	129.301.158		1.851.694.286	1.887.223.200	1.927.883.244	1.976.589.825
08	FUNGSI PARIWISATA	267.278.240	834.457.723	63.651.158		1.245.387.121	1.269.180.587	1.295.885.850	1.328.289.540
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA	267.278.240	834.457.723	63.651.158		1.245.387.121	1.269.180.587	1.295.885.850	1.328.289.540
147.01.EK	Program Pariwisata		597.599.315	5.270.938		603.970.253	616.259.332	627.949.786	643.138.827
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

261

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PARIWISATA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.07.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**287.278.240**	**326.758.408**	**47.380.220**		**641.416.868**	**663.901.585**	**687.938.084**	**684.662.713**
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1952 -

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PARIWISATA

(Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		161.452.[illegible]	25.[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	**FUNGSI PENDIDIKAN**	**173.858.582**	**386.786.583**	**75.850.000**		**636.307.854**	**615.062.403**	**831.277.334**	**647.300.283**
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**173.858.582**	**386.786.582**	**75.850.000**		**636.307.854**	**615.062.403**	**831.277.334**	**647.300.283**
147.01.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**		**208.480.085**	**75.650.000**		**284.110.085**	**289.926.103**	**295.827.460**	**303.348.485**
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
147.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**173.858.582**	**148.938.517**			**322.197.099**	**328.436.300**	**335.449.934**	**343.963.518**
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SK No 154432 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 147
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN PARIWISATA

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	441.136.822	1.224.859.684	127.628.561		1.793.113.067	1.827.214.434	1.865.857.982	1.912.742.655
	JUMLAH PNBP		52.110.046			52.110.046	53.418.297	54.691.155	55.980.823
	JUMLAH BLU		4.785.646	1.674.607		6.470.253	6.582.629	6.733.827	6.896.541
	TOTAL JUMLAH	441.136.822	1.281.756.306	129.301.168		1.851.694.366	1.887.221.360	1.927.142.244	1.975.569.823



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

HASIL ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	137.758.818	389.490.761	1.218.000		528.467.657	632.700.909	650.209.674	564.160.580
145.01	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	137.758.818	389.490.761	1.218.000		528.467.657	632.700.909	650.209.674	564.160.580
08	FUNGSI PARIWISATA	137.758.818	389.490.761	1.218.000		528.467.657	632.700.909	650.209.674	564.160.580
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA	137.758.816	103.238.476	918.000		241.914.292	245.461.200	251.579.212	257.771.312
145.01.WA	Program Dukungan Manajemen	137.758.816	24.182.000	918.000		162.769.816	166.858.087	169.110.903	173.663.885
7320	Pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	137.758.816	2.718.000			140.476.816	142.107.000	144.240.105	147.776.210
7321	Pembelian Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas		2.125.000			2.125.000	2.189.375	2.668.056	2.749.058
7322	Pembelian Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan		2.450.000			2.450.000	1.361.250	2.450.000	1.225.714
7323	Pembelian Aset Tetap Alat Angkutan		1.200.000			1.200.000	1.212.000	1.236.240	1.248.602
7325	Pembelian Aset Tetap Alat Kantor dan Rumah Tangga		1.307.000	918.000		2.225.000	2.402.000	2.514.847	2.652.000
7327	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		2.100.000			2.100.000	2.121.000	2.163.420	2.185.354
7424	Pengelolaan Pelayanan Umum Pemerintahan dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Kementerian/Lembaga		3.100.000			3.100.000	3.131.000	3.193.620	3.225.556
7425	Pengelolaan Pelayanan Umum Pemerintahan dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Kementerian/Lembaga		3.100.000			3.100.000	3.131.000	3.193.620	3.225.556
7426	Pengelolaan Pelayanan Umum Pemerintahan dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Kementerian/Lembaga		3.100.000			3.100.000	3.131.000	3.193.620	3.225.556
7427	Pengelolaan Pelayanan Umum Pemerintahan dan Dukungan Teknis Lainnya Lingkup Kementerian/Lembaga		3.100.000			3.100.000	3.131.000	3.193.620	3.225.556
145.01.EL	Program Ekonomi Kreatif		79.164.478			79.164.478	80.603.113	82.232.278	84.207.468
7340	Pengembangan Sistem Manajemen Strategi		4.125.000			4.125.000	4.207.500	4.291.650	4.377.483
7342	Pengembangan Aset Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif		4.125.000			4.125.000	4.207.500	4.291.650	4.377.483
7351	Pengembangan Standar Kompetensi Kerja		4.250.000			4.250.000	4.335.000	4.421.700	4.510.134

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 195

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		2	3	4	5	6	7	8	9
7351	Pengembangan Sistem Pemerintahan [illegible] Kelembagaan		3.250.000			3.250.000	3.481.250	3.729.661	3.995.437
7352	Pengembangan Kebijakan [illegible]		4.100.000			4.100.000	4.391.000	4.703.237	5.038.157
7353	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif		4.950.000			4.950.000	5.301.450	5.678.753	6.083.133
7354	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif		4.530.000			4.530.000	4.851.630	5.196.653	5.566.933
7355	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif		4.725.000			4.725.000	5.060.325	5.419.608	5.804.379
7356	Pengembangan Layanan Pemerintah Kemitraan Substansi Kreatif Pengembangan Digital		5.112.500			5.112.500	5.474.107	5.862.525	6.278.217
7357	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif Kreatif Tenun		5.550.000			5.550.000	5.942.550	6.364.541	6.817.362
7358	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif		5.059.500			5.059.500	5.416.316	5.801.946	6.215.884
7359	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif		4.444.130			4.444.130	4.758.285	5.097.407	5.459.384
7360	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif Digital		5.555.163			5.555.163	5.948.562	6.371.563	6.824.875
7361	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif Kreatif Digital		3.400.000			3.400.000	3.640.400	3.897.868	4.173.814
7362	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif [illegible]		5.000.000			5.000.000	5.352.500	5.732.797	6.140.482
7363	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif		3.200.000			3.200.000	3.427.200	3.670.781	3.931.117
7364	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif [illegible]		3.400.000			3.400.000	3.640.400	3.897.868	4.173.814
7365	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif		4.440.000			4.440.000	4.753.680	5.090.439	5.451.041
7366	Pengembangan Ekosistem dan Kemitraan Substansi Kreatif [illegible]		4.400.000			4.400.000	4.711.600	5.044.833	5.403.427
08.60	PARIWISATA LAINNYA		286.154.275	400.000		286.554.275	282.239.668	298.530.482	306.379.288
148.01.WA	Program Dukungan Manajemen		285.008.751	400.000		285.408.751	281.071.368	297.406.875	305.164.502
7822	Pengelolaan [illegible]		285.008.751	400.000		285.408.751	281.071.368	297.406.875	305.164.502
148.01.BL	Program Ekonomi Kreatif		1.145.524			1.145.524	1.168.237	1.123.787	1.224.786

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

256

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	137 759 814	389 490 751	1 218 000		528 468 567	538 700 906	550 203 674	564 160 580
	TOTAL JUMLAH	137 759 814	389 490 751	1 218 000		528 468 567	538 700 906	550 203 674	564 160 580

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 149
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOPERASI

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
149	KEMENTERIAN KOPERASI	92.749.199	835.629.770	53.764.648		982.043.615	979.743.474	999.640.682	1.023.765.711
149.01	KEMENTERIAN KOPERASI	92.749.199	835.629.770	53.764.648		982.043.615	979.743.474	999.640.682	1.023.765.711
04	FUNGSI EKONOMI	92.749.199	835.629.770	53.764.648		982.043.615	979.743.474	999.640.682	1.023.765.711
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	92.749.199	835.629.770	53.764.648		982.043.615	979.743.474	999.640.682	1.023.765.711
149.01.EM	Program Pemopelasian		629.434.453	19.354.822		648.789.275	666.282.430	673.202.308	688.887.456
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 149

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
		3	4	5	6	7	8	9	10
7045	Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Koperasi		9.050.000			9.050.000	7.233.710	9.421.275	9.690.772
7046	Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan UMKM		21.421.562	1.914.375		23.335.937	22.810.[illegible]	23.114.[illegible]	23.[illegible]
7054	Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Penanganan Konflik		13.264.000			13.264.000	12.278.514	13.[illegible]	13.[illegible]
7055	Fasilitasi Tata Kelola Koperasi di Daerah		175.700.000			175.700.000	181.[illegible]	184.[illegible]	188.[illegible]
9.05	Pengelolaan Tata Kelola dan Kepatuhan Internal		7.650.000			7.650.000	7.914.[illegible]	7.[illegible]	7.[illegible]
149.01.WA	**Program Dukungan Manajemen**	92.749.189	206.085.317	14.409.824		313.284.340	319.468.044	326.436.285	334.636.281
7021	Koordinasi Perencanaan dan Umum Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi		4.[illegible]	[illegible]		4.[illegible]	4.[illegible]	4.[illegible]	4.[illegible]
7051	Koordinasi Perencanaan dan Umum Bidang Pengembangan Usaha Koperasi		7.[illegible]			7.[illegible]	7.[illegible]	7.[illegible]	8.[illegible]
7052	Koordinasi Perencanaan dan Umum Bidang Pengembangan Talenta dan Budaya Bidang Koperasi		3.[illegible]	270.[illegible]		3.[illegible]	3.[illegible]	3.[illegible]	3.[illegible]
7053	Koordinasi Perencanaan dan Umum Bidang Pemberdayaan Koperasi		5.[illegible]	270.[illegible]		5.[illegible]	5.[illegible]	6.[illegible]	6.[illegible]
7.4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, Data dan Informasi Kelembagaan		11.[illegible]			11.[illegible]	11.[illegible]	12.[illegible]	12.[illegible]
7.40	Dukungan Pengelolaan Layanan Umum dan Pelaksanaan Anggaran	92.749.189	81[illegible]	10.[illegible]		104.[illegible]	111.[illegible]	200.[illegible]	209.[illegible]
7.42	Pengelolaan SDM, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi		12.[illegible]	25.[illegible]		12.[illegible]	13.[illegible]	13.[illegible]	13.[illegible]
7.51	Penyelenggaraan Kehumasan, Tata Usaha, Kerumahtanggaan, dan Layanan Internal		41.[illegible]	2.[illegible]		43.[illegible]	51.[illegible]	51.[illegible]	51.[illegible]
7011	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional		5.[illegible]	5.[illegible]		5.[illegible]	5.[illegible]	6.[illegible]	6.[illegible]
7012	Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		6.400.000	400.000		6.800.000	7.003.000	7.[illegible]	7.340.427
	JUMLAH RM	92.749.189	622.104.000	21.150.250		735.004.340	749.000.000	765.530.000	778.459.000
	JUMLAH BLU		213.424.082	12.514.393		225.939.075	229.040.770	234.120.423	239.305.701
	TOTAL JUMLAH	92.749.189	835.529.770	33.764.643		962.043.415	979.740.474	999.650.482	1.023.764.711



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Rupiah (dalam ribuan)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	116.548.220	419.997.443	80.049.729		646.690.402	551.038.332	558.040.579	582.104.475
150.01	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	116.548.220	419.997.443	80.049.729		646.690.402	551.038.332	558.040.579	582.104.475
04	FUNGSI EKONOMI	116.548.220	419.997.443	80.049.729		646.690.402	551.038.332	558.040.579	582.104.475
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	116.548.220	419.997.443	80.049.729		646.690.402	551.038.332	558.040.579	582.104.475
150.01.EN	Program Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Kewirausahaan		258.868.719	847.910		257.716.629	258.096.749	258.524.383	268.043.874
7001	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7004	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7005	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7006	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7007	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7008	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7009	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7011	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7012	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7013	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7014	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7015	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7016	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7017	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7018	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 160

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Satuan Mata Uang : Ribu

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
160.01.WA	Program Dukungan Manajemen	116.640.230	143.128.726	8.202.419		268.974.374	282.942.688	297.916.686	303.080.601
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

271

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia		5.xx.xxx	10.xxx		x.xx.xxx	6x.xx.xxx	x.xx.xxx	x.xx.xxx
150.01	Sekretariat Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		23.xx7.xxx			23.xxx.xxx	24.xxx.xxx	24.xxx.xxx	24.xxx.xxx
	JUMLAH RM	916.648.230	376.867.443	10.948.729		603.680.402	607.589.237	512.984.598	597.534.977
	JUMLAH BLU		43.000.000			43.000.000	43.448.805	43.955.843	44.569.498
	TOTAL JUMLAH	916.648.230	419.867.443	10.948.729		646.680.402	651.038.042	556.940.441	642.104.475

SK No 154466 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 151
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	K P J M		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	358.212.848	2.113.653.848	34.360.056		2.506.226.052	2.646.111.467	2.597.504.237	2.657.289.443
151.01	SEKRETARIAT JENDERAL	334.147.670	143.820.181	3.194.000		480.881.751	487.736.758	495.689.889	505.332.499
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	334.147.670	143.820.181	3.194.000		480.881.751	487.736.758	495.689.889	505.332.499
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	334.147.670	143.820.181	3.194.000		480.881.751	487.736.758	495.689.889	505.332.499
151.01.WA	Program Dukungan Manajemen	334.147.670	143.820.181	3.194.000		480.881.751	487.736.758	495.689.889	505.332.499
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.03	INSPEKTORAT JENDERAL	1.743.215	20.196.463	1.394.389		23.334.047	23.464.770	23.681.729	23.789.905
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.743.215	20.196.463	1.394.389		23.334.047	23.464.770	23.681.729	23.789.905
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	1.743.215	20.196.463	1.394.389		23.334.047	23.464.770	23.681.729	23.789.905
151.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.743.215	20.196.463	1.394.389		23.334.047	23.464.770	23.681.729	23.789.905
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.03	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN	5.254.682	211.785.747	1.200.000		218.220.429	218.534.571	218.887.722	219.315.813
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	5.254.682	211.785.747	1.200.000		218.220.429	218.534.571	218.887.722	219.315.813
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	5.254.682	211.785.747	1.200.000		218.220.429	218.534.571	218.887.722	219.315.813
151.03.CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		181.184.246			181.184.246	181.478.406	199.831.568	182.289.750

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.03.WA	Program Dukungan Manajemen	5.254.662	20.601.501	1.200.000		27.056.163	27.056.163	27.056.163	27.056.163
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.04	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	3.816.855	344.388.681	500.000		348.204.348	351.847.538	356.156.485	361.267.485
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	3.816.855	344.388.681	500.000		348.204.348	351.847.538	356.156.485	361.267.485
06.60	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	3.816.855	344.388.681	500.000		348.204.348	351.847.538	356.156.485	361.267.485
151.04.GT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		324.385.487			324.385.487	328.108.778	332.316.626	337.416.579
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.816.855	20.020.194	600.000		23.818.859	23.738.760	23.839.859	23.850.906
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.05	DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.626.848	45.286.324			48.213.172	48.498.021	48.831.918	49.242.519
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	2.626.848	45.286.324			48.213.172	48.498.021	48.831.918	49.242.519
06.60	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	2.626.848	45.286.324			48.213.172	48.498.021	48.831.918	49.242.519
151.05.GT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		24.500.000			24.500.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.05.WA	Program Dukungan Manajemen	2.626.848	20.786.324			23.713.172	23.998.021	24.331.918	24.742.519
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.11	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	3.441.917	47.540.385	17.481.250		68.463.532	66.890.557	59.370.581	68.962.605

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	3.441.817	47.540.385	17.481.250		68.463.532	68.830.657	69.370.881	68.962.605
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	3.441.817	47.540.385	17.481.250		68.463.532	68.830.657	69.370.881	68.962.605
151.11.OT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		13.852.206	3.200.000		17.052.206	17.052.206	17.052.206	17.052.206
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7201	Pengembangan Kebijakan Kerjasama dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal		6.500.000			6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.11.WA	Program Dukungan Manajemen	3.441.817	33.688.179	14.281.250		51.411.326	51.838.051	52.318.675	52.900.399
7248	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.12	BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL	5.382.471	1.301.155.897	10.580.437		1.317.828.796	1.349.030.152	1.394.907.102	1.420.397.575
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	5.382.471	1.301.155.897	10.580.437		1.317.828.796	1.349.030.152	1.394.907.102	1.420.397.575
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	5.382.471	1.301.155.897	10.580.437		1.317.828.796	1.349.030.152	1.394.907.102	1.420.397.575
151.12.OT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		1.251.217.982			1.251.217.982	1.282.188.160	1.317.417.854	1.359.896.160
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7127	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151.12.WA	Program Dukungan Manajemen	5.382.471	49.937.915	10.580.437		65.910.823	66.842.992	67.489.248	68.502.428
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH RM	366,212,140	1,939,628,239	34,360,066		2,290,100,443	2,329,930,404	2,374,760,176	2,429,014,241
	JUMLAH PLN		196,261,383			196,261,383	200,004,055	204,217,502	209,314,457
	JUMLAH HLN		17,884,248			17,884,248	18,179,408	18,531,568	18,958,750
	TOTAL JUMLAH	366,212,140	2,113,653,868	34,360,066		2,504,226,052	2,548,113,867	2,597,509,247	2,657,287,448

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(Rupiah)

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA				JUMLAH	KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		2027	2028	2029
152	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	114.758.483	1.578.755.065	210.527.258		1.902.040.754	1.919.649.738	1.938.444.738	1.958.446.887
152.01	SEKRETARIAT JENDERAL	114.758.483	394.282.817	80.884.118		609.875.498	618.122.430	623.144.954	631.858.585
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	114.758.483	394.282.817	80.884.118		609.875.498	618.122.430	623.144.954	631.858.585
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	114.758.483	394.282.817	80.884.118		609.875.498	618.122.430	623.144.954	631.858.585
152.01.DW	Program Transmigrasi		49.580.000	1.420.000		51.000.000	51.629.883	52.326.014	53.193.329
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
152.01.WA	Program Dukungan Manajemen	114.758.483	284.652.817	59.464.118		458.875.498	464.483.637	470.808.840	478.468.266
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
152.02	INSPEKTORAT JENDERAL		19.888.112	648.000		20.537.112	21.048.728	21.619.650	22.314.309
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		19.888.112	648.000		20.537.112	21.048.728	21.619.650	22.314.309
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		19.888.112	648.000		20.537.112	21.048.728	21.619.650	22.314.309
152.02.WA	Program Dukungan Manajemen		19.888.112	648.000		20.537.112	21.048.728	21.619.650	22.314.309
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.1 RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN 152

KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	RINCIAN JENIS BELANJA					KPJM		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	2027	2028	2029
152.03	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		481.770.504	147.915.380		629.685.884	537.900.334	647.134.396	658.330.589
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		481.770.504	147.915.380		629.685.884	537.900.334	647.134.396	658.330.589
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		481.770.504	147.915.380		629.685.884	537.900.334	647.134.396	658.330.589
152.03.DW	Program Transmigrasi		438.106.575	146.767.894		584.876.169	592.845.328	601.800.578	612.685.247
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
152.03.WA	Program Dukungan Manajemen		43.663.929	1.147.786		44.809.715	45.055.006	45.333.818	45.685.342
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
152.04	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI		740.862.632	1.079.758		741.942.390	744.680.247	747.545.738	751.141.344
06	FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		740.862.632	1.079.758		741.942.390	744.680.247	747.545.738	751.141.344
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		740.862.632	1.079.758		741.942.390	744.680.247	747.545.738	751.141.344
152.04.DW	Program Transmigrasi		701.758.968			701.758.968	703.526.269	705.613.057	707.921.962
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
152.04.WA	Program Dukungan Manajemen		39.103.664	1.079.758		40.183.381	41.053.978	42.032.678	43.219.382
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH RM	114.758.460	1.576.735.685	210.527.258		1.902.040.784	1.818.649.739	1.939.444.738	1.963.445.837
	TOTAL JUMLAH	114.758.460	1.576.735.685	210.527.258		1.902.040.784	1.818.649.739	1.939.444.738	1.963.445.837

SK No 154460 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 001
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)					1.050.000.000
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					1.050.000.000
3 Program	1) CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan					735.039.762
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					314.960.238
Program	1) CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan					735.039.762
	RM	735.039.762	01 Terselenggaranya pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR RI dengan dukungan teknis dan keahlian yang berkualitas	ABC	Kebijakan Bidang Politik	6 Rekomendasi Kebijakan	141.782.299
				AEA	Koordinasi	2.283 kegiatan	117.267.399
				AEB	Forum	130 forum	19.208.015
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	585.046 orang	449.932.472
				BLA	Persidangan Lembaga Legislatif	1 sidang	3.906.125
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.634.612
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					314.960.238
	RM	314.960.238	01 Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi General dan Tematik Setjen MPR RI	BNA	Data dan Informasi Publik	201 dokumen, Peta, Data	27.269.345
			02 Meningkatnya layanan internal Setjen MPR RI yang berkualitas	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	34 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	235.838.237
				EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	346 Unit, m2, Paket	41.639.388
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	339 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.840.257

SK No 154459 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 001

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	292 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.485.021
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	8 Sistem Informasi	867.992

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT					
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					
3 Program	1) CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan					5.926.757.173
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					3.973.242.827
Program	1) CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan					5.926.757.173
	RM	5.926.757.173	01 Terwujudnya persidangan penyusunan dan pembahasan RUU Usul Inisiatif DPR RI dan RUU Usul Pemerintah yang dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan prioritas pembangunan nasional	AAA Undang-Undang	56	UU, RUU	405.882.010
			02 Terwujudnya persidangan penyusunan dan pembahasan Rancangan APBN/APBN-P dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran negara untuk penguatan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sesuai RPJMN 2025-2029	AAH Peraturan lainnya	1	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	3.647.817
			03 Terwujudnya Persidangan Penyusunan dan Pembahasan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	56	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	36.399.901
			04 Terwujudnya Persidangan Pembahasan Kerja Sama Antara Parlemen dan Organisasi Internasional dalam rangka mendukung politik luar negeri Pemerintah	ABC Kebijakan Bidang Politik	1.247	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	669.942.105
			05 Terwujudnya Persidangan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dalam Memperkokoh Demokrasi Substansial	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	16	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	30.921.958
			06 Terwujudnya Kebijakan Tata Kelola Kelembagaan DPR RI yang berperan dalam pembangunan nasional	AEA Koordinasi	1.162	kegiatan	113.992.189
			07 Terwujudnya Persidangan dalam rangka Penanganan Perkara Etik dan Perkara Hukum yang dimanfaatkan	AEC Kerja sama	170	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	160.283.584
				AEG Konferensi dan Event	3	Kegiatan, Paket Kegiatan	48.067.226

SK No 154457 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BCA	Perkara Hukum Perseorangan	20 Perkara, Berkas Perkara	17.549.483
		BCB	Perkara Hukum Lembaga	153 Perkara, Berkas Perkara	10.868.020
		BKB	Pemantauan produk	5 laporan	10.631.017
		BMB	Komunikasi Publik	8.701 layanan, kegatan, Media, Orang, Volume	4.418.411.533
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**3.973.242.827**
RM 3.973.242.827	01 Terwujudnya layanan persidangan yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	60 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	6.865.757
	02 Terwujudnya layanan administrasi yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.660.274
	03 Terwujudnya layanan keahlian yang profesional dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang dimanfaatkan	ABC	Kebijakan Bidang Politik	204 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	15.680.458
	04 Terwujudnya layanan pengawasan internal inspektorat utama yang berintegritas dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	10 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.223.750
	05 Terwujudnya tata kelola Sekretariat Jenderal DPR RI yang berintegritas dan akuntabel dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI, dalam kerangka reformasi birokrasi	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	676 Unit	51.454.584
	06 Tersedianya hak keuangan Dewan	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	32.191 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.917.097.441
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.668 Unit, m2, Paket	861.699.385
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	84 Orang, Layanan, Rekomendasi	31.094.248

SK No 154456 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 002

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	512 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	28.547.151
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	29 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	50.799.771
		CDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	50 Lembaga	6.000.000

SK No 154455 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 004

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN					6.834.960.000
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					6.834.960.000
3 Program	1) CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara					5.425.003.513
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					1.409.956.487
Program	1) CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara					5.425.003.513
RM 5.397.615.237			01 Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Negara	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	232 Unit	5.730.179
PNBP 27.388.278			02 Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	44 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.365.042.742
			03 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.863 Unit, m2, Paket	28.587.947
			04 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Pembelajar melalui BPK Corpu yang Berbasis Pengetahuan	FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	10.210 Laporan, Pendapat Hukum, LHP, Bahan Pertimbangan, Pertimbangan	2.025.642.645
			05 Meningkatnya Kualitas Hasil Investigasi				
			06 Menguatnya Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah				
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					1.409.956.487
RM 1.409.652.295			01 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Organisasi, Sumber Daya, Komunikasi dan Kerja Sama	BMA	Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	12.358.379
PNBP 304.192				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.846 Unit	84.077.434

SK No 154454 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 004
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	102.699.387
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	296 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	922.032.196
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	28 Unit, m2, Paket	164.777.862
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	9.914 Orang, Layanan, Rekomendasi	67.851.379
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	47 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	21.515.650
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	8 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	4.444.000

SK No 154453 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	005	MAHKAMAH AGUNG					14.753.752.140
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					14.753.752.140
3 Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					198.625.196
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					14.555.126.944
Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					198.625.196
	RM	188.221.744	01 Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung yang Transparan dan Modern	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3	Rekomendasi Kebijakan Kajian	1.014.868
	PNBP	10.403.452	02 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang pasti dan berkeadilan	AEA Koordinasi	2.164	kegiatan	33.471.655
			03 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang pasti dan berkeadilan	BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	4.103	Orang	1.002.900
			04 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	BCA Perkara Hukum Perseorangan	149.479	Perkara, Berkas Perkara	69.380.179
			05 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Umum yang mudah dan terjangkau	FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	440	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	2.577.747
			06 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum yang optimal	QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	312.603	Orang	40.741.762
			11 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Agama yang mudah dan terjangkau	QCA Perkara Hukum Perseorangan	87.896	Perkara, Berkas Perkara	47.706.308
			12 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	388	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	2.829.767

SK No 154452 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	14 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal				
	15 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama yang optimal				
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**14.555.126.944**
RM 14.555.743.016	01 Terlaksananya dukungan manajemen pada Kepaniteraan yang prima dan optimal	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	24 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	17.593.223
PNBP 19.383.928	02 Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, dan Penanganan Pengaduan yang efektif, efesien, dan ekonomis	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.200 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	12.797.472.533
	03 Terlaksananya dukungan manajemen Badan Pengawasan yang prima dan optimal	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.842 Unit, m2, Paket	1.571.117.619
	05 Terlaksananya dukungan manajemen Badan Urusan Administrasi yang prima dan optimal	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	108.149 Orang, Layanan, Rekomendasi	104.629.992
	08 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Umum yang prima dan optimal	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.934 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	42.815.939
	09 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Agama yang prima dan optimal	PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
	10 Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.000.000
	11 Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang mendukung kebijakan Mahkamah Agung	TBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	6.000.000
	12 Terlaksananya dukungan manajemen Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan yang prima dan optimal	TBC	Layanan Manajemen SDM Internal	441 Orang, Layanan, Rekomendasi	11.567.641

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 005
KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	13 Terwujudnya SDM Mahkamah Agung yang kompeten		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA				20.250.000.000
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN				20.250.000.000
3 Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				8.657.322.245
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				11.592.677.755
Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				8.657.322.245
	RM	8.470.604.959	01 Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	AEA Koordinasi	35 kegiatan	969.500
	PNBP	186.717.286	02 Meningkatnya keberhasilan pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	220 orang	463.456
			03 Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Tindak Pidana Umum secara transparan, akuntabel dan profesional	AEG Konferensi dan Event	536 Kegiatan	1.316.000
			04 Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	11.642 Orang, Akta, Bidang, Laporan	3.003.200
			05 Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara pidana korupsi, pidana perpajakan, pidana kepabeanan, pidana cukai, pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	1.460 Lembaga	3.656.092
			06 Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara serta pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	BCE Penanganan Perkara	124.477 Perkara	260.698.879
			07 Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	BHB Operasi Bidang Keamanan	1.253 operasi, Hari Operasi	9.042.280

SK No 154498 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	08 Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel dan profesional	BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2 Orang, Laporan	15.000
	09 Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara koneksitas tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain	BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	20 laporan	21.900
	10 Meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer	BMB	Komunikasi Publik	90 layanan	2.356.908
	11 Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan	CAQ	Sarana Bidang Hukum	39 Unit	6.234.958.693
	12 Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	162 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.506.662
	13 Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	445 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	28.679.703
	14 Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	470 Laporan, Layanan	1.760.100
	15 Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	FAQ	Pengawasan Pembangunan	135 Laporan, Layanan	2.618.950
	16 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	1.509.000
	17 Meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum	QHB	Operasi Bidang Keamanan	25 operasi, Hari Operasi	8.178.000
	18 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	QMB	Komunikasi Publik	4.135 layanan	19.741.500
		RAQ	Sarana Bidang Hukum	55 Unit	74.448.390
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**11.592.677.755**
RM 10.398.420.382	01 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	551.050.000

SK No 154497 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 006

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
PNBP	547.470.023	02 Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI	CAQ Sarana Bidang Hukum	10	Unit	1.271.175.041
SBSN	854.387.350	03 Menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI	CBW Prasarana Bidang Hukum	121	Unit	1.612.967.943
BLU	92.400.000	04 Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.256	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.225.820.382
		06 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kelaksanaan Kejaksaan RI	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	679	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	17.252.701
		07 Meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum	FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.000	Orang	50.000.000
		08 Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI	FAH Pengelolaan Keuangan Negara	12	Layanan	10.034.338
		09 Meningkatnya kualitas program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI	RPW Prasarana Bidang Hukum	5	Unit	854.387.350
		10 Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial				
		11 Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI				
		12 Meningkatnya integritas Aparatur Kejaksaan RI				
		13 Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan Hubungan Luar Negeri				
		14 Menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani				
		15 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan berbasis TI				
		16 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI				

SK No 154496 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA				2.609.387.464
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM				2.609.387.464
3 Program	1) CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden				243.863.633
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				2.365.523.831
Program	1) CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden				243.863.633
	RM	233.888.804	01 Pemberian Analisa dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Pendapat Hukum tentang Litigasi, Permasalahan Hukum, Grasi, Amnesti, Abolisi, Rehabilitasi, Remisi Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara.	AAE Keputusan Presiden	215 KepPres	322.871
	HEN	9.974.829	02 Pemberian Rekomendasi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang Berkualitas	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	19 Rekomendasi Kebijakan	1.496.052
			04 Pemberian Rekomendasi Kebijakan atas Pengaduan Masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Berkualitas	ABC Kebijakan Bidang Politik	12 Rekomendasi Kebijakan	1.443.684
			05 Pemberian Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden yang Berkualitas	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	224 Rekomendasi Kebijakan	1.694.590
			06 Pengelolaan Program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular, Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri, serta Penanganan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang Efektif	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4 Rekomendasi Kebijakan	583.869
			07 Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis dan Administrasi Penanganan Administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pejabat Lainnya	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	9.974.829
			08 Terselenggaranya Dukungan Administrasi Personel TNI dan Polri yang Berkualitas	ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4 Rekomendasi Kebijakan	583.869

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	09 Terselenggaranya Dukungan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang Berkualitas	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	41 Rekomendasi Kebijakan	2.013.051
	10 Terwujudnya Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, serta Pers dan Media Kegiatan Presiden yang Lancar	ABN Kebijakan Bidang Sosial	4 Rekomendasi Kebijakan	741.764
	11 Terwujudnya Dukungan Kerumahtanggaan, Keprotokolan, serta Pers dan Media Kegiatan Wakil Presiden yang Lancar	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	170 Orang	1.360.564
	13 Meningkatnya Kelancaran Aktivitas Presiden dan Wakil Presiden melalui Dukungan Koordinasi Pengamanan	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.000 Orang, Akta, Bidang, Laporan	49.920
	14 Layanan Fasilitas Pejabat Negara, Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang Berkualitas	BAH Pelayanan Publik Lainnya	27 layanan	195.038.646
	15 Layanan Dukungan Tugas Lainnya yang secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara sesuai Ketentuan	BHB Operasi Bidang Kemaritiman	7 operasi, Hari Operasi	21.430.622
	16 Terwujudnya Tugas Khusus pada Lembaga Lain yang Anggarannya secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara secara Optimal	BLB Persidangan Lembaga Eksekutif	2 sidang	548.360
	17 Pemberian Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Perekonomian, Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pangan, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan yang berkualitas	FAA Kearsipan	4 Dokumen, Arsip	345.879
	18 Terwujudnya layanan pengelolaan persidangan kabinet yang lancar	PEC Kerja sama	13 Kesepakatan	8.295.193
	19 Terwujudnya dokumen pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama/Madya yang berkualitas			
	20 Terwujudnya Naskah Kepresidenan dan Kenegaraan yang berkualitas			
	21 Terwujudnya pengelolaan arsip kepresidenan dan pendokumentasian kegiatan kabinet yang berkualitas			

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 007

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
			22 Pemberian Jabatan Fungsional Bidang Kesekretariatan Negara yang Berkualitas				
Program	**2) WA Program Dukungan Manajemen**						**2.365.523.831**
	RM	1.590.603.368	01 Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia	ABC Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	445.542
	PNBP	922.021	02 Organisasi, Tata Kelola, dan Transformasi Birokasi yang Efektif	BAH Pelayanan Publik Lainnya	15	layanan	478.272.176
	BLU	773.998.442	03 Pengawasan yang Berkualitas	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	68	Unit	15.984.612
			04 Perencanaan Kinerja dan Anggaran, serta Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas dan Akuntabel	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	48	Unit	36.049.640
			05 Layanan BLU Kementerian Sekretariat Negara yang Berkualitas	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	84	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.797.706.254
			06 Terwujudnya Dukungan Administrasi yang Baik pada Lembaga Lain yang Anggarannya secara Administratif Dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	559	Unit, m2, Paket	18.981.379
			07 Hasil Analisis dan Pendapat Hukum terkait Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi, dan Litigasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang Berkualitas	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7.634	Orang, Layanan, Rekomendasi	13.711.524
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	126	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.162.464
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	1.209.220

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI				7.800.000.000
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM				7.800.000.000
3 Program	1) CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa				886.731.523
	2) CP	Program Tata Kelola Kependudukan				2.069.744.710
	3) CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum				282.819.299
	4) WA	Program Dukungan Manajemen				4.570.704.468
Program	1) CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa				886.731.523
	RM	752.739.193	01 Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan Damkar sesuai standar	AAA Undang-Undang	1 UU, RUU	600.000
	PNBP	38.277.402	02 Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu, serta pengelolaan kawasan dan perbatasan negara	AAD Peraturan Presiden	2 PerPres, R.Perpres	440.000
	PLN	58.365.400	03 Meningkatnya kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	AAG Peraturan Menteri	11 PerMen, Perka, RPermen	2.135.000
	HLN	47.351.498	04 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat desa	AAH Peraturan lainnya	8 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	216.000
			05 Meningkatnya kualitas pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	156 Rekomendasi Kebijakan	28.072.090
			06 Meningkatnya kualitas unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, Produk Hukum Daerah, dan Penataan Daerah	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.770 Orang Sertifikat	2.580.582

SK No 154492 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	07 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.050.000
	08 Meningkatnya kualitas inovasi pemerintahan dalam negeri	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9.810 Lembaga, Unit Kerja, Tim	22.780.000
	09 Meningkatnya kualitas strategi dan kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam perataan kebijakan pemerintahan dalam negeri	BMA	Data dan Informasi Publik	4 layanan, dokumen, publikasi Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.800.000
	10 Meningkatnya kualitas standarisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	300.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	21.264 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	78.204.863
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1.007 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	3.142.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	7.307 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	169.282.556
		FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	13.451 Desa, DesaKelurahan	24.250.000
		PAC	Peraturan Pemerintah	1 PP, RPP	620.000
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	154 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	46.889.770
		PEC	Kerja sama	21 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	18.900.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	19 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.900.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9.500 Lembaga, Unit Kerja, Tim	6.500.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	3 layanan, dokumen, publikasi Wilayah, Peta, Data, Lokasi	17.300.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	12.449.335

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	7.740 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	45.264.217
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10.476 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	331.569.788
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	73.252 Desa, DesaKelurahan	62.589.380
Program **2) CP Program Tata Kelola Kependudukan**					**2.069.744.710**
RM 704.307.868	01 Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	AAG	Peraturan Menteri	2 PerMen, Perka	295.000
PLN 1.365.436.852		AAH	Peraturan lainnya	1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	30.000
		ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	9 Rekomendasi Kebijakan	38.448.385
		AEH	Promosi	1 promosi, Kegiatan	5.997.600
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	5.000.000
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	22.372.627 Orang, Akta, Keping, Bidang	226.136.314
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	33.775.600
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.690 Lembaga, Unit Kerja, Tim	5.223.206
		BMB	Komunikasi Publik	1 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	23.868.000
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	751 Unit	877.765.261
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	552 Unit, KabKota, Kecamatan, Titik/Lokasi	205.665.756

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	15 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	430.906.412
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4.846 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	53.513.756
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	4.404 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	85.061.047
		PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	440.000
		PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.580.851 Orang, Akta, Keping, Bidang	1.400.500
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1.375 Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	14.852.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	703.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	58.936.824
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	60 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, Kabkota	2.261.075
Program 3) CR **Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum**					**262.819.299**
RM 262.819.299	01 Meningkatnya kebebasan, Kesetaraan dan kapasitas kelembagaan demokrasi, serta kewaspadaan dini di daerah dalam memelihara stabilitas sosial dan politik dalam negeri	ABC	Kebijakan Bidang Politik	7 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.000.000
	02 Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat penyelarasan kehidupan harmoni di Indonesia	ACB	Pendidikan Masyarakat	300 Orang, Kelelasan	400.000
		AEB	Forum	46 forum	7.250.000
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	12 orang	11.000.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8 Lembaga	800.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BOD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	30 Kelompok Masyarakat	7.500.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	150 Orang	2.250.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	717 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	68.290.174
		PBC	Kebijakan Bidang Politik	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.250.000
		PEB	Forum	20 forum, DesaKelurahan, KabKota, TitikLokasi, Meter, Dokumen, Kilo Liter	3.900.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8 Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.100.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	12.450 Orang	6.700.000
		QEI	Bantuan Lembaga	8 Lembaga	134.469.125
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	2.500 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	6.500.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	226 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	13.400.000
Program **4) WA Program Dukungan Manajemen**					**4.570.704.468**
RM 4.554.337.100	01 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	AAG	Peraturan Menteri	15 PerMen, Perka	2.603.485
PNBP 16.367.368	02 Tersedianya kader pemerintahan dalam negeri yang unggul, profesional, berdaya saing dan berintegritas	AAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	35.020
	03 Meningkatnya kualitas pengawasan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	50 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	19.496.511
		ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000
		ADB	Akreditasi Produk	4 produk	738.609

SK No 154488 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		ADG	Standardisasi Profesi dan SDM	380 Orang	797.865
		AEA	Koordinasi	8 kegiatan	3.542.003
		AEC	Kerja sama	55 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	114.339.183
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, title	6.562.095
		BCB	Perkara Hukum Lembaga	80 Perkara, Berkas Perkara	3.332.828
		BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	84 Pemerintah Daerah	18.438.064
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	6.142.714
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	273.713.709
		CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	6.321.300
		DBA	Pendidikan Tinggi	260 Orang, Kegatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	14.062.122
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	169 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.239.884.719
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.083 Unit, m2, Paket	475.219.405
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	6.460 Orang, Layanan, Rekomendasi	149.302.218
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	752 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.067.581.780
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	10.228.748

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 010

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	606 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	1.492.774
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3 Laporan, Layanan	620.016
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	39 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	20.570.824
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	380 Daerah (Prov/KabKota), Provinsi, KabKota	22.916.664
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	76 Lembaga	7.227.806
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	44.188.095
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	47.067.071

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI**					**10.220.520.811**
2 Fungsi	**01 PELAYANAN UMUM**					**10.220.520.811**
3 Program	**1) AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**					**1.981.062.426**
	2) AL Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik					**300.121.729**
	3) WA Program Dukungan Manajemen					**7.939.336.656**
Program	**1) AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional**					**1.981.062.426**
	RM 1.981.062.426	01 Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	37 Rekomendasi Kebijakan	3.926.915
		02 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan	ABC	Kebijakan Bidang Politik	137 Rekomendasi Kebijakan	1.040.705.361
		03 Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	27 Rekomendasi Kebijakan	3.922.632
		04 Kebijakan luar negeri yang berkualitas	AEA	Koordinasi	9 kegiatan	67.066.652
		05 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN	AEB	Forum	267 forum	53.727.709
		06 Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional	AEC	Kerja sama	869 Kesepakatan	294.108.978
		23 Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkat melalui Perwakilan RI	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	5.622.511 orang	6.962.700
			AEH	Promosi	1.210 promosi	416.915.267
			BDD	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	862 Kelompok Masyarakat	84.524.756
			BMA	Data dan Informasi Publik	5 dokumen, Peta, Data	1.869.360

SK No 154485 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAB Sistem informasi Pemerintahan	3	Sistem informasi	400.000
		PBC Kebijakan Bidang Politik	44	Rekomendasi Kebijakan	5.679.535
		PEC Kerja sama	6	Kesepakatan	1.165.561
Program 2) AL Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik					**300.121.729**
RM 299.001.857	01 Pelindungan WNI di Luar Negeri termasuk PMI yang integratif	AEA Koordinasi	34	kegiatan	2.500.000
PNBP 1.119.872		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	368.131	Orang, Akta, Bidang, Laporan	27.653.899
		BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	471	Lembaga	17.000.000
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	182.150	layanan	23.800.000
		PEA Koordinasi	3	kegiatan	1.183.859
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	154.000	Orang, Akta, Bidang, Laporan	227.083.971
Program 3) WA Program Dukungan Manajemen					**7.939.336.656**
RM 7.710.357.214	01 Infrastruktur Diplomasi Kemenlu yang Riat	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8	Unit	10.000.000
PNBP 228.979.442		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	196	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.988.798.533
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.700	Unit, m2, Paket	969.635.967
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7.403	Orang, Layanan, Rekomendasi	254.482.667
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	886	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	17.419.199

SK No 154484 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN				187.100.000.000
2 Fungsi	02	PERTAHANAN				186.609.805.453
	10	PENDIDIKAN				490.194.547
3 Program	1) AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI				5.896.648.245
	2) AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit				13.813.236.661
	3) AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan				36.717.369
	4) AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan				84.459.115.506
	5) AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan				948.487.637
	6) KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan				1.843.054.027
	7) WA	Program Dukungan Manajemen				80.072.740.555
Program	1) AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI				5.896.648.245
	RM	5.822.402.543	01 Terjaganya kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa yang bebas dari pelanggaran maupun ancaman	AEA Koordinasi	5 kegiatan	1.191.305
	PNBP	74.245.702	02 Terwujudnya kesiapan dan kesiapsiagaan operasional Satuan maupun Satgas TNI AD guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Tugas TNI AD yang dilaksanakan melalui Operasi Militer (OMP/OMSP)	AEC Kerja sama	80 Kesepakatan	177.424.428
			03 Terwujudnya kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang mendukung pelaksanaan tugas, peran dan fungsi TNI AD	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.001 orang	2.724.310

SK No 154483 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	04 Terwujudnya kesiapsiagaan operasi dan diplomasi TNI AL dalam rangka penegakan hukum, keamanan wilayah laut, serta penguatan hubungan luar negeri	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	171.900
	05 Terwujudnya kesiapsiagaan operasi dan diplomasi TNI AU dalam rangka pelaksanaan tugas OMP dan OMSP serta penguatan hubungan luar negeri	BHA	Operasi Bidang Pertahanan	12.539.671 operasi	4.965.072.103
	06 Terwujudnya ketersediaan peta wilayah darat dan data geografi medan darat yang mendukung operasi militer dan upaya diplomasi batas negara	BHB	Operasi Bidang Keamanan	3 operasi, Hari Operasi	68.660.915
	07 Terwujudnya batas laut yang jelas	CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Unit, Paket	1.425.000
	08 Terwujudnya peta udara yang diperbaharui	CCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	2.548 Orang	56.065.026
	09 Terwujudnya sinergi penataan wilayah pertahanan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.172 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	453.968.516
	10 Meningkatnya peran diplomasi militer yang dilaksanakan Mabes TNI untuk mendukung kebijakan diplomasi pertahanan dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	38.108 Orang, Layanan, Rekomendasi	39.338.413
	11 Meningkatnya peran diplomasi militer yang dilaksanakan TNI AD untuk mendukung kebijakan diplomasi pertahanan dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.422 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	22.910.073
		CHA	Operasi Bidang Pertahanan	18 operasi	107.674.354
Program **2) AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit**					**13.913.236.661**
RM 6.848.782.730	01 Terwujudnya komposisi personel ideal dalam rangka pemenuhan kekuatan pokok TNI	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	3 Orang	19.204.040
SBSN 1.116.101.000	02 Terwujudnya kekuatan personel militer ideal sesuai pentahapan pemenuhan kekuatan pokok TNI AD yang mencerminkan kesiapan struktural bidang Personel	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	2 Paket, Unit, m2	523.469.275

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	PNBP	1.268.978.013	03 Terwujudnya komposisi personel ideal dalam rangka pemenuhan kekuatan pokok TNI AL yang menseimbangkan kesiapan struktural bidang Personel	CAB Sarana Bidang Kesehatan	2.190	Paket, Unit	704.310.789
	BLU	4.579.374.916	04 Terwujudnya komposisi personel ideal dalam rangka pemenuhan kekuatan pokok TNI AU yang menseimbangkan kesiapan struktural bidang Personel	CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	12	Unit, Paket	513.763.218
			05 Terwujudnya personel TNI yang profesional berdasarkan hasil latihan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	CBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.860	unit, Kawasan	1.053.687.354
			06 Terwujudnya prajurit TNI dan/atau PNS yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	CBV Prasarana Bidang kesehatan	9	Unit	7.462.254
			07 Terwujudnya personel TNI AD yang kompeten berdasarkan hasil latihan dan siap mendukung tugas, peran, dan fungsi TNI AD	CCB OM Sarana Bidang Kesehatan	4.638	Paket, Unit	238.372.622
			08 Terwujudnya kesiapan personel TNI AD yang kompeten berdasarkan hasil pendidikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TNI AD	CDM OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	10.563	unit	225.295.175
			09 Terwujudnya personel TNI AL yang profesional berdasarkan hasil latihan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	DCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2.559.714	Orang, Kegiatan	4.178.051.185
			10 Terwujudnya prajurit dan/atau PNS TNI AL yang profesional berdasarkan hasil pendidikan dan kursus dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.701	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.222.911.758
			11 Terwujudnya personel TNI AU yang profesional berdasarkan hasil latihan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	800	Orang, Layanan, Rekomendasi	12.786.011
			12 Terwujudnya prajurit dan/atau PNS TNI AU yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok	RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	128	unit, Kawasan	1.116.101.090
			13 Terpenuhinya rumah dinas Prajurit dan PNS di lingkungan TNI				
			14 Terpenuhinya rumah dinas yang layak huni untuk personel TNI AD				

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	15 Terpenuhinya rumah dinas yang layak huni untuk personel TNI AL			
	16 Terpenuhinya rumah dinas yang layak huni untuk personel TNI AU			
	17 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan psikologi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI			
	18 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan psikologi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AD			
	19 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan psikologi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AL			
	20 Terpenuhinya pelayanan kesehatan dan psikologi Prajurit dan PNS di lingkungan TNI AU			
	21 Meningkatnya peran diplomasi militer yang dilaksanakan Mabes TNI melalui latihan bersama untuk mendukung kebijakan diplomasi pertahanan dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia			
	22 Meningkatnya peran diplomasi militer yang dilaksanakan TNI AD melalui Latihan Bersama untuk mendukung kebijakan diplomasi pertahanan dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia			
Program **3) AD** **Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan**				**36.717.369**
RM 36.717.369	01 Terlaksananya diplomasi batas negara sesuai tahapan rencana	AAC Peraturan Pemerintah	2 PP, RPP	663.385
	02 Terwujudnya penyusunan rencana aksi implementasi Kebijakan Pertahanan Militer dan/atau Nirmiliter oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda	AAG Peraturan Menteri	7 PerMen, Perka, RPermen	9.052.017
	03 Terwujudnya penataan wilayah pertahanan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda	AAH Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	440.877

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				04 Meningkatnya hubungan diplomasi pertahanan melalui kerja sama bilateral dan multilateral di kawasan dan global yang telah disepakati	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	24	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	11.683.674
				05 Terwujudnya kebijakan strategis pertahanan negara yang diimplementasikan	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	2	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	352.849
				15 Terumuskannya rancangan dan rekomendasi kebijakan terkait pertahanan nasional yang bersifat strategis	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2	Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	385.120
					AEB Forum	8	forum	3.988.079
					AEC Kerja sama	15	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	4.486.672
					AEF Sosialisasi dan Diseminasi	640	orang	1.568.294
					EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.982.509
					FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	15	Laporan, Rekomendasi	3.098.993
Program	**4) AF**	**Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Serpras Pertahanan**						**84.489.115.506**
		RM	33.439.862.835	01 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista Strategis yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	AEA Koordinasi	4	kegiatan	273.605
		SBSN	797.912.499	02 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista Integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	53	orang	946.263
		PDN	3.587.798.759	03 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista (Alat Utama Alpalhankam) Matra Darat yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	34.349
		PLN	46.500.000.000	04 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista Matra Laut yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	594	Unit, Paket	16.518.368.183
		PNBP	63.541.409	05 Terpenuhinya kebutuhan Alutsista Matra Udara yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	CBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	312	unit	7.539.621.506

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	06 Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	CCF	OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1.261 Unit, Paket	2.033.175.617
	07 Terwujudnya kodifikasi materiel pertahanan yang diimplementasikan	COM	OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	510 unit	1.202.440.493
	08 Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista Integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	359 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	57.146.965
	09 Terpenuhinya kebutuhan materiel Alpalhankam matra darat Non Alutsista (termasuk Alpalhankam Siber) yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	85 Unit, m2, Paket	538.052.330
	10 Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista Matra Laut yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2.052.006 Unit, Paket	54.019.526.068
	11 Terpenuhinya kebutuhan Non Alutsista Matra Udara yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	167 km	300.000.000
	12 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	22 unit	911.361.510
	13 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Integratif yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI	RCF	OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	162 Unit, Paket	1.368.270.717
	14 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Pertahanan Matra Darat yang siap digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI				
	15 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Matra Laut yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI				
	16 Terpenuhinya kebutuhan Sarpras Matra Udara yang siap digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI				
Program 5j AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan					**948.487.837**

SK No 154478 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
RM 948.487.697	01 Terwujudnya kesadaran Bela Negara yang tinggi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran warga negara serta kesiapan kader Bela Negara	AAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	170.000
	02 Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Nasional yang optimal untuk mendukung pertahanan negara melalui pendidikan Komponen Cadangan dan pengelolaan Sumberdaya dalam Komponen Pendukung	AAG	Peraturan Menteri	11 PerMen, Perka, RPermen	1.509.426
	03 Terwujudnya penyiapan kekuatan pendukung pertahanan aspek darat dalam rangka mewujudkan Alat dan Kondisi Juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara	AAH	Peraturan lainnya	12 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	481.500
	04 Terwujudnya penataan wilayah pertahanan darat yang selaras dengan RUTR Kementerian/Lembaga dan Pemda	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	16 Rekomendasi Kebijakan	1.752.225
	05 Terwujudnya penataan wilayah pertahanan laut yang selaras dengan RUTR Kementerian/Lembaga dan Pemda	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	124 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	2.892.500
	06 Terwujudnya penataan wilayah pertahanan udara yang selaras dengan RUTR Kementerian/Lembaga dan Pemda	ACA	Perizinan Produk	1 Produk, Keputusan	179.269
	07 Terwujudnya kebijakan di bidang potensi pertahanan yang diimplementasikan	AEA	Koordinasi	20 kegiatan	2.339.069
	08 Terwujudnya kebijakan dan kesiapan di bidang kekuatan pertahanan yang diimplementasikan	AEB	Forum	1 forum	718.000
		AEC	Kerja sama	24 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	1.047.633
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	5.467 orang	10.015.068
		AEG	Konferensi dan Event	1 Kegiatan	143.288
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	350 Orang, Akta, Bidang, Laporan	232.652

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	8.000	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, title	503.235
		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	132.131	Orang	386.637.784
		BEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	65	Orang	11.602.773
		BHA Operasi Bidang Pertahanan	1.327	operasi	272.508.261
		BMA Data dan Informasi Publik	2	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	648.235
		CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2	Unit, Paket	1.180.650
		CCF OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	5	Unit	2.175.000
		DCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	650	Orang	999.918
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	870	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	126.401.095
		EBO Layanan Manajemen Kinerja Internal	22	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.155.000
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	75	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	200.040
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	13	Laporan, Rekomendasi	1.736.682
		PAG Peraturan Menteri	1	PerMen, Perka	250.000
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	760	orang	1.262.942
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	10.000.000
		RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1	Unit, Paket	7.275.000
		SCG Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	3.969	Orang	99.549.352

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program **6) KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan**				**1.843.054.027**
RM 1.843.054.027	01 Terwujudnya perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Offset (IDKLO) dalam pengadaan Alpalhankam luar negeri	AAG Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka, RPermen	40.000
	02 Meningkatnya kerjasama baru yang ditandatangani dengan industri pertahanan luar negeri	AAH Peraturan lainnya	11 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	369.673
	03 Terwujudnya First Article hasil Litbanghan yang tersertifikasi	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Kemaritiman	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	50.441.765
	04 Meningkatnya pengadaan, pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan	ACC Sertifikasi Produk	1 produk	505.466
	05 Terwujudnya hasil Litbanghan UO Kemhan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara	AEA Koordinasi	3 kegiatan	1.048.137
	06 Tersedianya SDM lulusan Diploma, S1, S2, S3 dengan nilai "Sangat Memuaskan"	AEB Forum	2 forum, Dokumen, Kegiatan, Rekomendasi	1.049.354
	07 Terwujudnya pendidikan tinggi pertahanan menuju pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) yang berkualitas dan bernilai tambah	AEC Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	300.000
	08 Terwujudnya hasil Litbanghan Matra Darat yang direalisasikan	AED Perjanjian	2 perjanjian	1.020.150.000
	09 Terwujudnya hasil Litbanghan Matra Laut yang direalisasikan	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	100 orang	595.050
	10 Terwujudnya hasil Litbanghan Matra Udara yang direalisasikan	AEG Konferensi dan Event	2 Kegiatan, Paket Kegiatan	377.842
	11 Terwujudnya kebijakan di bidang teknologi dan industri pertahanan yang diimplementasikan	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	10 Orang, Akta, Keping, Bidang	852.008
		BCI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3 Industri, IKM, Miliar USD	410.000
		BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1 Layanan, Laporan	100.000
		BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1 Badan Usaha, Laporan	75.000

SK No 154475 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	3 unit		10.403.760
				DBA Pendidikan Tinggi	17.269 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi		119.634.846
				DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	8 produk, Ekor, Bibit/Benih		2.491.945
				DDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	31 Purwarupa, Desain		60.660.955
				DDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	7 model, Desain		7.083.014
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		27.882.580
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	17 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		7.885.682
				RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	2 Unit, Paket		6.934.000
				SDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	5 Purwarupa		223.365.000
Program	**7) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**80.072.740.555**
	BLU	132.010.252	01 Terwujudnya SDM bidang pertahanan yang kompeten dan profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi	AAA Undang-Undang	4 UU, RUU		1.254.632
	RM	79.931.229.035	02 Terwujudnya tata kelola sistem pemerintahan Kemhan yang baik	AAC Peraturan Pemerintah	2 PP, RPP		667.394
	PNBP	9.491.269	03 Terpenuhinya pelayanan kesehatan Prajurit dan PNS di lingkungan Kemhan	AAD Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres		343.047
			04 Terwujudnya kinerja Unhan yang baik	AAG Peraturan Menteri	9 PerMen, Perka, RPermen		662.975
			05 Terwujudnya tata kelola sistem pemerintahan TNI yang baik	AAH Peraturan lainnya	30 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan		2.233.040
			06 Terwujudnya kinerja UO Kemhan yang baik	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	153 Rekomendasi Kebijakan		22.703.843
				ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	60 Orang, Sertifikat		1.700.966

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		AEA Koordinasi	1.452	kegiatan	175.817.856
		AEB Forum	11	forum	826.572
		AEC Kerja sama	2	Kesepakatan	22.786
		AED Perjanjian	1	perjanjian	85.000
		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	4.378	orang	16.002.265
		AEG Konferensi dan Event	31	Kegiatan	3.497.126
		AEH Promosi	57.011	promosi, Kegiatan	1.835.000
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12	NSPK	37.342.561
		BBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	51.702	Orang	19.468.496
		BCA Perkara Hukum Perseorangan	100.377	Perkara, Berkas Perkara	53.081.355
		BCB Perkara Hukum Lembaga	35	Perkara, Berkas Perkara	1.127.757
		BGF Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pertahanan dan Keamanan	91	Lembaga	1.520.374
		BMB Komunikasi Publik	2	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	3.139.386
		CAB Sarana Bidang Kesehatan	2	Paket, Unit	84.010.252
		CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	36	Unit, Paket	1.560.253.391
		CBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	16	unit, Kawasan	323.479.617
		CBO Prasarana Pengembangan Kawasan	1	bidang, hektar	782.370
		CBV Prasarana Bidang Kesehatan	742	Unit	70.000.000
		CDM OM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	6	unit	70.058.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 012
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		DCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	7.807	Orang, Kegiatan	35.555.833
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.483	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	74.764.086.619
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	29	Unit, m2, Paket	1.815.728.366
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.484	Orang, Layanan, Rekomendasi	72.407.382
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.509	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	842.083.204
		FAA Kearsipan	66	Dokumen, Arsip	10.542.661
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	9.667.500
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4.849	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	8.334.331
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	46	Layanan, Dokumen	7.905.965
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	164	Laporan, Rekomendasi	12.308.010
		FAH Pengelolaan Keuangan Negara	16	Laporan	1.983.367

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	015	KEMENTERIAN KEUANGAN					52.016.000.000
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					47.773.586.873
	04	EKONOMI					249.259.263
	10	PENDIDIKAN					3.993.153.864
3 Program	1) CB	Program Pengelolaan Belanja Negara					24.406.799
	2) CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara					1.997.068.482
	3) CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko					289.232.672
	4) CE	Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi					90.032.330
	5) WA	Program Dukungan Manajemen					49.615.259.817
Program	1) CB	Program Pengelolaan Belanja Negara					24.406.799
	RM	24.406.799	01 Belanja Negara yang berkualitas untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	AAD	Peraturan Presiden	2 PerPres, R.Perpres	314.250
				AAG	Peraturan Menteri	6 PerMen, Perka, RPerman	495.869
				AAH	Peraturan lainnya	8 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	253.400
				ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	82 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.099.393
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1.500 orang, Paket Kegiatan	733.679
				FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	8.631 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	7.470.143

SK No 160514 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	15 Layanan, Dokumen	3.645.764
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	58 Laporan, Rekomendasi	3.460.474
		FAH Pengelolaan Keuangan Negara	4 Laporan	554.578
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.150 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	1.709.784
		UAD Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan, Dokumen	157.000
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Rekomendasi	463.118
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	955 Desa, DesaKelurahan	1.139.327
Program **2) CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara**				**1.997.068.482**
RM 1.997.068.482	01 Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP yang maksimal dan berkeadilan sebagai sumber pendanaan pembangunan	AAC Peraturan Pemerintah	5 PP, RPP	1.107.172
	02 Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi yang efektif	AAG Peraturan Menteri	18 PerMen, Perka, RPermen	2.019.093
		AAH Peraturan lainnya	42 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	1.405.365
		ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	146 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	22.883.189
		AEA Koordinasi	186 kegiatan	5.148.383
		AEC Kerja sama	10 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	546.361
		AED Perjanjian	4 perjanjian	1.319.976
		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	42.209 orang	11.964.341
		AEG Konferensi dan Event	7 Kegiatan, Paket Kegiatan	1.225.858

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				BAE Pelayanan Publik kepada UMKM	176	UMKM	775.664
				BCE Penanganan Perkara	1.655.779	Perkara, Berkas Perkara	56.324.550
				BHB Operasi Bidang Keamanan	1.201	operasi, Hari Operasi	226.580.145
				BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	2.186.647	Laporan	372.909.122
				BMA Data dan Informasi Publik	1.252.355	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	184.947.007
				BMB Komunikasi Publik	63.617	layanan, kegatan, Media, Orang, Volume	86.736.417
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.012	Orang, Layanan, Rekomendasi	9.109.283
				FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	426	Laporan, Rekomendasi	23.508.487
				FAJ Benda Meterai dan Cukai	601.195.661	Keping, Lembar	888.928.537
				PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	Rekomendasi Kebijakan	2.000.428
				QAE Pelayanan Publik kepada UMKM	50	UMKM	175.464
				QHB Operasi Bidang Keamanan	2	operasi, Hari Operasi	1.362.610
Program	**3) C0**	**Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko**					**289.232.572**
		RM 268.048.327	01 Pengelolaan perbendaharaan yang optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	AAA Undang-Undang	4	UU, RUU	1.349.720
		PNBP 21.184.245	02 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	AAC Peraturan Pemerintah	2	PP, RPP	131.733

SK No 160512 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	03 Pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif dan risiko yang prudent	AAG	Peraturan Menteri	42 PerMen, Perka, RPermen	869.626
		AAH	Peraturan lainnya	20.736 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	28.965.707
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	35.526 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	14.207.212
		ACD	Perizinan Lembaga	10 Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	80.000
		ACE	Perizinan Profesi	164 Orang	258.046
		AEB	Forum	2 forum	35.750
		AED	Perjanjian	17 perjanjian	35.750
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	37.120 orang	13.716.703
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	29.978 layanan, bidang, dokumen, Mitra Rp, Hak	29.278.030
		BDA	Fasilitasi dan Pembinaan BLMN	5 BLMN	95.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	14 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	43.100
		BMB	Komunikasi Publik	217 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	2.369.370
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	42.389 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	9.629.259
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	86 Layanan, Dokumen	37.216
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	30.394 Laporan, Rekomendasi, Media, Orang, Volume	56.903.103
		FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	2.434 Laporan	6.068.127



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAK	Pengelolaan Aset BUN	1.559 Unit, Aset	40.226.761
		FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	5.500.465.298 Dokumen, Kegiatan	23.745.839
		PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.786.864
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11 Laporan, Rekomendasi	711.046
		UAK	Pengelolaan Aset BUN	175 Unit, Aset	60.994.450
		UAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	50.002 Dokumen, Kegiatan	691.146
Program **4) CE** **Program Kebijakan Fiskal Sektor Keuangan dan Ekonomi**					**80.032.330**
RM 80.032.330	01 Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang berkualitas, proaktif dan adaptif	AAA	Undang-Undang	1 UU, RUU	409.750
	02 Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif	AAC	Peraturan Pemerintah	5 PP, RPP	1.741.383
		AAG	Peraturan Menteri	14 PerMen, Perka, RPermen	2.582.867
		AAH	Peraturan lainnya	1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	7.101
		ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	260 Rekomendasi Kebijakan	42.285.742
		AEB	Forum	3 forum, Paket Kegiatan	3.182.774
		AEC	Kerja sama	5 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	9.506.643
		AEG	Konferensi dan Event	9 Kegiatan, Paket Kegiatan	5.214.276
		BMB	Komunikasi Publik	2 layanan	4.231.301

SK No 160510 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	200 Orang, Layanan, Rekomendasi	201.396
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan, Dokumen	476.130
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	227 Laporan, Layanan	8.675.330
		PAC	Peraturan Pemerintah	4 PP, RPP	1.709.994
		PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	7 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	9.590.843
Program **5j WA Program Dukungan Manajemen**					**49.615.259.817**
RM 39.168.048.014	01 Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik	AAG	Peraturan Menteri	107 PerMen, Perka, RPermen	517.730
BLU 10.377.043.522	02 Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara;	AAH	Peraturan lainnya	134 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	795.668
PNBP 52.168.281	03 Penguatan sistem pengendalian intern terintegrasi;	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	73 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	20.389.420
	04 Pencapaian fugas khusus yang efektif;	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	28 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	104.453.643
		ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja	15.299
		AEG	Konferensi dan Event	2 Kegatan	381.482
		BCE	Penanganan Perkara	15.000 Perkara, Berkas Perkara	255.000
		BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1 Layanan	994.744
		BMA	Data dan Informasi Publik	140 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	3.145.330
		BMB	Komunikasi Publik	214.017 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	42.803.682

SK No 160509 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAA Sarana Bidang Pendidikan	580	Paket, Unit	480.010
		CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	26	Unit, Paket	443.239.527
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	29.981	Unit	319.655.426
		CCF OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	4.083	Unit	273.762.133
		CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.600	Unit	1.288.222.308
		DBA Pendidikan Tinggi	10.936	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	29.545.683
		DCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	164.446	Orang, Kegiatan	169.955.910
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	75.350	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	32.970.544.536
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	182.734	Unit, m2, Paket	1.269.624.563
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	186.695	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.694.721.088
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.547	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	58.089.361
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	97	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	993.248.854
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	46.915	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	5.685.678
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Layanan	130.343
		FAK Pengelolaan Aset BUN	39.488	Unit, Aset	45.753.665

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAM	Hasil Kelolaan Dana	73.640 Rupiah, Hektar, Orang, Usaha Mikro, Miyar, Dokumen, Kilo Liter	4.814.531.632
		PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.232.946
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	6 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	15.664.513
		UAM	Hasil Kelolaan Dana	2.462.025 Rupiah, Hektar, Orang, Usaha Mikro, Miyar, Dokumen, Kilo Liter	4.777.446.691

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	018	KEMENTERIAN PERTANIAN					40.146.000.000
2 Fungsi	04	EKONOMI					38.906.789.504
	10	PENDIDIKAN					238.230.495
3 Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					747.693.339
	2) EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					6.623.748.308
	3) HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					23.814.710.637
	4) WA	Program Dukungan Manajemen					8.958.847.716
Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					747.693.339
	PNBP	9.519.839	01 Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	AEC	Kerja sama	10 Kesepakatan	1.050.000
	RM	738.173.500		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	844 Lembaga	13.000.000
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.950 Orang	10.000.000
				BMA	Data dan Informasi Publik	30 dokumen, Peta, Data	3.260.000
				CAA	Sarana Bidang Pendidikan	11 Paket, Unit, m2	6.001.782
				CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.070 Unit	269.758.345
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	38 Unit	2.280.000
				CSI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	3 unit	2.702.184
				CSJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	6 unit	9.212.550

SK No 160506 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12 unit	8.594.086
		DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	438 Orang	2.630.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.850.000
		PAA	Undang-Undang	1 UU, RUU	300.000
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1.130 Orang, Sertifikat	3.126.500
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	48 Lembaga	950.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	37.505 Orang	135.078.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.250 Kelompok Masyarakat	12.500.000
		SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan	6.464 Orang	207.114.000
		SOC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	52.456 Orang, Kegiatan	57.205.914
Program **2) EC** **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**					**6.623.748.308**
RM 5.817.888.799	01 Komoditas Pertanian yang Bernilai Tambah	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	14 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.067.200
PLN 669.711.139	02 Komoditas Pertanian Yang Berdaya Saing	AEA	Koordinasi	46 kegiatan	5.873.208
PNBP 16.148.370	03 Meningkatnya Sertifikasi Usaha Tani Nasional	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	6.035 orang	2.646.225
	05 Meningkatnya indeks harga yang diterima petani tanaman pangan	AEH	Promosi	5 promosi, Kegiatan	1.000.000
	06 Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman pangan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	496.792

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	07 Meningkatnya volume ekspor komoditas tanaman pangan yang siap digunakan	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	26 Orang, Akta, Bidang, Laporan	356.223
	08 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas tanaman pangan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7 Lembaga, Unit Kerja, Tim	311.567
	09 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal perkebunan dan produksi dalam negeri	BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	55.886.961 Produk	9.880.339
	10 Meningkatnya indeks harga yang diterima Pekebun	BMA	Data dan Informasi Publik	298 dokumen, Peta, Data	2.486.000
	13 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	149 Unit	3.795.527
	14 Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	5 Rekomendasi Kebijakan	554.300
	15 Meningkatnya indeks harga yang diterima peternak	PDA	Standarisasi Produk	1.750 produk	4.460.000
	16 Terjaminnya mutu komoditas peternakan	PDC	Sertifikasi Produk	202 produk	7.260.000
	17 Meningkatnya volume ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan	PEH	Promosi	9 promosi	1.260.000
	18 Meningkatnya hasil pengolahan komoditas peternakan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	290 Lembaga, Unit Kerja, Tim	571.720.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	42.000 Orang	15.233.300
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	204 Kelompok Masyarakat	7.824.960
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4 Lembaga	50.000
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	291.042.800 Unit	3.277.711.014
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	586.194 Unit, Hektar	2.322.775.747

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.638 unit		369.117.685
				RDK DM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	214 unit		15.698.191
Program	**3) HA**	**Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**					**23.814.710.637**
	RM	23.311.712.877	01 Komoditas Tanaman Pangan Dalam Negeri yang Tersedia	AEA Koordinasi	214 kegiatan		42.562.873
	PNBP	38.604.016	02 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal hortikultura dari produksi dalam negeri	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	32 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar		3.170.240
	BLU	48.977.156	03 Terpenuhinya kebutuhan pangan asal ternak dari produksi dalam negeri	BMA Data dan Informasi Publik	8 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi		2.500.000
	SBSN	302.871.785	04 Terjaminnya keamanan komoditas peternakan	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.365.086 Unit		48.567.025
	PLN	112.244.603	05 Terkendalinya wilayah dari zoonosis dan penyimpangan produk hewan yang memperganuhi kesehatan manusia	CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17 unit		5.065.370
			06 Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas yang Terkendali	DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	4 produk		260.000
			07 Terkendalinya wilayah atau kawasan dari penyakit hewan	PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	63 Rekomendasi Kebijakan		19.940.580
			08 Prasarana pertanian yang tersedia sesuai kebutuhan	PDA Standarisasi Produk	5.423.351 produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar		58.999.534
			09 Sarana produksi pertanian yang dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan	PDC Sertifikasi Produk	26.533 produk, Sertifikat		11.318.272
			11 Terwujudnya Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman Pertanian	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	22.494.262 Orang, Akta, Bidang, Laporan		101.111.203
			12 Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	QAH Pelayanan Publik Lainnya	10.617.422 layanan, bidang, dokumen, Nilkar Rp, SIR		139.069.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	13 Meningkatnya produksi komoditas hortikultura pada Kawasan Sentra Produksi Pertanian	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.458	Kelompok Masyarakat	75.869.720
		QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	225.000	Kelompok Masyarakat	207.765.000
		QEC Bantuan Produk dan Peralatan	97.750	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	52.234.100
		QJA Penyidikan dan Pengujian Produk	17.499	Produk	14.214.081
		QJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	53.163	Sampel	26.917.564
		QKB Pemantauan produk	5.600	laporan	16.750.125
		QMA Data dan Informasi Publik	1	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	10.000.000
		RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	251.974.038	Unit	4.423.538.461
		RAI Sarana Pengembangan Kawasan	4.282.413	Unit, Hektar	2.946.748.948
		RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	26.441	unit	3.586.815.849
		RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	560.000	km2, bidang, km, hektar	10.913.037.429
		RBR Dukungan Teknis	700.011	Dokumen	333.264.000
		RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.000	unit	754.771.500
		SDA Penelitian dan Pengembangan Produk	105	produk	37.445.135
		SDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	6	Purwarupa, Desain	3.040.000
		SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	2	model, Desain	495.637
Program **4) WA Program Dukungan Manajemen**					**6.958.847.718**
RM 6.918.872.684	01 Tata Kelola Pemerintahan yang Agile, Efektif, dan Efisien	AAA Undang-Undang	2	UU, RUU	399.557

SK No 160502 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 018

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
PNBP	7.159.172	02 Tata Kelola Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel	AAG	Peraturan Menteri	19 PerMen, Perka	2.671.331
BLU	32.815.860	03 Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Organisasi Badan Penelitian dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	28 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.075.000
		05 Terwujudnya birokrasi dan tata kelola organisasi Ditjen PKH yang baik transparan dan akuntabel	ACD	Perizinan Lembaga	4 Institusi, Badan Usaha, Lembaga	750.000
			ADC	Sertifikasi Produk	230 produk, Sertifikat	1.469.240
			AEA	Koordinasi	212 kegiatan	94.020.036
			AEC	Kerja sama	19 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	34.407.902
			AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	11.155 orang	4.462.000
			BCB	Perkara Hukum Lembaga	16 Perkara, Berkas Perkara	894.641
			CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	4.500.000
			EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	116.924 Layanan, Perkara	9.647.291.957
			EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4.709 Unit, m2, Paket	21.509.244
			EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	50.704 Orang, Layanan, Rekomendasi	29.360.867
			EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.604 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	105.478.462
			FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	15 Sistem Informasi	5.812.477

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					2.501.796.683
2 Fungsi	04	EKONOMI					1.807.044.199
	10	PENDIDIKAN					694.752.484
3 Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					117.327.582
	2) EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri					729.468.915
	3) WA	Program Dukungan Manajemen					1.655.010.186
Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					117.327.582
BLU		48.405.349	01 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6 Lembaga	600.000
RM		40.534.428	02 Penguatan Making Indonesia 4.0	CBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	2 unit	227.000
PNBP		28.357.805	04 Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	45 Lembaga	16.373.990
			05 Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3 Rekomendasi Kebijakan	930.000
				PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	100 Orang	180.000
				QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	2 Industri	600.000
				QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	32 Start Up	1.877.808
				RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	7 unit	11.367.467
				SAG	Pendidikan Vokasi Bidang Industri	19.616 Orang	71.946.317
				SCH	Pelatihan Bidang Industri	1.860 Orang	12.995.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program **2) BC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**				**729.466.915**
RM 588.540.101	01 Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	6 Rekomendasi Kebijakan	1.714.514
PNBP 20.132.442	02 Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	AEB Forum	2 forum, Kajian	282.304
BLU 140.668.372	03 Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri	AEC Kerja sama	30 Kesepakatan	1.469.566
	04 Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	10.717 orang	4.257.612
	05 Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	AEH Promosi	4 promosi	609.170
	06 Meningkatnya Persebaran Industri	BAD Pelayanan Publik kepada industri	18.460 Industri	110.078.256
	08 Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Lembaga Pembiayaan, Asosiasi Industri, Asosiasi Profesi dan lainnya serta penguatan kelembagaan	BDI Fasilitas dan Pemberian Industri	33 Industri	1.423.869
		BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.134 Produk	614.718
		BMA Data dan Informasi Publik	7 dokumen, Peta, Data	1.367.841
		CAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	137 Unit	38.503.459
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	1.168.484
		CBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	3 unit	4.578.500
		PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	81 Rekomendasi Kebijakan	67.172.321
		PBF Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	600.000
		PDC Sertifikasi Produk	530 produk	12.035.000

SK No 160538 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PEC Kerja sama	207	Kesepakatan	7.105.000
		PEG Konferensi dan Event	3	Kegatan	2.000.000
		PEH Promosi	9	promosi	109.725.792
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	49	NSPK	8.700.000
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Lembaga	500.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	12	Kelompok Masyarakat	7.126.629
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	83	Badan Usaha	29.984.160
		QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	8.922	Industri	283.101.716
		QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1	Lembaga	3.000.000
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	54	Produk	5.450.000
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	40	Lembaga	1.150.000
		QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	93	Badan Usaha	5.100.000
		QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	992.337
		RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	15.097.865
		RBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	Unit	3.600.000
		SCH Pelatihan Bidang Industri	100	Orang	1.000.000
		SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	6	model, Desain	600.000
Program **3	WA Program Dukungan Manajemen**				**1.655.010.198**
RM 1.480.338.463	01 Terwujudnya Tata Kelola Kementerian yang Efektif dan Efisien	AAG Peraturan Menteri	1	Permen, Perka	150.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 019

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
BLU	153.285.053	02 Meningkatnya Penggunaan Produk dan Industri Halal Dalam Negeri	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	2.576.441
PNBP	21.386.640	03 Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Andal dan Efektivitas Publikasi Kinerja Industri	AEC	Kerja sama	5 Kesepakatan	202.042
		04 Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	AEH	Promosi	1 promosi	1.884.000
		05 Terwujudnya Organisasi dan Tata Laksana yang Tepat Fungsi, Tepat Proses dan Tepat Ukuran	BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	80.000
		06 Meningkatnya kinerja ASN dan Efektivitas Organisasi	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	319 Unit	7.890.068
		07 Terwujudnya tata kelola keuangan, BMN, Sarana dan Prasarana kemenperin yang efektif dan efisien	OCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.349 Unit	7.834.383
		08 Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, dan evaluasi kinerja industri	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	316 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.557.467.579
		09 Meningkatnya layanan legislasi dan advokasi yang andal	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	422 Unit, m2, Paket	11.710.712
		10 Meningkatnya nilai TKDN produk industri	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	9.743 Orang, Layanan, Rekomendasi	27.190.361
		12 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	835 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	35.561.649
		13 Terwujudnya ASN yang Kompeten dan Berintegritas	FAD	Perencanaan dan Penganggaran	9 Layanan, Dokumen	2.465.951
		14 Meningkatnya penggunaan Knowledge management				
		15 Tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien				
		16 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Inspektorat Jenderal				

SK No 160536 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				10.117.997.491
2 Fungsi	04	EKONOMI				9.952.841.292
	10	PENDIDIKAN				165.156.199
3 Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				37.229.768
	2) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				340.595.227
	3) FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi				208.892.425
	4) JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan				5.964.032.709
	5) JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara				53.249.979
	6) WA	Program Dukungan Manajemen				3.624.197.383
Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				37.229.768
	RM	37.229.768	01 Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum dan Meningkatnya Budaya Kebaatan terhadap Peraturan Perundang- Undangan Sektor ESDM	BCE Penanganan Perkara	3 Perkara	18.532.556
				BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	4 Operasi	14.460.787
				BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	1 Badan Usaha	4.236.425
Program	2) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				340.595.227
	BLU	300.947.921	01 Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSDM ESDM Bertumbuh	ADE Akreditasi Lembaga	16 Lembaga Unit Kerja	609.838

SK No 160535 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	RM	34.062.108	02 Terwujudnya Pengembangan Kompetensi SDM sektor ESDM yang Unggul dan Berdaya Saing	AEC Kerja sama	499	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	2.206.193
	PNBP	5.585.198		AEH Promosi	8	promosi, Kegiatan	724.503
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	423	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.361.631
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	82	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	191.605.470
				BMA Data dan Informasi Publik	6	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	364.048
				CAA Sarana Bidang Pendidikan	308	Paket, Unit, m2	18.040.000
				CAV Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	85	Unit	639.588
				DAC Pendidikan Vokasi Bidang Industri	50	Orang	105.000
				FAD Perencanaan dan Penganggaran	2	Layanan, Dokumen	230.000
				FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	Laporan, Layanan	420.000
				SAG Pendidikan Vokasi Bidang Industri	1.924	Orang	35.777.646
				SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur	8.330	Orang, Kegiatan	12.094.234
				SCH Pelatihan Bidang Industri	49.910	Orang, Kegiatan	74.418.588
Program	**3) FE**	**Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi**					**208.692.425**
	RM	187.852.778	01 Optimalisasi Data dan Informasi Kebencanaan Geologi serta Penguatan Infrastruktur dan Sistem Mitigasi Bencana Geologi	AB Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	12	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	1.326.623
	PNBP	1.139.647	02 Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Sumber Daya Geologi	ABS Kebijakan Bidang Kebencanaan bencana dan perubahan iklim	93	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	13.510.690

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
BLU	19.600.000	03 Optimalisasi Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Konservasi Lingkungan Berbasis Geologi	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	6 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	21.289.468
			BMA	Data dan Informasi Publik	55 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	10.829.276
			BMB	Komunikasi Publik	128 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	2.402.440
			CAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	48 Unit	108.169.970
			CAO	Sarana Bidang IPTEK	2 Unit	1.277.899
			CAP	Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	8 Unit	1.849.442
			CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	9 unit	3.364.237
			CCN	OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana	25 Unit	688.653
			FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	793.613
			PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	8.474 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	22.762.086
			PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	1.261.982
			QMA	Data dan Informasi Publik	42 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	10.123.486
			RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	84 Unit	9.226.752
			RAP	Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	2 Unit	462.010
			RCN	OP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana	80 Unit	1.367.854

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
Program	**4) JA Program Energi dan Ketenagalistrikan**					**5.954.032.709**
	RM 4.113.871.686	01 Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Bidang Minyak dan Gas Bumi	AAH	Peraturan lainnya	51 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	23.209.583
	PNBP 1.581.336.023	02 Meningkatnya Kontribusi Subsektor Migas terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	58 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	9.389.666
	BLU 258.825.000	03 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Migas yang Efektif	ABU	Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir	4 Rekomendasi Kebijakan	1.331.706
		04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	ACA	Perizinan Produk	14 Produk, Keputusan	765.916
		11 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	ACD	Perizinan Lembaga	54 Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	730.000
		12 Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	ADC	Sertifikasi Produk	100 produk, Sertifikat	251.910
		13 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	ADE	Akreditasi Lembaga	7 Lembaga, Unit Kerja	373.642
		21 Meningkatnya Ketahanan Energi Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi	ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	2.000 Orang	400.000
		22 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Hilir Migas	AEA	Koordinasi	27 kegiatan	2.098.532
		23 Optimalisasi Kontribusi BPH Migas Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak	AEC	Kerja sama	2 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	405.085
		31 Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Subsektor EBTKE yang berkelanjutan	AED	Perjanjian	10 perjanjian	86.364
		32 Optimalisasi kontribusi Subsektor EBTKE yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	500 orang	211.887
		33 Layanan Subsektor EBTKE yang Optimal	AEH	Promosi	4 promosi, Kegatan	675.162

SK No 160532 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	34 Pembinaan dan Pengawasan Subsektor EBTKE yang Efektif	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.532.804
	41 Mewujudkan Peran Hulu Migas Aceh dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Energi Nasional	BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	26.639.033
	42 Mewujudkan Kontribusi Hulu Migas Aceh yang Bertanggung Jawab, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Berkelanjutan	BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	298 Badan usaha, Penyalur, Hektar	12.139.898
	43 Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas Aceh yang handal, tertib, aman dan ramah lingkungan	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	62 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	225.559.566
	44 Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional	BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	214 Badan usaha, Miliar USD	3.591.936
	46 Tersedianya Rumusan Rekomendasi Pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Energi Lintas Sektor	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3 Industri, IKM, Miliar USD	495.961
		BGA	Tata Kerola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1 Lembaga	30.000
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	850 Produk, Laporan, Keputusan	2.669.066
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	614.545
		BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	4 Layanan	11.854.310
		BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	4 Layanan	13.635.823
		BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	569 Badan Usaha, Laporan	16.528.873
		BKB	Pemantauan produk	1 laporan	162.500
		BMA	Data dan Informasi Publik	7 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	11.244.070
		BMB	Komunikasi Publik	3 layanan	10.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	12	Unit	117.314
		CBR Dukungan Teknis	12	Dokumen	12.113.179
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	2	Layanan, Dokumen	1.595.772
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	5	Laporan, Layanan	2.772.936
		FAG Pengawasan Pembangunan	19	Laporan	55.361.440
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	4	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	460.928
		PBI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	35	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	13.519.359
		PBJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	400.000
		PDA Standarisasi Produk	1	produk	173.293
		PEA Koordinasi	3	kegiatan	257.700
		PEC Kerja sama	2	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	640.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	339.100
		QEO Bantuan Produk dan Peralatan	420.699	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	3.108.728.455
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	5	Produk, Laporan, Keputusan	245.956
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	127	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	4.078.630
		QIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	3	Layanan, Laporan	750.000
		QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	615	Badan Usaha, Laporan	6.104.106

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		GMA Data dan Informasi Publik	28 dokumen, Peta, Data	5.372.857
		RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	9.202.450
		RBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	2 unit	2.352.197.183
		UAG Pengawasan Pembangunan	3 Laporan	2.900.000
Program 6) JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara				**53.249.979**
RM 20.749.979	21 Meningkatnya Ketaharan dan Kemandirian Energi Subsektor Batubara	ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	13 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	11.062.251
BLU 32.500.000	22 Optimalisasi Kontribusi Penerimaan, Manfaat Ekonomi dan Sosial Sub Sektor Minerba	BAH Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	33.750.000
	23 Terpenuhinya Produk Mineral untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi	BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	240 Badan Usaha	7.182.728
	24 Optimalisasi Pengelolaan Batubara Nasional	GDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	8 Badan usaha	825.000
	25 Pengelolaan Lingkungan Hidup Minerba yang Berkualitas	QII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	2.000 Hektar, Layanan	430.000
	26 Pembinaan dan Pengawasan Sub Sektor Minerba yang Efektif			
	27 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional			
Program 8) WA Program Dukungan Manajemen				**3.524.197.383**
RM 3.269.038.988	01 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif melalui Koordinasi, Pembinaan, dan Dukungan Manajemen Terpadu	BAH Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan	775.935
PNBP 235.158.395	02 Optimalisasi Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Sekretariat Jenderal	BMA Data dan Informasi Publik	11 layanan, dokumen, publikasi Wilayah, Peta, Data, Lokasi	57.738.230

SK No 160529 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	05 Terwujudnya Dukungan Manajemen yang Efektif dan Akuntabel untuk Penguatan Sistem Penegakan Hukum Sektor ESDM yang Profesional dan Berintegritas	BMB	Komunikasi Publik	2 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	1.150.000
	12 Layanan Sektor ESDM yang Optimal serta Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	874 Unit	71.065.021
	14 Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah serta Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien serta Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	393 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.229.731.868
	15 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Inspektorat Jenderal yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan berkelanjutan yang di Dukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.770 Unit, m2, Paket	24.767.736
	21 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan, yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	26.748 Orang, Layanan, Rekomendasi	59.913.000
	22 Organisasi Ditjen Migas yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	535 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	75.003.516
	23 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Migas yang Optimal	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	6 Sistem Informasi	3.757.075
	24 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Migas yang Efektif	PAH	Peraturan lainnya	1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	305.000
	25 Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal (Dukman)				
	27 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas				
	28 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	29 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan		
	30 Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul		
	31 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal		
	32 Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal		
	34 Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor EBTKE Yang Berkualitas		
	35 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor EBTKE yang Efektif		
	36 Terwujudnya birokrasi Subsektor EBTKE yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima		
	37 Organisasi EBTKE yang Fit dan SDM yang Unggul		
	38 Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen EBTKE yang Optimal		
	43 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK dan ASN yang Profesional		
	49 Meningkatnya Kemandirian Dan Ketahanan Energi Nasional		
	50 Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN		
	53 Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan		
	54 Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN		

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	55 Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral		
	56 Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi Setjen DEN		
	57 Terwujudnya Birokrasi Setjen DEN Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima		
	58 Organisasi Setjen DEN yang Fit dan SDM yang Unggul		
	59 Pengelolaan Sistem Anggaran Setjen DEN yang Optimal		
	60 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan BPH Migas yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, dan ASN yang Profesional		
	67 Terwujudnya Pengembangan Kompetensi SDM sektor ESDM yang Unggul dan Berdaya Saing		
	68 Terwujudnya Dukungan Manajemen yang Efektif dan Akuntabel untuk Pengembangan SDM ESDM Berbasis Kompetensi dalam mendukung Ketahanan Kemandirian Energi, Transisi Energi dan Hilirisasi		
	75 Optimalisasi Kontribusi Sektor Geologi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan		
	78 Terwujudnya birokrasi Badan Geologi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima		
	79 Organisasi Badan Geologi yang Fit dan SDM Unggul		
	80 Pengelolaan Sistem Anggaran Badan Geologi yang Optimal		
	83 Terwujudnya Budaya birokrasi BPH Migas yang BerAKHLAK		
	84 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan BPH Migas yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Berkelanjutan		

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 020

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	85 Terwujudnya ASN BPH Migas yang profesional 87 Terwujudnya Pengawasan yang Andal Ditjen Gakum 88 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK Ditjen Gakum 91 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Profesional untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Energi Hulu Migas Aceh 92 Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan BPMA yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan 98 Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi 99 Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Setjen DEN yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan, dengan Dukungan ASN yang Profesional		

SK No 160525 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					26.489.404.712
2 Fungsi	04	EKONOMI					26.611.987.133
	10	PENDIDIKAN					1.877.417.579
3 Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					1.834.949.516
	2) GA	Program Infrastruktur Konektivitas					16.676.512.657
	3) WA	Program Dukungan Manajemen					9.777.842.539
Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					1.834.949.516
	RM	460.000.000	01 Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi Yang Kompeten	ADO	Standarisasi Lembaga	48 Lembaga, Unit Kerja	8.382.327
	BLU	1.370.970.584		AEC	Kerja sama	344 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	20.364.931
	PNBP	3.978.932		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	230 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	18.892.815
				BMA	Data dan Informasi Publik	196 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	37.865.471
				CMA	Sarana Bidang Pendidikan	232 Paket, Unit, m2	28.023.636
				CMN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	500.000
				CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	3 unit	1.920.000
				CCA	OP Sarana Bidang Pendidikan	1.345 Paket, Unit	66.537.668
				CDJ	OP Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	70 unit	47.142.465
				DMB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	4.990 Orang	78.475.815

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				DCB Pelatihan Bidang Infrastruktur	218.334	Orang, Kegiatan	920.373.740
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	27	Unit, m2, Paket	4.392.498
				RAA Sarana Bidang Pendidikan	2	Paket, Unit, m2	15.263.850
				SAB Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	18.217	Orang	505.267.353
				SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur	32.886	Orang, Kegiatan	78.426.954
Program	**2	GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**				**16.878.512.657**
	BLU	447.251.673	01 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Nasional	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	169	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	100.133.791
	RM	10.005.400.741	02 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	ADC Sertifikasi Produk	10.000.006	produk, Sertifikat	73.146.498
	PNBP	3.662.341.739	04 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	1	Orang, Sertifikat	20.016.189
	PLN	2.761.518.904	13 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Transportasi Strategis yang Direkomendasikan Badan Kebijakan Transportasi	AEA Koordinasi	32	kegiatan	16.488.121
			14 Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	160	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	115.365.904
			15 Meningkatnya Kinerja Manajemen Pengetahuan Kebijakan Transportasi	BAH Pelayanan Publik Lainnya	9	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	124.141.033
			16 Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan yang Efektif	BEO Bantuan Produk dan Peralatan	106	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	80.748.699
			17 Meningkatnya Integrasi Transportasi Nasional	BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.310	Layanan, Laporan	568.305.253
			18 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Integrasi Transportasi Antarmoda dan Multimoda	CAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	128	Unit, Paket	58.975.673
				CAD Sarana Bidang Konektivitas Udara	26	Unit, Paket	41.715.621
				CAE Sarana Bidang Konektivitas Laut	429	Unit	379.790.276
				CAK Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	2	Unit, Paket	4.623.000

SK No 160523 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	5.374.000
		CBA	Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	9 km, Paket, Unit	59.139.767
		CBD	Prasarana Bidang Konektivitas Laut	90 unit	702.754.029
		CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	208 unit, Paket	224.655.658
		CBP	Prasarana Bidang Konektivitas Darat	8 Unit, Paket	95.669.369
		CBR	Dukungan Teknis	97 Dokumen	97.621.336
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	15.000.000
		CCC	OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	44 Unit, Paket	29.660.533
		CCD	OM Sarana Bidang Konektivitas Udara	44 Unit, Paket	25.931.498
		CCE	OM Sarana Bidang Konektivitas Laut	2.913 Unit	544.373.244
		CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	71 Unit, Paket	88.076.498
		CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5 Unit	1.100.000
		CDA	OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	171 km, Paket, Unit	80.979.132
		CDD	OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut	191 unit	14.337.503
		CDE	OM Prasarana Bidang Konektivitas Udara	656 unit, Paket	467.623.310
		CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat	699 Unit, Paket	213.964.243
		CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	16.213.689

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	21.367.983
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.511	Unit, m2, Paket	328.462.333
		EBC Layanan Manajemen Kinerja Internal	3	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	15.364.476
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	499.500
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	469	Laporan, Rekomendasi	235.670.516
		PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	14	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	28.282.729
		PDH Promosi	61	promosi, Kegiatan	12.600.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	14.400.000
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	11.662	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, title	3.858.200.583
		RAC Sarana Bidang Konektivitas Darat	5.097	Unit, Paket	346.446.266
		RAE Sarana Bidang Konektivitas Laut	1	Unit	239.000.000
		RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	215	km, Paket, Unit	1.207.165.259
		RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut	23	unit	2.136.190.404
		RBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara	19	unit, Paket	273.936.967
		RBP Prasarana Bidang Konektivitas Darat	3	Unit, Paket	1.169.000.000
		RCC OM Sarana Bidang Konektivitas Darat	617	Unit, Paket	84.106.781
		RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian	13	km, Paket, Unit	2.447.691.032
Program 3) WA Program Dukungan Manajemen					**9.777.942.539**

SK No 160521 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	RM	9.237.905.965	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	AAG Peraturan Menteri	123	PerMen, Perka, RPerman	5.046.550
	BLU	407.251.883	02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	AAH Peraturan lainnya	3	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	481.160
	PNBP	132.784.691	05 Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.923.800
			06 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola, Integritas, dan Kepatuhan di Kementerian Perhubungan	ABI Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	499.414
			07 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan	ABJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	545.130
			08 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	4	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.530.000
				ABS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	2	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	465.450
				AEB Forum	1	forum	65.000
				AEC Kerja sama	31	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	24.907.708
				AED Perjanjian	15	perjanjian	535.059
				AEE Kemitraan	1	Kesepakatan	4.323.711
				AEF Sosialisasi dan Diseminasi	250	orang	592.400
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	17	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	6.350.608
				BCA Perkara Hukum Perseorangan	30	Perkara, Berkas Perkara	1.650.000
				BCD Perkara Hukum Badan Usaha	1	Perkara, Berkas Perkara	90.000
				BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	8	Layanan, Laporan	12.065.853

SK No 160520 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 022
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BMA	Data dan Informasi Publik	10 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	18.484.743
		BMB	Komunikasi Publik	7 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	14.291.112
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	175 Unit	13.130.101
		COL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	9.955.134
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.797 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.505.309.453
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	750 Unit, m2, Paket	197.881.766
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	28.509 Orang, Layanan, Rekomendasi	120.896.751
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.277 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	802.958.443
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	14 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	22.933.067

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	024	KEMENTERIAN KESEHATAN					114.000.000.000
2 Fungsi	07	KESEHATAN					111.488.704.961
	10	PENDIDIKAN					2.511.295.039
3 Program	1) 01	Program Sumber Daya Kesehatan					59.414.183.231
	2) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					2.969.325.835
	3) DX	Program Pelayanan Kesehatan Primer					2.690.551.491
	4) DY	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan					29.697.796.758
	5) DZ	Program Sistem Ketahanan Kesehatan					9.607.523.881
	6) WA	Program Dukungan Manajemen					9.620.618.804
Program	1) 01	Program Sumber Daya Kesehatan					59.414.183.231
	RM	59.400.386.435	01 Meningkatnya pemerataan SDM Kesehatan sesuai standar	ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	32 Rekomendasi Kebijakan	4.466.092
	PNBP	13.796.796	02 Terpenuhinya pembiayaan kesehatan dalam mencapai UHC	ACB	Pelatihan Masyarakat	16.000 Orang	2.872.750
			03 Meningkatnya kecukupan pendanaan kesehatan yang berkeadilan dan berkesinjutan	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	392.285 Orang	115.906.656
			04 Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah	AEA	Koordinasi	7 kegiatan	949.260
			05 Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan	AEB	Forum	1 forum	75.000
			06 Meningkatnya jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan rehabilitasi medis	AEC	Kerja sama	15 Kesepakatan	204.961.962
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	4.000 orang	2.300.000

SK No 160518 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				AEG Konferensi dan Event	22	Kegiatan	1.174.870
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	192	NSPK	42.079.023
				BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.117	Orang, Akta, Bidang, Laporan	3.018.974
				BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	428	Lembaga	17.020.582
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.000	Orang	5.171.380
				BBI Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	61	Orang	6.922.390
				BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	269.680
				BMB Komunikasi Publik	1	layanan	50.000
				CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit	2.090.250
				DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	2.885	Orang	10.180.860
				FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2	Laporan, Layanan	155.076
				FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	41	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.839.666
				PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	4	Rekomendasi Kebijakan	2.035.000
				PEA Koordinasi	3	kegiatan	563.340
				QEA Bantuan Masyarakat	146.405.975	Orang	56.990.057.090
Program	**2) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**2.989.326.835**
		RM 1.545.682.233	01 Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan yang berkualitas	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	25	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	547.316
		BLU 1.392.723.010		ADA Standarisasi Produk	1	produk	289.250
		PNBP 30.920.592		ADE Akreditasi Lembaga	86	Lembaga, Unit Kerja	16.233.771

SK No 160517 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		AEC Kerja sama	826	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	7.555.017
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	170.550
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	76	Lembaga, Unit Kerja, Tim	585.975
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.981	Kelompok Masyarakat	77.993.039
		BEN Bantuan Peserta Didik	27.377	Orang	71.766.955
		BGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	38	Lembaga	653.460.289
		BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	6	Produk, Laporan, Keputusan	52.444
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	29.340
		CAA Sarana Bidang Pendidikan	4.539	Paket, Unit, m2	101.054.202
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	521	Unit	7.657.899
		CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1.586	unit	99.238.478
		CCA OP Sarana Bidang Pendidikan	675	Paket, Unit	6.130.491
		CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.354	Unit	12.077.988
		DBA Pendidikan Tinggi	171.496	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	1.050.469.864
		DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	16.346	Orang, Kegiatan	70.280.454
		DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	135	Orang, Kegiatan	225.300

SK No 160561 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				DOA	Penelitian dan Pengembangan Produk	9 produk, Ekstr, BibitBenih	1.973.365
				DOB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	122 Purwarupa, Desain	9.375.499
				DOC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2.077 model, Desain	122.335.906
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	129 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	186.689.131
				EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	870 Unit, m2, Paket	13.769.166
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7.793 Orang, Layanan, Rekomendasi	8.137.699
				EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	313 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	17.960.077
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	53.064
				QEN	Bantuan Peserta Didik	6.338 Orang	421.958.398
				SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	91 Orang, Kegiatan	1.200.000
Program	**3) DX**	**Program Pelayanan Kesehatan Primer**					**2.690.551.491**
		RM 255.971.903	01 Meningkatnya proporsi kabupaten/kota yang menyelenggarakan skrining penyakit tidak menular prioritas	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	29 layanan	5.245.865
		PNBP 9.718.356	03 Tercapainya imunisasi lengkap pada populasi	BQD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	22 Lembaga	53.625.950
		BLU 71.701.791	04 Meningkatnya pengendalian penyakit dan faktor risiko penyakit tidak menular	CAB	Sarana Bidang Kesehatan	9 Paket, Unit	82.470
		PLN 2.331.556.865	05 Meningkatnya tatalaksana penyakit kanker	CCB	OP Sarana Bidang Kesehatan	18 Paket, Unit	2.832.887
		HLN 21.602.574	06 Menurunnya proporsi perokok usia 10-21 tahun	DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	186 Orang	987.704

SK No 160560 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	07 Meningkatnya produk pangan olahan yang beredar di masyarakat memenuhi batas maksimum kandungan Gula Garam Lemak (GGL)	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	228.275
	08 Meningkatnya Skrining kolesterol pada Puskesmas	PEA	Koordinasi	51 kegiatan	6.750.422
	09 Menurunnya insiden penyakit menular	PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	4.200 orang	82.360
	10 Meningkatnya eliminasi penyakit menular	PEH	Promosi	2 promosi	350.000
	11 Menurunnya kematian akibat penyakit menular	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7 NSPK	745.030
	12 Menurunnya proporsi obesitas di Kab/Kota	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.437.468 Orang, Akta, Bidang, Laporan	134.927.372
	13 Menurunnya kejadian penyakit menular sensitif iklim	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	211 layanan	32.465.602
	14 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10.200 Lembaga	288.780
	15 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	362 Kelompok Masyarakat	34.560.000
	16 Meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup sehat	QEA	Bantuan Masyarakat	533.147 Orang	31.502.758
	17 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan primer	QEC	Bantuan Produk dan Peralatan	88.126 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	1.886.991.479
		QGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	23 Lembaga	3.609.055
		QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	24.100 Sampel	1.548.931
		QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	75 Orang, Kelompok Masyarakat	4.001.130
		QMA	Data dan Informasi Publik	6 dokumen, Peta, Data	758.500
		RAR	Sarana Bidang Kesehatan	886 Paket, Unit	354.152.280
		RCB	OP Sarana Bidang Kesehatan	3 Paket, Unit	726.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				SCM Pelatihan Bidang Kesehatan	18.952	Orang	129.746.949
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	6	Sistem Informasi	770.000
				UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	182	Laporan_Layanan	2.964.616
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	310	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	21.317.045
Program	**4) OY**	**Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan**					**29.697.796.758**
		PNBP 79.780.279	01 Meningkatnya kualitas layanan obstetrik di RS	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	152	Rekomendasi Kebijakan	46.203.439
		RM 3.924.953.392	02 Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan lanjutan	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	56.270	orang	36.366.320
		BLU 21.637.753.877	03 Meningkatnya layanan berbasis kedokteran presisi	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	343.885
		PLN 4.059.309.210	04 Meningkatnya kapabilitas riset di RS	BAH Pelayanan Publik Lainnya	51	layanan	2.128.802
				BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.405	Lembaga	2.684.179
				BEN Bantuan Peserta Didik	317	Orang	15.341.602
				BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2	Lembaga	97.770
				BKC Pemantauan lembaga	2.152	Lembaga	384.360
				CAB Sarana Bidang Kesehatan	7.010	Paket, Unit	6.617.780.214
				CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.295	Unit	179.041.070
				CBV Prasarana Bidang Kesehatan	6.459	Unit	1.078.882.652
				CCB OP Sarana Bidang Kesehatan	356	Paket, Unit	4.711.848.794
				CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.276	Unit	87.205.865

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	71.475	Orang	209.566.636
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	172	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.468.750.709
		EBG Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.317	Unit, m2, Paket	178.162.181
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	25.022	Orang, Layanan, Rekomendasi	56.676.756
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	93	Laporan, Layanan	11.283.516
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.116
		PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	20	Rekomendasi Kebijakan	5.545.548
		PDE Akreditasi Lembaga	46	Lembaga	64.560
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	260	orang	10.800
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10	NSPK	797.147
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.231	Lembaga	125.130.684
		QEO Bantuan Produk dan Peralatan	20	Paket, Unit, Biji, Benih, Ekor	2.749.864.150
		QKC Pemantauan lembaga	10	Lembaga	185.745
		RAB Sarana Bidang Kesehatan	6.007	Paket, Unit	3.512.080.334
		RBV Prasarana Bidang Kesehatan	2.845	Unit	1.518.982.072
		RCB OP Sarana Bidang Kesehatan	15.324	Paket, Unit	44.508.812
		RCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	129	Unit	24.703.700
		SCM Pelatihan Bidang Kesehatan	1.939	Orang	17.679.207
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	177.965

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	35 Laporan, Layanan		1.237.116
Program	**6j DZ**	**Program Sistem Kesehatan Kesehatan**					**9.607.523.881**
	RM	9.417.577.440	01 Meningkatnya Desa/Kelurahan yang menerapkan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkelanjutan	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	6 Rekomendasi Kebijakan		220.061
	PNBP	156.426.453	02 Meningkatnya kabupaten/kota yang mendeteksi, merespon dan mengendalikan faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	ACA Perizinan Produk	22.000 Produk		10.839.263
	BLU	33.517.988	03 Meningkatnya pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	ACD Perizinan Lembaga	2.025 Institusi, Badan Usaha, Lembaga		3.221.627
			04 Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan di Kab/Kota	ADE Akreditasi Lembaga	1 Lembaga		1.273.627
			05 Menurunnya jumlah KLB Keracunan Pangan	ADF Sertifikasi Lembaga	700 Lembaga, Badan Usaha		1.670.291
			06 Meningkatnya Kab/Kota yang menyelenggarakan adaptasi perubahan iklim bidang Kesehatan	AEA Koordinasi	10 kegiatan		4.141.672
			07 Meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	21.400 orang		14.490.000
			08 Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	AEH Promosi	2 promosi		150.000
			09 Meningkatnya kemampuan pemenuhan obat, obat bahan alam, produk biologi (termasuk vaksin) serta alkes secara mandiri	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9 NSPK		755.250
			10 Meningkatnya pemanfaatan alat Kesehatan produksi dalam negeri di pelayanan kesehatan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	5 layanan		362.500
			11 Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan di peredaran	BDB Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga	113 Lembaga		3.556.076
			12 Meningkatnya rancangan produk baru dan uji klinik yang dilakukan dalam negeri	BDC Fasilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	25.300 Orang		22.159.456

SK No 160556 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	13 Menguatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan untuk menghadapi ancaman kesehatan	BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	171	Industri	1.682.491
		BEE Bantuan Penanggulangan Kebencanaan	12	Paket	368.128
		BGO Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	1	Lembaga	313.732
		BHC Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	35	operasi	6.629.353
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	50	Lembaga	200.000
		BJB Penyidikan dan Pengujian Peralatan	55.149	Unit	16.682.020
		CAB Sarana Bidang Kesehatan	153	Paket, Unit	38.462.806
		CBV Prasarana Bidang Kesehatan	1	Unit	5.308.152
		CCB OP Sarana Bidang Kesehatan	5	Paket, Unit	1.884.465
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	22	Sistem Informasi	5.117.946
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	41	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.467.740
		PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	1	Rekomendasi Kebijakan	38.500
		PEA Koordinasi	358	kegiatan	2.715.971
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	3.955	orang	954.048
		PEH Promosi	2	promosi	401.269
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	274.935
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.179.636	Orang, Akta, Bidang, Laporan	21.871.709
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	39.617	layanan	83.369.660
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11.511	Lembaga	2.120.779

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	409	Industri	3.866.439
				QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	435	Kelompok Masyarakat	44.322.845
				QEO Bantuan Produk dan Peralatan	42	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	9.271.160.407
				QHC Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	35	operasi	4.008.745
				QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	187	Produk	813.735
				QMA Data dan Informasi Publik	4	dokumen, Peta, Data	1.230.000
				RAB Sarana Bidang Kesehatan	886	Paket, Unit	22.668.308
				RCB OP Sarana Bidang Kesehatan	12	Paket, Unit	327.543
				SCM Pelatihan Bidang Kesehatan	1.500	Orang	22.590
				UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	23	Laporan Layanan	106.100
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2.646	Daerah (Prov/Kab/Kota) Provinsi, Kab/Kota	2.018.402
Program	**6) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**9.620.618.804**
	RM	9.282.133.582	01 Meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan	AAD Peraturan Presiden	2	PerPres, R.Perpres	431.190
	PNBP	56.481.970	04 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi	AAG Peraturan Menteri	15	PerMen, Perka	625.535
	HLN	43.768.090	05 Meningkatnya keselarasan perencanaan pusat dan daerah	AAH Peraturan lainnya	70	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	540.135
	PLN	229.997.131		ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	20	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.508
	BLU	8.336.021		AEA Koordinasi	26	kegiatan	6.115.095
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	24	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	85.113

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	8 layanan	418.100
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	13 Kelompok Masyarakat	2.990.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	22.060
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	268 Unit	51.845.937
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	40.000
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	142 Unit	58.179.355
		CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	17 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	23.462.864
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	995 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8.869.123.590
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.011 Unit, m2, Paket	68.241.384
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	128.247 Orang, Layanan, Rekomendasi	53.151.156
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	394 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	22.602.331
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	53 Sistem Informasi	7.971.616
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	39 Layanan, Dokumen	728.980
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	40.000.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3 Lembaga, Unit Kerja, Tim	153.033.996
		QMA	Data dan Informasi Publik	9 dokumen, Peta, Data	463.916

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 024
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		CMB Komunikasi Publik	3 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	1.547.985
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	186.784.360
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	111 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	3.145.365
		UAD Perencanaan dan Penganggaran	50 Layanan, Dokumen	47.469.600
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	128 Laporan, Layanan	22.823.615
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	35 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	5.475.970

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	025	KEMENTERIAN AGAMA					88.897.728.380
2 Fungsi	09	AGAMA					13.276.526.896
	10	PENDIDIKAN					75.621.201.484
3 Program	1) DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama					2.737.097.455
	2) DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun					15.791.615.443
	3) DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					9.784.774.838
	4) DK	Program Pendidikan Tinggi					8.907.767.806
	5) WA	Program Dukungan Manajemen					51.676.472.538
Program	1) DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama					2.737.097.455
	RM	1.443.951.201	02 Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yang rukun	AEG	Konferensi dan Event	182 Kegiatan, Paket Kegiatan	34.489.654
	PNBP	471.010.881	04 Terwujudnya Transformasi Layanan Keagamaan yang Berkualitas, Merata dan Inklusif	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	177 NSPK	9.866.339
	SBSN	822.135.373		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	547.401 Orang, Akta, Bidang, Laporan	4.481.577
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22 Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.968.511
				BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	3.080.209
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	19.466 Orang, Layanan, Rekomendasi	65.469.622
				PBN	Kebijakan Bidang Sosial	18 Rekomendasi Kebijakan	26.132.028
				PEG	Konferensi dan Event	338 Kegiatan, Paket Kegiatan	132.834.540

SK No 160551 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	5.508.805 Orang, Akta, Keping, Bidang	280.528.110
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	34 Lembaga	7.100.229
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	42 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, Itik	488.885.383
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6.975 Lembaga	239.795.697
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	84.265 Orang	234.531.273
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	25.507 Kelompok Masyarakat	107.244.517
		QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	2.323.669 Keluarga, KK	114.606.701
		QEA	Bantuan Masyarakat	25.185.289 Orang	28.410.000
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	3.333 Unit, Titik, Paket, SR	1.379.642
		QEI	Bantuan Lembaga	6.764 Lembaga	311.147.070
		QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	271.474 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	60.522.715
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	6.209 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	46.000.000
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	271.790 Orang	55.303.649
		UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	9.715 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	477.290.000
Program **2) DF** **Program Wajib Belajar 13 Tahun**					**15.791.615.443**
RM 14.988.183.491	01 Meningkatnya Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	6 Orang, Akta, Bidang, Laporan	16.000.000
SBSN 803.431.952		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	100 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, Itik	64.250.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				QEG Bantuan Peralatan / Sarana	8.015	Unit, Titik, Paket, SR	3.747.940
				QEI Bantuan Lembaga	15.242	Lembaga	449.254.237
				QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	324	Orang	221.300
				QEN Bantuan Peserta Didik	14.173.957	Orang	13.819.748.393
				RAA Sarana Bidang Pendidikan	33.652	Paket, Unit, m2	526.825.850
				RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	356	unit	842.469.442
				SBB Pendidikan Menengah	11.390	Orang	69.088.281
Program	**3) DI**	**Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**					**9.784.774.838**
		RM 9.784.774.838	01 Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	25	Lembaga	3.383.509
			02 Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa	DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	120	Orang	646.000
			03 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan	PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	99	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	34.262.327
			04 Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi SNP	PDE Akreditasi Lembaga	15	Lembaga, Unit Kerja	254.000
			05 Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan	PDG Standarisasi Profesi dan SDM	61.101	Orang	83.000.000
			06 Menguatnya pendidikan karakter siswa	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	19.745	Orang	16.025.368
			07 Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan dunia kerja/industri	PEF Sosialisasi dan Diseminasi	35.014	orang	33.695.549
			08 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pendidikan yang moderat/maslahat dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional dan moderat	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	224	NSPK	8.269.347
			09 Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran	QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.550	Orang, Akta, Keping, Bidang	3.419.762

SK No 160549 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
			10 Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata	QCB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15.610	Lembaga, Unit Kerja, Tim	31.228.859
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.929	Orang, Unit Kerja, Tim	46.158.059
				QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	17	Kelompok Masyarakat	3.276.136
				QEA Bantuan Masyarakat	550.986	Orang	9.134.680.607
				QEH Bantuan Kelompok Masyarakat	145	Kelompok Masyarakat	1.970.000
				QEI Bantuan Lembaga	2.063	Lembaga	49.569.250
				QEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	5.777	Orang	119.659.508
				QGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	36	Lembaga	1.600.002
				QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	35	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.400.000
				SBA Pendidikan Tinggi	709	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	4.500.000
				SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	1.035.712	Orang, Kegiatan	205.726.535
Program	**4) DK**	**Program Pendidikan Tinggi**					**8.907.767.506**
	RM	3.442.084.811	01 Meningkatnya kualitas karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan	ACD Perizinan Lembaga	10	Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	3.734.000
	PNBP	731.821.806	02 Meningkatnya Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Berkualitas	ADE Akreditasi Lembaga	31	Lembaga, Unit Kerja	1.234.682
	SBSN	753.460.932	03 Meningkatnya Kualitas Standar dan Sistem Penjaminan Mutu	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	75	Orang	1.901.443
	BLU	3.980.800.257	04 Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan	AEC Kerja sama	29	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	3.046.465

SK No 160548 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	05 Meningkatnya Relevansi Pendidikan Tinggi Keagamaan Melalui Penguatan Kemitraan Strategis	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	147.998 Orang, Akta, Bidang, Laporan	6.000.000
	06 Meningkatnya Daya Saing Lulusan PTK/Ma'had Aly	BEA	Bantuan Masyarakat	10.249 Orang	409.687.895
	07 Meningkatnya partisipasi peserta didik pada PTK/Ma'had Aly	BEG	Bantuan Peralatan / Sarana	9 Unit, Titik, Paket, SR	1.235.000
		BEI	Bantuan Lembaga	814 Lembaga	647.782.240
		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	3.623 Orang	58.083.637
		BEN	Bantuan Peserta Didik	6.296 Orang	22.119.799
		BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	67 Lembaga	3.864.782.244
		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	4.108 Paket, Unit	272.920.167
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	691 Unit	58.019.119
		CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	147 unit	702.401.110
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	878.302
		DBA	Pendidikan Tinggi	8.681 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	20.604.755
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	2.765 Orang, Kegiatan	10.277.434
		DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	90 model, Desain	4.500.000
		DDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	175 kekayaan intelektual	7.226.560
		PDD	Standarisasi Lembaga	37 Lembaga	6.400.000
		PDE	Akreditasi Lembaga	509 Lembaga, Unit Kerja	22.658.025

SK No 160547 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				PDG Standarisasi Profesi dan SDM	80	Orang	3.712.500
				PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	2.500	Orang, Sertifikat	7.788.465
				PEC Kerja sama	4	Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	1.000.000
				PEF Sosialisasi dan Diseminasi	2.254	orang	5.707.450
				QEA Bantuan Masyarakat	7	Orang	370.000
				QEI Bantuan Lembaga	128	Lembaga	374.380.057
				QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	325	Orang	2.022.000
				QEN Bantuan Peserta Didik	148.184	Orang	1.611.840.228
				RBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	78	unit	753.460.502
				SBA Pendidikan Tinggi	1.250	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	4.054.615
				SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	2.204	Orang, Kegiatan	17.946.646
Program	**5) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**51.678.472.838**
	RM	51.639.636.156	01 Meningkatnya akuntabilitas keuangan Kementerian Agama	AAH Peraturan lainnya	20	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	636.040
	PNBP	38.836.682	02 Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi Kementerian Agama	AEC Kerja sama	1	Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	1.464.865
			06 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi yang Efektif dan Akuntabel	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	466	Unit	175.828.788
			07 Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal atas Akuntabilitas Keuangan, Kinerja dan Integritas SDM aparatur Kementerian Agama	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.257	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	50.697.058.737
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8.425	Unit, m2, Paket	267.390.818

SK No 160546 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 025
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	560.281	Orang, Layanan, Rekomendasi	42.379.885
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.662	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	501.693.602

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN				3.860.857.021
2 Fungsi	04	EKONOMI				3.046.857.021
	10	PENDIDIKAN				814.000.000
3 Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				968.113.824
	2) DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan				1.604.006.677
	3) WA	Program Dukungan Manajemen				1.288.736.520
Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				968.113.824
	PLN	524.586.985	01 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	AEA Koordinasi	42 kegiatan	1.997.299
	PNBP	227.654.406	03 Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja	AEB Forum	10 forum	1.125.000
	RM	215.872.433		AEC Kerja sama	12 Kesepakatan	237.122
				BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	963 Lembaga, Unit Kerja, Tim	3.171.066
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	30 Orang	10.000.000
				BMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.850.114
				CAA Sarana Bidang Pendidikan	1 Paket, Unit	2.382.241
				CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1 unit	300.000
				PDE Akreditasi Lembaga	26 Lembaga	5.285.809
				PDF Sertifikasi Lembaga	50 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	1.233.600
				PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	61.101 Orang, Sertifikat	52.726.567

SK No 160544 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				REA Koordinasi	43 kegiatan		5.032.634
				PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	300 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar		7.409.912
				QEI Bantuan Lembaga	70 Lembaga		83.000.000
				RAJ Sarana Bidang Ketenagakerjaan	47 Unit		526.533.373
				SBA Pendidikan Tinggi	722 Orang		1.762.372
				SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	1.060 Orang, Kegiatan		11.122.916
				SCO Pelatihan Vokasi	78.279 Orang, Kegiatan		272.943.777
Program	**2) ON**	**Program Pembinaan Ketenagakerjaan**					**1.604.006.877**
		PNBP 506.880.119	01 Tersedianya Rekomendasi Kebijakan dan Rencana Tenaga Kerja Nasional Berbasis Data dan Informasi Ketenagakerjaan	ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	7 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		1.832.379
		RM 1.023.486.816	11 Meningkatnya Penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar hubungan kerja	ADA Koordinasi	2 kegiatan		467.783
		PLN 73.640.742	12 Meningkatnya Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	AEE Kemitraan	5 Kesepakatan		99.710
			13 Meningkatnya perusahaan yang menerapkan dan memenuhi norma ketenagakerjaan	AEG Konferensi dan Event	3 Kegiatan, Paket Kegiatan		9.248.522
			15 Meningkatnya pemenuhan hak pekerja/buruh	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	12 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar		1.468.660
			17 Meningkatnya kepesertaan Program Jaminan Sosial tenaga kerja dan penyediaan Fasilitas Kesehatan Pekerja	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	757.620 Orang, Aksi, Keping, Bidang		21.366.878
				BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	1.113 Lembaga		12.085.745
				BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	24.000 Badan usaha		4.628.854
				BCC Penanganan Perkara	140 Perkara, Berkas Perkara		4.508.787

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja, Tim	4.723.829
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.239.175 Orang	105.944.672
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	25 Kelompok Masyarakat, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.000.000
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	180 Badan usaha	19.388.287
		BEA	Bantuan Masyarakat	104.603.982 Orang	1.164.643.913
		BEI	Bantuan Lembaga	200 Lembaga	20.000.000
		BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	21 Lembaga	13.073.320
		BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	247 Pemerintah Daerah	1.284.100
		BMA	Data dan Informasi Publik	42 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	5.987.520
		DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	1.220 Orang, Kegiatan	7.095.812
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	52.390.812
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.970 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	13.170.275
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	34 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	5.206.314
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	33 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	279.190
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	7 Rekomendasi Kebijakan	6.650.884
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	585 orang	2.574.000

SK No 160542 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	2.367	Badan usaha, Penyalur, Hektar	5.716.205
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	351	Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.404.000
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	34.252	Orang	20.972.619
				QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	2.641	Badan usaha, Miliar USD	9.335.565
				QEA Bantuan Masyarakat	11.000	Orang	65.000.000
				QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	330.294	Badan Usaha, Laporan	19.268.069
				QMA Data dan Informasi Publik	9	dokumen, Peta, Data	11.110.069
				UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	990	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	10.156.854
Program	**3) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**1.288.736.520**
	PNBP	43.068.958	01 Meningkatnya pengawasan intern Inspektorat Jenderal dalam mendukung tata Kelola pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel di Kementerian Ketenagakerjaan	AAC Peraturan Pemerintah	2	PP, RPP	266.570
	RN	1.165.437.162	02 Terwujudnya penatakelolaan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang baik, berintegritas, bersih, dan bebas KKN	AAD Peraturan Presiden	2	PerPres, R.Perpres	260.820
	PLN	79.430.490	03 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	AAG Peraturan Menteri	20	PerMen, Perka	1.193.660
			04 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	AAH Peraturan lainnya	35	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	378.940
			05 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	AEA Koordinasi	1	kegiatan	65.480.490



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	06 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	AEC	Kerja sama	14 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	3.184.484
	07 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Internal Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	BCE	Penanganan Perkara	25 Perkara	1.271.360
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	112 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.156.838.861
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	166 Unit, m2, Paket	7.879.466
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.238 Orang, Layanan, Rekomendasi	26.344.011
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	213 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	25.667.919

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**027**	**KEMENTERIAN SOSIAL**					**84.440.056.166**
2 Fungsi	**10**	**PENDIDIKAN**					**4.961.000.000**
	11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**					**79.479.056.166**
3 Program	**1) DQ**	**Program Perlindungan Sosial**					**77.861.262.087**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**6.578.794.079**
Program	**1) DQ**	**Program Perlindungan Sosial**					**77.861.262.087**
	RM	77.857.417.551	01 Terjaminnya Prasyarat Hidup Layak Masyarakat Miskin dan Rentan	ABN Kebijakan Bidang Sosial	4	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.300.000
	PNBP	3.844.539	02 Meningkatnya Fungsi Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	ACD Perizinan Lembaga	1.050	Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Kelestarian	4.658.139
			03 Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	210	Orang	2.585.000
			04 Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesejahteraan Sosial	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.235	Orang, Akta, Keping, Bidang	4.270.000
			05 Meningkatnya Kualitas Layanan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	BAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	1.021.760
			06 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Sosial	BOB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.100	Lembaga, Unit Kerja, Tim	600.000
			07 Meningkatnya Hubungan Partnership dan Kolaborasi yang Berkualitas	BOC Fasilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	87.264	Orang	94.467.552
				BOH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	150	Badan usaha	600.000
				BEA Bantuan Masyarakat	403	Orang	6.334.052
				BEH Bantuan Kelompok Masyarakat	60	Kelompok Masyarakat	3.000.000

SK No 160585 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CDN	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	139 unit	2.326.460
		DBA	Pendidikan Tinggi	1.630 Orang, Kegatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	9.530.049
		DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	2.550 Orang, Kegatan	4.295.000
		DDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	69 produk, Ekor, Bibit/Benih	5.285.961
		PBN	Kebijakan Bidang Sosial	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.545.000
		PDE	Akreditasi Lembaga	1.035 Lembaga, Unit Kerja	3.000.000
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	7.300 Orang, Sertifikat	8.000.000
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	8.250.000
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	526.605 Orang, Akta, Keping, Bidang	775.912.943
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, ttsk	93.862.556
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	550 Lembaga, Unit Kerja, Tim	22.000.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	88.581 Orang	563.609.919
		QEB	Bantuan Keluarga	35.267.800 Keluarga, KK	72.633.966.765
		QEE	Bantuan Kebencanaan	72.000 Paket	73.444.720
		QEG	Bantuan Peralatan / Sarana	22.131 Unit, Titik, Paket, SR	28.393.176
		QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	60 Kelompok Masyarakat	10.500.000
		RAA	Sarana Bidang Pendidikan	55.378 Paket, Unit	1.322.387.710

SK No 160584 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 027
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN SOSIAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	401 Unit	114.063.861
		RBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	280 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	104.787.966
		SBB Pendidikan Menengah	14.575 Orang	725.711.697
		SBC Pendidikan Dasar	24.050 Orang	1.144.641.473
		SCJ Pelatihan Bidang Sosial	14.625 Orang, Kegiatan	29.833.397
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	17.932.949
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	514 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	28.900.000
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	1.220 Desa, DesaKelurahan	12.164.040
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**6.578.794.079**
RM 6.576.297.999	01 Penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien Berorientasi Layanan	ADE Akreditasi Lembaga	2 Lembaga, Unit Kerja	117.366
PNBP 2.496.081		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	178 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.521.158.503
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	391 Unit, m2, Paket	6.333.636
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.910 Orang, Layanan, Rekomendasi	8.703.453
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	185 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	42.482.872

SK No 160583 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				13.000.000.000
2 Fungsi	04	EKONOMI				12.782.638.193
	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP				44.540.000
	10	PENDIDIKAN				172.821.807
3 Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				286.666.436
	2) EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				384.600.000
	3) FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				44.540.000
	4) HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				8.673.131.355
	5) WA	Program Dukungan Manajemen				3.631.060.209
Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				286.666.436
	RN	177.868.000	01 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	AAH Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	200.000
	BBSN	50.754.032		ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	5 Rekomendasi Kebijakan	650.000
	BLU	38.046.404		ADF Sertifikasi Lembaga	8 Lembaga, Badan Usaha	550.000
				AEA Koordinasi	4 kegiatan	400.000
				AEE Kemitraan	4 Kesepakatan	200.000
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	11 NSPK	960.000
				DOC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	50 Orang, Kegiatan	50.000

SK No 160582 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	200.000
		PDE	Akreditasi Lembaga	19 Lembaga	235.000
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	7.052 Orang	11.035.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja, Tim	150.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	40.101 Kelompok Masyarakat	21.068.260
		QGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	16 Lembaga	3.000.000
		QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1 laporan	100.000
		RAA	Sarana Bidang Pendidikan	3 Paket, Unit	28.446.275
		RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	6 Unit	26.129.145
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, Unit, m2, Penelitian, Program Studi	50.000
		RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	1 unit	50.000
		RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	2 unit	5.140.032
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	3 Unit	4.601.121
		SAC	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan	5.637 Orang	134.765.500
		SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	23.465 Orang	33.373.103
		SDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	23 model, Desain	1.125.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
Program	**2	EC**	**Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**				**384.600.000**
	RM	332.831.351	01 Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	15 Rekomendasi Kebijakan		1.950.000
	PNBP	14.568.649	02 Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing	ADA Standarisasi Produk	469 produk		3.060.000
	SBSN	37.200.000		AEE Kemitraan	10 Kesepakatan		250.000
				AEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.500 orang		450.000
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4 NSPK		500.000
				BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	45 Badan usaha		600.000
				BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.500 Lembaga		7.000.000
				BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	400 UMKM		600.000
				BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	35 Produk		350.000
				BMA Data dan Informasi Publik	10 dokumen, Peta, Data		1.900.000
				DCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	47 Orang		300.000
				DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	12 produk		600.000
				PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	118 Rekomendasi Kebijakan		7.050.000
				PDC Sertifikasi Produk	10.413 produk		9.500.000
				PDD Standarisasi Lembaga	108 Lembaga		2.100.000
				PDF Sertifikasi Lembaga	3.007 Lembaga, Badan Usaha		9.250.000
				PEE Kemitraan	30 Kesepakatan		750.000
				PEH Promosi	205 promosi		40.550.000

SK No 160579 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				GDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	120 Lembaga	2.310.600
				GDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.000 Orang	15.000.000
				GDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	7.895 UMKM	22.100.000
				GDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	60 Badan usaha, Miliar USD	900.000
				GDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	860 Industri	2.300.000
				GIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	87 Produk	1.300.000
				GIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.308 Lembaga	750.000
				QMA	Data dan Informasi Publik	22 dokumen, Peta, Data	3.300.000
				RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	5.894 Unit	212.989.400
				RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	15 Unit	39.700.000
Program	**3j FD**	**Program Kualitas Lingkungan Hidup**					**44.540.000**
	RM	14.540.000	01 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil	PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	18 Rekomendasi Kebijakan	3.060.000
	PLN	30.000.000	02 Meningkatnya Pengelolaan Biota Perairan dan/Atau Appendix CITES yang dikelola (kumulatif)	PCA	Perairan Produk	28 Produk	3.075.000
			03 Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	PEE	Kemitraan	4 Kesepakatan	465.000
			04 Meningkatnya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih kembali	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6 NSPK	500.000
				GDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	250.000
				RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	13 Unit	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	39.464.881	Hektar	32.975.000
				REB Konservasi Jenis/Spesies	22	Spesies, Lokasi	2.625.000
				SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	250	Orang	1.100.000
Program	**4) HB**	**Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan**					**8.673.131.355**
	RM	8.245.865.929	03 Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	33	Rekomendasi Kebijakan	5.439.648
	PNBP	40.126.237	04 Meningkatnya kesadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan	ACA Perizinan Produk	3.259	Produk	4.600.000
	PLN	220.000.000	05 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	AOC Sertifikasi Produk	1	produk	461.426
	HLN	38.000.000	06 Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	AEA Koordinasi	1	kegiatan	509.500
	BLU	139.007.189	10 Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan	AEB Forum	5	forum	1.267.589
			11 Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	970.000
			12 Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	BCB Perkara Hukum Lembaga	2	Perkara	200.000
			15 Terselenggaranya Fasilitasi prasarana dan sarana untuk mendukung produksi perikanan budi daya	BCE Penanganan Perkara	146	Perkara	10.239.100
			17 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.552	Orang	1.600.000
			18 Meningkatnya Investasi pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan	BGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	180	Lembaga	29.500.966
			19 Meningkatnya Nilai Tukar Petambak Garam	BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	1.212	Operasi	18.871.944
			20 Meningkatnya Produktivitas Lahan Garam	BII Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	16	Hektar, Layanan	694.500

SK No 160577 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	31 Meningkatnya Kualitas Produksi Garam	BJC Penyidikan dan Pengujian Penyakit	13.007	Sampel	5.610.960
	32 Produktivitas perikanan tangkap meningkat	BKB Pemantauan produk	50	Produk	500.000
	33 Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pelambik garam	BMB Komunikasi Publik	1	layanan	480.665
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	63	Laporan, Layanan	5.795.030
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	21	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	500.000
		PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	33	Rekomendasi Kebijakan	3.750.000
		PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2.299	Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	43.200.000
		PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	62	Rekomendasi Kebijakan	32.430.000
		PCA Perizinan Produk	8.110	Produk	2.200.000
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.092	Orang	1.960.000
		PEE Kemitraan	2	Kesepakatan	1.500.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	18	NSPK	5.798.242
		QAB Pelayanan Publik kepada lembaga	1.000	Lembaga	2.000.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	14.500	Orang	8.300.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	500	Kelompok Masyarakat	30.000.000
		QEA Bantuan Masyarakat	275.375	Orang	62.725.000
		QED Bantuan Tanaman	62.231	Unit	4.500.000
		QEG Bantuan Peralatan / Sarana	201	Unit, Titik, Paket, SR	15.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	264 Kelompok Masyarakat	5.005.750.000
		QEL	Bantuan Hewan	165.327.339 Ekor	63.400.000
		QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	53.002 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	857.100.000
		QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	213 Lembaga	21.950.000
		QHO	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	1.462 Operasi	550.194.762
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.031 Lembaga	16.857.619
		QJC	Penyidikan dan Pengujian Penyakit	3.206 Sampel	4.922.653
		QKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	10.120 laporan	2.400.000
		QKB	Pemantauan produk	8 Produk	1.000.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	100.012 dokumen, Peta, Data	6.750.000
		RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	93.438.144 Unit	194.313.345
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	6.600.000
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	1.500 bidang, hektar	563.000.000
		RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	85 Unit	842.600.000
		RCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	121 Unit	100.000.000
		RDB	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	3.926.331
		SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	840 Orang	8.333.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	64	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	3.586.876
Program	**6) WA Program Dukungan Manajemen**						**3.631.060.209**
	RM	3.570.351.588	01 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	AAH Peraturan lainnya	36	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	1.253.564
	BLU	40.459.085	02 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal	ABW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	20	Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
	PNBP	20.249.536	03 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP	AEA Koordinasi	78	kegiatan	57.556.407
			04 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PDSPKP	AEC Kerja sama	25	Kesepakatan	8.314.344
			05 Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP	BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.464	UMKM	8.678.966
			06 Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dilingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan	BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1	Layanan	1.181.134
			07 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya	BMA Data dan Informasi Publik	46	dokumen, Peta, Data	17.094.889
			08 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	BMB Komunikasi Publik	3	layanan	15.121.287
			09 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	257	Unit	8.542.720
			10 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan tangkap	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	599	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.272.444.690
			11 PNBP BLU Sektor KP Meningkat	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	427	Unit, m2, Paket	78.505.390

SK No 160574 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 032

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	12 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Dijaga Perairan Ruang Laut	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	26.359 Orang, Layanan, Rekomendasi	27.773.387
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	809 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	68.445.474
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi	25.155.700
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4.664 Orang	12.470.200
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4 Laporan, Layanan	1.512.376
		PEC	Kerja sama	2 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	15.000.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	160 dokumen, Peta Data	4.600.000
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	5.608.731
		RCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Unit	4.600.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN				485.214.445
2 Fungsi	04	EKONOMI				485.214.445
3 Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				217.442.208
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				267.772.237
Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan				217.442.208
	RM	217.442.208	02 Terwujudnya Akses Indonesia ke OECD	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	107 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	124.672.208
			03 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang Berkualitas	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000
			05 Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan yang Berkualitas	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000
			06 Terwujudnya Tenaga Kerja yang Produktif dan Berdaya Saing	ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.000.000
			07 Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	29 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	11.425.000
			09 Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Lintas Sektoral yang Efektif	BAH Pelayanan Publik Lainnya	9 layanan	4.645.000
			11 Terwujudnya Kemudahan Investasi yang mendukung target pertumbuhan ekonomi	CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	15.000
			12 Terwujudnya Penguatan Nilai Transaksi dan Daya Saing Perdagangan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	21.500.000
			13 Terwujudnya Ekosistem Logistik Nasional yang terintegrasi	PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	18 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	19.785.000

SK No 160571 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	14 Terwujudnya Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.500.000
	15 Terwujudnya Daya Saing Kawasan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	8 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	12.500.000
	16 Terwujudnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pariwisata	PBP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.000.000
	17 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Pengembangan Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Efektif	OAH Pelayanan Publik Lainnya	4 layanan, bidang, dokumen, Mitra Rp, titik	3.000.000
	19 Terwujudnya Kerja Sama Ekonomi yang Efektif dalam Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi			
	20 Terwujudnya Kebijakan Penguatan dan/atau Perluasan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi yang berkualitas			
	21 Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang berkualitas			
	22 Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah			
	23 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang berkualitas			
	41 Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan			
	42 Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan			
	43 Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global			
	44 Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas			
	45 Terwujudnya Dukungan Pengambilan Kebijakan Perekonomian yang berkualitas			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 035
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	46 Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas			
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**267.772.237**
RM 267.772.237	01 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Berdaya Saing	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	14 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	9.000.000
	02 Terwujudnya Layanan Prima yang Berkualitas	BMB Komunikasi Publik	2 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	9.585.000
	03 Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai	CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Unit	7.028.625
	04 Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	18 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	218.691.987
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	38 Unit, m2, Paket	10.500.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	750 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.792.500
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	25 Dokumen, Layanan, Laporan Rekomendasi	7.206.125

SK No 160569 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 036

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN					236.708.932
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					236.708.932
3 Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					50.145.620
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					186.563.312
Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					50.145.620
	RM	50.145.620	01 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial	ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	18 Rekomendasi Kebijakan	3.800.000
			02 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	54 Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
			03 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	59 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	17.468.120
			04 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	ABS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	27 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	5.400.000
			05 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Pendidikan	AEA	Koordinasi	40 kegiatan	9.863.750
			06 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Peningkatan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
				PEA	Koordinasi	8 kegiatan	2.613.750

SK No 160568 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 036

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**186.563.312**
RM 186.563.312	01 Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara lebih administrasi	ABH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	4 Rekomendasi Kebijakan	922.500
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	3 Rekomendasi Kebijakan	922.500
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	169.210.862
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	45 Unit, m2, Paket	15.500.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.128.187
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.879.243

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 041

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**041**	**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**				**280.311.060**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**				**280.311.060**
3 Program	**1) EI**	**Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN**				**82.485.324**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**197.825.736**
Program	**1) EI**	**Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN**				**82.485.324**
	RM	82.485.324	01 Meningkatnya Profitabilitas BUMN	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	13 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.371.616
			02 Meningkatnya Kapasitas BUMN	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5 Rekomendasi Kebijakan	3.600.000
			03 Meningkatnya Peran BUMN terhadap Program Pemerintah	BBD Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha	40 Badan usaha	3.250.000
			04 Meningkatnya Kontribusi BUMN pada Kemanfaatan Sosial dan Lingkungan	BDA Fasilitasi dan Pembinaan BUMN	51 BUMN	8.880.000
			05 Terwujudnya SDM BUMN yang Profesional dan Berintegritas	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	6 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	41.682.416
			06 Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko di BUMN	PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	13 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.701.292
			07 Terciptanya Penguatan Aspek Legal dan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN yang Efektif			
			08 Penguatan Kualitas Teknologi Strategis di BUMN			
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**197.825.736**
	RM	197.825.736	01 Terwujudnya Kelembagaan Kementerian BUMN yang Kuat	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	175.965.281

SK No 160566 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 041

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	02 Terciptanya SDM Kementerian BUMN yang profesional dan berintegritas	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6 Unit, m2, Paket	1.650.000
	03 Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kementerian BUMN	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	532 Orang, Layanan, Rekomendasi	11.429.793
	04 Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian BUMN yang Berkualitas	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	23 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.681.310
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan, Dokumen	899.442

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 047

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				214.112.817
2 Fungsi	11	PERLINDUNGAN SOSIAL				214.112.817
3 Program	1) DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak				69.070.000
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				145.042.817
Program	1) DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak				69.070.000
	RM	69.070.000	01 Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	PAD Peraturan Presiden	3 PerPres, R.Perpres	500.000
			04 Meningkatnya pemenuhan hak anak	PAG Peraturan Menteri	4 PerMen, Perka, RPermen	500.000
			07 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO	PAH Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	300.000
			08 Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	PBN Kebijakan Bidang Sosial	29 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.800.000
				PDD Standarisasi Lembaga	143 Lembaga, Unit Kerja	1.650.000
				PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	300 Orang, Sertifikat	150.000
				PEA Koordinasi	83 kegiatan	1.950.000
				QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.815 Orang, Akta, Keping, Bidang, ttik	17.350.000
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.000.000
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	270 Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.000.000
				QEA Bantuan Masyarakat	800 Orang	900.000

SK No 160564 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 047
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		QIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	100 Orang, Laporan	200.000
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	36 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	250.000
		QIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	50 Pemerintah Daerah	200.000
		QMA Data dan Informasi Publik	4 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	450.000
		QMB Komunikasi Publik	45 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	8.219.999
		SCJ Pelatihan Bidang Sosial	3.962 Orang, Kegiatan	8.300.000
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3 Laporan, Rekomendasi	350.000
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	270 Daerah (Prov/KabKota), Provinsi, Kab/Kota	19.000.001
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**145.042.817**
RM 145.042.817	01 Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	25 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	145.042.817

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 048

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI					392.980.127
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					392.980.127
3 Program	1) CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					139.520.000
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					253.460.127
Program	1) CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					139.520.000
	RM	139.520.000	01 Terwujudnya kelembagaan instansi pemerintah yang agile dan kolaboratif	AAO	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	440.000
			02 Meningkatnya implementasi Kebijakan Manajemen Pegawai ASN berlandaskan Sistem Merit yang berkualitas	AAG	Peraturan Menteri	4 PerMen, Perka	799.970
			03 Meningkatnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	11 Rekomendasi Kebijakan	5.614.004
			04 Meningkatnya kualitas integritas instansi pemerintah	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	2 Rekomendasi Kebijakan	400.000
			05 Terwujudnya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	AEA	Koordinasi	16 kegiatan	1.191.885
			06 Terwujudnya penerapan pemerintah digital	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	3.919.300
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	75.004 Laporan, Layanan	3.876.236
				FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	3.700 Lembaga	29.118.252
				PAC	Peraturan Pemerintah	1 PP, RPP	364.000
				PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	10 Rekomendasi Kebijakan	5.644.640
				PEA	Koordinasi	46 kegiatan	25.076.397
				UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	45.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 048
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		UAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1.973 Lembaga	18.073.336
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen					**253.460.127**
RM 253.460.127	01 Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	12 Rekomendasi Kebijakan	765.670
	02 Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional	AEC	Kerja sama	7 Kesepakatan	1.945.820
	03 Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi dan akuntabel	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	146 Unit	4.751.463
	04 Terwujudnya pelayanan publik Kementerian PANRB yang berkualitas	CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	204 Unit	2.795.528
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	17 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	224.651.269
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 Unit, m2, Paket	1.781.997
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.383 Orang, Layanan, Rekomendasi	8.398.936
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	49 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	8.360.963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 050

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	050	BADAN INTELIJEN NEGARA					16.670.000.000
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					16.670.000.000
3 Program	1) BK	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara					12.994.864.190
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					3.675.135.810
Program	1) BK	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara					12.994.864.190
	RM	10.301.000.354	01 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen luar negeri	BHB Operasi Bidang Keamanan	95.030 operasi, Hari Operasi		5.995.324.195
	PLN	2.693.863.836	02 Menurunnya status ancaman aspek Ipoleksosbudhankam yang dipengaruhi dari luar negeri	CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	99 Unit, Paket		6.322.762.059
			03 Menurunnya status ancaman aspek Ipoleksosbudhankam	CCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	512 Unit, Paket		626.177.936
			04 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen dalam negeri	OHB Operasi Bidang Keamanan	1.692 operasi, Hari Operasi		50.600.000
			05 Menurunnya status ancaman aspek Sosbudhankam				
			06 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi kontra intelijen				
			07 Menurunnya status ancaman aspek ekonomi				
			08 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen ekonomi				
			09 Menurunnya status ancaman variabel ancaman teknologi				
			10 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen teknologi				

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 050
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	11 Menurunnya status ancaman variabel ancaman siber			
	12 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen siber			
	13 Terwujudnya stabilitas pemberitaan media komunikasi dan informasi			
	14 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen bidang komunikasi dan informasi			
	15 Terwujudnya deteksi dini dan peringatan dini secara cepat dan tepat			
	16 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan produksi intelijen			
	17 Meningkatnya efektivitas koordinasi dan kerja sama antar penyelenggara intelijen negara			
	18 Menurunnya status ancaman variabel ancaman pengamanan aparatur			
	19 Mewujudkan PROBIN dalam pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen pengamanan aparatur			
	20 Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja, anggaran dan BMN			
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**3.675.135.810**
RM 3.675.135.810	01 Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BIN	CAB Sarana Bidang Kesehatan	12 Paket, Unit	16.259.756
	02 Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja, anggaran dan BMN	DBA Pendidikan Tinggi	400 Orang	152.176.483
	03 Meningkatnya profesionalisme SDM	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	26 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.182.318.771
		EBS Layanan Sarana dan Prasarana Internal	431 Unit, m2, Paket	1.300.000.000

SK No 160605 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 050
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja (Internal)	12 Dokumen Layanan Laporan Rekomendasi	24.380.800

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	051 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA				3.496.547.080
2 Fungsi	03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN				3.496.547.080
3 Program	1) BO Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara				3.060.691.118
	2) WA Program Dukungan Manajemen				434.855.962
Program	1) BO Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara				3.060.691.118
	RM 716.703.914	01 Meningkatnya kematangan PSE dan Penyelenggara Persandian dalam menyelenggarakan keamanan siber dan sandi	AAG Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka, RPermen	117.669
	PLN 2.343.887.204	02 Meningkatnya manfaat kerja sama keamanan siber dan sandi dalam pengelolaan strategi dan kebijakan keamanan siber dan sandi	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	32 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.384.295
		03 Meningkatnya manfaat kebijakan keamanan siber dan sandi dalam penanganan gangguan keamanan siber dan sandi	ADA Standarisasi Produk	2 produk, Ekor, Peraturan, Rekomendasi, Standar	110.696
		04 Meningkatnya manfaat kerja sama keamanan siber dan sandi dalam operasi keamanan siber dan sandi	ADC Sertifikasi Produk	1 produk, Sertifikat	113.615
		05 Meningkatnya manfaat kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	ADE Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	142.806
		06 Meningkatnya manfaat kerja sama peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi sektor perekonomian	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	140 Orang	113.139
		07 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan siber	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	325 Orang, Sertifikat	944.708
		08 Meningkatnya kesadaran K/L/Pemda terhadap keamanan siber	AEA Koordinasi	16 kegiatan	1.167.708
		09 Meningkatnya kesadaran PSE sektor pembangunan manusia terhadap keamanan siber	AEB Forum	6 forum	451.684



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	10 Meningkatnya kesadaran PSE sektor perekonomian terhadap keamanan siber	AEC	Kerja sama	4 Kesepakatan	162.018
	11 Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional	AEG	Konferensi dan Event	2 Kegiatan, Paket Kegiatan	462.509
		AEH	Promosi	1 promosi, Kegiatan	68.908
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	900.000 Orang, Akta, Keping, Bidang	3.031.451
		BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1 Lembaga	409.998
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	167 Lembaga, Unit Kerja, Tim	9.208.396
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	88 operasi, Hari Operasi	7.178.149
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	2 Produk	81.660
		CAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	4 Unit, Paket	17.802.249
		CBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 unit	3.000.000
		CCF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	5 Unit, Paket	217.013.536
		DBA	Pendidikan Tinggi	422 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	24.757.049
		DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	984 Orang, Kegiatan	4.333.050
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	39 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.074.615
		PBE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.267.013
		PDC	Sertifikasi Produk	2 produk, Sertifikat	2.543.193
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	360 Orang, Sertifikat	244.805

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 051
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PEC Kerja sama	2	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	439.568
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	348	Lembaga, Unit Kerja, Tim	14.169.368
		QHB Operasi Bidang Keamanan	27	operasi, Hari Operasi	5.916.713
		RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	5	Unit, Paket	2.733.987.204
		SCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	300	Orang, Kegiatan	3.535.516
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	26	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	2.316.296
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**434.855.962**
RM 434.855.962	01 Meningkatnya Hasil Pelaksanaan RB General	AAG Peraturan Menteri	2	PerMen, Perka, RPermen	67.846
		ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2	Rekomendasi Kebijakan	759.911
		ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	4	Rekomendasi Kebijakan	756.726
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	37	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	423.651.391
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.129	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.696.362
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	46	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.827.038
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	5	Orang	77.670

SK No 160601 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 054
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	054	BADAN PUSAT STATISTIK					6.926.985.046
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					6.926.985.046
3 Program	1) GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik					3.133.423.345
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					3.793.561.701
Program	1) GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik					3.133.423.345
	RM	3.128.143.128	01 Peningkatan pemanfaatan Data dan Insight Statistik Sosial yang Berkualitas	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	86	Lembaga	4.602.616
	PNBP	5.280.217	02 Peningkatan pemanfaatan Data dan Insight Statistik Produksi yang Berkualitas	BMA Data dan Informasi Publik	28.412	dokumen; Peta; Data	2.882.838.722
			03 Peningkatan pemanfaatan Data dan Insight Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	536	Unit	159.282.432
			04 Peningkatan pemanfaatan Data dan Insight Statistik Untuk Sektor yang Berkualitas	GDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	559	Lembaga	8.737.293
			05 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Sosial yang berkualitas	GMA Data dan Informasi Publik	1.689	dokumen; Peta; Data	71.633.836
			06 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Produksi yang berkualitas	UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2.982	Desa; DesaKelurahan	9.235.449
			07 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Berkualitas				
			08 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Bidang Neraca dan Analisis Statistik yang Berkualitas				

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 054
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	09 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang berkualitas			
	10 Penguatan Literasi Pengguna Data Statistik			
	11 Terwujudnya pengembangan metodologi dan Pemanfaatan Teknologi dalam proses bisnis statistik			
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**3.793.561.701**
RM 3.786.817.505	01 Terwujudnya Kelembagaan yang Responsif, Adaptif, dan Kolaboratif melalui Transformasi Lembaga	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.183 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.642.721.709
PNBP 6.744.196	02 Terwujudnya "Belanja Berkualitas" melalui Penguatan Manajemen Risiko	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	49 Unit, m2, Paket	30.808.021
	03 Terwujudnya Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang berkarakter	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	18.447 Orang, Layanan, Rekomendasi	71.645.792
	04 Terwujudnya Tata Kepemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.466 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	46.227.419
		PEC Kerja sama	1 Kesepakatan	2.068.760

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS				2.597.000.000
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM				2.597.000.000
3 Program	1) CK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional				1.069.286.597
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				1.527.713.403
Program	1) CK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional				1.069.286.597
	RN	881.581.622	01 Terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas, terukur, lengkap untuk menjadi acuan sesuai bidangnya	AAA Undang-Undang	1 UU, RUU	320.000
	HLN	181.279.536	02 Terlaksananya dukungan pemenuhan anggaran dalam rangka pembangunan nasional	AAC Peraturan Pemerintah	1 PP, RPP	266.939
	PLN	26.425.439	03 Terwujudnya efektivitas pengendalian perencanaan sesuai bidangnya	AAG Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka	200.906
			04 Terlaksananya penerapan kemampuan daya tanggap dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai bidangnya	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	11 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	12.147.014
				ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	6.368.446
				ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.962.183
				ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	19 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	45.916.664
				ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.574.501

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.182.000
		ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	5.456.591
		ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.787.490
		ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.172.200
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	8 Rekomendasi Kebijakan	8.095.152
		ABN	Kebijakan Bidang Sosial	17 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	18.665.000
		ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	3 Rekomendasi Kebijakan	2.232.256
		ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	22 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.075.854
		ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.480.291
		ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.010.000
		ABS	Kebijakan Bidang Kebhanan bencana dan perubahan iklim	3 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	41.460.674
		ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.000.000
		AEA	Koordinasi	52 kegatan	532.571.725
		BDB	Fasilitasi dan Pemionaan Lembaga	98 Lembaga, Unit Kerja, Tim	464.140
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	1.500.000

SK No 160597 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	754 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	36.263.108
		FAD	Perencanaan dan Penganggaran	72 Layanan Dokumen	75.490.795
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	98 Laporan, Rekomendasi	74.722.625
		PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	250.000
		PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	1.797.877
		PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	800.000
		PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.830.000
		PBI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	5.039.304
		PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	2 Rekomendasi Kebijakan	2.350.000
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	29.110.498
		PBP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.528.679
		PBS	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Rekomendasi	3.012.510
		PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.350.000
		PBW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	2 Rekomendasi Kebijakan	3.200.000
		PEA	Koordinasi	6 kegiatan	36.549.002
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	11.043.772
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	249 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	75.000.000

SK No 160596 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**1.527.713.403**
RM 1.527.713.403	01 Terwujudnya Kinerja dan Pelayanan Prima yang Bersih, Akuntabel, Professional dan Kompeten atas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PPN/Bappenas	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	92 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	1.421.809.971
	02 Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mencapai sasaran kinerja yang berdampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Unit, m2, Paket	46.569.694
	03 Terwujudnya pengelolaan sistem informasi perencanaan dan pembangunan nasional	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	16.684 Orang, Layanan, Rekomendasi	36.000.000
	04 Terwujudnya pengawasan intern untuk manajemen risiko pada lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas lingkup Inspektorat Utama	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	115 Dokumen, Layanan, Laporan Rekomendasi	24.300.738

SK No 160595 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**056**	**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN**					**9.499.346.965**
2 Fungsi	**05**	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					**9.499.346.965**
3 Program	**1) CS**	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**					**2.122.885.068**
	2) IC	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**					**281.817.955**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**7.094.843.942**
Program	**1) CS**	**Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan**					**2.122.885.068**
	PNBP	1.286.839.030	01 Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pengurangan Tuna Lahan dan Meningkatnya Produktifitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	533 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen		4.867.151
	PLN	836.046.038	02 Terwujudnya Aset Reform dalam Reforma Agraria	ADF Sertifikasi Lembaga	20 Lembaga, Badan Usaha		6.500
			03 Terwujudnya Akses Reform dalam Reforma Agraria	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	11.583 Orang		4.153.528
			04 Peningkatan Pendaftaran Tanah untuk Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang	AEA Koordinasi	1 kegiatan		519.328
			06 Percepatan Penyelesian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	AEC Kerja sama	9 Kesepakatan		3.606.311
			07 Optimalisasi Pemanfaatan Nilai Tanah	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	37 NSPK		8.542.872
			08 Tersedianya Infrastruktur Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	12.286 Orang, Akta, Bidang, Laporan		368.580
				BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	20.380 Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang		19.760.299
				BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	251.635 Badan usaha		4.192.360

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	11.338.491 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	380.679.815
		BCE	Penanganan Perkara	86 Perkara	2.171.415
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	8 Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.116.251
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	571.002 Produk	22.566.141
		BKC	Pemantauan lembaga	490 laporan	12.371.539
		BNA	Data dan Informasi Publik	156 dokumen, Peta, Data	38.046.518
		CBC	Prasarana Pengembangan Kawasan	337.185 bidang, hektar	19.676.305
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	497.675
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.219 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	57.068.138
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	98 Laporan, Layanan	9.647.510
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	9 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	500.000
		PEA	Koordinasi	135 kegiatan	47.638.067
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.982.612 Orang, Akta, Bidang, Laporan	449.262.469
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	3.978.691 Lembaga	951.066.091
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3.340 layanan	12.090.081
		QCE	Penanganan Perkara	2.152 Perkara	79.336.690
		QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	54.600 Keluarga	33.525.400
		QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	40.000 Produk	7.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				QMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	42.851
				RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	5.228.030 km2, bidang, km, hektar	54.003.957
Program	**2) IC**	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**					**281.617.955**
	PNBP	146.341.760	01 Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	168 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	32.212.700
	PLN	135.276.195	02 Terwujudnya implementasi pemanfaatan ruang yang terkendali dan tertib	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6 NSPK	4.137.309
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	79.901 layanan	34.541.336
				BCE	Penanganan Perkara	6 Perkara	650.000
				BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	76 Pemerintah Daerah	2.140.000
				EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.323.336
				FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	50 Orang	600.000
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	102 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	10.742.336
				PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	276 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	183.461.341
				QCE	Penanganan Perkara	66 Perkara	13.550.000
				QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.372 Produk	10.000.000
				UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	50 Orang	2.000.000
Program	**3) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**7.094.843.942**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 056

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	PNBP	491.012.564	01 Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dan aspek manajemen operasional	AAC Peraturan Pemerintah	3	PP, RPP	401.269
	RM	6.475.585.591	02 Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar kepemerintahan yang baik dan aspek pengendalian internal	AAD Peraturan Presiden	6	PerPres, R Perpres	601.169
	PLN	128.245.767		AAG Peraturan Menteri	18	PerMen, Perka	1.429.512
				ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	27	Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	1.943.703
				AEC Kerja sama	24	Kesepakatan	3.744.223
				AEF Sosialisasi dan Diseminasi	2	orang	378.230
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	20	Kelompok Masyarakat	200.000
				BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	2.000.000
				CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	84.280.464
				DBA Pendidikan Tinggi	2.310	Orang	5.737.289
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.797	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	6.734.462.128
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14.568	Unit, m2, Paket	96.539.192
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.410	Orang, Layanan, Rekomendasi	38.282.702
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.225	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	118.295.811
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	1.230.400

SK No 160591 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 055
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		TBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	417.057 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.338.630

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 057

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA					377.999.537
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					306.682.864
	10	PENDIDIKAN					72.316.673
3 Program	1) DM	Program Perpustakaan dan Literasi					72.316.673
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					306.682.864
Program	1) DM	Program Perpustakaan dan Literasi					72.316.673
	RM	72.242.585	01 Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian bahan perpustakaan	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	92.254 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	100.000
	PNBP	74.088	02 Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	377.500 Paket, Unit, m2	1.000.000
			03 Terselenggaranya layanan perpustakaan sesuai dengan standar pelayanan publik melalui pengembangan, pengolahan, pemanfaatan dan pelestarian naskah kuno nusantara	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	16 Unit	6.181.000
				DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	60 Orang, Kegiatan	402.570
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	34.061
				FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	2.281.000
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	360 Orang	10.675.000
				QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.000 Kelompok Masyarakat	5.389.990
				QEI	Bantuan Lembaga	750 Lembaga	40.134.000
				RAA	Sarana Bidang Pendidikan	44.600 Paket, Unit, m2	4.839.052



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 057
KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	2.000 Orang, Kegiatan	1.280.000
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**305.692.864**
RM 305.312.190	01 Terwujudnya Peningkatan Kinerja Perpustakaan Nasional yang Akuntabel	AEC Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	662.415
PNBP 370.674		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	303.925.449
		EBC Layanan Manajemen Kinerja Internal	44 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	575.000
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	10 Layanan, Dokumen	300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL					8.624.310.746
2 Fungsi	04	EKONOMI					8.566.646.296
	10	PENDIDIKAN					57.664.446
3 Program	1) GH	Program Komunikasi Publik dan Media					277.967.731
	2) GK	Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital					1.612.528.578
	3) GL	Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital					4.535.304.473
	4) WA	Program Dukungan Manajemen					2.198.509.964
Program	1) GH	Program Komunikasi Publik dan Media					277.967.731
		RM 277.967.731	01 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional	AAS Peraturan Menteri	3	PerMen, Perka, RPermen	600.000
			02 Meningkatnya keterbukaan informasi publik	ACO Penzinan Lembaga	30	Institusi, Badan Usaha, Lembaga	1.000.000
			03 Meningkatnya kualitas pengelolaan media dalam ekosistem informasi	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	210.000
				BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	170.000	Orang, Akta, Keping, Bidang	5.500.000
				BMB Komunikasi Publik	7	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	5.199.337
				FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	3.900	Orang	6.682.180
				PAA Undang-Undang	1	UU, RUU	945.000
				PAD Peraturan Presiden	1	PerPres, R Perpres	440.000

SK No 160587 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.690.244
		PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000
		PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	5	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.619.042
		PCD Standarisasi Lembaga	85	Lembaga, Unit Kerja	246.850
		PCI Sertifikasi Profesi dan SDM	60	Orang, Sertifikat	79.900
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	1.000	orang	900.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	610.000
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	814.555
		QCB Perkara Hukum Lembaga	105	Perkara, Berkas Perkara	1.024.832
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	585	Lembaga	47.792.786
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	201	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Kepulauan	2.171.002
		QMA Data dan Informasi Publik	20	dokumen, Peta, Data	4.647.000
		QMB Komunikasi Publik	101.534.396	layanan, konten	189.140.765
		SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	610	Orang	1.158.238
Program **2) GK Program Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital**					**1.612.626.678**
RM 1.250.917.715	01 Meningkatnya Penciptaan Nilai Ekonomi Digital dengan Penguatan Ekosistem Digital Nasional	AAG Peraturan Menteri	2	Permen, Perka	400.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 069

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
PNBP	381.610.860	02 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Baru di Sektor Strategis Nasional	ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	17 Rekomendasi Kebijakan	38.275.691
		03 Meningkatnya Kesehatan dan Keberlanjutan Industri Pos Logistik dan Penyiaran	ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	1.051.233
		04 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Ekosistem Digital	AEC	Kerja sama	6 Kesepakatan	800.460
		05 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan perlindungan di ruang digital	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan	4.049.270
		06 Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur dan Aplikasi Pemerintah Digital	BOB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100 Lembaga	2.047.179
		07 Mengakselerasi transformasi digital daerah	BOH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1 Badan usaha	2.000.000
		08 Akselerasi pengembangan kompetensi digital sdm nasional sesuai kebutuhan industri ke depan	BOI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	2 Industri	14.200.000
		09 Mempercepat akselerasi kompetensi sdm aparatur dan kepemimpinan digital	BOJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	10 Start Up	11.528.750
		10 Mengakselerasi masyarakat digital untuk bisa produktif dan bijak dalam menggunakan internet	BIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan	3 Layanan	54.355.279
		11 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang SDM Digital	CAA	Sarana Bidang Pendidikan	3 Paket, Unit	495.170
		12 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Bidang Pengawasan Ruang Digital	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	10.413.429
			CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	19.665.459
			CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	3.274.259
			DBA	Pendidikan Tinggi	2.340 Orang	12.750.530
			DCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	160 Orang	1.611.099

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		DDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	8 Purwarupa	3.852.945
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	328 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.256.058
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	9 Sistem Informasi	12.946.329
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3 Laporan, Layanan	4.168.327
		PAA	Undang-Undang	1 UU, RUU	945.000
		PAG	Peraturan Menteri	4 PerMen, Perka	800.000
		PBD	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	7 Rekomendasi Kebijakan	16.604.739
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	825 Orang	1.173.927
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	4 layanan	60.166.916
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	450 Orang	9.000.000
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	20 Badan usaha	5.000.000
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3 Industri	5.900.000
		QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	192 Start Up	64.149.775
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga	80.000.000
		RBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	50 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	879.179
		RCL	DP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	22 Unit	313.143.234
		RDS	DP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	650.671.966
		SCA	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	8.270 Orang	27.067.664
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	12 Sistem Informasi	108.109.431

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	40 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	28.000.000
Program 3) GL Program Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital				**4.535.304.473**
BLU 3.415.252.449	01 Meningkatnya coverage Broadband yang menjangkau ke seluruh Indonesia	ABC Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	9 Rekomendasi Kebijakan	17.191.841
RM 781.460.289	02 Meningkatnya Penetrasi dan Utilisasi (Take Up) Internet Broadband	BAH Pelayanan Publik Lainnya	1.474 layanan	142.033.010
PNBP 338.591.755	03 Meningkatnya kualitas internet broadband Nasional	BCD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	80.185.699
	04 Meningkatnya pertumbuhan industri telekomunikasi dan data center yang berkelanjutan	BCH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1 Badan usaha	1.547.591
	05 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Perangkat Digital dalam negeri	BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1 Layanan	1.850.000
	06 Meningkatnya Akselerasi Penyediaan Infrastruktur dan Sumber Daya untuk Layanan Khusus secara nasional	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	96 Unit	3.954.624
	07 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan PNBP Bidang Infrastruktur dan Perangkat Digital	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	241 Unit	39.388.926
		FBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	615 Desa DesaKelurahan	10.917.964
		PBC Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	12 Rekomendasi Kebijakan	26.460.279
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	7 layanan	21.092.679
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2 Lembaga	950.985
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	9 Badan usaha	28.978.340
		QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	1 Industri	569.701

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 059

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				RAN	Sarana Bidang Teknolog Informasi dan Komunikasi	3 Unit	44.719.503
				ROL	OP Sarana Bidang Teknolog Informasi dan Komunikasi	2 Unit	131.178.184
				RDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	35.615 Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi	4.009.545.491
				UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	20 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	2.657.674
Program	**4) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**2.198.609.964**
		RM 1.473.234.241	02 Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama internasional dalam memperkuat transformasi digital bermakna	AAG	Peraturan Menteri	3 PerMen, Perka, RPermen	800.000
		BLU 236.747.551		AAH	Peraturan lainnya	7 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	700.000
		PNBP 466.628.172		ABD	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	22 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.101.074
				AEA	Koordinasi	2 kegiatan	370.000
				AEC	Kerja sama	10 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	8.726.014
				BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	4.897.500
				BMB	Komunikasi Publik	40 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	3.759.698
				CCL	DM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	17 Unit	47.820.158
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	197 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.999.676.623

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 069

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	654	Unit, m2, Paket	30.712.186
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.179	Orang, Layanan, Rekomendasi	114.830.253
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	147	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	81.906.877
		PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	2.207.563

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA					146.060.000.000
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					146.060.000.000
3 Program	1) BD	Program Profesionalisme SDM Polri					1.388.391.446
	2) BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana					3.535.735.359
	3) BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri					54.327.270.881
	4) BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					13.705.842.463
	6) WA	Program Dukungan Manajemen					73.089.759.951
Program	1) BD	Program Profesionalisme SDM Polri					1.388.391.446
	RM	1.316.057.721	01 Mewujudkan pengelolaan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara Profesional yang didukung dengan teknologi yang memadai.	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	215 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	12.707.036
	PNBP	72.333.725		AEC	Kerja sama	857 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	27.150.410
				DBA	Pendidikan Tinggi	1.853 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	139.645.056
				DBE	Pendidikan Non Gelar	86.090 Orang	680.194.967
				DCG	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	4.510 Orang, Kegiatan	59.325.252
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	876 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	114.954.568
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	306.720 Orang, Layanan, Rekomendasi	324.264.502

SK No 160627 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	103	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	26.680.666
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	500	Orang, Sertifikat	1.265.249
		SBE Pendidikan Non Gelar	225	Orang	1.475.400
		SCG Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan	30	Orang, Kegiatan	678.335
Program 2) BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana					**3.535.736.259**
RM 3.481.012.265	01 Polri yang efektif dan adaptif dalam menegakkan hukum secara adil dan akuntabel.	BCE Penanganan Perkara	165.194	Perkara, Berkas Perkara	2.827.038.806
PNBP 54.722.994		BHB Operasi Bidang Keamanan	744	operasi, Hari Operasi	4.976.401
		BJA Penyidikan dan Pengujian Produk	190.868	Produk	115.374.072
		BMA Data dan Informasi Publik	2.714	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.964.633
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	91.565	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	544.787.039
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	350	Orang, Layanan, Rekomendasi	206.709
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	4.461	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	16.569.667
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	10	Orang, Sertifikat	175.000
		QCE Penanganan Perkara	526	Perkara	23.643.146
Program 3) BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri					**54.327.270.881**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	PNBP	3.189.155.525	01 Meningkatnya kualitas pengelolaan almaluls dan sarpras dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, narkoba dan gakkum serta Layanan Internal	CAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	47.124 Unit, Paket		47.465.781.525
	BLU	156.460.966		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.537 Unit		641.611.614
	SBSN	686.964.886		CDM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	114 unit, Kawasan		1.170.884.836
	RM	46.163.703.106		CDF DM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Unit		1.500.000
	RMP	1.676.332.207		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.277 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		2.195.560.844
	PDN	454.633.869		RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	23 Unit, Paket		2.185.966.076
				RBM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	804 unit, Kawasan		665.955.986
Program	4) BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					13.706.842.463
	RM	6.291.535.345	01 Polri yang responsif dan preditif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemampuan personil Polri yang mampu berkolaboratif dan adaptif untuk mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	11 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		883.344
	PNBP	7.417.307.118		AEC Kerja sama	286 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan		22.084.083
				BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	91.273.439 Orang, Akta, Keping, Bidang		4.674.993.445
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	7.001 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, trik		218.800.680
				BHB Operasi Bidang Keamanan	1.211.545 operasi, Hari Operasi		2.117.944.204

SK No 160625 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	1.439.730	laporan	2.026.502.570
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	90.086	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	4.146.309.572
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.554	Orang, Layanan, Rekomendasi	693.850
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.626	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	296.626.735
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, ttk	10.000.000
Program	SjWA	Program Dukungan Manajemen					**73.089.759.951**
	PNBP	245.191.031	01 Terbangunnya efektivitas dukungan manajemen terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, harkamtibmas dan gakkum serta Layanan Internal	AAH Peraturan lainnya	82	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	2.223.041
	RM	70.298.906.459		ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	52	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.272.885
	BLU	2.545.662.461		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	53.745	orang	16.836.669
				BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.270.086	Orang, Akta, Keping, Bidang	2.956.472.121
				BJA Penyidikan dan Pengujian Produk	105	Produk	461.190
				BMA Data dan informasi Publik	1	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	6.014.216
				DDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	1	Purwarupa, Desain	2.000.842
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	27.527	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	69.633.746.811
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	287	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.811.167

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 060

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen Kinerja Internal	35.346	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	254.468.057
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	195	Layanan, Dokumen, Laporan, Rekomendasi	2.291.534
		QHE Operasi Bidang Kesmaran	1	operasi, Hari Operasi	1.161.399

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN					2.247.043.158
2 Fungsi	07	KESEHATAN					2.247.043.158
3 Program	1) DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan					708.269.230
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					1.538.773.928
Program	1) DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan					708.269.230
	RM	609.173.515	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	384	Rekomendasi Kebijakan Kajian	11.710.465
	PNBP	99.095.715	02 Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, BK, Kos	ACD Perizinan Lembaga	56	Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Kelatapan	1.600.000
			05 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	AEA Koordinasi	1.064	kegiatan	1.581.260
			06 Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	AEE Kemitraan	1	Kesepakatan	245.000
			07 Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	140	NSPK	13.770.974
			08 Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal	BAH Pelayanan Publik Lainnya	118.155	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, tbk	18.284.288
			09 Layanan Publik BPOM yang Prima	BOB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4.254	Lembaga	16.324.862
			10 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	BOC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	154.569	Orang	44.664.455
				BOG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	900	UMKM	1.613.845
				BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	24.586	Produk	16.961.944

SK No 160622 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	12	Orang	398.560
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	515	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Kepubusan	3.228.215
		BKB Pemantauan produk	770	laporan	21.237.447
		BMB Komunikasi Publik	785	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	1.316.494
		CAB Sarana Bidang Kesehatan	280	Paket, Unit	14.839.631
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	347	Unit	4.795.600
		CBV Prasarana Bidang Kesehatan	12	Unit	168.534.233
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	530.044
		PCA Perizinan Produk	158.102	Produk, Keputusan	10.238.302
		PDD Standarisasi Lembaga	154	Lembaga, Unit Kerja	87.914.686
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	396.018
		QCD Perkara Hukum Badan Usaha	197	Perkara, Berkas Perkara	27.651.262
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.455	Orang	4.910.546
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	661	UMKM	1.490.909
		QDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	152	Industri	6.046.364
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	65.624	Produk, Laporan, Kepubusan	50.748.322
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	31.496	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Kepubusan	57.969.575



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				QKB	Pemantauan produk	33 laporan, Berkas Perkara	7.656.756
				RAB	Sarana Bidang Kesehatan	73 Paket, Unit	107.765.926
				UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	279 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	5.028.065
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**1.538.773.929**
	RM	1.532.943.929	01 Meningkatnya efektivitas kerjasama BPOM	AAH	Peraturan lainnya	25 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	339.442
	PNBP	5.830.000	02 Meningkatnya efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	296.401
			03 Layanan Publik Sekretariat Utama yang prima	ADM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	207.515
			04 Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal serta layanan publik yang prima dalam koordinasi Sekretariat Utama	ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	538.595
			05 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	AEC	Kerja sama	70 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	1.742.967
			06 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	124.250
			07 Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyelur, Keputusan	190.926
				BMA	Data dan Informasi Publik	5 dokumen, Peta, Data	1.000.000
				BMB	Komunikasi Publik	2 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	534.644
				CAN	Sarana Bidang Teknolog. Informasi dan Komunikasi	63 Unit	1.002.000
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	356 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.510.386.626

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 063

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	55 Unit, m2, Paket	1.319.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	6.956 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.212.320
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	53 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.084.681
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	4 Layanan, Dokumen	733.033
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	712 Orang, Sertifikat	2.088.869
		PEC Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	119.354
		TBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.561 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.782.541
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	1.149.764

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 064

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL				212.029.784
2 Fungsi	02 PERTAHANAN				212.029.784
3 Program	1) AI Program Pembinaan Ketahanan Nasional				59.029.826
	2) WA Program Dukungan Manajemen				152.999.958
Program	1) AI Program Pembinaan Ketahanan Nasional				59.029.826
	RM 59.029.826	01 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Nasional dan Daerah dalam Membina Ketahanan Nasional	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	574.785
		02 Meningkatkan Kapabilitas Ketahanan Nasional bagi Pimpinan Nasional	ABC Kebijakan Bidang Politik	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	574.755
		03 Terbentuknya Komponen Bangsa yang memahami dan mengimplementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	54 Rekomendasi Kebijakan	4.742.629
		04 Performa Kajian Strategis yang Efektif dan Kredibel	ABN Kebijakan Bidang Sosial	6 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.648.927
		05 Terukurnya Indeks Ketahanan Nasional	AEA Koordinasi	51 kegiatan	3.214.938
		06 Terwujudnya Basis Data Kompetensi Kepemimpinan Nasional yang Kredibel dan Akuntabel	DBE Pendidikan Non Gelar	80 Orang	9.960.916
		07 Terukurnya Indeks Kepemimpinan Nasional	QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5.946 Orang	14.852.830
			SBE Pendidikan Non Gelar	220 Orang	23.458.877
Program	2) WA Program Dukungan Manajemen				152.999.958
	RM 152.999.958	01 Terwujudnya Manajemen Lemhannas RI yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	AEC Kerja sama	29 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.186.738

SK No 160617 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 064
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	17 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	146.123.685
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	612 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.766.782
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	68 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.922.765



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	065	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL					775.082.289
2 Fungsi	04	EKONOMI					775.082.289
3 Program	1) ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi					298.498.642
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					476.583.647
Program	1) ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi					298.498.642
	RM	298.498.642	01 Meningkatnya kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan	BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	70	Badan usaha, Penyalur, Hektar	3.025.640
			02 Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Peningkatan Iklim Penanaman Modal	BMA Data dan Informasi Publik	6	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	3.201.646
			03 Meningkatnya tata kelola deregulasi, pemberdayaan usaha, dan pengembangan potensi daerah bidang penanaman modal	BMB Komunikasi Publik	200.000	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	10.000.000
			04 Meningkatnya implementasi Kerja Sama Penanaman Modal	FAB Sistem informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	3.136.194
			05 Terwujudnya promosi yang efektif dalam meningkatkan nilai rencana penanaman modal	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Rekomendasi	500.000
			06 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	PAD Peraturan Presiden	1	PerPres, R Perpres	4.000.000
			07 Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Fasilitas Berusaha yang Berkualitas	PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	68	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	28.875.171
			08 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	5.700.000
			09 Terwujudnya Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif	PEB Forum	5	forum	1.000.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	10 Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	PEC Kerja sama	39	Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	8.967.435
	11 Meningkatnya realisasi PMA/PMDN hilirisasi investasi strategis	PEG Konferensi dan Event	3	Kegiatan, Paket Kegiatan	7.172.252
	12 Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Penanaman Modal	PEH Promosi	136	promosi, Kegiatan	84.939.214
	13 Meningkatnya Kualitas Layanan Teknologi Informasi Penanaman	PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	500.000
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	2.720.119
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	564	Lembaga, Unit Kerja, Tim	7.000.000
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	750	UMKM	6.500.000
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1.015	Badan usaha, Miliar USD	26.946.967
		QIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	5	Pemerintah Daerah	3.408.091
		QKC Pemantauan lembaga	1	laporan	500.000
		QMB Komunikasi Publik	2	layanan	4.863.906
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	80.923.167
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.000.000
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**476.583.647**
RM 476.583.647	01 Terwujudnya Tata Kelola yang Akuntabel dan Transparan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	2	layanan	924.947
	02 Terwujudnya organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional	OCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	324	Orang, Kegiatan	959.930

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 065

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	03. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Berakhlak dan Profesional	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	467.665.774
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	276 Unit, m2, Paket	2.782.833
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	35 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.208.142
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.042.021

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 066

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**066**	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)**					**1.516.617.307**
2 Fungsi	**08**	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**					**1.516.617.307**
3 Program	**1) BL**	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**					**144.788.809**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.371.828.498**
Program	**1) BL**	**Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**					**144.788.809**
		RM	126.370.000	01 Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	AAH Peraturan lainnya	1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	49.120
		PNBP	18.418.809	02 Meningkatnya keberdayaan stakeholder dalam penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	219.760
				03 Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba yang berkelanjutan	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.195.549
				04 Meningkatnya pengungkapan jaringan dan aset jaringan pelaku kejahatan narkoba	ADD Standarisasi Lembaga	7 Lembaga, Unit Kerja	1.160.000
				05 Meningkatnya kualitas sistem hukum penanganan kejahatan narkoba dan kolaborasi lintas instansi	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	30 Orang, Sertifikat	1.480.000
					AEA Koordinasi	3 kegiatan	75.000
					AEC Kerja sama	5 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	275.000
					AED Perjanjian	4 perjanjian	150.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 069
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	5.277.756
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	79.354 Orang, Aksi, Bidang, Laporan	40.829.366
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	236 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	105.752
		BCA	Perkara Hukum Penyerangan	109 Perkara, Berkas Perkara	9.885.805
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.044 Lembaga, Unit Kerja, Tim	6.288.603
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	60 Kelompok Masyarakat	1.496.000
		BHB	Operasi Bidang Keamanan	9 operasi, Hari Operasi	5.345.457
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	66 Produk	1.992.080
		BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	236 Orang, Laporan	2.238.469
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	12.004 Produk	4.190.000
		BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	3.041 laporan	6.372.482
		BKC	Pemantauan lembaga	60 laporan	217.963
		BMA	Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	715.500
		DCJ	Pelatihan Bidang Sosial	1.160 Orang	3.367.855
		DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	250 Orang	1.084.650
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	16 Layanan, Perkara	281.120
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	336.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 066
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	850.500
		PDD	Standarisasi Lembaga	20 Lembaga	3.525.479
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	22.100.000 orang	3.368.980
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	6.554 Orang, Akta, Keping, Bidang	9.411.911
		QCA	Periksa Hukum Perseorangan	2 Periksa	2.441.270
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	170 Lembaga	3.950.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	277 Kelompok Masyarakat	11.520.464
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	950 Orang, Kegiatan	2.733.029
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	342.400
Program **2] WA Program Dukungan Manajemen**					**1.371.828.488**
RM 1.371.828.488	01 Meningkatnya kapabilitas kelembagaan yang profesional, adaptif, dan berbasis transformasi digital	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	315 Orang	168.000
	02 Meningkatnya kualitas pengawasan internal berbasis risiko dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja dan sumber daya organisasi	COF	OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	40 Unit	45.000.000
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.999 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.317.211.759
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24 Unit, m2, Paket	349.600
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.150 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.575.798
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	458 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.503.148

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 069

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	068	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL				3.837.975.239
2 Fungsi	07	KESEHATAN				3.837.975.239
3 Program	1) DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana				359.305.641
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				3.278.669.598
Program	1) DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana				359.305.641
	RM	350.908.473	01 Meningkatnya Kualitas Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)	ABN Kebijakan Bidang Sosial	5 Rekomendasi Kebijakan Kajian	500.000
	PNBP	79.168	02 Meningkatnya Ketahanan Keluarga Sesuai Siklus Hidup	ADE Akreditasi Lembaga	2 Lembaga, Unit Kerja	356.447
	HLN	8.318.000	03 Meningkatnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Penduduk secara Holistik dan Komprehensif	AEH Promosi	38 promosi, Kegiatan	2.500.000
			04 Meningkatnya Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif Berbasis Kewilayahan dan Fokus pada Segmentasi Sasaran	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	85 Lembaga, Unit Kerja, Tim	10.782.380
			05 Meningkatnya Kualitas Penggerakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Kolaboratif	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	5.032.960
			06 Terwujudnya Ekosistem Evidence Based Policy Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	263.150
				FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	32 Laporan, Rekomendasi	3.335.001

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.523 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.100.328
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	180.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.607.961 Orang	5.420.000
		QEI	Bantuan Lembaga	21.580 Lembaga	303.000.000
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	1.500.000
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	556 Orang, Kegiatan	2.025.258
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	12 Laporan, Rekomendasi	2.662.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.306 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	19.636.120
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**3.278.669.598**
RN 3.278.669.598	01 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas	AEA	Koordinasi	3 kegiatan	200.000
	02 Terwujudnya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang Akuntabel dan Berintegritas	AEH	Promosi	36 promosi	1.042.000
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	95 Unit	3.200.000
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	74 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.241.329.001
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13 Unit, m2, Paket	21.800.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM internal	8.882 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.868.597

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 068

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.750.000
		FAA	Kearsipan	1 Arsip	150.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	930.000

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 074

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA					161.624.725
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					161.624.725
3 Program	1) BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM					30.180.783
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					131.443.942
Program	1) BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM					30.180.783
	RM	30.180.783	01 Meningkatnya pemahaman HAM dalam Regulasi, Penyelenggaraan Pemerintahan, Budaya Kewargaan dan Praktik Bisnis	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	9	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.040.948
			02 Meningkatnya Penanganan Pelanggaran HAM yang Optimal	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	2.650	orang	2.503.666
			03 Meningkatnya Efektivitas Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	800.000
			04 Terwujudnya Perangkat Standar Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Komprehensif, Inklusif, Efektif, Sistemik, Berkelanjutan, Berbasis Kepulauan dan Digital	GAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1	Orang, Akta, Bidang, Laporan	322.853
			05 Meningkatnya Inisiatif Kebijakan Kondusif dan Penyikapan atas Kebijakan Diskriminatif untuk Mendukung Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia dalam Memperkuat Sistem Penanganan, Pemulihan, dan Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi	BCC Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	5.464	Perkara, Berkas Perkara	5.037.792
				BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2	laporan	970.234
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	610.575
				PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	18	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.394.515

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 074

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBL Kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan	1	Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	400	Orang, Akta, Bidang, Laporan	2.000.000
		QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	10	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyakit, Keputusan	2.500.000
		QIE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	3	Pemerintah Daerah	1.500.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**131.443.942**
RM 131.443.942	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kelembagaan	AEA Koordinasi	1	kegiatan	664.521
	02 Menguatnya Kredibilitas dan Legitimasi Mekanisme Khusus HAM Perempuan melalui Peningkatan Daya Tanggap Daya Pengaruh dan Tata Kelola Komnas Perempuan	AEB Forum	3	forum	2.142.682
		AEC Kerja sama	15	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	961.498
		BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	400.000
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	20	Unit	666.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	33	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	115.383.548
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	32	Unit, Paket	2.932.043
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	61	Orang, Layanan, Rekomendasi	2.511.366
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	27	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.922.366
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	60.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA				2.675.438.903
2 Fungsi	04	EKONOMI				2.675.438.903
3 Program	1] GJ	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika				1.369.894.535
	2] WA	Program Dukungan Manajemen				1.305.544.368
Program	1] GJ	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika				1.369.894.535
RM 669.335.009			01 Meningkatnya layanan informasi Meteorologi terbaik (excellent services) guna mendukung konsep Early Warning for All	AAG Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka, RPermen	167.650
SBSN 122.001.850			02 Tersedianya Layanan Klimatologi yang Prima	ADD Standarisasi Lembaga	18 Lembaga, Unit Kerja	756.166
PNBP 103.483.619			03 Meningkatnya Layanan Geofisika yang Berkualitas dan Prima	ADE Akreditasi Lembaga	2 Lembaga	200.636
PLN 475.073.057			04 Meningkatnya Layanan Infrastruktur MKG untuk Mendukung Layanan MKG yang Prima	AEA Koordinasi	116 kegiatan	6.920.507
			05 Meningkatnya Layanan Modifikasi Cuaca yang Prima	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	25 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	112.987
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	9 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.009.092
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	200 Orang	1.112.614
				BMA Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	150.000
				BMB Komunikasi Publik	2 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	500.000
				CAD Sarana Bidang Konektivitas Udara	22 Unit, Paket	21.972.534

SK No 160657 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Unit	380.000
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit	1.215
		CCG OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17.720	Unit	472.302.212
		CCL OP Sarana Bidang Teknolog Informasi dan Komunikasi	826	Unit	149.162.754
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	813	Orang, Kl., Daerah, Unit Kerja	4.003.164
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan, Layanan	611.412
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	2.655	orang	3.047.547
		QDC Fasilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	3.670	Orang	6.403.826
		RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	Unit	122.001.850
		RAL Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	1	Unit	475.073.067
		RCG OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.884	Unit	69.006.272
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**1.305.644.368**
RM 1.304.535.078	01 Meningkatnya Tata Kelola Dukungan Manajemen Yang Baik Dalam Mendukung Transformasi Organisasi BMKG Berkelas Dunia	AAG Peraturan Menteri	1	Perilen, Perka	100.000
PNBP 1.009.290		AAH Peraturan lainnya	25	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	36.500
		ABO Kebijakan Bidang Teknolog informasi	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	503.809



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 075

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		ADA	Standardisasi Produk	3 produk, Ekor, Peralatan, Rekomendasi, Standar	228.762
		ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	100 Orang	100.000
		AEA	Koordinasi	2 kegiatan	200.000
		AEC	Kerja sama	157 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	460.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	705.000
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	87.429
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	203 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.279.264.174
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	36 Unit, m2, Paket	3.808.694
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	7.717 Orang, Layanan, Rekomendasi	16.045.500
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	45 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.812.340
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60 Orang	187.660
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Rekomendasi	4.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 076
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	076 KOMISI PEMILIHAN UMUM				3.539.587.941
2 Fungsi	01 PELAYANAN UMUM				3.539.587.941
3 Program	1) CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				87.304.002
	2) WA Program Dukungan Manajemen				3.452.283.939
Program	1) CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				87.304.002
	RM 87.304.002	01 Tersedianya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	ABC Kebijakan Bidang Politik	555 Rekomendasi Kebijakan	4.062.150
		02 Tersedianya Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	3 Lembaga	3.000.000
		03 Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pilkada yang Ditetapkan	BBB Layanan Bantuan Hukum Lembaga	1 Institusi, Lembaga	3.003.750
		04 Terwujudnya Layanan kepada Publik dengan Baik	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.766 Lembaga	9.837.902
		05 Tersedianya Data Peserta Pemilu sesuai Ketentuan yang Berlaku	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.658 Lembaga	67.400.200
Program	2) WA Program Dukungan Manajemen				3.452.283.939
	RM 3.452.283.939	01 Terlaksananya Program Reformasi Birokrasi sesuai Ketentuan yang Berlaku	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	555 Lembaga	5.811.520
		02 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.347 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.385.223.659
		03 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas, Fungsi, dan Wewenang KPU	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.658 Orang, Layanan, Rekomendasi	20.916.541

SK No 160654 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 076

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	04 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.671 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	21.101.280
	05 Tersedianya Data Pemilih yang Valid sesuai Ketentuan yang Berlaku	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.222 Lembaga	19.730.739
	06 Terwujudnya Integrasi Data dan Sistem Informasi Pemilu yang Baik			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 077

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI					379.335.542
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					379.335.542
3 Program	1) BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi					201.519.340
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					177.816.202
Program	1) BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi					201.519.340
	RM	201.519.340	01 Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.155.000
			02 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	AEC	Kerja sama	3 Kesepakatan	7.125.000
			04 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi	BCE	Penanganan Perkara	192 Perkara	169.266.440
			05 Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300 Orang	90.000
				BMA	Data dan Informasi Publik	14 dokumen, Peta, Data	6.023.000
				CAQ	Sarana Bidang Hukum	131 Unit	16.477.900
				PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.500 Orang	200.000
				RAQ	Sarana Bidang Hukum	1 Unit, Kajian	600.000
				UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	100.000
				UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3 Laporan, Layanan	200.000
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					177.816.202

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 077

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
RM	177.816.202	01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	162.675.042
		02 Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6 Unit, m2, Paket	11.373.210
		03 Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	156 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.828.600
		04 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	54 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.040.750
			PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	2 Rekomendasi Kebijakan	200.000

SK No 160651 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 078

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)					333.577.080
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					333.577.080
3 Program	1) BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme					82.095.202
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					251.481.878
Program	1) BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme					82.095.202
	RM	82.095.202	01 Meningkatnya Kebermanfaatan Data Pelaporan PPATK dan Kepatuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT dan PPSPM	AAH	Peraturan lainnya	10 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	899.651
			02 Meningkatnya Tindak Lanjut Produk Intelijen Keuangan PPATK (PIK)	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	33 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.721.493
			03 Meningkatnya Efektivitas Strategi, Kebijakan dan Regulasi APU PPT dan PPSPM	AEC	Kerja sama	23 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	2.007.490
			04 Meningkatnya Efektivitas Kerjasama APU PPT dan PPSPM	BCE	Penanganan Perkara	890 Perkara	4.338.289
			05 Terwujudnya Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Informasi PPATK	BDB	Fasilitasi dan Penilaian Lembaga	2.565 Lembaga, Unit Kerja, Tim	850.114
				BKC	Pemantauan lembaga	209 laporan	3.090.957
				BMA	Data dan Informasi Publik	18 dokumen, Peta, Data	349.255
				CCL	DP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	59 Unit	45.379.412
				DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	23 Orang, Kegiatan	1.836.234

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 078

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		DCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	11 Orang	1.777.143
		PBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	6 Rekomendasi Kebijakan	3.681.285
		PEC	Kerja sama	20 Kesepakatan	4.724.713
		GCE	Penanganan Perkara	127 Perkara	8.540.053
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	5.000.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**251.481.878**
RM 251.481.878	01 Meningkatnya Tata Kelola Internal PPATK	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	30 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	249.076.094
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	179 Unit, m2, Paket	4.300.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	401 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.213.007
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	66 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	892.777

SK No 160649 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 083

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)					2.271.253.362
2 Fungsi	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					2.271.253.362
3 Program	1) GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial					2.118.731.472
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					152.521.890
Program	1) GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial					2.118.731.472
	RM	60.050.305	01 Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Dasar termutakhir di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial	BAH Pelayanan Publik Lainnya	130 layanan		1.116.767
	PNBP	1.962.080	05 Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial secara elektronik	BMA Data dan Informasi Publik	6 dokumen, Peta, Data		7.727.078
	PLN	2.056.719.087	06 Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial	CAA Sarana Bidang Pendidikan	1 Paket, Unit		3.140.597
			09 Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia	CBR Dukungan Teknis	1 Dokumen		21.628.230
			10 Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis cloud secara berkelanjutan	CCI OM Sarana Pengembangan Kawasan	1.056 Unit, Hektar		30.178.309
			11 Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang IG	DCB Pelatihan Bidang Infrastruktur	140 Orang, Kegiatan		845.313
			12 Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1 Orang, Layanan, Rekomendasi		8.847.426
			13 Berkembangnya teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk seluruh pengguna IG	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan		2.364.120

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 083
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	14 Terselenggaranya Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial	PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	13.726.782
	15 Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial	OMA Data dan Informasi Publik	17 dokumen, Peta, Data	1.731.609.647
	16 Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial	RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	287.475.033
		RDS OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit, KabKota, Kecamatan TitikLokasi	29.872.056
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**152.521.880**
RM 152.521.880	01 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	152.521.880

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 084

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)					190.003.227
2 Fungsi	04	EKONOMI					190.003.227
3 Program	1) EJ	Program Standardisasi Nasional					44.183.600
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					145.819.627
Program	1) EJ	Program Standardisasi Nasional					44.183.600
PNBP 44.183.600			03 Meningkatnya ketersediaan LPK untuk mendukung produk Indonesia	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	15 layanan	572.720
			04 Meningkatnya keterlaluasan pengukuran Nasional ke Sistem Internasional	PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	46 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
				PDA	Standarisasi Produk	405 produk	1.895.000
				PDE	Akreditasi Lembaga	2.895 Lembaga	35.428.502
				PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	52 NSPK	6.758.791
				QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1.780 Orang, Akta, Bidang, Laporan	1.887.480
				QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000 UMKM	3.000.000
				QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	810 Industri, IKM, Miliar USD	2.000.000
				QJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan	2.020 Unit	2.641.107
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					145.819.627
RM 144.139.057			01 Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.036.092
PNBP 1.680.570				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	142.474.913
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	732 Orang, Layanan, Rekomendasi	660.000

SK No 160646 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 084

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBO Layanan Manajemen Kinerja Internal	6 Dokumen Layanan, Laporan, Rekomendasi	910.000
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	644.478
		FEC Kerja sama	2 Kesepakatan	104.144

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 085

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**085**	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)**					**117.741.540**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**					**117.741.540**
3 Program	**1) KB**	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**13.586.786**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**104.145.754**
Program	**1) KB**	**Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**13.586.786**
	PNBP	11.656.786	01 Meningkatnya Kualitas Perizinan dalam Keselamatan dan Keamanan di Fasilitas Kesehatan dan Industri	ACB Perizinan Masyarakat	1.300	Orang	2.225.000
	RM	1.930.000	02 Meningkatnya Kualitas Inspeksi dalam Keselamatan dan Keamanan di Fasilitas Kesehatan dan Industri	ACC Perizinan Lembaga	3.033	Institusi, Badan Usaha, Lembaga	2.965.197
			03 Meningkatnya Kualitas Peraturan ketenaganukliran bidang Kesehatan dan Industri	ADC Sertifikasi Produk	600	produk	166.757
			04 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan ketenaganukliran bidang Kesehatan dan Industri	ADF Sertifikasi Lembaga	31	Lembaga, Badan Usaha	278.700
			05 Meningkatnya Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Ketenaganukliran untuk Fasilitas Kesehatan, Industri dan Penelitian/Lingkungan Hidup	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	160	Orang	460.304
			06 Meningkatnya Kinerja Perizinan Instalasi Nuklir	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	2.600.000
			07 Meningkatnya Kinerja Inspeksi Instalasi Nuklir	PAC Peraturan Pemerintah	1	PP, RPP	300.000
			08 Meningkatnya Kualitas Peraturan ketenaganukliran bidang Instalasi Nuklir	PEA Koordinasi	1	kegiatan, RUU	200.000
			09 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Instalasi Nuklir	GIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	238	Lembaga	2.608.848

SK No 160644 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 085
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	11 Meningkatnya Kinerja Inspeksi PLTN	RDH OP Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana	39 unit	1.939.000
	12 Meningkatnya Kualitas Peraturan Ketenaganukliran bidang Energi (PLTN)			
	13 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Bidang Energi			
	14 Terpenuhinya Infrastruktur Pengkajian Keselamatan Nuklir			
	15 Meningkatnya Infrastruktur Keselamatan, Keamanan dan Safeguards			
	16 Meningkatnya Infrastruktur Layanan Perizinan PLTN			
	17 Meningkatnya Kualitas Sistem Kesiapsiagaan Nuklir dan Respons Kedaruratan Nuklir			
	18 Meningkatnya Infrastruktur Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional			
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**104.145.754**
RM 104.145.754	01 Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan Laporan, Dokumen Rekomendasi Unit	104.145.754
	02 Meningkatnya Kualitas Kinerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			
	03 Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum			
	04 Meningkatnya Kualitas Kebijakan			
	05 Meningkat dan Menguatnya Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri dalam Mendukung Fungsi Pengawasan Ketenaganukliran			
	06 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan			
	07 Meningkatnya Kualitas Laporan BMN			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 085

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	08 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 09 Meningkatnya Kualitas Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 10 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan 11 Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik 12 Meningkatnya Kualitas SDM 13 Meningkatnya Kualitas Layanan TIK		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 086

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA					293.349.382
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					274.594.287
	10	PENDIDIKAN					18.755.095
3 Program	1) CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					47.221.776
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					246.127.607
Program	1) CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					47.221.776
	PNBP	45.141.509	01 Meningkatnya kualitas kebijakan instansi pemerintah di Bidang Administrasi Negara	ASH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	81 Rekomendasi Kebijakan	2.821.488
	RM	2.080.267	02 Meningkatnya kualitas Jabatan Fungsional bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	ASQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	200.000
			03 Terwujudnya Transformasi Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	ADE	Akreditasi Lembaga	30 Lembaga, Unit Kerja	1.272.228
			04 Meningkatnya ASN yang mendapatkan akses pembelajaran	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	765 Orang, Sertifikat	1.078.950
			05 Meningkatnya Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara	BDO	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	36 Kelompok Masyarakat	1.064.703
			06 Meningkatnya daya saing Pendidikan Tinggi dalam Mendukung Pengembangan Administrasi Negara	DBA	Pendidikan Tinggi	15.152 Orang	14.678.905
				FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	4.260 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	25.446.726
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Rekomendasi	470.776
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					246.127.607
	PNBP	8.941.196	01 Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Kolaboratif	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	150.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 086

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
RM 237.186.409		CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 Unit	2.499.694
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	36 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	242.027.466
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit, m2, Paket	536.200
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	283 Orang, Layanan, Rekomendasi	786.000
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	126.248



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**087**	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**						**279.336.383**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**						**279.336.383**
3 Program	**1) CN**	**Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional**						**93.268.438**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**						**186.066.945**
Program	**1) CN**	**Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional**						**93.268.438**
	PNBP	16.201.428	01 Penguatan Tata Kelola Kearsipan Nasional	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	11	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	693.024
	RM	17.067.010	02 Percepatan Digitalisasi Arsip	ADE	Akreditasi Lembaga	15	Lembaga, Unit Kerja	368.400
	SBSN	60.000.000	03 Peningkatan Ketersediaan Arsip secara Nasional	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1.540	Orang, Sertifikat	1.475.600
			04 Peningkatan Pelayanan Kearsipan dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan melalui JIKN	AEG	Konferensi dan Event	1	Kegiatan	31.345
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1	NSPK	16.680
				BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	20.100	Orang, Akta, Keping, Bidang	131.529
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	507	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	5.763.941
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	109	Lembaga, Unit Kerja, Tim	122.910
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	300	Orang	13.260
				BMA	Data dan Informasi Publik	4	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	104.606
				CAN	Sarana Bidang Teknolog Informasi dan Komunikasi	7	Unit	559.980

SK No 160639 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	400.000
		DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	2.000	Orang, Kegiatan	7.700.000
		DDD Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	1	kekayaan intelektual	87.472
		FAA Kearsipan	159.657	Dokumen, Arsip	2.400.107
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	4	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	2.326.660
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.360	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	191.565
		FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	60	Lembaga	30.760
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	160	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	749.926
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	497.413	Orang, Akta, Bidang, Laporan	1.846.338
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2	unit	60.000.000
		UAA Kearsipan	701.483	Dokumen, Arsip	5.795.343
		UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	147	Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	1.547.876
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**185.066.945**
RM 184.301.554	01 Peningkatan manajemen internal yang bersih dan transparan	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	Unit	1.217.298
PNBP 1.765.391		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	23	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	179.247.323
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	112	Unit, m2, Paket	2.947.631

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 087

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.000 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.475.526
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	32 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.178.960

SK No 160637 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 088

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA					639.467.823
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					639.467.823
3 Program	1) CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					19.413.322
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					620.054.501
Program	1) CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN					19.413.322
	PNBP	19.413.322	01 Terwujudnya pelayanan unggul dalam pengelolaan kepegawaian, advokasi, dan pembinaan manajemen ASN strategis	ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	1	Rekomendasi Kebijakan	212.048
			02 Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan kaster ASN berbasis mobilitas talenta	ADE Akreditasi Lembaga	30	Lembaga	500.000
			03 Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel dan mendukung kebijakan berbasis bukti	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3	NSPK	977.737
			04 Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	169.948	Orang, Akta, Bidang, Laporan	13.929.787
				FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.195	Orang	3.793.750
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					620.054.501
	RM	578.612.011	01 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pengendalian internal BKN	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	17	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	578.612.011
	PNBP	4.799.741	02 Terwujudnya meritokrasi dan profesionalitas ASN BKN	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	21	Unit, m2, Paket	41.442.490
	SBSN	36.642.749	03 Terwujudnya digital BKN				
			04 Meningkatnya kapasitas pengelolaan kebijakan dan kearsipan BKN				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)							2.374.938.553
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM							2.374.938.553
3 Program	1) CH	Program Pengawasan Pembangunan							395.535.656
	2) WA	Program Dukungan Manajemen							1.979.402.897
Program	1) CH	Program Pengawasan Pembangunan							395.535.656
	RM		216.154.786	11 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	AAH	Peraturan lainnya	1 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	810.000
	PNBP		55.681.001	12 Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Kedeputian Bidang PIP Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan	AEA	Koordinasi	5 kegiatan	19.599.794
	PLN		120.699.869	21 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.476.751
				22 Meningkatnya Kesadaran K/L di Lingkungan Kedeputian Bidang PIP Bidang Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	692.560
				31 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan	CDT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	1.027.466
				32 Meningkatnya Kesadaran K/L/D di Lingkungan Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	ESD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	84 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.093.067
				41 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	12.824.000

SK No 160635 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	42 Meningkatnya Kesadaran K/L/D di Lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 28.182 Orang	175.656.116
	51 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Akuntan Negara	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 12 Laporan, Layanan	1.169.084
	52 Meningkatnya Kesadaran K/L/BU di Lingkungan Kedeputian Akuntan Negara dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern	FAG Pengawasan Pembangunan 321 Laporan, Layanan	145.803.539
	61 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional Bidang Investigasi	UAG Pengawasan Pembangunan 149 Laporan	35.488.208
	62 Meningkatnya Kesadaran K/L/D/BU di Lingkungan Kedeputian Bidang Investigasi dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern		
	71 Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional di Lingkungan Perwakilan BPKP		
	72 Meningkatnya Kesadaran Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Lingkungan Perwakilan BPKP dalam Melakukan Penguatan Pengendalian Intern		
	81 Meningkatnya Kualitas Dukungan Teknis Pengawasan		
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**			**1.978.402.867**
RM 1.671.074.012	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BPKP	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 99 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	1.546.473.197
PNBP 22.349.035		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2.039 Unit, m2, Paket	389.803.106
PLN 285.979.660		EBC Layanan Manajemen SDM Internal 11.540 Orang, Layanan, Rekomendasi	26.572.468

SK No 160634 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 089
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen Layanan Laporan Rekomendasi	14.467.015

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN					1.400.364.230
2 Fungsi	04	EKONOMI					1.387.814.230
	10	PENDIDIKAN					12.550.000
3 Program	1) EE	Program Perdagangan Luar Negeri					97.980.481
	2) EF	Program Perdagangan Dalam Negeri					37.887.230
	3) WA	Program Dukungan Manajemen					1.264.496.519
Program	1) EE	Program Perdagangan Luar Negeri					97.980.481
	RM	93.293.802	01 Meningkatnya Ekspor Produk Bernilai Tambah Berbasis Kewilayahan serta pengaitan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	ABS Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	9	Rekomendasi Kebijakan	739.854
	PNBP	4.686.679	02 Meningkatnya Efektifitas Kebijakan Perdagangan Luar Negeri	AEH Promosi	5	promosi, Kegiatan	2.350.000
			03 Meningkatnya Akses Pasar Barang dan Jasa Indonesia di Pasar Internasional	BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	700.000	Badan usaha	400.000
			04 Tersedianya Dukungan atas Pengamanan Kebijakan Nasional serta Tata Aturan yang Kondusif Bagi Perdagangan Internasional Indonesia	BCE Penanganan Perkara	1	Perkara	534.453
			05 Tercapainya Efektivitas Implementasi dan Pemahaman Hasil Perundingan Perdagangan Indonesia dengan Negara Mitra FTA	PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	213	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.885.136
			07 Meningkatnya Produk Ekspor yang Berdaya Saing	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	40	Orang	84.082
				PEA Koordinasi	7	kegiatan	80.833
				PEB Forum	3	forum	396.855
				PEC Kerja sama	11	Kesepakatan	2.823.777
				PED Perjanjian	3	perjanjian	1.356.953

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	215 orang	539.000
		PEG	Konferensi dan Event	70 Kegiatan	30.731.514
		PEH	Promosi	48 promosi	34.733.336
		QAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	708.073 Badan usaha	3.327.501
		QCB	Perkara Hukum Lembaga	27 Perkara	574.280
		QCB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	45 Lembaga	225.000
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	30 UMKM	600.000
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	180 Badan usaha	1.761.360
		SCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1.288 Orang	2.878.475
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	158.270
Program **2) EF** **Program Perdagangan Dalam Negeri**					**37.887.230**
RM 22.785.047	01 Meningkatnya Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	AAH	Peraturan lainnya	5 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	182.500
PNBP 15.102.183	02 Meningkatnya Nilai Tambah Perdagangan Jasa	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	12 Rekomendasi Kebijakan	2.344.088
	03 Meningkatnya Penetrasi Produk Dalam Negeri	AGA	Perizinan Produk	169 Produk	264.958
	06 Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	ACB	Perizinan Masyarakat	500 Orang	24.250
	06 Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran	ACD	Perizinan Lembaga	503 Institusi, Badan Usaha, Lembaga	144.980
	07 Meningkatnya Integrasi Perdagangan Domestik	ADC	Sertifikasi Produk	14.002 produk	3.937.989
	08 Meningkatnya Hasil Pembinaan Usaha dan Pelaku Usaha Perdagangan	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	230 Orang	150.548

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	09 Meningkatnya Kinerja Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas yang tangguh dan berkelanjutan	AEA	Koordinasi	4 kegiatan	238.736
	11 Pengembangan Upaya Perlindungan Konsumen yang Efektif	AEC	Kerja sama	1 Kesepakatan	152.000
	12 Meningkatnya Ketahanan Pasar Dalam Negeri terhadap Lonjakan Impor, Barang Dumping, dan Barang Mengandung Subsidi	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1.000 orang	400.000
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	50.000
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	100 Orang, Akta, Bidang, Laporan	380.000
		BBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	6 Orang	131.250
		BCB	Perkara Hukum Lembaga	5 Perkara	131.250
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7 Lembaga	282.000
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7 Lembaga	296.875
		BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	46 Badan Usaha	625.000
		BJA	Penyidikan dan Pengujian Produk	85 Produk	1.516.774
		BMA	Data dan Informasi Publik	9 dokumen, Peta, Data	67.410
		CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	4 Unit	2.785.490
		COH	DP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	177 Unit	2.957.950
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	89.490
		PSB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	867.332
		PDC	Sertifikasi Produk	7.500 produk	1.323.280
		PEA	Koordinasi	4 kegiatan	397.590

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				PEB Forum	3	forum	791.385
				PEF Sosialisasi dan Diseminasi	190	orang	76.000
				PEH Promosi	1	promosi	1.479.349
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	263	Lembaga	1.985.571
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.655	Orang	1.016.800
				QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	480	UMKM	745.920
				QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	360	Badan usaha	751.680
				QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	4.884	Produk	3.299.885
				QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	79	Lembaga	1.093.380
				QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	200	Badan Usaha	529.484
				QJA Penyidikan dan Pengujian Produk	3.750	Produk	2.000.000
				QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	3.275.065
				RAH Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	1	Unit	500.000
				RCH OP Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	2	Unit	566.885
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	90.000
Program	**9) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**1.264.496.619**
	RM	1.239.755.485	01 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	16	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.529.500
	PNBP	24.741.034	02 Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	ABC Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	470.000
			04 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	130	Orang	165.680
			05 Meningkatnya Profesionalisme ASN Perdagangan	AEA Koordinasi	9	kegiatan	2.269.175

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	06 Meningkatnya Kualitas Rekomendasi Kebijakan Perdagangan	AEC	Kerja sama	7 Kesepakatan	237.866
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	250 orang	100.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7 layanan	5.700.000
		BDC	Fasilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Orang	5.366
		BMA	Data dan Informasi Publik	14 dokumen, Peta, Data	1.393.664
		BMB	Komunikasi Publik	1 layanan	743.681
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	167 Unit	4.564.936
		CBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	25 unit	1.485.000
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.237 Unit	9.321.290
		CCL	OP Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	2 unit	7.562.977
		CCB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	1 Purwarupa	22.440
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	155 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.193.045.297
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	48 Unit, m2, Paket	2.867.980
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4.464 Orang, Layanan, Rekomendasi	6.960.602
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	131 Layanan, Rekomendasi	9.737.051
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	20 Sistem Informasi	13.511.930
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	407 Orang	643.926
		SBA	Pendidikan Tinggi	260 Orang	1.000.009

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 090

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem informasi	45.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				1.156.000.000
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM				357.550.000
	09	PARIWISATA				554.637.267
	10	PENDIDIKAN				243.812.733
3 Program	1) DA	Program Keolahragaan				741.950.000
	2) DB	Program Kepemudaan				56.500.000
	3) WA	Program Dukungan Manajemen				357.550.000
Program	1) DA	Program Keolahragaan				741.950.000
	RM	708.950.000	01 Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga	AEA Koordinasi	6 kegiatan	1.614.477
	BLU	33.000.000	02 Pertumbuhan klim industri olahraga nasional	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK	2.707.096
			03 Meningkatnya Berprestasi Olahraga Tingkat Regional dan Internasional	BAH Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	11.699.095
				BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	21 Lembaga	534.001
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100 Orang	1.900.000
				BEI Bantuan Lembaga	5 Lembaga	2.057.600
				BMA Data dan Informasi Publik	2 dokumen, Peta, Data	2
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.581.476
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	20 Unit, m2, Paket	4.911.145
				EBC Layanan Manajemen Kinerja Internal	2 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	12.808.284
				PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	13 Rekomendasi Kebijakan	7.461.356

SK No 160676 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.000	Orang	21.000.000
		PEA Koordinasi	32	kegiatan	5.185.869
		PEC Kerja sama	1	Kewepelatan	3.000.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	12.254.744
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	148	Lembaga	22.474.587
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	21.288	Orang	476.046.612
		QEA Bantuan Masyarakat	10	Orang	2.000.000
		QEI Bantuan Lembaga	406	Lembaga	150.713.756
Program **2) DB Program Kepemudaan**					**56.500.000**
RM 56.500.000	01 Meningkatnya kualitas hidup generasi pemuda dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemuda, Kesehatan Pemuda, Ketenagakerjaan Layak Pemuda, Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Layanan	1.410.340
		PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	4	Rekomendasi Kebijakan	594.000
		PEA Koordinasi	32	kegiatan	16.374.106
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	15	Lembaga	4.156.505
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6.577	Orang	24.577.769
		QEI Bantuan Lembaga	40	Lembaga	7.364.780
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Layanan	22.500
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**357.550.000**
RM 357.550.000	01 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	AAH Peraturan lainnya	10	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	138.600

SK No 160675 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 092

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	02 Meningkatnya kualitas kebijakan strategis bidang Pemuda dan Olahraga	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	147.124
		AEA	Koordinasi	3 kegiatan	361.600
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	685.569
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	231.641
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	323.350.182
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.429 Unit, m2, Paket	3.000.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	4 Orang, Layanan, Rekomendasi	9.755.920
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	15.802.369
		FAA	Kearsipan	200 Arsip	1.156.961
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	22 Sistem Informasi	20.000
		PAC	Peraturan Pemerintah	2 PP, RPP	400.000
		PAD	Peraturan Presiden	3 PerPres, R Perpres	600.000
		PAG	Peraturan Menteri	6 PerMen, Pleno	800.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 093

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)					1.581.860.853
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					1.581.860.853
3 Program	1) BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi					329.770.836
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					1.252.089.817
Program	1) BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi					329.770.836
	RM	329.770.836	06 Meningkatnya Integritas Sistem dalam Penyelenggaraan Pemerintahan_01	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	825 Orang, Sertifikat	3.502.108
			07 Meningkatnya Efektivitas Penerapan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan_02	AEA	Koordinasi	14 kegiatan	7.162.611
			08 Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi_03	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	200.000 orang	10.473.260
			09 Menguatnya Nilai Antikorupsi Masyarakat_04	BCE	Penanganan Perkara	560 Perkara	104.972.868
			10 Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penindakan Pidana Korupsi_05	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6.799 Orang	5.791.170
			11 Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi, dan Analisis Informasi untuk Penindakan Tindak Pidana Korupsi_06	BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	400.320 Orang, Kelompok Masyarakat	3.119.704
			12 Terwujudnya Digitalisasi Pemberantasan Korupsi Berbasis Data dan Pendekatan Kolaboratif_07	BMA	Data dan Informasi Publik	11 dokumen, Peta, Data	2.086.500
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit	53.868.156
				CBR	Dukungan Teknis	2 Dokumen	2.176.664
				DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	10.000 Orang	962.547

SK No 160673 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 093
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi	10.260.000
		FAC Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.734 Laporan, Layanan	69.638.125
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.328.595
		FBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	25 Desa, DesaKelurahan	614.701
		PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4 Rekomendasi Kebijakan	5.970.594
		PBQ Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	12.289.980 orang	21.609.960
		QCE Penanganan Perkara	8 Perkara	8.020.000
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	88 Lembaga, Unit Kerja, Tim	2.200.773
		RBR Dukungan Teknis	2 Dokumen	1.348.250
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi	4.963.150
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.575 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	6.000.000
		UAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan, Layanan	500.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**				**1.252.089.817**
RM 1.252.089.817	09 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan, Tata Kelola Aset, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kearsipan_01	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.988 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.218.033.443
	10 Terjaganya Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal dan Integritas KPK_02	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13 Unit, m2, Paket	13.939.784
	11 Meningkatnya Optimalisasi Manajemen Kepegawaian KPK_03	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	3.982 Orang, Layanan, Rekomendasi	12.865.626
	12 Menguatnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK_04	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	39 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.647.471

SK No 160672 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 093
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	13 Meningkatnya Efektivitas Reformasi Hukum KPK_05	PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan Kajian	3.843.493

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 095
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)					1.800.000.000
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					1.800.000.000
3 Program	1) CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan					1.082.240.817
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					717.759.183
Program	1) CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan					1.082.240.817
	RM	1.082.240.817	01 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian legislasi RUU	AAA	Undang-Undang	19 UU, RUU	87.042.113
			02 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	AAH	Peraturan lainnya	3 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	3.895.250
			03 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian pertimbangan atas RUU mengenai APBN dan RUU lainnya	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	5 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.929.155
			04 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	ABC	Kebijakan Bidang Politik	80 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	58.762.550
			05 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4 Rekomendasi Kebijakan	13.893.766
			06 Tersedianya dukungan bahan dan keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Renperda dan Perda sesuai ASMASDA	AEA	Koordinasi	52 kegiatan	93.385.013
				AEC	Kerja sama	3 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	8.779.328
				BLA	Persidangan Lembaga Legislatif	1 sidang	4.456.232
				BMA	Data dan Informasi Publik	12 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.569.521

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 095
KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		BMB Komunikasi Publik	12 layanan, legislasi, Media, Orang, Volume	794.389.056
		PBC Kebijakan Bidang Politik	17 Rekomendasi Kebijakan, Kajian,	6.539.831
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**717.759.163**
RM 717.759.163	01 Terselenggaranya sistem dan tata kelola internal pada sekretariat jenderal DPD RI	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	714.759.763
		SCA Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	456 Orang	399.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem Informasi	2.600.400

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 100

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA					196.253.154
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					196.253.154
3 Program	1) BH	Program Penegakan Integritas Hakim					39.232.241
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					156.020.913
Program	1) BH	Program Penegakan Integritas Hakim					39.232.241
	RN	39.232.241	01 Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	40 Orang	7.302.724
			02 Menguatkan Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	AEA	Koordinasi	34 kegiatan	2.173.356
			03 Menguatkan Sistem Rekam Jejak Hakim	BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2.485 Orang, Laporan	16.083.859
				PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	620 Orang	8.864.200
				QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	4 Orang, Laporan	3.208.102
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					156.020.913
	RN	156.020.913	01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	136 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	126.269.671
			02 Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6 Unit, m2, Paket	3.960.000
			03 Meningkatkan Kualitas Hasil Kajian, Layanan Informasi, dan Fasilitasi JFPK	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	730 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.389.637
				EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	167 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	11.866.605

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 100
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	505.000
		TSD Layanan Manajemen Kinerja Internal	8 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	10.719.600

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 103

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)				490.962.957
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN				490.962.957
3 Program	1) FA	Program Ketahanan Bencana				250.000.000
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				240.962.957
Program	1) FA	Program Ketahanan Bencana				250.000.000
RM 250.000.000			01 Meningkatnya Sinkronisasi Pengembangan Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Terpadu dan Inovatif	GEE Bantuan Kebencanaan	30 Paket	250.000.000
			02 Meningkatnya kualitas masyarakat yang Tangguh terhadap bencana di kawasan berisiko bencana			
			03 Meningkatnya manajemen penanganan darurat saat kejadian bencana			
			04 Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor			
			05 Meningkatnya ketahanan logistik dan peralatan yang berkelanjutan dalam mendukung penanggulangan bencana berdasarkan wilayah			
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen				240.962.957
RM 238.327.057			01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Profesional, Akuntabel dan Transparan	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	188 Orang, Sertifikat	423.000
PNBP 1.635.900			02 Meningkatnya Pengawasan yang Akuntabel dan Transparan	DGK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	400 Orang, Kegiatan	1.035.000
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	239.327.057

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 103
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	94 Orang, K/L, Daerah, Unit Kerja	177.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME		KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	104	KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA							548.336.168
2 Fungsi	04	EKONOMI							546.336.168
3 Program	1) DP	Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia							69.786.167
	2) WA	Program Dukungan Manajemen							476.550.001
Program	1) DP	Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia							69.786.167
	RM		57.266.167	09	Meningkatnya Promosi, Penempatan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	ACD	Perizinan Lembaga	25 Institusi, Badan Usaha, Lembaga	462.725
	PNBP		2.520.000	10	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal yang Efisien dan Transparan berbasis Transformasi Digital	ACD	Standarisasi Lembaga	10 Lembaga	621.514
						AEA	Koordinasi	8 kegiatan	2.657.200
						AEC	Kerja sama	1 Kesepakatan	414.485
						AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	6.019 orang	2.000.496
						AEH	Promosi	1 promosi	148.475
						AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	24 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.054.637
						BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	30.106 Orang, Akta, Keping, Bidang	4.280.099
						BAH	Pelayanan Publik Lainnya	33 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, lbk	2.662.995

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 104

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	75	Lembaga	616.760
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	45	Lembaga	371.625
		BMA Data dan Informasi Publik	3	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	680.060
		DCO Pelatihan Vokasi	276	Orang	567.015
		PEA Koordinasi	1	kegiatan	64.950
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	260.517	Orang, Akta, Keping, Bidang	51.930.140
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen** RM 476.550.001	01 Meningkatnya efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan				**476.550.001**
		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	8.400	orang	2.400.000
		BMA Data dan Informasi Publik	2	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.847.180
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14	Unit	353.990
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	77	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	464.756.955
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	75	Unit, m2, Paket	1.652.544
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	200	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.192.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	141	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.700.612
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	634.720

SK No 160662 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 106

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**106**	**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)**				**216.286.954**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**				**216.286.954**
3 Program	**1) CJ**	**Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional**				**78.127.488**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**138.139.466**
Program	**1) CJ**	**Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional**				**78.127.488**
	RM	78.127.488	01 Meningkatnya kinerja pengadaan melalui transformasi digital	AAC Peraturan Pemerintah	1 PP, RPP	520.000
			02 Meningkatnya dukungan pengadaan terhadap arah pembangunan nasional	AAH Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	400.000
			03 Meningkatnya kualitas kepatuhan pelaksanaan pengadaan	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.810.255
			04 Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ	ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	2 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	344.000
			05 Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ	ADD Standardisasi Lembaga	5 Lembaga, Unit Kerja	217.000
			06 Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan	ADE Akreditasi Lembaga	4 Lembaga	400.000
				ADG Standardisasi Profesi dan SDM	145 Orang	1.230.000
				ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	4.732 Orang, Sertifikat	2.115.557
				AEA Koordinasi	186 kegiatan	1.530.002
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	41 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	1.633.240

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 106
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.000.000
		BCE	Penanganan Perkara	1.005 Perkara, Berkas Perkara	2.953.783
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	16 Lembaga, Unit Kerja, Tim	1.750.000
		BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	200.000 Produk	3.709.723
		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	5 Paket, Unit, m2	700.000
		CCL	Dll Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	196 Unit	305.000
		DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	12.600 Orang, Kegiatan	6.106.551
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	20.486.560
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	17 Laporan, Rekomendasi	4.083.109
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	244 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	5.344.432
		PAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	383.508
		PDL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan	2.049.300
		PDA	Standarisasi Produk	4 produk	529.994
		PDE	Akreditasi Lembaga	35 Lembaga, Unit Kerja	2.200.000
		PDG	Standarisasi Profesi dan SDM	550 Orang	1.000.000
		PEC	Kerja sama	8 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.257.272
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5 Lembaga	628.198



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 106

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	450	Orang	776.864
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	2.000	UMKM	4.647.230
		SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	400	Orang, Kegiatan	707.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	1.500.000
		UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	30	Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	1.346.910
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	18	Desa, Desa/Kelurahan	4.920.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**138.139.466**
RM 138.139.466	01 Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP	ABC Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	3	Rekomendasi Kebijakan	392.562
		BMA Data dan Informasi Publik	1	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.051.610
		CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	16	Unit	5.153.239
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	28	Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	120.271.770
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	84	Unit, m2, Paket	1.000.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	4	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.855.976
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	46	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.145.704
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	5	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	2.268.605

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	107	BADAN SAR NASIONAL					1.553.675.969
2 Fungsi	04	EKONOMI					1.553.675.969
3 Program	1) BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana					685.185.536
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					868.490.433
Program	1) BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana					685.185.536
	RM	684.341.696	01 Meningkatnya kualitas SDM tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	AEA Koordinasi	101	kegiatan	4.729.637
	PNBP	843.840	02 Meningkatnya kualitas SDM potensi pencarian dan pertolongan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.289.702
			03 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	10.510
			04 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	765	Orang	3.707.000
			05 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2	Kelompok Masyarakat	719.037
			06 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	BHC Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	3	operasi	2.500.000
				BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	231	laporan	22.163.057
				CAP Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	500	Unit	150.000
				DCK Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	330	Orang, Kegiatan	28.868.848

SK No 160700 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	46.937
		PEA	Koordinasi	4 kegiatan	700.000
		GDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Maeyarakat	2 Kelompok Masyarakat	2.650.000
		QHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	46 operasi	50.328.224
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	20.000.000
		RAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	1 Unit	27.000.000
		RBH	Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	1 unit, Kawasan	5.000.000
		RCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	128 Unit	76.286.481
		RCM	OM Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	2.548 Unit	433.166.835
		RDH	OM Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	116 unit, Pos	3.465.676
		SCK	Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana	3 Orang	1.400.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**868.490.433**
RM 868.490.433	01 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	AEC	Kerja sama	10 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.394.130
	02 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	372 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	841.076.948

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 107

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	03 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	819 Unit, m2, Paket	13.181.480
	04 Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	31 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.910.899
	05 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	176 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	8.826.966
	06 Meningkatnya kualitas pengawasan intern			

SK No 160698 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 108
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**108**	**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**					**163.498.893**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**163.498.893**
3 Program	**1) EG**	**Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan**					**56.316.893**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**107.182.000**
Program	**1) EG**	**Program Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan**					**56.316.893**
	RM	53.164.057	01 Mewujudkan advokasi kebijakan persaingan usaha dan kemitraan yang sehat	AEB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	14	Rekomendasi Kebijakan	1.772.000
	PNBP	3.152.836	02 Mewujudkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang sehat	BCE Penanganan Perkara	16	Perkara	2.042.000
				FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.496.000
				PBB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	27	Rekomendasi Kebijakan	8.387.000
				PEA Koordinasi	1	kegiatan	500.000
				PEB Forum	3	forum	750.000
				PEF Sosialisasi dan Diseminasi	5.681	orang	1.681.000
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	19	layanan	2.200.000
				QCE Penanganan Perkara	186	Perkara	32.072.893
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4	Lembaga	380.000
				QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	4	Badan Usaha	400.000
				QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	34	Badan Usaha	4.400.000
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	316.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 108

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**107.182.000**
	RM	99.334.838	C2 Mewujudkan kapasitas dan kapabilitas kinerja layanan birokrasi	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	44 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	91.585.000
	PNBP	7.847.162		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	51 Unit, m2, Paket	5.000.000
				EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	329 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.595.000
				EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	69 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.002.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 110

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA					251.978.173
2 Fungsi 01 PELAYANAN UMUM					251.978.173
3 Program 1) CQ Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik					37.022.541
2) WA Program Dukungan Manajemen					214.955.632
Program 1) CQ Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik					37.022.541
RM 37.022.541	01 Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	1 Rekomendasi Kebijakan	10.000
		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	2 Orang, Akta, Bidang, Laporan	60.000
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, tbk	250.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2 Lembaga, Unit Kerja, Tim	20.000
		BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	10.000
		BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	10.000
		BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	10.000
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Layanan	50.000
		QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	7.875 Orang, Akta, Bidang, Laporan	23.739.278
		QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	85 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.419.585

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 110
KEMENTERIAN/LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		GE Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	552 Pemerintah Daerah	11.444.675
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**214.955.632**
RM 214.955.632	01 Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	AEC Kerja sama	1 Kesepakatan	10.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	213.524.589
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11 Unit, m2, Paket	201.043
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	386 Orang, Layanan, Rekomendasi	510.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	5 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	60.000
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul, Aplikasi, Layanan	650.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 111
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)					469.610.875
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					469.610.875
3 Program	1) AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan					35.261.008
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					434.349.867
Program	1) AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan					35.261.008
	RM	35.261.008	01 Meningkatnya Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Laut dan Udara serta Lintas Batas Negara	ABE	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	10 Rekomendasi Kebijakan	1.809.736
			02 Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan berbasis Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	17 Rekomendasi Kebijakan	5.462.997
			03 Meningkatnya pemerataan pembangunan, sarana dan prasarana infrastruktur layanan dasar serta layanan pemerintahan di kawasan perbatasan negara	AEA	Koordinasi	28 kegiatan	12.862.048
				BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	140 Orang	1.186.435
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	49 Laporan, Layanan	11.196.791
				PEA	Koordinasi	1 kegiatan	740.000
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100 Orang	1.000.000
				UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	75 Orang	1.004.000
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					434.349.867
	RM	434.349.867	01 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Setiap BNPP	AEC	Kerja sama	2 Kesepakatan	1.400.000
			02 Meningkatnya kapabilitas Setiap BNPP	AEG	Konferensi dan Event	1 Kegiatan	530.000

SK No 160693 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 111
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	03 Meningkatnya kualitas pelayanan Setbap BNPP	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	10 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	212.225.867
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.759 Unit, m2, Paket	211.500.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.016 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.000.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	17 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.664.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA				SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**112**	**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)**					**2.527.948.530**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**2.527.948.530**
3 Program	**1) EH**	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**					**1.428.920.479**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**1.099.028.051**
Program	**1) EH**	**Program Pengembangan Kawasan Strategis**					**1.428.920.479**
	BLU		1.348.920.479	01 Meningkatnya efektivitas promosi dan kualitas realisasi investasi	ABA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.528.260
	RM		80.000.000	02 Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan, pesisir, dan reklamasi di KPBPB Batam	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.917.321
				03 Meningkatnya kualitas penyediaan infrastruktur	ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	2.489.142
				04 Meningkatnya kualitas pelayanan umum BP Batam	ACD Perizinan Lembaga	3 Institusi, Badan Usaha Lembaga	894.625
				05 Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan bandara, kepelabuhanan, dan lalu lintas barang	AEH Promosi	18 promosi	12.534.408
					BAH Pelayanan Publik Lainnya	11 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	81.068.638
					BDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	2 Industri	3.486.453
					BHC Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	1 operasi	606.121
					BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	6 Layanan	15.060.670
					BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	10 Badan Usaha	1.446.494

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAB	Sarana Bidang Keselmatan	2 Paket, Unit	6.035.000
		CAD	Sarana Bidang Konektivitas Udara	4 Unit, Paket	587.646
		CAE	Sarana Bidang Konektivitas Laut	3 Unit	763.650
		CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3 Unit	16.210.295
		CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	8 Unit, Hektar	65.861.340
		CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	2 unit, Hektar	4.700.000
		CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	12 km	208.977.932
		CBE	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1 unit	3.115.000
		CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	8 unit	123.462.404
		CBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 unit	13.000.000
		CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	2.800 bidang, hektar	59.331.452
		CBR	Dukungan Teknis	15 Dokumen	18.329.568
		CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	3 Unit	33.250.000
		CCB	OP Sarana Bidang Keselmatan	14 Paket, Unit	154.160.672
		CCD	OP Sarana Bidang Konektivitas Udara	5 Unit, Paket	9.648.904
		CCE	OP Sarana Bidang Konektivitas Laut	7 Unit	31.653.014
		CCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4 Unit	12.818.563
		CCI	OP Sarana Pengembangan Kawasan	1 Unit	11.312.348



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CDB	OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	5 unit, Hektar	12.095.884
		CDC	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	15 km	73.193.843
		CDD	OM Prasarana Bidang Konektivitas Laut	47 unit	34.092.528
		CDE	OP Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1 unit	2.511.485
		CDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	33 unit	98.053.357
		CDK	OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8 unit	24.935.516
		CDN	OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	4 unit	4.697.582
		CDO	OP Prasarana Pengembangan Kawasan	4 bidang, Hektar	5.647.782
		CDV	OP Prasarana Bidang Kesehatan	2 Unit	7.400.000
		FAA	Kearsipan	4 Arsip	983.004
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi	6.202.868
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11 Laporan, Layanan	1.778.340
		FAG	Pengawasan Pembangunan	4 Laporan, Layanan	8.697.095
		RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	8 km	244.362.447
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**1.099.028.051**
BLU 1.099.028.051	01 Meningkatnya kualitas kebijakan dan perizinan BP Batam	ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2 Rekomendasi Kebijakan	905.170
	02 Meningkatnya kualitas pengelolaan internal BP Batam	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	5 Rekomendasi Kebijakan	1.282.435
		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan	1.436.460

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 112

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BMA	Data dan Informasi Publik	5 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.701.161
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	44.249.536
		CBR	Dukungan Teknis	20 Dokumen	46.348.592
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	40 Unit	32.971.732
		CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3 Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik Lokasi	1.756.574
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	32 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	910.963.843
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	703 Unit, m2, Paket	16.392.547
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2 Orang, Layanan, Rekomendasi	24.774.410
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	33 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	13.578.528
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	11 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	3.667.013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 113

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)					1.719.777.488
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					1.719.777.488
3 Program	1) BA	Program Penanggulangan Terorisme					1.435.049.128
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					284.728.360
Program	1) BA	Program Penanggulangan Terorisme					1.435.049.128
	RM	3.819.400	01 Menurunnya Potensi Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	AEA	Koordinasi	1 kegiatan	779.400
	PLN	1.431.229.728	02 Menurunnya tindak pidana terorisme di Indonesia	CCL	CP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Unit	3.040.000
			03 Menurunnya dampak kerugian akibat tindak pidana terorisme	RAF	Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Unit, Paket	1.431.229.728
			04 Terselenggaranya kerjasama internasional terkait penanggulangan terorisme di tingkat bilateral, regional dan multilateral serta penguatan penegakan hukum internasional, dan perlindungan WNI dan BHI dari ancaman terorisme di luar negeri				
			05 Meningkatnya jumlah jaringan terorisme yang berhasil diungkap				
			06 Tersedianya informasi intelijen jaringan terorisme yang tepat dan dapat reliabel				
			07 Meningkatnya kesiapan aparat pemerintah mengantisipasi tindak pidana terorisme				
			09 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme				
			10 Terkendalinya situasi keamanan saat kejahatan terorisme terjadi				

SK No 160687 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 113
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
			11 Terlindunginya Apgakum dalam menangani tindak pidana terorisme terorisme			
			12 Meningkatnya jumlah korban terorisme yang berhasil dipulihkan			
			13 Meningkatnya jumlah masyarakat terpapar yang berhasil dideradikalisasi			
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**284.728.380**
	RM	164.063.489	01 Tersedianya regulasi penanggulangan terorisme berbasis penelitian	CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	60 Unit	1.258.574
	SBSN	120.664.891	02 Terwujudnya reformasi birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	162.804.595
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit, m2, Paket	120.664.891

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 115
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM				2.472.934.469
2 Fungsi	01 PELAYANAN UMUM				2.472.934.469
3 Program	1) CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				42.657.837
	2) WA Program Dukungan Manajemen				2.430.276.632
Program	1) CQ Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum				42.657.837
	RM 42.657.837	01 Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas	ABC Kebijakan Bidang Politik	16 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.523.837
		02 Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih	AEC Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	20.000
		03 Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel	BAH Pelayanan Publik Lainnya	554 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, tibik	80.000
		04 Terwujudnya sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	31.994.000
		05 Terbangunnya sistem teknologi informasi kepemiluan Bawaslu	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	42 Lembaga, Unit Kerja, Tim	3.500.000
		06 Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	553 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	2.440.000
		07 Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	UAB Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	1.100.000
		08 Terwujudnya kolaborasi Pengawasan netralitas ASN/TNI/Polri pada Kementerian/Lembaga, penyelenggara negara, dan kepala desa/perangkat desa			
Program	2) WA Program Dukungan Manajemen				2.430.276.632

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 115

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
RM	2.430.276.632	01 Terwujudnya peningkatan profesionalitas pegawai	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.649	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.429.736.632
		02 Terwujudnya kajian ilmiah dalam mendukung Pengawasan Pemilu inovatif dan akuntabel	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.001	Orang, Layanan, Rekomendasi	130.000
		03 Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	6	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	410.000
		04 Terwujudnya ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif				
		05 Terwujudnya tata kelola hukum pengawasan pemilu yang tertekur, transparan, dan berkelanjutan				
		06 Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan yang akuntabel				
		07 Terwujudnya layanan BMN yang akuntabel				
		08 Terwujudnya tingkat kematangan UKPBJ Bawaslu				
		09 Terwujudnya keselarasan antara Renstra K/L dan Renja K/L pada Sasaran Strategis, dan/atau Sasaran Program, dan/atau Sasaran Kegiatan				
		10 Terwujudnya perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan capaian kinerja internal yang tepat sasaran dan berorientasi hasil				
		11 Terwujudnya pencapaian kinerja pada unit kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
		12 Terwujudnya pencapaian kinerja proyek prioritas sesuai dengan RPJMN/RKP				
		13 Terwujudnya pengawasan arsip statis dan dinamis di Bawaslu				
		14 Terwujudnya Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi				

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 115

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	15 Meningkatnya tindak lanjut Areas of Improvement dan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP 16 Terwujudnya penjaminan tindak lanjut pengaduan masyarakat 17 Terwujudnya peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja 18 Terwujudnya hasil pemeriksaan Pengawasan yang bernilai tambah 19 Terwujudnya peran APIP yang efektif 20 Terwujudnya pengelolaan keamanan siber yang optimal dan berfungsi secara menyeluruh 21 Terwujudnya tata kelola data dan informasi Kepemiluan Bawaslu 22 Terwujudnya pengelolaan data Pengawasan Kepemiluan yang berkualitas, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan pengguna 23 Terwujudnya pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 24 Terwujudnya layanan kehumasan, website, dan media massa		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 116

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA				997.705.955
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM				997.705.955
3 Program	1) GC	Program Penyiaran Publik				15.868.345
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				981.837.610
Program	1) GC	Program Penyiaran Publik				15.868.345
PNBP 15.868.345			01 Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi konten	ABC Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.208.148
			02 Meningkatnya Relevansi Program Siaran dengan Prioritas Nasional	AEC Kerja sama	2 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	1.068.100
			03 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penyiaran	BMA Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.600.649
			04 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Promosi Program Siaran yang Selaras dengan Prioritas Nasional	QAH Pelayanan Publik Lainnya	1 layanan	1.747.548
				QMA Data dan Informasi Publik	847 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	9.243.900
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen				981.837.610
RM 981.837.610			01 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan LPP RRI yang Responsif, Efektif, Efisien, Adaptif, Kolaboratif dan Berintegritas serta Akuntabel dalam Penerapan Reformasi Birokrasi	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	108 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	981.837.610
			02 Meningkatnya Kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 117

KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA					1.159.703.080
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					1.159.703.080
3 Program	1) GC	Program Penyiaran Publik					183.986.881
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					975.716.179
Program	1) GC	Program Penyiaran Publik					183.986.881
	RM	122.453.125	01 Meningkatkan Kualitas Program Siaran Dan Multiplatform yang Meliputi Siaran Nasional, Siaran Olahraga, Siaran Internasional Dan Media Baru yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Indonesia Maupun Masyarakat Global	AEC Kerja sama	103 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan		6.626.045
	PNBP	61.533.756	02 Meningkatnya Konten yang Berkualitas, Cepat, dan Menarik dalam Multiplatform LPP TVRI	BAH Pelayanan Publik Lainnya	102 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		58.318.922
			03 Meningkatnya Partisipasi Publik Dan Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Penyelenggaraan Public Service Media	CBR Dukungan Teknis	6 Dokumen		7.738.594
			04 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Peralatan teknik dan Jangkauan Penyiaran	CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	477 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi		6.471.933
			05 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Bertalenta Digital	CDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	214 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi		2.021.516
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		238.996
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	6 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik		58.427.595
				RBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	66 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi		29.693.000
				RDS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi		13.200.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 117
KEMENTERIAN/LEMBAGA : TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
Program	**2) WA Program Dukungan Manajemen**				**975.716.179**
	RM 967.052.707	01 Terciptanya Transformasi Birokrasi Digital	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	34 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	967.143.087
	PNBP 9.663.472	02 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Bertalenta Digital	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13 Unit, m2, Paket	7.779.071
		03 Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	EBC Layanan Manajemen BDM Internal	832 Orang, Layanan, Rekomendasi	794.021

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 119

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)					36.475.743
2 Fungsi	04	EKONOMI					36.475.743
3 Program	1) EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis					5.258.545
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					31.216.198
Program	1) EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis					5.258.545
	BLU	5.258.545	01 Peningkatan Pengembangan Kawasan Strategis KPBPB Sabang	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	2	Rekomendasi Kebijakan	93.258
			05 Meningkatnya daya saing dan investasi Pelabuhan	ADF Sertifikasi Lembaga	1	Lembaga, Badan Usaha	100.000
				AEC Kerja sama	1	Kesepakatan	75.000
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	30	layanan	91.800
				COE OP Sarana Bidang Konektivitas Laut	3	Unit	183.000
				COI OP Sarana Pengembangan Kawasan	2	Unit	179.000
				RAI Sarana Pengembangan Kawasan	1	Unit	1.890.286
				ROO OP Prasarana Bidang Konektivitas Laut	1	unit	2.647.201
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					31.216.198
	RM	24.800.173	01 Peningkatan Kualitas Kelembagaan BPKS dalam Pengusahaan Kawasan Sabang	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	30.716.198
	BLU	6.416.025		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	500.000

SK No 160724 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 119
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	119	BADAN KEAMANAN LAUT				1.751.987.893
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN				1.751.987.893
3 Program	1) BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia				1.504.902.934
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				247.084.959
Program	1) BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia				1.504.902.934
	SBSN	271.556.855	01 Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia	CCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	8 Unit, Paket	5.681.273
	RM	140.741.113	02 Meningkatnya kualitas kebijakan keamanan dan keselamatan laut	RAF Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	1 Unit, Paket	1.092.605.166
	PLN	1.092.605.166	03 Meningkatnya kapasitas sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi	RSM Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	18 unit	271.556.855
			04 Meningkatnya Kualitas Regulasi dan Penanganan Pelanggaran Keamanan dan Keselamatan Laut	RCF OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	6 Unit, Paket	135.079.840
			05 Meningkatnya Partisipasi aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim di forum bilateral maupun multilateral			
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen				247.084.959
	RM	247.084.959	01 Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis Konsep Operasi Keamanan Laut	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	247.084.959

SK No 160723 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 119

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	02 Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan Kinerja tinggi, efektif dan efisien 03 Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Bakamla RI yang akuntabel dan profesional 04 Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 122

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA					384.862.022
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					384.862.022
3 Program	1) AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila					194.885.000
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					189.977.022
Program	1) AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila					194.885.000
	RM	194.885.000	01 Terwujudnya Penguatan Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi dan Pembudayaan Ideologi Pancasila yang Efektif	ABC Kebijakan Bidang Politik	9	Rekomendasi Kebijakan	5.700.000
			02 Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Dan Pengawasan Regulasi, Serta Advokasi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila yang Efektif	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	9	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
			03 Terwujudnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi yang Efektif	ABN Kebijakan Bidang Sosial	15	Rekomendasi Kebijakan	8.173.226
			04 Terwujudnya Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Komprehensif	AEG Konferensi dan Event	3	Kegatan	2.500.000
			05 Terwujudnya Pengukuran dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang Efektif	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7	NSPK	2.000.000
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	16.000	Orang	35.000.000
				PBC Kebijakan Bidang Politik	4	Rekomendasi Kebijakan	13.224.979
				PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	14	Rekomendasi Kebijakan	11.321.267
				PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	2	Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
				PBN Kebijakan Bidang Sosial	5	Rekomendasi Kebijakan	5.294.726

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 122

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PDE	Akreditasi Lembaga	10 Lembaga	1.955.500
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	315 Orang	5.000.000
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1.020.000 orang	41.500.000
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	6.903 Orang	38.000.000
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	4.000.000
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	6.984 Orang	12.175.202
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**189.977.022**
RM 189.977.022	01 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan BerAKHLAK dan Pelayanan Prima Berbasis Elektronik	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	176.450.022
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	963 Unit, m2, Paket	2.000.000
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	536 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.550.000
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.977.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 123

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN					269.222.211
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					269.222.211
3 Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					122.213.277
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					137.008.934
Program	1) BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					122.213.277
	RM	122.213.277	01 Meningkatnya aksesibilitas layanan perlindungan saksi dan korban	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	9.790 Orang, Akta, Bidang, Laporan	60.423.250
			02 Terpenuhinya hak-hak saksi dan korban yang berorientasi keadilan	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	13.729 layanan	58.726.977
				PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAN	3 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000
				QMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.563.050
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					137.008.934
	RM	137.008.934	01 Terwujudnya tata kelola perlindungan saksi dan korban	AEA	Koordinasi	3 kegiatan	100.000
			02 Terwujudnya transformasi tata kelola kelembagaan LPSK secara menyeluruh	AEC	Kerja sama	3 Kesepakatan	615.000
				AED	Perjanjian	1 perjanjian	50.000
				AEE	Kemitraan	1 Kesepakatan	92.200
				CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	500 Unit	150.000
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	129.851.960

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 123
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3 Unit, m2, Paket	100.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	391 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.401.466
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	22 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.648.088

SK No 160718 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 124
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL					6.144.562.191
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					6.116.596.881
	10	PENDIDIKAN					27.966.310
3 Program	1) KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					2.269.753.395
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					3.874.808.796
Program	1) KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					2.269.753.395
	RM	1.635.588.740	01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Riset dan Inovasi	CBR	Dukungan Teknis	1 Dokumen	1.000.000
	PNBP	230.938.729	02 Peningkatan Kualitas Hasil Riset dan Inovasi	COT	OM Prasarana Bidang IPTEK	1 Unit, Hektar	116.897.189
	SBSN	150.000.000	03 Peningkatan Kapasitas Infrastruktur riset dan inovasi untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi	PBH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	150 Rekomendasi Kebijakan	9.000.000
	HLN	16.759.778	04 Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	2.000 Orang	4.107.500
	PLN	236.466.148	05 Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global melalui Naskah Kebijakan/ Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan di bidang Kebijakan Pembangunan	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	9 NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	699.905
			07 Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah Global melalui Naskah Kebijakan/ Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan di bidang Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10.336 Lembaga, Unit Kerja, Tim	242.647.000
			08 Peningkatan Fungsi Pemanfaatan Riset dan Inovasi	QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	11.895 Orang	165.480.103
			11 Peningkatan proporsi anggaran matching fund di bidang SDM Iptek	QMA	Data dan Informasi Publik	2 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta Data, Lokasi	36.759.778
				RAO	Sarana Bidang IPTEK	9 Unit	1.084.445.240
				RBU	Prasarana Bidang IPTEK	2 Unit	406.166.820

SK No 160717 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 124

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		SBA Pendidikan Tinggi	450 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	12.467.860
		SDB Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	286 Purwarupa	143.000.000
		SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	94 model, Desain	23.500.000
		SDD Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	29 kekayaan intelektual	21.750.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen** RM 3.874.808.796	01 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pengawasan melalui penguatan pelayanan publik, sistem digital, akuntabilitas kinerja, dan budaya kerja			**3.874.808.796**
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.863.804.796
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.370 Orang, Layanan, Rekomendasi	9.000.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	26 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.004.000

SK No 160716 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 125
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga 125 BADAN PANGAN NASIONAL					233.284.603
2 Fungsi 04 EKONOMI					233.284.603
3 Program 1) HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					89.196.331
2) WA Program Dukungan Manajemen					144.088.272
Program 1) HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					89.196.331
RM 89.196.331	01 Tersedianya ketersediaan pangan	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	5	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	856.900
	02 Terjaganya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu	AEA Koordinasi	75	kegiatan	19.955.995
	03 Menurunnya daerah rentan rawan pangan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	20	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	2.295.300
	04 Meningkatnya Penyelamatan Pangan	PAD Peraturan Presiden	1	PerPres, R.Perpres	440.000
	05 Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan	PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	67	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.337.030
	06 Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	PCA Penjenian Produk	600	Produk, Keputusan	2.222.800
		PEH Promosi	1	promosi, Kegiatan	1.500.000
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	86	Lembaga, Unit Kerja, Tim	3.171.120
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	180	Kelompok Masyarakat	11.921.000
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	10	UMKM	1.700.000
		QEB Bantuan Keluarga	15.460	Keluarga	6.003.327
		QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	39	Produk, Laporan, Keputusan	4.739.630

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 125
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		QMA Data dan Informasi Publik	16 layanan, dokumen, publikasi Wilayah, Peta, Data, Lokasi	17.951.169
		RAC Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10 Unit	8.100.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen** RM 144.098.272	01 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi			**144.098.272**
		AEA Koordinasi	1 kegiatan	9.720.000
		AEC Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.200.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	108.887.520
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	39 Unit, m2, Paket	1.314.054
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	520 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.167.686
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	34 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	9.346.482
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	6 Layanan, Dokumen	4.860.000
		FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	2.850.000
		QMA Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi Wilayah, Peta, Data, Lokasi	2.709.060
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	1.024.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	126	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA					6.262.046.870
2 Fungsi	04	EKONOMI					6.262.046.870
3 Program	1) EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis					5.617.980.000
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					644.066.870
Program	1) EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis					5.617.980.000
	RM	5.617.980.000	01 Terwujudnya Perencanaan Kota Kelas Dunia	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.765.000
			02 Terwujudnya Pembangunan Kawasan IKN berkelas dunia	ABI	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	3 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	500.000
			03 Meningkatnya kualitas dan keberlanjutan Lingkungan Hidup	ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	1 Rekomendasi Kebijakan	506.000
			04 Meningkatkan kapabilitas SDM Penduduk IKN yang kompeten dan berdaya saing tinggi	ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	7 Rekomendasi Kebijakan	1.639.821
			05 Meningkatnya kesiapan kawasan industri dan pusat ekonomi	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2 Rekomendasi Kebijakan	1.220.000
			06 Meningkatnya iklim usaha dan investasi	ABS	Kebijakan Bidang Kebencanaan bencana dan perubahan iklim	2 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	2.449.182
			07 Terwujudnya Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kelas Dunia	AEA	Koordinasi	47 kegiatan	21.857.966
			08 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang handal dan berkualitas	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7 NSPK	1.495.035
			09 Terwujudnya infrastruktur Penyelenggaraan Pemerintahan	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	7 layanan	350.000
			10 Terwujudnya infrastruktur pelayanan publik bagi masyarakat IKN	BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	972.617

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CAG	Sarana Bidang Perbaran, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 Unit	2.050.000
		CAI	Sarana Pengembangan Kawasan	7 Unit	1.083.264.491
		CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	15 km	875.625.578
		CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	1 bidang, hektar	1.800.560.000
		DCK	Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana	100 Orang	1.063.564
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	64 Laporan, Rekomendasi	19.046.317
		PAH	Peraturan lainnya	9 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	313.500
		PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	3 Rekomendasi Kebijakan	9.750.000
		PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	725.946
		PBQ	Kebijakan Bidang Aparatur	1 Rekomendasi Kebijakan	1.419.670
		PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	14 Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	71.300.000
		PEA	Koordinasi	5 kegiatan	8.460.330
		PEC	Kerja sama	25 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	7.200.000
		PEH	Promosi	20 promosi, Kegiatan	10.985.800
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	13 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	49.233.781
		QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	23 Orang	1.963.776

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	71 Kelompok Masyarakat	5.514.416
		QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	40 UMKM	1.563.600
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	9 Badan usaha	2.898.630
		QII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	9 Hektar, Laporan	2.025.383
		QMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	850.000
		RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	9.240.000
		RAP	Sarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	16 Unit	6.962.454
		RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	5 unit, Hektar	778.154.000
		RBM	Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan	10 unit	8.000.000
		RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	598 km2, bidang, km, hektar	310.484.302
		RBR	Dukungan Teknis	3 Dokumen	26.631.513
		RCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	4.616.572
		RDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	126 unit, Hektar, KK, Lisendetik, SR	382.044.298
		RDC	OP Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	12 km	51.160.764
		RDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	15 unit	27.483.362
		RDO	OP Prasarana Pengembangan Kawasan	3 bidang, Hektar	34.055.933
		REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	150 Hektar	4.650.000

SK No 160708 C

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 126

KEMENTERIAN/LEMBAGA : OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		SCD	Pelatihan Vokasi	16 Orang	903.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi	7.892.388
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**644.066.870**
RM 644.066.870	01 Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Efektif	AAH	Peraturan lainnya	19 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	7.645.226
	02 Meningkatnya Tata Kelola Otorita Ibu Kota Nusantara yang Optimal	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	1.500 orang	549.530
		BMA	Data dan Informasi Publik	1 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	375.000
		BMB	Komunikasi Publik	3 layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	799.750
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	217 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	606.475.189
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	599 Unit, m2, Paket	12.252.218
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	9 Orang, Layanan, Rekomendasi	4.660.857
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	31 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	9.323.100

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 127
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KARANTINA INDONESIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	127	BADAN KARANTINA INDONESIA					1.796.065.911
2 Fungsi	04	EKONOMI					1.796.065.911
3 Program	1) HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					604.647.071
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					1.191.418.840
Program	1) HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					604.647.071
	PNBP	282.264.770	01 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Hewan yang Efektif	PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	266 Rekomendasi Kebijakan	56.456.534
	RM	242.558.278	02 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Ikan yang Efektif	PDC	Sertifikasi Produk	1.601.258 produk	154.050.705
	SBSN	79.823.022	03 Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan Tumbuhan yang Efektif	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	74 Produk	71.937.846
			04 Terselenggaranya Layanan Perkarantinaan yang Profesional	RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	402 Unit	76.158.464
			05 Sinergitas pencegahan dan penindakan pelanggaran perkarantinaan	RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	44.409 unit	246.043.541
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					1.191.418.840
	RM	1.191.418.840	01 Terciptanya Tata Kelola Birokrasi yang Baik	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	43 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.191.418.840

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 128
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga 128 BADAN GIZI NASIONAL					268.000.000.000
2 Fungsi 04 EKONOMI					19.714.694.606
07 KESEHATAN					24.726.344.904
10 PENDIDIKAN					223.558.960.490
3 Program 1) DT Program Pemenuhan Gizi Nasional					255.580.233.304
2) WA Program Dukungan Manajemen					12.419.766.696
Program 1) DT Program Pemenuhan Gizi Nasional					255.580.233.304
RM 255.580.233.304	01 Terwujudnya Sistem dan Tata Kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif	AEA Koordinasi	40	kegiatan	283.457.610
	02 Terwujudnya penyediaan dan penyaluran makan bergizi yang efektif	AEC Kerja sama	10	Kesepakatan	10.000.000
	03 Terwujudnya promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang makan bergizi secara optimal	PBG Kebijakan Sidang Kesehatan	21	Rekomendasi Kebijakan	500.500.000
	04 Terwujudnya kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung implementasi pemenuhan gizi nasional	PEE Kemitraan	36	Kesepakatan	40.000.000
	05 Terwujudnya pemantauan dan pengawasan program makan bergizi sesuai standar	PEH Promosi	22	promosi	270.000.000
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	18	NSPK	9.000.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5.000	Kelompok Masyarakat	50.000.000
		QDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3.000	UMKM	45.000.000
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1.000	Badan usaha, Miliar USD	15.000.000
		QEA Bantuan Masyarakat	74.569.151	Orang	248.355.305.304

SK No 160705 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 128
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN GIZI NASIONAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		GIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13.254	Lembaga	880.000.000
		QMB Komunikasi Publik	1	layanan	32.800.000
		RAB Sarana Bidang Kesehatan	8.606	Paket, Unit	4.300.000.000
		RBV Prasarana Bidang Kesehatan	384	Unit	595.200.000
		SCM Pelatihan Bidang Kesehatan	81.000	Orang	121.500.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	162.470.300
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**12.419.768.696**
RM 12.419.768.696	01 Terwujudnya Birokrasi Pemenuhan Gizi Nasional yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Excellence, Responsif, dan Adaptif	AAH Peraturan lainnya	50	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	10.000.000
	02 Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Internal Badan Gizi Nasional yang Akuntabel	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	5	Rekomendasi Kebijakan	7.500.000
		ABQ Kebijakan Bidang Aparatur	5	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	32.000	Unit	3.910.440.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	332	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.949.569.673
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.543	Unit, m2, Paket	177.100.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.001	Orang, Layanan, Rekomendasi	84.000.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	364	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	80.550.823
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	94.670.000
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	32.000	Orang	96.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga **129 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**			**357.997.743**
2 Fungsi **03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN**			**357.997.743**
3 Program **1) CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**			**103.000.000**
2) WA Program Dukungan Manajemen			**254.997.743**
Program **1) CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**			**103.000.000**
RM 103.000.000	01 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan yang Terintegrasi dalam Mendukung Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Penyelesaian Masalah Politik dalam Rangka Memperkokoh Demokrasi	ABC Kebijakan Bidang Politik 23 Rekomendasi Kebijakan	23.300.000
	02 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 1 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
	03 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Luar Negeri terhadap Kepentingan Nasional yang Bersinergi pada Diplomasi Politik dan Kerja Sama Internasional dalam Rangka Memperkuat Kedudukan Indonesia di Dunia Internasional	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan 39 Rekomendasi Kebijakan	39.100.000
	04 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	ABD Kebijakan Bidang Teknologi Informasi 16 Rekomendasi Kebijakan	16.300.000
	05 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pertahanan dan Kesatuan Bangsa untuk Memperkuat Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah NKRI dan Melindungi Segenap Bangsa serta Seluruh Tumpah Darah Indonesia dan ATHG terhadap Kedutuhan Bangsa dan Negara	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 5 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.223.886

SK No 160703 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	06 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	15 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.776.112
	07 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Keamanan, Ketertiban Masyarakat, Serta Penegakan Hukum yang Efektif dalam Rangka Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional	PBC Kebijakan Bidang Politik	4 Rekomendasi Kebijakan	7.200.000
	08 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	PBE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	4 Rekomendasi Kebijakan	4.900.000
	09 Terselenggaranya Sinkronisasi dan Koordinasi Efektivitas Komunikasi dan Penyebaran Informasi Kebijakan Politik dan Keamanan dalam Rangka Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Publik	PBO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000
	10 Terlaksananya Dukungan Manajemen yang Efektif, Akuntabel, dan Berbasis Sistem Administrasi Terintegrasi untuk Memperkuat Koordinasi dan Pelayanan Internal di Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi			
	11 Terselenggaranya pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan terhadap penyelenggaraan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum			
	12 Tersusunnya rekomendasi terkait Arah Kebijakan Kejaksaan RI yang berkualitas kepada Presiden RI			
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen				**254.997.743**
RM 254.997.743	01 Terselenggaranya layanan koordinasi kebijakan politik dan keamanan yang responsif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan strategis nasional	ABE Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan	5 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000

SK No 160743 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 129

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	02 Terlaksananya sistem koordinasi internal yang terintegrasi melalui penguatan regulasi, dukungan persidangan, dan tata kelola yang tertib	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	226.025.665
	03 Meningkatnya kapasitas SDM, sistem informasi, dan budaya organisasi berbasis kinerja dan nilai ASN	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	218 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.347.000
	04 Terselenggaranya pengelolaan anggaran, aset, dan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan efisien	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	16 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	20.668.877

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 130

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	130	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN					221.934.522
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					221.934.522
3 Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					33.784.557
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					188.149.965
Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					33.784.557
	RM	33.784.557	01 Terwujudnya pembangunan hukum, capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L di bidang hukum	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	35 Rekomendasi Kebijakan	18.132.646
			02 Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM	AEA	Koordinasi	35 kegiatan	15.151.911
			03 Terwujudnya capaian kinerja dan penyelesaian permasalahan lintas K/L terkait Keimigrasian dan Pemasyarakatan	PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					188.149.965
	RM	188.149.965	01 Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	26.080.000
				CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	1.740.000
				CDS	OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik Lokasi	960.000
				EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15 Layanan Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	115.632.969
				EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	437 Unit, m2, Paket	33.416.000

SK No 160741 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2025

BAGIAN ANGGARAN : 130

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	248 Orang Layanan Rekomendasi	664.400
		EBC Layanan Manajemen Kinerja Internal	12 Dokumen Layanan Laporan Rekomendasi	4.691.225
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	2.032.571

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 131
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	131	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN					206.987.149
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					206.987.149
3 Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					50.000.000
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					156.987.149
Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					50.000.000
	RM	50.000.000	01 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Tata Niaga dan Distribusi Pangan	ABB Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	66 Rekomendasi Kebijakan		4.000.000
			02 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Usaha Pangan dan Pertanian	ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	716 Rekomendasi Kebijakan		42.650.000
			03 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Keterjangkauan dan Kemanan Pangan	ABS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	97 Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi		3.350.000
			04 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Sumber Daya Maritim				
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					156.987.149
	RM	156.987.149	01 Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	AAG Peraturan Menteri	3 PerMen, Perka		600.000
				AEC Kerja sama	2 Kesepakatan		638.121
				BMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen Peta, Data		200.000
				CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit		650.000
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		148.743.298

SK No 160739 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 131
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100 Unit, mC, Paket	200.000
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	50 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.100.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	59 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.665.720

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 132

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**132**	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**				**262.557.371**
2 Fungsi	**01**	**PELAYANAN UMUM**				**262.557.371**
3 Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**				**72.944.890**
	2) WA	**Program Dukungan Manajemen**				**189.612.481**
Program	**1) CL**	**Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan**				**72.944.890**
	RN	72.944.890	01 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	16 Rekomendasi Kebijakan	20.158.191
			02 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pengembangan Konektivitas	ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	19 Rekomendasi Kebijakan	17.712.050
			03 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Dasar	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	30 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	35.074.649
			04 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Dalam Upaya Pembangunan Perumahan dan Saran dan Prasarana Permukiman			
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**				**189.612.481**
	RN	189.612.481	01 Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	BMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	2.500.000
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	162.352.311
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	31 Unit, m2, Paket	12.785.520
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	7 Orang, Layanan, Rekomendasi	5.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 132

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	36 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.374.650

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 134

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	134	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					333.585.580
2 Fungsi	01	PELAYANAN UMUM					333.585.580
3 Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					53.708.482
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					279.877.098
Program	1) CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan					53.708.482
	RM	53.708.482	01 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	14 Rekomendasi Kebijakan	7.000.000
			02 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	ABN	Kebijakan Bidang Sosial	12 Rekomendasi Kebijakan	8.300.000
			03 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Daerah Tertentu	ABP	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	12 Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
			04 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Perluasan Fasilitas dan Perlindungan Kesejahteraan	AEA	Koordinasi	7 kegiatan	19.908.482
			05 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Perluasan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses	PBN	Kebijakan Bidang Sosial	7 Rekomendasi Kebijakan	10.500.000
			06 Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Bidang Koordinasi Kebijakan Kemandirian Sosial dan Ekonomi	PEA	Koordinasi	3 kegiatan	2.000.000
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					279.877.098

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 134

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
RM 279.877.099	01 Terselenggaranya dukungan pelayanan perkantoran dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi secara tertib	ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1 Rekomendasi Kebijakan	766.556
		ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1 Rekomendasi Kebijakan	741.273
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	255.452.338
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	64 Unit, m2, Paket	12.246.473
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	180 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.853.740
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	37 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.816.718



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	135 KEMENTERIAN HUKUM					4.221.215.291
2 Fungsi	03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN					4.145.026.344
	10 PENDIDIKAN					76.188.947
3 Program	1) BB Program Pembentukan Regulasi					47.036.578
	2) BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					790.163.540
	3) WA Program Dukungan Manajemen					3.384.015.173
Program	1) BB Program Pembentukan Regulasi					47.036.578
	RM 47.036.578	01 Meningkatnya kualitas peraturan-perundang-undangan	AAA	Undang-Undang	5 UU, RUU	1.071.462
		02 Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional	AAC	Peraturan Pemerintah	4 PP, RPP	468.273
		04 Meningkatnya Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum	AAD	Peraturan Presiden	4 PerPres, R.Perpres	537.605
			AAG	Peraturan Menteri	4 PerMen, Perka	166.044
			ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3.575 Rekomendasi Kebijakan	26.948.255
			ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	700 Orang	1.661.964
			AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6 NSPK	902.670
			BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	64 Lembaga	2.626.663
			BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga	299.084
			BNA	Data dan Informasi Publik	1.037 dokumen, Peta, Data	4.276.931
			FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	33 Laporan, Layanan	741.716
			PAA	Undang-Undang	5 UU, RUU	3.246.981
			PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	100.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		PBD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	3 Rekomendasi Kebijakan	1.920.843
		PFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	350.000
		QMA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	1.800.000
Program 2) BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				**780.183.540**
RM 74.865.162	01 Terwujudnya Penegakan Hukum AHU yang Profesional	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	900.000
PNBP 705.298.378	02 Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	655 Orang	960.998
	03 Terwujudnya Penegakan Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional	AEC Kerja sama	72 Kesepakatan	15.313.825
	04 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	6.400 orang	2.553.328
	05 Meningkatnya Kepatuhan Hukum Masyarakat Indonesia	AEH Promosi	68 promosi	6.208.600
	06 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16 NSPK	27.226.635
	07 Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2.700 Orang, Akta, Bidang, Laporan	4.988.562
	08 Meningkatnya Kemudahan Berusaha pada Layanan Badan Usaha dan Keperdataan	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	30 Lembaga	9.649.805
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	334.075 layanan	164.997.566
		BCB Perkara Hukum Lembaga	119 Perkara	5.889.516
		BCE Penanganan Perkara	32 Perkara	4.720.114
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	255 Lembaga	1.877.217
		BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9.015 Orang	1.614.994
		BIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	30 Produk	1.165.216

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4.716	Lembaga	36.307.345
		BLB Persidangan Lembaga Eksekutif	113	sidang	6.414.640
		BMA Data dan Informasi Publik	735	dokumen, Peta, Data	21.553.978
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit	82.667.543
		CGT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	14.084.200
		CCL OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	34	Unit	198.714.318
		COS OP Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	18.400.000
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	2	Sistem Informasi	60.382.285
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	33	Laporan, Layanan	1.666.336
		QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	6.271	Orang	50.168.000
		QBC Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	843	Kelompok Masyarakat	8.994.810
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	66	Lembaga	6.625.000
		QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	538.997
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**3.394.016.173**
RM 2.923.697.575	02 Meningkatnya Kompetensi SDM Bidang Hukum	ABD Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	94	Rekomendasi Kebijakan	7.799.839
PNBP 470.317.598	03 Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	9	Rekomendasi Kebijakan	1.136.520
	04 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	ADG Standarisasi Profesi dan SDM	2.260	Orang	4.130.334

SK No 160731 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 135

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	05 Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Hukum	AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3.096 orang	499.704
	06 Meningkatnya Kepuasan dan Manfaat Layanan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum	BMA	Data dan Informasi Publik	7 dokumen, Peta, Data	1.492.943
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8 Unit	73.260.710
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	223 Unit	26.643.140
		CCG	Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	55 Orang	784.460
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	320 Layanan, Perkara	2.815.607.523
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.470 Unit, m2, Paket	250.440.836
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	62.854 Orang, Layanan, Rekomendasi	98.380.736
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	404 Layanan, Rekomendasi	99.985.670
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	10 Sistem Informasi	1.193.260
		FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	1 Lembaga	227.960
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	4.530.814
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	1.000.480
		UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	462 Orang	4.931.225

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	136	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA					718.129.472
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					718.129.472
3 Program	1) BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM					235.078.166
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					483.051.287
Program	1) BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM					235.078.166
	RM	235.078.166	01 Terwujudnya penegakan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia	AAD	Peraturan Presiden	2 PerPres, R.Perpres	10.000
			02 Meningkatnya manfaat PUU dalam perlindungan Hak Asasi Manusia	AAG	Peraturan Menteri	1 PerMen, Perka	10.000
			03 Meningkatnya kesadaran HAM Pemerintah dan Masyarakat Indonesia	ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	14 Rekomendasi Kebijakan	12.289.386
				AEA	Koordinasi	3 kegiatan	5.860.866
				AEB	Forum	1 forum	10.000.000
				AEC	Konferensi dan Event	5 Kegiatan	8.178.000
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	2.259.140
				BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1.410 layanan	10.595.340
				BDB	Fasilitasi dan Pemberdayaan Lembaga	42 Lembaga	5.122.015
				BDC	Fasilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	113.521 Orang	67.113.921
				BDD	Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	128 Kelompok Masyarakat	2.316.349
				BDH	Fasilitasi dan Pemberdayaan Badan Usaha	84 Badan usaha	5.375.501
				BEH	Bantuan Kelompok Masyarakat	21 Kelompok Masyarakat	10.666.634

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	23 Orang, Kelompok Masyarakat	6.016.672
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	47 Laporan, Layanan	9.461.040
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	331 Daerah (Prov/KabKota), Provinsi, Kab/Kota	5.035.484
		FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	489 Desa, Desa/Kelurahan	49.715.847
		PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	201 Rekomendasi Kebijakan	7.540.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	955 Lembaga	12.500.000
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	54 Badan usaha	3.000.000
		QMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	3.000.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**463.051.287**
RM 463.051.287	01 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian HAM	ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	3 Rekomendasi Kebijakan	477.105
	02 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian HAM	ADC	Standarisasi Profesi dan SDM	500 Orang	1.007.402
		AEC	Kerja sama	9 Kesepakatan	428.939
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3 Lembaga	696.781
		BMA	Data dan informasi Publik	2 dokumen, Peta, Data	39.184
		CAN	Sarana Bidang Teknologi informasi dan Komunikasi	5 Unit	1.129.294
		CQL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	28.590
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	187 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	432.208.638

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 136

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		ESC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.597 Orang, Layanan, Rekomendasi	10.264.421
		ESD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	250 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	20.371.567
		FAB	Sistem informasi Pemerintahan	1 Sistem informasi	54.690
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	900 Orang	3.305.295
		PAA	Undang-Undang	1 UU, RUU	1.000.000
		UAB	Sistem informasi Pemerintahan	1 Sistem informasi	12.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 137

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	137	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN					13.849.074.581
2 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN					13.849.074.581
3 Program	1] BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					5.777.350.112
	2] WA	Program Dukungan Manajemen					13.071.724.469
Program	1] BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					5.777.350.112
	PNBP	2.794.160.312	01 Terwujudnya pemenuhan hak bagi tahanan, anak dan warga binaan guna terciptanya warga binaan yang siap bermasyarakat	AEA Koordinasi	20	kegiatan	2.046.518
	RM	2.983.189.800	02 Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	AEB Forum	10	forum	2.795.033
			03 Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	AEC Kerja sama	15	Kesepakatan	11.188.427
				AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	27	NSPK	46.934.662
				BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	4818.672	Orang, Akta, Bidang, Laporan	220.644.656
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	2	layanan, Rekomendasi	1.461.647.260
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	388.136	Orang	2.723.000.000
				BHB Operasi Bidang Keamanan	2.975	operasi, Hari Operasi	128.400.940
				BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	11.510	Orang	98.030.722
				BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	1.300	Layanan	17.446.796
				BKA Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2.612	Orang, Kelompok Masyarakat	105.264.753
				BMA Data dan informasi Publik	4	dokumen, Peta, Data	239.367.716

SK No 160759 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 137

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	246.909.000
				CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit	120.370.734
				EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	808 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	84.414.114
				FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	147.427.044
				PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	5.963.642
				QHB	Operasi Bidang Keamanan	1.031 operasi, Hari Operasi	41.551.503
				QIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	22.740.401 Orang	73.944.599
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**13.071.724.469**
	RM	11.291.103.304	01 Meningkatnya Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	3.096.175
	PNBP	1.640.621.165	02 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.453 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.757.240.589
			03 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.662 Unit, m2, Paket	2.061.183.414
			04 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	160 Orang, Layanan, Rekomendasi	126.871.173
				EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	843 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	116.358.990
				PBD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	6.054.129

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	138	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH					56.682.130.000
2 Fungsi	10	PENDIDIKAN					56.682.130.000
3 Program	1) DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun					27.290.347.151
	2) DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					21.155.833.945
	3) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					3.210.177.351
	4) DU	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan					198.217.983
	5) WA	Program Dukungan Manajemen					4.827.553.570
Program	1) DF	Program Wajib Belajar 13 Tahun					27.290.347.151
	RM	27.290.347.151	01 Terwujudnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	BEI	Bantuan Lembaga	943 Lembaga	260.368.949
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.495 Lembaga	159.631.424
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	203.215 Orang	114.679.646
				QEN	Bantuan Peserta Didik	19.486.146 Orang	13.860.373.017
				RAA	Sarana Bidang Pendidikan	2.185 Paket, Unit, m2	160.316.770
				RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	11.109 unit	12.575.777.145
Program	2) DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran					21.155.833.945
	RM	20.991.713.915	01 Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	11 Rekomendasi Kebijakan	12.774.029

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
BLU	161.437.308		AEE Kemitraan	103 Kesepakatan		25.918.429
PNBP	2.882.932		AEF Sosialisasi dan Diseminasi	105.000 orang		8.982.427
			BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	5.676 Orang, Akta, Bidang, Laporan		346.264.618
			BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.050 Orang		56.770.603
			BGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	500 Lembaga		5.267.280
			BMA Data dan Informasi Publik	620 dokumen, Peta, Data		83.048.000
			CCI Pelatihan Bidang Pendidikan	36.175 Orang		269.046.773
			CDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	44 model, Desain		9.533.261
			PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	35.008 Rekomendasi Kebijakan		287.914.750
			PDE Akreditasi Lembaga	99.235 Lembaga		304.120.044
			PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	41.957 Orang		671.206.854
			PEE Kemitraan	15 Kesepakatan		4.292.204
			QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	3.598.000 Orang, Akta, Bidang, Laporan		392.411.517
			QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.055.402 Lembaga		1.525.345.855
			QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	222.726 Orang		1.478.763.786
			QEA Bantuan Masyarakat	798.905 Orang		14.126.587.721
			QEN Bantuan Peserta Didik	3.000 Orang		61.471.548
			QGC Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	750 Lembaga		3.482.430
			QMA Data dan Informasi Publik	1.885 dokumen, Peta, Data		32.780.667

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QMB Komunikasi Publik	15 layanan		56.931.789
		SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	91.686 Orang		916.973.403
		SDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	10 model, Desain		2.552.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	29 Sistem Informasi		368.000.889
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	286 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota		127.412.876
Program 3) DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					**3.210.177.351**
RM 3.205.439.436	01 Meningkatnya Pembelajaran dan Produktivitas Vokasi	PBH Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	14 Rekomendasi Kebijakan		1.769.404
PNBP 4.737.915		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	256.000 Orang		311.486.399
		PEC Kerja sama	271 Kesepakatan		23.023.770
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5.854 Lembaga		170.140.156
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	22.710 Orang		114.123.511
		QMA Data dan Informasi Publik	11 dokumen, Peta, Data		128.589.457
		RAA Sarana Bidang Pendidikan	86 Paket, Unit		69.590.721
		RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	640 unit		2.000.307.329
		SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	24.225 Orang		391.236.813
Program 4) DU Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan					**198.217.983**
RM 197.226.633	01 Meningkatnya Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.539 Lembaga		12.748.764

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 138
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	PNBP	661.950		BGC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	5	Orang	3.126.529
				BMA Data dan Informasi Publik	46	dokumen, Peta, Data	3.773.908
				PEG Konferensi dan Event	157	Kegiatan	44.214.682
				QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	387	Lembaga	34.102.536
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	221.038	Orang	48.101.922
				QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	266	Kelompok Masyarakat	16.269.455
				QNA Data dan Informasi Publik	149	dokumen, Peta, Data	35.680.767
Program	**5) WA Program Dukungan Manajemen**						**4.827.563.570**
	RM	4.826.479.414	01 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	AEC Kerja sama	1	Kesepakatan	7.687.947
	PNBP	1.075.156		BAH Pelayanan Publik Lainnya	22	layanan	62.342.227
				BMA Data dan Informasi Publik	3	dokumen, Peta, Data	190.750.087
				BMB Komunikasi Publik	158	layanan	72.116.113
				CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	Unit	61.990.743
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	871	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.760.227.915
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.714	Unit, m2, Paket	176.296.204
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	20.379	Orang, Layanan, Rekomendasi	209.825.490
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	881	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	199.094.447
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	14	Sistem Informasi	3.505.550

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	64 Layanan Dokumen	38.808.847
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	42 Laporan, Layanan	16.230.287
		FAH Pengelolaan Keuangan Negara	46 Layanan	23.061.759
		QNA Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	3.507.645

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	139	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI					**61.873.870.000**
2 Fungsi	10	PENDIDIKAN					**61.873.870.000**
3 Program	1) DK	Program Pendidikan Tinggi					**41.526.922.645**
	2) KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi					**1.082.600.000**
	3) WA	Program Dukungan Manajemen					**19.270.447.355**
Program	**1) DK**	**Program Pendidikan Tinggi**					**41.526.922.645**
	RM	28.286.581.310	01 Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing pendidikan tinggi	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	6 Rekomendasi Kebijakan	6.000.000
	BLU	9.228.849.612		AOD	Standarisasi Lembaga	490 Lembaga	14.051.600
	SBSN	1.550.806.101		BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	12.974 Orang, Akta, Bidang, Laporan	298.564.083
	PNBP	991.451.232		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3.391 Lembaga	98.598.779
	RMP	7.530.000		BEI	Bantuan Lembaga	561 Lembaga	6.327.166.220
	PLN	1.408.051.633		BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	98.247 Orang	2.704.297.187
	HLN	47.652.757		CAA	Sarana Bidang Pendidikan	3.321 Paket, Unit	866.916.348
				CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	930 unit	1.414.413.348
				DBA	Pendidikan Tinggi	3.341.100 Orang	8.186.385.148
				DBE	Pendidikan Non Gelar	2.555 Orang	7.365.000
				PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R Perpres	440.000
				POB	Akreditasi Produk	1.400 produk	23.750.000
				POD	Standarisasi Lembaga	619 Lembaga, Unit Kerja	22.200.165

SK No 160752 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PDE	Akreditasi Lembaga	1.760 Lembaga, Unit Kerja	48.230.749
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	4.600 Orang, Sertifikat	6.100.000
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12 Lembaga, Unit Kerja, Tim	87.167.793
		QEI	Bantuan Lembaga	3.233 Lembaga	1.983.482.925
		QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	1.062.616 Orang	15.906.078.144
		RAA	Sarana Bidang Pendidikan	1.497 Paket, Unit	1.551.058.082
		RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	33 unit	1.066.485.973
		SBA	Pendidikan Tinggi	4.091 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	88.421.585
		SBE	Pendidikan Non Gelar	6.400 Orang	20.244.464
		SCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	4.455 Orang, Kegiatan	213.056.691
		SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk	780 produk	700.338.362
		SDB	Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	350 Purwarupa	52.500.000
		SDD	Penelitian dan Pengembangan yang Dipatenkan	350 kekayaan intelektual	10.500.000
Program **2) KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**					**1.082.500.000**
RM 1.082.500.000	01 Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000
	07 Meningkatnya pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang sains dan teknologi	AEH	Promosi	10 promosi	3.000.000
		BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	22 Lembaga	8.500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	10	Kelompok Masyarakat	5.500.000
		DCI Pelatihan Bidang Pendidikan	500	Orang, Kegiatan	10.000.000
		DDC Penelitian dan Pengembangan Modeling	50	model, Desain	10.000.000
		PEC Kerja sama	12	Kesepakatan	5.000.000
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9	Lembaga	20.000.000
		QEI Bantuan Lembaga	25	Lembaga	20.000.000
		RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	4	unit	975.000.000
		SCI Pelatihan Bidang Pendidikan	40	Orang	15.000.000
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	10.000.000
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**19.270.447.355**
RM 19.270.447.355	01 Meningkatnya tata kelola Kementerian yang berkualitas	ABO Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1	Rekomendasi Kebijakan	4.720.450
		AEC Kerja sama	2	Kesepakatan	4.877.376
		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	2	Orang, Akta, Bidang, Laporan	2.000.000
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	1	layanan	619.714
		BMA Data dan Informasi Publik	5	dokumen, Peta, Data	8.017.636
		BMB Komunikasi Publik	1	layanan, konten	1.490.607
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	61.261.788
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	524	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	19.049.505.233

SK No 160750 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 139

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	555 Unit, m2, Paket	19.730.122
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.672 Orang, Layanan, Rekomendasi	16.079.242
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	351 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	65.634.726
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	6 Sistem Informasi	10.912.153
		PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	660 orang	2.396.297

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 140
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	140	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN					1.507.381.821
2 Fungsi	10	PENDIDIKAN					1.507.381.821
3 Program	1) DV	Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan					654.693.728
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					852.686.093
Program	1) DV	Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan					654.693.728
	RM	592.419.000	01 Terwujudnya revitalisasi nilai budaya dan penguatan kearifan lokal di masyarakat	ABH	Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	71 Rekomendasi Kebijakan	5.953.335
	BLU	62.274.728	02 Terwujudnya pengelolaan dan pemajuan warisan budaya dalam memperkaya kebudayaan nasional	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	200 Orang	3.838.810
			03 Terwujudnya rekognisi global budaya Indonesia melalui penguatan diplomasi, promosi dan kerja sama	AEG	Konferensi dan Event	166 Kegiatan	31.730.233
			04 Terwujudnya Talenta Nasional bidang seni dan budaya yang unggul dan berkualitas	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	16 NSPK	5.700.000
			05 Terwujudnya pengelolaan Kekayaan Budaya Nasional secara optimal dan komprehensif yang mendukung produktivitas	BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	4.000 Orang, Akta, Bidang, Laporan	4.400.000
			06 Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat berkreativitas dan berekspresi budaya	BMA	Data dan Informasi Publik	339 dokumen, Peta, Data	17.740.446
				PEB	Forum	4 forum	5.000.000
				PEG	Konferensi dan Event	6 Kegiatan	45.000.000
				PEH	Promosi	4 promosi	15.000.000
				QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	858.053 Orang, Akta, Bidang, Laporan	51.898.689
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	3 layanan	3.769.190

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 140
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	693	Lembaga	28.413.013
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4.053	Orang	81.649.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.365	Kelompok Masyarakat	68.285.899
		QMA Data dan Informasi Publik	9.986	dokumen, Peta, Data	123.289.751
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	9	Unit	4.659.000
		RDN OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100.461	unit	135.753.890
		SCD Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	360	Orang	4.712.112
		UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	100	Desa, DesaKelurahan	17.691.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**852.695.053**
RM 852.695.053	01 Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Kebudayaan yang berkualitas	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	3.649.339
	02 Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal yang berkualitas	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	99	Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	803.581.240
	03 Terwujudnya sistem Sistem Pengendalian dan Pengawasan di Kementerian Kebudayaan yang optimal	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	40	Unit, m2, Paket	1.969.500
	04 Terwujudnya Tata Kelola Inspektorat Jenderal yang Berkualitas	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1	Orang, Layanan, Rekomendasi	5.079.540
	05 Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang berkualitas	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	57	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	34.462.118
	06 Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama yang berkualitas	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	3	Sistem Informasi	1.945.356
	07 Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang berkualitas	QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	2.009.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 141

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	141	KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH					579.031.717
2 Fungsi	09	AGAMA					579.031.717
3 Program	1) DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama					484.964.329
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					94.067.388
Program	1) DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama					484.964.329
	RM	484.964.329	01 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	3	Rekomendasi Kebijakan	7.591.849
				QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	311.434	Orang, Akta, Bidang, Laporan	36.606.641
				QAH Pelayanan Publik Lainnya	3.000	layanan	15.680.360
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	324.588	Orang	368.635.961
				QIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan	7	Layanan	27.731.510
				QMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	40.517.998
Program	2) WA	Program Dukungan Manajemen					94.067.388
	RM	94.067.388	01 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	8	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	93.467.388
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	60	Orang, Layanan, Rekomendasi	100.000
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	4	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	500.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 142

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	142	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL					**551.848.230**
2 Fungsi	09	AGAMA					**551.848.230**
3 Program	1) DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama					**391.021.061**
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					**160.827.169**
Program	**1) DC**	**Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama**					**391.021.061**
	BLU	57.988.916	02 Meningkatnya kualitas dan kuantitas registrasi dan sertifikasi halal	AEE Kemitraan	30	Kesepakatan	12.300.000
	RM	333.032.145	03 Meningkatnya kualitas kehalalan produk	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6	NSPK	4.500.000
			04 Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap jaminan produk halal	PDC Sertifikasi Produk	1.368.000	produk	335.752.169
			06 Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerja sama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	PDE Akreditasi Lembaga	33	Lembaga	20.700.000
			07 Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	358	Lembaga	8.021.061
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.300	Orang	2.500.000
				QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1.100	Lembaga	7.247.831
Program	**2) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**160.827.169**
	RM	160.827.169	01 Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	16.000.000
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	105.917.045
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2	Unit, m2, Paket	35.172.924

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 142
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.500.000
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	160 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.237.200



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**143**	**KEMENTERIAN KEHUTANAN**					**6.039.295.258**
2 Fungsi	**04**	**EKONOMI**					**4.976.507.615**
	05	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP**					**986.777.643**
	10	**PENDIDIKAN**					**76.000.000**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**112.348.750**
	2) FF	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**					**1.723.704.412**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**4.203.222.096**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**112.348.750**
	PNBP	21.420.000	02 Sumber Daya Manusia Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	1.500	Orang	2.160.000
	RM	90.928.750		BAH Pelayanan Publik Lainnya	3	layanan	1.800.000
				BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	700	Orang	2.000.000
				CBA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	100	Hektar	1.000.000
				DCE Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.597	Orang	7.141.500
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	800.000
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	885	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7 Unit	4.200.000
				SAE	Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanaran dan Lingkungan Hidup	499 Orang	74.500.000
				SCE	Pelatihan Bidang Kehutanaran dan Lingkungan Hidup	4.814 Orang	15.757.200
Program	**2) FF**	**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**					**1.723.704.412**
	RM	478.944.472	01 Peningkatan daya dukung daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati melalui pelaksanaan rehabilitasi hutan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan	ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan	47 Rekomendasi Kebijakan	31.313.793
	PNBP	1.028.160.000	02 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK	4.000.000
	HLN	216.599.940	03 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan serta berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	7 Lembaga	365.400
			04 Meningkatan peran perhutanan sosial dalam penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	2.525 Badan usaha	12.473.000
			05 Penegakan hukum kehutanan dan pengendalian kebakaran hutan yang berdampak pada penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	458 layanan	13.991.133

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	06 Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	BCE Penanganan Perkara	7 Perkara	3.000.000
	07 Meningkatkan peran perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	394 Lembaga	128.121.548
	08 SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.130 Orang	5.100.000
	09 Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	58.592.978
	10 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	100 UMKM	10.960.000
	11 Meningkatnya pengelolaan hutan lindung dan produksi yang berdampak terhadap peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	BDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	60 Badan usaha	9.300.000
	12 Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem	BIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	295 Badan Usaha	9.000.000
	13 Pemantapan kawasan hutan yang legitimate dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	BMA Data dan Informasi Publik	771 dokumen, Peta, Data	76.495.428
	14 Meningkatkan peran perhutanan sosial dalam mendukung peningkatan produk barang dan jasa dari hutan	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	17 Unit	76.553.382
	15 Meningkatnya layanan dukungan tugas teknis kementerian	CDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	28 unit	778.000
		PAD Peraturan Presiden	1 PerPres, R Perpres	1.000.000

SK No 160782 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	536	Rekomendasi Kebijakan	86.460.000
		PEE Kemitraan	20	Kesepakatan	1.170.000
		PEF Sosialisasi dan Diseminasi	2.000	orang	200.000
		QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	1	Orang, Akta, Bidang, Laporan	1.650.000
		QAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	386	Badan usaha	21.596.000
		QAH Pelayanan Publik Lainnya	116	layanan	13.490.000
		QCE Penanganan Perkara	42	Perkara	87.861.107
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	115	Lembaga	9.523.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.681	Orang	25.810.000
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.844	Kelompok Masyarakat	148.533.543
		QDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	456	Badan usaha	25.523.000
		QHG Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	665	operasi	40.845.056
		QIH Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	643	Badan Usaha	29.250.525
		QMA Data dan Informasi Publik	492	dokumen, Peta, Data	38.280.000
		RAD Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.030	Unit	54.991.355
		RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	21.580.005	unit	216.250.000
		RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	22.601	bidang, hektar	147.466.372
		RDK OP Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9	unit	569.439
		REA Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	2.283.034	Hektar	377.261.360

SK No 160781 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 143
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				RES Konservasi Jenis/Spesies	185 Spesies, Lokasi		4.500.000
				SCE Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	170 Orang, Peta, Data		10.250.000
				UAB Sistem Informasi Pemerintahan	34 Sistem Informasi		26.500.000
Program	**3) WA**	**Program Dukungan Manajemen**					**4.203.232.096**
	RM	4.181.812.096	01 Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	ABV Kebijakan Bidang Kehutanan	6 Rekomendasi Kebijakan		2.380.091
	PNBP	21.420.000	02 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan	AEA Koordinasi	3 kegiatan		2.175.381
				BAH Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan		1.161.250
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	574 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit		4.171.146.721
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	150 Unit, m2, Paket		7.213.859
				EBC Layanan Manajemen SDM Internal	2.501 Orang, Layanan, Rekomendasi		2.338.260
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	118 Dokumen, Layanan, Laporan Rekomendasi		14.632.024
				FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi		1.998.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	144	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP					1.398.394.243
2 Fungsi	04	EKONOMI					839.897.829
	05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					558.696.414
3 Program	1) FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim					58.760.177
	2) FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup					476.441.860
	3) WA	Program Dukungan Manajemen					861.162.376
Program	1) FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim					58.760.177
	RM	47.156.777	01 Menurunnya emisi GRK dan 5 sektor NDC yang terverifikasi	BCB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	11 Lembaga	12.634.400
	HLN	11.603.400	02 Menurunnya tingkat kerentanan iklim di lokasi prioritas	PBB	Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	7 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	7.997.110
			03 Meningkatnya PNBP dan Ekonomi Karbon	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	1.612.511
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5 Lembaga	1.000.000
				QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	323 Kelompok Masyarakat	14.191.382
				QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	80 Badan Usaha	2.430.000
				QII	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan	40 Hektar, Layanan	5.014.505
				QMA	Data dan Informasi Publik	6 dokumen, Peta, Data	5.062.669
				RAC	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20 Unit, Pos	8.088.012
				UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan, Layanan	1.611.262

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
Program **2) FD Program Kualitas Lingkungan Hidup**					**476.441.890**
RM 476.441.890	01 Meningkatnya penguatan kebijakan di bidang lingkungan hidup	ABJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	11 Rekomendasi Kebijakan	5.500.000
	02 Meningkatnya penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan rekomendasi perubahan iklim yang berkelanjutan	ADA	Standarisasi Produk	10 produk	100.000
	03 Meningkatnya kualitas air	ADF	Sertifikasi Lembaga	3 Lembaga, Badan Usaha	100.000
	04 Meningkatnya kualitas udara	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	450 Orang	700.000
	05 Meningkatnya kualitas lahan	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3 NSPK	75.000
	06 Meningkatnya kualitas tutupan lahan	BAC	Pelayanan Publik kepada badan usaha	675 Badan usaha	1.150.000
	07 Meningkatnya kualitas air laut	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	31 layanan	4.371.000
	08 Meningkatnya layanan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas lingkungan hidup	BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	17 Lembaga	2.171.713
	09 Meningkatnya Kualitas Ekosistem Esensial	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	360 Orang	946.237
	10 Meningkatnya pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100 Kelompok Masyarakat	1.977.517
	11 Meningkatnya pengelolaan Limbah B3 dan Non B3	BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	60 Badan usaha	7.196.023
	12 Meningkatnya penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	8 Industri	1.843.310
	13 Meningkatnya pengelolaan sampah	BMA	Data dan Informasi Publik	2 dokumen, Peta, Data	1.100.000
	14 Menurunnya ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	CCG	OP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2 Unit	2.050.000
	15 Menurunnya emisi GRK dan sub sektor limbah padat domestik	CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	2.028.933
	16 Meningkatnya nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup	DBA	Pendidikan Tinggi	8 Orang	391.559

SK No 160778 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	17. Meningkatnya PNBP dari Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup	DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	259 Orang	3.785.000
	18. Meningkatnya penegakan hukum dibidang lingkungan hidup	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	100.000
	19. Meningkatnya Indeks Produktifitas dan Daya Saing SDM Lingkungan Hidup	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	357 Orang, Layanan, Rekomendasi	300.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem Informasi	5.189.682
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	375 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	32.813.214
		PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	54 Rekomendasi Kebijakan	10.200.000
		PDA	Standarisasi Produk	3 produk	300.000
		PEB	Forum	7 forum	700.000
		PEE	Kemitraan	15 Kesepakatan	483.300
		PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	17 NSPK	665.000
		QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	21 Lembaga	525.000
		QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.469 layanan	20.397.526
		QCE	Penanganan Perkara	64 Perkara	51.785.467
		QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.455 Lembaga	5.753.658
		QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	186 Kelompok Masyarakat	24.717.021
		QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	136 Badan usaha	7.816.109
		QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	3.949 Industri	17.146.434
		QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	885 Badan Usaha	48.832.542

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QMA	Data dan Informasi Publik	2.175 dokumen, Peta, Data	39.621.879
		RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	57 Unit	86.339.139
		RBR	Dukungan Teknis	2 Dokumen	2.300.000
		RCG	GP Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	368 Unit	23.662.000
		REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	430 Hektar	5.850.866
		SCE	Pelatihan Bidang Kehutanaran dan Lingkungan Hidup	1.300 Orang	2.600.000
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi	5.510.000
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	2.380 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	22.386.005
		UBR	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	85 Desa, DesaKelurahan	24.250.756
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**861.162.376**
RM 861.162.376	01 Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi KLH yang agile, efektif, dan efisien	AEA	Koordinasi	6 kegiatan	2.808.588
	02 Meningkatnya laporan keuangan KLH yang transparan dan akuntabel	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4 layanan	3.361.562
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	144 Layanan, Laporan, Dokumen Rekomendasi, Unit	818.334.524
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	201 Unit, m2, Paket	18.302.879
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.501 Orang, Layanan, Rekomendasi	3.139.362
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	184 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	11.601.661

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 144

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	4 Sistem informasi	3.613.883

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					118.506.000.000
2 Fungsi	04	EKONOMI					92.219.920.894
	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					13.226.624.577
	10	PENDIDIKAN					23.060.554.529
3 Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					140.648.886
	2) FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air					32.095.164.080
	3) GA	Program Infrastruktur Konektivitas					42.606.582.257
	4) GM	Program Prasarana Strategis					23.916.726.864
	5) IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					10.694.320.539
	6) WA	Program Dukungan Manajemen					9.052.557.404
Program	1) DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					140.648.886
	RM	129.407.739	01 Meningkatnya SDM Vokasional Pendidikan Bidang Pekerjaan Umum yang Kompeten dan Siap Kerja	ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga, Unit Kerja	1.000.000
	PNBP	11.241.127		ASC	Kerja sama	1 Kesepakatan, Dokumen Kegiatan	500.000
				BOC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	3 Lembaga	19.741.127
				CAA	Sarana Bidang Pendidikan	1 Paket, Unit	44.000.000
				CDJ	DP Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1 unit	19.707.739
				DAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	21.379 Orang	46.977.952



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				DCO Pelatihan Vokasi	2.664 Orang		7.022.046
				DDA Penelitian dan Pengembangan Produk	6 produk, RUU		2.700.000
Program	**2) FC**	**Program Ketahanan Sumber Daya Air**					**32.095.164.080**
		RM 24.932.631.079	01 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	41 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		41.163.777
		RMP 135.229.378	02 Bertransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	AEA Koordinasi	79 kegiatan		74.135.864
		SBSN 2.009.353.227		BAH Pelayanan Publik Lainnya	519 layanan		255.168.946
		PLN 5.017.950.402		BHC Operasi Bidang Penanggulangan Bencana	126 operasi		380.490.990
				BHD Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	102 Operasi		82.250.367
				BMA Data dan Informasi Publik	145 dokumen, Peta, Data		147.364.896
				CAH Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	13 Unit		24.934.923
				CAP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	51 Unit		102.300.000
				CBQ Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	67 unit		1.100.119.884
				CBH Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	20 Unit		304.954.607
				CBR Dukungan Teknis	1.049 Dokumen		2.469.404.098
				CBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	758 Km		5.040.023.069
				CCM DP Sarana Bidang Pencarian dan Penanggulangan Bencana	855 Unit		166.517.378
				CDC DP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	6.285 unit		1.671.380.260

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
				COH	OP Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana	552 unit	324.067.202
				CDR	OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	51.148 km	1.750.196.099
				RBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	20 unit	2.849.912.526
				RBH	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana	12 unit	668.811.550
				RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	884 Km	11.941.146.664
				RDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	1 unit	2.700.000.000
Program	**3) GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**					**42.606.582.257**
	RM	29.134.985.151	01 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	58 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	365.487.648
	SBSN	4.054.039.624	02 Meningkatnya kinerja pelayanan jalan tol	BEE	Bantuan Ketenteraman	1 Paket	203.345.351
	RMP	609.466.588	03 Meningkatnya konektivitas jalan daerah	CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	2.708 km	1.262.858.213
	PDN	3.005.253.840	04 Meningkatnya kualitas proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	CBF	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	26.135 m	141.824.146
	PLN	5.802.837.254		CBR	Dukungan Teknis	541 Dokumen	1.958.140.852
				CDC	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	43.441 km	4.358.382.336
				CDF	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	444.806 m	516.228.040
				RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	157 km	16.883.320.773
				RBF	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	8.753 m	1.707.364.216
				RBR	Dukungan Teknis	3 Dokumen	578.676.590

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		RDC OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	4.124	km	12.270.642.360
		RDF OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	107.975	m	2.353.511.732
Program 4) GM Program Prasarana Strategis					**23.910.726.854**
RM 23.910.726.854	01 Meningkatnya keandalan bangunan prasarana strategis untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai penugasan kepada Kementerian PU	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3	Rekomendasi Kebijakan	22.000.000
		BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	2.800.000
		DBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	3	unit, Hektar	24.869.700
		DBV Prasarana Bidang Kesehatan	2	Unit	100.782.766
		FAD Perencanaan dan Penganggaran	37	Layanan, Dokumen	130.600.094
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	3	Laporan, Layanan	8.024.689
		RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	9	unit, Hektar, KK, Liter/detik, SR, Kawasan	436.853.670
		RBI Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	1.145	unit	22.808.858.951
		RBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	7	unit	301.046.722
		RBL Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	6	unit, Ruas	255.204.707
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	2	unit, Kawasan	20.885.503
Program 5) IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					**10.694.320.539**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	RM	7.921.071.331	01 Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan aset infrastruktur air minum, air limbah domestik, dan persampahan yang aman dan berkelanjutan;	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	128 Rekomendasi Kebijakan, Kajian	93.690.594
	SBSN	218.685.602	02 Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur Kesiptakaryaan di Kawasan Strategis dan Percepatan Bangunan Gedung yang Andal	AEE	Kemitraan	2 Kesepakatan	4.700.000
	PLN	2.553.893.927	03 Meningkatnya Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Infrastruktur Cipta Karya	AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	7 NSPK	9.005.000
	HLN	869.569		BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2.863 layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, ttnk	50.721.961
				BHC	Operasi Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana	35 operasi	100.000.000
				BMA	Data dan Informasi Publik	36 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	26.474.700
				CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	161 unit, Hektar	1.289.469.678
				DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	5.930 Orang, Kegiatan	22.562.361
				FAD	Perencanaan dan Penganggaran	36 Layanan, Dokumen	239.907.176
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	58 Laporan, Rekomendasi	110.127.836
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.697 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	153.808.738
				PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10 NSPK	11.700.000
				QAH	Pelayanan Publik Lainnya	2 layanan	1.305.801
				RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	154.874 unit, Hektar, KK, Lberdelik SR, Kawasan	8.321.403.209
				SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	700 Orang	6.306.472

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.585	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kabkota	302.813.993
Program 6) WA Program Dukungan Manajemen					**9.052.557.404**
RM 9.052.557.404	01 Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	AAG Peraturan Menteri	1	PerMen, Perka, RPermen	200.000
		AAH Peraturan lainnya	6	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	210.000
		ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	38	Rekomendasi Kebijakan	12.681.665
		ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	51	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	83.180.000
		ADI Sertifikasi Profesi dan SDM	80	Orang, Sertifikat	166.350
		AEC Kerja sama	9	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	7.579.912
		AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	56	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	17.445.971
		BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	9	Orang, Akta, Keping, Bidang	5.966.964
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	36	layanan, bidang, dokumen Nilai Rp.1Bik	41.321.150
		BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.170	Lembaga	17.541.714
		BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	30	Kelompok Masyarakat	464.764
		BNA Data dan Informasi Publik	8	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	50.559.600
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	Unit	24.245.116

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 145
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		CBR	Dukungan Teknis	13 Dokumen	38.650.000
		OCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	11.266 Orang	20.814.267
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.366 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.369.451.704
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.330 Unit, m2, Paket	148.934.160
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	61.511 Orang, Layanan, Rekomendasi	83.362.145
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2.676 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	111.952.208
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	8.920.072
		FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	456 Laporan, Rekomendasi	10.431.469
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.708 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	8.404.133

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	146	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.895.507.244
2 Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					10.895.507.244
3 Program	1) IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					9.913.546.976
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					981.960.268
Program	1) IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					9.913.546.976
	RM	9.913.546.976	01 Meningkatnya Hunian Layak di Kawasan Permukiman	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	258 Rekomendasi Kebijakan	73.333.337
				AEA	Koordinasi	3 kegiatan	2.339.280
				AEE	Kemitraan	2 Kesepakatan	1.435.640
				AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	950 orang	800.000
				AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8 NSPK	3.164.884
				BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3 Lembaga	1.862.250
				BMA	Data dan Informasi Publik	52 dokumen, Peta, Data	10.782.707
				CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	212 unit, Hektar	70.822.647
				CBN	Dukungan Teknis	69 Dokumen	17.674.306
				DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	200 Orang	828.136
				FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	182 Laporan, Layanan	44.058.859
				FBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	20 Rekomendasi Kebijakan	4.660.000
				PEA	Koordinasi	22 kegiatan	6.621.796

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 146

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	407.136	unit, Hektar	9.674.762.934
Program 2) WA Program Dukungan Manajemen					**981.960.268**
RM 981.960.268	01 Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PKP	AEC Kerja sama	6	Kesepakatan	552.726
	02 Meningkatnya Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	14	NSPK	666.085
	03 Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	308.000
	04 Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit	117.415
	05 Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	117.610
	06 Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	437	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	938.282.838
	07 Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.370	Unit, m2, Paket	18.267.661
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1.160	Orang, Layanan, Rekomendasi	6.520.309
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	154	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	17.520.129
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1	Sistem Informasi	472.975
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan, Layanan	114.306

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	**147**	**KEMENTERIAN PARIWISATA**					**1.851.694.285**
2 Fungsi	**09**	**PARIWISATA**					**1.245.307.121**
	10	**PENDIDIKAN**					**606.387.164**
3 Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**284.110.065**
	2) EK	**Program Pariwisata**					**603.970.253**
	3) WA	**Program Dukungan Manajemen**					**963.613.967**
Program	**1) DL**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**					**284.110.065**
	RM	232.000.000	01 Meningkatnya kapabilitas SDM Kepariwisataan	PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	6.751 Orang	4.770.534
	PNBP	52.110.065		PEC	Kerja sama	186 Kesepakatan	4.101.766
				RAA	Sarana Bidang Pendidikan	8 Paket, Unit	14.900.000
				RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	3 unit	60.750.000
				SAD	Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	21.850 Orang	199.587.753
Program	**2) EK**	**Program Pariwisata**					**603.970.253**
	RM	597.500.000	01 Terwujudnya destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	3 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
	BLU	6.470.253	02 Meningkatnya kapasitas dan skala industri pariwisata nasional	ABK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	2 Rekomendasi Kebijakan	2.000.000
			03 Meningkatnya kualitas dukungan kebijakan berbasis kajian dan jejaring kebijakan terhadap bidang pariwisata	ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	1 Rekomendasi Kebijakan	620.000
			04 Meningkatnya jumlah dan kapasitas SDM pariwisata	AEA	Koordinasi	6 kegiatan	2.110.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	05 Meningkatnya frekuensi dan kualitas wisatawan mancanegara dan Wisatawan Nusantara serta citra pariwisata Indonesia	AEC	Kerja sama	20 Kesepakatan	12.400.000
		AEE	Kemitraan	1 Kesepakatan	3.743.520
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	12.975 orang	60.925.000
		AEG	Konferensi dan Event	46 Kegiatan	12.102.750
		AEH	Promosi	43 promosi	48.898.430
		AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	278 NSPK	39.550.980
		BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.000 Orang	9.250.000
		BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	150 Badan usaha	950.000
		CAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	1 Unit	100.000
		CBR	Dukungan Teknis	1 Dokumen	100.000
		DCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	4.000.000
		DCD	Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	20 Orang	200.000
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	5 Sistem Informasi	3.350.000
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	255 Orang, Layanan, Rekomendasi	2.650.000
		FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.210.000
		FBA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2 Rekomendasi Kebijakan	2.600.000
		FBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	1.400.000

SK No 160763 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		PBP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	8	Rekomendasi Kebijakan	7.000.000
		PDI Sertifikasi Profesi dan SDM	2.000	Orang	1.562.872
		PEA Koordinasi	100	kegiatan	40.700.000
		PEC Kerja sama	6	Kesepakatan	5.482.785
		PEG Konferensi dan Event	144	Kegiatan	113.550.000
		PEH Promosi	107	promosi	190.826.945
		GDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	750	Orang	5.648.585
		GDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	38	UMKM	1.300.000
		GDH Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	241	Badan usaha	9.905.000
		GDI Fasilitasi dan Pembinaan Industri	4	Industri	1.250.000
		GMA Data dan Informasi Publik	2	dokumen, Peta, Data	1.600.000
		RAM Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	92	Unit	4.800.000
		RBN Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	7	unit, hektar	6.474.695
		RBO Prasarana Pengembangan Kawasan	1	bidang, hektar	1.079.393
		SCD Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	700	Orang	2.633.228
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**					**963.613.967**
RM 963.613.967	01 Transformasi birokrasi Kemenpar yang berdampak pada kinerja strategis	BMA Data dan Informasi Publik	1	dokumen, Peta, Data	3.000.000
	02 Terwujudnya Pelayanan Dukungan Manajemen Internal yang Berkualitas	BMB Komunikasi Publik	1	layanan	30.000.000
		CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	39	Unit	714.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 147
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		COL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	138 Unit	10.251.337
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	59 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	605.447.909
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	101 Unit, m2, Paket	40.480.220
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	960 Orang, Layanan, Rekomendasi	19.175.597
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	360 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	50.536.704
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	6 Sistem Informasi	2.996.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	148	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF					528.468.567
2 Fungsi	08	PARIWISATA					528.468.567
3 Program	1) EL	Program Ekonomi Kreatif					80.300.000
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					448.168.567
Program	1) EL	Program Ekonomi Kreatif					80.300.000
	RM	80.300.000	01 Penguatan kebijakan strategis ekonomi kreatif	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	25 Orang	400.000
			02 Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan ekonomi kreatif	BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	100 Badan usaha	1.000.000
			03 Pengembangan skema insentif ekonomi kreatif	FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	100.000
			04 Penguatan Pelindungan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	PAD	Peraturan Presiden	1 PerPres, R.Perpres	439.346
			05 Penguatan infrastruktur ekonomi kreatif	PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	382.000
			06 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif	PBK	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	11 Rekomendasi Kebijakan, RUU	6.138.531
			07 Peningkatan Efektivitas Pemasaran Ekonomi Kreatif	PDC	Sertifikasi Produk	240 produk	1.300.000
			08 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis budaya dan desain	PEA	Koordinasi	2 kegiatan	600.000
			09 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis digital dan teknologi	PEB	Forum	1 forum	2.450.000
			10 Peningkatan nilai Pendanaan dan Pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kreativitas media	PEC	Kerja sama	2 Kesepakatan	1.000.000
			11 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Budaya dan Desain	PEH	Promosi	64 promosi	25.378.994

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	12 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Digital dan Teknologi	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	150.000
	13 Peningkatan Aktivasi Pemasaran dan komersialisasi Ekonomi Kreatif Kreativitas Media	QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4 Lembaga	1.800.000
	14 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas budaya dan desain terhadap PDB nasional	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	680 Orang	3.615.000
	15 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas digital dan teknologi terhadap PDB nasional	QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	122 Badan Usaha, RPP	1.582.500
	16 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif bidang kreativitas media terhadap PDB nasional	QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	98 Industri	17.467.500
	17 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas budaya dan desain	QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	82 Start Up	9.831.993
	18 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas digital dan teknologi	QNA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	500.000
	19 Peningkatan ekspor subsektor ekonomi kreatif bidang kreativitas media	RAM	Sarana Bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan	5 Unit	650.000
	20 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas budaya dan desain	RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	1 unit	1.750.000
	21 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas digital dan teknologi	SCL	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	4.440 Orang	6.744.136
	22 Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap tenaga kerja bidang kreativitas media				
Program **Z) WA Program Dukungan Manajemen**					**449.168.567**
RM 449.168.567	01 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	625.000
	02 Penguatan data ekonomi kreatif	BMB	Komunikasi Publik	1 layanan	2.850.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 148

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	03 Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM ekonomi kreatif	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	500.000
	04 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif	CCL	CP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	400.000
	05 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	434.725.287
	06 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37 Unit, m2, Paket	600.000
	07 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang berkualitas pada Deputi Bidang Kreativitas Media	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	148 Orang, Layanan, Rekomendasi	1.360.080
	08 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.209.300
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	200.000
		PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	200 Orang	700.000
		SCL	Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif	200 Orang	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 149

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	149	KEMENTERIAN KOPERASI					962.043.615
2 Fungsi	04	EKONOMI					962.043.615
3 Program	1) EM	Program Perkoperasian					648.789.275
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					313.254.340
Program	1) EM	Program Perkoperasian					648.789.275
	RM	422.750.000	01 Penguatan dan Pengembangan Koperasi	AEF Sosialisasi dan Diseminasi	100	orang	750.000
	BLU	226.039.275		BAF Pelayanan Publik kepada Koperasi	300	Koperasi	1.800.000
				BDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	360	Koperasi	22.314.210
				EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	28	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	186.382.645
				EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	64	Unit, m2, Paket	2.075.258
				EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	58	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	33.963.972
				FAD Perencanaan dan Penganggaran	3	Layanan, Dokumen	14.609.600
				PAA Undang-Undang	1	UU, RUU	1.500.000
				PAC Peraturan Pemerintah	2	PP, RPP	900.000
				PAD Peraturan Presiden	2	PerPres, R.Perpres	750.000
				PAG Peraturan Menteri	2	PerMen, Perka	1.579.650
				PEG Konferensi dan Event	1	Kegiatan	1.500.000
				QAF Pelayanan Publik kepada Koperasi	14.588	Koperasi	23.843.048
				QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.160	Orang	162.140.400

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 149

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOPERASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	100	Kelompok Masyarakat	2.611.672
		QDF Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi	4.229	Koperasi	154.839.914
		QMA Data dan Informasi Publik	2	dokumen, Peta, Data	18.090.000
		SCF Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2.110	Orang	19.338.906
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**313.254.340**
RM 313.254.340		AEA Koordinasi	4	kegiatan	4.211.800
		AEC Kerja sama	1	Kesepakatan	1.750.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	15	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	209.972.140
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24	Unit, m2, Paket	38.440.980
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1	Orang, Layanan, Rekomendasi, Rekomendasi, Unit	9.275.670
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	19	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	28.053.750
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	5	Sistem Informasi	12.660.000
		PBA Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	3	Rekomendasi Kebijakan	10.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	150	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH					546.590.402
2 Fungsi	04	EKONOMI					546.590.402
3 Program	1) EN	Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan					257.716.028
	2) WA	Program Dukungan Manajemen					288.874.374
Program	1) EN	Program Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan					257.716.028
	RM	237.713.268	01 Penguatan UMKM dan Kewirausahaan	BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	12.090 UMKM	34.080.044
	BLU	20.002.760		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	100.000
				FAD	Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan, Dokumen	2.982.240
				FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Daerah (Prov/KabKota), Provinsi, KabKota	3.527.200
				PAH	Peraturan lainnya	2 peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	1.000.000
				PDC	Sertifikasi Produk	20.161 produk	7.500.000
				PEA	Koordinasi	1 kegiatan	206.309
				PEC	Kerja sama	1 Kesepakatan	1.500.000
				PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1 NSPK	989.077
				QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	1.548 Orang	1.500.000
				QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	5 Lembaga	1.350.000
				QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.315 Orang	32.733.974
				QDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	51.356 UMKM	78.743.885

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		QDJ Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	40 Start Up	2.500.000
		QEO Bantuan Produk dan Peralatan	40 Paket, Unit, Bibit, Bersh, Ekor	11.906.308
		QGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	1 Lembaga	3.600.000
		QMA Data dan Informasi Publik	3 dokumen, Peta, Data	381.078
		SBE Pendidikan Non Gelar	488 Orang	1.206.308
		SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	988 Orang	2.031.017
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	2 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	64.754.961
		UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	640 Orang	4.160.000
		UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	55 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	763.690
Program **3) WA Program Dukungan Manajemen**				**288.874.374**
RM 265.877.134	(I) Penguatan Tata Kelola dalam Mendukung Reformasi Birokrasi	AEA Koordinasi	1 kegiatan	300.000
BLU 22.997.240		BMB Komunikasi Publik	5 layanan	4.500.000
		EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	350.565.690
		EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	210 Unit, Paket	7.990.623
		EBC Layanan Manajemen SDM Internal	100 Orang, Layanan, Rekomendasi	509.848
		EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	22 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	19.868.213
		FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	4.300.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 150
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
		PBK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA			SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	151	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				2.504.226.052
2 Fungsi	06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				2.504.226.052
3 Program	1) CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal				1.808.299.931
	2) WA	Program Dukungan Manajemen				695.926.121
Program	1) CT	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal				1.808.299.931
	RM	1.594.174.322	01 Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan SDA, dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	AEN Kebijakan Bidang Sosial	5 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000
	HLN	17.864.246	02 Meningkatnya Pemberdayaan Desa Adaptif	AEP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	30 Rekomendasi Kebijakan	13.500.000
	PLN	196.261.363	03 Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa	AEA Koordinasi	2 kegiatan	900.000
			04 Meningkatnya Kemandirian Perdesaan pada Daerah Tertinggal	DCJ Pelatihan Bidang Sosial	835 Orang	869.862
			05 Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal serta layanan data desa terpublikasi	FAE Pemanfaatan dan Evaluasi serta Pelaporan	13 Laporan, Layanan	3.000.000
			06 Meningkatnya daya saing kawasan perdesaan dan kemandirian desa di kawasan perdesaan	FBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	10 Desa, DesaKelurahan	1.500.000
			07 Meningkatnya alokasi APBDes dan kegiatan K/L untuk program penurunan kemiskinan di desa	PBP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	8 Rekomendasi Kebijakan	8.338.653
			08 Meningkatnya peran BUM Desa dalam mendukung penurunan kemiskinan	PBS Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	1 Rekomendasi Kebijakan, Rekomendasi	200.000
			09 Meningkatnya omset BUM Desa yang berbadan hukum	PEA Koordinasi	37 kegiatan	32.855.160

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	10 Tersedianya kesepahaman / kerjasama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih	PEC	Kerja sama	110 Kesepakatan	16.500.000
	11 Meningkatnya Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Menurunnya Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Daerah Tertinggal	PEH	Promosi	9 promosi	4.500.000
	12 Meningkatnya Rata-rata alokasi APBD dan jumlah kegiatan K/L di Kabupaten Daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan	PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	4 NSPK	350.000
		CDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	30.896 Orang	1.237.465.271
		CDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.838 Kelompok Masyarakat	179.524.237
		CDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	1.508 Badan usaha	89.104.124
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	146 Unit	51.350.000
		RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	5 km	6.000.000
		RBN	Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	100 unit	44.400.000
		SCJ	Pelatihan Bidang Sosial	4.440 Orang	20.747.172
		UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3 Sistem Informasi	8.757.206
		UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2 Laporan, Layanan	7.500.000
		UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	160.089 Desa, DesaKelurahan	66.814.246
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**695.926.121**
RM 695.926.121	13 Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	AAG	Peraturan Menteri	10 PerMen, Perka	709.655
	14 Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	ABQ	Kebijakan Bidang Aparatur	17 Rekomendasi Kebijakan	3.000.000
	15 Meningkatnya Kualitas Kebijakan, Layanan Data, dan Sistem Informasi	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	200 Orang	1.148.355

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 151

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	16 Meningkatnya Pengawasan Internal	AEA	Koordinasi	15 kegiatan	6.340.339
		AEC	Kerja sama	5 Kesepakatan	1.557.579
		AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	3.600 orang	1.424.566
		BMA	Data dan Informasi Publik	1 dokumen, Peta, Data	8.100.000
		BMB	Komunikasi Publik	1 layanan, konten	5.573.241
		CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	286 Unit	4.564.787
		CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	12.350.000
		CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	4.060.000
		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	113 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	596.744.116
		EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	303 Unit, m2, Paket	13.546.269
		EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2.870 Orang, Layanan, Rekomendasi	11.307.364
		EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	282 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	21.380.586
		FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1 Sistem Informasi	2.266.548
		FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.200 Orang	1.851.645

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA		SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
1 Kementerian Negara/ Lembaga	152 KEMENTERIAN TRANSMIGRASI				1.902.040.784
2 Fungsi	06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				1.902.040.784
3 Program	1) DW Program Transmigrasi				1.337.635.128
	2) WA Program Dukungan Manajemen				564.405.656
Program	1) DW Program Transmigrasi				1.337.635.128
	RM 1.337.635.128	01 Terselenggaranya legalisasi dan pemanfaatan lahan transmigrasi secara optimal guna menjamin kepastian hukum dan mendukung produktivitas kawasan transmigrasi	ABP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	44 Rekomendasi Kebijakan	29.792.623
		05 Terselenggaranya migrasi puatan dalam rangka penguatan pengembangan potensi lokal	ABT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan, Materi Teknis, Dokumen	74.095
		06 Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di kawasan transmigrasi yang unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi	AEA Koordinasi	76 kegiatan	20.310.740
		07 Meningkatnya penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan kawasan transmigrasi secara inklusif dan berkelanjutan	AEC Kerja sama	2 Kesepakatan	308.578
		08 Terwujudnya SDM unggul, berkesadaran kebangsaan, dan berkomitmen dalam pengembangan kawasan transmigrasi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian	AEE Kemitraan	11 Kesepakatan	6.200.150
		09 Terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang produktif dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi melalui penguatan hilirisasi produk lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kolaborasi dunia usaha	AEH Promosi	10 promosi	13.469.405
		10 Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka penguatan pengembangan potensi lokal	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	22 NSPK	5.824.869

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
	11 Terwujudnya pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum dalam rangka penguatan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	12	Lembaga	2.190.001
	12 Terselenggaranya migrasi buatan dalam rangka penguatan pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi	BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7.094	Orang	62.224.069
	13 Terwujudnya Kawasan transmigrasi yang maroon melalui SDM yang berkualitas unggul	BDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	32	Kelompok Masyarakat	6.043.370
		BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	30	UMKM	2.109.290
		BEB Bantuan Keluarga	67	Keluarga	467.950
		BEH Bantuan Kelompok Masyarakat	12	Kelompok Masyarakat	13.822.000
		BEI Bantuan Lembaga	82	Lembaga	22.253.167
		BED Bantuan Produk dan Peralatan	20	Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	1.000.000
		CAI Sarana Pengembangan Kawasan	60	Unit	84.536.649
		CBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	66	km	90.568.038
		CBF Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	333	m	29.389.470
		CBS Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	8	Km	8.232.295
		FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	93	Laporan, Layanan	11.677.960
		PSP Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	205	Rekomendasi Kebijakan	161.640.805
		QCC Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	55	Perkara	2.592.320
		QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10	Lembaga	225.000
		QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	33.559	Orang	8.022.059
		QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	371	Keluarga	6.664.201

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN			ALOKASI
		QEB	Bantuan Keluarga	4.241 Keluarga	54.390.042
		QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	1.000 Orang	400.271.540
		QEO	Bantuan Produk dan Peralatan	9 Paket, Unit, Bibit, Benih, Ekor	445.000
		RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	313 Unit	161.126.084
		RBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	66 km	124.423.290
		RBF	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	150 m	20.822.296
		RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	3 Km	2.552.776
		UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	28 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.026.000
Program **2) WA Program Dukungan Manajemen**					**564.405.656**
RM 564.405.656	01 Menguatnya Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	AEA	Koordinasi	1 kegiatan	1.466.134
	03 Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian	CAN	Sarana Bidang Teknolog Informasi dan Komunikasi	433 Unit	7.440.716
	04 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana dan layanan pengadaan	CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	15.606.000
	05 Meningkatnya Kualitas Penataan Peraturan Perundang-undangan	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	220 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	457.529.730
	06 Terlaksananya pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.391 Unit, m2, Paket	37.261.359
	07 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Transmigrasi	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	741 Orang, Layanan, Rekomendasi	14.915.601

SK No 160787 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN		ALOKASI
	08 Meningkatnya kinerja perencanaan dan penganggaran	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	246 Dokumen Layanan Laporan Rekomendasi	20.663.615
	09 Meningkatnya kepuasan atas layanan dukungan manajemen	FAB Sistem Informasi Pemerintahan	8 Sistem Informasi	9.213.310
	10 Meningkatnya layanan keterbukaan informasi publik			
	11 Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)			
	12 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	13 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	14 Meningkatnya Penerapan Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	15 Meningkatnya Layanan Kearsipan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	17 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi			
	18 Meningkatnya Penerapan Pengendalian Internal Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi			
	19 Meningkatnya Layanan Kearsipan Direktorat jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi			
	20 Peningkatan kualitas layanan, pengelolaan data, dan pengembangan teknologi informasi transmigrasi			
	21 Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Kawasan Transmigrasi			

III.2 RINGKASAN EKSEKUTIF INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA T.A. 2026

BAGIAN ANGGARAN : 152
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

(dalam ribuan rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA FUNGSI PROGRAM DAN SUMBER DANA	SASARAN / OUTCOME	KELUARAN	ALOKASI
	22 Meningkatnya layanan pengkajian dan pengembangan strategi kebijakan penyelenggaraan transmigrasi 23 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern di Kementerian 24 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Yang Bernilai Tambah 25 APIP yang Optimal dan Berintegritas 26 Meningkatnya layanan dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum 28 Meningkatnya kualitas ASN Kementerian Transmigrasi		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,

Ayda Silvanna Djaman

SK No 160476 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN 2026

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.01] PENGELOLA UTANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**599.440.898.164**	**599.440.898.164**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.01] PENGELOLA UTANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA BUNGA DAN PINJAMAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH		0	0	0	599.440.898.164	599.440.898.164
999 01.06	Program Pengelolaan Utang Negara		0	0	0	599.440.898.164	599.440.898.164
	Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang	RM	0	0	0	599.440.898.164	599.440.898.164
1	Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri		0	0	0	538.701.328.102	538.701.328.102
2	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri		0	0	0	60.739.570.062	60.739.570.062
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**599.440.898.164**	**599.440.898.164**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.02] PENGELOLA HIBAH

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA HIBAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**350.610.000**	**350.610.000**
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA		0	0	0	350.610.000	350.610.000
999 02.07	Program Pengelolaan Hibah Negara		0	0	0	350.610.000	350.610.000
	Pengelolaan Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan *Banking Commission*	RM	0	0	0	350.610.000	350.610.000
1	Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing		0	0	0	349.610.000	349.610.000
2	*Banking Commission*		0	0	0	1.000.000	1.000.000
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**350.610.000**	**350.610.000**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**0**	**0**	**10.649.892.145**	**10.649.892.145**
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA		0	0	0	10.649.892.145	10.649.892.145
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	10.649.892.145	10.649.892.145
	Pengelolaan Subsidi Pajak	RM	0	0	0	10.649.892.145	10.649.892.145
1	PPh atas Komoditas Panas Bumi		0	0	0	3.645.004.553	3.645.004.553

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : |999| BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : |999.07| PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	PPh DTP Bunga, Imbal Hasil, dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Atau Pihak Lain Yang Mendapat Penugasan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali SBN di Pasar Internasional, Tetapi Tidak Termasuk Jasa Konsultan Hukum Lokal		0	0	0	7.004.887.592	7.004.887.592
04	**EKONOMI**		**0**	**0**	**0**	**302.658.090.890**	**302.658.090.890**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
04 01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		0	0	0	36.685.721.902	36.685.721.902
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	174.950.694	174.950.694
	Pengelolaan Subsidi Kredit Program	RM	0	0	0	174.950.694	174.950.694
1	Skema Subsidi Resi Gudang		0	0	0	5.753.771	5.753.771
2	Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah		0	0	0	169.196.923	169.196.923
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	36.510.771.208	36.510.771.208

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR	RM	0	0	0	36.510.771.208	36.510.771.208
1	Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR		0	0	0	16.192.000	16.192.000
2	Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Rakyat		0	0	0	36.483.962.208	36.483.962.208
3	Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)		0	0	0	10.617.000	10.617.000
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, DAN KELAUTAN		0	0	0	46.874.493.429	46.874.493.429
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	46.874.493.429	46.874.493.429

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi Pupuk	RM	0	0	0	46.874.493.429	46.874.493.429
1	Subsidi Pupuk		0	0	0	46.874.493.429	46.874.493.429
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI		0	0	0	210.060.831.700	210.060.831.700
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	210.060.831.700	210.060.831.700
	Pengelolaan Subsidi Energi	RM	0	0	0	210.060.831.700	210.060.831.700
1	Subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT)		0	0	0	25.144.542.060	25.144.542.060
2	Subsidi LPG Tabung 3 Kg		0	0	0	80.269.826.037	80.269.826.037
3	Subsidi Listrik		0	0	0	104.646.463.603	104.646.463.603
04.08	TRANSPORTASI		0	0	0	8.832.660.963	8.832.660.963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	5.864.206.808	5.864.206.808
	Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian	RM	0	0	0	5.864.206.808	5.864.206.808
1	PSO Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi		0	0	0	5.864.206.808	5.864.206.808
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	2.968.454.155	2.968.454.155
	Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut	RM	0	0	0	2.968.454.155	2.968.454.155
1	PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi		0	0	0	2.968.454.155	2.968.454.155
04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		0	0	0	182.178.954	182.178.954
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	182.178.954	182.178.954

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	RM	0	0	0	182.178.954	182.178.954
1	PSO Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers		0	0	0	182.178.954	182.178.954
04.90	EKONOMI LAINNYA		0	0	0	22.203.942	22.203.942
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	22.203.942	22.203.942
	Pengelolaan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	RM	0	0	0	22.203.942	22.203.942
1	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah		0	0	0	22.203.942	22.203.942
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**		**0**	**0**	**0**	**10.817.821**	**10.817.821**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : |999| BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : |999.07| PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
06 90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA		0	0	0	10.817.821	10.817.821
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	10.817.821	10.817.821
	Pengelolaan Subsidi Bunga Air Bersih	RM	0	0	0	10.817.821	10.817.821
1	Subsidi Bunga Penyediaan Air Minum		0	0	0	10.817.821	10.817.821
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		**0**	**0**	**0**	**5.567.434.751**	**5.567.434.751**
11.07	BANTUAN PERUMAHAN		0	0	0	5.567.434.751	5.567.434.751
999.07.11	Program Pengelolaan Subsidi		0	0	0	5.567.434.751	5.567.434.751
	Pengelolaan Subsidi Perumahan	RM	0	0	0	5.567.434.751	5.567.434.751
1.	Subsidi Perumahan		0	0	0	5.567.434.751	5.567.434.751

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLA SUBSIDI

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA SUBSIDI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH TOTAL		**0**	**0**	**0**	**318.886.235.607**	**318.886.235.607**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] PENGELOLA BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM	RM	32.296.800.000	0	0	21.734.693.526	54.031.493.526
01	PELAYANAN UMUM	PLN	0	0	0	9.339.881.580	9.339.881.580
01	PELAYANAN UMUM	PDN	0	0	0	187.118.420	187.118.420
02	PERTAHANAN	RM	0	0	0	150.550.000.000	150.550.000.000
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	RM	0	0	5.000.000.000	4.000.000.000	9.000.000.000
04	EKONOMI	RM	0	0	0	289.762.521.406	289.762.521.406
07	KESEHATAN	RM	0	0	0	11.000.000.000	11.000.000.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] PENGELOLA BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	
08	PARIWISATA	RM	0	0	0	683.000.000	683.000.000
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	RM	0	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000
	JUMLAH TOTAL		**32.296.800.000**	**0**	**5.000.000.000**	**489.257.214.932**	**526.554.014.932**

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	**PELAYANAN UMUM**		**0**	**376.406.836**	**0**	**514.491.403**	**890.898.239**
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI		0	376.406.836	0	514.491.403	890.898.239
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	0	0	160.249.068	160.249.068
	Pengelolaan Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	RM	0	0	0	160.249.068	160.249.068

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : |999| BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : |999.99| PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog		0	0	0	160.249.068	160.249.068
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	376.406.836	0	0	376.406.836
	Pengelolaan Pembayaran Belanja Terkait Pengelolaan Kas Negara	RM	0	376.406.836	0	0	376.406.836

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : |999| BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : |999.99| PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembiayaan Operasional BUN Pengelolaan Kas Negara		0	376.406.836	0	0	376.406.836
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus					354.242.335	354.242.335
	Pengelolaan Dana PNBP BUN Dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Pengawasan BUN	PNBP				354.242.335	354.242.335

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : |999| BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : |999.99| PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan, Pengembangan dan Pengawasan BUN					354.242.335	354.242.335
04	**EKONOMI**		**0**	**782.997.261**	**0**	**0**	**782.997.261**
04.90	EKONOMI LAINNYA		0	782.997.261	0	0	782.997.261
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	219.212.632	0	0	219.212.632
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama	RM	0	219.212.632	0	0	219.212.632

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dana Dukungan Kelayakan/ *Viability Gap Fund* (VGF) pada Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)		0	219.212.632	0	0	219.212.632
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	352.303.151	0	0	352.303.151

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Fasilitas Penyiapan Proyek	RM	0	352.303.151	0	0	352.303.151
	Dana Fasilitas Penyiapan Proyek dengan Skema KPBU		0	352.303.151	0	0	352.303.151
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	206.822.210	0	0	206.822.210

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : |999| BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : |999.99| PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengelolaan Pembayaran Kontribusi dan *Trust Fund* ke Lembaga Internasional	RM	0	206.822.210	0	0	206.822.210
	Kontribusi ke Lembaga Internasional		0	206.822.210			206.822.210
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		0	4.659.268	0	0	4.659.268
	Pengelolaan Dukungan Investasi Pemerintah	RM	0	4.659.268	0	0	4.659.268

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Penggantian Biaya dan Margin Investasi		0	4.659.268	0	0	4.659.268
11	**PERLINDUNGAN SOSIAL**		**191.412.212.525**	**868.746.272**	**0**	**0**	**192.280.958.797**
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL		191.412.212.525	868.746.272	0	0	192.280.958.797
999.99.13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus		191.412.212.525	868.746.272	0	0	192.280.958.797
	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial	RM	191.412.212.525	868.746.272	0	0	192.280.958.797

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : |999| BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : |999.99| PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Anggaran Manfaat Pensiun		177.121.404.794	0	0	0	177.121.404.794
2	Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan)		12.604.516.299	0	0	0	12.604.516.299
3	Cicilan UPSL Program THT		0	0	0	0	0

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : |999| BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : |999.99| PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Jamkesmen dan Jamkestama		687.598.981	0	0	0	687.598.981
5	IWP Program Jaminan Kecelakaan Kerja		353.327.191	0	0	0	353.327.191
6	IWP Program Jaminan Kematian		645.365.260	0	0	0	645.365.260
7	BOP Manfaat Pensiun		0	868.746.272	0	0	868.746.272

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLA TRANSAKSI KHUSUS

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH TOTAL		**191.412.212.525**	**2.028.150.369**	**0**	**514.491.403**	**193.954.854.297**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum

Lydia Silvanna Djaman
SK No 166459 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

V.1 RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	APBN TA 2026
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	58.515.000.000
1. DBH Pajak	26 837.190.871
a. Pajak Penghasilan	15.223.108.671
b. Pajak Bumi dan Bangunan	8.330.520.077
c. Cukai Hasil Tembakau	3.283.562.123
2. DBH Sumber Daya Alam	30.903.117.522
a. Kehutanan	745.973.828
b. Mineral dan Batubara	19.936 639.869
c. Minyak Bumi dan Gas Bumi	9 464 123.596
d. Panas Bumi	537.887.138
e. Perikanan	218.493.091
3. DBH Perkebunan Sawit	774.691.607
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	400.019.370.460
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	386.739.874.265
2. DAU ditentukan penggunaannya	13.279.496.195
a. Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.699.200.000
b. Dukungan Bidang Pendidikan	
c. Dukungan Bidang Kesehatan	4.726.152.330
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	6 854.143.865
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	154.343.290.901
a. Bidang Kesehatan	5.000.000.000
b. Bidang Konektivitas	1.874 490 454
c. Bidang Air Minum	2 376.044 690
d. Bidang Sanitasi	367.302.311
e. Bidang Pangan Pertanian	270.835.827
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	111.326.718
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	149.343.290.901
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	59.295.114.550
c. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	74.763.332.083
	12 878 672 152

URAIAN	APBN TA 2026
d. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.999.172.116
e. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	150.000.000
f. Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	125.000.000
g. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000
3. Hibah kepada Daerah	2,746,687,810
D. Dana Otonomi Khusus	14.000.629.540
1. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	9.000,435.835
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	4.000.193.705
3. Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi-Provinsi di Papua	1.000.000.000
E. Dana Keistimewaan DIY	1.000.000.000
F. Dana Desa	60.570.000.000
G. Dana Insentif Fiskal	1.800.000.000
JUMLAH	692.994.978.711

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Provinsi Aceh	34.356.050	730.277	35.086.327
2	Kab. Aceh Barat	2.779.590	37.190	2.816.780
3	Kab. Aceh Besar	3.020.736	49.289	3.070.025
4	Kab. Aceh Selatan	1.341.524	18.820	1.360.344
5	Kab. Aceh Singkil	1.158.549	22.110	1.180.659
6	Kab. Aceh Tengah	1.532.216	29.754	1.561.970
7	Kab. Aceh Tenggara	1.215.548	22.501	1.238.049
8	Kab. Aceh Timur	1.946.334	24.752	1.971.086
9	Kab. Aceh Utara	3.848.807	76.387	3.925.194
10	Kab. Bireuen	1.989.286	41.087	2.030.373
11	Kab. Pidie	2.033.192	73.371	2.106.563
12	Kab. Simeulue	1.035.538	16.799	1.052.337
13	Kota Banda Aceh	13.710.001	322.977	14.032.978
14	Kota Sabang	1.066.406	18.441	1.084.847
15	Kota Langsa	2.244.451	48.264	2.292.715

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
16	Kota Lhokseumawe	4.306.074	100.458	4.406.532
17	Kab. Gayo Lues	951.497	18.292	969.789
18	Kab. Aceh Barat Daya	1.167.276	18.499	1.185.775
19	Kab. Aceh Jaya	1.141.364	17.391	1.158.755
20	Kab. Nagan Raya	2.327.951	79.265	2.407.216
21	Kab. Aceh Tamiang	2.052.929	74.172	2.127.101
22	Kab. Bener Meriah	1.131.967	16.521	1.148.488
23	Kab. Pidie Jaya	1.186.143	15.312	1.201.455
24	Kota Subulussalam	1.150.044	19.144	1.169.188
25	Provinsi Sumatera Utara	113.010.257	9.874.106	122.884.363
26	Kab. Asahan	4.996.790	337.168	5.333.958
27	Kab. Dairi	2.452.182	174.363	2.626.545
28	Kab. Deli Serdang	16.678.281	823.517	17.501.798
29	Kab. Karo	3.355.914	224.894	3.580.808
30	Kab. Labuhanbatu	4.268.355	302.653	4.571.008

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
31	Kab. Langkat	5.020.624	337.895	5.358.519
32	Kab. Mandailing Natal	3.460.619	177.104	3.637.723
33	Kab. Nias	2.129.763	166.425	2.296.188
34	Kab. Simalungun	6.874.345	278.874	7.153.219
35	Kab. Tapanuli Selatan	5.268.279	219.265	5.487.544
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.910.593	180.792	3.091.385
37	Kab. Tapanuli Utara	3.281.421	177.190	3.458.611
38	Kab. Toba	3.674.222	182.227	3.856.449
39	Kota Binjai	3.587.233	392.376	3.979.609
40	Kota Medan	82.332.232	9 738.748	92.070 980
41	Kota Pematang Siantar	5.425.614	407.370	5.832.984
42	Kota Sibolga	3.235.017	208.385	3.443.402
43	Kota Tanjung Balai	2.536.287	319.512	2.855 799
44	Kota Tebing Tinggi	2.785.465	460.975	3.246.440
45	Kota Padang Sidempuan	3.787.836	193.775	3.981.611

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
46	Kab. Pakpak Bharat	1.855.765	148.533	2.004.298
47	Kab. Nias Selatan	2.280.286	167.422	2.447.708
48	Kab. Humbang Hasundutan	2.411.705	173.661	2.585.366
49	Kab. Serdang Bedagai	4.216.135	356.741	4.572.876
50	Kab. Samosir	2.255.494	169.980	2.425.474
51	Kab. Batu Bara	6.055.922	309.971	6.365.893
52	Kab. Padang Lawas	2.623.567	183.539	2.807.106
53	Kab. Padang Lawas Utara	2.289.605	157.488	2.447.093
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	3.558.923	326.840	3.885.763
55	Kab. Labuhanbatu Utara	2.990.224	217.908	3.208 132
56	Kab. Nias Utara	2.140.155	165.913	2.306.068
57	Kab. Nias Barat	2.178.973	164.740	2.343.713
58	Kota Gunungsitoli	2.861 618	191.066	3.052.684
59	Provinsi Sumatera Barat	39.394.141	2.419.423	41.813.564
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.964.230	117.878	2.082.108

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
61	Kab. Agam	2.624.216	130.814	2.755.030
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.442.765	67.913	1 510.678
63	Kab. Padang Pariaman	2.609.411	86.836	2.696.247
64	Kab. Pasaman	1.767.415	100.632	1.868.047
65	Kab. Pesisir Selatan	2.460.708	81.998	2.542.706
66	Kab. Sijunjung	1.697.259	68.251	1.765.510
67	Kab. Solok	1.740 237	72.929	1.813.166
68	Kab. Tanah Datar	2.217.369	100.687	2.318.056
69	Kota Bukit Tinggi	3.730.777	152.451	3.883.228
70	Kota Padang Panjang	1.658.474	111.667	1.770.141
71	Kota Padang	26.654.410	2.312.855	28.967.265
72	Kota Payakumbuh	2.235.139	130.909	2 366 048
73	Kota Sawahlunto	1.813.300	73.874	1.887.174
74	Kota Solok	2.375.736	81.972	2 457.708
75	Kota Pariaman	1.923.210	80.423	2 003 633

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
76	Kab. Pasaman Barat	2.314.026	80.153	2.394.179
77	Kab. Dharmasraya	1.947.607	95.093	2.042.700
78	Kab. Solok Selatan	2.086.811	70.141	2.156.952
79	Provinsi Riau	81.240.397	4.286.905	85.527.302
80	Kab. Bengkalis	15.668.961	637.527	16.306.488
81	Kab. Indragiri Hilir	5.773.848	437.813	6.211.661
82	Kab. Indragiri Hulu	6.028.118	281.912	6.310.030
83	Kab. Kampar	7.205.445	244 057	7.449.502
84	Kab. Kuantan Singingi	4.663.005	533.628	5.196.633
85	Kab. Pelalawan	11.735.676	216.286	11.951.962
86	Kab. Rokan Hilir	5.238.030	277.919	5.515.949
87	Kab. Rokan Hulu	6.334.258	238.662	6.572.920
88	Kab. Siak	11.242.781	246.100	11.488.881
89	Kota Dumai	12.523.235	1.000.689	13.523.924
90	Kota Pekanbaru	43.775.001	2.640.199	46.415.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
91	Kab. Kepulauan Meranti	4.388.049	356.599	4.744.648
92	Provinsi Jambi	22.859.229	1.162.082	24.021.311
93	Kab. Batang Hari	2.193.405	97.825	2.291.230
94	Kab. Bungo	3.384.718	167.307	3.552.025
95	Kab. Kerinci	1.604.620	60.349	1.664.969
96	Kab. Merangin	1.878.713	92.691	1.971.404
97	Kab. Muaro Jambi	3.106.177	71.588	3.177.765
98	Kab. Sarolangun	2.242.413	64.536	2.306.949
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.705.731	98.485	2.804.216
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.721.445	59.146	2.780.591
101	Kab. Tebo	1.972.469	69.567	2.042.036
102	Kota Jambi	14.228.294	1.082.854	15.311.148
103	Kota Sungai Penuh	1.877.241	65.802	1.943.043
104	Provinsi Sumatera Selatan	77.685.303	4.154.212	81.839.515
105	Kab. Lahat	6.981.066	180.229	7.161.295

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
106	Kab. Musi Banyuasin	8.564.782	172.196	8.736.978
107	Kab. Musi Rawas	3.860.643	150.073	4.010.716
108	Kab. Muara Enim	15.221.686	407.056	15.628.742
109	Kab. Ogan Komering Ilir	5.823.609	145.130	5.968.739
110	Kab. Ogan Komering Ulu	4.587.676	188.387	4.776.063
111	Kota Palembang	47.707.700	3.996.974	51.704.674
112	Kota Prabumulih	6.578.920	246.477	6.825.397
113	Kota Pagar Alam	2.641.189	131.171	2.772.360
114	Kota Lubuk Linggau	4.150.656	213.770	4.364.426
115	Kab. Banyuasin	5.817.907	255.743	6.073.650
116	Kab. Ogan Ilir	3.432.025	157.580	3.589.605
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	3.296.095	181.456	3.477.551
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3.011.867	146.506	3.158.373
119	Kab. Empat Lawang	2.589.691	126.144	2.715.835
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	3.632.133	155.484	3.787.617

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
121	Kab. Musi Rawas Utara	3.253.631	134.118	3.387.749
122	Provinsi Bengkulu	11.064.455	358.947	11.423.402
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.375.279	41.624	1.416.903
124	Kab. Bengkulu Utara	1.763.778	58.305	1.822.083
125	Kab. Rejang Lebong	1.374.405	115.035	1.489.440
126	Kota Bengkulu	8.747.038	232.430	8.979.468
127	Kab. Kaur	995.137	23.263	1.018.400
128	Kab. Seluma	1.120.205	23.879	1.144.084
129	Kab. Mukomuko	1.532.186	40.626	1.572.812
130	Kab. Lebong	940.104	31.432	971.536
131	Kab. Kepahiang	1.160.655	27.682	1.188.337
132	Kab. Bengkulu Tengah	1.165.936	57.594	1.223.530
133	Provinsi Lampung	35.575.216	2.142.387	37.717.603
134	Kab. Lampung Barat	1.653.342	79.135	1.732.477
135	Kab. Lampung Selatan	5.124.264	179.740	5.304.004

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
136	Kab. Lampung Tengah	5.284.173	207.327	5.491.500
137	Kab. Lampung Utara	2.943.762	117.672	3.061.434
138	Kab. Lampung Timur	2.517.940	242 915	2.760.855
139	Kab. Tanggamus	2.466.143	107.424	2.573.567
140	Kab. Tulang Bawang	2.577.865	106.782	2.684.647
141	Kab. Way Kanan	2.412.963	97.412	2.510.375
142	Kota Bandar Lampung	19.557.598	1.590.412	21.148.010
143	Kota Metro	3.364.549	282.101	3.646.650
144	Kab. Pesawaran	1.993.590	74.684	2.068.274
145	Kab. Pringsewu	2.232.934	114.570	2.347.504
146	Kab. Mesuji	1.742.039	74.353	1.816.392
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.734.852	80.749	1.815.601
148	Kab. Pesisir Barat	1.482.899	69 951	1.552.850
149	Provinsi DKI Jakarta	7.086.173.764	400.598.439	7.486.772.203
150	Provinsi Jawa Barat	558.849.646	36.365.705	595.215.351

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
151	Kab. Bandung	29.395.588	1.760.649	31.156.237
152	Kab. Bekasi	186.172.089	6 864 183	193 036 272
153	Kab. Bogor	67.077.868	3.050.380	70.128.248
154	Kab. Ciamis	12.472.836	752.463	13.225.299
155	Kab. Cianjur	15.373.330	2 172.399	17 545.729
156	Kab. Cirebon	20.146.513	1.037.102	21.183.615
157	Kab. Garut	15.710.536	1.008.747	16.719.283
158	Kab. Indramayu	18.190.188	1.305.499	19.495.687
159	Kab. Karawang	92.805.531	2.291.722	95.097.253
160	Kab. Kuningan	12.106.753	819.167	12 925.920
161	Kab. Majalengka	14.122.023	731.319	14.853.342
162	Kab. Purwakarta	30.358.934	873.863	31.232.797
163	Kab. Subang	18.709.895	722.968	19 432 863
164	Kab. Sukabumi	19.441.648	830.489	20.272.137
165	Kab. Sumedang	16.295.062	803.473	17 098.535

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
166	Kab. Tasikmalaya	12.994.683	745.100	13.739.783
167	Kota Bandung	121.832.015	14.373.823	136.205.838
168	Kota Bekasi	51.880.638	4.753.764	56.634.402
169	Kota Bogor	26.839.738	3.061.570	29.901.308
170	Kota Cirebon	17.880.786	1.417.170	19.297.956
171	Kota Depok	34.165.229	3.515.590	37.680.819
172	Kota Sukabumi	13.463.026	941.547	14.404.573
173	Kota Tasikmalaya	15.204.296	1.105.333	16.309.629
174	Kota Cimahi	16.181.510	2.466.598	18.648.108
175	Kota Banjar	11.281.438	705.840	11.987.278
176	Kab. Bandung Barat	19.790.621	1.418.582	21.209.203
177	Kab. Pangandaran	11.196.023	675.790	11.871.813
178	Provinsi Jawa Tengah	189.335.787	16.118.165	205.453.952
179	Kab. Banjarnegara	5.533.320	358.842	5.892.162
180	Kab. Banyumas	12.185.773	788.562	12.974.335

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
181	Kab. Batang	6.734.297	346.006	7.080.303
182	Kab. Blora	5.119.859	332.404	5.452.263
183	Kab. Boyolali	6.220.529	467.468	6.687.997
184	Kab. Brebes	6.347.907	448.774	6.796.681
185	Kab. Cilacap	12.988.178	980.721	13.968.899
186	Kab. Demak	6.345.007	377.771	6 722.778
187	Kab. Grobogan	5.491 326	345.939	5.837.265
188	Kab. Jepara	9.409.277	702.296	10.111.573
189	Kab. Karanganyar	7.824.771	522.438	8.347.209
190	Kab. Kebumen	5.045.985	554.434	5.600.419
191	Kab. Kendal	6.665.612	400.475	7.066.087
192	Kab. Klaten	7.169.932	663.470	7.833.402
193	Kab. Kudus	31.896.317	1.740.148	33.636.465
194	Kab. Magelang	5.261.527	405.104	5 666.631
195	Kab. Pati	6.153.750	521.470	6.675.220

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
196	Kab. Pekalongan	4.007.624	284.425	4.292.049
197	Kab. Pemalang	4.924.895	352.129	5.277.024
198	Kab. Purbalingga	5.156.872	391.920	5 548 792
199	Kab. Purworejo	4.451.551	434.768	4.886.319
200	Kab. Rembang	4.750.156	426.591	5.176.747
201	Kab. Semarang	8.936.921	533.206	9.470.127
202	Kab. Sragen	5.456.543	369.778	5.826.321
203	Kab. Sukoharjo	8.495.729	824.616	9 320 345
204	Kab. Tegal	6.195.063	383.483	6.578.546
205	Kab. Temanggung	5.035.886	382.060	5.417.946
206	Kab. Wonogiri	5.109.125	324.206	5.433.331
207	Kab. Wonosobo	4.348.654	294.877	4.643.531
208	Kota Magelang	5.497.045	574.715	6.071.760
209	Kota Pekalongan	5.747.449	989.086	6.736.535
210	Kota Salatiga	6.068.941	665.068	6.734.009

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
211	Kota Semarang	66.802.202	6.792.051	73.594.253
212	Kota Surakarta	14.325.143	2.405.943	16.731.086
213	Kota Tegal	5.952.891	631.248	6.584.139
214	Provinsi DI Yogyakarta	36.059.825	3.325.856	39.385.681
215	Kab. Bantul	9.292.264	864.345	10.156.609
216	Kab. Gunung Kidul	6.068.492	462.126	6.530.618
217	Kab. Kulon Progo	6.371.902	463.902	6.835.804
218	Kab. Sleman	19.582.869	2.100.804	21.683.673
219	Kota Yogyakarta	18.784.182	1.651.917	20.436.099
220	Provinsi Jawa Timur	330.795.361	42.802.623	373.597.984
221	Kab. Bangkalan	6.041.727	661.036	6.702.763
222	Kab. Banyuwangi	9.786.053	960.914	10.746.967
223	Kab. Blitar	5.256.802	981.809	6.238.611
224	Kab. Bojonegoro	9.966.585	868.978	10.835.563
225	Kab. Bondowoso	5.294.287	585.719	5.880.006

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
226	Kab. Gresik	41.745.731	2.180.045	43.925.776
227	Kab. Jember	11.711.562	1.089.638	12.801.200
228	Kab. Jombang	7.252.680	748.151	8.000.831
229	Kab. Kediri	7.419.764	800.236	8.220.000
230	Kab. Lamongan	7.077.286	664 754	7.742.040
231	Kab. Lumajang	6.055.010	795.778	6.850.788
232	Kab. Madiun	5.917.591	649 709	6.567.300
233	Kab. Magetan	6.220.533	717.856	6.938.389
234	Kab. Malang	12.904.904	1.860.114	14.765.018
235	Kab. Mojokerto	11.548.142	716 203	12.264.345
236	Kab. Nganjuk	6.678.784	887.381	7.566.165
237	Kab. Ngawi	6.163.121	649.639	6.812.760
238	Kab. Pacitan	5.531.058	662 627	6.193.685
239	Kab. Pamekasan	6.582.422	711.332	7.293.754
240	Kab. Pasuruan	22.719.389	1.173.040	23.892.429

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
241	Kab. Ponorogo	6.650.455	763.964	7.414.419
242	Kab. Probolinggo	7.979.689	662.721	8.642.410
243	Kab. Sampang	5.365.859	565.074	5.930.933
244	Kab. Sidoarjo	43.946.111	4.404.443	48.350.554
245	Kab. Situbondo	5.987.914	696.587	6.684.501
246	Kab. Sumenep	6.122.451	697.876	6.820.327
247	Kab. Trenggalek	5.558.406	688.047	6.246.453
248	Kab. Tuban	9.763.249	750.214	10.513.463
249	Kab. Tulungagung	6.764.694	1.197.752	7.962.446
250	Kota Blitar	5.585.553	879.137	6.464.690
251	Kota Kediri	13.649.542	2.848.050	16.497.592
252	Kota Madiun	10.288.488	855.664	11.144.152
253	Kota Malang	19.669.423	3.166.792	22.836.215
254	Kota Mojokerto	5.898.833	706.358	6.605.191
255	Kota Pasuruan	5.946.561	612.512	6.559.073

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
256	Kota Probolinggo	6.166.830	640.711	6.807.541
257	Kota Surabaya	165.797.089	30.643.216	196.440.305
258	Kota Batu	5.317.903	653.007	5.970.910
259	Provinsi Kalimantan Barat	32.923.953	2.416.679	35.340.632
260	Kab. Bengkayang	1.859.983	115.297	1.975.280
261	Kab. Landak	1.976.113	103.945	2.080.058
262	Kab. Kapuas Hulu	2.630.769	108.239	2.739.008
263	Kab. Ketapang	6.434.425	170.525	6.604.950
264	Kab. Mempawah	2.302.511	109.512	2.412.023
265	Kab. Sambas	2.219.358	180.235	2.399.593
266	Kab. Sanggau	3.473.388	131.166	3.604.554
267	Kab. Sintang	3.346.455	159.102	3.505.557
268	Kota Pontianak	16.123.180	1.928.629	18.051.809
269	Kota Singkawang	2.806.320	415.309	3.221.629
270	Kab. Sekadau	2.225.528	106.961	2.332.489

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
271	Kab. Melawi	1.833.387	98.715	1.932.102
272	Kab. Kayong Utara	1.815.880	101.581	1.917.461
273	Kab. Kubu Raya	5.227.115	197.293	5.424.408
274	Provinsi Kalimantan Tengah	34.021.915	610.214	34.632.129
275	Kab. Barito Selatan	2.548.833	23.733	2.572.566
276	Kab. Barito Utara	3.514.025	22.472	3.536.497
277	Kab. Kapuas	3.057.998	25.894	3.083.892
278	Kab. Kotawaringin Barat	6.594.157	259.786	6.853.943
279	Kab. Kotawaringin Timur	7.579.885	267.375	7.847.260
280	Kota Palangkaraya	9.228.821	117.595	9.346.416
281	Kab. Katingan	2.013.480	21.431	2.034.911
282	Kab. Seruyan	2.699.243	16.542	2.715.785
283	Kab. Sukamara	1.761.076	23.066	1.784.142
284	Kab. Lamandau	1.764.752	33.950	1.798.702
285	Kab. Gunung Mas	2.108.106	24.934	2.133.040

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
286	Kab. Pulang Pisau	1.967.144	22.098	1.989.242
287	Kab. Murung Raya	3.879.784	82.808	3.962.592
288	Kab. Barito Timur	4.484.770	22.739	4.507 509
289	Provinsi Kalimantan Selatan	58.548.320	1.961.845	60.510.165
290	Kab. Banjar	5.815.427	414.525	6.229.952
291	Kab. Barito Kuala	3.465.250	84.408	3.549.658
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.277.493	107.258	3.384.751
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.542.416	109.910	3.652 326
294	Kab. Hulu Sungai Utara	3.285.339	95.185	3.380.524
295	Kab. Kotabaru	7.917.282	116.684	8.033.966
296	Kab. Tabalong	7.025.529	127.863	7.153 392
297	Kab. Tanah Laut	6.356.484	116.321	6.472.805
298	Kab. Tapin	5.253.655	115.447	5.369.102
299	Kota Banjarbaru	11.648.251	176.526	11.824.777
300	Kota Banjarmasin	21.892.502	1.310.505	23.203.007

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
301	Kab. Bulungan	5.978.109	80.478	6.058.587
302	Kab. Tanah Bumbu	11.437.086	399.617	11.836.703
303	Provinsi Kalimantan Timur	137.513.992	3.322.749	140.836.741
304	Kab. Berau	19.496.867	325.532	19.822.399
305	Kab. Kutai Kartanegara	29.202.737	296.302	29.499.039
306	Kab. Kutai Barat	13.440.556	184.523	13.625.079
307	Kab. Kutai Timur	30.167.073	256.602	30.423.675
308	Kab. Paser	13.538.912	261.264	13.800.176
309	Kota Balikpapan	62.485.272	2.181.486	64.666.758
310	Kota Bontang	22.812.430	302.480	23.114.910
311	Kota Samarinda	27.973.600	1.576.078	29.549.678
312	Kab. Penajam Paser Utara	10.834.674	212.979	11.047.653
313	Kab. Mahakam Ulu	7.713.638	177.246	7.890.884
314	Provinsi Sulawesi Utara	23.539.283	1.142.228	24.681.511
315	Kab. Bolaang Mongondow	1.465.001	53.196	1.518.197

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
316	Kab. Minahasa	2.202.346	82.380	2.284.726
317	Kab. Kepulauan Sangihe	1.612.757	45.581	1.658.338
318	Kota Bitung	2.641.439	127.749	2.769.188
319	Kota Manado	15.373.896	879.525	16.253.421
320	Kab. Kepulauan Talaud	1.158.582	41.624	1.200.205
321	Kab. Minahasa Selatan	1.631.912	54.599	1.686.511
322	Kota Tomohon	1.713.418	143.434	1.856.852
323	Kab. Minahasa Utara	3.130.822	97.826	3.228.648
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	978.755	41.324	1.020.079
325	Kota Kotamobagu	2.356.158	87.522	2.443.680
326	Kab Bolaang Mongondow Utara	1.114.157	39.544	1.153.701
327	Kab. Minahasa Tenggara	1.157.730	41.622	1.199.352
328	Kab Bolaang Mongondow Timur	1.102.780	105.544	1.208.324
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.045.575	40.678	1.086.253
330	Provinsi Sulawesi Tengah	57.690.359	723.341	58.413.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
331	Kab. Banggai	6.620.357	217.487	6.837.844
332	Kab. Banggai Kepulauan	2.526.446	30.455	2.556.901
333	Kab. Buol	2.810.004	43.205	2.853.209
334	Kab. Toli-Toli	3.125.512	91.520	3.217.032
335	Kab. Donggala	2.879.533	52.938	2.932.471
336	Kab. Morowali	46.511.107	48.574	46.559.681
337	Kab. Poso	3.089.033	49.290	3.138.323
338	Kota Palu	10.545.862	409.847	10.955.709
339	Kab. Parigi Moutong	3.247.868	75.045	3.322.913
340	Kab. Tojo Una Una	2.623.147	33.992	2.657.139
341	Kab. Sigi	2.828.250	35.309	2.863.559
342	Kab. Banggai Laut	2.558.398	52.883	2.611.281
343	Kab. Morowali Utara	4.453.096	32.106	4.485.202
344	Provinsi Sulawesi Selatan	70.887.131	3.598.020	74.485.151
345	Kab. Bantaeng	2.794.384	91.106	2.885.490

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
346	Kab. Barru	2.165.224	72.376	2.237.600
347	Kab. Bone	3.954.863	182.199	4 137.062
348	Kab. Bulukumba	2.992.711	96.033	3.088.744
349	Kab. Enrekang	1.912.367	84.835	1.997 202
350	Kab. Gowa	3.857.469	175.035	4.032.504
351	Kab. Jeneponto	2.719.336	83.563	2.802.899
352	Kab. Luwu	2.294.296	97.300	2.391.596
353	Kab. Luwu Utara	2.301.262	88.508	2.389.770
354	Kab. Maros	4.088.430	108.576	4.197 006
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.900.179	105.644	4.005.823
356	Kota Palopo	3.744.103	172.547	3.916.650
357	Kab. Luwu Timur	8.335.299	113.642	8.448.941
358	Kab. Pinrang	2.351.592	95.764	2.447.356
359	Kab. Sinjai	2.116.897	88.043	2.204 940
360	Kab. Kepulauan Selayar	2.056.213	85.109	2.141.322

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
361	Kab. Sidenreng Rappang	2.368.284	107.795	2.476.079
362	Kab. Soppeng	2.275.095	100.426	2.375.521
363	Kab. Takalar	2.406.531	90.157	2.496.688
364	Kab. Tana Toraja	2.141.037	94.774	2.235.811
365	Kab. Wajo	2.956 492	123.956	3.080.448
366	Kota Pare-pare	3.386.350	144.303	3.530.653
367	Kota Makassar	42.879.196	3 135.998	46.015.194
368	Kab. Toraja Utara	2.040.715	103.847	2.144.562
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	19.714.266	407.216	20.121.482
370	Kab. Buton	967 989	12.658	980.647
371	Kab. Konawe	2.116.858	74.530	2.191.388
372	Kab. Kolaka	4.830.460	43.167	4 873 627
373	Kab. Muna	1.450.312	24.282	1.474.594
374	Kota Kendari	10.227.631	308.223	10.535.854
375	Kota Bau-bau	1.952.823	70.026	2.022.849

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
376	Kab. Konawe Selatan	1.526.540	14.679	1.541.219
377	Kab. Bombana	1.875.773	13.522	1.889.295
378	Kab. Wakatobi	1.004.342	14.333	1.018.675
379	Kab. Kolaka Utara	949.230	14.990	964.220
380	Kab. Konawe Utara	1.231.309	12.794	1.244.103
381	Kab. Buton Utara	812.324	12.539	824.863
382	Kab. Konawe Kepulauan	715.857	12.541	728.398
383	Kab. Kolaka Timur	858.370	14.114	872.484
384	Kab. Muna Barat	830.725	12.494	843.219
385	Kab. Buton Tengah	913.324	12.904	926.228
386	Kab. Buton Selatan	793.887	13.034	806.921
387	Provinsi Bali	82.549.028	6.107.751	88.656.779
388	Kab. Badung	43.931.926	2.570.315	46.502.241
389	Kab. Bangli	5.875.797	415.450	6.291.247
390	Kab. Buleleng	9.161.568	749.582	9.911.150

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
391	Kab. Gianyar	9.866.103	1.064.652	10.930.755
392	Kab. Jembrana	6.145.217	500.144	6.645.361
393	Kab. Karangasem	6.865.494	434.047	7.299.541
394	Kab. Klungkung	6.649.563	437.658	7.087.221
395	Kab. Tabanan	8.055.122	666.972	8.722.094
396	Kota Denpasar	40.281.259	3.264.330	43.545.589
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	27.679.880	929.093	28.608.973
398	Kab. Bima	2.163.954	66.442	2.230.396
399	Kab. Dompu	2.379.943	89.213	2.469.156
400	Kab. Lombok Barat	3.191.422	94.196	3.285.618
401	Kab. Lombok Tengah	3.578.457	109.967	3.688.424
402	Kab. Lombok Timur	3.471.064	109.054	3.580.118
403	Kab. Sumbawa	3.293.310	160.123	3.453.433
404	Kota Mataram	13.661.758	674.414	14.336.172
405	Kota Bima	3.021.300	110.229	3.131.529

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
406	Kab. Sumbawa Barat	9.045.083	63.056	9.108.139
407	Kab. Lombok Utara	2.208.736	68.160	2.276.896
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	17.575.164	1 060 889	18.636.053
409	Kab. Alor	779.397	220.497	999.894
410	Kab. Belu	1.023.249	54.759	1.078.008
411	Kab. Ende	1.224.906	91.340	1.316.246
412	Kab. Flores Timur	888.607	72.590	961.197
413	Kab. Kupang	1.126.156	26.646	1.152.802
414	Kab. Lembata	676.283	55.343	731.626
415	Kab. Manggarai	1.026.117	60.275	1.086.392
416	Kab. Ngada	803.614	36 447	840.061
417	Kab. Sikka	1.494.086	104.706	1.598.792
418	Kab. Sumba Barat	855.015	46.611	901.626
419	Kab. Sumba Timur	1.551.509	88.272	1.639.781
420	Kab. Timor Tengah Selatan	920.654	32.317	952.971

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
421	Kab. Timor Tengah Utara	806.270	26.872	833.142
422	Kota Kupang	9.472.081	566.954	10.039.035
423	Kab. Rote Ndao	755.485	31.502	786.987
424	Kab. Manggarai Barat	1.733.501	50.190	1.783.691
425	Kab. Nagekeo	648.598	29.578	678.176
426	Kab. Sumba Barat Daya	748.014	31.035	779.049
427	Kab. Sumba Tengah	547.750	26.328	574.078
428	Kab. Manggarai Timur	698.257	52.506	750.763
429	Kab. Sabu Raijua	665.349	25.297	690.646
430	Kab. Malaka	720.044	28.413	748.457
431	Provinsi Maluku	10.173.697	221.804	10.395.501
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.008.446	19.453	1.027.899
433	Kab. Maluku Tengah	1.563.730	20.779	1.584.509
434	Kab. Maluku Tenggara	1.114.603	29.618	1.144 221
435	Kab. Buru	812.399	12.466	824.865

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
436	Kota Ambon	7 887 107	193.784	8.080.891
437	Kab. Seram Bagian Barat	855.305	17.195	872.500
438	Kab. Seram Bagian Timur	1.059.231	12.001	1.071.232
439	Kab. Kepulauan Aru	829 766	38.587	868.353
440	Kota Tual	780.525	19.564	800.089
441	Kab. Maluku Barat Daya	1 342.891	11.948	1.354.839
442	Kab. Buru Selatan	595.206	11.829	607.035
443	Provinsi Papua	12.795.900	496.161	13.292.061
444	Kab. Biak Numfor	2 080 289	92.703	2.172.992
445	Kab. Jayapura	1.973.413	98.968	2.072.381
446	Kab Kepulauan Yapen	1.313.668	40.208	1.353.876
447	Kota Jayapura	11 669.977	458.993	12.128.970
448	Kab. Sarmi	994.756	34.395	1.029.151
449	Kab Keerom	1 021.980	32.569	1.054.549
450	Kab. Waropen	922.513	29.990	952.503

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
451	Kab. Supiori	938.827	29.885	968.712
452	Kab. Mamberamo Raya	906.051	29.796	935.847
453	Provinsi Maluku Utara	48.915.553	360.268	49.275.821
454	Kab. Halmahera Tengah	34.897.208	23.405	34.920.613
455	Kota Ternate	8.262.403	365 450	8.627.853
456	Kab. Halmahera Barat	2.912.690	23.881	2.936.571
457	Kab. Halmahera Timur	3.629.959	21.386	3.651.345
458	Kab. Halmahera Selatan	14.208.745	34 841	14.243.586
459	Kab. Halmahera Utara	4.485.166	40.121	4.525.287
460	Kab. Kepulauan Sula	2.947.501	22 707	2.970.208
461	Kota Tidore Kepulauan	4.442.030	22 817	4.464.847
462	Kab. Pulau Morotai	2.766.597	25.659	2.792.256
463	Kab. Pulau Taliabu	2.843.079	19 221	2.862.300
464	Provinsi Banten	335.998.380	11.051.274	347.049.654
465	Kab. Lebak	25.679.765	847 839	26.527.604

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
466	Kab. Pandeglang	25.480.140	803.751	26.283.891
467	Kab. Serang	43.588.989	1.035.728	44.624.717
468	Kab. Tangerang	112.750.714	3.437.603	116.188.317
469	Kota Cilegon	63.611.243	1.649.678	65.260.921
470	Kota Tangerang	135.139.770	3.252.082	138.391.852
471	Kota Serang	34.931.281	909.085	35.840.366
472	Kota Tangerang Selatan	93.369.316	5.665.260	99.034.576
473	Provinsi Bangka Belitung	12.798.583	672.949	13.471.532
474	Kab. Bangka	3.254.926	161.420	3.416.346
475	Kab. Belitung	2.526.401	112.900	2.639.301
476	Kota Pangkal Pinang	7.044.080	572.374	7.616.454
477	Kab. Bangka Selatan	1.544.294	56.540	1.600.834
478	Kab. Bangka Tengah	2.439.279	82.218	2.521.497
479	Kab. Bangka Barat	2.406.334	68.496	2.474.830
480	Kab. Belitung Timur	2.042.458	65.150	2.107.608

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
481	Provinsi Gorontalo	6.574.412	324.515	6.898.927
482	Kab. Boalemo	1.037.076	35.628	1.072.704
483	Kab. Gorontalo	1.997.422	131.900	2.129.322
484	Kota Gorontalo	4.048.510	257.615	4.306.125
485	Kab. Pohuwato	1.346.878	52.709	1.399.587
486	Kab. Bone Bolango	1.643.841	39.069	1.682.910
487	Kab. Gorontalo Utara	991.041	31.626	1.022.667
488	Provinsi Kepulauan Riau	70.332.995	4.679.428	75.012.423
489	Kab. Natuna	6.519.911	413.620	6.933.531
490	Kab. Kepulauan Anambas	8.481.145	386.259	8.867.404
491	Kab. Karimun	11.346.819	637.549	11.984.368
492	Kota Batam	66.590.700	4.682.336	71.273.036
493	Kota Tanjung Pinang	10.619.649	915.920	11.535.569
494	Kab. Lingga	6.029.477	388.352	6.417.829
495	Kab. Bintan	9.686.456	507.556	10.194.012

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
496	Provinsi Papua Barat	8.595.095	248.045	8.843.140
497	Kab. Fak Fak	1.312.702	70.523	1.383.225
498	Kab. Manokwari	3.903.767	170.756	4.074.523
499	Kab. Teluk Bintuni	5.606.280	94.970	5.701.250
500	Kab. Teluk Wondama	920.669	22.663	943.332
501	Kab. Kaimana	1.075.801	24.900	1.100.701
502	Kab. Manokwari Selatan	880.296	19.881	900.177
503	Kab. Pegunungan Arfak	942.685	20.307	962.992
504	Provinsi Sulawesi Barat	4.968.062	82.375	5.050.437
505	Kab. Majene	1.137.042	15.558	1.152.600
506	Kab. Mamuju	3.132.862	43.593	3.176.455
507	Kab. Polewali Mandar	1.540.702	44.267	1.584.969
508	Kab. Mamasa	836.394	11.269	847.663
509	Kab. Pasangkayu	975.353	10.295	985.648
510	Kab. Mamuju Tengah	687.035	13.652	700.687

V.2 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
S11	Provinsi Kalimantan Utara	10.992.790	1.039.884	12.032.674
S12	Kab. Bulungan	5.723.570	164.761	5.888.331
S13	Kab. Malinau	2.494.464	126.882	2.621.346
S14	Kab. Nunukan	2.154.667	152.401	2.307.068
S15	Kota Tarakan	5.652.072	1.127.812	6.779.884
S16	Kab. Tana Tidung	1.993.833	125.016	2.118.849
S17	Provinsi Papua Selatan	3.700.351	161.280	3.861.631
S18	Kab. Merauke	3.210.289	187.917	3.398.206
S19	Kab. Boven Digoel	1.130.014	26.133	1.156.147
S20	Kab. Mappi	912.770	28.636	941.406
S21	Kab. Asmat	952.211	27.308	979.519
S22	Provinsi Papua Tengah	54.557.549	356.268	54.913.817
S23	Kab. Mimika	56.751.663	325.895	57.077.558
S24	Kab. Nabire	5.287.492	87.888	5.375.380
S25	Kab. Paniai	3.943.923	28.012	3.971.935

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
526	Kab. Puncak Jaya	3.814.596	22.964	3.837.560
527	Kab. Dogiyai	3.929.751	25.355	3.955.106
528	Kab. Puncak	3.657.627	21.987	3.679.614
529	Kab. Intan Jaya	3.575.556	21.987	3.597.543
530	Kab. Deiyai	3.593.569	22.475	3.616.044
531	Provinsi Papua Pegunungan	2.667.758	40.406	2.708.164
532	Kab. Jayawijaya	1.560.742	46.891	1.607.633
533	Kab. Yahukimo	499.583	2.849	502.432
534	Kab. Pegunungan Bintang	520.667	3.801	524.468
535	Kab. Tolikara	465.917	2.771	468.688
536	Kab. Mamberamo Tengah	347.273	2.773	350.046
537	Kab. Yalimo	435.183	2.780	437.963
538	Kab. Lanny Jaya	364.681	2.771	367.452
539	Kab. Nduga	263.078	2.771	265.849
540	Provinsi Papua Barat Daya	5.110.304	317.336	5.427.640

V.2. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PPh PASAL 21	PPh PASAL 25/29	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
541	Kab. Sorong	1.952.666	43.782	1 996 448
542	Kab. Sorong Selatan	741.217	34.075	775.292
543	Kab. Raja Ampat	1.028.256	42.165	1.070.421
544	Kab. Tambrauw	619.020	34.311	653.331
545	Kab. Maybrat	625.198	31.135	656.333
546	Kota Sorong	3.686.315	346.908	4.033.223
547	Selisih Lebih	178.038.596	8 700.050	186.738.646
JUMLAH NASIONAL		14.372.428 836	850.679.835	15.223.108.671

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
1	Provinsi Aceh	2.924.394	306.386	11.311.427
2	Kab. Aceh Barat	2.111.954	8.082	373.382
3	Kab. Aceh Besar	74.416	1.092.257	401.644
4	Kab. Aceh Selatan	241.847	7.738	386.067
5	Kab. Aceh Singkil	1.987.156	7.738	363.505
6	Kab. Aceh Tengah	75.490	92.275	386.461
7	Kab. Aceh Tenggara	75.490	7.909	385.317
8	Kab. Aceh Timur	2.037.523	7.909	11.316.591
9	Kab. Aceh Utara	659.968	23.238	12.332.602
10	Kab. Bireuen	313.669	7.738	385.104
11	Kab. Pidie	73.849	7.738	395.273
12	Kab. Simeulue	73.849	7.738	359.765
13	Kota Banda Aceh	82.054	8.597	364.541
14	Kota Sabang	73.849	7.738	311.960

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7-8
1	Provinsi Aceh	0	937.407	214.824	15.694.438
2	Kab. Aceh Barat	0	2.005.557	45.417	4.544.392
3	Kab. Aceh Besar	0	318.810	43.484	1.930.611
4	Kab. Aceh Selatan	0	23.794	43.484	702.930
5	Kab. Aceh Singkil	0	23.672	43.484	2.427.555
6	Kab. Aceh Tengah	0	24.198	44.450	622.874
7	Kab. Aceh Tenggara	0	24.198	44.450	537.364
8	Kab. Aceh Timur	0	24.198	44.450	13.430.671
9	Kab. Aceh Utara	0	25.776	47.349	13.088.933
10	Kab. Bireuen	0	23.672	43.484	773.667
11	Kab. Pidie	0	30.670	43.484	551.014
12	Kab. Simeulue	0	23.672	43.484	508.508
13	Kota Banda Aceh	0	26.302	48.316	529.810
14	Kota Sabang	0	23.672	43.484	460.703

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
15	Kota Langsa	317.898	7.738	321.212
16	Kota Lhokseumawe	80.413	8.426	409.371
17	Kab. Gayo Lues	75.490	40.120	390.576
18	Kab. Aceh Barat Daya	337.328	7.738	340.842
19	Kab. Aceh Jaya	183.868	8.597	406.153
20	Kab. Nagan Raya	2.123.867	8.597	406.030
21	Kab. Aceh Tamiang	2.565.771	8.253	24.611.660
22	Kab. Bener Meriah	75.490	44.993	347.092
23	Kab. Pidie Jaya	78.614	7.909	336.821
24	Kota Subulussalam	497.050	7.738	325.114
25	Provinsi Sumatera Utara	21.735.201	711.131	6.128.140
26	Kab. Asahan	15.272.217	19.330	316.996
27	Kab. Dairi	468.710	62.885	198.719
28	Kab. Deli Serdang	7.499.723	14.938	1.095.822

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
15	Kota Langsa	0	23.672	43.484	714.004
16	Kota Lhokseumawe	0	25.776	47.349	571.335
17	Kab. Gayo Lues	0	24.198	44.450	574.834
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	70.168	43.484	799.560
19	Kab. Aceh Jaya	0	26.302	48.316	673.236
20	Kab. Nagan Raya	0	1.773.240	48.316	4 360.050
21	Kab. Aceh Tamiang	0	25.631	46.383	27.257.698
22	Kab. Bener Meriah	0	24.198	44.450	536.223
23	Kab. Pidie Jaya	0	24.198	44.450	491.992
24	Kota Subulussalam	0	25.472	43.484	898.858
25	Provinsi Sumatera Utara	7.220.615	1.562.907	277.403	37.635.397
26	Kab. Asahan	154.763	33.499	48.316	15.845.121
27	Kab. Dairi	142.382	210.024	44.450	1.127.170
28	Kab. Deli Serdang	168.501	32.829	47.349	8.859.162

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
29	Kab. Karo	554.565	14.023	215.239
30	Kab. Labuhanbatu	8.874.249	14.023	237.844
31	Kab. Langkat	12.189.884	14.938	25.298.232
32	Kab. Mandailing Natal	4.851.961	111.770	316.918
33	Kab. Nias	465.861	15.243	178.868
34	Kab. Simalungun	12.999.690	381.154	354.379
35	Kab. Tapanuli Selatan	2.442.832	133.372	236.683
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.780.385	28.246	246.591
37	Kab. Tapanuli Utara	465.861	414.042	234.087
38	Kab. Toba	490.084	109.248	207.826
39	Kota Binjai	712.067	14.633	671.745
40	Kota Medan	465.861	15.243	738.039
41	Kota Pematang Siantar	431.569	13.719	163.276
42	Kota Sibolga	465.861	15.243	155.583

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
29	Kab. Karo	560.335	30.819	44.450	1.419.431
30	Kab. Labuhanbatu	142.382	30.819	44.450	9.343.767
31	Kab. Langkat	161.495	32.829	47.349	37.744.727
32	Kab. Mandailing Natal	12.964.932	67.033	48.316	18.360.930
33	Kab. Nias	154.763	33.499	48.316	896.550
34	Kab. Simalungun	154.909	33.499	48.316	13.971.947
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.843.181	7.339.284	46.383	12.041.735
36	Kab. Tapanuli Tengah	193.427	41.378	48.316	2.338.343
37	Kab. Tapanuli Utara	21.225.888	37.703	48.316	22.425.897
38	Kab. Toba	154.763	33.499	48.316	1.043.736
39	Kota Binjai	148.573	32.159	46.383	1.625.560
40	Kota Medan	154.763	33.499	48.316	1.455.721
41	Kota Pematang Siantar	139.287	30.149	43.484	821.484
42	Kota Sibolga	154.763	33.499	48.316	873.265

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
43	Kota Tanjung Balai	465.861	15.243	169.271
44	Kota Tebing Tinggi	465.861	15.243	167.429
45	Kota Padang Sidempuan	525.765	14.938	175.278
46	Kab. Pakpak Bharat	419.276	37.758	170.714
47	Kab. Nias Selatan	456.544	353.683	273.707
48	Kab. Humbang Hasundutan	465.861	178.541	209.670
49	Kab. Serdang Bedagai	10.432.115	15.243	278.622
50	Kab. Samosir	465.861	248.110	191.170
51	Kab. Batu Bara	3.329.918	15.243	229.616
52	Kab. Padang Lawas	4.817.714	680.165	494.441
53	Kab. Padang Lawas Utara	4.661.085	78.672	220.016
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	15.199.051	844.883	215.116
55	Kab. Labuhanbatu Utara	7.301.189	14.023	237.615
56	Kab. Nias Utara	484.919	15.243	204.675

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
43	Kota Tanjung Balai	154.763	33.499	48.316	886.953
44	Kota Tebing Tinggi	154.763	33.499	48.316	885.111
45	Kota Padang Sidempuan	162.427	32.829	47.349	958.586
46	Kab. Pakpak Bharat	139.287	52.170	43.484	862.689
47	Kab. Nias Selatan	151.668	32.829	47.349	1.315.780
48	Kab. Humbang Hasundutan	154.763	33.499	48.316	1.090.650
49	Kab. Serdang Bedagai	154.763	34.547	48.316	10.963.606
50	Kab. Samosir	154.763	33.499	48.316	1.141.719
51	Kab. Batu Bara	154.763	33.499	48.316	3.811.355
52	Kab. Padang Lawas	148.573	32.159	46.383	6.219.435
53	Kab. Padang Lawas Utara	341.314	30.819	44.450	5.376.356
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	142.382	30.819	44.450	16.476.701
55	Kab. Labuhanbatu Utara	142.382	30.819	44.450	7.770.478
56	Kab. Nias Utara	154.763	33.499	48.316	941.415

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
57	Kab. Nias Barat	465.861	15.243	187.132
58	Kota Gunungsitoli	465.861	15.243	172.237
59	Provinsi Sumatera Barat	3.061.560	181.515	450.607
60	Kab. Lima Puluh Kota	211.854	6.225	130.755
61	Kab. Agam	1.016.523	6.225	137.790
62	Kab. Kepulauan Mentawai	104.992	328.248	188.884
63	Kab. Padang Pariaman	104.992	6.225	115.428
64	Kab. Pasaman	104.992	6.225	125.527
65	Kab. Pesisir Selatan	2.474.237	193.436	208.569
66	Kab. Sijunjung	489.637	219.358	405.789
67	Kab. Solok	170.467	5.852	121.077
68	Kab. Tanah Datar	109.871	6.225	99.872
69	Kota Bukit tinggi	102.892	6.101	42.379
70	Kota Padang Panjang	104.992	6.225	33.563

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
57	Kab. Nias Barat	154.763	33.499	48.316	904.814
58	Kota Gunungsitoli	154.763	33.499	48.316	889.919
59	Provinsi Sumatera Barat	2.279.288	587.603	177.463	6.738.036
60	Kab. Lima Puluh Kota	78.165	280.710	48.316	756.025
61	Kab. Agam	78.165	20.151	48 316	1.307.170
62	Kab. Kepulauan Mentawai	78.165	20.151	48 316	768.756
63	Kab. Padang Pariaman	78.165	20.151	48.316	373.277
64	Kab. Pasaman	78.165	20 151	48 316	383.376
65	Kab. Pesisir Selatan	97.040	42.645	48.316	3.064.243
66	Kab. Sijunjung	78.165	20.181	48.316	1.261.446
67	Kab. Solok	73.475	112.436	45 417	528.724
68	Kab. Tanah Datar	78.165	23.265	48.316	365.714
69	Kota Bukit tinggi	76.602	19 748	47 349	295.071
70	Kota Padang Panjang	78.165	20.151	48.316	291.412

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
71	Kota Padang	104.992	6.225	185.623
72	Kota Payakumbuh	104.992	6.225	45.974
73	Kota Sawahlunto	104.992	6.225	40.621
74	Kota Solok	96.593	5.727	37.916
75	Kota Pariaman	104.992	6.225	47.250
76	Kab. Pasaman Barat	4.427.714	6.225	153.105
77	Kab. Dharmasraya	3.178.953	96.649	100.768
78	Kab. Solok Selatan	2.696.907	14.109	98.144
79	Provinsi Riau	15.683.626	4.452.181	200.798.304
80	Kab. Bengkalis	4.727.683	2.854.741	496.146.908
81	Kab. Indragiri Hilir	9.697.423	1.891.278	11.581.185
82	Kab. Indragiri Hulu	8.992.187	915.544	25.511.718
83	Kab. Kampar	11.295.067	2.036.326	96.000.306
84	Kab. Kuantan Singingi	4.322.072	1.299.018	11.405.762

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
71	Kota Padang	78.165	1.415.015	48.316	1.838.336
72	Kota Payakumbuh	78.165	20.151	48.316	303.823
73	Kota Sawahlunto	78.165	895.496	48.316	1.173.815
74	Kota Solok	71.912	18.539	44.450	275.137
75	Kota Pariaman	78.165	20.151	48.316	305.099
76	Kab. Pasaman Barat	78.165	20.151	48.316	4.736.676
77	Kab. Dharmasraya	78.165	20.991	48.316	3.523.842
78	Kab. Solok Selatan	10.364.546	20.151	48.316	13.242.173
79	Provinsi Riau	0	1.790.047	112.082	222.836.240
80	Kab. Bengkalis	0	100.452	48.316	503.878.100
81	Kab. Indragiri Hilir	0	7.276.042	48.316	30.494.244
82	Kab. Indragiri Hulu	0	116.045	48.316	35.583.810
83	Kab. Kampar	0	100.452	48.316	109.380.467
84	Kab. Kuantan Singingi	0	404.138	48.316	17.479.306

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
85	Kab. Pelalawan	11.295.086	6.491.362	37.230.085
86	Kab. Rokan Hilir	7.588.764	613.540	111.040.064
87	Kab. Rokan Hulu	11.649.105	536.500	17.943.428
88	Kab. Siak	7.390.007	3.567.293	162.355.687
89	Kota Dumai	880.114	1.147.453	16.233.078
90	Kota Pekanbaru	1.348.769	271.979	16.645.964
91	Kab. Kepulauan Meranti	914.462	1.208.612	25.821.574
92	Provinsi Jambi	3.791.357	1.491.882	32.080.060
93	Kab. Batang Hari	3.101.739	1.473.356	18.867.555
94	Kab. Bungo	2.594.671	113.765	2.195.340
95	Kab. Kerinci	461.659	86.454	1.940.957
96	Kab. Merangin	371.621	86.454	2.021.715
97	Kab. Muaro Jambi	4.247.727	552.872	27.646.880
98	Kab. Sarolangun	2.900.815	1.106.002	8.515.938

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
85	Kab. Pelalawan	0	163.981	47.349	55.227.863
86	Kab. Rokan Hilir	0	92.416	44.450	119.379.234
87	Kab. Rokan Hulu	0	98.443	47.349	30.274.825
88	Kab. Siak	0	100.452	48.316	173.461.755
89	Kota Dumai	0	100.452	48.316	18.409.413
90	Kota Pekanbaru	0	100.452	48.316	18.415.480
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	592.914	48.316	28.585.878
92	Provinsi Jambi	99.191	676.410	100.687	38.239.587
93	Kab. Batang Hari	6.248	257.555	48.316	23.754.769
94	Kab. Bungo	6.248	749.632	48.316	5.707.972
95	Kab. Kerinci	395.530	39.197	44.450	2.968.247
96	Kab. Merangin	5.749	47.453	44.450	2.577.442
97	Kab. Muaro Jambi	6.123	147.644	47.349	32.648.595
98	Kab. Sarolangun	6.248	1.889.978	48.316	14.467.297

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	2.835.183	2.004.885	67.291.592
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.378.008	664.784	16.410.187
101	Kab. Tebo	1.308.588	1.460.694	6.005.500
102	Kota Jambi	234.035	92.092	11.746.962
103	Kota Sungai Penuh	229.259	90.212	1.970.784
104	Provinsi Sumatera Selatan	11.426.594	4.271.004	155.510.144
105	Kab. Lahat	2.582.346	670.540	21.436.209
106	Kab. Musi Banyuasin	11.334.850	2.525.599	307.790.343
107	Kab. Musi Rawas	5.311.073	1.543.448	78.907.204
108	Kab. Muara Enim	3.801.451	1.393.246	113.375.687
109	Kab. Ogan Komering Ilir	12.247.609	12.711.021	6.221.756
110	Kab. Ogan Komering Ulu	3.580.310	323.481	25.976.282
111	Kota Palembang	440.842	164.777	6.272.505
112	Kota Prabumulih	422.082	157.765	33.449.045

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	5.998	70.717	46.383	72.254.752
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	5.998	41.767	46.383	18.547.127
101	Kab. Tebo	6.248	225.987	48.316	9.055.333
102	Kota Jambi	6.123	41.754	47.349	12.168.315
103	Kota Sungai Penuh	35.916	40.902	46.383	2.413.456
104	Provinsi Sumatera Selatan	2.885.239	24.693.319	149.256	198.935.556
105	Kab. Lahat	644.143	54.581.942	48.316	79.963.496
106	Kab. Musi Banyuasin	118.419	10.011.490	48.316	331.829.017
107	Kab. Musi Rawas	121.783	1.013.773	48.316	86.945.597
108	Kab. Muara Enim	9.357.517	43.339.447	44.450	171.311.798
109	Kab. Ogan Komering Ilir	108.946	1.079.299	44.450	32.413.081
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.891.218	1.935.771	48.316	33.755.378
111	Kota Palembang	111.314	952.675	45.417	7.987.530
112	Kota Prabumulih	106.577	912.136	43.484	35.091.089

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3 RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
113	Kota Pagar Alam	562.610	157.765	5.784.788
114	Kota Lubuk Linggau	459.601	171.788	6.305.616
115	Kab. Banyuasin	8.658.319	732.228	15.389.764
116	Kab. Ogan Ilir	1.419.538	161.271	18.588.777
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.869.761	311.454	6.604.723
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	761.696	338.682	6.519.289
119	Kab. Empat Lawang	2.011.022	275.359	6.119.947
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.357.160	291.635	165.790.766
121	Kab. Musi Rawas Utara	4.153.754	255.071	10.352.884
122	Provinsi Bengkulu	1.881.450	4.794	155.056
123	Kab. Bengkulu Selatan	391.423	351	66.604
124	Kab. Bengkulu Utara	3.164.376	366	144.062
125	Kab. Rejang Lebong	162.545	351	83.137
126	Kota Bengkulu	143.382	366	83.623

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
113	Kota Pagar Alam	7.137.367	912.136	43.484	8.598.150
114	Kota Lubuk Linggau	116.051	993.214	47.349	8.093.619
115	Kab. Banyuasin	118.419	1.456.595	48.316	26.403.641
116	Kab. Ogan Ilir	108.946	932.406	44.450	21.255.388
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	118.419	1.036.037	48.316	9.988.710
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	439.518	1.018.027	48.316	9.125.528
119	Kab. Empat Lawang	111.314	952.675	45.417	9.515.734
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	116.051	1.490.085	47.349	169.093.046
121	Kab. Musi Rawas Utara	158.494	8.772.546	47.349	23.740 098
122	Provinsi Bengkulu	353.793	1.886.560	84.062	4.365.715
123	Kab. Bengkulu Selatan	26.884	139.256	46.383	669.901
124	Kab. Bengkulu Utara	123.432	4.517.265	48.316	7 997.817
125	Kab. Rejang Lebong	94.673	143.976	46.383	531.065
126	Kota Bengkulu	26.963	159.921	48.316	462.571

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
127	Kab. Kaur	483.516	351	87.884
128	Kab. Seluma	1.419.895	359	96.705
129	Kab. Mukomuko	3.764.233	24.264	113.030
130	Kab. Lebong	174.317	351	73.453
131	Kab. Kepahiang	200.812	351	58.874
132	Kab. Bengkulu Tengah	788.623	351	63.788
133	Provinsi Lampung	4.163.131	259.620	2.297.523
134	Kab. Lampung Barat	168.875	10.532	176.614
135	Kab. Lampung Selatan	2.209.407	10.761	308.403
136	Kab. Lampung Tengah	6.158.277	11.448	405.103
137	Kab. Lampung Utara	1.582.259	11.448	248.489
138	Kab. Lampung Timur	213.327	11.448	8.611.127
139	Kab. Tanggamus	313.155	11.219	268.372
140	Kab. Tulang Bawang	3.316.945	11.448	227.213

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
127	Kab. Kaur	109.057	138.020	46.383	865.211
128	Kab. Seluma	26.423	157.042	47.349	1.747.773
129	Kab. Mukomuko	27.151	143.771	48.316	4.120.765
130	Kab. Lebong	1.474.416	177.954	46.383	1.946.874
131	Kab. Kepahiang	25.884	138.020	46.383	470.324
132	Kab. Bengkulu Tengah	25.884	4.890.281	46.383	5.815.310
133	Provinsi Lampung	3.726.265	124.399	140.103	10.711.041
134	Kab. Lampung Barat	151.155	59.758	44.450	611.384
135	Kab. Lampung Selatan	180.200	233.930	45.417	2.988.118
136	Kab. Lampung Tengah	164.298	25.354	48.316	6.812.796
137	Kab. Lampung Utara	164.298	30.001	48.316	2.084.811
138	Kab. Lampung Timur	164.298	5.485	48.316	9.054.001
139	Kab. Tanggamus	16.608.847	140.290	47.349	17.379.232
140	Kab. Tulang Bawang	164.298	11.195	48.316	3.779.413

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
141	Kab. Way Kanan	1.746.301	891.373	237.834
142	Kota Bandar Lampung	172.547	10.761	261.828
143	Kota Metro	179.889	11.219	133.288
144	Kab. Pesawaran	823.531	14.708	208.544
145	Kab. Pringsewu	168.875	10.532	171.512
146	Kab. Mesuji	3.061.019	299.229	182.057
147	Kab. Tulang Bawang Barat	883.829	11.219	178.439
148	Kab. Pesisir Barat	292.023	10.761	181.739
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	13.890.867
150	Provinsi Jawa Barat	5.700.972	924.545	23.663.772
151	Kab. Bandung	6.843.407	21.951	1.191.867
152	Kab. Bekasi	135.351	21.951	15.250.182
153	Kab. Bogor	2.188.530	206.521	1.511.698
154	Kab. Ciamis	397.171	243.440	793.485

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
141	Kab. Way Kanan	164.298	16.731	48.316	3.104.853
142	Kota Bandar Lampung	154.440	7.938	45.417	652.931
143	Kota Metro	161.012	5.376	47.349	538.133
144	Kab. Pesawaran	161.012	22.352	47.349	1.277.496
145	Kab. Pringsewu	151.155	14.437	44.450	560.961
146	Kab. Mesuji	164.298	10.322	48.316	3.765.241
147	Kab. Tulang Bawang Barat	161.012	5.376	47.349	1.287.224
148	Kab. Pesisir Barat	154.440	27.755	45.417	712.135
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	57.656	13.948.523
150	Provinsi Jawa Barat	23.020.241	1.654.363	252 184	55.216.077
151	Kab. Bandung	47.627.582	39.278	48.316	55.772.401
152	Kab. Bekasi	546.540	179.050	48.316	16.181.390
153	Kab. Bogor	15.784.251	5.770.013	48 316	25.509.329
154	Kab. Ciamis	557.726	39 278	48.316	2.079 416

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
155	Kab. Cianjur	1.343.138	828.543	1.033.355
156	Kab. Cirebon	135.351	78.288	2.045.490
157	Kab. Garut	3.042.996	21.951	1.058.033
158	Kab. Indramayu	1.919.407	191.431	34.611.248
159	Kab. Karawang	127.230	149.746	16.751.452
160	Kab. Kuningan	196.691	162.003	729.022
161	Kab. Majalengka	1.372.771	69.351	3.057.668
162	Kab. Purwakarta	724.275	552.134	790.259
163	Kab. Subang	3.898.280	103.374	25.505.568
164	Kab. Sukabumi	3.020.849	625.362	1.036.919
165	Kab. Sumedang	135.351	391.538	776.026
166	Kab. Tasikmalaya	599.531	192.529	919.672
167	Kota Bandung	135.351	21.951	976.273
168	Kota Bekasi	135.351	21.951	3.867.178

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7-8
155	Kab. Cianjur	585.812	55.744	48.316	3.894.908
156	Kab. Cirebon	546.540	522.300	48.316	3.376.285
157	Kab. Garut	25.048.036	45.043	48.316	29.264.375
158	Kab. Indramayu	535.609	38.492	47.349	37.343.536
159	Kab. Karawang	513.748	36.921	45.417	17.624.514
160	Kab. Kuningan	513.748	36.921	45.417	1.683.802
161	Kab. Majalengka	559.238	39.278	48.316	5 146 622
162	Kab. Purwakarta	546.540	233.048	48.316	2.894.572
163	Kab. Subang	502.817	36.136	44.450	30.090.625
164	Kab. Sukabumi	16.196.852	852.462	46.383	21.778.827
165	Kab. Sumedang	553.393	50.879	48.316	1.955.503
166	Kab Tasikmalaya	1.605 186	44.982	48.316	3.410.216
167	Kota Bandung	546.540	39.278	48.316	1.767.709
168	Kota Bekasi	546.540	39.278	48.316	4.658.614

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
169	Kota Bogor	132.644	21.512	730.682
170	Kota Cirebon	135.351	21.951	681.475
171	Kota Depok	135.351	21.951	882.283
172	Kota Sukabumi	132.644	21.512	610.977
173	Kota Tasikmalaya	135.351	21.951	688.632
174	Kota Cimahi	135.351	21.951	656.652
175	Kota Banjar	282.456	21.951	604.368
176	Kab. Bandung Barat	1.136.564	424.395	880.885
177	Kab. Pangandaran	383.370	241.616	656.972
178	Provinsi Jawa Tengah	2.069.249	2.307.151	8.416.506
179	Kab. Banjarnegara	38.335	374.206	341.928
180	Kab. Banyumas	297.881	340.723	496.147
181	Kab. Batang	543.407	282.806	349.602
182	Kab. Blora	36.802	2.177.837	28.164.130

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
169	Kota Bogor	535.801	38.492	47.349	1.506.480
170	Kota Cirebon	546.540	39.278	48.316	1.472.911
171	Kota Depok	546.540	39.278	48.316	1.673.719
172	Kota Sukabumi	560.147	38.492	47.349	1.411.121
173	Kota Tasikmalaya	546.540	41.268	48.316	1.482.058
174	Kota Cimahi	546.540	39.278	48.316	1.448.088
175	Kota Banjar	546.540	39.278	48.316	1.542.909
176	Kab. Bandung Barat	570.666	99.010	48.316	3.159.836
177	Kab. Pangandaran	546.540	39.278	48.316	1.916.092
178	Provinsi Jawa Tengah	1.120.202	395.627	320.367	14.629.102
179	Kab. Banjarnegara	3.184.366	7.330	48.316	3.994.481
180	Kab. Banyumas	77.473	181.435	48.316	1.441.975
181	Kab. Batang	90.640	7.184	47.349	1.320.988
182	Kab. Blora	19.923	7.037	46.383	30.452.112

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
183	Kab. Boyolali	37.569	364.810	342.844
184	Kab. Brebes	254.738	996.877	547.922
185	Kab. Cilacap	2.500.071	480.612	551.131
186	Kab. Demak	38.335	244.451	375.829
187	Kab. Grobogan	37.569	1.403.320	2.204.523
188	Kab. Jepara	952.986	166.211	386.608
189	Kab. Karanganyar	421.481	50.574	320.774
190	Kab. Kebumen	38.335	253.006	407.124
191	Kab. Kendal	1.450.798	294.203	624.200
192	Kab. Klaten	38.335	69.229	374.030
193	Kab. Kudus	38.335	52.022	306.337
194	Kab. Magelang	35.268	169.495	356.473
195	Kab. Pati	815.892	303.752	397.831
196	Kab. Pekalongan	459.617	191.362	321.832

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
183	Kab. Boyolali	20.338	7.184	47.349	820.094
184	Kab. Brebes	20.753	21.306	48.316	1.889.912
185	Kab. Cilacap	20.753	560.764	48.316	4.161.647
186	Kab. Demak	20.753	7.330	48.316	635.014
187	Kab. Grobogan	20.338	321.949	47.349	4.035.048
188	Kab. Jepara	20.338	22.931	47.349	1.596.423
189	Kab. Karanganyar	20.753	7.330	48.316	869.228
190	Kab. Kebumen	20.753	7.330	48.316	774.864
191	Kab. Kendal	49.790	7.330	48.316	2.474.637
192	Kab. Klaten	20.753	7.330	48.316	557.993
193	Kab. Kudus	20.753	7.330	48.316	473.093
194	Kab. Magelang	19.093	6.743	44.450	631.522
195	Kab. Pati	20.338	10.337	47.349	1.595.499
196	Kab. Pekalongan	125.519	7.037	46.383	1.151.750

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
197	Kab. Pemalang	200.695	528.890	421.800
198	Kab. Purbalingga	38.335	173.220	337.596
199	Kab. Purworejo	38.335	269.000	303.573
200	Kab. Rembang	37.569	703.732	343.376
201	Kab. Semarang	1.297.478	209.450	344.920
202	Kab. Sragen	192.859	288.485	334.699
203	Kab. Sukoharjo	176.231	45.324	310.712
204	Kab. Tegal	116.934	477.690	419.923
205	Kab. Temanggung	249.101	155.799	301.108
206	Kab. Wonogiri	38.335	353.351	354.543
207	Kab. Wonosobo	162.407	289.668	322.958
208	Kota Magelang	37.569	41.887	175.872
209	Kota Pekalongan	36.802	41.032	202.301
210	Kota Salatiga	60.607	41.887	187.516

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
197	Kab. Pemalang	20.338	7.184	47.349	1.226.256
198	Kab. Purbalingga	20.753	7.330	48.316	625.550
199	Kab. Purworejo	20.753	9.385	48.316	689.362
200	Kab. Rembang	20.338	728.976	47.349	1.881.340
201	Kab. Semarang	20.753	7.330	48.316	1.928.247
202	Kab. Sragen	20.753	7.330	48.316	892.442
203	Kab. Sukoharjo	20.753	7.330	48.316	608.666
204	Kab. Tegal	19.508	17.399	45.417	1.096.871
205	Kab. Temanggung	35.101	7.330	48.316	796.755
206	Kab. Wonogiri	20.753	7.330	48.316	822.628
207	Kab. Wonosobo	1.761.836	7.330	48.316	2.592.515
208	Kota Magelang	20.338	7.184	47.349	330.199
209	Kota Pekalongan	19.923	7.037	46.383	353.478
210	Kota Salatiga	20.338	7.184	47.349	364.881

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
211	Kota Semarang	37.569	131.059	1.358.735
212	Kota Surakarta	38.335	42.742	251.772
213	Kota Tegal	36.035	40.178	193.695
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	143.971
215	Kab. Bantul	0	0	182.928
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	165.358
217	Kab. Kulon Progo	0	0	103.463
218	Kab. Sleman	0	0	204.718
219	Kota Yogyakarta	0	0	88.270
220	Provinsi Jawa Timur	3.648.390	3.782.089	71.358.298
221	Kab. Bangkalan	59.651	120.955	1.545.954
222	Kab. Banyuwangi	3.674.014	1.044.181	1.534.129
223	Kab. Blitar	896.068	202.264	1.306.669
224	Kab. Bojonegoro	60.868	2.810.300	288.715.399

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
211	Kota Semarang	20.338	7.184	47.349	1.602.234
212	Kota Surakarta	20.753	7.330	48.316	409.248
213	Kota Tegal	19.508	6.890	45.417	341.723
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	4 191	46.701	194.863
215	Kab. Bantul	0	647	48.316	231.891
216	Kab. Gunung Kidul	0	647	48.316	214 321
217	Kab. Kulon Progo	0	19.091	48.316	170.870
218	Kab. Sleman	0	647	48.316	253.681
219	Kota Yogyakarta	0	647	48.316	137.233
220	Provinsi Jawa Timur	145.085	1 683.291	354.926	80.972.079
221	Kab. Bangkalan	2.372	27.522	47.349	1.803.803
222	Kab. Banyuwangi	46.460	4.135.094	48.316	10.482.194
223	Kab. Blitar	2.227	25.837	44 450	2.477.515
224	Kab. Bojonegoro	2.421	37.038	48.316	291.674.342

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
225	Kab. Bondowoso	822.326	140.263	1.234.725
226	Kab. Gresik	60.868	134.273	19.764.638
227	Kab. Jember	3.595.959	571.792	1.629.389
228	Kab. Jombang	54.781	599.085	1.294.593
229	Kab. Kediri	2.015.154	345.672	1.334.897
230	Kab. Lamongan	57.216	1.028.116	1.593.647
231	Kab. Lumajang	1.468.642	318.212	1.394.024
232	Kab. Madiun	60.868	1.688.087	1.327.339
233	Kab. Magetan	60.868	128.140	1.314.518
234	Kab. Malang	2.501.867	1.128.463	1.612.745
235	Kab. Mojokerto	93.581	498.564	1.288.318
236	Kab. Nganjuk	59.651	557.477	1.367.574
237	Kab. Ngawi	665.012	1.399.335	1.354.611
238	Kab. Pacitan	60.868	109.258	1.313.934

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
225	Kab. Bondowoso	558.874	25.837	44.450	2.826.475
226	Kab. Gresik	2.421	36.021	48.316	20.046.537
227	Kab. Jember	2.372	27.522	47.349	5.874.383
228	Kab. Jombang	2.179	25.275	43.484	2.019.397
229	Kab. Kediri	2.179	25.275	43.484	3.766.661
230	Kab. Lamongan	2.276	26.398	45.417	2.753.070
231	Kab. Lumajang	2.421	28.084	48.316	3.259.699
232	Kab. Madiun	2.421	28.084	48.316	3.155.115
233	Kab. Magetan	2.421	28.084	48.316	1.582.347
234	Kab. Malang	2.324	76.188	46.383	5.367.970
235	Kab. Mojokerto	2.227	52.091	44.450	1.979.201
236	Kab. Nganjuk	2.372	27.522	47.349	2.061.945
237	Kab. Ngawi	2.421	28.084	48.316	3.497.779
238	Kab. Pacitan	2.421	38.501	48.316	1.573.298

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
239	Kab. Pamekasan	59.651	69.500	1.328.621
240	Kab. Pasuruan	199.844	300.321	1.535.414
241	Kab. Ponorogo	60.868	649.744	1.369.820
242	Kab. Probolinggo	119.335	59.313	1.330.035
243	Kab. Sampang	59.651	77.155	1.378.181
244	Kab. Sidoarjo	59.651	2.889	2.354.928
245	Kab. Situbondo	508.495	342.743	1.336.319
246	Kab. Sumenep	60.868	306.732	3.308.611
247	Kab. Trenggalek	61.205	1.023.552	1.337.077
248	Kab. Tuban	60.868	2.042.111	8.770.996
249	Kab. Tulungagung	197.995	717.338	1.279.844
250	Kota Blitar	55.999	60.164	1.123.209
251	Kota Kediri	59.651	88.335	1.216.320
252	Kota Madiun	60.868	63.098	1.226.382

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
239	Kab. Pamekasan	2.372	27.522	47.349	1.535.015
240	Kab. Pasuruan	2.324	148.584	46.383	2.232.870
241	Kab. Ponorogo	11.852	28.084	48.316	2.168.684
242	Kab. Probolinggo	2.276	26.398	45.417	1.582.774
243	Kab. Sampang	2.372	27.522	47.349	1.592.230
244	Kab. Sidoarjo	2.372	27.522	47.349	2.494.711
245	Kab. Situbondo	2.421	28.084	48.316	2.266.378
246	Kab. Sumenep	2.421	28.084	48.316	3.755.032
247	Kab. Trenggalek	2.421	34.721	48.316	2.507.292
248	Kab. Tuban	2.421	3.312.924	48.316	14.237.636
249	Kab. Tulungagung	2.227	33.137	44.450	2.274.991
250	Kota Blitar	2.227	25.837	44.450	1.311.886
251	Kota Kediri	2.372	27.522	47.349	1.441.549
252	Kota Madiun	2.421	28.084	48.316	1.429.169

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
253	Kota Malang	54.781	56.789	1.201.429
254	Kota Mojokerto	55.999	58.051	1.120.686
255	Kota Pasuruan	54.781	56.789	1.107.169
256	Kota Probolinggo	55.999	58.051	1.136.546
257	Kota Surabaya	60.868	63.098	1.677.353
258	Kota Batu	59.651	211.879	1.208.765
259	Provinsi Kalimantan Barat	15.351.093	2.689.113	639.989
260	Kab. Bengkayang	4.605.176	180.547	153.485
261	Kab. Landak	5.726.051	164.981	198.554
262	Kab. Kapuas Hulu	4.955.982	461.165	501.235
263	Kab. Ketapang	25.652.354	6.041.963	556.854
264	Kab. Sambas	1.535.678	210.076	114.662
265	Kab. Sambas	4.995.681	326.755	199.253
266	Kab. Sanggau	7.848.203	1.130.797	255.151

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7+8
253	Kota Malang	2.179	25.275	43.484	1.383.937
254	Kota Mojokerto	2.227	25.837	44.450	1.307.250
255	Kota Pasuruan	2.179	25.275	43.484	1.289.677
256	Kota Probolinggo	2.227	25.837	44.450	1.323.110
257	Kota Surabaya	2.421	28.084	48.316	1.880.140
258	Kota Batu	2.372	27.522	47.349	1.557.538
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	1.785.823	122.917	20.588.935
260	Kab. Bengkayang	0	90.924	43.484	5.073.616
261	Kab. Landak	0	186.942	43.484	6.320.032
262	Kab. Kapuas Hulu	0	94.588	48.316	6.061.286
263	Kab. Ketapang	0	4.169.025	48.316	36.468.512
264	Kab. Mempawah	0	186.853	44.450	2.091.719
265	Kab. Sambas	0	93.415	44.450	5.659.554
266	Kab. Sanggau	0	3.879.971	43.484	13.157.606

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
267	Kab. Sintang	9.160.193	1.601.932	394.063
268	Kota Pontianak	697.904	122.255	130.603
269	Kota Singkawang	706.796	122.255	76.286
270	Kab. Sekadau	3.596.238	868.586	146.727
271	Kab. Melawi	2.712.177	1.780.099	209.737
272	Kab. Kayong Utara	2.732.391	388.176	173.846
273	Kab. Kubu Raya	5.700.263	900.111	243.005
274	Provinsi Kalimantan Tengah	19.221.489	3.375.037	1.723.585
275	Kab. Barito Selatan	1.230.086	356.734	190.114
276	Kab. Barito Utara	2.552.517	1.866.291	4.738.034
277	Kab. Kapuas	6.626.664	1.161.950	352.542
278	Kab. Kotawaringin Barat	12.503.426	1.189.752	267.164
279	Kab. Kotawaringin Timur	25.718.317	684.864	347.091
280	Kota Palangkaraya	1.051.735	144.233	149.784

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
267	Kab. Sintang	0	91.453	47.349	11.294.990
268	Kota Pontianak	0	81.189	43.484	1.075.435
269	Kota Singkawang	0	82.892	43.484	1.031.713
270	Kab. Sekadau	0	82.994	44.450	4.738.995
271	Kab. Melawi	0	86.626	46.383	4.835.022
272	Kab. Kayong Utara	0	90.210	48.316	3.432.939
273	Kab. Kubu Raya	0	85.626	44.450	6.973.485
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	36.134.469	130.762	60.585.342
275	Kab. Barito Selatan	0	9.865.320	45.417	11.687.671
276	Kab. Barito Utara	0	52.974.266	44.460	62.175.558
277	Kab. Kapuas	0	36.811.454	44.450	44.997.060
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	1.820.400	48.316	15.829.058
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	2.186.066	45.417	28.981.755
280	Kota Palangkaraya	0	1.611.540	43.484	3.000.776

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
281	Kab. Katingan	4.117.342	1.915.116	370.904
282	Kab. Seruyan	17.238.267	2.697.025	329.734
283	Kab. Sukamara	3.401.672	157.054	156.163
284	Kab. Lamandau	6.243.249	1.468.943	191.683
285	Kab. Gunung Mas	5.320.258	1.470.898	232.435
286	Kab. Pulang Pisau	5.209.314	153.849	239.804
287	Kab. Murung Raya	875.909	3.019.237	391 559
288	Kab. Barito Timur	2.911.748	191.222	334.275
289	Provinsi Kalimantan Selatan	5.642.936	404.887	3.331.100
290	Kab. Banjar	2.030.780	344.414	333.870
291	Kab. Barito Kuala	3.004.553	20.411	263.483
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.500.098	33.527	238.463
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	290.275	20.828	241.141
294	Kab. Hulu Sungai Utara	460.992	20.828	229.233

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
281	Kab. Katingan	0	1.662.616	45.417	8.111.395
282	Kab. Seruyan	0	1.816.447	48.316	22.129.789
283	Kab. Sukamara	0	1.681.472	47.349	5.443.710
284	Kab. Lamandau	0	1.613.727	43.484	9.561.086
285	Kab. Gunung Mas	0	2.227.874	46.383	9.297.848
286	Kab. Pulang Pisau	0	1.647.156	46.383	7.296.506
287	Kab. Murung Raya	0	46.783.575	44.450	51.114.730
288	Kab. Barito Timur	0	10.037.943	44.450	13.519.638
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	75.760.167	121.422	85.260.512
290	Kab. Banjar	0	6.802.754	48.316	9.560.134
291	Kab. Barito Kuala	0	3.819.186	47.349	7.154.982
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	16.672.264	48.316	18.492.668
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	3.898.748	48.316	4.499.308
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	3.897.128	48.316	4.656.497

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
295	Kab. Kotabaru	7.608.234	409.834	400.447
296	Kab. Tabalong	644.513	207.870	13.219.410
297	Kab. Tanah Laut	5.610.481	525.288	296.856
298	Kab. Tapin	3.296.830	37.002	242.504
299	Kota Banjarbaru	290.275	20.828	224.230
300	Kota Banjarmasin	290.275	20.828	282.938
301	Kab. Balangan	334.278	19.578	893.584
302	Kab. Tanah Bumbu	3.670.856	403.283	296.621
303	Provinsi Kalimantan Timur	15.430.150	3.834.305	56.188.755
304	Kab. Berau	9.160.454	4.430.535	4.748.400
305	Kab. Kutai Kartanegara	15.884.879	4.399.291	211.299.250
306	Kab. Kutai Barat	12.154.105	2.238.477	4.053.426
307	Kab. Kutai Timur	24.938.274	4.267.818	14.965.791
308	Kab. Paser	9.351.029	1.109.301	6.740.439

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6-7-8
295	Kab. Kotabaru	0	51.202.847	48.316	59.669.678
296	Kab. Tabalong	0	26.704.347	48.316	40.824.456
297	Kab. Tanah Laut	0	14.298.123	48.316	20.779.064
298	Kab. Tapin	0	34.873.199	48.316	38.497.851
299	Kota Banjarbaru	0	3.914.741	48.316	4.498.390
300	Kota Banjarmasin	0	3.897.128	48.316	4.539.485
301	Kab. Balangan	0	74.668.982	45.417	75.961.839
302	Kab. Tanah Bumbu	0	139.553.660	47.349	143.971.769
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	100.959.139	84.062	176.496.411
304	Kab. Berau	0	31.791.620	48.316	50.179.325
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	241.047.683	44.450	472.675.553
306	Kab. Kutai Barat	0	28.778.521	43.484	47.268.013
307	Kab. Kutai Timur	0	116.671.305	43.484	160.886.672
308	Kab. Paser	0	70.443.943	44.450	87.689.162

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
309	Kota Balikpapan	1.128.864	314.005	4.240.590
310	Kota Bontang	1.058.310	262.984	27.912.983
311	Kota Samarinda	1.081.828	268.828	7.966.367
312	Kab. Penajam Paser Utara	3.411.557	2.374.910	11.384.627
313	Kab. Mahakam Ulu	3.548.273	993.864	4.135.056
314	Provinsi Sulawesi Utara	42.916	0	212.801
315	Kab. Bolaang Mongondow	68.692	0	106.781
316	Kab. Minahasa	25 541	0	81.477
317	Kab. Kepulauan Sangihe	1.741	0	79.763
318	Kota Bitung	1.855	0	57.728
319	Kota Manado	1.893	0	90.774
320	Kab. Kepulauan Talaud	1.893	0	86 828
321	Kab. Minahasa Selatan	42.018	0	85.045
322	Kota Tomohon	1.893	0	42.631

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5-6-7+8
309	Kota Balikpapan	0	7.412.818	46.383	13.142.660
310	Kota Bontang	0	6.924.496	43.484	36.202.257
311	Kota Samarinda	0	16.006 725	44.450	25.368.198
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	7.708.250	48.316	24.927.660
313	Kab. Mahakam Ulu	0	6.992.883	43.484	15.713.560
314	Provinsi Sulawesi Utara	2.078.092	1.503.483	140.103	3.977.395
315	Kab. Bolaang Mongondow	89.794	2.476.927	47.349	2.789.543
316	Kab. Minahasa	4.179.251	60.988	44.450	4.391.707
317	Kab. Kepulauan Sangihe	84.297	112.929	44.450	323.180
318	Kota Bitung	89.794	1.767.137	47.349	1 963.863
319	Kota Manado	131.105	66.292	48.316	338.380
320	Kab. Kepulauan Talaud	91.627	66.292	48.316	294 956
321	Kab. Minahasa Selatan	322.031	80.979	48.316	578.389
322	Kota Tomohon	4.711.491	86.800	48.316	4.891.131

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
323	Kab. Minahasa Utara	50.255	0	77.575
324	Kab. Kep. Sitaro Talaud Diaro	1.703	0	40.223
325	Kota Kotamobagu	1.893	0	39.478
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	5.275	0	78.801
327	Kab. Minahasa Tenggara	2.706	0	63.088
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	8.577	0	65.187
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.893	0	82.235
330	Provinsi Sulawesi Tengah	1.236.625	42.237	24.309.151
331	Kab. Banggai	1.026.455	57.015	100.251.131
332	Kab. Banggai Kepulauan	62.497	2.086	1.293.773
333	Kab. Buol	959.224	2.129	1.321.077
334	Kab. Toli-Toli	611.391	2.086	1.293.555
335	Kab. Donggala	605.885	2.129	1.373.471
336	Kab. Morowali	365.865	2.129	1.348.222

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
323	Kab. Minahasa Utara	118.902	111.064	48.316	406.112
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	82.464	59.663	43.484	227.537
325	Kota Kotamobagu	91.627	66.292	48.316	247.606
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	91.627	67.516	48.316	291.535
327	Kab. Minahasa Tenggara	98.805	81.445	48.316	294.360
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	89.794	91.541	47.349	302.448
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	91.627	2.471.187	48.316	2.695.258
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	6.449.066	121.422	32.158.501
331	Kab. Banggai	0	2.312.624	44.450	103.691.675
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	318.473	46.383	1.723.212
333	Kab. Buol	0	341.480	47.349	2.671.259
334	Kab. Toli-Toli	0	340.494	46.383	2.293.909
335	Kab. Donggala	0	675.921	47.349	2.704.755
336	Kab. Morowali	0	20.203.138	47.349	21.966.703

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
337	Kab. Poso	230.779	2 043	1.319.450
338	Kota Palu	63.613	2.173	1.321.222
339	Kab. Parigi Moutong	63.613	2.173	1.436.112
340	Kab. Tojo Una Una	59.796	83.553	1.316.033
341	Kab. Sigi	63 613	2.173	1.374.808
342	Kab. Banggai Laut	63.613	2.173	1.343.712
343	Kab. Morowali Utara	2.004.331	44.979	1.645.179
344	Provinsi Sulawesi Selatan	1.607.529	34.468	2.775.472
345	Kab. Bantaeng	44.024	945	123.793
346	Kab. Barru	39.622	850	119.865
347	Kab. Bone	1.754.326	926	278.272
348	Kab. Bulukumba	741.462	926	176.654
349	Kab. Enrekang	270.529	850	133.380
350	Kab. Gowa	137.849	160.226	230.009

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
337	Kab. Poso	0	311.838	45.417	1.909.527
338	Kota Palu	0	2.246.717	48.316	3.682.041
339	Kab. Parigi Moutong	0	354.962	48.316	1.905.176
340	Kab. Tojo Una Una	0	311.838	45.417	1.816.637
341	Kab. Sigi	0	360.299	48.316	1.849.209
342	Kab. Banggai Laut	0	331.743	48.316	1.789.557
343	Kab. Morowali Utara	0	4.458.042	47.349	8.199.880
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	2.114.222	219.681	6.751.372
345	Kab. Bantaeng	0	59.443	48.316	276.521
346	Kab. Barru	0	52.801	43.484	256.622
347	Kab. Bone	0	60.791	47.349	2.141.664
348	Kab. Bulukumba	0	56.743	47.349	1.023.134
349	Kab. Enrekang	0	52.111	43.484	500.354
350	Kab. Gowa	0	57.901	48.316	634.301

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
351	Kab. Jeneponto	151.614	945	164.110
352	Kab. Luwu	39.622	850	169.517
353	Kab. Luwu Utara	129.719	907	230.189
354	Kab. Maros	42.263	907	159.254
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	43.144	926	149.815
356	Kota Palopo	43.144	926	112.571
357	Kab. Luwu Timur	724.787	850	203.288
358	Kab. Pinrang	51.701	850	161.307
359	Kab. Sinjai	41.383	888	134.427
360	Kab. Kepulauan Selayar	44.024	945	199.146
361	Kab. Sidenreng Rappang	109.291	850	141.624
362	Kab. Soppeng	81.042	926	136.705
363	Kab. Takalar	1.889.774	945	151.534
364	Kab. Tana Toraja	122.913	869	141.037

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
351	Kab. Jeneponto	0	58.223	48.316	423.208
352	Kab. Luwu	0	77.220	43.484	330.693
353	Kab. Luwu Utara	0	104.871	46.383	512.069
354	Kab. Maros	0	860.098	46.383	1.108.905
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	1.793.689	47.349	2.034.923
356	Kota Palopo	0	56.743	47.349	260.733
357	Kab. Luwu Timur	0	6.415.840	43.484	7.388.249
358	Kab. Pinrang	0	52.111	43.484	309.453
359	Kab. Sinjai	0	54.427	45.417	276.542
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	57.901	48.316	350.332
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	52.111	43.484	347.360
362	Kab. Soppeng	0	57.810	47.349	323.832
363	Kab. Takalar	0	57.901	48.316	2.148.470
364	Kab. Tana Toraja	0	54.454	44.450	363.723

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
365	Kab. Wajo	1.573.991	926	10.393.982
366	Kota Pare-pare	39.622	850	97.240
367	Kota Makassar	39.622	850	285.127
368	Kab. Toraja Utara	69.012	850	130.420
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	619.717	8.638	277.630
370	Kab. Buton	23.910	334	73.034
371	Kab. Konawe	826.102	334	123.001
372	Kab. Kolaka	661.632	342	101.413
373	Kab. Muna	23.910	39.348	80.534
374	Kota Kendari	23.910	334	69.036
375	Kota Bau-bau	23.910	334	44.780
376	Kab. Konawe Selatan	574.409	334	127.380
377	Kab. Bombana	135.489	342	104.432
378	Kab. Wakatobi	23.910	334	72.531

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
365	Kab. Wajo	0	57.228	47.349	12.073.476
366	Kota Parc-parc	0	52.111	43.484	233.307
367	Kota Makassar	0	52.111	43.484	421.194
368	Kab. Toraja Utara	0	52.111	43.484	295.877
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	7.879.662	142.905	8.928.552
370	Kab. Buton	0	450 152	43.484	590.914
371	Kab. Konawe	0	2.477.488	43.484	3.470.409
372	Kab. Kolaka	0	7.461.921	44.450	8.269.758
373	Kab. Muna	0	304.051	43 484	491.327
374	Kota Kendari	0	304.000	43.484	440.764
375	Kota Bau-bau	0	304.027	43.484	416.535
376	Kab. Konawe Selatan	0	4.195.027	43.484	4.940.634
377	Kab. Bombana	0	4.535.239	44.450	4.819.952
378	Kab. Wakatobi	0	304 000	43 484	444.259

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
379	Kab. Kolaka Utara	24.441	342	87.071
380	Kab. Konawe Utara	691.695	334	100.337
381	Kab. Buton Utara	37.403	334	84.965
382	Kab. Konawe Kepulauan	24.441	342	73.626
383	Kab. Kolaka Timur	58.477	342	99.664
384	Kab. Muna Barat	23.910	334	62.384
385	Kab. Buton Tengah	23.910	334	71.739
386	Kab. Buton Selatan	23.910	334	70.354
387	Provinsi Bali	60.362	0	182.097
388	Kab. Badung	4.658	0	107.885
389	Kab. Bangli	4.565	0	65.877
390	Kab. Buleleng	11.733	0	172.310
391	Kab. Gianyar	36.519	0	94.402
392	Kab. Jembrana	233.713	0	86.004

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
379	Kab. Kolaka Utara	0	1.447.044	44.450	1.603.348
380	Kab. Konawe Utara	0	15.994.391	43.484	16.830.241
381	Kab. Buton Utara	0	304.000	43.484	470.186
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	310.755	44.450	453.614
383	Kab. Kolaka Timur	0	310.755	44.450	513.688
384	Kab. Muna Barat	0	304.000	43.484	434.112
385	Kab. Buton Tengah	0	1.755.159	43.484	1.894.626
386	Kab. Buton Selatan	0	304.000	43.484	442.082
387	Provinsi Bali	66.405	0	84.062	392.926
388	Kab. Badung	18.049	0	48.316	178.908
389	Kab. Bangli	7.437	0	47.349	125.228
390	Kab. Buleleng	38.428	0	48.316	270.787
391	Kab. Gianyar	10.157	0	45.417	186.495
392	Kab. Jembrana	5.124	0	48.316	373.157

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
393	Kab. Karangasem	4.658	0	117.912
394	Kab. Klungkung	4.658	0	62.763
395	Kab. Tabanan	4.658	0	104.034
396	Kota Denpasar	4.658	0	123.402
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	36.260	37.323	294.599
398	Kab. Bima	12.973	8.552	198.132
399	Kab. Dompu	64.002	36.516	112.356
400	Kab. Lombok Barat	2.487	2.561	162.196
401	Kab. Lombok Tengah	2.438	27.452	215.121
402	Kab. Lombok Timur	52.658	46.596	278.899
403	Kab. Sumbawa	43.011	37.744	229.739
404	Kota Mataram	2.487	2.561	96.379
405	Kota Bima	2.487	2.561	60.784
406	Kab. Sumbawa Barat	2.487	2.561	82.458

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
393	Kab. Karangasem	5.124	0	48.316	176.010
394	Kab. Klungkung	5.124	0	48.316	120.861
395	Kab. Tabanan	248.135	0	48.316	405.143
396	Kota Denpasar	5.124	0	48.316	181.500
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	11.553.063	93.402	12.014.647
398	Kab. Bima	0	801.737	48.316	1.069.710
399	Kab. Dompu	0	827.470	48.316	1.088.660
400	Kab. Lombok Barat	0	828.635	48.316	1.044.195
401	Kab. Lombok Tengah	0	776.928	47.349	1.069.288
402	Kab. Lombok Timur	0	819.634	48.316	1.246.103
403	Kab. Sumbawa	0	1.617.604	48.316	1.976.414
404	Kota Mataram	0	792.391	48.316	942.134
405	Kota Bima	0	792.391	48.316	906.539
406	Kab. Sumbawa Barat	0	51.696.941	48.316	51.832.763

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
407	Kab. Lombok Utara	2.438	24.902	81.795
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	191.104	51.282	434 569
409	Kab. Alor	5.852	1.571	130.656
410	Kab. Belu	5.618	1.508	70.863
411	Kab. Ende	5.384	1.445	98.546
412	Kab. Flores Timur	5.267	1.414	103.701
413	Kab. Kupang	5.852	243.349	176.755
414	Kab. Lembata	6.802	1.414	77.480
415	Kab. Manggarai	5.384	1.445	90.431
416	Kab. Ngada	215.302	1.445	75.203
417	Kab. Sikka	5 267	1.414	107.128
418	Kab. Sumba Barat	23 506	1.508	59 323
419	Kab. Sumba Timur	654 845	1.571	182.595
420	Kab. Timor Tengah Selatan	5 735	1.539	155.556

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
407	Kab. Lombok Utara	0	776.702	47.349	933.186
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	382.809	22.141	197.264	1.279.169
409	Kab. Alor	11.722	1.938	48.316	200.055
410	Kab. Belu	11.253	2.085	46.383	137.710
411	Kab. Ende	955.452	952	44.450	1.106.229
412	Kab. Flores Timur	10.550	611	43.484	165.027
413	Kab. Kupang	11.722	4.335	48.316	490.329
414	Kab. Lembata	10.550	611	43.484	140.341
415	Kab. Manggarai	630.477	13.375	44.450	785.562
416	Kab. Ngada	106.882	624	44.450	443.906
417	Kab. Sikka	10.550	8.195	43.484	176.038
418	Kab. Sumba Barat	11.253	651	46.383	142.624
419	Kab. Sumba Timur	11.722	678	48.316	899.727
420	Kab. Timor Tengah Selatan	11.488	28.916	47.349	250.583

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
421	Kab. Timor Tengah Utara	5.384	1.445	93.560
422	Kota Kupang	5.618	1.508	83.463
423	Kab. Rote Ndao	5.618	1.508	89.856
424	Kab. Manggarai Barat	5.852	1.571	125.826
425	Kab. Nagekeo	5.384	1.445	76.060
426	Kab. Sumba Barat Daya	5.852	1.571	108.484
427	Kab. Sumba Tengah	5.852	1.571	89.898
428	Kab. Manggarai Timur	5.267	1.414	101.520
429	Kab. Sabu Raijua	5.852	1.571	68.917
430	Kab. Malaka	9.164	1.539	77.374
431	Provinsi Maluku	82.891	343.269	981.240
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	5.685	345.761	235.804
433	Kab. Maluku Tengah	333.158	87.456	382.395
434	Kab. Maluku Tenggara	5.685	23.544	143.014

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
421	Kab. Timor Tengah Utara	10.784	26.566	44.450	182.189
422	Kota Kupang	11.253	2.844	46.383	151.069
423	Kab. Rote Ndao	11.253	660	46.383	155.278
424	Kab. Manggarai Barat	11.722	3.315	48.316	196.602
425	Kab. Nagekeo	10.784	2.685	44.450	140.808
426	Kab. Sumba Barat Daya	11.722	678	48.316	176.623
427	Kab. Sumba Tengah	11.722	678	48.316	158.037
428	Kab. Manggarai Timur	10.550	611	43.484	162.846
429	Kab. Sabu Raijua	11.722	11.082	48.316	147.460
430	Kab. Maluka	11.488	1.385	47.349	148.299
431	Provinsi Maluku	29.287	38.986	92.468	1.568.141
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	2.009	2.675	48.316	640.250
433	Kab. Maluku Tengah	145.274	2.621	47.349	998.253
434	Kab. Maluku Tenggara	2.009	2.675	48.316	225.243

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
435	Kab. Buru	54.695	352.193	185.550
436	Kota Ambon	5.117	21.190	121.927
437	Kab. Seram Bagian Barat	35.170	23.544	230.699
438	Kab. Seram Bagian Timur	5.685	822.186	3.475.616
439	Kab. Kepulauan Aru	5.685	23.544	285.894
440	Kota Tual	5.685	23.544	129.040
441	Kab. Maluku Barat Daya	5.685	23.544	248.275
442	Kab. Buru Selatan	5.117	193.628	158.781
443	Provinsi Papua	793.264	279.240	340.703
444	Kab. Biak Numfor	66.650	23.462	124.897
445	Kab. Jayapura	1.771.064	269.660	238.581
446	Kab. Kepulauan Yapen	62.570	22.026	126.782
447	Kota Jayapura	62.570	22.026	101.614
448	Kab. Sarmi	103.730	880.167	254.161

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
435	Kab. Buru	1.969	2.621	47.349	644.377
436	Kota Ambon	1.808	2.407	43.484	195.933
437	Kab. Seram Bagian Barat	2.009	92.002	48.316	431.740
438	Kab. Seram Bagian Timur	2.009	2.675	48.316	4.356.487
439	Kab. Kepulauan Aru	2.009	2.675	48.316	368.123
440	Kota Tual	2.009	2.675	48.316	211.269
441	Kab. Maluku Barat Daya	2.009	108.010	48.316	435.839
442	Kab. Buru Selatan	1.808	2.407	43.484	405.225
443	Provinsi Papua	0	17.009	75.655	1.505.871
444	Kab. Biak Numfor	0	1.430	47.349	263.788
445	Kab. Jayapura	0	1.342	44.450	2.325.097
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	1.342	44.450	257.170
447	Kota Jayapura	0	1.342	44.450	232.002
448	Kab. Sarmi	0	43.335	43.484	1.324.877

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
449	Kab. Keerom	1.836.957	171.221	178.043
450	Kab. Waropen	124.136	21.547	234.673
451	Kab. Supiori	61.210	21.547	98.704
452	Kab. Mamberamo Raya	61.210	21.547	425.295
453	Provinsi Maluku Utara	69.736	368.934	249.261
454	Kab. Halmahera Tengah	4.783	139.897	97.654
455	Kota Ternate	4.783	25.305	71.343
456	Kab. Halmahera Barat	4.783	25.305	108.905
457	Kab. Halmahera Timur	4.688	616.318	161.140
458	Kab. Halmahera Selatan	284.582	401.726	278.100
459	Kab. Halmahera Utara	37.882	25.305	123.887
460	Kab. Kepulauan Sula	4.783	586.091	117.425
461	Kota Tidore Kepulauan	4.783	25.305	84.253
462	Kab. Pulau Morotai	4.688	24.798	106.932

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
449	Kab. Keerom	0	35.463	43.484	2.265.168
450	Kab. Waropen	0	1.313	43.484	425.153
451	Kab. Supiori	0	1.313	43.484	226.258
452	Kab. Mamberamo Raya	0	1.313	43.484	552.849
453	Provinsi Maluku Utara	0	12.835.842	93.402	13.617.175
454	Kab. Halmahera Tengah	0	16.456.399	48.316	16.747.049
455	Kota Ternate	0	880.374	48.316	1.030.121
456	Kab. Halmahera Barat	0	899.271	48.316	1.086.580
457	Kab. Halmahera Timur	0	24.296.288	47.349	25.125.783
458	Kab. Halmahera Selatan	0	17.307.104	48.316	18.319.828
459	Kab. Halmahera Utara	0	894.005	48.316	1.129.395
460	Kab. Kepulauan Sula	0	914.221	48.316	1.670.836
461	Kota Tidore Kepulauan	0	887.453	48.316	1.050.110
462	Kab. Pulau Morotai	0	863.662	47.349	1.047.429

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
463	Kab. Pulau Taliabu	4.783	25.305	134.276
464	Provinsi Banten	1.069.739	378.900	488.130
465	Kab. Lebak	3.840.282	1.086.677	334.206
466	Kab. Pandeglang	1.031.477	672.835	332.540
467	Kab. Serang	190.164	33.413	351.881
468	Kab. Tangerang	86.787	30.740	546.873
469	Kota Cilegon	94.334	33.413	121.407
470	Kota Tangerang	86.787	30.740	322.841
471	Kota Serang	94.334	33.413	167.325
472	Kota Tangerang Selatan	90.561	32.077	261.428
473	Provinsi Bangka Belitung	2.111.686	89.804	143.688
474	Kab. Bangka	2.239.573	78.571	123.794
475	Kab. Belitung	2.251.821	9.240	109.488
476	Kota Pangkal Pinang	217.252	9.240	59.301

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
463	Kab. Pulau Taliabu	0	2.485.509	48.316	2.698.189
464	Provinsi Banten	24.352	136.405	74.721	2.172.247
465	Kab. Lebak	2.335	109.225	48.316	5.421.043
466	Kab. Pandeglang	56.960	18.261	48.316	2.160.389
467	Kab. Serang	55.938	502.655	48.316	1.182.367
468	Kab. Tangerang	1.977	11.067	44.450	721.894
469	Kota Cilegon	2.148	27.345	48.316	326.963
470	Kota Tangerang	1.977	11.067	44.450	497.862
471	Kota Serang	2.148	12.029	48.316	357.565
472	Kota Tangerang Selatan	2.062	11.548	46.383	444.059
473	Provinsi Bangka Belitung	0	3.345.963	65.381	5.756.522
474	Kab. Bangka	0	5.191.257	48.316	7.681.511
475	Kab. Belitung	0	984.748	48.316	3.403.613
476	Kota Pangkal Pinang	0	344.235	48.316	678.344

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
477	Kab. Bangka Selatan	864.952	9.055	127.117
478	Kab. Bangka Tengah	808.952	112.078	104.189
479	Kab. Bangka Barat	2.376.066	94.547	110.114
480	Kab. Belitung Timur	2.104.201	148.595	104.544
481	Provinsi Gorontalo	308.952	119.796	96.489
482	Kab. Boalemo	340.616	15.092	78.030
483	Kab. Gorontalo	426.790	15.092	113.244
484	Kota Gorontalo	38.921	15.092	48.133
485	Kab. Pohuwato	727.497	14.790	111.794
486	Kab. Bone Bolango	37.364	14.488	68.288
487	Kab. Gorontalo Utara	42.319	545.737	82.997
488	Provinsi Kepulauan Riau	179.684	0	11.546.865
489	Kab. Natuna	18.864	0	34.265.076
490	Kab. Kepulauan Anambas	53.958	0	19.990.104

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
477	Kab. Bangka Selatan	0	5.137.653	47.349	6.186.126
478	Kab. Bangka Tengah	0	791.351	48.316	1.864.886
479	Kab. Bangka Barat	0	3.398.341	48.316	6.027.384
480	Kab. Belitung Timur	0	1.328.584	47.349	3.733.273
481	Provinsi Gorontalo	0	14.420	54.921	594.578
482	Kab. Boalemo	0	3.253	48.316	485.307
483	Kab. Gorontalo	0	1.882	48.316	605.324
484	Kota Gorontalo	0	1.817	48.316	152.279
485	Kab. Pohuwato	0	20.680	47.349	922.110
486	Kab. Bone Bolango	0	40.853	46.383	207.376
487	Kab. Gorontalo Utara	0	5.395	47.349	723.797
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	842.679	64.074	12.633.302
489	Kab. Natuna	0	692.756	48.316	35.025.012
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	88.465	48.316	20.180.843

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
491	Kab. Karimun	131.805	0	1.302.058
492	Kota Batam	18.864	0	1.464.613
493	Kota Tanjung Pinang	18.487	0	1.235.538
494	Kab Lingga	189.758	0	1.319.179
495	Kab. Bintan	512.461	0	1.320.360
496	Provinsi Papua Barat	380.196	1.083.043	81.798.112
497	Kab. Fak fak	680 744	378.419	20.059.042
498	Kab. Manokwari	525.439	111.424	8.504.259
499	Kab. Teluk Bintuni	648.106	1.730.122	370.295.841
500	Kab. Teluk Wondama	39.965	881.671	8.726 779
501	Kab. Kaimana	78.938	2.425.265	8.889.285
502	Kab. Manokwari Selatan	39 115	111.424	8.516.878
503	Kab. Pegunungan Arfak	39.985	113.901	8.765.753
504	Provinsi Sulawesi Barat	654.104	21.157	128.157

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
491	Kab. Karimun	0	2.340.753	48.316	3.822.932
492	Kota Batam	0	88.521	48.316	1.620.314
493	Kota Tanjung Pinang	0	86.695	47.349	1.388.069
494	Kab. Lingga	0	730.220	47.349	2.286.506
495	Kab. Bintan	0	403.919	48.316	2.285.056
496	Provinsi Papua Barat	0	12.966	58.843	83.333.160
497	Kab. Fak fak	0	1.483	48.316	21.168.004
498	Kab. Manokwari	0	59.065	43.484	9.243.671
499	Kab. Teluk Bintuni	0	1.364	44.450	372.719.883
500	Kab. Teluk Wondama	0	1.364	44.450	9.694.249
501	Kab. Kaimana	0	1.364	44.450	11.439.302
502	Kab. Manokwari Selatan	0	1.335	43.484	8.712.236
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	1.364	44.450	8.965.453
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	1.466	53.800	858.684

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
505	Kab. Majene	84.119	2.721	77.208
506	Kab. Mamuju	470.041	2.613	158.543
507	Kab. Polewali Mandar	84.119	2.721	129.961
508	Kab. Mamasa	82.437	2.667	103.165
509	Kab. Pasangkayu	2.210.637	28.917	98.697
510	Kab. Mamuju Tengah	300.207	65.306	95.046
511	Provinsi Kalimantan Utara	2.792.579	1.227.742	12.285.045
512	Kab. Bulungan	5.121.563	2.059.075	17.240.080
513	Kab. Malinau	430.954	2.240.003	2.427.909
514	Kab. Nunukan	6.210.611	1.180.650	8.061.762
515	Kota Tarakan	422.335	185.678	29.226.000
516	Kab. Tana Tidung	1.711.428	579.052	5.295.345
517	Provinsi Papua Selatan	1.460.965	323.496	365.551
518	Kab. Merauke	5.335.159	908.088	689.806

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
505	Kab. Majene	0	189	48.316	212.553
506	Kab. Mamuju	0	1.725	46.383	679.305
507	Kab. Polewali Mandar	0	1.984	48.316	267.101
508	Kab. Mamasa	0	3.483	47.349	239.101
509	Kab. Pasangkayu	0	170	43.484	2.381.905
510	Kab. Mamuju Tengah	0	173	44.450	505.182
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	19.746.894	46.701	36.098.961
512	Kab. Bulungan	0	11.695.502	48.316	36.164.536
513	Kab. Malinau	0	10.359.006	48.316	15.506.188
514	Kab. Nunukan	0	11.923.698	44.450	27.421.171
515	Kota Tarakan	0	2.986.413	47.349	32.867.775
516	Kab. Tana Tidung	0	64.085.107	48.316	71.719.248
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	34.372	2.184.384
518	Kab. Merauke	0	0	44.450	6.977.503

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
519	Kab. Boven Digoel	1.620.959	544.956	382.109
520	Kab. Mappi	313.681	160.473	418.740
521	Kab. Asmat	300.610	66.564	417.729
522	Provinsi Papua Tengah	233.621	419.481	296.590
523	Kab. Mimika	67.332	494.676	316.667
524	Kab. Nabire	1.011.687	1.410.271	255.134
525	Kab. Paniai	20.190	36.252	134.674
526	Kab. Puncak Jaya	19.366	34.772	157.961
527	Kab. Dogiyai	20.602	36.992	145.216
528	Kab. Puncak	18.542	33.293	167.049
529	Kab. Intan Jaya	18.542	33.293	140.365
530	Kab. Deiyai	18.954	34.032	131.216
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	236.080
532	Kab. Jayawijaya	0	0	102.773

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
519	Kab. Boven Digoel	0	0	44.450	2.592.474
520	Kab. Mappi	0	0	46.383	939.277
521	Kab. Asmat	0	0	44.450	829.353
522	Provinsi Papua Tengah	0	32.024.431	74.721	33.048.844
523	Kab. Mimika	0	134.217.948	44.450	135.141.073
524	Kab. Nabire	0	2.824.025	48.316	5.549.433
525	Kab. Paniai	0	2.767.544	47.349	3.006.009
526	Kab. Puncak Jaya	0	2.654.583	45.417	2.912.099
527	Kab. Dogiyai	0	2.824.025	48.316	3.075.151
528	Kab. Puncak	0	2.541.622	43.484	2.803.990
529	Kab. Intan Jaya	0	2.541.622	43.484	2.777.306
530	Kab. Deiyai	0	2.598.102	44.450	2.826.754
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	15.951	67.249	319.280
532	Kab. Jayawijaya	0	1.407	43.484	147.664

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
533	Kab. Yahukimo	0	0	296.404
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	225.804
535	Kab. Tolikara	0	0	134.637
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	110.486
537	Kab. Yalimo	0	0	106.088
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	102.485
539	Kab. Nduga	0	0	148.971
540	Provinsi Papua Barat Daya	346.771	28.130	6.072.289
541	Kab. Sorong	1.155.716	3.705	28.611.480
542	Kab. Sorong Selatan	453.226	128.146	878.656
543	Kab. Raja Ampat	42.688	3.473	1.031.356
544	Kab. Tambrauw	53.122	3.551	1.007.082
545	Kab. Maybrat	114.568	3.473	889.675
546	Kota Sorong	42.688	3.473	802.841

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7+8
533	Kab. Yahukimo	0	1.438	44.450	342.292
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	72.664	43.484	341.952
535	Kab. Tolikara	0	1.407	43.484	179.528
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	1.407	43.484	155.377
537	Kab. Yalimo	0	1.407	43.484	150.979
538	Kab. Lanny Jaya	0	1.407	43.484	147.376
539	Kab. Nduga	0	1.407	43.484	193.862
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	980.400	50.437	7.477.027
541	Kab. Sorong	0	129.588	46.383	29.946.872
542	Kab. Sorong Selatan	0	121.038	43.484	1.624.550
543	Kab. Raja Ampat	0	4.457.051	43.484	5.578.052
544	Kab. Tambrauw	0	123.728	44.450	1.231.933
545	Kab. Maybrat	0	121.038	43.484	1.172.238
546	Kota Sorong	0	129.798	43.484	1.022.284

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN	PERHUTANAN	PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
1	2	3	4	5
547	Seliaih Lebih	35.160.304	7.833.237	151.843.644
JUMLAH NASIONAL		942.151.523	216.715.052	4.617.368.728

V.3. RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERTAMBANGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	SEKTOR LAINNYA	JUMLAH
1	2	6	7	8	9 = 3+4+5+6+7-8
547	Sebsih Lebih	4.285.504	109.787.264	1.015.592	309.925.545
JUMLAH NASIONAL		271.695.768	2.250 242 397	29.346.609	8.330.520.077

V.4. RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	CHT
1	2	3
1	Provinsi Aceh	10.396.929
2	Provinsi Sumatera Utara	12.750.187
3	Provinsi Sumatera Barat	827.335
4	Provinsi Riau	1.690
5	Provinsi Jambi	809.319
6	Provinsi Sumatera Selatan	179.341
7	Provinsi Bengkulu	410
8	Provinsi Lampung	2.029.433
9	Provinsi DKI Jakarta	1.211.795
10	Provinsi Jawa Barat	290.202.997
11	Provinsi Jawa Tengah	764.870.938
12	Provinsi DI Yogyakarta	9.687.792
13	Provinsi Jawa Timur	1.857.306.250
14	Provinsi Kalimantan Barat	1.098.530
15	Provinsi Kalimantan Tengah	196
16	Provinsi Kalimantan Selatan	10.913
17	Provinsi Kalimantan Timur	16.945
18	Provinsi Sulawesi Utara	0
19	Provinsi Sulawesi Tengah	265.662
20	Provinsi Sulawesi Selatan	10.406.682
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0
22	Provinsi Bali	1.242.794
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	312.628.695
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.296.298
25	Provinsi Maluku	0
26	Provinsi Papua	0
27	Provinsi Maluku Utara	0
28	Provinsi Banten	2.206.537
29	Provinsi Bangka Belitung	0
30	Provinsi Gorontalo	188
31	Provinsi Kepulauan Riau	299.084
32	Provinsi Papua Barat	0
33	Provinsi Sulawesi Barat	0
34	Provinsi Kalimantan Utara	112
35	Provinsi Papua Selatan	0
36	Provinsi Papua Tengah	0
37	Provinsi Papua Pegunungan	0
38	Provinsi Papua Barat Daya	0
39	Selisih Lebih	1.815.071
JUMLAH NASIONAL		3.283.562.123

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
1	Provinsi Aceh	399.264	18.815.854	19.215.118
2	Kab. Aceh Barat	35.903	0	35.903
3	Kab. Aceh Besar	35.903	0	35.903
4	Kab. Aceh Selatan	35.903	0	35.903
5	Kab. Aceh Singkil	35.903	0	35.903
6	Kab. Aceh Tengah	120.386	0	120.386
7	Kab. Aceh Tenggara	35.903	0	35.903
8	Kab. Aceh Timur	1.134.135	0	1.134.135
9	Kab. Aceh Utara	309.093	0	309.093
10	Kab. Bireuen	58.903	0	58.903

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
1	Provinsi Aceh	1.221.901	20.867.577	22.089.478	41.304.596
2	Kab. Aceh Barat	96.594	0	96.594	132.497
3	Kab. Aceh Besar	96.594	0	96.594	132.497
4	Kab. Aceh Selatan	96.594	0	96.594	132.497
5	Kab. Aceh Singkil	96.594	0	96.594	132.497
6	Kab. Aceh Tengah	292.110	0	292.110	412.496
7	Kab. Aceh Tenggara	100.506	0	100.506	136.409
8	Kab. Aceh Timur	2.847.678	0	2.847.678	3.981.813
9	Kab. Aceh Utara	1.710.918	0	1.710.918	2.020.011
10	Kab. Bireuen	261.532	0	261.532	320.435

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
11	Kab. Pidie	35.903	0	35.903
12	Kab. Simeulue	35.903	0	35.903
13	Kota Banda Aceh	35.170	0	35.170
14	Kota Sabang	35.903	0	35.903
15	Kota Langsa	117.929	0	117.929
16	Kota Lhokseumawe	57.701	0	57.701
17	Kab. Gayo Lues	120.386	0	120.386
18	Kab. Aceh Barat Daya	35.903	0	35.903
19	Kab. Aceh Jaya	35.903	0	35.903
20	Kab. Nagan Raya	35.903	0	35.903

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
11	Kab. Pidie	96.594	0	96.594	132.497
12	Kab. Simeulue	96.594	0	96.594	132.497
13	Kota Banda Aceh	94.623	0	94.623	129.793
14	Kota Sabang	96.594	0	96.594	132.497
15	Kota Langsa	286.149	0	286.149	404.078
16	Kota Lhokseumawe	256.195	0	256.195	313.896
17	Kab. Gayo Lues	296.023	0	296.023	416.409
18	Kab. Aceh Barat Daya	96.594	0	96.594	132.497
19	Kab. Aceh Jaya	96.594	0	96.594	132.497
20	Kab. Nagan Raya	96.594	0	96.594	132.497

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
21	Kab. Aceh Tamiang	120.386	0	120.386
22	Kab. Bener Meriah	137.532	0	137.532
23	Kab. Pidie Jaya	35.903	0	35.903
24	Kota Subulussalam	35.903	0	35.903
25	Provinsi Sumatera Utara	17.311	0	17.311
26	Kab. Asahan	1.038	0	1.038
27	Kab. Dairi	1.060	0	1.060
28	Kab. Deli Serdang	1.038	0	1.038
29	Kab. Karo	1.060	0	1.060
30	Kab. Labuhanbatu	9.440.078	0	9.440.078

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
21	Kab. Aceh Tamiang	296.023	0	296.023	416.409
22	Kab. Bener Meriah	438.393	0	438.393	575.925
23	Kab. Pidie Jaya	96.594	0	96.594	132.497
24	Kota Subulussalam	96.594	0	96.594	132.497
25	Provinsi Sumatera Utara	15.652	0	15.652	32.963
26	Kab. Asahan	826	0	826	1.864
27	Kab. Dairi	843	0	843	1.903
28	Kab. Deli Serdang	4.659	0	4.659	5.697
29	Kab. Karo	4.756	0	4.756	5.816
30	Kab. Labuhanbatu	826	0	826	9.440.904

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
31	Kab. Langkat	1.060	0	1.060
32	Kab. Mandailing Natal	6.252	0	6.252
33	Kab. Nias	1.060	0	1.060
34	Kab. Simalungun	1.038	0	1.038
35	Kab. Tapanuli Selatan	6.252	0	6.252
36	Kab. Tapanuli Tengah	1.060	0	1.060
37	Kab. Tapanuli Utara	1.060	0	1.060
38	Kab. Toba	1.060	0	1.060
39	Kota Binjai	1.038	0	1.038
40	Kota Medan	1.038	0	1.038

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
31	Kab. Langkat	53.256	0	53.256	54.316
32	Kab. Mandailing Natal	843	0	843	7.095
33	Kab. Nias	843	0	843	1.903
34	Kab. Simalungun	826	0	826	1.864
35	Kab. Tapanuli Selatan	843	0	843	7.095
36	Kab. Tapanuli Tengah	843	0	843	1.903
37	Kab. Tapanuli Utara	843	0	843	1.903
38	Kab. Toba	843	0	843	1.903
39	Kota Binjai	4.659	0	4.659	5.697
40	Kota Medan	826	0	826	1.864

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
41	Kota Pematang Siantar	1.038	0	1.038
42	Kota Sibolga	1.017	0	1.017
43	Kota Tanjung Balai	1.038	0	1.038
44	Kota Tebing Tinggi	1.038	0	1.038
45	Kota Padang Sidempuan	1.038	0	1.038
46	Kab. Pakpak Bharat	1.060	0	1.060
47	Kab. Nias Selatan	1.060	0	1.060
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.060	0	1.060
49	Kab. Serdang Bedagai	1.038	0	1.038
50	Kab. Samosir	1.060	0	1.060

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
41	Kota Pematang Siantar	826	0	826	1.864
42	Kota Sibolga	809	0	809	1.826
43	Kota Tanjung Balai	826	0	826	1.864
44	Kota Tebing Tinggi	826	0	826	1.864
45	Kota Padang Sidempuan	826	0	826	1.864
46	Kab. Pakpak Bharat	843	0	843	1.903
47	Kab. Nias Selatan	843	0	843	1.903
48	Kab. Humbang Hasundutan	843	0	843	1.903
49	Kab. Serdang Bedagai	826	0	826	1.864
50	Kab. Samosir	843	0	843	1.903

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
51	Kab. Batu Bara	1.038	0	1.038
52	Kab. Padang Lawas	275.401	0	275.401
53	Kab. Padang Lawas Utara	9.866.077	0	9.866.077
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	9.636.746	0	9.636.746
55	Kab. Labuhanbatu Utara	1.038	0	1.038
56	Kab. Nias Utara	1.038	0	1.038
57	Kab. Nias Barat	1.038	0	1.038
58	Kota Gunungsitoli	1.038	0	1.038
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	5.140.330	0	5.140.330

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
51	Kab. Batu Bara	826	0	826	1.864
52	Kab. Padang Lawas	826	0	826	276.227
53	Kab. Padang Lawas Utara	843	0	843	9.866.920
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	843	0	843	9.637.589
55	Kab. Labuhanbatu Utara	826	0	826	1.864
56	Kab. Nias Utara	826	0	826	1.864
57	Kab. Nias Barat	826	0	826	1.864
58	Kota Gunungsitoli	826	0	826	1.864
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	305.056	0	305.056	5.445.386

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
61	Kab. Agam	0	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0
64	Kab. Pasaman	229.332	0	229.332
65	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0
66	Kab. Sijunjung	4.815.861	0	4.815.861
67	Kab. Solok	0	0	0
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0
69	Kota Bukit Tinggi	0	0	0
70	Kota Padang Panjang	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
61	Kab. Agam	0	0	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0
64	Kab. Pasaman	0	0	0	229.332
65	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	0
66	Kab. Sijunjung	298.830	0	298.830	5.114.691
67	Kab. Solok	0	0	0	0
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0	0
69	Kota Bukit Tinggi	0	0	0	0
70	Kota Padang Panjang	0	0	0	0

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
71	Kota Padang	0	0	0
72	Kota Payakumbuh	0	0	0
73	Kota Sawahlunto	0	0	0
74	Kota Solok	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	0	0	0
77	Kab. Dharmasraya	48.768	0	48.768
78	Kab. Solok Selatan	0	0	0
79	Provinsi Riau	151.866.316	0	151.866.316
80	Kab. Bengkalis	260.293.739	0	260.293.739

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
71	Kota Padang	0	0	0	0
72	Kota Payakumbuh	0	0	0	0
73	Kota Sawahlunto	0	0	0	0
74	Kota Solok	0	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	0	0	0	0
77	Kab. Dharmasraya	0	0	0	48.768
78	Kab. Solok Selatan	0	0	0	0
79	Provinsi Riau	5.706.323	0	5.706.323	157.572.639
80	Kab. Bengkalis	862.075	0	862.075	261.155.814

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
81	Kab. Indragiri Hilir	26.266.451	0	26.266.451
82	Kab. Indragiri Hulu	20.380.477	0	20.380.477
83	Kab. Kampar	98.409.375	0	98.409.375
84	Kab. Kuantan Singingi	25.162.833	0	25.162.833
85	Kab. Pelalawan	33.806.848	0	33.806.848
86	Kab. Rokan Hilir	160.374.450	0	160.374.450
87	Kab. Rokan Hulu	68.422.306	0	68.422.306
88	Kab. Siak	129.841.511	0	129.841.511
89	Kota Dumai	89.226.729	0	89.226.729
90	Kota Pekanbaru	33.029.762	0	33.029.762

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
81	Kab. Indragiri Hilir	11.256.779	0	11.256.779	37.523.230
82	Kab. Indragiri Hulu	1.907.976	0	1.907.976	22.288.453
83	Kab. Kampar	6.624.009	0	6.624.009	305.033.384
84	Kab. Kuantan Singingi	2.206.805	0	2.206.805	27.369.638
85	Kab. Pelalawan	15.016.544	0	15.016.544	48.823.392
86	Kab. Rokan Hilir	862.075	0	862.075	161.236.525
87	Kab. Rokan Hulu	1.160.904	0	1.160.904	69.583.210
88	Kab. Siak	2.206.805	0	2.206.805	132.048.316
89	Kota Dumai	862.075	0	862.075	90.088.804
90	Kota Pekanbaru	2.206.805	0	2.206.805	35.236.567

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
91	Kab. Kepulauan Meranti	27.452.160	0	27.452.160
92	Provinsi Jambi	24.040.221	0	24.040.221
93	Kab. Batang Hari	13.702.876	0	13.702.876
94	Kab. Bungo	4.323.600	0	4.323.600
95	Kab. Kerinci	4.273.818	0	4.273.818
96	Kab. Merangin	4.576.972	0	4.576.972
97	Kab. Muaro Jambi	14.423.289	0	14.423.289
98	Kab. Sarolangun	8.274.006	0	8.274.006
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	69.171.999	0	69.171.999
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	21.609.399	0	21.609.399

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
91	Kab. Kepulauan Meranti	936.749	0	936.749	28.388.909
92	Provinsi Jambi	35.777.610	0	35.777.610	59.817.831
93	Kab. Batang Hari	31.002.023	0	31.002.023	44.704.899
94	Kab. Bungo	5.962.936	0	5.962.936	10.286.536
95	Kab. Kerinci	5.962.936	0	5.962.936	10.236.754
96	Kab. Merangin	5.841.413	0	5.841.413	10.418.385
97	Kab. Muaro Jambi	31.636.631	0	31.636.631	46.059.920
98	Kab. Sarolangun	21.475.518	0	21.475.518	29.749.524
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	111.092.057	0	111.092.057	180.264.056
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	28.195.199	0	28.195.199	49.804.598

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
101	Kab. Tebo	13.031.206	0	13.031.206
102	Kota Jambi	4.186.597	0	4.186.597
103	Kota Sungai Penuh	4.273.818	0	4.273.818
104	Provinsi Sumatera Selatan	15.060.077	0	15.060.077
105	Kab. Lahat	1.530.272	0	1.530.272
106	Kab. Musi Banyuasin	40.323.833	0	40.323.833
107	Kab. Musi Rawas	5.623.314	0	5.623.314
108	Kab. Muara Enim	2.022.325	0	2.022.325
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.389.677	0	1.389.677
110	Kab. Ogan Komering Ulu	3.695.510	0	3.695.510

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
101	Kab. Tebo	15.253.562	0	15.253.562	28.284.768
102	Kota Jambi	5.841.243	0	5.841.243	10.027.840
103	Kota Sungai Penuh	5.962.936	0	5.962.936	10.236.754
104	Provinsi Sumatera Selatan	75.609.515	0	75.609.515	90.669.592
105	Kab. Lahat	9.166.640	0	9.166.640	10.696.912
106	Kab. Musi Banyuasin	230.353.545	0	230.353.545	270.677.378
107	Kab. Musi Rawas	33.565.020	0	33.565.020	39.188.334
108	Kab. Muara Enim	13.717.585	0	13.717.585	15.739.910
109	Kab. Ogan Komering Ilir	6.943.732	0	6.943.732	8.333.409
110	Kab. Ogan Komering Ulu	8.288.802	0	8.288.802	11.984.312

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
111	Kota Palembang	5.086.285	0	5.086.285
112	Kota Prabumulih	1.491.528	0	1.491.528
113	Kota Pagar Alam	1.427.065	0	1.427.065
114	Kota Lubuk Linggau	1.470.482	0	1.470.482
115	Kab. Banyuasin	9.576.356	0	9.576.356
116	Kab. Ogan Ilir	1.671.847	0	1.671.847
117	Kab. OKU Timur	1.656.814	0	1.656.814
118	Kab. OKU Selatan	1.665.239	0	1.665.239
119	Kab. Empat Lawang	1.446.917	0	1.446.917
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.222.255	0	5.222.255

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
111	Kota Palembang	7.187.786	0	7.187.786	12.274.071
112	Kota Prabumulih	10.851.516	0	10.851.516	12.343.014
113	Kota Pagar Alam	7.448.002	0	7.448.002	8.875.067
114	Kota Lubuk Linggau	7.658.557	0	7.658.557	9.129.039
115	Kab. Banyuasin	35.205.913	0	35.205.913	44.782.269
116	Kab. Ogan Ilir	11.124.113	0	11.124.113	12.795.960
117	Kab. OKU Timur	7.069.562	0	7.069.562	8.726.376
118	Kab. OKU Selatan	7.313.617	0	7.313.617	8.978.856
119	Kab. Empat Lawang	7.610.475	0	7.610.475	9.057.392
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	23.287.436	0	23.287.436	28.509.691

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
121	Kab. Musi Rawas Utara	7.550.386	0	7.550.386
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	6.447	0	6.447
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0
125	Kab. Rejang Lebong	58.599	0	58.599
126	Kota Bengkulu	0	0	0
127	Kab. Kaur	8.603	0	8.603
128	Kab. Seluma	6.313	0	6.313
129	Kab. Mukomuko	0	0	0
130	Kab. Lebong	380.956	0	380.956

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
121	Kab. Musi Rawas Utara	22.508.494	0	22.508.494	30.058.880
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	108.217	0	108.217	114.664
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	0
125	Kab. Rejang Lebong	570.164	0	570.164	628.763
126	Kota Bengkulu	0	0	0	0
127	Kab. Kaur	249.140	0	249.140	257.743
128	Kab. Seluma	105.962	0	105.962	112.275
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	0
130	Kab. Lebong	570.164	0	570.164	951.120

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
131	Kab. Kepahiang	0	0	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0
133	Provinsi Lampung	11.717.901	0	11.717.901
134	Kab. Lampung Barat	1.641.891	0	1.641.891
135	Kab. Lampung Selatan	2.675.828	0	2.675.828
136	Kab. Lampung Tengah	2.675.828	0	2.675.828
137	Kab. Lampung Utara	1.608.383	0	1.608.383
138	Kab. Lampung Timur	10.774.483	0	10.774.483
139	Kab. Tanggamus	1.641.891	0	1.641.891
140	Kab. Tulang Bawang	2.675.828	0	2.675.828

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
131	Kab. Kepahiang	0	0	0	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0
133	Provinsi Lampung	487.875	0	487.875	12.205.776
134	Kab. Lampung Barat	66.677	0	66.677	1.708.568
135	Kab. Lampung Selatan	65.316	0	65.316	2.741.144
136	Kab. Lampung Tengah	65.316	0	65.316	2.741.144
137	Kab. Lampung Utara	65.316	0	65.316	1.673.699
138	Kab. Lampung Timur	66.677	0	66.677	10.841.160
139	Kab. Tanggamus	66.677	0	66.677	1.708.568
140	Kab. Tulang Bawang	65.316	0	65.316	2.741.144

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
141	Kab. Way Kanan	1.641.891	0	1.641.891
142	Kota Bandar Lampung	1.608.383	0	1.608.383
143	Kota Metro	2.675.828	0	2.675.828
144	Kab. Pesawaran	1.608.383	0	1.608.383
145	Kab. Pringsewu	1.608.383	0	1.608.383
146	Kab. Mesuji	1.608.383	0	1.608.383
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.608.383	0	1.608.383
148	Kab. Pesisir Barat	1.641.891	0	1.641.891
149	Provinsi DKI Jakarta	16.739.159	0	16.739.159
150	Provinsi Jawa Barat	9.582.036	0	9.582.036

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
141	Kab. Way Kanan	66.677	0	66.677	1.708.568
142	Kota Bandar Lampung	65.316	0	65.316	1.673.699
143	Kota Metro	65.316	0	65.316	2.741.144
144	Kab. Pesawaran	65.316	0	65.316	1.673.699
145	Kab. Pringsewu	65.316	0	65.316	1.673.699
146	Kab. Mesuji	65.316	0	65.316	1.673.699
147	Kab. Tulang Bawang Barat	65.316	0	65.316	1.673.699
148	Kab. Pesisir Barat	66.677	0	66.677	1.708.568
149	Provinsi DKI Jakarta	2.295.139	0	2.295.139	19.034.298
150	Provinsi Jawa Barat	7.525.340	0	7.525.340	17.107.376

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
151	Kab. Bandung	673.360	0	673.360
152	Kab. Bekasi	686.335	0	686.335
153	Kab. Bogor	700.937	0	700.937
154	Kab. Ciamis	687.388	0	687.388
155	Kab. Cianjur	673.360	0	673.360
156	Kab. Cirebon	673.360	0	673.360
157	Kab. Garut	673.360	0	673.360
158	Kab. Indramayu	2.611.829	0	2.611.829
159	Kab. Karawang	908.117	0	908.117
160	Kab. Kuningan	687.388	0	687.388

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
151	Kab. Bandung	682.090	0	682.090	1.355.450
152	Kab. Bekasi	2.120.518	0	2.120.518	2.806.853
153	Kab. Bogor	835.094	0	835.094	1.536.031
154	Kab. Ciamis	534.944	0	534.944	1.222.332
155	Kab. Cianjur	520.760	0	520.760	1.194.120
156	Kab. Cirebon	593.867	0	593.867	1.267.227
157	Kab. Garut	520.760	0	520.760	1.194.120
158	Kab. Indramayu	1.702.793	0	1.702.793	4.314.622
159	Kab. Karawang	2.029.710	0	2.029.710	2.937.827
160	Kab. Kuningan	534.944	0	534.944	1.222.332

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
161	Kab. Majalengka	673.360	0	673.360
162	Kab. Purwakarta	700.937	0	700.937
163	Kab. Subang	700.937	0	700.937
164	Kab. Sukabumi	673.360	0	673.360
165	Kab. Sumedang	673.360	0	673.360
166	Kab. Tasikmalaya	659.332	0	659.332
167	Kota Bandung	673.360	0	673.360
168	Kota Bekasi	673.360	0	673.360
169	Kota Bogor	673.360	0	673.360
170	Kota Cirebon	673.360	0	673.360

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
161	Kab. Majalengka	633.949	0	633.949	1.307.309
162	Kab. Purwakarta	819.525	0	819.525	1.520.462
163	Kab. Subang	2.868.762	0	2.868.762	3.569.699
164	Kab. Sukabumi	520.760	0	520.760	1.194.120
165	Kab. Sumedang	755.198	0	755.198	1.428.558
166	Kab. Tasikmalaya	513.109	0	513.109	1.172.441
167	Kota Bandung	520.760	0	520.760	1.194.120
168	Kota Bekasi	951.540	0	951.540	1.624.900
169	Kota Bogor	520.760	0	520.760	1.194.120
170	Kota Cirebon	520.760	0	520.760	1.194.120

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
171	Kota Depok	673.360	0	673.360
172	Kota Sukabumi	673.360	0	673.360
173	Kota Tasikmalaya	673.360	0	673.360
174	Kota Cimahi	659.332	0	659.332
175	Kota Banjar	673.360	0	673.360
176	Kab. Bandung Barat	673.360	0	673.360
177	Kab. Pangandaran	673.360	0	673.360
178	Provinsi Jawa Tengah	104.739	0	104.739
179	Kab. Banjarnegara	4.622	0	4.622
180	Kab. Banyumas	4.622	0	4.622

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
171	Kota Depok	565.817	0	565.817	1.239.177
172	Kota Sukabumi	520.760	0	520.760	1.194.120
173	Kota Tasikmalaya	520.760	0	520.760	1.194.120
174	Kota Cimahi	509.910	0	509.910	1.169.242
175	Kota Banjar	520.760	0	520.760	1.194.120
176	Kab. Bandung Barat	682.090	0	682.090	1.355.450
177	Kab. Pangandaran	520.760	0	520.760	1.194.120
178	Provinsi Jawa Tengah	771.026	0	771.026	875.765
179	Kab. Banjarnegara	39.089	0	39.089	43.711
180	Kab. Banyumas	39.089	0	39.089	43.711

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
181	Kab. Batang	4.622	0	4.622
182	Kab. Blora	59.755.897	0	59.755.897
183	Kab. Boyolali	6.694	0	6.694
184	Kab. Brebes	4.718	0	4.718
185	Kab. Cilacap	56.991	0	56.991
186	Kab. Demak	6.694	0	6.694
187	Kab. Grobogan	63.468	0	63.468
188	Kab. Jepara	4.622	0	4.622
189	Kab. Karanganyar	4.718	0	4.718
190	Kab. Kebumen	4.622	0	4.622

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
181	Kab. Batang	39.089	0	39.089	43.711
182	Kab. Blora	3.678.533	0	3.678.533	63.434.430
183	Kab. Boyolali	50.816	0	50.816	57.510
184	Kab. Brebes	39.904	0	39.904	44.622
185	Kab. Cilacap	39.089	0	39.089	96.080
186	Kab. Demak	50.816	0	50.816	57.510
187	Kab. Grobogan	424.532	0	424.532	488.000
188	Kab. Jepara	39.089	0	39.089	43.711
189	Kab. Karanganyar	39.904	0	39.904	44.622
190	Kab. Kebumen	39.089	0	39.089	43.711

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
191	Kab. Kendal	4.622	0	4.622
192	Kab. Klaten	4.622	0	4.622
193	Kab. Kudus	6.694	0	6.694
194	Kab. Magelang	4.622	0	4.622
195	Kab. Pati	30.116	0	30.116
196	Kab. Pekalongan	4.622	0	4.622
197	Kab. Pemalang	4.622	0	4.622
198	Kab. Purbalingga	4.622	0	4.622
199	Kab. Purworejo	4.622	0	4.622
200	Kab. Rembang	302.343	0	302.343

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
191	Kab. Kendal	39.089	0	39.089	43.711
192	Kab. Klaten	39.089	0	39.089	43.711
193	Kab. Kudus	50.816	0	50.816	57.510
194	Kab. Magelang	39.089	0	39.089	43.711
195	Kab. Pati	227.937	0	227.937	258.053
196	Kab. Pekalongan	39.089	0	39.089	43.711
197	Kab. Pemalang	39.089	0	39.089	43.711
198	Kab. Purbalingga	39.089	0	39.089	43.711
199	Kab. Purworejo	39.089	0	39.089	43.711
200	Kab. Rembang	218.180	0	218.180	520.523

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
201	Kab. Semarang	6.694	0	6.694
202	Kab. Sragen	6.694	0	6.694
203	Kab. Sukoharjo	4.622	0	4.622
204	Kab. Tegal	4.622	0	4.622
205	Kab. Temanggung	4.622	0	4.622
206	Kab. Wonogiri	4.622	0	4.622
207	Kab. Wonosobo	4.718	0	4.718
208	Kota Magelang	4.622	0	4.622
209	Kota Pekalongan	4.622	0	4.622
210	Kota Salatiga	4.622	0	4.622

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
201	Kab. Semarang	50.816	0	50.816	57.510
202	Kab. Sragen	50.816	0	50.816	57.510
203	Kab. Sukoharjo	39.089	0	39.089	43.711
204	Kab. Tegal	39.089	0	39.089	43.711
205	Kab. Temanggung	39.089	0	39.089	43.711
206	Kab. Wonogiri	39.089	0	39.089	43.711
207	Kab. Wonosobo	39.904	0	39.904	44.622
208	Kota Magelang	39.089	0	39.089	43.711
209	Kota Pekalongan	39.089	0	39.089	43.711
210	Kota Salatiga	39.089	0	39.089	43.711

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
211	Kota Semarang	4.622	0	4.622
212	Kota Surakarta	4.622	0	4.622
213	Kota Tegal	4.622	0	4.622
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	283.110.654	0	283.110.654

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
211	Kota Semarang	39.089	0	39.089	43.711
212	Kota Surakarta	39.089	0	39.089	43.711
213	Kota Tegal	39.089	0	39.089	43.711
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	0	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	50.441.068	0	50.441.068	333.561.722

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
221	Kab. Bangkalan	11.462.493	0	11.462.493
222	Kab. Banyuwangi	11.528.582	0	11.528.582
223	Kab. Blitar	11.293.305	0	11.293.305
224	Kab. Bojonegoro	919.650.510	0	919.650.510
225	Kab. Bondowoso	11.293.305	0	11.293.305
226	Kab. Gresik	13.853.798	0	13.853.798
227	Kab. Jember	11.293.305	0	11.293.305
228	Kab. Jombang	69.248.347	0	69.248.347
229	Kab. Kediri	11.528.582	0	11.528.582
230	Kab. Lamongan	69.821.820	0	69.821.820

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
221	Kab. Bangkalan	2.478.024	0	2.478.024	13.940.517
222	Kab. Banyuwangi	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
223	Kab. Blitar	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
224	Kab. Bojonegoro	21.378.412	0	21.378.412	941.028.922
225	Kab. Bondowoso	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
226	Kab. Gresik	9.537.597	0	9.537.597	23.391.395
227	Kab. Jember	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
228	Kab. Jombang	3.645.563	0	3.645.563	72.893.910
229	Kab. Kediri	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
230	Kab. Lamongan	3.840.340	0	3.840.340	73.662.160

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
231	Kab. Lumajang	11.293.305	0	11.293.305
232	Kab. Madiun	70.691.022	0	70.691.022
233	Kab. Magetan	11.293.305	0	11.293.305
234	Kab. Malang	11.528.582	0	11.528.582
235	Kab. Mojokerto	11.592.478	0	11.592.478
236	Kab. Nganjuk	69.248.347	0	69.248.347
237	Kab. Ngawi	69.273.841	0	69.273.841
238	Kab. Pacitan	11.293.305	0	11.293.305
239	Kab. Pamekasan	11.293.305	0	11.293.305
240	Kab. Pasuruan	11.293.305	0	11.293.305

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
231	Kab. Lumajang	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
232	Kab. Madiun	3.721.512	0	3.721.512	74.412.534
233	Kab. Magetan	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
234	Kab. Malang	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
235	Kab. Mojokerto	2.693.565	0	2.693.565	14.286.043
236	Kab. Nganjuk	3.645.563	0	3.645.563	72.893.910
237	Kab. Ngawi	3.834.410	0	3.834.410	73.108.251
238	Kab. Pacitan	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
239	Kab. Pamekasan	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
240	Kab. Pasuruan	2.500.757	0	2.500.757	13.794.062

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
241	Kab. Ponorogo	11.528.582	0	11.528.582
242	Kab. Probolinggo	11.293.305	0	11.293.305
243	Kab. Sampang	11.372.379	0	11.372.379
244	Kab. Sidoarjo	11.592.478	0	11.592.478
245	Kab. Situbondo	11.293.305	0	11.293.305
246	Kab. Sumenep	11.293.305	0	11.293.305
247	Kab. Trenggalek	11.528.582	0	11.528.582
248	Kab. Tuban	187.426.847	0	187.426.847
249	Kab. Tulungagung	11.293.305	0	11.293.305
250	Kota Blitar	11.293.305	0	11.293.305

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
241	Kab. Ponorogo	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
242	Kab. Probolinggo	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
243	Kab. Sampang	2.473.597	0	2.473.597	13.845.976
244	Kab. Sidoarjo	2.936.469	0	2.936.469	14.528.947
245	Kab. Situbondo	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
246	Kab. Sumenep	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
247	Kab. Trenggalek	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
248	Kab. Tuban	4.372.437	0	4.372.437	191.799.284
249	Kab. Tulungagung	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
250	Kota Blitar	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
251	Kota Kediri	11.293.305	0	11.293.305
252	Kota Madiun	11.293.305	0	11.293.305
253	Kota Malang	11.293.305	0	11.293.305
254	Kota Mojokerto	11.293.305	0	11.293.305
255	Kota Pasuruan	11.293.305	0	11.293.305
256	Kota Probolinggo	11.293.305	0	11.293.305
257	Kota Surabaya	11.592.478	0	11.592.478
258	Kota Batu	11.528.582	0	11.528.582
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
251	Kota Kediri	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
252	Kota Madiun	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
253	Kota Malang	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
254	Kota Mojokerto	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
255	Kota Pasuruan	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
256	Kota Probolinggo	2.469.978	0	2.469.978	13.763.283
257	Kota Surabaya	2.693.565	0	2.693.565	14.286.043
258	Kota Batu	2.521.436	0	2.521.436	14.050.018
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
261	Kab. Landak	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0
263	Kab. Ketapang	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0
265	Kab. Sambas	0	0	0
266	Kab. Sanggau	0	0	0
267	Kab. Sintang	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
261	Kab. Landak	0	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0	0
265	Kab. Sambas	0	0	0	0
266	Kab. Sanggau	0	0	0	0
267	Kab. Sintang	0	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
271	Kab. Melawi	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	27.459	0	27.459
277	Kab. Kapuas	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
271	Kab. Melawi	0	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	27.459
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
281	Kab. Katingan	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0
283	Kab. Sukamara	0	0	0
284	Kab. Lamandau	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0
287	Kab. Murung Raya	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
281	Kab. Katingan	0	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0	0
283	Kab. Sukamara	0	0	0	0
284	Kab. Lamandau	0	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0
295	Kab. Kotabaru	27.459	0	27.459
296	Kab. Tabalong	27.459	0	27.459
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0
298	Kab. Tapin	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	27.459
296	Kab. Tabalong	0	0	0	27.459
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	0
298	Kab. Tapin	0	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
301	Kab. Balangan	27.459	0	27.459
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	27.165.694	0	27.165.694
304	Kab. Berau	4.837.691	0	4.837.691
305	Kab. Kutai Kartanegara	46.040.181	0	46.040.181
306	Kab. Kutai Barat	7.484.808	0	7.484.808
307	Kab. Kutai Timur	7.401.617	0	7.401.617
308	Kab. Paser	5.306.937	0	5.306.937
309	Kota Balikpapan	16.705.500	0	16.705.500
310	Kota Bontang	7.478.739	0	7.478.739

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
301	Kab. Bulungan	0	0	0	27.459
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	21.683.787	0	21.683.787	48.849.481
304	Kab. Berau	4.336.191	0	4.336.191	9.173.882
305	Kab. Kutai Kartanegara	29.188.631	0	29.188.631	75.228.812
306	Kab. Kutai Barat	5.849.520	0	5.849.520	13.334.328
307	Kab. Kutai Timur	5.737.770	0	5.737.770	13.139.387
308	Kab. Paser	4.434.417	0	4.434.417	9.741.354
309	Kota Balikpapan	5.730.142	0	5.730.142	22.435.642
310	Kota Bontang	5.632.967	0	5.632.967	13.111.706

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
311	Kota Samarinda	7.309.842	0	7.309.842
312	Kab. Penajam Paser Utara	8.428.051	0	8.428.051
313	Kab. Mahakam Ulu	7.326.747	0	7.326.747
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0
316	Kab. Minahasa	0	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	0
318	Kota Bitung	0	0	0
319	Kota Manado	0	0	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
311	Kota Samarinda	6.355.334	0	6.355.334	13.665.176
312	Kab. Penajam Paser Utara	6.722.783	0	6.722.783	15.150.834
313	Kab. Mahakam Ulu	5.733.941	0	5.733.941	13.060.688
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	0
316	Kab. Minahasa	0	0	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	0	0
318	Kota Bitung	0	0	0	0
319	Kota Manado	0	0	0	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
321	Kab. Minahasa Selatan	0	0	0
322	Kota Tomohon	0	0	0
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0	0
325	Kota Kotamobagu	0	0	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	5.106.681	0	5.106.681

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
321	Kab. Minahasa Selatan	0	0	0	0
322	Kota Tomohon	0	0	0	0
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0	0	0
325	Kota Kotamobagu	0	0	0	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	25.214.697	0	25.214.697	30.321.378

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
331	Kab. Banggai	16.793.124	0	16.793.124
332	Kab. Banggai Kepulauan	834.747	0	834.747
333	Kab. Buol	834.747	0	834.747
334	Kab. Toli-Toli	834.747	0	834.747
335	Kab. Donggala	834.747	0	834.747
336	Kab. Morowali	834.747	0	834.747
337	Kab. Poso	834.747	0	834.747
338	Kota Palu	834.747	0	834.747
339	Kab. Parigi Moutong	834.747	0	834.747
340	Kab. Tojo Una Una	4.664.757	0	4.664.757

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
331	Kab. Banggai	91.403.277	0	91.403.277	108.196.401
332	Kab. Banggai Kepulauan	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
333	Kab. Buol	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
334	Kab. Toli-Toli	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
335	Kab. Donggala	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
336	Kab. Morowali	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
337	Kab. Poso	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
338	Kota Palu	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
339	Kab. Parigi Moutong	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
340	Kab. Tojo Una Una	22.062.860	0	22.062.860	26.727.617

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3-4
341	Kab. Sigi	834.747	0	834.747
342	Kab. Banggai Laut	834.747	0	834.747
343	Kab. Morowali Utara	4.664.757	0	4.664.757
344	Provinsi Sulawesi Selatan	77	0	77
345	Kab. Bantaeng	8	0	8
346	Kab. Barru	8	0	8
347	Kab. Bone	35	0	35
348	Kab. Bulukumba	8	0	8
349	Kab. Enrekang	8	0	8
350	Kab. Gowa	8	0	8

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
341	Kab. Sigi	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
342	Kab. Banggai Laut	3.151.838	0	3.151.838	3.986.585
343	Kab. Morowali Utara	22.062.860	0	22.062.860	26.727.617
344	Provinsi Sulawesi Selatan	4.496.152	0	4.496.152	4.496.229
345	Kab. Bantaeng	340.063	0	340.063	340.071
346	Kab. Barru	340.063	0	340.063	340.071
347	Kab. Bone	1.984.770	0	1.984.770	1.984.805
348	Kab. Bulukumba	333.123	0	333.123	333.131
349	Kab. Enrekang	340.063	0	340.063	340.071
350	Kab. Gowa	333.123	0	333.123	333.131

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
351	Kab. Jeneponto	8	0	8
352	Kab. Luwu	35	0	35
353	Kab. Luwu Utara	8	0	8
354	Kab. Maros	8	0	8
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	8	0	8
356	Kota Palopo	8	0	8
357	Kab. Luwu Timur	8	0	8
358	Kab. Pinrang	8	0	8
359	Kab. Sinjai	8	0	8
360	Kab. Kepulauan Selayar	8	0	8

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
351	Kab. Jeneponto	333.123	0	333.123	333.131
352	Kab. Luwu	1.943.421	0	1.943.421	1.943.456
353	Kab. Luwu Utara	340.063	0	340.063	340.071
354	Kab. Maros	340.063	0	340.063	340.071
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	340.063	0	340.063	340.071
356	Kota Palopo	333.123	0	333.123	333.131
357	Kab. Luwu Timur	340.063	0	340.063	340.071
358	Kab. Pinrang	333.123	0	333.123	333.131
359	Kab. Sinjai	340.063	0	340.063	340.071
360	Kab. Kepulauan Selayar	333.123	0	333.123	333.131

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
361	Kab. Sidenreng Rappang	35	0	35
362	Kab. Soppeng	35	0	35
363	Kab. Takalar	8	0	8
364	Kab. Tana Toraja	8	0	8
365	Kab. Wajo	245	0	245
366	Kota Pare-pare	8	0	8
367	Kota Makassar	8	0	8
368	Kab. Toraja Utara	8	0	8
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0
370	Kab. Buton	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
361	Kab. Sidenreng Rappang	1.984.770	0	1.984.770	1.984.805
362	Kab. Soppeng	1.984.770	0	1.984.770	1.984.805
363	Kab. Takalar	333.123	0	333.123	333.131
364	Kab. Tana Toraja	340.063	0	340.063	340.071
365	Kab. Wajo	14.910.706	0	14.910.706	14.910.951
366	Kota Pare pare	333.123	0	333.123	333.131
367	Kota Makassar	333.123	0	333.123	333.131
368	Kab. Toraja Utara	340.063	0	340.063	340.071
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
370	Kab. Buton	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
371	Kab. Konawe	0	0	0
372	Kab. Kolaka	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0
375	Kota Bau-bau	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0
377	Kab. Bombana	0	0	0
378	Kab. Wakatobi	0	0	0
379	Kab. Kolaka Utara	0	0	0
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
371	Kab. Konawe	0	0	0	0
372	Kab. Kolaka	0	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0
375	Kota Bau-bau	0	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	0
377	Kab. Bombana	0	0	0	0
378	Kab. Wakatobi	0	0	0	0
379	Kab. Kolaka Utara	0	0	0	0
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0	0

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
381	Kab. Buton Utara	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0
387	Provinsi Bali	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0	0
387	Provinsi Bali	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
391	Kab. Gianyar	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0
393	Kab. Karangasem	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0
398	Kab. Bima	0	0	0
399	Kab. Dompu	0	0	0
400	Kab. Lombok Barat	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0	0
393	Kab. Karangasem	0	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
398	Kab. Bima	0	0	0	0
399	Kab. Dompu	0	0	0	0
400	Kab. Lombok Barat	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3-4
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0
402	Kab. Lombok Timur	0	0	0
403	Kab. Sumbawa	0	0	0
404	Kota Mataram	0	0	0
405	Kota Bima	0	0	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0
407	Kab. Lombok Utara	0	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0
409	Kab. Alor	0	0	0
410	Kab. Belu	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0
402	Kab. Lombok Timur	0	0	0	0
403	Kab. Sumbawa	0	0	0	0
404	Kota Mataram	0	0	0	0
405	Kota Bima	0	0	0	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0
407	Kab. Lombok Utara	0	0	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
409	Kab. Alor	0	0	0	0
410	Kab. Belu	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
411	Kab. Ende	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	0	0	0
413	Kab. Kupang	0	0	0
414	Kab. Lembata	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0
417	Kab. Sikka	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0
419	Kab. Sumba Timur	0	0	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
411	Kab. Ende	0	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	0	0	0	0
413	Kab. Kupang	0	0	0	0
414	Kab. Lembata	0	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0	0
417	Kab. Sikka	0	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	0
419	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0
422	Kota Kupang	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0
425	Kab. Nagekeo	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0
430	Kab. Malaka	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	0
422	Kota Kupang	0	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0	0
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0
425	Kab. Nagekeo	0	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	0
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	0
430	Kab. Malaka	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
431	Provinsi Maluku	359.566	0	359.566
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	70.280	0	70.280
433	Kab. Maluku Tengah	609.628	0	609.628
434	Kab. Maluku Tenggara	70.280	0	70.280
435	Kab. Buru	70.280	0	70.280
436	Kota Ambon	70.280	0	70.280
437	Kab. Seram Bagian Barat	70.280	0	70.280
438	Kab. Seram Bagian Timur	1.184.932	0	1.184.932
439	Kab. Kepulauan Aru	68.846	0	68.846
440	Kota Tual	70.280	0	70.280

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
431	Provinsi Maluku	0	0	0	359.566
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	70.280
433	Kab. Maluku Tengah	0	0	0	609.628
434	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	70.280
435	Kab. Buru	0	0	0	70.280
436	Kota Ambon	0	0	0	70.280
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	0	70.280
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	1.184.932
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	68.846
440	Kota Tual	0	0	0	70.280

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
441	Kab. Maluku Barat Daya	70.280	0	70.280
442	Kab. Buru Selatan	70.280	0	70.280
443	Provinsi Papua	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0
448	Kab. Sarmi	0	0	0
449	Kab. Keerom	0	0	0
450	Kab. Waropen	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	70.280
442	Kab. Buru Selatan	0	0	0	70.280
443	Provinsi Papua	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0	0
448	Kab. Sarmi	0	0	0	0
449	Kab. Keerom	0	0	0	0
450	Kab. Waropen	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
451	Kab. Supiori	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0
455	Kota Ternate	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	0	0	0
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
451	Kab. Supiori	0	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	0
455	Kota Ternate	0	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	0	0	0	0
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0
464	Provinsi Banten	0	0	0
465	Kab. Lebak	0	0	0
466	Kab. Pandeglang	0	0	0
467	Kab. Serang	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0
470	Kota Tangerang	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	0
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	0
464	Provinsi Banten	0	0	0	0
465	Kab. Lebak	0	0	0	0
466	Kab. Pandeglang	0	0	0	0
467	Kab. Serang	0	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0	0
470	Kota Tangerang	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
471	Kota Serang	0	0	0
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0
473	Provinsi Bangka Belitung	622.067	0	622.067
474	Kab. Bangka	182.813	0	182.813
475	Kab. Belitung	182.813	0	182.813
476	Kota Pangkal Pinang	182.813	0	182.813
477	Kab. Bangka Selatan	182.813	0	182.813
478	Kab. Bangka Tengah	182.813	0	182.813
479	Kab. Bangka Barat	186.621	0	186.621
480	Kab. Belitung Timur	182.813	0	182.813

V 5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
471	Kota Serang	0	0	0	0
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	622.067
474	Kab. Bangka	0	0	0	182.813
475	Kab. Belitung	0	0	0	182.813
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	182.813
477	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	182.813
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	182.813
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	186.621
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	182.813

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	0	0	0
484	Kota Gorontalo	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	4.072.910	0	4.072.910
489	Kab. Natuna	11.067.097	0	11.067.097
490	Kab. Kepulauan Anambas	6.556.195	0	6.556.195

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	0	0	0	0
484	Kota Gorontalo	0	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	18.745.064	0	18.745.064	22.817.974
489	Kab. Natuna	36.702.343	0	36.702.343	47.769.440
490	Kab. Kepulauan Anambas	22.262.164	0	22.262.164	28.818.359

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
491	Kab. Karimun	1.293.475	0	1.293.475
492	Kota Batam	1.267.078	0	1.267.078
493	Kota Tanjung Pinang	1.267.078	0	1.267.078
494	Kab. Lingga	1.293.475	0	1.293.475
495	Kab. Bintan	1.267.078	0	1.267.078
496	Provinsi Papua Barat	5.339.497	251.632.217	256.971.714
497	Kab. Fak Fak	2.603.006	0	2.603.006
498	Kab. Manokwari	1.601.850	0	1.601.850
499	Kab. Teluk Bintuni	18.421.262	0	18.421.262
500	Kab. Teluk Wondama	2.603.006	0	2.603.006

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
491	Kab. Karimun	5.415.289	0	5.415.289	6.708.764
492	Kota Batam	5.304.773	0	5.304.773	6.571.851
493	Kota Tanjung Pinang	5.304.773	0	5.304.773	6.571.851
494	Kab. Lingga	5.415.289	0	5.415.289	6.708.764
495	Kab. Bintan	5.304.773	0	5.304.773	6.571.851
496	Provinsi Papua Barat	134.483.654	2.296.709.508	2.431.193.162	2.688.164.876
497	Kab. Fak Fak	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696
498	Kab. Manokwari	36.983.006	0	36.983.006	38.584.856
499	Kab. Teluk Bintuni	467.330.693	0	467.330.693	485.751.955
500	Kab. Teluk Wondama	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
501	Kab. Kaimana	2.603.006	0	2.603.006
502	Kab. Manokwari Selatan	2.603.006	0	2.603.006
503	Kab. Pegunungan Arfak	2.603.006	0	2.603.006
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0
505	Kab. Majene	0	0	0
506	Kab. Mamuju	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	0	0
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
501	Kab. Kaimana	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696
502	Kab. Manokwari Selatan	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696
503	Kab. Pegunungan Arfak	62.198.690	0	62.198.690	64.801.696
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0
505	Kab. Majene	0	0	0	0
506	Kab. Mamuju	0	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	0	0	0
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3-4
511	Provinsi Kalimantan Utara	506.479	0	506.479
512	Kab. Bulungan	240.578	0	240.578
513	Kab. Malinau	2.729.635	0	2.729.635
514	Kab. Nunukan	240.578	0	240.578
515	Kota Tarakan	2.406.291	0	2.406.291
516	Kab. Tana Tidung	240.578	0	240.578
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
511	Provinsi Kalimantan Utara	158.293	0	158.293	664.772
512	Kab. Bulungan	163.546	0	163.546	404.124
513	Kab. Malinau	1.497.173	0	1.497.173	4.226.808
514	Kab. Nunukan	80.580	0	80.580	321.158
515	Kota Tarakan	571.245	0	571.245	2.977.536
516	Kab. Tana Tidung	121.996	0	121.996	362.574
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
521	Kab. Asmat	0	0	0
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0
525	Kab. Pantai	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0
527	Kab. Dogiyai	0	0	0
528	Kab. Puncak	0	0	0
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
521	Kab. Asmat	0	0	0	0
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	0
528	Kab. Puncak	0	0	0	0
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0
535	Kab. Tolikara	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	2.273.926	107.162.306	109.436.232

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	0
535	Kab. Tolikara	0	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	0	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	514.203	8.781.529	9.295.732	118.731.964

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	MINYAK BUMI		
		MINYAK BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3+4
541	Kab. Sorong	8.527.219	0	8.527.219
542	Kab. Sorong Selatan	2.365.511	0	2.365.511
543	Kab. Raja Ampat	1.364.356	0	1.364.356
544	Kab. Tambrauw	2.365.511	0	2.365.511
545	Kab. Maybrat	2.365.511	0	2.365.511
546	Kota Sorong	1.364.356	0	1.364.356
547	Selisih Lebih	122.065.744	0	122.065.744
JUMLAH NASIONAL		4.117.091.305	377.610.377	4.494.701.682

V.5 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	GAS BUMI			JUMLAH
		GAS BUMI	TAMBAHAN OTONOMI KHUSUS	SUB JUMLAH	
1	2	6	7	8 = 6+7	9 = 5+8
541	Kab. Sorong	1.756.857	0	1.756.857	10.284.076
542	Kab. Sorong Selatan	25.545.632	0	25.545.632	27.911.143
543	Kab. Raja Ampat	329.947	0	329.947	1.694.303
544	Kab. Tambrauw	25.545.632	0	25.545.632	27.911.143
545	Kab. Maybrat	25.545.632	0	25.545.632	27.911.143
546	Kota Sorong	329.947	0	329.947	1.694.303
547	Selisih Lebih	66.769.808	0	66.769.808	188.835.552
JUMLAH NASIONAL		2.643.063.300	2.326.358.614	4.969.421.914	9.464.123.596

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1	Provinsi Aceh	644.657	24.791.339	25.435.996
2	Kab. Aceh Barat	373.211	38.751.469	39.124.680
3	Kab. Aceh Besar	24.245	1.384.103	1.408.348
4	Kab. Aceh Selatan	15.387	1.862.389	1.877.776
5	Kab. Aceh Singkil	17	1.400.374	1.400.391
6	Kab. Aceh Tengah	258.002	5.813.362	6.071.364
7	Kab. Aceh Tenggara	17	1.400.374	1.400.391
8	Kab. Aceh Timur	38	1.384.103	1.384.141
9	Kab. Aceh Utara	25	1.355.856	1.355.881
10	Kab. Bireuen	117	1.384.103	1.384.220

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
11	Kab. Pidie	19.280	4.856.811	4.876.091
12	Kab. Simeulue	0	1.384.103	1.384.103
13	Kota Banda Aceh	0	1.355.856	1.355.856
14	Kota Sabang	0	1.384.103	1.384.103
15	Kota Langsa	23	1.355.856	1.355.879
16	Kota Lhokseumawe	0	1.355.856	1.355.856
17	Kab. Gayo Lues	161.844	2.621.961	2.783.805
18	Kab. Aceh Barat Daya	17.335	4.441.074	4.458.409
19	Kab. Aceh Jaya	106.867	4.856.811	4.963.678
20	Kab. Nagan Raya	89.971	15.151.149	15.241.120

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
21	Kab. Aceh Tamiang	5.763	1.384.103	1.389.866
22	Kab. Bener Meriah	71	1.327.609	1.327.680
23	Kab. Pidie Jaya	91	1.384.103	1.384.194
24	Kota Subulussalam	2.138	1.400.374	1.402.512
25	Provinsi Sumatera Utara	1.635.687	56.601.127	58.236.814
26	Kab. Asahan	0	2.139.607	2.139.607
27	Kab. Dairi	186.403	2.184.182	2.370.585
28	Kab. Deli Serdang	75	2.139.607	2.139.682
29	Kab. Karo	50	2.184.182	2.184.232
30	Kab. Labuhanbatu	0	2.139.607	2.139.607

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
31	Kab. Langkat	604	2.184.182	2.184.786
32	Kab. Mandailing Natal	1.529.037	8.492.996	10.022.033
33	Kab. Nias	0	2.184.182	2.184.182
34	Kab. Simalungun	119	2.139.607	2.139.726
35	Kab. Tapanuli Selatan	723.331	114.059.845	114.783.176
36	Kab. Tapanuli Tengah	169.631	8.248.589	8.418.220
37	Kab. Tapanuli Utara	90.413	8.248.589	8.339.002
38	Kab. Toba	0	2.184.182	2.184.182
39	Kota Binjai	0	2.139.607	2.139.607
40	Kota Medan	0	2.139.607	2.139.607

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
41	Kota Pematang Siantar	0	2.139.607	2.139.607
42	Kota Sibolga	0	2.095.032	2.095.032
43	Kota Tanjung Balai	0	2.139.607	2.139.607
44	Kota Tebing Tinggi	0	2.139.607	2.139.607
45	Kota Padang Sidempuan	0	8.080.250	8.080.250
46	Kab. Pakpak Bharat	25.643	2.184.182	2.209.825
47	Kab. Nias Selatan	0	2.184.182	2.184.182
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	2.184.182	2.184.182
49	Kab. Serdang Bedagai	0	2.139.607	2.139.607
50	Kab. Samosir	0	2.184.182	2.184.182

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	UKRAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
51	Kab. Batu Bara	55	2.139.607	2.139.662
52	Kab. Padang Lawas	0	8.080.250	8.080.250
53	Kab. Padang Lawas Utara	568	8.248.589	8.249.157
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	17	2.184.182	2.184.199
55	Kab. Labuhanbatu Utara	203	8.080.250	8.080.453
56	Kab. Nias Utara	0	2.139.607	2.139.607
57	Kab. Nias Barat	0	2.139.607	2.139.607
58	Kota Gunungsitoli	0	2.139.607	2.139.607
59	Provinsi Sumatera Barat	259.041	7.475.212	7.734.253
60	Kab. Lima Puluh Kota	5.137	544.096	549.233

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
61	Kab. Agam	51	559.307	559.358
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	481.359	481.359
63	Kab. Padang Pariaman	2.436	471.536	473.972
64	Kab. Pasaman	931	559.307	560.238
65	Kab. Pesisir Selatan	4.151	481.359	485.510
66	Kab. Sijunjung	2.746	2.820.822	2.823.568
67	Kab. Solok	357.188	2.267.638	2.624.826
68	Kab. Tanah Datar	0	2.224.722	2.224.722
69	Kota Bukit Tinggi	0	471.536	471.536
70	Kota Padang Panjang	0	471.536	471.536

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
71	Kota Padang	17.255	481.359	498.614
72	Kota Payakumbuh	0	474.898	474.898
73	Kota Sawahlunto	31.726	14.178.491	14.210.217
74	Kota Solok	0	471.536	471.536
75	Kota Pariaman	0	471.536	471.536
76	Kab. Pasaman Barat	1.605	1.043.326	1.044.931
77	Kab. Dharmasraya	6.843	4.185.509	4.192.352
78	Kab. Solok Selatan	730	481.359	482.089
79	Provinsi Riau	198.408	7.350.257	7.548.665
80	Kab. Bengkalis	0	715.935	715.935

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
81	Kab. Indragiri Hilir	40.681	7.751.497	7.792.178
82	Kab. Indragiri Hulu	218.089	5.587.721	5.805.810
83	Kab. Kampar	0	1.256.814	1.256.814
84	Kab. Kuantan Singingi	18.542	7.963.797	7.982.339
85	Kab. Pelalawan	0	1.919.612	1.919.612
86	Kab. Rokan Hilir	0	715.935	715.935
87	Kab. Rokan Hulu	1.899	885.722	887.621
88	Kab. Siak	329	715.935	716.264
89	Kota Dumai	0	715.935	715.935
90	Kota Pekanbaru	0	715.935	715.935

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	730.851	730.851
92	Provinsi Jambi	781.025	31.119.236	31.900.261
93	Kab. Batang Hari	277.551	22.670.000	22.947.551
94	Kab. Bungo	29.962	23.200.530	23.230.492
95	Kab. Kerinci	0	5.106.686	5.106.686
96	Kab. Merangin	119.846	18.076.663	18.196.509
97	Kab. Muaro Jambi	59.445	13.501.305	13.560.750
98	Kab. Sarolangun	571.826	36.652.375	37.224.201
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.226	6.065.010	6.068.236
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	9.975.912	9.975.912

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
101	Kab. Tebo	225.639	17.987.492	18.213.131
102	Kota Jambi	0	3.164.916	3.164.916
103	Kota Sungai Penuh	0	3.198.367	3.198.367
104	Provinsi Sumatera Selatan	2.871.337	312.085.559	314.956.896
105	Kab. Lahat	219.282	228.095.415	228.314.697
106	Kab. Musi Banyuasin	2.173.792	74.241.873	76.415.665
107	Kab. Musi Rawas	65.943	50.501.775	50.567.718
108	Kab. Muara Enim	868.396	324.753.055	325.621.451
109	Kab. Ogan Komering Ilir	95.612	20.866.392	20.962.004
110	Kab. Ogan Komering Ulu	224.336	32.592.298	32.816.634

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
111	Kota Palembang	0	31.023.115	31.023.115
112	Kota Prabumulih	379	30.791.957	30.792.336
113	Kota Pagar Alam	0	43.917.091	43.917.091
114	Kota Lubuk Linggau	0	20.630.459	20.630.459
115	Kab. Banyuasin	307.713	47.515.586	47.823.299
116	Kab. Ogan Ilir	0	31.288.978	31.288.978
117	Kab. OKU Timur	65.548	20.423.139	20.488.687
118	Kab. OKU Selatan	11.185	30.579.861	30.591.046
119	Kab. Empat Lawang	2.107	32.864.102	32.866.209
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	354.645	34.585.894	34.940.539

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
121	Kab. Musi Rawas Utara	318.964	72.125.908	72.444.872
122	Provinsi Bengkulu	277.706	9.856.409	10.134.115
123	Kab. Bengkulu Selatan	524	19.709.741	19.710.265
124	Kab. Bengkulu Utara	226.570	19.363.040	19.589.610
125	Kab. Rejang Lebong	177	2.678.922	2.679.099
126	Kota Bengkulu	0	1.204.577	1.204.577
127	Kab. Kaur	115	17.570.369	17.570.484
128	Kab. Seluma	210.470	19.327.140	19.537.610
129	Kab. Mukomuko	126	2.563.628	2.563.754
130	Kab. Lebong	5.374	12.571.120	12.576.494

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
131	Kab. Kepahiang	0	1.204.577	1.204.577
132	Kab. Bengkulu Tengah	10.310	2.929.261	2.939.571
133	Provinsi Lampung	90.756	0	90.756
134	Kab. Lampung Barat	48.453	0	48.453
135	Kab. Lampung Selatan	3.148	0	3.148
136	Kab. Lampung Tengah	1.477	0	1.477
137	Kab. Lampung Utara	660	0	660
138	Kab. Lampung Timur	3.357	0	3.357
139	Kab. Tanggamus	55.829	0	55.829
140	Kab. Tulang Bawang	4.168	0	4.168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
141	Kab. Way Kanan	31.752	0	31.752
142	Kota Bandar Lampung	260	0	260
143	Kota Metro	0	0	0
144	Kab. Pesawaran	422	0	422
145	Kab. Pringsewu	323	0	323
146	Kab. Mesuji	564	0	564
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0
148	Kab. Pesisir Barat	632	0	632
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	125.588	7.078.489	7.204.077

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
151	Kab. Bandung	837	322.163	323.000
152	Kab. Bekasi	1.387	787.927	789.314
153	Kab. Bogor	101.994	14.271.917	14.373.911
154	Kab. Ciamis	0	328.875	328.875
155	Kab. Cianjur	16.047	804.970	821.017
156	Kab. Cirebon	6.582	322.163	328.745
157	Kab. Garut	39.387	322.163	361.550
158	Kab. Indramayu	326	322.163	322.489
159	Kab. Karawang	481	804.881	805.362
160	Kab. Kuningan	562	328.875	329.437

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
161	Kab. Majalengka	168	322.163	322.331
162	Kab. Purwakarta	3.337	804.691	808.028
163	Kab. Subang	965	322.183	323.148
164	Kab. Sukabumi	34.055	807.815	841.870
165	Kab. Sumedang	478	322.163	322.641
166	Kab. Tasikmalaya	195	315.451	315.646
167	Kota Bandung	0	322.163	322.163
168	Kota Bekasi	0	804.671	804.671
169	Kota Bogor	0	804.671	804.671
170	Kota Cirebon	0	322.163	322.163

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
171	Kota Depok	0	804.671	804.671
172	Kota Sukabumi	0	322.462	322.462
173	Kota Tasikmalaya	32	322.163	322.195
174	Kota Cimahi	0	315.451	315.451
175	Kota Banjar	0	322.163	322.163
176	Kab. Bandung Barat	2.430	322.163	324.593
177	Kab. Pangandaran	45	322.163	322.208
178	Provinsi Jawa Tengah	35.490	0	35.490
179	Kab. Banjarnegara	1.625	0	1.625
180	Kab. Banyumas	16.621	0	16.621

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
181	Kab. Batang	201	0	201
182	Kab. Blora	22	0	22
183	Kab. Boyolali	280	0	280
184	Kab. Brebes	167	0	167
185	Kab. Cilacap	9.407	0	9.407
186	Kab. Demak	0	0	0
187	Kab. Grobogan	5.367	0	5.367
188	Kab. Jepara	1.034	0	1.034
189	Kab. Karanganyar	0	0	0
190	Kab. Kebumen	348	0	348

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
191	Kab. Kendal	779	0	779
192	Kab. Klaten	134	0	134
193	Kab. Kudus	261	0	261
194	Kab. Magelang	895	0	895
195	Kab. Pati	376	0	376
196	Kab. Pekalongan	0	0	0
197	Kab. Pemalang	1.061	0	1.061
198	Kab. Purbalingga	600	0	600
199	Kab. Purworejo	10	0	10
200	Kab. Rembang	4.902	0	4.902

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 - 4
201	Kab. Semarang	131	0	131
202	Kab. Sragen	501	0	501
203	Kab. Sukoharjo	0	0	0
204	Kab. Tegal	1.074	0	1.074
205	Kab. Temanggung	0	0	0
206	Kab. Wonogiri	13.380	0	13.380
207	Kab. Wonosobo	0	0	0
208	Kota Magelang	0	0	0
209	Kota Pekalongan	0	0	0
210	Kota Salatiga	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
211	Kota Semarang	0	0	0
212	Kota Surakarta	0	0	0
213	Kota Tegal	0	0	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	4.864	0	4.864
215	Kab. Bantul	362	0	362
216	Kab. Gunung Kidul	147	0	147
217	Kab. Kulon Progo	7.594	0	7.594
218	Kab. Sleman	9	0	9
219	Kota Yogyakarta	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	471.352	29.881.469	30.352.821

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
221	Kab. Bangkalan	106	978.498	978.604
222	Kab. Banyuwangi	71.793	60.155.921	60.227.714
223	Kab. Blitar	903	978.498	979.401
224	Kab. Bojonegoro	608	998.884	999.492
225	Kab. Bondowoso	0	8.296.385	8.296.385
226	Kab. Gresik	3.881	978.688	982.569
227	Kab. Jember	585	8.296.385	8.296.970
228	Kab. Jombang	0	978.498	978.498
229	Kab. Kediri	913	998.884	999.797
230	Kab. Lamongan	1.376	978.517	979.893

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
231	Kab. Lumajang	1.674	978.498	980.172
232	Kab. Madiun	0	998.884	998.884
233	Kab. Magetan	694	978.498	979.192
234	Kab. Malang	1.153	998.884	1.000.037
235	Kab. Mojokerto	4.093	978.517	982.610
236	Kab. Nganjuk	0	978.498	978.498
237	Kab. Ngawi	409	978.498	978.907
238	Kab. Pacitan	13.855	978.498	992.353
239	Kab. Pamekasan	0	978.498	978.498
240	Kab. Pasuruan	5.502	978.498	984.000

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
241	Kab. Ponorogo	133	998.884	999.017
242	Kab. Probolinggo	778	978.498	979.276
243	Kab. Sampang	239	978.498	978.737
244	Kab. Sidoarjo	0	978.517	978.517
245	Kab. Situbondo	2.744	8.296.385	8.299.129
246	Kab. Sumenep	0	978.498	978.498
247	Kab. Trenggalek	656.594	998.884	1.655.478
248	Kab. Tuban	16.314	978.498	994.812
249	Kab. Tulungagung	18	978.498	978.516
250	Kota Blitar	0	978.498	978.498

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
251	Kota Kediri	0	978.498	978.498
252	Kota Madiun	0	978.498	978.498
253	Kota Malang	0	978.498	978.498
254	Kota Mojokerto	137	978.498	978.635
255	Kota Pasuruan	0	978.498	978.498
256	Kota Probolinggo	0	978.498	978.498
257	Kota Surabaya	0	978.517	978.517
258	Kota Batu	0	998.884	998.884
259	Provinsi Kalimantan Barat	4.681.306	22.972.698	27.654.004
260	Kab. Bengkayang	27.993	3.358.443	3.386.436

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
261	Kab. Landak	883.045	5.054.911	5.937.956
262	Kab. Kapuas Hulu	18.442	22.710.252	22.728.694
263	Kab. Ketapang	4.670.222	25.876.360	30.546.582
264	Kab. Mempawah	125.361	2.171.791	2.297.152
265	Kab. Sambas	11.563	2.001.547	2.013.110
266	Kab. Sanggau	1.843.121	21.696.180	23.539.301
267	Kab. Sintang	38.516	25.412.377	25.450.893
268	Kota Pontianak	0	2.001.547	2.001.547
269	Kota Singkawang	15.306	2.001.547	2.016.853
270	Kab. Sekadau	1.903	4.273.838	4.275.741

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
271	Kab. Melawi	1.381	11.850.630	11.852.011
272	Kab. Kayong Utara	23.911	4.187.568	4.211.479
273	Kab. Kubu Raya	1.935	4.736.699	4.738.634
274	Provinsi Kalimantan Tengah	6.343.273	400.029.799	406.373.072
275	Kab. Barito Selatan	612.344	118.566.950	119.179.294
276	Kab. Barito Utara	2.271.293	488.440.843	490.712.136
277	Kab. Kapuas	966.856	245.882.078	246.848.933
278	Kab. Kotawaringin Barat	197.038	31.774.943	31.971.981
279	Kab. Kotawaringin Timur	502.891	50.351.271	50.854.162
280	Kota Palangkaraya	21.235	32.421.856	32.443.091

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
281	Kab. Katingan	378.503	36.028.413	36.406.916
282	Kab. Seruyan	411.413	35.566.271	35.977.684
283	Kab. Sukamara	96.250	32.915.360	33.011.610
284	Kab. Lamandau	1.758	33.601.096	33.602.854
285	Kab. Gunung Mas	821.782	60.110.253	60.932.035
286	Kab. Pulang Pisau	20.934	42.976.741	42.997.675
287	Kab. Murung Raya	3.548.973	248.524.436	252.073.409
288	Kab. Barito Timur	690.827	83.146.139	83.836.966
289	Provinsi Kalimantan Selatan	2.493.512	665.773.779	668.267.291
290	Kab. Banjar	323.815	171.888.353	172.212.168

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
291	Kab. Barito Kuala	0	92.498.697	92.498.697
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	95.594	100.166.356	100.261.950
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	27.236	99.546.815	99.574.051
294	Kab. Hulu Sungai Utara	7.221	119.921.800	119.929.021
295	Kab. Kotabaru	1.353.037	342.081.655	343.434.692
296	Kab. Tabalong	440.206	318.280.054	318.720.260
297	Kab. Tanah Laut	410.226	196.505.806	196.916.032
298	Kab. Tapin	236.017	164.013.686	164.249.703
299	Kota Banjarbaru	25.823	72.087.977	72.113.800
300	Kota Banjarmasin	0	61.190.905	61.190.905

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
301	Kab. Balangan	227.527	477.354.754	477.582.331
302	Kab. Tanah Bumbu	992.970	485.765.926	486.758.896
303	Provinsi Kalimantan Timur	6.696.818	1.187.338.195	1.194.035.013
304	Kab. Berau	1.129.530	571.291.944	572.421.474
305	Kab. Kutai Kartanegara	3.345.964	983.574.288	986.920.252
306	Kab. Kutai Barat	1.350.262	412.806.947	414.157.209
307	Kab. Kutai Timur	3.748.477	1.030.150.553	1.033.899.030
308	Kab. Paser	502.980	405.599.530	406.102.510
309	Kota Balikpapan	0	168.461.277	168.461.277
310	Kota Bontang	0	245.575.915	245.575.915

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
311	Kota Samarinda	287.924	196.771.850	197.059.774
312	Kab. Penajam Paser Utara	76.274	198.749.001	198.825.275
313	Kab. Mahakam Ulu	713.960	235.244.740	235.958.700
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.497.686	46.782.251	48.279.937
315	Kab. Bolaang Mongondow	185.884	43.268.418	43.454.302
316	Kab. Minahasa	208	9.105.599	9.105.807
317	Kab. Kepulauan Sangihe	1.584.416	3.887.156	5.471.572
318	Kota Bitung	33.322	15.740.293	15.773.615
319	Kota Manado	0	8.932.540	8.932.540
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	3.968.138	3.968.138

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
321	Kab. Minahasa Selatan	6.988	6.997.593	7.004.581
322	Kota Tomohon	0	3.887.156	3.887.156
323	Kab. Minahasa Utara	305.663	45.668.471	45.974.134
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	3.968.138	3.968.138
325	Kota Kotamobagu	3.243	6.824.534	6.827.777
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	26.539	7.356.930	7.383.469
327	Kab. Minahasa Tenggara	11.704	5.234.543	5.246.247
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	185.843	7.533.594	7.719.437
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	112.504	11.017.549	11.130.053
330	Provinsi Sulawesi Tengah	2.345.350	141.425.392	143.770.742

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
331	Kab. Banggai	645.490	57.031.739	57.677.229
332	Kab. Banggai Kepulauan	884	13.258.632	13.259.516
333	Kab. Buol	72.539	13.258.632	13.331.171
334	Kab. Toli-Toli	75.924	13.258.632	13.334.556
335	Kab. Donggala	177.586	19.207.481	19.385.067
336	Kab. Morowali	1.824.815	161.130.349	162.955.164
337	Kab. Poso	19.867	22.620.743	22.640.610
338	Kota Palu	111.771	59.362.214	59.473.985
339	Kab. Parigi Moutong	183.457	19.207.481	19.390.938
340	Kab. Tojo Una Una	2.423	27.251.821	27.254.244

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
341	Kab. Sigi	73.365	19.207.481	19.280.846
342	Kab. Banggai Laut	0	13.258.632	13.258.632
343	Kab. Morowali Utara	720.808	121.274.057	121.994.865
344	Provinsi Sulawesi Selatan	1.284.004	20.128.816	21.412.820
345	Kab. Bantaeng	0	656.376	656.376
346	Kab. Barru	6.980	656.376	663.356
347	Kab. Bone	158.695	642.980	801.675
348	Kab. Bulukumba	1.833	642.980	644.813
349	Kab. Enrekang	478	656.376	656.854
350	Kab. Gowa	285	642.980	643.265

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
351	Kab. Jeneponto	189	642.980	643.169
352	Kab. Luwu	121.113	629.585	750.698
353	Kab. Luwu Utara	368.277	3.172.478	3.540.755
354	Kab. Maros	3.587	656.376	659.963
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	12.284	656.376	668.660
356	Kota Palopo	229	642.980	643.209
357	Kab. Luwu Timur	1.423.243	77.169.928	78.593.171
358	Kab. Pinrang	1.915	642.980	644.895
359	Kab. Sinjai	16	656.376	656.392
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	642.980	642.980

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
361	Kab. Sidenreng Rappang	638	642.980	643.618
362	Kab. Soppeng	600	642.980	643.580
363	Kab. Takalar	0	642.980	642.980
364	Kab. Tana Toraja	27.756	656.376	684.132
365	Kab. Wajo	114	642.980	643.094
366	Kota Parepare	0	642.980	642.980
367	Kota Makassar	55	642.980	643.035
368	Kab. Toraja Utara	3.155	656.376	659.531
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.222.740	205.723.148	207.945.888
370	Kab. Buton	150.916	9.786.656	9.937.572

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
371	Kab. Konawe	601.511	106.038.623	106.640.134
372	Kab. Kolaka	365.289	170.731.781	171.097.070
373	Kab. Muna	1.342	10.346.874	10.348.216
374	Kota Kendari	0	16.198.829	16.198.829
375	Kota Bau-bau	848	9.657.038	9.657.886
376	Kab. Konawe Selatan	95.290	62.756.489	62.851.779
377	Kab. Bombana	398.873	65.460.417	65.859.290
378	Kab. Wakatobi	0	9.249.671	9.249.671
379	Kab. Kolaka Utara	996.439	58.152.873	59.149.312
380	Kab. Konawe Utara	910.944	202.591.918	203.502.862

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
381	Kab. Buton Utara	0	9.657.038	9.657.038
382	Kab. Konawe Kepulauan	51.468	15.412.044	15.463.512
383	Kab. Kolaka Timur	55.843	30.469.817	30.525.660
384	Kab. Muna Barat	0	9.643.274	9.643.274
385	Kab. Buton Tengah	44.946	18.200.200	18.245.146
386	Kab. Buton Selatan	29.904	9.657.038	9.686.942
387	Provinsi Bali	153	0	153
388	Kab. Badung	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
391	Kab. Gianyar	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0
393	Kab. Karangasem	255	0	255
394	Kab. Klungkung	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	525.978	53.383.882	53.909.860
398	Kab. Bima	0	6.972.662	6.972.662
399	Kab. Dompu	22.989	7.939.431	7.962.420
400	Kab. Lombok Barat	54	6.972.589	6.972.643

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
401	Kab. Lombok Tengah	40	6.972.589	6.972.629
402	Kab. Lombok Timur	507	6.972.589	6.973.096
403	Kab. Sumbawa	415.457	50.225.131	50.640.588
404	Kota Mataram	89	6.972.589	6.972.678
405	Kota Bima	18.035	6.972.589	6.990.624
406	Kab. Sumbawa Barat	418.464	105.380.531	105.798.995
407	Kab. Lombok Utara	132	6.972.589	6.972.721
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	207.684	16.807	224.491
409	Kab. Alor	26	983	1.009
410	Kab. Belu	5.661	963	6.624

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
411	Kab. Ende	0	983	983
412	Kab. Flores Timur	5	983	988
413	Kab. Kupang	29.600	33.995	63.595
414	Kab. Lembata	25	983	1.008
415	Kab. Manggarai	3.493	983	4.476
416	Kab. Ngada	0	983	983
417	Kab. Sikka	0	983	983
418	Kab. Sumba Barat	0	983	983
419	Kab. Sumba Timur	0	963	963
420	Kab. Timor Tengah Selatan	267.794	5.185	272.979

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
421	Kab. Timor Tengah Utara	25.156	5.185	30.341
422	Kota Kupang	0	5.079	5.079
423	Kab. Rote Ndao	0	963	963
424	Kab. Manggarai Barat	467	983	1.450
425	Kab. Nagekeo	850	963	1.813
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	963	963
427	Kab. Sumba Tengah	0	963	963
428	Kab. Manggarai Timur	0	983	983
429	Kab. Sabu Raijua	12.671	963	13.634
430	Kab. Malaka	0	963	963

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
431	Provinsi Maluku	46.278	1.235.458	1.281.736
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	148.817	148.817
433	Kab. Maluku Tengah	1.255	148.817	150.072
434	Kab. Maluku Tenggara	0	148.817	148.817
435	Kab. Buru	0	148.817	148.817
436	Kota Ambon	0	148.817	148.817
437	Kab. Seram Bagian Barat	49.633	148.817	198.450
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	148.817	148.817
439	Kab. Kepulauan Aru	0	145.781	145.781
440	Kota Tual	0	148.817	148.817

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
441	Kab. Maluku Barat Daya	26.243	3.453.664	3.479.907
442	Kab. Buru Selatan	0	148.817	148.817
443	Provinsi Papua	185.352	0	185.352
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0
448	Kab. Sarmi	23.809	0	23.809
449	Kab. Keerom	285.111	0	285.111
450	Kab. Waropen	0	9.705.640	9.705.640

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
451	Kab. Supiori	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	3.303.764	243.196.562	246.500.326
454	Kab. Halmahera Tengah	447.056	263.814.724	264.261.780
455	Kota Ternate	0	20.266.381	20.266.381
456	Kab. Halmahera Barat	232.651	52.358.939	52.591.590
457	Kab. Halmahera Timur	1.361.673	280.915.015	282.276.688
458	Kab. Halmahera Selatan	364.801	182.983.329	183.348.130
459	Kab. Halmahera Utara	292.811	20.286.923	20.579.734
460	Kab. Kepulauan Sula	736.454	20.266.381	21.002.835

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
461	Kota Tidore Kepulauan	0	86.973.963	86.973.963
462	Kab. Pulau Morotai	120.673	20.266.381	20.387.054
463	Kab. Pulau Taliabu	1.950.163	24.654.219	26.604.382
464	Provinsi Banten	65.361	242	65.603
465	Kab. Lebak	83.292	600.860	684.152
466	Kab. Pandeglang	19.817	78	19.895
467	Kab. Serang	5.284	498	5.782
468	Kab. Tangerang	140	600.561	600.701
469	Kota Cilegon	405	78	483
470	Kota Tangerang	0	42	42

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
471	Kota Serang	0	78	78
472	Kota Tangerang Selatan	0	600.525	600.525
473	Provinsi Bangka Belitung	2.398.332	66.303.028	68.701.360
474	Kab. Bangka	564.704	54.822.884	55.387.588
475	Kab. Belitung	126.023	10.413.267	10.539.290
476	Kota Pangkal Pinang	1.870	16.507.185	16.509.055
477	Kab. Bangka Selatan	286.765	42.089.828	42.376.593
478	Kab. Bangka Tengah	134.841	34.765.596	34.900.437
479	Kab. Bangka Barat	517.907	57.425.358	57.943.265
480	Kab. Belitung Timur	405.952	10.412.996	10.818.948

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
481	Provinsi Gorontalo	206.805	0	206.805
482	Kab. Boalemo	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	45.955	0	45.955
484	Kota Gorontalo	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	70.430	0	70.430
486	Kab. Bone Bolango	221.147	1.852.165	2.073.312
487	Kab. Gorontalo Utara	6.188	0	6.188
488	Provinsi Kepulauan Riau	513.171	1.476.018	1.989.189
489	Kab. Natuna	37.081	184.503	221.584
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	184.503	184.503

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
491	Kab. Kaimana	521.957	922.511	1.444.468
492	Kota Batam	0	180.737	180.737
493	Kota Tanjung Pinang	631	180.737	181.368
494	Kab. Lingga	260.824	4.059.046	4.319.870
495	Kab. Bintan	1.392	180.737	182.129
496	Provinsi Papua Barat	814	0	814
497	Kab. Fak Fak	0	0	0
498	Kab. Manokwari	1.356	0	1.356
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0
500	Kab. Teluk Wondama	0	9.705.640	9.705.640

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
501	Kab. Kaimana	0	33.362.632	33.362.632
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	29.650	0	29.650
505	Kab. Majene	635	0	635
506	Kab. Mamuju	9.935	0	9.935
507	Kab. Polewali Mandar	29.041	0	29.041
508	Kab. Mamasa	64	0	64
509	Kab. Pasangkayu	7.627	0	7.627
510	Kab. Mamuju Tengah	1.513	0	1.513

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
511	Provinsi Kalimantan Utara	565.741	85.567.595	86.133.336
512	Kab. Bulungan	623.537	142.064.107	142.687.644
513	Kab. Malinau	107.196	288.303.745	288.410.941
514	Kab. Nunukan	161.147	44.570.047	44.731.194
515	Kota Tarakan	0	20.373.238	20.373.238
516	Kab. Tana Tidung	51.025	89.095.870	89.146.895
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
521	Kab. Asmat	0	33.362.475	33.362.475
522	Provinsi Papua Tengah	75.271	252.342.513	252.417.784
523	Kab. Mimika	84.431	514.388.116	514.472.547
524	Kab. Nabire	32.075	36.744.572	36.776.647
525	Kab. Panai	7.060	60.399.330	60.406.390
526	Kab. Puncak Jaya	0	36.742.180	36.742.180
527	Kab. Dogiyai	0	60.399.330	60.399.330
528	Kab. Puncak	1.364	59.166.536	59.167.900
529	Kab. Intan Jaya	486	59.166.691	59.167.177
530	Kab. Deiyai	0	57.933.900	57.933.900

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
531	Provinsi Papua Pegunungan	76.857	0	76.857
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	128.094	0	128.094
535	Kab. Tolikara	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	32.000.741	32.000.741
540	Provinsi Papua Barat Daya	150.094	11.849.830	11.999.924

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.6 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN TETAP	ROYALTI	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
541	Kab. Sorong	74.479	11.779.800	11.854.279
542	Kab. Sorong Selatan	0	2.782.343	2.782.343
543	Kab. Raja Ampat	175.677	24.490.148	24.665.825
544	Kab. Tambrauw	0	2.782.343	2.782.343
545	Kab. Maybrat	0	2.782.343	2.782.343
546	Kota Sorong	0	2.782.343	2.782.343
547	Selisih Lebih	2.718.994	471.819.348	474.538.342
JUMLAH NASIONAL		115.829.671	19.820.810.198	19.936.639.869

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Provinsi Aceh	0	58.733	805.583	864.316
2	Kab. Aceh Barat	0	15.053	0	15.053
3	Kab. Aceh Besar	0	4.046	0	4.046
4	Kab. Aceh Selatan	0	8.621	0	8.621
5	Kab. Aceh Singkil	0	12.681	0	12.681
6	Kab. Aceh Tengah	0	22.094	0	22.094
7	Kab. Aceh Tenggara	0	10.183	0	10.183
8	Kab. Aceh Timur	0	39.312	0	39.312
9	Kab. Aceh Utara	0	8.446	0	8.446
10	Kab. Bireuen	0	5.609	0	5.609

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
11	Kab. Pidie	0	6.008	0	6.008
12	Kab. Simeulue	0	2.670	0	2.670
13	Kota Banda Aceh	0	2.618	0	2.618
14	Kota Sabang	0	2.670	0	2.670
15	Kota Langsa	0	5.424	0	5.424
16	Kota Lhokseumawe	0	2.768	0	2.768
17	Kab. Gayo Lues	0	20.839	0	20.839
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	5.210	0	5.210
19	Kab. Aceh Jaya	0	11.824	0	11.824
20	Kab. Nagan Raya	0	15.840	0	15.840

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DOPB	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
21	Kab. Aceh Tamiang	0	7.199	0	7.199
22	Kab. Bener Meriah	0	20.722	0	20.722
23	Kab. Pidie Jaya	0	2.672	0	2.672
24	Kota Subulussalam	0	17.405	0	17.405
25	Provinsi Sumatera Utara	12.630	2.309.576	13.631.808	15.954.014
26	Kab. Asahan	0	109.426	0	109.426
27	Kab. Dairi	0	147.200	0	147.200
28	Kab. Deli Serdang	0	90.926	0	90.926
29	Kab. Karo	18.943	115.022	0	133.965
30	Kab. Labuhanbatu	0	266.254	0	266.254

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
31	Kab. Langkat	0	80.501	0	80.501
32	Kab. Mandailing Natal	0	399.240	0	399.240
33	Kab. Nias	0	342.803	0	342.803
34	Kab. Simalungun	0	330.116	0	330.116
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	323.052	0	323.052
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	187.807	0	187.807
37	Kab. Tapanuli Utara	0	352.712	0	352.712
38	Kab. Toba	0	225.367	0	225.367
39	Kota Binjai	0	71.140	0	71.140
40	Kota Medan	0	70.703	0	70.703

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
41	Kota Pematang Siantar	0	88.329	0	88.329
42	Kota Sibolga	0	74.697	0	74.697
43	Kota Tanjung Balai	0	71.399	0	71.399
44	Kota Tebing Tinggi	0	70.703	0	70.703
45	Kota Padang Sidempuan	0	75.327	0	75.327
46	Kab. Pakpak Bharat	0	168.190	0	168.190
47	Kab. Nias Selatan	0	1.137.773	0	1.137.773
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	281.169	0	281.169
49	Kab. Serdang Bedagai	0	88.329	0	88.329
50	Kab. Samosir	0	347.959	0	347.959

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
51	Kab. Batu Bara	0	89.027	0	89.027
52	Kab. Padang Lawas	0	1.136.220	0	1.136.220
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	732.255	0	732.255
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	848.322	0	848.322
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	145.625	0	145.625
56	Kab. Nias Utara	0	70.703	0	70.703
57	Kab. Nias Barat	0	335.808	0	335.808
58	Kota Gunungsitoli	0	70.703	0	70.703
59	Provinsi Sumatera Barat	0	856.116	13.520.101	14.376.217
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	183.580	0	183.580

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
61	Kab. Agam	0	52.546	0	52.546
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	2.115.590	0	2.115.590
63	Kab. Padang Pariaman	0	49.821	0	49.821
64	Kab. Pasaman	0	206.271	0	206.271
65	Kab. Pesisir Selatan	0	78.562	0	78.562
66	Kab. Sijunjung	0	345.739	0	345.739
67	Kab. Solok	0	120.635	0	120.635
68	Kab. Tanah Datar	0	59.251	0	59.251
69	Kota Bukit Tinggi	0	46.605	0	46.605
70	Kota Padang Panjang	0	46.592	0	46.592

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
71	Kota Padang	0	53.383	0	53.383
72	Kota Payakumbuh	0	46.598	0	46.598
73	Kota Sawahlunto	0	76.992	0	76.992
74	Kota Solok	0	50.445	0	50.445
75	Kota Pariaman	0	46.592	0	46.592
76	Kab. Pasaman Barat	0	100.946	0	100.946
77	Kab. Dharmasraya	0	249.087	0	249.087
78	Kab. Solok Selatan	0	103.196	0	103.196
79	Provinsi Riau	374.577	11.867.883	3.971.804	16.214.264
80	Kab. Bengkulis	0	4.493.302	0	4.493.302

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
81	Kab. Indragiri Hilir	0	4.351.479	0	4.351.479
82	Kab. Indragiri Hulu	97.911	2.842.000	0	2.939.911
83	Kab. Kampar	0	3.618.039	0	3.618.039
84	Kab. Kuantan Singingi	0	3.088.834	0	3.088.834
85	Kab. Pelalawan	0	9.599.289	0	9.599.289
86	Kab. Rokan Hilir	0	2.326.748	0	2.326.748
87	Kab. Rokan Hulu	0	2.484.902	0	2.484.902
88	Kab. Siak	0	6.104.704	0	6.104.704
89	Kota Dumai	0	1.901.761	0	1.901.761
90	Kota Pekanbaru	0	2.208.570	0	2.208.570

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
91	Kab. Kepulauan Meranti	461.914	2.639.425	0	3.101.339
92	Provinsi Jambi	0	1.108.023	4.789.091	5.897.114
93	Kab. Batang Hari	0	788.893	0	788.893
94	Kab. Bungo	0	257.066	0	257.066
95	Kab. Kerinci	0	164.242	0	164.242
96	Kab. Merangin	0	284.959	0	284.959
97	Kab. Muaro Jambi	0	506.634	0	506.634
98	Kab. Sarolangun	0	388.291	0	388.291
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	1.482.819	0	1.482.819
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	431.790	0	431.790

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
101	Kab. Tebo	0	998.953	0	998.953
102	Kota Jambi	0	112.629	0	112.629
103	Kota Sungai Penuh	0	111.030	0	111.030
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	4.686.694	110.994	4.797.688
105	Kab. Lahat	0	523.209	0	523.209
106	Kab. Musi Banyuasin	0	2.464.034	0	2.464.034
107	Kab. Musi Rawas	0	960.211	0	960.211
108	Kab. Muara Enim	0	905.012	0	905.012
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	5.420.683	0	5.420.683
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	394.466	0	394.466

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
111	Kota Palembang	0	338.252	0	338.252
112	Kota Prabumulih	0	313.152	0	313.152
113	Kota Pagar Alam	0	336.949	0	336.949
114	Kota Lubuk Linggau	0	319.785	0	319.785
115	Kab. Banyuasin	0	1.281.404	0	1.281.404
116	Kab. Ogan Ilir	0	729.915	0	729.915
117	Kab. OKU Timur	0	753.558	0	753.558
118	Kab. OKU Selatan	0	340.193	0	340.193
119	Kab. Empat Lawang	0	329.448	0	329.448
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	538.043	0	538.043

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DHPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	490.893	0	490.893
122	Provinsi Bengkulu	0	136.318	722.112	858.430
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	33.598	0	33.598
124	Kab. Bengkulu Utara	0	131.020	0	131.020
125	Kab. Rejang Lebong	0	51.846	0	51.846
126	Kota Bengkulu	0	15.441	0	15.441
127	Kab. Kaur	0	60.411	0	60.411
128	Kab. Seluma	0	33.273	0	33.273
129	Kab. Mukomuko	0	171.601	0	171.601
130	Kab. Lebong	0	59.325	0	59.325

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
131	Kab. Kepahiang	0	15.260	0	15.260
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	27.184	0	27.184
133	Provinsi Lampung	0	100.497	48.836	149.333
134	Kab. Lampung Barat	0	14.065	0	14.065
135	Kab. Lampung Selatan	0	7.152	0	7.152
136	Kab. Lampung Tengah	0	8.698	0	8.698
137	Kab. Lampung Utara	0	13.257	0	13.257
138	Kab. Lampung Timur	0	7.218	0	7.218
139	Kab. Tanggamus	0	15.656	0	15.656
140	Kab. Tulang Bawang	0	401.100	0	401.100

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
141	Kab. Way Kanan	0	463.321	0	463.321
142	Kota Bandar Lampung	0	7.081	0	7.081
143	Kota Metro	0	7.065	0	7.065
144	Kab. Pesawaran	0	8.394	0	8.394
145	Kab. Pringsewu	0	8.390	0	8.390
146	Kab. Mesuji	0	496.308	0	496.308
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	406.750	0	406.750
148	Kab. Pesisir Barat	0	10.302	0	10.302
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	876.502	0	876.502

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
151	Kab. Bandung	0	97.757	0	97.757
152	Kab. Bekasi	0	36.375	0	36.375
153	Kab. Bogor	0	293.977	0	293.977
154	Kab. Ciamis	0	406.077	0	406.077
155	Kab. Cianjur	0	389.775	0	389.775
156	Kab. Cirebon	0	77.353	0	77.353
157	Kab. Garut	0	101.316	0	101.316
158	Kab. Indramayu	0	86.424	0	86.424
159	Kab. Karawang	0	67.985	0	67.985
160	Kab. Kuningan	0	225.636	0	225.636

V 7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
161	Kab. Majalengka	0	110.179	0	110.179
162	Kab. Purwakarta	0	272.766	0	272.766
163	Kab. Subang	0	85.494	0	85.494
164	Kab. Sukabumi	0	386.712	0	386.712
165	Kab. Sumedang	0	89.822	0	89.822
166	Kab. Tasikmalaya	0	216.021	0	216.021
167	Kota Bandung	0	47.581	0	47.581
168	Kota Bekasi	0	35.683	0	35.683
169	Kota Bogor	0	35.683	0	35.683
170	Kota Cirebon	0	34.653	0	34.653

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
171	Kota Depok	0	35.683	0	35.683
172	Kota Sukabumi	0	56.337	0	56.337
173	Kota Tasikmalaya	0	67.610	0	67.610
174	Kota Cimahi	0	46.590	0	46.590
175	Kota Banjar	0	69.672	0	69.672
176	Kab. Bandung Barat	0	227.088	0	227.088
177	Kab. Pangandaran	0	192.346	0	192.346
178	Provinsi Jawa Tengah	0	3.831.696	0	3.831.696
179	Kab. Banjarnegara	0	243.321	0	243.321
180	Kab. Banyumas	0	414.918	0	414.918

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
181	Kab. Batang	0	617.654	0	617.654
182	Kab. Blora	0	2.382.692	0	2.382.692
183	Kab. Boyolali	0	368.094	0	368.094
184	Kab. Brebes	0	368.125	0	368.125
185	Kab. Cilacap	0	380.194	0	380.194
186	Kab. Demak	0	289.983	0	289.983
187	Kab. Grobogan	0	1.290.257	0	1.290.257
188	Kab. Jepara	0	478.142	0	478.142
189	Kab. Karanganyar	0	160.006	0	160.006
190	Kab. Kebumen	0	179.518	0	179.518

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
191	Kab. Kendal	0	347.585	0	347.585
192	Kab. Klaten	0	126.865	0	126.865
193	Kab. Kudus	0	291.232	0	291.232
194	Kab. Magelang	0	159.067	0	159.067
195	Kab. Pati	0	1.126.692	0	1.126.692
196	Kab. Pekalongan	0	343.749	0	343.749
197	Kab. Pemalang	0	1.201.012	0	1.201.012
198	Kab. Purbalingga	0	283.577	0	283.577
199	Kab. Purworejo	0	135.375	0	135.375
200	Kab. Rembang	0	978.014	0	978.014

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
201	Kab. Semarang	0	300.340	0	300.340
202	Kab. Sragen	0	214.837	0	214.837
203	Kab. Sukoharjo	0	128.788	0	128.788
204	Kab. Tegal	0	737.798	0	737.798
205	Kab. Temanggung	0	181.492	0	181.492
206	Kab. Wonogiri	0	146.951	0	146.951
207	Kab. Wonosobo	0	224.626	0	224.626
208	Kota Magelang	0	113.921	0	113.921
209	Kota Pekalongan	0	165.574	0	165.574
210	Kota Salatiga	0	118.249	0	118.249

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
211	Kota Semarang	0	143.988	0	143.988
212	Kota Surakarta	0	124.848	0	124.848
213	Kota Tegal	0	186.325	0	186.325
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	16.229	0	16.229
215	Kab. Bantul	0	8.788	0	8.788
216	Kab. Gunung Kidul	0	24.306	0	24.306
217	Kab. Kulon Progo	0	9.515	0	9.515
218	Kab. Sleman	0	10.011	0	10.011
219	Kota Yogyakarta	0	12.337	0	12.337
220	Provinsi Jawa Timur	0	1.710.887	563.973	2.274.860

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
221	Kab. Bangkalan	0	50.595	0	50.595
222	Kab. Banyuwangi	0	662.317	0	662.317
223	Kab. Blitar	0	144.313	0	144.313
224	Kab. Bojonegoro	0	618.830	0	618.830
225	Kab. Bondowoso	0	219.397	0	219.397
226	Kab. Gresik	0	115.384	0	115.384
227	Kab. Jember	0	457.058	0	457.058
228	Kab. Jombang	0	143.134	0	143.134
229	Kab. Kediri	0	164.260	0	164.260
230	Kab. Lamongan	0	267.929	0	267.929

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
231	Kab. Lumajang	0	143.433	0	143.433
232	Kab. Madiun	0	507.462	0	507.462
233	Kab. Magetan	0	120.202	0	120.202
234	Kab. Malang	0	148.890	0	148.890
235	Kab. Mojokerto	0	96.806	0	96.806
236	Kab. Nganjuk	0	282.264	0	282.264
237	Kab. Ngawi	0	715.328	0	715.328
238	Kab. Pacitan	0	64.701	0	64.701
239	Kab. Pamekasan	0	50.213	0	50.213
240	Kab. Pasuruan	0	70.935	0	70.935

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BHPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
241	Kab. Ponorogo	0	229.086	0	229.086
242	Kab. Probolinggo	0	165.295	0	165.295
243	Kab. Sampang	0	48.857	0	48.857
244	Kab. Sidoarjo	0	71.025	0	71.025
245	Kab. Situbondo	0	158.666	0	158.666
246	Kab. Sumenep	0	51.448	0	51.448
247	Kab. Trenggalek	0	89.291	0	89.291
248	Kab. Tuban	0	652.420	0	652.420
249	Kab. Tulungagung	0	116.103	0	116.103
250	Kota Blitar	0	56.194	0	56.194

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
251	Kota Kediri	0	52.191	0	52.191
252	Kota Malang	0	77.820	0	77.820
253	Kota Malang	0	48.867	0	48.867
254	Kota Mojokerto	0	46.771	0	46.771
255	Kota Pasuruan	0	46.646	0	46.646
256	Kota Probolinggo	0	49.799	0	49.799
257	Kota Surabaya	0	122.870	0	122.870
258	Kota Batu	0	53.543	0	53.543
259	Provinsi Kalimantan Barat	634.821	2.614.884	27.879.626	31.129.331
260	Kab. Bengkayang	0	253.694	0	253.694

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
261	Kab. Landak	0	388.870	0	388.870
262	Kab. Kapuas Hulu	0	832.696	0	832.696
263	Kab. Ketapang	399.021	3.321.273	0	3.720.294
264	Kab. Mempawah	0	371.802	0	371.802
265	Kab. Sambas	0	243.053	0	243.053
266	Kab. Sanggau	114.509	658.524	0	773.033
267	Kab. Sintang	259.213	1.812.659	0	2.071.872
268	Kota Pontianak	0	265.004	0	265.004
269	Kota Singkawang	0	209.004	0	209.004
270	Kab. Sekadau	0	428.432	0	428.432

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
271	Kab. Melawi	168.793	2.184.093	0	2.352.886
272	Kab. Kayong Utara	0	539.983	0	539.983
273	Kab. Kubu Raya	0	1.063.032	0	1.063.032
274	Provinsi Kalimantan Tengah	75.819	18.438.996	79.379.085	97.893.900
275	Kab. Barito Selatan	0	2.311.365	0	2.311.365
276	Kab. Barito Utara	0	6.388.533	0	6.388.533
277	Kab. Kapuas	0	7.152.074	0	7.152.074
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	5.238.377	0	5.238.377
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	4.773.515	0	4.773.515
280	Kota Palangkaraya	0	2.196.487	0	2.196.487

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DHPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
281	Kab. Katingan	0	9.594.172	0	9.594.172
282	Kab. Seruyan	0	8.811.573	0	8.811.573
283	Kab. Sukamara	0	2.262.042	0	2.262.042
284	Kab. Lamandau	0	3.912.563	0	3.912.563
285	Kab. Gunung Mas	0	5.446.517	0	5.446.517
286	Kab. Pulang Pisau	0	2.667.878	0	2.667.878
287	Kab. Murung Raya	113.729	7.127.961	0	7.241.690
288	Kab. Barito Timur	0	1.460.116	0	1.460.116
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	141.382	1.890.155	2.031.537
290	Kab. Banjar	0	33.568	0	33.568

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
291	Kab. Barito Kuala	0	430.274	0	430.274
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	17.641	0	17.641
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	20.617	0	20.617
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	39.963	0	39.963
295	Kab. Kotabaru	0	109.244	0	109.244
296	Kab. Tabalong	0	432.561	0	432.561
297	Kab. Tanah Laut	0	66.047	0	66.047
298	Kab. Tapin	0	14.404	0	14.404
299	Kota Banjarbaru	0	19.808	0	19.808
300	Kota Banjarmasin	0	11.542	0	11.542

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
301	Kab. Bulungan	0	73.615	0	73.615
302	Kab. Tanah Bumbu	0	67.014	0	67.014
303	Provinsi Kalimantan Timur	867.207	6.133.791	51.170.819	58.171.817
304	Kab. Berau	0	6.188.032	0	6.188.032
305	Kab. Kutai Kartanegara	363.765	4.080.221	0	4.443.986
306	Kab. Kutai Barat	0	2.101.509	0	2.101.509
307	Kab. Kutai Timur	937.046	4.483.186	0	5.420.232
308	Kab. Paser	0	1.374.626	0	1.374.626
309	Kota Balikpapan	0	908.551	0	908.551
310	Kota Bontang	0	1.205.179	0	1.205.179

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
311	Kota Samarinda	0	854.426	0	854.426
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	1.460.170	0	1.460.170
313	Kab. Mahakam Ulu	0	2.145.333	0	2.145.333
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	40.910	753.185	794.095
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	15.666	0	15.666
316	Kab. Minahasa	0	7.508	0	7.508
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	2.863	0	2.863
318	Kota Bitung	0	6.281	0	6.281
319	Kota Manado	0	3.910	0	3.910
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	2.923	0	2.923

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IHPHT	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
321	Kab. Minahasa Selatan	0	10.450	0	10.450
322	Kota Tomohon	0	2.863	0	2.863
323	Kab. Minahasa Utara	0	10.083	0	10.083
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	2.923	0	2.923
325	Kota Kotamobagu	0	4.292	0	4.292
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	18.228	0	18.228
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	22.553	0	22.553
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	18.322	0	18.322
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	37.041	0	37.041
330	Provinsi Sulawesi Tengah	270.194	236.987	3.894.999	4.402.180

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DCPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
331	Kab. Banggai	178.439	44.857	0	223.296
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	19.749	0	19.749
333	Kab. Buol	0	134.719	0	134.719
334	Kab. Toli-Toli	0	63.594	0	63.594
335	Kab. Donggala	0	38.754	0	38.754
336	Kab. Morowali	119.504	350.597	0	470.101
337	Kab. Poso	107.350	124.794	0	232.144
338	Kota Palu	0	21.307	0	21.307
339	Kab. Parigi Moutong	0	126.281	0	126.281
340	Kab. Tojo Una Una	0	43.135	0	43.135

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
341	Kab. Sigi	0	26.238	0	26.238
342	Kab. Banggai Laut	0	19.749	0	19.749
343	Kab. Morowali Utara	0	256.954	0	256.954
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	464.438	10.127.118	10.591.556
345	Kab. Bantaeng	0	21.108	0	21.108
346	Kab. Barru	0	20.351	0	20.351
347	Kab. Bone	0	21.085	0	21.085
348	Kab. Bulukumba	0	19.796	0	19.796
349	Kab. Enrekang	0	21.074	0	21.074
350	Kab. Gowa	0	31.911	0	31.911

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IUPHT	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
351	Kab. Jeneponto	0	20.664	0	20.664
352	Kab. Luwu	0	22.527	0	22.527
353	Kab. Luwu Utara	0	99.580	0	99.580
354	Kab. Maros	0	21.222	0	21.222
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	20.431	0	20.431
356	Kota Palopo	0	20.026	0	20.026
357	Kab. Luwu Timur	0	955.702	0	955.702
358	Kab. Pinrang	0	21.119	0	21.119
359	Kab. Sinjai	0	21.229	0	21.229
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	19.782	0	19.782

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IUPHT	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	21.002	0	21.002
362	Kab. Soppeng	0	20.100	0	20.100
363	Kab. Takalar	0	20.664	0	20.664
364	Kab. Tana Toraja	0	21.549	0	21.549
365	Kab. Wajo	0	20.112	0	20.112
366	Kota Pare-pare	0	19.856	0	19.856
367	Kota Makassar	0	20.673	0	20.673
368	Kab. Toraja Utara	0	21.027	0	21.027
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	71.041	123.256	1.070.503	1.264.800
370	Kab. Buton	0	9.042	0	9.042

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
371	Kab. Konawe	0	152.770	0	152.770
372	Kab. Kolaka	106.562	58.173	0	164.735
373	Kab. Muna	0	8.366	0	8.366
374	Kota Kendari	0	10.473	0	10.473
375	Kota Bau-bau	0	8.119	0	8.119
376	Kab. Konawe Selatan	0	29.781	0	29.781
377	Kab. Bombana	0	117.247	0	117.247
378	Kab. Wakatobi	0	7.390	0	7.390
379	Kab. Kolaka Utara	0	97.720	0	97.720
380	Kab. Konawe Utara	0	74.406	0	74.406

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
381	Kab. Buton Utara	0	9.677	0	9.677
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	21.296	0	21.296
383	Kab. Kolaka Timur	0	49.755	0	49.755
384	Kab. Muna Barat	0	7.739	0	7.739
385	Kab. Buton Tengah	0	20.329	0	20.329
386	Kab. Buton Selatan	0	7.997	0	7.997
387	Provinsi Bali	0	1.586	0	1.586
388	Kab. Badung	0	199	0	199
389	Kab. Bangli	0	216	0	216
390	Kab. Buleleng	0	1.014	0	1.014

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
391	Kab. Gianyar	0	195	0	195
392	Kab. Jembrana	0	3.066	0	3.066
393	Kab. Karangasem	0	273	0	273
394	Kab. Klungkung	0	207	0	207
395	Kab. Tabanan	0	947	0	947
396	Kota Denpasar	0	195	0	195
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	79.362	64.889	820.504	964.755
398	Kab. Bima	0	28.888	0	28.888
399	Kab. Dompu	0	58.026	0	58.026
400	Kab. Lombok Barat	0	9.375	0	9.375

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
401	Kab. Lombok Tengah	0	8.983	0	8.983
402	Kab. Lombok Timur	0	9.283	0	9.283
403	Kab. Sumbawa	119.042	79.620	0	198.662
404	Kota Mataram	0	7.304	0	7.304
405	Kota Bima	0	10.588	0	10.588
406	Kab. Sumbawa Barat	0	31.836	0	31.836
407	Kab. Lombok Utara	0	12.640	0	12.640
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0
409	Kab. Alor	0	0	0	0
410	Kab. Belu	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
411	Kab. Ende	0	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	0	0	0	0
413	Kab. Kupang	0	0	0	0
414	Kab. Lembata	0	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0	0
417	Kab. Sikka	0	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	0
419	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0	0

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IHPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	0
422	Kota Kupang	0	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0	0
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0
425	Kab. Nagekeo	0	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	0
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	0
430	Kab. Malaka	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
431	Provinsi Maluku	338.827	666.340	7.409.257	8.414.424
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	348.693	0	348.693
433	Kab. Maluku Tengah	118.411	179.369	0	297.780
434	Kab. Maluku Tenggara	0	66.635	0	66.635
435	Kab. Buru	0	724.459	0	724.459
436	Kota Ambon	0	84.530	0	84.530
437	Kab. Seram Bagian Barat	98.719	92.233	0	190.952
438	Kab. Seram Bagian Timur	291.113	97.217	0	388.330
439	Kab. Kepulauan Aru	0	67.607	0	67.607
440	Kota Tual	0	66.635	0	66.635

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	66.635	0	66.635
442	Kab. Buru Selatan	0	869.945	0	869.945
443	Provinsi Papua	347.039	868.393	4.395.319	5.610.751
444	Kab. Biak Numfor	0	108.550	0	108.550
445	Kab. Jayapura	99.471	564.844	0	664.315
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	108.550	0	108.550
447	Kota Jayapura	0	211.834	0	211.834
448	Kab. Sarmi	210.384	1.048.757	0	1.259.141
449	Kab. Keerom	0	604.602	0	604.602
450	Kab. Waropen	0	161.396	0	161.396

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DBPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
451	Kab. Supiori	0	108.550	0	108.550
452	Kab. Mamberamo Raya	210.706	295.679	0	506.385
453	Provinsi Maluku Utara	0	572.471	7.205.488	7.777.959
454	Kab. Halmahera Tengah	0	466.939	0	466.939
455	Kota Ternate	0	63.609	0	63.609
456	Kab. Halmahera Barat	0	113.600	0	113.600
457	Kab. Halmahera Timur	0	331.680	0	331.680
458	Kab. Halmahera Selatan	0	545.916	0	545.916
459	Kab. Halmahera Utara	0	65.775	0	65.775
460	Kab. Kepulauan Sula	0	220.173	0	220.173

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
461	Kota Tidore Kepulauan	0	265.209	0	265.209
462	Kab. Pulau Morotai	0	63.609	0	63.609
463	Kab. Pulau Taliabu	0	153.377	0	153.377
464	Provinsi Banten	0	3.747.586	0	3.747.586
465	Kab. Lebak	0	3.440.183	0	3.440.183
466	Kab. Pandeglang	0	6.256.525	0	6.256.525
467	Kab. Serang	0	2.192.909	0	2.192.909
468	Kab. Tangerang	0	686.833	0	686.833
469	Kota Cilegon	0	536.334	0	536.334
470	Kota Tangerang	0	535.371	0	535.371

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
471	Kota Serang	0	536.334	0	536.334
472	Kota Tangerang Selatan	0	537.341	0	537.341
473	Provinsi Bangka Belitung	0	32.407	787.999	820.406
474	Kab. Bangka	0	7.317	0	7.317
475	Kab. Belitung	0	21.840	0	21.840
476	Kota Pangkal Pinang	0	6.241	0	6.241
477	Kab. Bangka Selatan	0	38.185	0	38.185
478	Kab. Bangka Tengah	0	26.988	0	26.988
479	Kab. Bangka Barat	0	5.647	0	5.647
480	Kab. Belitung Timur	0	20.884	0	20.884

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
481	Provinsi Gorontalo	0	425.486	6.437.973	6.863.459
482	Kab. Boalemo	0	185.300	0	185.300
483	Kab. Gorontalo	0	100.883	0	100.883
484	Kota Gorontalo	0	87.079	0	87.079
485	Kab. Pohuwato	0	764.849	0	764.849
486	Kab. Bone Bolango	0	103.761	0	103.761
487	Kab. Gorontalo Utara	0	259.042	0	259.042
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	216.736	4.324.485	4.541.221
489	Kab. Natuna	0	36.123	0	36.123
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	36.123	0	36.123

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
491	Kab. Karimun	0	79.414	0	79.414
492	Kota Batam	0	52.264	0	52.264
493	Kota Tanjung Pinang	0	141.315	0	141.315
494	Kab. Lingga	0	283.536	0	283.536
495	Kab. Bintan	0	229.362	0	229.362
496	Provinsi Papua Barat	0	1.881.519	12.272.608	14.154.127
497	Kab. Fak Fak	0	932.452	0	932.452
498	Kab. Manokwari	0	316.599	0	316.599
499	Kab. Teluk Bintuni	0	3.107.581	0	3.107.581
500	Kab. Teluk Wondama	0	899.200	0	899.200

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
501	Kab. Kaimana	0	825.087	0	825.087
502	Kab. Manokwari Selatan	0	538.426	0	538.426
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	490.734	0	490.734
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	6.635	86.534	93.169
505	Kab. Majene	0	2.501	0	2.501
506	Kab. Mamuju	0	3.144	0	3.144
507	Kab. Polewali Mandar	0	5.863	0	5.863
508	Kab. Mamasa	0	4.630	0	4.630
509	Kab. Pasangkayu	0	5.326	0	5.326
510	Kab. Mamuju Tengah	0	3.957	0	3.957

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	5.323.381	77.057.611	82.380.992
512	Kab. Bulungan	0	6.809.941	0	6.809.941
513	Kab. Malinau	0	5.769.712	0	5.769.712
514	Kab. Nunukan	0	4.532.776	0	4.532.776
515	Kota Tarakan	0	1.303.686	0	1.303.686
516	Kab. Tana Tidung	0	3.603.911	0	3.603.911
517	Provinsi Papua Selatan	703.009	1.092.532	19.774.080	21.569.621
518	Kab. Merauke	237.478	1.609.322	0	1.846.800
519	Kab. Boven Digoel	470.392	1.367.834	0	1.838.226
520	Kab. Mappi	199.826	793.364	0	993.190

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IHPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
521	Kab. Asmat	146.820	487.842	0	634.662
522	Provinsi Papua Tengah	0	665.119	4.676.372	5.341.491
523	Kab. Mimika	0	771.382	0	771.382
524	Kab. Nabire	0	715.035	0	715.035
525	Kab. Paniai	0	190.844	0	190.844
526	Kab. Puncak Jaya	0	97.120	0	97.120
527	Kab. Dogiyai	0	197.430	0	197.430
528	Kab. Puncak	0	139.299	0	139.299
529	Kab. Intan Jaya	0	186.949	0	186.949
530	Kab. Deiyai	0	134.381	0	134.381

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IIUPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	94.936	0	94.936
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	181.708	0	181.708
535	Kab. Tolikara	0	2.103	0	2.103
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	158.831	0	158.831
537	Kab. Yalimo	0	18.491	0	18.491
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	43.243	0	43.243
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	358.992	2.768.255	3.127.247

V.7 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IHPH	PSDH	DR	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
541	Kab. Sorong	0	491.979	0	491.979
542	Kab. Sorong Selatan	0	325.167	0	325.167
543	Kab. Raja Ampat	0	121.682	0	121.682
544	Kab. Tambrauw	0	325.455	0	325.455
545	Kab. Maybrat	0	529.172	0	529.172
546	Kota Sorong	0	137.334	0	137.334
547	Sebab Lebih	205.285	9.992.262	7.394.808	17.592.355
JUMLAH NASIONAL		9.628.872	366.603.871	369.741.085	745.973.828

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
1	Provinsi Aceh	0
2	Kab. Aceh Barat	313.966
3	Kab. Aceh Besar	527.593
4	Kab. Aceh Selatan	460.479
5	Kab. Aceh Singkil	724.243
6	Kab. Aceh Tengah	252.406
7	Kab. Aceh Tenggara	252.406
8	Kab. Aceh Timur	391.185
9	Kab. Aceh Utara	310.028
10	Kab. Bireuen	333.321
11	Kab. Pidie	318.502
12	Kab. Simeulue	838.987
13	Kota Banda Aceh	262.413
14	Kota Subang	386.492
15	Kota Langsa	260.951
16	Kota Lhokseumawe	270.014
17	Kab. Gayo Lues	252.406
18	Kab. Aceh Barat Daya	305.393
19	Kab. Aceh Jaya	423.218
20	Kab. Nagan Raya	340.607
21	Kab. Aceh Tamiang	310.116
22	Kab. Bener Meriah	242.104
23	Kab. Pidie Jaya	285.666
24	Kota Subulussalam	252.406
25	Provinsi Sumatera Utara	0
26	Kab. Asahan	313.413
27	Kab. Dairi	252.406
28	Kab. Deli Serdang	293.051
29	Kab. Karo	252.406
30	Kab. Labuhanbatu	299.327
31	Kab. Langkat	345.160
32	Kab. Mandailing Natal	458.274
33	Kab. Nias	364.018

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
34	Kab. Simalungun	247.255
35	Kab. Tapanuli Selatan	270.439
36	Kab. Tapanuli Tengah	567.512
37	Kab. Tapanuli Utara	252.406
38	Kab. Toba	252.406
39	Kota Binjai	247.255
40	Kota Medan	253.583
41	Kota Pematang Siantar	247.255
42	Kota Sibolga	248.596
43	Kota Tanjung Balai	247.255
44	Kota Tebing Tinggi	247.255
45	Kota Padang Sidempuan	247.255
46	Kab. Pakpak Bharat	252.406
47	Kab. Nias Selatan	1.081.243
48	Kab. Humbang Hasundutan	252.406
49	Kab. Serdang Bedagai	346.806
50	Kab. Samosir	252.406
51	Kab. Batu Bara	367.259
52	Kab. Padang Lawas	247.255
53	Kab. Padang Lawas Utara	253.406
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	252.406
55	Kab. Labuhanbatu Utara	267.363
56	Kab. Nias Utara	502.031
57	Kab. Nias Barat	360.936
58	Kota Gunungsitoli	277.646
59	Provinsi Sumatera Barat	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	252.406
61	Kab. Agam	305.849
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.471.103
63	Kab. Padang Pariaman	314.753
64	Kab. Pasaman	252.406
65	Kab. Pesisir Selatan	673.550
66	Kab. Solok	247.255

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
67	Kab. Solok	252.406
68	Kab. Tanah Datar	247.255
69	Kota Bukit Tinggi	247.255
70	Kota Padang Panjang	247.255
71	Kota Padang	426.786
72	Kota Payakumbuh	247.255
73	Kota Sawahlunto	247.255
74	Kota Solok	247.255
75	Kota Pariaman	278.668
76	Kab. Pasaman Barat	379.736
77	Kab. Dharmasraya	247.255
78	Kab. Solok Selatan	252.406
79	Provinsi Riau	0
80	Kab. Bengkalis	617.455
81	Kab. Indragiri Hilir	541.368
82	Kab. Indragiri Hulu	247.255
83	Kab. Kampar	247.255
84	Kab. Kuantan Singingi	247.255
85	Kab. Pelalawan	371.034
86	Kab. Rokan Hilir	495.600
87	Kab. Rokan Hulu	247.255
88	Kab. Siak	288.852
89	Kota Dumai	322.148
90	Kota Pekanbaru	247.255
91	Kab. Kepulauan Meranti	538.923
92	Provinsi Jambi	0
93	Kab. Batang Hari	247.255
94	Kab. Bungo	252.406
95	Kab. Kerinci	252.406
96	Kab. Merangin	247.255
97	Kab. Muaro Jambi	247.255
98	Kab. Sarolangun	252.406
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	310.509

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	440.015
101	Kab. Tebo	247.255
102	Kota Jambi	247.255
103	Kota Sungai Penuh	252.406
104	Provinsi Sumatera Selatan	0
105	Kab. Lahat	247.255
106	Kab. Musi Banyuasin	247.255
107	Kab. Musi Rawas	252.406
108	Kab. Muara Enim	247.255
109	Kab. Ogan Komering Ilir	600.191
110	Kab. Ogan Komering Ulu	247.255
111	Kota Palembang	247.255
112	Kota Prabumulih	247.255
113	Kota Pagar Alam	252.406
114	Kota Lubuk Linggau	252.406
115	Kab. Banyuasin	500.660
116	Kab. Ogan Ilir	247.255
117	Kab. OKU Timur	247.255
118	Kab. OKU Selatan	247.255
119	Kab. Empat Lawang	247.255
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	252.406
121	Kab. Musi Rawas Utara	252.406
122	Provinsi Bengkulu	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	296.952
124	Kab. Bengkulu Utara	558.243
125	Kab. Rejang Lebong	252.406
126	Kota Bengkulu	306.245
127	Kab. Kaur	352.474
128	Kab. Seluma	322.374
129	Kab. Mukomuko	362.453
130	Kab. Lebong	252.406
131	Kab. Kepahiang	247.255
132	Kab. Bengkulu Tengah	262.316

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
133	Provinsi Lampung	0
134	Kab. Lampung Barat	295.149
135	Kab. Lampung Selatan	557.147
136	Kab. Lampung Tengah	247.255
137	Kab. Lampung Utara	247.255
138	Kab. Lampung Timur	409.652
139	Kab. Tanggamus	490.411
140	Kab. Tulang Bawang	327.340
141	Kab. Way Kanan	252.406
142	Kota Bandar Lampung	255.134
143	Kota Metro	247.255
144	Kab. Pesawaran	366.575
145	Kab. Pringsewu	247.255
146	Kab. Mesuji	247.255
147	Kab. Tulang Bawang Barat	247.255
148	Kab. Pesisir Barat	477.679
149	Provinsi DKI Jakarta	1.192.950
150	Provinsi Jawa Barat	0
151	Kab. Bandung	247.255
152	Kab. Bekasi	291.182
153	Kab. Bogor	247.255
154	Kab. Ciamis	252.406
155	Kab. Cianjur	328.915
156	Kab. Cirebon	316.908
157	Kab. Garut	330.236
158	Kab. Indramayu	443.353
159	Kab. Karawang	337.589
160	Kab. Kuningan	252.406
161	Kab. Majalengka	247.255
162	Kab. Purwakarta	247.255
163	Kab. Subang	297.372
164	Kab. Sukabumi	388.361
165	Kab. Sumedang	247.255

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
166	Kab. Tasikmalaya	295.178
167	Kota Bandung	247.255
168	Kota Bekasi	247.255
169	Kota Bogor	247.255
170	Kota Cirebon	253.951
171	Kota Depok	247.255
172	Kota Sukabumi	247.255
173	Kota Tasikmalaya	247.255
174	Kota Cimahi	242.104
175	Kota Banjar	247.255
176	Kab. Bandung Barat	247.255
177	Kab. Pangandaran	323.356
178	Provinsi Jawa Tengah	0
179	Kab. Banjarnegara	247.255
180	Kab. Banyumas	247.255
181	Kab. Batang	286.550
182	Kab. Blora	252.406
183	Kab. Boyolali	247.255
184	Kab. Brebes	308.940
185	Kab. Cilacap	348.429
186	Kab. Demak	290.447
187	Kab. Grobogan	247.255
188	Kab. Jepara	585.036
189	Kab. Karanganyar	252.406
190	Kab. Kebumen	314.656
191	Kab. Kendal	300.694
192	Kab. Klaten	247.255
193	Kab. Kudus	247.255
194	Kab. Magelang	247.255
195	Kab. Pati	304.892
196	Kab. Pekalongan	259.283
197	Kab. Pemalang	287.238
198	Kab. Purbalingga	247.255

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
199	Kab. Purworejo	271.041
200	Kab. Rembang	328.252
201	Kab. Semarang	247.255
202	Kab. Sragen	247.255
203	Kab. Sukoharjo	247.255
204	Kab. Tegal	273.474
205	Kab. Temanggung	247.255
206	Kab. Wonogiri	255.074
207	Kab. Wonosobo	252.406
208	Kota Magelang	247.255
209	Kota Pekalongan	254.139
210	Kota Salatiga	247.255
211	Kota Semarang	266.031
212	Kota Surakarta	247.255
213	Kota Tegal	253.019
214	Provinsi DI Yogyakarta	0
215	Kab. Bantul	263.814
216	Kab. Gunung Kidul	330.085
217	Kab. Kulon Progo	277.353
218	Kab. Sleman	247.255
219	Kota Yogyakarta	247.255
220	Provinsi Jawa Timur	0
221	Kab. Bangkalan	369.302
222	Kab. Banyuwangi	525.730
223	Kab. Blitar	296.324
224	Kab. Bojonegoro	252.406
225	Kab. Bondowoso	247.255
226	Kab. Gresik	419.205
227	Kab. Jember	407.156
228	Kab. Jombang	247.255
229	Kab. Kediri	252.406
230	Kab. Lamongan	290.330
231	Kab. Lumajang	290.491

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
232	Kab. Madiun	252.406
233	Kab. Magetan	247.255
234	Kab. Malang	359.586
235	Kab. Mojokerto	247.255
236	Kab. Nganjuk	247.255
237	Kab. Ngawi	247.255
238	Kab. Pacitan	323.669
239	Kab. Pamekasan	307.861
240	Kab. Pasuruan	276.329
241	Kab. Ponorogo	252.406
242	Kab. Probolinggo	333.769
243	Kab. Sampang	367.489
244	Kab. Sidoarjo	282.196
245	Kab. Situbondo	409.702
246	Kab. Sumenep	1.565.626
247	Kab. Trenggalek	358.223
248	Kab. Tuban	320.386
249	Kab. Tulungagung	278.714
250	Kota Blitar	247.255
251	Kota Kediri	247.255
252	Kota Madiun	247.255
253	Kota Malang	247.255
254	Kota Mojokerto	247.255
255	Kota Pasuruan	254.164
256	Kota Probolinggo	251.499
257	Kota Surabaya	272.238
258	Kota Batu	252.406
259	Provinsi Kalimantan Barat	0
260	Kab. Bengkayang	389.768
261	Kab. Landak	252.406
262	Kab. Kapuas Hulu	252.406
263	Kab. Ketapang	793.828
264	Kab. Sempawah	433.966

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
265	Kab. Sambas	471.042
266	Kab. Sanggau	247.255
267	Kab. Sintang	252.406
268	Kota Pontianak	247.255
269	Kota Singkawang	270.030
270	Kab. Sekadau	247.255
271	Kab. Melawi	252.406
272	Kab. Kayong Utara	1.153.245
273	Kab. Kubu Raya	494.684
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0
275	Kab. Barito Selatan	252.406
276	Kab. Barito Utara	252.406
277	Kab. Kapuas	283.261
278	Kab. Kotawaringin Barat	415.436
279	Kab. Kotawaringin Timur	344.952
280	Kota Palangkaraya	252.406
281	Kab. Katingan	339.360
282	Kab. Seruyan	416.870
283	Kab. Sukamara	335.091
284	Kab. Lamandau	252.406
285	Kab. Gunung Mas	247.255
286	Kab. Pulang Pisau	371.399
287	Kab. Murung Raya	252.406
288	Kab. Barito Timur	252.406
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0
290	Kab. Banjar	256.200
291	Kab. Barito Kuala	267.083
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	247.255
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	252.406
294	Kab. Hulu Sungai Utara	247.255
295	Kab. Kotabaru	1.159.897
296	Kab. Tabalong	252.406
297	Kab. Tanah Laut	455.096

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
298	Kab. Tapin	247.255
299	Kota Banjarbaru	247.255
300	Kota Banjarmasin	247.255
301	Kab. Balangan	252.406
302	Kab. Tanah Bumbu	358.026
303	Provinsi Kalimantan Timur	0
304	Kab. Berau	1.004.396
305	Kab. Kutai Kartanegara	561.763
306	Kab. Kutai Barat	252.406
307	Kab. Kutai Timur	639.640
308	Kab. Paser	437.572
309	Kota Balikpapan	297.636
310	Kota Bontang	292.280
311	Kota Samarinda	247.376
312	Kab. Penajam Paser Utara	319.548
313	Kab. Mahakam Ulu	252.406
314	Provinsi Sulawesi Utara	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	345.174
316	Kab. Minahasa	326.162
317	Kab. Kepulauan Sangihe	969.226
318	Kota Bitung	338.905
319	Kota Manado	307.439
320	Kab. Kepulauan Talaud	754.132
321	Kab. Minahasa Selatan	335.723
322	Kota Tomohon	247.255
323	Kab. Minahasa Utara	464.104
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	554.175
325	Kota Kotamobagu	247.255
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	376.996
327	Kab. Minahasa Tenggara	309.050
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	337.018
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	408.067
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
331	Kab. Banggai	1.054.377
332	Kab. Banggai Kepulauan	725.983
333	Kab. Buol	451.873
334	Kab. Toli-Toli	614.721
335	Kab. Donggala	712.081
336	Kab. Morowali	865.859
337	Kab. Poso	332.909
338	Kota Palu	269.228
339	Kab. Parigi Moutong	812.067
340	Kab. Tojo Una Una	952.758
341	Kab. Sigi	252.406
342	Kab. Banggai Laut	1.208.781
343	Kab. Morowali Utara	435.637
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0
345	Kab. Bantaeng	276.424
346	Kab. Barru	337.080
347	Kab. Bone	387.809
348	Kab. Bulukumba	377.293
349	Kab. Enrekang	252.406
350	Kab. Gowa	247.256
351	Kab. Jeneponto	327.062
352	Kab. Luwu	355.290
353	Kab. Luwu Utara	315.572
354	Kab. Maros	271.156
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.923.397
356	Kota Palopo	253.022
357	Kab. Luwu Timur	355.025
358	Kab. Pinrang	341.228
359	Kab. Sinjai	328.939
360	Kab. Kepulauan Selayar	1.640.737
361	Kab. Sidenreng Rappang	247.255
362	Kab. Soppeng	247.255
363	Kab. Takalar	395.631

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
364	Kab. Tana Toraja	252.406
365	Kab. Wajo	332.711
366	Kota Parepare	249.225
367	Kota Makassar	396.598
368	Kab. Toraja Utara	252.406
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0
370	Kab. Buton	431.909
371	Kab. Konawe	350.014
372	Kab. Kolaka	496.619
373	Kab. Muna	423.691
374	Kota Kendari	259.197
375	Kota Bau-bau	264.048
376	Kab. Konawe Selatan	464.429
377	Kab. Bombana	645.318
378	Kab. Wakatobi	774.334
379	Kab. Kolaka Utara	410.029
380	Kab. Konawe Utara	421.312
381	Kab. Buton Utara	466.899
382	Kab. Konawe Kepulauan	395.681
383	Kab. Kolaka Timur	252.406
384	Kab. Muna Barat	436.561
385	Kab. Buton Tengah	418.195
386	Kab. Buton Selatan	436.438
387	Provinsi Bali	0
388	Kab. Badung	326.069
389	Kab. Bangli	252.406
390	Kab. Buleleng	409.500
391	Kab. Gianyar	260.630
392	Kab. Jembrana	335.511
393	Kab. Karangasem	356.840
394	Kab. Klungkung	362.447
395	Kab. Tabanan	279.111
396	Kota Denpasar	263.584

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0
398	Kab. Bima	837.170
399	Kab. Dompu	443.341
400	Kab. Lombok Barat	383.346
401	Kab. Lombok Tengah	303.778
402	Kab. Lombok Timur	424.560
403	Kab. Sumbawa	904.399
404	Kota Mataram	255.399
405	Kota Bima	253.750
406	Kab. Sumbawa Barat	421.337
407	Kab. Lombok Utara	351.007
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0
409	Kab. Alor	832.463
410	Kab. Belu	273.483
411	Kab. Ende	477.476
412	Kab. Flores Timur	630.017
413	Kab. Kupang	693.242
414	Kab. Lembata	586.936
415	Kab. Manggarai	346.472
416	Kab. Ngada	352.663
417	Kab. Sikka	650.178
418	Kab. Sumba Barat	321.516
419	Kab. Sumba Timur	711.296
420	Kab. Timor Tengah Selatan	356.970
421	Kab. Timor Tengah Utara	302.523
422	Kota Kupang	260.570
423	Kab. Rote Ndao	617.249
424	Kab. Manggarai Barat	796.407
425	Kab. Nagekeo	347.582
426	Kab. Sumba Barat Daya	365.890
427	Kab. Sumba Tengah	331.426
428	Kab. Manggarai Timur	366.392
429	Kab. Sabu Raijua	463.374

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
430	Kab. Malaka	307.526
431	Provinsi Maluku	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	1.523.029
433	Kab. Maluku Tengah	1.380.313
434	Kab. Maluku Tenggara	776.662
435	Kab. Buru	492.901
436	Kota Ambon	319.682
437	Kab. Seram Bagian Barat	950.979
438	Kab. Seram Bagian Timur	1.178.746
439	Kab. Kepulauan Aru	1.571.559
440	Kota Tual	686.388
441	Kab. Maluku Barat Daya	1.975.119
442	Kab. Buru Selatan	612.982
443	Provinsi Papua	0
444	Kab. Biak Numfor	897.249
445	Kab. Jayapura	368.834
446	Kab. Kepulauan Yapen	1.020.561
447	Kota Jayapura	319.731
448	Kab. Sarmi	683.310
449	Kab. Keerom	252.406
450	Kab. Waropen	448.319
451	Kab. Supiori	597.870
452	Kab. Mamberamo Raya	532.362
453	Provinsi Maluku Utara	0
454	Kab. Halmahera Tengah	827.799
455	Kota Ternate	458.791
456	Kab. Halmahera Barat	496.348
457	Kab. Halmahera Timur	838.278
458	Kab. Halmahera Selatan	2.633.065
459	Kab. Halmahera Utara	682.322
460	Kab. Kepulauan Sula	803.034
461	Kota Tidore Kepulauan	451.738
462	Kab. Pulau Morotai	619.498

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
463	Kab. Pulau Taliabu	700.370
464	Provinsi Banten	0
465	Kab. Lebak	334.419
466	Kab. Pandeglang	698.756
467	Kab. Serang	433.436
468	Kab. Tangerang	274.607
469	Kota Cilegon	288.390
470	Kota Tangerang	247.255
471	Kota Serang	250.122
472	Kota Tangerang Selatan	247.255
473	Provinsi Bangka Belitung	0
474	Kab. Bangka	455.408
475	Kab. Belitung	812.654
476	Kota Pangkal Pinang	254.462
477	Kab. Bangka Selatan	667.690
478	Kab. Bangka Tengah	606.614
479	Kab. Bangka Barat	538.387
480	Kab. Belitung Timur	929.922
481	Provinsi Gorontalo	0
482	Kab. Boalemo	361.524
483	Kab. Gorontalo	300.142
484	Kota Gorontalo	256.883
485	Kab. Pohuwato	444.763
486	Kab. Bone Bolango	317.828
487	Kab. Gorontalo Utara	460.015
488	Provinsi Kepulauan Riau	0
489	Kab. Natuna	1.535.209
490	Kab. Kepulauan Anambas	1.298.433
491	Kab. Karimun	798.586
492	Kota Batam	731.919
493	Kota Tanjung Pinang	275.939
494	Kab. Lingga	1.595.787
495	Kab. Bintan	1.281.915

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
496	Provinsi Papua Barat	0
497	Kab. Fak Fak	960.249
498	Kab. Manokwari	430.960
499	Kab. Teluk Bintuni	704.497
500	Kab. Teluk Wondama	896.731
501	Kab. Kaimana	1.098.858
502	Kab. Manokwari Selatan	348.675
503	Kab. Pegunungan Arfak	252.406
504	Provinsi Sulawesi Barat	0
505	Kab. Majene	385.500
506	Kab. Mamuju	794.066
507	Kab. Polewali Mandar	317.067
508	Kab. Mamasa	252.406
509	Kab. Pasangkayu	418.690
510	Kab. Mamuju Tengah	327.811
511	Provinsi Kalimantan Utara	0
512	Kab. Bulungan	603.722
513	Kab. Malinau	252.406
514	Kab. Nunukan	425.368
515	Kota Tarakan	308.419
516	Kab. Tana Tidung	354.903
517	Provinsi Papua Selatan	0
518	Kab. Merauke	1.206.218
519	Kab. Boven Digoel	252.406
520	Kab. Mappi	392.197
521	Kab. Asmat	546.474
522	Provinsi Papua Tengah	0
523	Kab. Mimika	686.355
524	Kab. Nabire	923.470
525	Kab. Paniai	252.406
526	Kab. Puncak Jaya	252.406
527	Kab. Dogiyai	252.406
528	Kab. Puncak	247.255

V.8 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERIKANAN
1	2	3
529	Kab. Intan Jaya	247.255
530	Kab. Deiyai	242.104
531	Provinsi Papua Pegunungan	0
532	Kab. Jayawijaya	252.406
533	Kab. Yahukimo	247.255
534	Kab. Pegunungan Bintang	252.406
535	Kab. Tolikara	252.406
536	Kab. Mamberamo Tengah	242.104
537	Kab. Yalimo	252.406
538	Kab. Lanny Jaya	242.104
539	Kab. Nduga	242.104
540	Provinsi Papua Barat Daya	0
541	Kab. Sorong	730.372
542	Kab. Sorong Selatan	451.145
543	Kab. Raja Ampat	3.629.864
544	Kab. Tambrauw	557.116
545	Kab. Maybrat	252.406
546	Kota Sorong	306.552
547	Selisih Lebih	6.329.106
JUMLAH NASIONAL		218.493.091

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Provinsi Aceh	0	97.601	0	97.601
2	Kab. Aceh Barat	0	5.450	0	5.450
3	Kab. Aceh Besar	0	141.603	0	141.603
4	Kab. Aceh Selatan	0	5.450	0	5.450
5	Kab. Aceh Singkil	0	5.450	0	5.450
6	Kab. Aceh Tengah	0	5.450	0	5.450
7	Kab. Aceh Tenggara	0	5.450	0	5.450
8	Kab. Aceh Timur	0	5.450	0	5.450
9	Kab. Aceh Utara	0	5.339	0	5.339
10	Kab. Bireuen	0	5.450	0	5.450

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
11	Kab. Pidie	0	22.764	0	22.764
12	Kab. Simeulue	0	5.450	0	5.450
13	Kota Banda Aceh	0	22.300	0	22.300
14	Kota Sabang	0	82.427	0	82.427
15	Kota Langsa	0	5.339	0	5.339
16	Kota Lhokseumawe	0	5.339	0	5.339
17	Kab. Gayo Lues	0	5.450	0	5.450
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	5.450	0	5.450
19	Kab. Aceh Jaya	0	22.764	0	22.764
20	Kab. Nagan Raya	0	5.450	0	5.450

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
21	Kab. Aceh Tamiang	0	5.450	0	5.450
22	Kab. Bener Meriah	0	5.228	0	5.228
23	Kab. Pidie Jaya	0	5.450	0	5.450
24	Kota Subulussalam	0	5.450	0	5.450
25	Provinsi Sumatera Utara	2.178.509	190.609	0	2.369.118
26	Kab. Asahan	50.017	4.377	0	54.394
27	Kab. Dairi	51.059	4.468	0	55.527
28	Kab. Deli Serdang	50.017	4.377	0	54.394
29	Kab. Karo	51.059	4.468	0	55.527
30	Kab. Labuhanbatu	50.017	4.377	0	54.394

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
31	Kab. Langkat	51.059	4.468	0	55.527
32	Kab. Mandailing Natal	5.446.270	476.520	0	5.922.790
33	Kab. Nias	51.059	4.468	0	55.527
34	Kab. Simalungun	50.017	4.377	0	54.394
35	Kab. Tapanuli Selatan	459.530	40.208	0	499.738
36	Kab. Tapanuli Tengah	51.059	4.468	0	55.527
37	Kab. Tapanuli Utara	51.059	4.468	0	55.527
38	Kab. Toba	51.059	4.468	0	55.527
39	Kota Binjai	50.017	4.377	0	54.394
40	Kota Medan	50.017	4.377	0	54.394

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
41	Kota Pematang Siantar	50.017	4.377	0	54.394
42	Kota Sibolga	48.975	4.286	0	53.261
43	Kota Tanjung Balai	50.017	4.377	0	54.394
44	Kota Tebing Tinggi	50.017	4.377	0	54.394
45	Kota Padang Sidempuan	50.017	4.377	0	54.394
46	Kab. Pakpak Bharat	51.059	4.468	0	55.527
47	Kab. Nias Selatan	51.059	4.468	0	55.527
48	Kab. Humbang Hasundutan	51.059	4.468	0	55.527
49	Kab. Serdang Bedagai	50.017	4.377	0	54.394
50	Kab. Samosir	51.059	4.468	0	55.527

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
51	Kab. Batu Bara	50.017	4.377	0	54.394
52	Kab. Padang Lawas	450.152	39.387	0	489.539
53	Kab. Padang Lawas Utara	51.059	4.468	0	55.527
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	51.059	4.468	0	55.527
55	Kab. Labuhanbatu Utara	50.017	4.377	0	54.394
56	Kab. Nias Utara	50.017	4.377	0	54.394
57	Kab. Nias Barat	50.017	4.377	0	54.394
58	Kota Gunungsitoli	50.017	4.377	0	54.394
59	Provinsi Sumatera Barat	1.877.178	107.212	0	1.984.390
60	Kab. Lima Puluh Kota	78.217	4.468	0	82.685

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
61	Kab. Agam	78.217	4.468	0	82.685
62	Kab. Kepulauan Mentawai	78.217	4.468	0	82.685
63	Kab. Padang Pariaman	76.621	7.697	0	84.318
64	Kab. Pasaman	486.687	40.208	0	526.895
65	Kab. Pesisir Selatan	430.188	20.334	0	450.522
66	Kab. Sijunjung	76.621	7.697	0	84.318
67	Kab. Soluk	430.188	96.588	0	526.776
68	Kab. Tanah Datar	76.621	7.697	0	84.318
69	Kota Bukit Tinggi	76.621	4.377	0	80.998
70	Kota Padang Panjang	76.621	4.377	0	80.998



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
71	Kota Padang	78.217	7.857	0	86.074
72	Kota Payakumbuh	76.621	4.377	0	80.998
73	Kota Sawahlunto	76.621	7.697	0	84.318
74	Kota Solok	76.621	7.697	0	84.318
75	Kota Pariaman	76.621	4.377	0	80.998
76	Kab. Pasaman Barat	476.755	39.387	0	516.142
77	Kab. Dharmasraya	421.409	19.919	0	441.328
78	Kab. Solok Selatan	4.692.943	191.773	0	4.884.716
79	Provinsi Riau	0	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
81	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0
82	Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	0
83	Kab. Kampar	0	0	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0
85	Kab. Pelalawan	0	0	0	0
86	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	0
87	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	0
88	Kab. Siak	0	0	0	0
89	Kota Dumai	0	0	0	0
90	Kota Pekanbaru	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0
92	Provinsi Jambi	0	0	0	0
93	Kab. Batang Hari	0	0	0	0
94	Kab. Bungo	0	0	0	0
95	Kab. Kerinci	351.971	12.478	0	364.449
96	Kab. Merangin	0	0	0	0
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0
98	Kab. Sarolangun	0	0	0	0
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
101	Kab. Tebo	0	0	0	0
102	Kota Jambi	0	0	0	0
103	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.262.932	106.720	0	1.369.652
105	Kab. Lahat	324.182	27.395	0	351.577
106	Kab. Musi Banyuasin	57.993	4.901	0	62.894
107	Kab. Musi Rawas	136.619	13.924	0	150.543
108	Kab. Muara Enim	2.594.845	219.269	0	2.814.114
109	Kab. Ogan Komering Ilir	57.993	4.901	0	62.894
110	Kab. Ogan Komering Ulu	123.315	10.422	0	133.737

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
111	Kota Palembang	123.315	10.422	0	133.737
112	Kota Prabumulih	123.315	10.422	0	133.737
113	Kota Pagar Alam	525.365	44.395	0	569.760
114	Kota Lubuk Linggau	59.201	9.623	0	68.824
115	Kab. Banyuasin	123.315	10.422	0	133.737
116	Kab. Ogan Ilir	123.315	10.422	0	133.737
117	Kab. OKU Timur	57.993	4.901	0	62.894
118	Kab. OKU Selatan	123.315	10.422	0	133.737
119	Kab. Empat Lawang	68.509	18.051	0	86.560
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	125.884	10.639	0	136.523

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
121	Kab. Musi Rawas Utara	59.201	5.003	0	64.204
122	Provinsi Bengkulu	0	53.788	0	53.788
123	Kab. Bengkulu Selatan	47.075	10.565	0	57.640
124	Kab. Bengkulu Utara	0	9.103	0	9.103
125	Kab. Rejang Lebong	0	57.168	0	57.168
126	Kota Bengkulu	0	6.587	0	6.587
127	Kab. Kaur	104.003	15.513	0	119.516
128	Kab. Seluma	10.298	7.320	0	17.618
129	Kab. Mukomuko	0	6.587	0	6.587
130	Kab. Lebong	0	9.103	0	9.103

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
131	Kab. Kepahiang	0	68.227	0	68.227
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	16.654	0	16.654
133	Provinsi Lampung	0	135.407	4.412.742	4.548.149
134	Kab. Lampung Barat	0	12.428	898.310	910.738
135	Kab. Lampung Selatan	0	88.882	231.573	320.455
136	Kab. Lampung Tengah	0	28.904	879.977	908.881
137	Kab. Lampung Utara	0	11.528	231.573	243.101
138	Kab. Lampung Timur	0	17.380	236.398	253.778
139	Kab. Tanggamus	0	31.794	11.031.853	11.063.647
140	Kab. Tulang Bawang	0	11.528	231.573	243.101

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
141	Kab. Way Kanan	0	11.768	236.398	248.166
142	Kota Bandar Lampung	0	75.236	231.573	306.809
143	Kota Metro	0	11.528	231.573	243.101
144	Kab. Pesawaran	0	172.469	879.977	1.052.446
145	Kab. Pringsewu	0	23.406	879.977	903.383
146	Kab. Mesuji	0	11.528	231.573	243.101
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	11.528	231.573	243.101
148	Kab. Pesisir Barat	0	12.428	898.310	910.738
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	88.773	87.908.243	87.997.016

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 + 5
151	Kab. Bandung	0	13.665	107.364.164	107.377.829
152	Kab. Bekasi	0	4.118	3.315.887	3.320.005
153	Kab. Bogor	0	10.247	36.240.430	36.250.677
154	Kab. Ciamis	0	4.294	2.588.645	2.592.939
155	Kab. Cianjur	0	12.641	14.189.778	14.202.419
156	Kab. Cirebon	0	4.206	2.535.816	2.540.022
157	Kab. Garut	0	4.364	56.848.141	56.852.505
158	Kab. Indramayu	0	8.513	2.535.816	2.544.329
159	Kab. Karawang	0	10.564	3.386.438	3.397.002
160	Kab. Kuningan	0	4.294	2.588.645	2.592.939

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
161	Kab. Majalengka	0	4.206	2.535.816	2.540.022
162	Kab. Purwakarta	0	37.695	3.386.438	3.424.133
163	Kab. Subang	0	76.570	6.989.475	7.066.045
164	Kab. Sukabumi	0	46.157	37.466.518	37.512.675
165	Kab. Sumedang	0	8.671	10.779.495	10.788.166
166	Kab. Tasikmalaya	0	4.118	7.283.628	7.287.746
167	Kota Bandung	0	6.599	6.989.475	6.996.074
168	Kota Bekasi	0	4.206	3.386.438	3.390.644
169	Kota Bogor	0	4.206	3.386.438	3.390.644
170	Kota Cirebon	0	4.206	2.535.816	2.540.022

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
171	Kota Depok	0	4.206	3.386.438	3.390.644
172	Kota Sukabumi	0	8.197	5.095.476	5.103.673
173	Kota Tasikmalaya	0	4.206	2.535.816	2.540.022
174	Kota Cimahi	0	6.462	6.843.860	6.850.322
175	Kota Banjar	0	4.206	2.535.816	2.540.022
176	Kab. Bandung Barat	0	45.970	6.989.475	7.035.445
177	Kab. Pangandaran	0	4.206	2.535.816	2.540.022
178	Provinsi Jawa Tengah	0	97.301	0	97.301
179	Kab. Banjarnegara	0	3.499	0	3.499
180	Kab. Banyumas	0	3.499	0	3.499

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
181	Kab. Batang	0	4.178	0	4.178
182	Kab. Blora	0	3.572	0	3.572
183	Kab. Boyolali	0	14.018	0	14.018
184	Kab. Brebes	0	3.572	0	3.572
185	Kab. Cilacap	0	3.499	0	3.499
186	Kab. Demak	0	9.525	0	9.525
187	Kab. Grobogan	0	9.652	0	9.652
188	Kab. Jepara	0	3.499	0	3.499
189	Kab. Karanganyar	0	3.702	0	3.702
190	Kab. Kebumen	0	3.499	0	3.499

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
191	Kab. Kendal	0	19.805	0	19.805
192	Kab. Klaten	0	3.626	0	3.626
193	Kab. Kudus	0	3.499	0	3.499
194	Kab. Magelang	0	49.013	0	49.013
195	Kab. Pati	0	3.499	0	3.499
196	Kab. Pekalongan	0	3.499	0	3.499
197	Kab. Pemalang	0	3.499	0	3.499
198	Kab. Purbalingga	0	3.499	0	3.499
199	Kab. Purworejo	0	5.301	0	5.301
200	Kab. Rembang	0	3.499	0	3.499

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
201	Kab. Semarang	0	135.197	0	135.197
202	Kab. Sragen	0	3.626	0	3.626
203	Kab. Sukoharjo	0	3.626	0	3.626
204	Kab. Tegal	0	3.499	0	3.499
205	Kab. Temanggung	0	25.987	0	25.987
206	Kab. Wonogiri	0	3.499	0	3.499
207	Kab. Wonosobo	0	7.458	0	7.458
208	Kota Magelang	0	5.301	0	5.301
209	Kota Pekalongan	0	3.499	0	3.499
210	Kota Salatiga	0	11.181	0	11.181

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
211	Kota Semarang	0	10.204	0	10.204
212	Kota Surakarta	0	3.626	0	3.626
213	Kota Tegal	0	3.499	0	3.499
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	0	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	3.155	0	3.155
218	Kab. Sleman	0	1.804	0	1.804
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	234.930	219.453	0	454.383

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
221	Kab. Bangkalan	4.666	4.359	0	9.025
222	Kab. Banyuwangi	63.495	96.250	0	159.745
223	Kab. Blitar	4.666	4.655	0	9.321
224	Kab. Bojonegoro	4.763	4.450	0	9.213
225	Kab. Bondowoso	177.266	421.142	0	598.408
226	Kab. Gresik	4.666	5.431	0	10.097
227	Kab. Jember	4.666	40.657	0	45.323
228	Kab. Jombang	4.666	5.727	0	10.393
229	Kab. Kediri	4.763	4.752	0	9.515
230	Kab. Lamongan	4.666	5.431	0	10.097

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
231	Kab. Lumajang	4.666	4.655	0	9.321
232	Kab. Madiun	4.763	4.450	0	9.213
233	Kab. Magetan	4.666	4.359	0	9.025
234	Kab. Malang	4.763	15.873	0	20.636
235	Kab. Mojokerto	4.666	30.358	0	35.024
236	Kab. Nganjuk	4.666	4.359	0	9.025
237	Kab. Ngawi	4.666	4.359	0	9.025
238	Kab. Pacitan	4.666	4.359	0	9.025
239	Kab. Pamekasan	4.666	4.359	0	9.025
240	Kab. Pasuruan	4.666	24.458	0	29.124

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
241	Kab. Ponorogo	4.763	4.450	0	9.213
242	Kab. Probolinggo	62.200	34.321	0	96.521
243	Kab. Sampang	4.666	4.359	0	9.025
244	Kab. Sidoarjo	4.666	6.486	0	11.152
245	Kab. Situbondo	460.270	41.093	0	501.363
246	Kab. Sumenep	4.666	4.359	0	9.025
247	Kab. Trenggalek	4.763	4.450	0	9.213
248	Kab. Tuban	4.666	4.359	0	9.025
249	Kab. Tulungagung	4.666	4.359	0	9.025
250	Kota Blitar	4.666	4.359	0	9.025

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
251	Kota Kediri	4.666	4.359	0	9.025
252	Kota Madiun	4.666	4.359	0	9.025
253	Kota Malang	4.666	4.655	0	9.321
254	Kota Mojokerto	4.666	5.431	0	10.097
255	Kota Pasuruan	4.666	5.414	0	10.080
256	Kota Probolinggo	4.666	4.359	0	9.025
257	Kota Surabaya	4.666	4.359	0	9.025
258	Kota Batu	4.763	23.189	0	27.952
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
261	Kab. Landak	0	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0	0
265	Kab. Sambas	0	0	0	0
266	Kab. Sanggau	0	0	0	0
267	Kab. Sintang	0	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
271	Kab. Melawi	0	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	0
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
281	Kab. Ketingan	0	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0	0
283	Kab. Sukamara	0	0	0	0
284	Kab. Lamandau	0	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	0
296	Kab. Tabalong	0	0	0	0
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	0
298	Kab. Tapin	0	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
301	Kab. Balangan	0	0	0	0
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	0
304	Kab. Berau	0	0	0	0
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	0
306	Kab. Kutai Barat	0	0	0	0
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	0
308	Kab. Paser	0	0	0	0
309	Kota Balikpapan	0	0	0	0
310	Kota Bontang	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
311	Kota Samarinda	0	0	0	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	0
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	28.520	3.774.107	3.802.627
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	14.420	224.901	239.321
316	Kab. Minahasa	0	3.556	5.532.260	5.535.816
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	2.429	198.059	200.488
318	Kota Bitung	0	2.480	205.771	208.251
319	Kota Manado	0	2.429	495.472	497.901
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	2.480	202.185	204.665

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
321	Kab. Minahasa Selatan	0	17.226	684.301	701.527
322	Kota Tomohon	0	2.429	5.275.663	5.278.092
323	Kab. Minahasa Utara	0	2.429	487.352	489.781
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	2.480	202.185	204.665
325	Kota Kotamobagu	0	8.031	198.059	206.090
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	3.075	202.185	205.260
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	6.068	481.829	487.897
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	37.991	225.844	263.835
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	5.639	202.185	207.824
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
331	Kab. Banggai	0	0	0	0
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0
333	Kab. Buol	0	0	0	0
334	Kab. Toli-Toli	0	0	0	0
335	Kab. Donggala	0	0	0	0
336	Kab. Morowali	0	0	0	0
337	Kab. Poso	0	0	0	0
338	Kota Palu	0	0	0	0
339	Kab. Parigi Moutong	0	0	0	0
340	Kab. Tojo Una Una	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
341	Kab. Sigi	0	0	0	0
342	Kab. Banggai Laut	0	0	0	0
343	Kab. Morowali Utara	0	0	0	0
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0	0
345	Kab. Bantaeng	0	0	0	0
346	Kab. Barru	0	0	0	0
347	Kab. Bone	0	0	0	0
348	Kab. Bulukumba	0	0	0	0
349	Kab. Enrekang	0	0	0	0
350	Kab. Gowa	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
351	Kab. Jeneponto	0	0	0	0
352	Kab. Luwu	0	0	0	0
353	Kab. Luwu Utara	0	0	0	0
354	Kab. Maros	0	0	0	0
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	0	0	0
356	Kota Palopo	0	0	0	0
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	0
358	Kab. Pinrang	0	0	0	0
359	Kab. Sinjai	0	0	0	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	0	0
362	Kab. Soppeng	0	0	0	0
363	Kab. Takalar	0	0	0	0
364	Kab. Tana Toraja	0	0	0	0
365	Kab. Wajo	0	0	0	0
366	Kota Pare-pare	0	0	0	0
367	Kota Makassar	0	0	0	0
368	Kab. Toraja Utara	0	0	0	0
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
370	Kab. Buton	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
371	Kab. Konawe	0	0	0	0
372	Kab. Kolaka	0	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0
375	Kota Bau-bau	0	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	0
377	Kab. Bombana	0	0	0	0
378	Kab. Wakatobi	0	0	0	0
379	Kab. Kolaka Utara	0	0	0	0
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0	0
387	Provinsi Bali	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0	0
393	Kab. Karangasem	0	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	26.029	0	26.029
398	Kab. Bima	0	18.072	0	18.072
399	Kab. Dompu	0	47.159	0	47.159
400	Kab. Lombok Barat	0	3.400	0	3.400

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
401	Kab. Lombok Tengah	0	3.400	0	3.400
402	Kab. Lombok Timur	0	3.400	0	3.400
403	Kab. Sumbawa	0	11.963	0	11.963
404	Kota Mataram	0	3.400	0	3.400
405	Kota Bima	0	4.644	0	4.644
406	Kab. Sumbawa Barat	0	3.471	0	3.471
407	Kab. Lombok Utara	0	3.400	0	3.400
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	316.056	248.857	0	564.913
409	Kab. Alor	11.289	8.889	0	20.178
410	Kab. Belu	11.059	8.708	0	19.767

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
411	Kab. Ende	419.091	303.680	0	722.771
412	Kab. Flores Timur	11.289	8.889	0	20.178
413	Kab. Kupang	11.289	8.889	0	20.178
414	Kab. Lembata	11.289	136.408	0	147.697
415	Kab. Manggarai	382.335	159.148	0	541.483
416	Kab. Ngada	11.289	84.808	0	96.097
417	Kab. Sikka	74.058	57.249	0	131.307
418	Kab. Sumba Barat	11.289	8.889	0	20.178
419	Kab. Sumba Timur	11.059	8.708	0	19.767
420	Kab. Timor Tengah Selatan	11.289	8.889	0	20.178

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
421	Kab. Timor Tengah Utara	11.289	8.889	0	20.178
422	Kota Kupang	11.059	8.708	0	19.767
423	Kab. Rote Ndao	11.059	8.708	0	19.767
424	Kab. Manggarai Barat	67.040	29.657	0	96.697
425	Kab. Nagekeo	72.546	62.522	0	135.068
426	Kab. Sumba Barat Daya	11.059	8.708	0	19.767
427	Kab. Sumba Tengah	11.059	8.708	0	19.767
428	Kab. Manggarai Timur	67.040	36.232	0	103.272
429	Kab. Sabu Raijua	11.059	8.708	0	19.767
430	Kab. Malaka	11.059	8.708	0	19.767

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
431	Provinsi Maluku	0	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	0
433	Kab. Maluku Tengah	0	0	0	0
434	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	0
435	Kab. Buru	0	0	0	0
436	Kota Ambon	0	0	0	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	0	0
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0
440	Kota Tual	0	0	0	0

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	0
442	Kab. Buru Selatan	0	0	0	0
443	Provinsi Papua	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0	0
448	Kab. Sarmi	0	0	0	0
449	Kab. Keerom	0	0	0	0
450	Kab. Waropen	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
451	Kab. Supiori	0	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	64.058	0	64.058
454	Kab. Halmahera Tengah	0	32.563	0	32.563
455	Kota Ternate	0	8.542	0	8.542
456	Kab. Halmahera Barat	0	8.542	0	8.542
457	Kab. Halmahera Timur	0	8.542	0	8.542
458	Kab. Halmahera Selatan	0	131.317	0	131.317
459	Kab. Halmahera Utara	0	8.542	0	8.542
460	Kab. Kepulauan Sula	0	8.542	0	8.542

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
461	Kota Tidore Kepulauan	0	32.563	0	32.563
462	Kab. Pulau Morotai	0	8.542	0	8.542
463	Kab. Pulau Taliabu	0	8.542	0	8.542
464	Provinsi Banten	0	158.271	0	158.271
465	Kab. Lebak	0	72.554	3.410.284	3.482.838
466	Kab. Pandeglang	0	189.808	0	189.808
467	Kab. Serang	0	205.188	0	205.188
468	Kab. Tangerang	0	38.609	850.623	889.232
469	Kota Cilegon	0	38.609	0	38.609
470	Kota Tangerang	0	26.850	0	26.850

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
471	Kota Serang	0	38.609	0	38.609
472	Kota Tangerang Selatan	0	26.850	850.623	877.473
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	0
475	Kab. Belitung	0	0	0	0
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0
477	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	0
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	0
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	0	0	0	0
484	Kota Gorontalo	0	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0
489	Kab. Natuna	0	0	0	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
491	Kab. Karimun	0	0	0	0
492	Kota Batam	0	0	0	0
493	Kota Tanjung Pinang	0	0	0	0
494	Kab. Lingga	0	0	0	0
495	Kab. Bintan	0	0	0	0
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	0	0	0	0
498	Kab. Manokwari	0	0	0	0
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	0
500	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
501	Kab. Kaimana	0	0	0	0
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0
505	Kab. Majene	0	0	0	0
506	Kab. Mamuju	0	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	0	0	0
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0
512	Kab. Bulungan	0	0	0	0
513	Kab. Malinau	0	0	0	0
514	Kab. Nunukan	0	0	0	0
515	Kota Tarakan	0	0	0	0
516	Kab. Tana Tidung	0	0	0	0
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
521	Kab. Asmat	0	0	0	0
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	0
528	Kab. Puncak	0	0	0	0
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	0
535	Kab. Tolikara	0	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0
537	Kab. Yalimo	0	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	0	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.9 RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	IURAN PRODUKSI	IURAN TETAP	SETORAN BAGIAN PEMERINTAH	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
541	Kab. Sorong	0	0	0	0
542	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	0
543	Kab. Raja Ampat	0	0	0	0
544	Kab. Tambrauw	0	0	0	0
545	Kab. Maybrat	0	0	0	0
546	Kota Sorong	0	0	0	0
547	Selisih Lebih	763.305	246.680	19.781.994	20.791.979
JUMLAH NASIONAL		29.946.973	8.315.093	499.625.072	537.887.138

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
1	Provinsi Aceh	8.056.583
2	Kab. Aceh Barat	1.543.754
3	Kab. Aceh Besar	585.457
4	Kab. Aceh Selatan	1.774.615
5	Kab. Aceh Singkil	2.158.991
6	Kab. Aceh Tengah	556.094
7	Kab. Aceh Tenggara	1.409.539
8	Kab. Aceh Timur	2.309.224
9	Kab. Aceh Utara	1.959.053
10	Kab. Bireuen	1.343.917
11	Kab. Pidie	1.101.049
12	Kab. Simeulue	697.642
13	Kota Banda Aceh	400.000
14	Kota Sabang	0
15	Kota Langsa	1.615.787
16	Kota Lhokseumawe	953.568
17	Kab. Gayo Lues	916.439
18	Kab. Aceh Barat Daya	1.275.428
19	Kab. Aceh Jaya	1.284.547
20	Kab. Nagan Raya	2.523.047
21	Kab. Aceh Tamiang	2.385.014
22	Kab. Bener Meriah	917.604
23	Kab. Pidie Jaya	953.954
24	Kota Subulussalam	1.568.646
25	Provinsi Sumatera Utara	15.226.554
26	Kab. Asahan	4.336.441
27	Kab. Dairi	1.508.376
28	Kab. Deli Serdang	2.364.591
29	Kab. Karo	1.871.073
30	Kab. Labuhanbatu	3.666.930
31	Kab. Langkat	3.684.300
32	Kab. Mandailing Natal	2.416.277
33	Kab. Nias	400.000
34	Kab. Simalungun	3.657.005
35	Kab. Tapanuli Selatan	2.955.732
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.062.904
37	Kab. Tapanuli Utara	1.545.079
38	Kab. Toba	1.476.687

V 10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
39	Kota Binjai	400.000
40	Kota Medan	400.000
41	Kota Pematang Siantar	400.000
42	Kota Sibolga	400.000
43	Kota Tanjung Balai	400.000
44	Kota Tebing Tinggi	400.000
45	Kota Padang Sidempuan	1.352.829
46	Kab. Pakpak Bharat	956.861
47	Kab. Nias Selatan	611.378
48	Kab. Humbang Hasundutan	1.231.860
49	Kab. Serdang Bedagai	2.635.480
50	Kab. Samosir	400.000
51	Kab. Batu Bara	2.196.594
52	Kab. Padang Lawas	3.009.506
53	Kab. Padang Lawas Utara	3.913.229
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	4.209.488
55	Kab. Labuhanbatu Utara	4.099.612
56	Kab. Nias Utara	0
57	Kab. Nias Barat	400.000
58	Kota Gunungsitoli	0
59	Provinsi Sumatera Barat	6.912.499
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.872.080
61	Kab. Agam	2.287.033
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0
63	Kab. Padang Pariaman	1.256.535
64	Kab. Pasaman	2.249.643
65	Kab. Pesisir Selatan	2.535.763
66	Kab. Sijunjung	2.012.579
67	Kab. Solok	2.041.419
68	Kab. Tanah Datar	1.165.003
69	Kota Bukit Tinggi	400.000
70	Kota Padang Panjang	400.000
71	Kota Padang	838.178
72	Kota Payakumbuh	400.000
73	Kota Sawahlunto	742.261
74	Kota Solok	1.295.600
75	Kota Pariaman	664.188
76	Kab. Pasaman Barat	3.681.097

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
77	Kab. Dharmasraya	3.016.441
78	Kab. Solok Selatan	2.294.640
79	Provinsi Riau	20.689.214
80	Kab. Bengkalis	6.706.550
81	Kab. Indragiri Hilir	5.305.118
82	Kab. Indragiri Hulu	6.057.350
83	Kab. Kampar	10.985.748
84	Kab. Kuantan Singingi	6.589.503
85	Kab. Pelalawan	8.111.296
86	Kab. Rokan Hilir	6.589.074
87	Kab. Rokan Hulu	10.425.149
88	Kab. Siak	7.535.366
89	Kota Dumai	2.924.485
90	Kota Pekanbaru	2.566.678
91	Kab. Kepulauan Meranti	1.626.557
92	Provinsi Jambi	7.150.703
93	Kab. Batang Hari	4.145.164
94	Kab. Bungo	3.191.081
95	Kab. Kerinci	1.429.188
96	Kab. Merangin	3.196.262
97	Kab. Muaro Jambi	4.537.221
98	Kab. Sarolangun	2.974.068
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.881.399
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.466.216
101	Kab. Tebo	4.433.428
102	Kota Jambi	400.000
103	Kota Sungai Penuh	400.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	12.232.699
105	Kab. Lahat	2.105.017
106	Kab. Musi Banyuasin	6.512.756
107	Kab. Musi Rawas	4.098.153
108	Kab. Muara Enim	3.243.049
109	Kab. Ogan Komering Ilir	5.611.863
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.716.686
111	Kota Palembang	1.142.546
112	Kota Prabumulih	1.524.792
113	Kota Pagar Alam	1.010.711
114	Kota Lubuk Linggau	1.254.227

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
115	Kab. Banyuasin	5.746.187
116	Kab. Ogan Ilir	2.163.836
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.053.906
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.120.314
119	Kab. Empat Lawang	1.271.869
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.527.693
121	Kab. Musi Rawas Utara	2.691.586
122	Provinsi Bengkulu	5.566.984
123	Kab. Bengkulu Selatan	1.806.016
124	Kab. Bengkulu Utara	3.349.021
125	Kab. Rejang Lebong	1.779.016
126	Kota Bengkulu	1.320.503
127	Kab. Kaur	1.775.258
128	Kab. Seluma	2.339.834
129	Kab. Mukomuko	3.575.558
130	Kab. Lebong	991.283
131	Kab. Kepahiang	1.066.319
132	Kab. Bengkulu Tengah	2.180.143
133	Provinsi Lampung	4.336.812
134	Kab. Lampung Barat	1.144.957
135	Kab. Lampung Selatan	1.013.059
136	Kab. Lampung Tengah	1.703.618
137	Kab. Lampung Utara	996.070
138	Kab. Lampung Timur	1.119.438
139	Kab. Tanggamus	708.120
140	Kab. Tulang Bawang	1.700.097
141	Kab. Way Kanan	1.645.721
142	Kota Bandar Lampung	541.753
143	Kota Metro	400.000
144	Kab. Pesawaran	1.135.223
145	Kab. Pringsewu	775.912
146	Kab. Mesuji	2.288.709
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.540.831
148	Kab. Pesisir Barat	1.183.255
149	Provinsi DKI Jakarta	0
150	Provinsi Jawa Barat	2.096.828
151	Kab. Bandung	400.000
152	Kab. Bekasi	400.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
153	Kab. Bogor	1.265.005
154	Kab. Ciamis	400.000
155	Kab. Cianjur	590.837
156	Kab. Cirebon	0
157	Kab. Garut	721.428
158	Kab. Indramayu	400.000
159	Kab. Karawang	400.000
160	Kab. Kuningan	0
161	Kab. Majalengka	400.000
162	Kab. Purwakarta	400.000
163	Kab. Subang	1.242.740
164	Kab. Sukabumi	1.231.316
165	Kab. Sumedang	400.000
166	Kab. Tasikmalaya	708.487
167	Kota Bandung	0
168	Kota Bekasi	400.000
169	Kota Bogor	400.000
170	Kota Cirebon	0
171	Kota Depok	400.000
172	Kota Sukabumi	400.000
173	Kota Tasikmalaya	400.000
174	Kota Cimahi	0
175	Kota Banjar	628.390
176	Kab. Bandung Barat	400.000
177	Kab. Pangandaran	450.094
178	Provinsi Jawa Tengah	0
179	Kab. Banjarnegara	0
180	Kab. Banyumas	0
181	Kab. Batang	0
182	Kab. Blora	0
183	Kab. Boyolali	0
184	Kab. Brebes	0
185	Kab. Cilacap	400.000
186	Kab. Demak	0
187	Kab. Grobogan	0
188	Kab. Jepara	0
189	Kab. Karanganyar	0
190	Kab. Kebumen	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
191	Kab. Kendal	0
192	Kab. Klaten	0
193	Kab. Kudus	0
194	Kab. Magelang	0
195	Kab. Pati	0
196	Kab. Pekalongan	0
197	Kab. Pemalang	0
198	Kab. Purbalingga	0
199	Kab. Purworejo	0
200	Kab. Rembang	0
201	Kab. Semarang	0
202	Kab. Sragen	0
203	Kab. Sukoharjo	0
204	Kab. Tegal	0
205	Kab. Temanggung	0
206	Kab. Wonogiri	0
207	Kab. Wonosobo	0
208	Kota Magelang	0
209	Kota Pekalongan	0
210	Kota Salatiga	0
211	Kota Semarang	0
212	Kota Surakarta	0
213	Kota Tegal	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	0
215	Kab. Bantul	0
216	Kab. Gunung Kidul	0
217	Kab. Kulon Progo	0
218	Kab. Sleman	0
219	Kota Yogyakarta	0
220	Provinsi Jawa Timur	0
221	Kab. Bangkalan	0
222	Kab. Banyuwangi	0
223	Kab. Blitar	0
224	Kab. Bojonegoro	0
225	Kab. Bondowoso	0
226	Kab. Gresik	0
227	Kab. Jember	0
228	Kab. Jombang	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
229	Kab. Kediri	0
230	Kab. Lamongan	0
231	Kab. Lumajang	0
232	Kab. Madiun	0
233	Kab. Magetan	0
234	Kab. Malang	0
235	Kab. Mojokerto	0
236	Kab. Nganjuk	0
237	Kab. Ngawi	0
238	Kab. Pacitan	0
239	Kab. Pamekasan	0
240	Kab. Pasuruan	0
241	Kab. Ponorogo	0
242	Kab. Probolinggo	0
243	Kab. Sampang	0
244	Kab. Sidoarjo	0
245	Kab. Situbondo	0
246	Kab. Sumenep	0
247	Kab. Trenggalek	0
248	Kab. Tuban	0
249	Kab. Tulungagung	0
250	Kota Blitar	0
251	Kota Kediri	0
252	Kota Madiun	0
253	Kota Malang	0
254	Kota Mojokerto	0
255	Kota Pasuruan	0
256	Kota Probolinggo	0
257	Kota Surabaya	0
258	Kota Batu	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	14.331.717
260	Kab. Bengkayang	3.332.663
261	Kab. Landak	4.311.901
262	Kab. Kapuas Hulu	2.672.059
263	Kab. Ketapang	12.949.473
264	Kab. Mempawah	1.830.486
265	Kab. Sambas	3.058.308
266	Kab. Sanggau	7.715.103

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
267	Kab. Sintang	5.540.431
268	Kota Pontianak	400.000
269	Kota Singkawang	1.253.007
270	Kab. Sekadau	3.814.089
271	Kab. Melawi	3.067.591
272	Kab. Kayong Utara	2.439.506
273	Kab. Kubu Raya	4.384.538
274	Provinsi Kalimantan Tengah	14.889.648
275	Kab. Barito Selatan	1.295.339
276	Kab. Barito Utara	2.353.530
277	Kab. Kapuas	4.292.414
278	Kab. Kotawaringin Barat	6.588.870
279	Kab. Kotawaringin Timur	9.257.093
280	Kota Palangkaraya	1.291.541
281	Kab. Katingan	5.062.175
282	Kab. Seruyan	9.093.484
283	Kab. Sukamara	4.107.644
284	Kab. Lamandau	5.375.050
285	Kab. Gunung Mas	3.140.533
286	Kab. Pulang Pisau	3.311.024
287	Kab. Murung Raya	1.502.262
288	Kab. Barito Timur	2.028.707
289	Provinsi Kalimantan Selatan	5.813.577
290	Kab. Banjar	1.926.264
291	Kab. Barito Kuala	2.100.956
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.621.039
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	400.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	1.397.489
295	Kab. Kotabaru	3.625.245
296	Kab. Tabalong	1.512.390
297	Kab. Tanah Laut	1.976.400
298	Kab. Tapin	1.981.147
299	Kota Banjarbaru	834.304
300	Kota Banjarmasin	785.410
301	Kab. Balangan	1.312.431
302	Kab. Tanah Bumbu	2.955.039
303	Provinsi Kalimantan Timur	10.686.006
304	Kab. Berau	4.818.175

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
305	Kab. Kutai Kartanegara	6.115.530
306	Kab. Kutai Barat	4.086.567
307	Kab. Kutai Timur	10.443.895
308	Kab. Paser	4.354.315
309	Kota Balikpapan	1.328.505
310	Kota Bontang	1.836.190
311	Kota Samarinda	1.236.063
312	Kab. Penajam Paser Utara	2.382.261
313	Kab. Mahakam Ulu	2.344.481
314	Provinsi Sulawesi Utara	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0
316	Kab. Minahasa	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0
318	Kota Bitung	0
319	Kota Manado	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0
321	Kab. Minahasa Selatan	0
322	Kota Tomohon	0
323	Kab. Minahasa Utara	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0
325	Kota Kotamobagu	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	3.615.970
331	Kab. Banggai	1.567.550
332	Kab. Banggai Kepulauan	0
333	Kab. Buol	1.354.099
334	Kab. Toli-Toli	1.089.784
335	Kab. Donggala	1.727.861
336	Kab. Morowali	1.890.976
337	Kab. Poso	1.459.183
338	Kota Palu	400.000
339	Kab. Parigi Moutong	1.060.739
340	Kab. Tojo Una Una	1.022.084
341	Kab. Sigi	1.045.066
342	Kab. Banggai Laut	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
343	Kab. Morowali Utara	2.186.868
344	Provinsi Sulawesi Selatan	2.708.503
345	Kab. Bantaeng	400.000
346	Kab. Barru	400.000
347	Kab. Bone	809.390
348	Kab. Bulukumba	400.000
349	Kab. Enrekang	492.008
350	Kab. Gowa	489.878
351	Kab. Jeneponto	400.000
352	Kab. Luwu	696.311
353	Kab. Luwu Utara	2.069.163
354	Kab. Maros	400.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	400.000
356	Kota Palopo	439.145
357	Kab. Luwu Timur	1.490.081
358	Kab. Pinrang	550.964
359	Kab. Sinjai	478.230
360	Kab. Kepulauan Selayar	0
361	Kab. Sidenreng Rappang	608.697
362	Kab. Soppeng	751.618
363	Kab. Takalar	400.000
364	Kab. Tana Toraja	400.000
365	Kab. Wajo	891.424
366	Kota Pare-pare	400.000
367	Kota Makassar	400.000
368	Kab. Toraja Utara	400.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.107.216
370	Kab. Buton	400.000
371	Kab. Konawe	1.350.836
372	Kab. Kolaka	963.470
373	Kab. Muna	756.052
374	Kota Kendari	515.062
375	Kota Bau-bau	0
376	Kab. Konawe Selatan	804.534
377	Kab. Bombana	662.634
378	Kab. Wakatobi	0
379	Kab. Kolaka Utara	400.000
380	Kab. Konawe Utara	1.047.032

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT
MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
381	Kab. Buton Utara	400.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	0
383	Kab. Kolaka Timur	1.115.653
384	Kab. Muna Barat	477.101
385	Kab. Buton Tengah	400.000
386	Kab. Buton Selatan	0
387	Provinsi Bali	0
388	Kab. Badung	0
389	Kab. Bangli	0
390	Kab. Buleleng	0
391	Kab. Gianyar	0
392	Kab. Jembrana	0
393	Kab. Karangasem	0
394	Kab. Klungkung	0
395	Kab. Tabanan	0
396	Kota Denpasar	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0
398	Kab. Bima	0
399	Kab Dompu	0
400	Kab. Lombok Barat	0
401	Kab Lombok Tengah	0
402	Kab. Lombok Timur	0
403	Kab. Sumbawa	0
404	Kota Mataram	0
405	Kota Bima	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0
407	Kab. Lombok Utara	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0
409	Kab. Alor	0
410	Kab. Belu	0
411	Kab. Ende	0
412	Kab. Flores Timur	0
413	Kab. Kupang	0
414	Kab. Lembata	0
415	Kab. Manggarai	0
416	Kab. Ngada	0
417	Kab. Sikka	0
418	Kab. Sumba Barat	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
419	Kab. Sumba Timur	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0
421	Kab. Timor Tengah Utara	0
422	Kota Kupang	0
423	Kab. Rote Ndao	0
424	Kab. Manggarai Barat	0
425	Kab. Nagekeo	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0
427	Kab. Sumba Tengah	0
428	Kab. Manggarai Timur	0
429	Kab. Sabu Raijua	0
430	Kab. Malaka	0
431	Provinsi Maluku	465.034
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0
433	Kab. Maluku Tengah	1.084.951
434	Kab. Maluku Tenggara	0
435	Kab. Buru	0
436	Kota Ambon	400.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	400.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	519.957
439	Kab. Kepulauan Aru	0
440	Kota Tual	0
441	Kab. Maluku Barat Daya	0
442	Kab. Buru Selatan	0
443	Provinsi Papua	996.702
444	Kab. Biak Numfor	0
445	Kab. Jayapura	1.643.171
446	Kab. Kepulauan Yapen	0
447	Kota Jayapura	400.000
448	Kab. Sarmi	400.000
449	Kab. Keerom	1.597.236
450	Kab. Waropen	400.000
451	Kab. Supiori	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0
453	Provinsi Maluku Utara	400.000
454	Kab. Halmahera Tengah	400.000
455	Kota Ternate	0
456	Kab. Halmahera Barat	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
457	Kab. Halmahera Timur	0
458	Kab. Halmahera Selatan	1.099.163
459	Kab. Halmahera Utara	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0
461	Kota Tidore Kepulauan	400.000
462	Kab. Pulau Morotai	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0
464	Provinsi Banten	634.479
465	Kab. Lebak	1.251.160
466	Kab. Pandeglang	988.410
467	Kab. Serang	400.000
468	Kab. Tangerang	400.000
469	Kota Cilegon	0
470	Kota Tangerang	0
471	Kota Serang	0
472	Kota Tangerang Selatan	400.000
473	Provinsi Bangka Belitung	3.513.366
474	Kab. Bangka	2.893.550
475	Kab. Belitung	2.543.232
476	Kota Pangkal Pinang	400.197
477	Kab. Bangka Selatan	1.576.551
478	Kab. Bangka Tengah	2.141.677
479	Kab. Bangka Barat	2.027.639
480	Kab. Belitung Timur	2.621.997
481	Provinsi Gorontalo	915.450
482	Kab. Boalemo	1.415.217
483	Kab. Gorontalo	842.381
484	Kota Gorontalo	400.000
485	Kab. Pohuwato	972.949
486	Kab. Bone Bolango	400.000
487	Kab. Gorontalo Utara	400.000
488	Provinsi Kepulauan Riau	668.138
489	Kab. Natuna	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0
491	Kab. Karimun	1.134.839
492	Kota Batam	0
493	Kota Tanjung Pinang	400.000
494	Kab. Lingga	0

V.10 RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
495	Kab. Bintan	1.134.980
496	Provinsi Papua Barat	989.340
497	Kab. Fak Fak	1.268.119
498	Kab. Manokwari	979.526
499	Kab. Teluk Bintuni	875.929
500	Kab. Teluk Wondama	400.000
501	Kab. Kaimana	400.000
502	Kab. Manokwari Selatan	400.000
503	Kab. Pegunungan Arfak	400.000
504	Provinsi Sulawesi Barat	2.194.535
505	Kab. Majene	575.693
506	Kab. Mamuju	1.736.068
507	Kab. Polewali Mandar	717.734
508	Kab. Mamasa	400.000
509	Kab. Pasangkayu	2.398.179
510	Kab. Mamuju Tengah	1.740.286
511	Provinsi Kalimantan Utara	2.394.993
512	Kab. Bulungan	2.751.164
513	Kab. Malinau	3.031.131
514	Kab. Nunukan	2.816.980
515	Kota Tarakan	0
516	Kab. Tana Tidung	1.732.563
517	Provinsi Papua Selatan	1.241.689
518	Kab. Merauke	2.342.720
519	Kab. Boven Digoel	1.895.853
520	Kab. Mappi	477.931
521	Kab. Asmat	400.000
522	Provinsi Papua Tengah	664.123
523	Kab. Mimika	626.141
524	Kab. Nabire	1.323.380
525	Kab. Paniai	400.000
526	Kab. Puncak Jaya	0
527	Kab. Dogiyai	400.000
528	Kab. Puncak	400.000
529	Kab. Intan Jaya	400.000
530	Kab. Deiyai	400.000
531	Provinsi Papua Pegunungan	0
532	Kab. Jayawijaya	0

V.10. RINCIAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PERKEBUNAN SAWIT
1	2	3
533	Kab. Yahukimo	400.000
534	Kab. Pegunungan Bintang	400.000
535	Kab. Tolikara	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0
537	Kab. Yalimo	400.000
538	Kab. Lanny Jaya	0
539	Kab. Nduga	400.000
540	Provinsi Papua Barat Daya	622.358
541	Kab. Sorong	1.048.827
542	Kab. Sorong Selatan	1.029.852
543	Kab. Raja Ampat	400.000
544	Kab. Tambrauw	400.000
545	Kab. Maybrat	400.000
546	Kota Sorong	400.000
547	Selisih Lebih	15.067.980
JUMLAH NASIONAL		774.691.607

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Provinsi Aceh	1.767.514.725	0	16.828.437	26.674.135	1.811.017.297
2	Kab. Aceh Barat	611.706.363	0	9.754.310	14.591.766	636.052.439
3	Kab. Aceh Besar	876.503.215	0	6.748.793	21.345.317	904.597.325
4	Kab. Aceh Selatan	565.432.543	0	10.644.259	12.431.077	588.507.879
5	Kab. Aceh Singkil	448.029.473	0	10.458.882	10.133.340	468.621.695
6	Kab. Aceh Tengah	668.114.267	0	11.156.650	15.637.753	694.908.670
7	Kab. Aceh Tenggara	595.456.732	0	12.206.535	12.357.143	620.020.410
8	Kab. Aceh Timur	997.663.491	0	18.620.966	22.992.424	1.039.276.881
9	Kab. Aceh Utara	1.155.110.652	0	21.564.614	26.925.136	1.203.600.402
10	Kab. Bireuen	977.065.341	0	16.728.067	15.867.697	1.009.661.105

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
11	Kab. Pidie	1.039.311.149	0	16.315.213	26.504.874	1.082.131.236
12	Kab. Simeulue	459.346.652	0	8.404.860	9.663.784	477.415.296
13	Kota Banda Aceh	543.944.009	0	5.777.204	8.908.130	558.629.343
14	Kota Sabang	298.874.402	0	2.633.520	6.874.076	308.381.998
15	Kota Langsa	401.762.214	0	3.339.757	9.371.374	414.473.345
16	Kota Lhokseumawe	367.358.455	0	3.582.080	8.984.618	379.925.153
17	Kab. Gayo Lues	381.470.505	0	6.062.668	7.118.588	394.651.761
18	Kab. Aceh Barat Daya	474.829.228	0	8.315.093	10.170.525	493.314.846
19	Kab. Aceh Jaya	403.986.434	0	3.550.697	7.719.218	415.256.349
20	Kab. Nagan Raya	540.462.810	0	9.137.918	11.454.538	561.055.266

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
21	Kab. Aceh Tamiang	569.752.307	0	4.967.740	13.359.790	588.079.837
22	Kab. Bener Meriah	507.146.895	0	4.039.195	6.384.971	517.571.061
23	Kab. Pidie Jaya	456.432.074	0	7.312.893	10.962.073	474.707.040
24	Kota Subulussalam	270.316.461	0	6.124.608	5.602.302	282.043.371
25	Provinsi Sumatera Utara	2.516.619.123	0	60.597.918	25.674.574	2.602.891.615
26	Kab. Asahan	745.512.839	5.400.000	13.003.665	19.448.375	783.364.879
27	Kab. Dairi	516.844.986	1.600.000	4.870.351	7.150.432	530.465.769
28	Kab. Deli Serdang	1.493.400.794	2.800.000	14.545.924	26.056.427	1.536.803.145
29	Kab. Karo	689.176.039	2.000.000	6.396.128	5.313.176	702.885.343
30	Kab. Labuhanbatu	567.706.433	4.600.000	10.446.346	14.278.869	597.031.648

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
31	Kab. Langkat	1.061.177.897	7.400.000	18.551.963	28.356.409	1.115.486.269
32	Kab. Mandailing Natal	895.458.954	5.400.000	17.821.232	20.093.498	938.773.684
33	Kab. Nias	399.733.600	0	4.225.781	7.951.112	411.910.493
34	Kab. Simalungun	1.169.183.735	5.400.000	21.823.603	29.718.609	1.226.125.947
35	Kab. Tapanuli Selatan	551.656.676	7.400.000	5.215.548	12.484.371	576.756.595
36	Kab. Tapanuli Tengah	538.399.137	11.200.000	11.057.405	13.616.857	574.273.399
37	Kab. Tapanuli Utara	645.892.636	2.200.000	7.340.491	14.179.789	669.612.916
38	Kab. Toba	632.025.038	2.600.000	6.761.507	13.981.735	655.368.280
39	Kota Binjai	458.877.407	7.400.000	4.697.797	7.970.167	478.945.371
40	Kota Medan	1.689.600.132	30.200.000	14.684.899	0	1.734.485.031

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41	Kota Pematang Siantar	473.823.519	10.600.000	4.829.397	7.779.513	497.032.429
42	Kota Sibolga	332.209.869	3.400.000	3.754.062	8.820.752	348.184.703
43	Kota Tanjung Balai	339.905.155	6.200.000	2.974.237	8.879.561	357.958.953
44	Kota Tebing Tinggi	345.709.902	7.000.000	3.700 539	0	356.410.441
45	Kota Padang Sidempuan	391.661.101	7.400.000	3.658 926	9.912.216	412.632.243
46	Kab. Pakpak Bharat	281.968.634	0	2.111.669	4.636.132	288.716.435
47	Kab. Nias Selatan	644.883.131	400.000	21.637 525	15.758.107	682.678.763
48	Kab. Humbang Hasundutan	485.215.954	200.000	5.421.598	9.973.240	500.810.792
49	Kab. Serdang Bedagai	729.367.302	1.200.000	6.823.489	19.095.404	756.486.195
50	Kab. Samosir	396.494.784	1.200.000	0	7.920.188	405.614.972

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51	Kab. Batu Bara	483.090.419	2.000.000	9.487.603	12.616.151	507.194.173
52	Kab. Padang Lawas	516.228.505	200.000	9.898.978	11.346.754	537.674.237
53	Kab. Padang Lawas Utara	534.060.631	400.000	14.201.655	11.836.212	560.498.498
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	405.388.594	400.000	3.609.302	9.564.238	418.962.134
55	Kab. Labuhanbatu Utara	469.476.260	1.600.000	8.188.272	11.556.313	490.820.845
56	Kab. Nias Utara	312.721.196	200.000	5.757.050	6.104.546	324.782.792
57	Kab. Nias Barat	308.473.857	0	2.972.092	5.823.943	317.269.892
58	Kota Gunungsitoli	337.090.813	600.000	3.914.268	4.876.821	346.481.902
59	Provinsi Sumatera Barat	1.634.400.415	0	18.253.722	24.038.246	1.676.692.383
60	Kab. Lima Puluh Kota	627.815.193	0	5.321.897	15.148.509	648.285.599

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61	Kab. Agam	727.215.104	0	5.969.616	11.332.237	744.516.957
62	Kab. Kepulauan Mentawai	401.448.587	0	9.161.497	6.452.986	417.063.070
63	Kab. Padang Pariaman	717.498.413	0	5.835.798	15.663.535	738.997.746
64	Kab. Pasaman	566.710.737	0	5.755.946	13.322.116	585.788.799
65	Kab. Pesisir Selatan	913.606.637	0	15.826.404	13.295.904	942.728.945
66	Kab. Sijunjung	517.397.218	0	5.320.612	11.520.997	534.238.827
67	Kab. Solok	597.034.586	0	5.773.750	13.971.912	616.780.248
68	Kab. Tanah Datar	644.062.792	0	4.941.129	14.704.476	663.708.397
69	Kota Bukit Tinggi	364.380.154	4.800.000	0	8.948.053	378.128.207
70	Kota Padang Panjang	305.085.061	3.200.000	0	7.475.267	315.760.328

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
71	Kota Padang	1.018.306.798	20.800.000	10.403.864	18.385.961	1.067.896.623
72	Kota Payakumbuh	355.641.598	9.400.000	0	8.467.293	373.508.891
73	Kota Sawahlunto	304.876.310	2.000.000	2.360.931	4.031.986	313.269.227
74	Kota Solok	323.112.686	2.600.000	3.368.926	5.029.075	334.110.687
75	Kota Pariaman	324.021.851	3.200.000	3.292.655	7.571.665	338.086.171
76	Kab. Pasaman Barat	542.589.672	0	11.429.480	13.340.700	567.359.852
77	Kab. Dharmasraya	485.961.640	0	4.631.165	6.867.327	497.460.132
78	Kab. Solok Selatan	392.843.377	0	3.035.185	7.777.766	403.656.328
79	Provinsi Riau	1.295.177.479	0	13.308.446	12.336.789	1.320.822.714
80	Kab. Bengkalis	491.336.103	3.800.000	5.122.243	7.964.676	508.223.022

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81	Kab. Indragiri Hilir	920.375.576	7.800.000	16.388.645	24.102.550	968.666.771
82	Kab. Indragiri Hulu	625.542.023	3.200.000	6.131.847	14.003.009	648.876.879
83	Kab. Kampar	1.040.521.252	1.600.000	20.901.457	15.933.390	1.078.956.099
84	Kab. Kuantan Singingi	636.411.850	2.200.000	5.645.214	13.886.032	658.143.096
85	Kab. Pelalawan	641.769.045	2.800.000	6.865.040	14.617.682	666.051.767
86	Kab. Rokan Hilir	684.435.130	5.000.000	14.187.575	16.374.427	719.997.132
87	Kab. Rokan Hulu	755.023.342	1.200.000	7.978.451	16.917.488	781.119.281
88	Kab. Siak	688.163.063	1.800.000	6.897.339	10.330.845	707.191.247
89	Kota Dumai	405.681.847	7.200.000	3.851.032	3.144.558	419.877.437
90	Kota Pekanbaru	828.052.827	16.600.000	0	14.544.179	859.197.006

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91	Kab. Kepulauan Meranti	539.425.019	1.000.000	9.070.361	7.887.667	557.383.047
92	Provinsi Jambi	1.088.871.101	0	20.578.643	11.077.226	1.120.526.970
93	Kab. Batang Hari	483.140.689	2.800.000	4.740.372	7.265.752	497.946.813
94	Kab. Bungo	571.329.031	2.400.000	5.441.156	14.097.421	593.267.608
95	Kab. Kerinci	614.723.130	400.000	5.490.226	9.275.321	629.888.677
96	Kab. Merangin	704.835.384	2.000.000	13.637.214	16.554.865	737.027.463
97	Kab. Muaro Jambi	542.822.541	1.000.000	9.667.167	13.741.296	567.231.004
98	Kab. Sarolangun	594.164.520	1.800.000	6.081.688	13.006.552	615.052.760
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	443.602.047	4.000.000	8.083.482	10.133.476	465.819.005
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	424.204.188	4.000.000	3.634.183	9.148.128	440.986.499

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
101	Kab. Tebo	442.584.447	1.400.000	4.175.904	10.814.880	458.975.231
102	Kota Jambi	660.905.731	13.600.000	6.661.598	11.865.527	693.032.856
103	Kota Sungai Penuh	389.804.204	800.000	3.946.746	9.513.230	404.064.180
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.395.112.058	0	30.441.356	22.010.112	1.447.563.526
105	Kab. Lahat	909.103.798	3.600.000	16.581.583	21.608.762	950.894.143
106	Kab. Musi Banyuasin	543.287.704	2.600.000	6.129.278	13.229.405	565.246.387
107	Kab. Musi Rawas	640.671.818	2.600.000	5.745.575	9.802.265	658.819.658
108	Kab. Muara Enim	589.595.342	2.000.000	6.061.216	14.799.114	612.455.672
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.013.181.778	2.600.000	10.619.163	24.856.763	1.051.257.704
110	Kab. Ogan Komering Ulu	674.807.940	2.800.000	13.022.001	11.254.296	701.884.237

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
111	Kota Palembang	1.290.673.530	21.400.000	0	0	1.312.073.530
112	Kota Prabumulih	445.171.593	6.600.000	4.493.637	3.573.170	459.838.400
113	Kota Pagar Alam	358.456.239	7.000.000	3.176.099	5.503.151	374.135.489
114	Kota Lubuk Linggau	371.139.447	14.400.000	4.157.217	6.541.162	396.237.826
115	Kab. Banyuasin	1.063.034.206	5.000.000	22.826.924	18.044.378	1.108.905.508
116	Kab. Ogan Ilir	511.708.575	2.800.000	10.689.795	12.655.352	537.853.722
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	935.942.119	1.400.000	8.730.804	7.949.843	954.022.766
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	630.363.500	1.400.000	11.361.144	15.755.801	658.880.445
119	Kab. Empat Lawang	484.598.644	1.800.000	7.168.884	12.581.116	506.148.644
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	369.278.031	1.200.000	8.195.000	5.903.234	384.576.265

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
121	Kab. Musi Rawas Utara	304.777.995	1.400.000	6.259.009	7.462.385	319.899.389
122	Provinsi Bengkulu	1.007.965.071	0	18.666.429	0	1.026.631.500
123	Kab. Bengkulu Selatan	525.898.133	3.200.000	4.279.155	6.859.460	540.236.748
124	Kab. Bengkulu Utara	702.469.137	1.000.000	7.032.156	11.567.906	722.069.199
125	Kab. Rejang Lebong	508.651.469	6.800.000	4.741.544	8.316.888	528.509.901
126	Kota Bengkulu	535.693.239	13.400.000	5.253.319	8.593.284	562.939.842
127	Kab. Kaur	478.082.232	600.000	8.804.334	6.929.660	494.416.226
128	Kab. Seluma	567.342.366	4.000.000	9.993.435	13.525.742	594.861.543
129	Kab. Mukomuko	473.071.087	600.000	4.485.486	7.122.560	485.279.133
130	Kab. Lebong	382.018.850	2.200.000	6.579.568	5.615.214	396.413.632

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
131	Kab. Kepahiang	395.902.920	2.400.000	6.476.270	6.165.705	410.944.895
132	Kab. Bengkulu Tengah	406.387.078	200.000	3.574.079	9.396.429	419.557.586
133	Provinsi Lampung	1.662.482.982	0	34.566.825	17.675.709	1.714.725.516
134	Kab. Lampung Barat	489.492.437	1.000.000	8.606.629	8.154.149	507.253.215
135	Kab. Lampung Selatan	948.930.350	800.000	18.146.491	8.258.655	976.135.496
136	Kab. Lampung Tengah	1.226.907.912	2.000.000	11.850.413	21.710.977	1.262.469.302
137	Kab. Lampung Utara	878.586.904	3.000.000	15.692.537	7.539.794	904.819.235
138	Kab. Lampung Timur	1.040.502.519	0	19.148.473	9.140.074	1.068.791.066
139	Kab. Tanggamus	805.079.075	600.000	15.134.787	13.818.909	834.632.771
140	Kab. Tulang Bawang	587.215.395	800.000	5.979.927	9.564.800	603.560.122

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
141	Kab. Way Kanan	591.791.160	1.200.000	11.838.496	14.548.935	619.378.591
142	Kota Bandar Lampung	916.968.452	25.200.000	9.551.627	16.953.839	968.673.918
143	Kota Metro	377.530.705	4.400.000	4.256.281	2.945.498	389.132.484
144	Kab. Pesawaran	531.299.756	0	9.271.120	8.868.610	549.439.486
145	Kab. Pringsewu	567.382.416	1.000.000	5.333.188	4.745.620	578.461.224
146	Kab. Mesuji	387.892.383	0	3.952.284	6.185.241	398.029.908
147	Kab. Tulang Bawang Barat	376.745.926	600.000	7.273.181	3.092.517	387.711.624
148	Kab. Pesisir Barat	364.131.568	400.000	3.463.441	8.672.583	376.667.592
149	Provinsi DKI Jakarta	226.345.202	53.400.000	0	6.083.924	285.829.126
150	Provinsi Jawa Barat	3.262.933.542	0	48.727.551	50.371.765	3.362.032.858

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
151	Kab. Bandung	2.066.669.373	2.000.000	25.823.258	44.214.154	2.138.706.785
152	Kab. Bekasi	1.218.535.742	1.600.000	16.387.596	39.104.877	1.275.628.215
153	Kab. Bogor	2.150.768.082	3.800.000	28.322.144	69.867.325	2.252.757.551
154	Kab. Ciamis	1.106.914.440	1.400.000	0	23.259.890	1.131.574.330
155	Kab. Cianjur	1.659.684.156	1.200.000	21.727.879	52.037.027	1.734.649.062
156	Kab. Cirebon	1.663.361.963	2.400.000	18.428.487	36.097.860	1.720.288.310
157	Kab. Garut	1.915.916.055	4.200.000	26.089.847	60.864.036	2.007.069.938
158	Kab. Indramayu	1.337.652.689	1.600.000	31.993.939	44.467.484	1.415.714.112
159	Kab. Karawang	1.255.147.123	2.400.000	15.355.127	39.078.173	1.311.980.423
160	Kab. Kuningan	1.209.403.736	3.000.000	0	25.065.179	1.237.468.915

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
161	Kab. Majalengka	1.289.800.601	2.600.000	14.359.314	27.203.749	1.333.963.664
162	Kab. Purwakarta	706.283.407	1.800 000	8.642.178	22.014.245	738.739.830
163	Kab. Subang	1.082.004.999	1.600.000	12.805.758	33.970.652	1.130.381.409
164	Kab. Sukabumi	1.485.277.670	1 000 000	17.939.845	47.853.304	1.552.070.819
165	Kab. Sumedang	1.147.513.165	1 400 000	13.203.260	11.838.269	1.173.954.694
166	Kab. Tasikmalaya	1.437.144.225	0	15.963.629	46.402.619	1.499.510.473
167	Kota Bandung	1.440.839.505	30 200.000	0	31.272.827	1.502.312.332
168	Kota Bekasi	1.557.118.353	11.200.000	0	14.040.488	1.582.358.841
169	Kota Bogor	683.692.897	13.600.000	8.569.112	23.535.720	729.397.729
170	Kota Cirebon	491.907.274	4 400 000	0	15.243.134	511.550.408

V.1 t. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
171	Kota Depok	933.318.213	12.600.000	0	9.377.766	955.295.979
172	Kota Sukabumi	406.541.449	6.600.000	0	13.232.376	426.373.825
173	Kota Tasikmalaya	625.632.618	13.800.000	0	20.188.191	659.620.809
174	Kota Cimahi	480.406.775	3.000.000	0	10.688.833	494.095.608
175	Kota Banjar	387.613.479	1.800.000	0	0	389.413.479
176	Kab. Bandung Barat	1.030.126.430	0	12.193.762	34.227.227	1.076.547.419
177	Kab. Pangandaran	503.015.581	0	4.539.097	4.908.640	512.463.318
178	Provinsi Jawa Tengah	3.221.471.619	0	43.948.075	49.959.475	3.315.379.169
179	Kab. Banjarnegara	952.017.152	2.400.000	0	9.852.902	964.270.054
180	Kab. Banyumas	1.411.361.788	6.000.000	0	0	1.417.361.788

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
181	Kab. Batang	771.534.915	1.800.000	0	16.353.612	789.688.527
182	Kab. Blora	865.974.136	4.800.000	0	17.701.030	888.475.166
183	Kab. Boyolali	824.519.917	1.200.000	0	18.041.879	843.761.796
184	Kab. Brebes	1.431.459.603	1.000.000	14.666.953	31.211.939	1.478.338.495
185	Kab. Cilacap	1.210.560.754	3.000.000	0	12.874.645	1.226.435.399
186	Kab. Demak	853.410.216	1.200.000	0	8.849.865	863.460.081
187	Kab. Grobogan	1.016.484.919	1.400.000	0	10.693.528	1.028.578.447
188	Kab. Jepara	971.296.210	2.200.000	0	0	973.496.210
189	Kab. Karanganyar	809.150.956	3.000.000	0	8.233.900	820.384.856
190	Kab. Kebumen	1.300.648.800	2.200.000	0	13.622.731	1.316.471.531

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
191	Kab. Kendal	952.863.778	4.000.000	0	9.741.367	966.605.145
192	Kab. Klaten	1.233.285.550	2.000.000	0	0	1.235.285.550
193	Kab. Kudus	663.634.292	1.800.000	0	14.448.034	679.882.326
194	Kab. Magelang	1.072.581.117	1.000.000	0	11.466.420	1.085.047.537
195	Kab. Pati	1.204.863.452	1.000.000	0	0	1.205.863.452
196	Kab. Pekalongan	993.694.155	2.600.000	0	20.850.986	1.017.145.141
197	Kab. Pemalang	1.156.708.919	2.200.000	13.297.197	37.937.188	1.210.143.304
198	Kab. Purbalingga	927.040.036	3.000.000	0	0	930.040.036
199	Kab. Purworejo	1.123.465.020	5.000.000	0	0	1.128.465.020
200	Kab. Rembang	924.444.483	1.400.000	0	0	925.844.483

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
201	Kab. Semarang	828.808.789	5.400.000	0	0	834.208.789
202	Kab. Sragen	945.485.314	2.400.000	0	9.521.803	957.407.117
203	Kab. Sukoharjo	757.081.391	3.400.000	0	0	760.481.391
204	Kab. Tegal	1.015.679.558	1.200.000	10.667.601	11.040.517	1.038.587.676
205	Kab. Temanggung	820.558.578	4.600.000	0	8.604.122	833.762.700
206	Kab. Wonogiri	1.122.797.880	8.600.000	0	0	1.131.397.880
207	Kab. Wonosobo	827.119.980	5.800.000	0	0	832.919.980
208	Kota Magelang	379.596.907	3.400.000	0	0	382.996.907
209	Kota Pekalongan	383.993.365	5.400.000	0	8.340.275	397.733.640
210	Kota Salatiga	391.131.260	4.600.000	0	0	395.731.260

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
211	Kota Semarang	1.030.821.894	35.400.000	0	0	1.066.221.894
212	Kota Surakarta	709.651.145	10.800.000	0	7.217.232	727.668.377
213	Kota Tegal	407.700.574	5.400.000	0	4.056.096	417.156.670
214	Provinsi DI Yogyakarta	1.094.517.680	0	0	9.235.034	1.103.752.714
215	Kab. Bantul	905.814.689	0	0	8.649.465	914.464.154
216	Kab. Gunung Kidul	920.701.888	0	0	8.808.971	929.510.859
217	Kab. Kulon Progo	645.580.492	200.000	0	0	645.780.492
218	Kab. Sleman	842.391.984	0	0	8.537.741	850.929.725
219	Kota Yogyakarta	552.272.203	9.000.000	0	5.518.565	566.790.768
220	Provinsi Jawa Timur	3.485.291.064	0	47.158.102	37.306.334	3.569.755.500

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
221	Kab. Bangkalan	912.726.890	1.600.000	23.173.806	18.785.709	956.286.405
222	Kab. Banyuwangi	1.161.934.855	5.600.000	0	23.113.149	1.190.648.004
223	Kab. Blitar	999.976.770	5.600.000	0	10.374.038	1.015.950.808
224	Kab. Bojonegoro	1.196.180.546	2.200.000	0	26.307.358	1.224.687.904
225	Kab. Bondowoso	866.288.584	2.000.000	8.095.958	16.215.999	892.600.541
226	Kab. Gresik	784.695.092	5.200.000	0	8.539.195	798.434.287
227	Kab. Jember	1.580.615.988	4.400.000	15.187.718	49.851.157	1.650.054.863
228	Kab. Jombang	1.039.663.998	800.000	0	10.904.285	1.051.368.283
229	Kab. Kediri	1.263.134.434	200.000	0	13.327.596	1.276.662.030
230	Kab. Lamongan	1.320.382.056	2.400.000	0	14.661.525	1.337.443.581

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
231	Kab. Lumajang	800.348.018	1.400.000	0	25.157.584	826.905.602
232	Kab. Madiun	853.435.562	1.600.000	0	8.550.185	863.585.747
233	Kab. Magetan	878.999.462	5.600.000	0	0	884 599.462
234	Kab. Malang	1.534.101 917	2.400.000	0	32.925.246	1.569.427.163
235	Kab. Mojokerto	794.223.794	1.000.000	0	8.076.999	803.300.793
236	Kab. Nganjuk	1.007.401 745	4.000.000	0	9.955.095	1.021.356.840
237	Kab. Ngawi	941.697.392	800.000	0	0	942.497.392
238	Kab. Pacitan	736.736.259	1 000 000	0	6.522.522	744.258.781
239	Kab. Pamekasan	706.265.922	2 200 000	13.978.879	21.891.561	744.336.362
240	Kab. Pasuruan	1.015.580.006	4.800.000	10.327.527	32.118.998	1.062.826.531

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
241	Kab. Ponorogo	949.763.616	5.200.000	0	10.187.730	965.151.346
242	Kab. Probolinggo	997.419.765	1.000.000	9.733.801	32.559.225	1.040.712.791
243	Kab. Sampang	795.705.134	1.200.000	17.966.552	25.538.409	840.410.095
244	Kab. Sidoarjo	1.063.529.552	5.600.000	0	11.180.995	1.080.310.547
245	Kab. Situbondo	719.357.758	800.000	6.876.391	13.865.064	740.899.213
246	Kab. Sumenep	1.208.574.751	800.000	18.866.903	41.615.177	1.269.856.831
247	Kab. Trenggalek	903.524.354	1.000.000	0	0	904.524.354
248	Kab. Tuban	865.937.414	3.400.000	0	19.096.762	888.434.176
249	Kab. Tulungagung	1.358.133.853	2.800.000	0	26.201.245	1.387.135.098
250	Kota Blitar	373.074.733	4.200.000	0	0	377.274.733

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
251	Kota Kediri	497.805.380	9.200.000	0	9.842.012	516.847.392
252	Kota Madiun	429.715.143	5.400.000	0	0	435.115.143
253	Kota Malang	688.723.774	11.400.000	0	13.617.560	713.741.334
254	Kota Mojokerto	367.970.906	3.600.000	0	0	371.570.906
255	Kota Pasuruan	365.307.590	6.800.000	0	7.630.799	379.738.389
256	Kota Probolinggo	455.498.930	5.800.000	5.343.294	14.074.283	480.716.507
257	Kota Surabaya	1.144.312.392	30.600.000	0	25.828.041	1.200.740.433
258	Kota Batu	408.805.338	1.000.000	0	4.057.814	413.863.152
259	Provinsi Kalimantan Barat	1.549.912.938	0	38.003.170	16.571.879	1.604.487.987
260	Kab. Bengkayang	571.620.135	400.000	10.752.938	10.700.639	593.473.712

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
261	Kab. Landak	605.276.164	0	11.504.426	11.564.377	628.344.967
262	Kab. Kapuas Hulu	771.743.704	800.000	13.139.601	13.456.738	799.140.043
263	Kab. Ketapang	1.005.997.022	1.800.000	17.851.939	27.363.395	1.053.012.356
264	Kab. Mempawah	473.990.735	1.400.000	7.521.241	14.553.129	497.465.105
265	Kab. Sambas	867.166.988	0	16.565.101	26.354.062	910.086.151
266	Kab. Sanggau	770.558.120	1.200.000	14.198.614	22.993.209	808.949.943
267	Kab. Sintang	895.076.179	3.200.000	16.139.133	24.220.553	938.635.865
268	Kota Pontianak	701.813.288	5.800.000	6.516.025	22.951.326	737.080.639
269	Kota Singkawang	413.600.733	5.200.000	3.842.417	4.075.781	426.718.931
270	Kab. Sekadau	409.545.810	0	11.829.827	11.833.721	433.209.358

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
271	Kab. Melawi	447.043.040	0	7.865.520	11.671.714	466.580.274
272	Kab. Kayong Utara	377.943.949	0	6.889.737	10.934.221	395.767.907
273	Kab. Kubu Raya	774.928.999	0	13.483.225	24.817.101	813.229.325
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.217.091.938	0	13.145.076	18.602.419	1.248.839.433
275	Kab. Barito Selatan	486.326.588	1.400.000	3.055.394	11.596.784	502.378.766
276	Kab. Barito Utara	778.840.833	2.000.000	12.436.640	20.572.462	813.849.935
277	Kab. Kapuas	780.067.955	3.400.000	11.304.880	20.569.716	815.342.551
278	Kab. Kotawaringin Barat	564.019.228	2.600.000	5.144.007	9.821.764	581.584.999
279	Kab. Kotawaringin Timur	863.483.343	3.400.000	8.164.741	22.267.633	897.315.717
280	Kota Palangkaraya	519.785.030	6.000.000	3.931.593	15.325.562	545.042.185

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
281	Kab. Katingan	648.413.732	1.400.000	11.800.161	17.334.445	678.948.338
282	Kab. Seruyan	582.567.245	600.000	5.543.967	13.469.069	602.180.281
283	Kab. Sukamara	338.985.822	600.000	5.156.531	4.978.853	349.721.206
284	Kab. Lamandau	423.108.935	600.000	3.530.047	10.949.895	438.188.877
285	Kab. Gunung Mas	576.754.368	2.600.000	11.487.422	14.127.920	604.969.710
286	Kab. Pulang Pisau	423.268.408	800.000	6.487.219	10.116.139	440.671.766
287	Kab. Murung Raya	756.590.956	1.800.000	12.662.083	17.532.999	788.586.038
288	Kab. Barito Timur	484.442.627	600.000	3.495.909	12.029.126	500.567.662
289	Provinsi Kalimantan Selatan	981.208.541	0	10.174.728	5.514.962	996.898.231
290	Kab. Banjar	1.118.802.973	2.600.000	8.270.301	35.882.953	1.165.556.227

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
291	Kab. Barito Kuala	740.430.373	1.200.000	6.047.376	7.139.491	754.817.240
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	720.483.304	800.000	5.073.801	13.850.844	740.207.949
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	721.096.650	1.600.000	0	14.144.843	736.841.493
294	Kab. Hulu Sungai Utara	723.129.592	1.000.000	0	23.369.306	747.498.898
295	Kab. Kotabaru	992.870.675	800.000	8.812.056	26.955.543	1.029.438.274
296	Kab. Tabalong	765.564.596	2.000.000	6.445.008	14.233.446	788.243.050
297	Kab. Tanah Laut	830.406.141	1.000.000	6.689.995	7.809.352	845.905.488
298	Kab. Tapin	743.613.885	1.800.000	5.881.818	14.162.384	765.458.087
299	Kota Banjarbaru	400.634.143	4.000.000	0	0	404.634.143
300	Kota Banjarmasin	708.745.985	10.400.000	0	14.954.523	734.100.508

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
301	Kab. Balangan	518.399.553	600.000	3.889.484	4.627.388	527.516.425
302	Kab. Tanah Bumbu	573.289.885	1.000.000	4.921.763	4.790.734	584.002.382
303	Provinsi Kalimantan Timur	846.491.404	0	11.259.264	8.867.424	866.618.092
304	Kab. Berau	746.773.588	2.000.000	13.630.519	12.202.939	774.607.046
305	Kab. Kutai Kartanegara	2.261.871.113	8.800.000	20.720.765	20.976.632	2.312.368.510
306	Kab. Kutai Barat	1.360.891.479	800.000	20.972.215	18.757.549	1.401.421.243
307	Kab. Kutai Timur	1.938.403.961	400.000	20.566.500	53.786.210	2.013.156.671
308	Kab. Paser	1.057.501.670	1.000.000	9.399.508	29.313.061	1.097.214.239
309	Kota Balikpapan	523.788.045	6.800.000	4.869.014	11.178.574	546.635.633
310	Kota Bontang	501.205.170	3.000.000	5.247.857	0	509.453.027

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
311	Kota Samarinda	738.050.978	11.800.000	6.657.048	15.577.289	772.085.315
312	Kab. Penajam Paser Utara	734.019.425	4.800.000	6.279.240	12.368.128	757.466.793
313	Kab. Mahakam Ulu	483.319.969	0	8.617.171	7.879.135	499.816.275
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.151.864.347	0	28.880.987	17.570.335	1.198.315.669
315	Kab. Bolaang Mongondow	532.175.247	400.000	8.345.561	15.740.489	556.661.297
316	Kab. Minahasa	582.392.148	8.600.000	4.440.239	11.482.245	606.914.632
317	Kab. Kepulauan Sangihe	475.799.993	4.400.000	7.455.151	9.288.929	496.944.073
318	Kota Bitung	393.335.823	13.800.000	6.551.486	12.480.800	426.168.109
319	Kota Manado	658.823.315	17.400.000	5.616.858	13.604.792	695.444.965
320	Kab. Kepulauan Talaud	407.774.406	2.200.000	7.648.914	12.194.782	429.818.102

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
321	Kab. Minahasa Selatan	439.108.809	2.000.000	6.453.455	8.625.045	456.187.309
322	Kota Tomohon	336.793.459	8.800.000	2.508.824	2.966.540	351.068.823
323	Kab. Minahasa Utara	419.001.590	1.200.000	7.518.710	4.161.981	431.882.281
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	303.320.235	2.000.000	6.825.439	8.550.319	320.695.993
325	Kota Kotamobagu	340.066.182	3.600.000	5.398.233	3.436.992	352.501.407
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	326.710.867	200.000	5.840.505	9.931.009	342.682.381
327	Kab. Minahasa Tenggara	325.882.621	1.800.000	2.332.768	7.686.110	337.701.499
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	277.253.764	0	3.335.715	6.573.876	287.163.355
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	306.621.127	0	7.285.407	7.684.963	321.591.497
330	Provinsi Sulawesi Tengah	1.257.395.894	0	28.466.395	18.492.394	1.304.354.683

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
331	Kab. Banggai	996.722.275	9.200.000	17.651.016	18.829.163	1.042.402.454
332	Kab. Banggai Kepulauan	447.376.505	600.000	6.918.742	10.333.376	465.228.623
333	Kab. Buol	495.360.578	1.400.000	7.959.680	11.907.031	516.627.289
334	Kab. Tolo-Toli	521.114.510	1.200.000	8.524.354	14.449.944	545.288.808
335	Kab. Donggala	572.351.031	1.800.000	16.573.791	15.992.714	606.717.536
336	Kab. Morowali	402.322.685	1.400.000	3.930.633	6.774.796	414.428.114
337	Kab. Poso	632.006.942	5.600.000	9.702.642	17.725.924	665.035.508
338	Kota Palu	590.972.814	9.200.000	5.211.020	0	605.383.834
339	Kab. Parigi Moutong	869.487.930	1.000.000	17.190.560	23.554.536	911.233.026
340	Kab. Tojo Una Una	518.995.519	2.400.000	8.568.671	8.406.197	538.370.387

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
341	Kab. Sigi	606.815.149	0	9.868.989	16.348.172	633.052.310
342	Kab. Banggai Laut	354.848.974	600.000	6.162.728	8.611.285	370.222.987
343	Kab. Morowali Utara	551.748.232	600.000	9.066.928	9.400.205	570.815.365
344	Provinsi Sulawesi Selatan	2.324.384.989	0	57.527.240	38.553.042	2.420.465.271
345	Kab. Bantaeng	399.300.098	4.200.000	3.301.319	11.549.464	418.350.881
346	Kab. Barru	412.066.692	3.000.000	3.421.102	7.579.599	426.067.393
347	Kab. Bone	1.189.989.204	8.800.000	9.242.710	24.179.717	1.232.211.631
348	Kab. Bulukumba	649.508.373	5.400.000	5.243.961	19.365.537	679.517.871
349	Kab. Enrekang	491.234.658	3.400.000	0	3.981.794	498.616.452
350	Kab. Gowa	891.213.017	9.200.000	7.379.816	8.536.851	916.329.684

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
351	Kab. Jeneponto	578.804.359	6.200.000	10.205.817	17.534.338	612.744.514
352	Kab. Luwu	668.414.683	4.000.000	5.050.898	11.722.011	689.187.592
353	Kab. Luwu Utara	678.330.868	1.400.000	9.678.682	5.833.940	695.243.490
354	Kab. Maros	650.878.020	4.600.000	5.824.599	0	661.302.619
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	623.735.208	7.600.000	6.104.286	17.974.435	655.413.929
356	Kota Palopo	420.678.293	9.600.000	3.776.609	0	434.054.902
357	Kab. Luwu Timur	826.638.970	600.000	6.107.312	6.471.176	839.817.458
358	Kab. Pinrang	626.475.219	8.000.000	5.425.768	6.346.738	646.247.725
359	Kab. Sinjai	519.949.371	2.600.000	0	9.039.208	531.588.579
360	Kab. Kepulauan Selayar	492.982.723	1.400.000	7.640.986	12.444.259	514.467.968

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
361	Kab. Sidenreng Rappang	549.925.219	7.600.000	4.707.958	0	562.233.177
362	Kab. Soppeng	514.730.051	4.200.000	3.412.775	4.733.368	527.076.194
363	Kab. Takalar	514.290.601	4.800.000	9.416.438	10.072.860	538.579.899
364	Kab. Tana Toraja	493.445.618	9.400.000	4.310.352	8.489.991	515.645.961
365	Kab. Wajo	651.993.806	9.600.000	5.404.691	12.772.961	679.771.458
366	Kota Parc-parc	381.419.560	4.400.000	0	3.767.602	389.587.162
367	Kota Makassar	1.419.790.960	30.600.000	13.251.904	15.268.841	1.478.911.705
368	Kab. Toraja Utara	469.955.229	8.000.000	9.451.917	8.955.460	496.362.606
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.321.833.951	0	35.952.118	13.009.973	1.370.796.042
370	Kab. Buton	361.402.026	2.400.000	3.790.573	9.350.515	376.943.114

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
371	Kab. Konawe	611.705.539	11.400.000	11.539.362	17.610.511	652.255.412
372	Kab. Kolaka	488.202.121	7.000.000	8.327.490	9.176.621	512.706.232
373	Kab. Muna	580.218.266	5.200.000	6.119.566	15.269.650	606.807.482
374	Kota Kendari	583.130.569	13.000.000	11.727.282	0	607.857.851
375	Kota Bau-bau	428.263.677	8.600.000	4.258.233	12.388.760	453.510.670
376	Kab. Konawe Selatan	725.088.578	3.000.000	13.441.628	13.810.750	755.340.956
377	Kab. Bombana	408.795.708	4.400.000	7.574.482	10.961.445	431.731.635
378	Kab. Wakatobi	357.935.052	5.000.000	6.559.974	9.737.913	379.232.939
379	Kab. Kolaka Utara	410.837.891	1.200.000	6.923.835	11.511.761	430.473.487
380	Kab. Konawe Utara	393.879.967	2.200.000	2.819.788	7.439.584	406.339.339

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
381	Kab. Buton Utara	318.592.145	2.400.000	5.989.610	7.289.329	334.271.084
382	Kab. Konawe Kepulauan	253.511.665	1.400.000	4.580.041	5.907.247	265.398.953
383	Kab. Kolaka Timur	367.025.346	3.200.000	2.776.181	6.382.628	379.384.155
384	Kab. Muna Barat	316.508.947	1.000.000	3.032.575	7.670.871	328.212.393
385	Kab. Buton Tengah	295.499.662	2.000.000	5.673.558	7.843.662	311.016.882
386	Kab. Buton Selatan	295.822.445	2.000.000	5.723.834	7.607.304	311.153.583
387	Provinsi Bali	1.149.433.493	0	0	0	1 149.433.493
388	Kab. Badung	341.996.152	3.200.000	0	0	345.196.152
389	Kab. Bangli	602.324.681	800.000	4.961.136	4.462.725	612.548.542
390	Kab. Buleleng	1.026.230.763	3.800.000	10.588.738	0	1 040 619.501

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
391	Kab. Gianyar	577.413.452	1.200.000	0	0	578.613.452
392	Kab. Jembrana	517.679.956	2.000.000	0	0	519.679.956
393	Kab. Karangasem	648.684.415	600.000	5.805.809	0	655.090.224
394	Kab. Klungkung	571.290.356	1.200.000	5.297.126	0	577.787.482
395	Kab. Tabanan	794.201.381	0	0	0	794.201.381
396	Kota Denpasar	575.009.235	3.200.000	0	5.392.665	583.601.900
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.465.821.818	0	26.126.753	26.341.098	1.518.289.669
398	Kab. Bima	1.027.567.984	0	9.736.306	8.489.307	1.045.793.597
399	Kab. Dompu	590.302.556	1.800.000	11.824.478	9.692.942	613.619.976
400	Kab. Lombok Barat	825.932.987	600.000	6.568.374	14.886.649	847.988.010

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
401	Kab. Lombok Tengah	1.105.610.215	2.400.000	9.098.704	19.871 663	1.136.980.582
402	Kab. Lombok Timur	1.437.526.038	3.000.000	24.827.789	25.871.823	1.491.225.650
403	Kab. Sumbawa	991.821.147	1.600.000	8.858.137	16.562.076	1.018.841.360
404	Kota Mataram	599.402.026	10.000.000	5.112.093	5.360.802	619 874 921
405	Kota Bima	402.840.803	8.200.000	3.554.568	0	414.595 371
406	Kab. Sumbawa Barat	363.639.250	1.400.000	3.364.980	2.939.372	371.343.602
407	Kab. Lombok Utara	375.722.429	0	6.094.407	6.549.823	388.366.659
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.643.809.745	0	38.347.271	17.401.341	1.699.558.357
409	Kab. Alor	609.210.423	3.400.000	17.117.407	14.244.671	643.972.501
410	Kab. Belu	450.005.639	2.400.000	13.726.068	11.570.521	477.702.228

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
411	Kab. Ende	595.679.547	4.600.000	5.139.289	9.596.268	615.015.104
412	Kab. Flores Timur	633.458.896	4.200.000	5.402.424	10.448.710	653.510.030
413	Kab. Kupang	629.240.091	3.400.000	11.941.107	15.703.651	660.284.849
414	Kab. Lembata	456.336.740	1.400.000	3.406.578	3.486.583	464.629.901
415	Kab. Manggarai	594.384.722	5.200.000	5.680.102	13.450.758	618.715.582
416	Kab. Ngada	519.606.679	3.200.000	3.881.233	7.386.207	534.074.119
417	Kab. Sikka	662.316.773	2.600.000	11.769.952	10.874.580	687.561.305
418	Kab. Sumba Barat	322.966.797	2.200.000	9.563.126	4.791.427	339.521.350
419	Kab. Sumba Timur	658.533.114	3.200.000	12.104.497	14.830.772	688.668.383
420	Kab. Timor Tengah Selatan	779.337.371	2.400.000	24.461.997	18.857.246	825.056.614

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
421	Kab. Timor Tengah Utara	610.929.662	2.200.000	18.923.431	15.171.883	647.224.976
422	Kota Kupang	636.461.519	10.200.000	5.620.283	5.201.197	657.482.999
423	Kab. Rote Ndao	392.241.516	2.400.000	7.511.775	9.045.282	410.198.573
424	Kab. Manggarai Barat	489.076.933	1.000.000	8.247.003	7.473.256	505.797.192
425	Kab. Nagekeo	403.858.850	3.200.000	3.382.969	0	410.441.819
426	Kab. Sumba Barat Daya	482.263.098	400.000	17.243.700	10.947.853	510.854.651
427	Kab. Sumba Tengah	281.259.611	0	4.486.898	5.397.396	291.143.905
428	Kab. Manggarai Timur	539.982.227	3.400.000	10.125.624	13.004.182	566.512.033
429	Kab. Sabu Raijua	310.337.124	1.000.000	6.524.962	7.026.858	324.888.944
430	Kab. Malaka	497.465.495	0	15.654.279	12.424.231	525.544.005

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
431	Provinsi Maluku	1.239.091 599	0	39.646.032	20.289.986	1.299.027.617
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	457.866.828	400.000	13.593.041	11 115.593	482 975.462
433	Kab. Maluku Tengah	839.353.109	1 200.000	20.805.573	21 465 422	882 824.104
434	Kab. Maluku Tenggara	413.953.038	200.000	9.757.426	9.089.425	432.999.889
435	Kab. Buru	406.736.788	0	7.254.614	8.591.642	422.583 044
436	Kota Ambon	583.785.555	4.000.000	4.890.145	15.798.366	608.474.066
437	Kab. Seram Bagian Barat	499.441.094	0	9.789.409	12.315 132	521.545.635
438	Kab. Seram Bagian Timur	455.302.283	0	13.558.619	11.360.003	480.220.905
439	Kab. Kepulauan Aru	462.126.263	400.000	14.518.357	11.511.247	488.555.867
440	Kota Tual	324.122.940	600.000	7.764.943	8 041.779	340.529.662

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
441	Kab. Maluku Barat Daya	423.549.967	200.000	7.225.124	7.789.883	438.764.974
442	Kab. Buru Selatan	338.850.202	0	10.667.910	7.372.428	356.890.540
443	Provinsi Papua	705.266.694	0	1.837.401	10.148.525	717.252.620
444	Kab. Biak Numfor	626.517.463	2.800.000	22.672.451	13.271.723	665.261.637
445	Kab. Jayapura	559.205.867	1.000.000	18.409.399	13.039.379	591.654.645
446	Kab. Kepulauan Yapen	485.944.863	1.000.000	17.653.979	11.121.278	515.720.120
447	Kota Jayapura	620.056.896	5.000.000	10.895.963	16.397.012	652.349.871
448	Kab. Sarmi	479.525.688	400.000	14.504.334	8.257.837	502.687.859
449	Kab. Keerom	817.126.158	0	23.812.442	18.048.857	858.987.457
450	Kab. Waropen	441.962.058	0	13.257.628	10.656.784	465.876.470

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
451	Kab. Supiori	334.978.988	0	11.883.657	6.369.814	353.232.459
452	Kab. Mamberamo Raya	496.515.602	0	13.525.416	8.269.498	518.310.516
453	Provinsi Maluku Utara	942.579.383	0	27.696.693	14.262.949	984.539.025
454	Kab. Halmahera Tengah	428.416.361	0	8.434.506	10.531.993	447.382.860
455	Kota Ternate	509.284.875	15.600.000	8.071.047	4.561.980	537.517.902
456	Kab. Halmahera Barat	403.982.475	0	9.472.333	9.723.239	423.178.047
457	Kab. Halmahera Timur	356.816.105	0	7.493.834	6.965.525	371.275.464
458	Kab. Halmahera Selatan	581.406.121	0	16.557.982	13.519.933	611.484.036
459	Kab. Halmahera Utara	458.549.540	0	13.656.094	11.803.391	484.009.025
460	Kab. Kepulauan Sula	368.578.700	0	9.709.518	8.409.241	386.697.459

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
461	Kota Tidore Kepulauan	438.104.945	8.000.000	6.677.534	0	452.782.479
462	Kab. Pulau Morotai	319.581.951	0	9.107.236	7.991.059	336.680.246
463	Kab. Pulau Taliabu	268.560.270	0	9.696.623	5.132.981	283.389.874
464	Provinsi Banten	929.472.024	0	13.664.545	13.966.986	957.103.555
465	Kab. Lebak	1.100.800.525	1.000.000	27.174.466	35.838.928	1.164.813.919
466	Kab. Pandeglang	1.236.097.226	2.600.000	14.937.294	39.792.491	1.293.427.011
467	Kab. Serang	910.470.470	0	22.951.644	29.085.980	962.508.094
468	Kab. Tangerang	1.156.318.231	5.600.000	30.801.021	38.276.843	1.230.996.095
469	Kota Cilegon	509.593.633	8.600.000	6.499.239	10.314.358	535.007.230
470	Kota Tangerang	810.251.519	20.800.000	0	9.244.303	840.295.822

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
471	Kota Serang	512.238.321	13.400.000	7.043.799	16.238.055	548.920.175
472	Kota Tangerang Selatan	573.700.691	10.800.000	7.604.011	6.190.302	598.295.004
473	Provinsi Bangka Belitung	831.356.644	0	7.545.381	0	838.902.025
474	Kab. Bangka	449.057.373	3.800.000	0	3.560.065	456.417.438
475	Kab. Belitung	458.949.682	1.400.000	4.002.145	3.458.660	467.810.487
476	Kota Pangkal Pinang	373.926.347	8.400.000	0	3.078.361	385.404.708
477	Kab. Bangka Selatan	424.392.419	600.000	4.139.314	6.501.171	435.632.904
478	Kab. Bangka Tengah	416.116.675	1.400.000	4.391.316	3.372.352	425.280.343
479	Kab. Bangka Barat	429.805.278	1.200.000	4.171.821	3.118.762	438.295.861
480	Kab. Belitung Timur	437.002.664	0	0	0	437.002.664

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
481	Provinsi Gorontalo	791.428.833	0	18.948.768	12.252.317	822.629.918
482	Kab. Boalemo	402.834.666	0	6.751.217	6.993.933	416.579.816
483	Kab. Gorontalo	672.110.892	2.800.000	5.256.339	12.306.155	692.473.386
484	Kota Gorontalo	425.473.594	10.000.000	3.830.988	9.005.300	448.309.882
485	Kab. Pohuwato	496.603.035	600.000	4.244.217	8.206.459	509.653.711
486	Kab. Bone Bolango	489.099.972	1.000.000	9.346.793	9.575.976	509.022.741
487	Kab. Gorontalo Utara	363.941.903	0	6.369.578	6.484.071	376.795.552
488	Provinsi Kepulauan Riau	972.609.974	0	11.055.857	0	983.665.831
489	Kab. Natuna	476.351.958	1.400.000	8.480.705	9.647.514	495.880.177
490	Kab. Kepulauan Anambas	421.733.836	400.000	4.027.471	8.720.958	434.882.265

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
491	Kab. Karimun	374.229.850	5.800.000	3.564.698	2.981.401	386.575.949
492	Kota Batam	741.764.750	12.800.000	0	6.467.852	761.032.602
493	Kota Tanjung Pinang	406.408.438	3.600.000	0	6.720.616	416.729.054
494	Kab. Lingga	389.042.696	1.800.000	6.835.754	5.554.983	403.233.433
495	Kab. Bintan	411.756.187	3.000.000	3.826.533	3.043.656	421.626.376
496	Provinsi Papua Barat	531.888.473	0	1.178.261	6.796.990	539.863.724
497	Kab. Fak Fak	565.997.361	1.400.000	18.031.616	12.836.152	598.265.129
498	Kab. Manokwari	476.333.485	1.800.000	10.827.585	10.997.480	499.958.550
499	Kab. Teluk Bintuni	375.913.966	400.000	8.929.993	6.020.370	391.264.329
500	Kab. Teluk Wondama	344.830.767	200.000	10.430.922	7.018.260	362.479.949

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
501	Kab. Kaimana	470.349.270	400.000	18.520.428	10.059.458	499.329.156
502	Kab. Manokwari Selatan	263.467.006	0	7.541.135	5.253.782	276.261.923
503	Kab. Pegunungan Arfak	263.652.838	0	4.316.426	4.090.212	272.059.476
504	Provinsi Sulawesi Barat	810.888.229	0	19.179.300	8.394.822	838.462.351
505	Kab. Majene	416.114.791	4.000.000	8.224.297	11.502.436	439.841.524
506	Kab. Mamuju	514.535.599	2.600.000	10.244.011	15.341.632	542.721.242
507	Kab. Polewali Mandar	749.024.212	4.600.000	13.993.098	22.590.015	790.207.325
508	Kab. Mamasa	413.357.250	2.600.000	8.517.474	11.746.740	436.221.464
509	Kab. Pasangkayu	360.669.856	800.000	5.395.469	8.384.403	375.249.728
510	Kab. Mamuju Tengah	287.068.668	0	2.592.101	8.005.467	297.666.236

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511	Provinsi Kalimantan Utara	830.626.335	0	8.063.283	0	838.689.618
512	Kab. Bulungan	833.686.120	1.400.000	8.241.207	0	843.327.327
513	Kab. Malinau	1.046.670.930	0	16.455.902	20.318.947	1.083.445.779
514	Kab. Nunukan	819.003.634	1.600.000	15.599 426	16.184.486	852.387.546
515	Kota Tarakan	386.190.294	4.000.000	3.707 758	3.973.845	397.871.897
516	Kab. Tana Tidung	330.502.789	0	2.665.543	2.165.104	335.333.436
517	Provinsi Papua Selatan	404.853.475	0	1.100.185	7.164.900	413.118.560
518	Kab. Merauke	952.508.838	2.200.000	32.195 142	14.056.318	1.000.960.298
519	Kab. Boven Digoel	584.191.777	0	14.813.872	8.407.501	607.413.150
520	Kab. Mappi	581.086.678	400.000	20.267.310	9.521.433	611.275.421

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521	Kab. Asmat	678.582.781	0	26.879.918	15.947.619	721.410.318
522	Provinsi Papua Tengah	377.572.312	0	691.094	7.640.961	385.904.367
523	Kab. Mimika	1.285.892.894	3.800.000	40.653.026	31.274.232	1.361.620.152
524	Kab. Nabire	619.051.110	1.800.000	21.034.011	13.322.627	655.207.748
525	Kab. Paniai	557.014.372	1.000.000	29.867.855	11.352.356	599.234.583
526	Kab. Puncak Jaya	741.980.556	600.000	6.631.153	22.753.558	771.965.267
527	Kab. Dogiyai	453.468.615	0	14.690.635	10.954.078	479.133.328
528	Kab. Puncak	759.113.997	0	2.933.638	22.130.065	784.177.700
529	Kab. Intan Jaya	519.591.983	0	3.713.326	14.301.845	537.607.154
530	Kab. Deiyai	374.204.696	0	16.860.572	7.922.177	398.987.445

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
531	Provinsi Papua Pegunungan	465.820.867	0	405.859	7.240.465	473.467.191
532	Kab. Jayawijaya	581.112.637	800.000	15.324.841	15.078.880	612.316.358
533	Kab. Yahukimo	824.795.457	200.000	23.826.112	18.076.343	866.897.912
534	Kab. Pegunungan Bintang	630.023.552	0	11.046.559	12.712.386	653.782.497
535	Kab. Tolikara	745.407.911	800.000	11.675.244	20.563.863	778.447.018
536	Kab. Mamberamo Tengah	468.713.184	0	8.459.147	10.533.520	487.705.851
537	Kab. Yalimo	477.479.511	0	9.648.474	13.308.408	500.436.393
538	Kab. Lanny Jaya	564.981.883	200.000	15.150.633	15.078.355	595.410.871
539	Kab. Nduga	454.489.664	0	4.731.843	11.486.905	470.708.412
540	Provinsi Papua Barat Daya	391.176.894	0	630.655	5.929.881	397.737.430

V.11. RINCIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA			TOTAL DAU
			DUKUNGAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	DUKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN	DUKUNGAN BIDANG KESEHATAN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
541	Kab. Sorong	528.949.221	5.200.000	9.229.176	10.565.217	553.943.614
542	Kota Sorong	490.572.730	8.200.000	8.642.566	8.986.968	516.402.264
543	Kab. Raja Ampat	528.285.664	800.000	15.952.693	10.147.230	555.185.587
544	Kab. Sorong Selatan	340.158.550	400.000	8.993.167	5.620.894	355.172.611
545	Kab. Maybrat	359.788.820	200.000	4.239.799	5.717.386	369.946.005
546	Kab. Tambrauw	383.678.329	0	7.943.849	6.092.471	397.714.649
JUMLAH NASIONAL		386.739.874.265	1.699.200.000	4.726.152.330	6.854.143.865	400.019.370.460

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Provinsi Aceh	0	0	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	9.630.508	0	0	0	0
3	Kab. Aceh Besar	8.900.000	12.156.574	0	0	12.156.574
4	Kab. Aceh Selatan	55.077.530	0	0	0	0
5	Kab. Aceh Singkil	1.121.167	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Tengah	2.280.000	7.000.000	0	0	7.000.000
7	Kab. Aceh Tenggara	1.156.591	0	0	0	0
8	Kab. Aceh Timur	11.985.860	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Provinsi Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	4.878.616	3.305.137	0	3.305.137	0	17.814.261
3	Kab. Aceh Besar	4.146.521	2.789.445	0	2.789.445	0	27.992.540
4	Kab. Aceh Selatan	4.327.609	2.915.308	0	2.915.308	0	62.320.447
5	Kab. Aceh Singkil	2.356.029	0	0	0	0	3.477.196
6	Kab. Aceh Tengah	3.870.048	3.499.436	0	3.499.436	0	16.649.484
7	Kab. Aceh Tenggara	4.581.277	2.542.860	0	2.542.860	0	8.280.728
8	Kab. Aceh Timur	4.245.125	3.003.192	0	3.003.192	0	19.231.177

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Kab. Aceh Utara	0	11.115.418	0	0	11.115.418
10	Kab. Bireuen	0	8.432.477	0	0	8.432.477
11	Kab. Pidie	6.252.489	0	17.892.590	0	17.892.590
12	Kab. Simeulue	3.209.220	0	0	0	0
13	Kota Banda Aceh	0	0	0	0	0
14	Kota Sabang	27.188.616	0	0	0	0
15	Kota Langsa	1.300.000	0	0	0	0
16	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Kab. Aceh Utara	0	0	0	0	0	11.115.418
10	Kab. Bireuen	4.044.704	2.000.093	0	2.000.093	0	14.477.274
11	Kab. Pidie	5.057.713	2.535.249	0	2.535.249	8.158.567	39.896.608
12	Kab. Simeulue	2.796.344	2.235.234	0	2.235.234	0	8.240.798
13	Kota Banda Aceh	0	0	0	0	0	0
14	Kota Sabang	0	0	0	0	0	27.188.616
15	Kota Langsa	0	0	0	0	0	1.300.000
16	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Kab. Gayo Lues	2.487.850	8.720.000	0	0	8.720.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	2.504.250	0	0	0	0
19	Kab. Aceh Jaya	31.182.488	0	0	0	0
20	Kab. Nagan Raya	22.897.083	0	0	0	0
21	Kab. Aceh Tamiang	6.198.914	0	0	0	0
22	Kab. Bener Meriah	2.580.000	0	0	0	0
23	Kab. Pidie Jaya	0	9.038.418	0	0	9.038.418
24	Kota Subulussalam	1.197.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17	Kab. Gayo Lues	0	0	0	0	0	11.207.850
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.202.000	3.193.857	0	3.193.857	0	8.900.107
19	Kab. Aceh Jaya	3.698.221	2.727.282	0	2.727.282	0	37.607.991
20	Kab. Nagan Raya	4.796.485	2.633.614	0	2.633.614	0	30.327.182
21	Kab. Aceh Tamiang	2.284.489	3.036.796	0	3.036.796	0	11.520.199
22	Kab. Bener Meriah	5.122.682	1.663.524	0	1.663.524	0	9.366.206
23	Kab. Pidie Jaya	4.384.771	1.067.831	0	1.067.831	0	14.491.020
24	Kota Subulussalam	4.750.000	908.315	0	908.315	0	6.855.315

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0
26	Kab. Asahan	0	11.412.879	0	0	11.412.879
27	Kab. Dairi	19.769.308	0	0	0	0
28	Kab. Deli Serdang	0	14.600.000	0	0	14.600.000
29	Kab. Karo	0	0	0	6.661.305	6.661.305
30	Kab. Labuhanbatu	2.095.375	0	0	0	0
31	Kab. Langkat	0	9.007.040	0	0	9.007.040
32	Kab. Mandailing Natal	1.200.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0
26	Kab. Asahan	0	0	0	0	0	11.412.879
27	Kab. Dairi	0	2.339.915	0	2.339.915	0	22.109.223
28	Kab. Deli Serdang	5.356.333	1.011.950	0	1.011.950	0	20.968.283
29	Kab. Karo	0	0	660.833	660.833	0	7.322.138
30	Kab. Labuhanbatu	1.900.000	0	0	0	0	3.995.375
31	Kab. Langkat	0	0	0	0	0	9.007.040
32	Kab. Mandailing Natal	0	0	0	0	0	1.200.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	Kab. Nias	0	0	0	0	0
34	Kab. Simalungun	0	0	0	0	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	6.141.000	0	0	6.141.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	0	0	0
37	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	7.127.764	7.127.764
38	Kab. Toba	4.500.000	14.220.000	0	0	14.220.000
39	Kota Binjai	1.235.000	0	0	0	0
40	Kota Medan	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	Kab. Nias	0	0	0	0	0	0
34	Kab. Simalungun	0	0	0	0	0	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	0	0	0	0	6.141.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	0	0	0	0
37	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	7.127.764
38	Kab. Toba	0	1.936.066	0	1.936.066	0	20.656.066
39	Kota Binjai	0	2.571.691	0	2.571.691	0	3.806 691
40	Kota Medan	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41	Kota Pemarang Siantar	1.541.765	0	0	0	0
42	Kota Sibolga	0	0	0	0	0
43	Kota Tanjung Balai	2.423.000	0	0	0	0
44	Kota Tebing Tinggi	1.812.243	0	0	0	0
45	Kota Padang Sidempuan	5.920.506	0	0	0	0
46	Kab. Pakpak Bharat	4.934.108	0	0	0	0
47	Kab. Nias Selatan	0	0	0	6.907.369	6.907.369
48	Kab. Humbang Hasundutan	2.595.295	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
41	Kota Pematang Siantar	0	0	0	0	0	1.541.765
42	Kota Sibolga	0	0	0	0	0	0
43	Kota Tanjung Balai	0	0	0	0	0	2.423.000
44	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	0	0	1.812.243
45	Kota Padang Sidempuan	2.245.500	0	0	0	0	8.166.006
46	Kab. Pakpak Bharat	2.850.000	0	0	0	0	7.784.108
47	Kab. Nias Selatan	0	0	0	0	0	6.907.369
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	0	0	2.595.295

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49	Kab. Serdang Bedagai	1.171.830	25.408.543	0	0	25.408.543
50	Kab. Samosir	1.582.908	0	0	0	0
51	Kab. Batu Bara	4.700.000	8.186.636	0	0	8.186.636
52	Kab. Padang Lawas	0	10.079.189	0	0	10.079.189
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0	0
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	0	0
56	Kab. Nias Utara	0	10.053.911	0	0	10.053.911

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49	Kab. Serdang Bedagai	0	0	0	0	0	26.580.373
50	Kab. Samosir	3.977.087	0	0	0	0	5.559.995
51	Kab. Batu Bara	0	0	0	0	0	12.886.636
52	Kab. Padang Lawas	0	0	0	0	0	10.079.189
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0	0
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0	0	0
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	0	0	0
56	Kab. Nias Utara	0	0	0	0	0	10.053.911

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57	Kab. Nias Barat	0	9.510.000	0	0	9.510.000
58	Kota Gunungsitoli	0	0	0	0	0
59	Provinsi Sumatera Barat	5.912.600	0	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	1.038.118	0	0	0	0
61	Kab. Agam	1.308.029	0	0	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0	0
64	Kab. Pasaman	2.300.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57	Kab. Nias Barat	0	0	0	0	0	9.510.000
58	Kota Gunungsitoli	0	0	0	0	0	0
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0	0	5.912.600
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	0	0	0	1.038.118
61	Kab. Agam	0	2.531.986	0	2.531.986	0	3.840.015
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0	0	0
64	Kab. Pasaman	0	0	0	0	0	2.300.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65	Kab. Pesisir Selatan	2.074.913	0	0	0	0
66	Kab. Sijunjung	629.816	0	0	0	0
67	Kab. Solok	1.349.553	0	16.509.149	0	16.509.149
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0	0	0
69	Kota Bukit Tinggi	4.391.300	0	0	0	0
70	Kota Padang Panjang	950.000	0	0	0	0
71	Kota Padang	0	9.829.741	0	0	9.829.741
72	Kota Payakumbuh	1.903.373	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
65	Kab. Pesisir Selatan	0	3.428.161	0	3.428.161	0	5.503.074
66	Kab. Sijunjung	0	0	0	0	0	629.816
67	Kab. Solok	2.500.000	0	0	0	8.214.321	28.573.023
68	Kab. Tanah Datar	0	3.504.723	0	3.504.723	0	3.504.723
69	Kota Bukit Tinggi	0	0	0	0	0	4.391.300
70	Kota Padang Panjang	0	0	0	0	0	950.000
71	Kota Padang	0	0	0	0	0	9.829.741
72	Kota Payakumbuh	0	0	0	0	0	1.903.373

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	Kota Sawahlunto	3.529.601	0	0	0	0
74	Kota Solok	0	0	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	2.300.000	0	0	0	0
77	Kab. Dharmasraya	1.308.029	0	0	0	0
78	Kab. Solok Selatan	5.077.643	0	0	0	0
79	Provinsi Riau	0	0	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
73	Kota Sawahlunto	0	0	0	0	0	3.529.601
74	Kota Solok	0	0	0	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	0	1.456.000	0	1.456.000	7.384.384	11.140.384
77	Kab. Dharmasraya	0	0	0	0	0	1.308.029
78	Kab. Solok Selatan	2.500.000	0	0	0	0	7.577.643
79	Provinsi Riau	0	0	0	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81	Kab. Indragiri Hilir	1.260.000	0	0	0	0
82	Kab. Indragiri Hulu	2.165.000	0	0	0	0
83	Kab. Kampar	0	0	0	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	3.542.000	0	0	0	0
85	Kab. Pelalawan	4.330.000	0	0	0	0
86	Kab. Rokan Hilir	2.200.307	0	0	0	0
87	Kab. Rokan Hulu	3.718.365	0	0	0	0
88	Kab. Siak	1.955.787	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
81	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0	0	1.260.000
82	Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	0	0	2.165.000
83	Kab. Kampar	0	0	0	0	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0	0	3.542.000
85	Kab. Pelalawan	0	0	0	0	0	4.330.000
86	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	0	0	2.200.307
87	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	0	0	3.718.365
88	Kab. Siak	0	0	0	0	0	1.955.787

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
89	Kota Dumai	0	0	0	0	0
90	Kota Pekanbaru	4.333.473	0	0	0	0
91	Kab. Kepulauan Meranti	1.260.000	0	0	0	0
92	Provinsi Jambi	15.445.200	0	0	0	0
93	Kab. Batang Hari	4.117.464	0	0	0	0
94	Kab. Bungo	0	0	0	0	0
95	Kab. Kerinci	0	0	0	0	0
96	Kab. Merangin	10.052.616	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
89	Kota Dumai	0	0	0	0	0	0
90	Kota Pekanbaru	0	0	0	0	0	4.333.473
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0	843.485	2.103.485
92	Provinsi Jambi	0	0	0	0	0	15.445.200
93	Kab. Batang Hari	0	0	0	0	0	4.117.464
94	Kab. Bungo	0	0	0	0	0	0
95	Kab. Kerinci	0	0	0	0	0	0
96	Kab. Merangin	0	0	0	0	0	10.052.616

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0	0
98	Kab. Sarolangun	4.347.052	0	0	0	0
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.337.186	0	0	0	0
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.236.329	8.896.389	0	0	8.896.389
101	Kab. Tebo	0	0	0	0	0
102	Kota Jambi	0	0	0	0	0
103	Kota Sungai Penuh	14.708.013	0	0	0	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	12.364.440	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0	0	0
98	Kab. Sarolangun	0	0	0	0	0	4.347.052
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0	0	1.337.186
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0	0	12.132.718
101	Kab. Tebo	0	0	0	0	0	0
102	Kota Jambi	0	0	0	0	0	0
103	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	14.708.011
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	12.364.440

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
105	Kab. Lahat	0	0	0	0	0
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	0	0
107	Kab. Musi Rawas	3.541.300	0	0	0	0
108	Kab. Muara Enim	1.197.000	0	0	0	0
109	Kab. Ogan Komering Ilir	2.166.190	15.438.599	0	0	15.438.599
110	Kab. Ogan Komering Ulu	1.058.880	0	0	0	0
111	Kota Palembang	0	0	0	0	0
112	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
105	Kab. Lahat	2.500.000	0	0	0	1.200.000	3.700.000
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	0	0	0
107	Kab. Musi Rawas	0	0	0	0	0	3.541.300
108	Kab. Muara Enim	0	0	0	0	0	1.197.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0	0	0	0	17.604.789
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	0	0	0	0	1.058.880
111	Kota Palembang	0	0	0	0	0	0
112	Kota Prabumulih	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
113	Kota Pagar Alam	13.040.000	0	0	7.050.125	7.050.125
114	Kota Lubuk Linggau	2.920.635	62.195.181	0	0	62.195.181
115	Kab. Banyuasin	0	0	17.225.188	0	17.225.188
116	Kab. Ogan Ilir	3.675.976	0	0	0	0
117	Kab. OKU Timur	2.691.546	0	13.354.439	0	13.354.439
118	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0	0
119	Kab. Empat Lawang	3.400.000	15.747.328	0	0	15.747.328

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
113	Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	20.090.125
114	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0	0	65.115.816
115	Kab. Banyuasin	0	0	0	0	1.788.910	19.014.098
116	Kab. Ogan Ilir	4.848.485	3.403.041	0	3.403.041	0	11.927.502
117	Kab. OKU Timur	0	0	0	0	10.757.825	26.803.810
118	Kab. OKU Selatan	0	0	0	0	0	0
119	Kab. Empat Lawang	4.729.774	1.076.238	0	1.076.238	0	24.953.340

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	0	0	0
122	Provinsi Bengkulu	3.000.000	0	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	4.274.413	0	0	0	0
124	Kab. Bengkulu Utara	2.262.000	0	0	0	0
125	Kab. Rejang Lebong	8.519.015	0	0	0	0
126	Kota Bengkulu	1.121.167	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0	0	0
121	Kab. Musi Rawas Utara	4.259.620	0	0	0	0	4.259.620
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0	0	0	3.000.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	0	0	4.274.413
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	0	0	2.262.000
125	Kab. Rejang Lebong	0	0	0	0	0	8.519.015
126	Kota Bengkulu	0	0	0	0	0	1.121.167

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
127	Kab. Kaur	0	0	0	0	0
128	Kab. Seluma	6.300.000	0	0	0	0
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	0	0
130	Kab. Lebong	3.648.476	0	0	0	0
131	Kab. Kepahiang	4.200.000	0	0	0	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0	0
133	Provinsi Lampung	21.864.440	0	0	0	0
134	Kab. Lampung Barat	4.479.405	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
127	Kab. Kaur	0	0	0	0	0	0
128	Kab. Seluma	0	0	0	0	0	6.300.000
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	0	0	0
130	Kab. Lebong	0	0	0	0	0	3.648.476
131	Kab. Kepahiang	0	0	0	0	0	4.200.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0	0	0
133	Provinsi Lampung	0	0	0	0	0	21.864.440
134	Kab. Lampung Barat	0	0	0	0	0	4.479.405

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
135	Kab. Lampung Selatan	13.482.894	3.270.000	0	0	3.270.000
136	Kab. Lampung Tengah	4.184.670	0	0	0	0
137	Kab. Lampung Utara	36.484.838	14.462.096	0	0	14.462.096
138	Kab. Lampung Timur	25.329.663	0	0	0	0
139	Kab. Tanggamus	0	0	0	0	0
140	Kab. Tulang Bawang	1.896.978	9.771.674	0	0	9.771.674
141	Kab. Way Kanan	4.353.556	14.800.000	0	0	14.800.000
142	Kota Bandar Lampung	0	4.957.050	0	0	4.957.050

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
135	Kab. Lampung Selatan	0	0	0	0	0	16.752.894
136	Kab. Lampung Tengah	0	0	0	0	0	4.184.670
137	Kab. Lampung Utara	0	0	0	0	0	30.946.934
138	Kab. Lampung Timur	0	0	0	0	0	25.329.663
139	Kab. Tanggamus	0	0	0	0	0	0
140	Kab. Tulang Bawang	0	0	0	0	0	11.668.652
141	Kab. Way Kanan	0	0	0	0	0	19.153.556
142	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0	0	4.957.050

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
143	Kota Metro	0	18.057.600	0	0	18.057.600
144	Kab. Pesawaran	2.706.006	0	0	0	0
145	Kab. Pringsewu	15.549.176	0	0	0	0
146	Kab. Mesuji	3.911.591	0	0	0	0
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0
148	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	0	0
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
143	Kota Metro	0	0	0	0	0	18.057.600
144	Kab. Pesawaran	0	0	0	0	0	2.706.006
145	Kab. Pringsewu	0	0	0	0	0	15.549.176
146	Kab. Mesuji	0	0	0	0	0	3.911.591
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	0	0	0
148	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	0	0	0
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
151	Kab. Bandung	0	0	0	0	0
152	Kab. Bekasi	0	0	0	0	0
153	Kab. Bogor	0	0	0	0	0
154	Kab. Ciamis	12.024.550	0	0	0	0
155	Kab. Cianjur	0	13.470.000	0	0	13.470.000
156	Kab. Cirebon	0	0	0	0	0
157	Kab. Garut	0	0	0	0	0
158	Kab. Indramayu	2.522.627	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
151	Kab. Bandung	0	0	0	0	0	0
152	Kab. Bekasi	0	0	0	0	0	0
153	Kab. Bogor	4.812.283	3.220.119	0	3.220.119	0	8.032.402
154	Kab. Ciamis	4.906.446	3.458.618	0	3.458.618	0	20.389.614
155	Kab. Cianjur	0	0	0	0	0	13.470.000
156	Kab. Cirebon	0	0	0	0	0	0
157	Kab. Garut	0	0	0	0	6.558.464	6.558.464
158	Kab. Indramayu	0	0	0	0	0	2.522.627

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
159	Kab. Karawang	0	0	0	0	0
160	Kab. Kuningan	14.229.965	29.625.000	0	0	29.625.000
161	Kab. Majalengka	2.573.463	14.850.000	0	0	14.850.000
162	Kab. Purwakarta	1.398.335	0	0	0	0
163	Kab. Subang	0	0	0	0	0
164	Kab. Sukabumi	0	14.850.000	0	0	14.850.000
165	Kab. Sumedang	1.594.036	0	0	0	0
166	Kab. Tasikmalaya	1.550.471	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
159	Kab. Karawang	0	0	0	0	0	0
160	Kab. Kuningan	0	0	0	0	0	43.854.965
161	Kab. Majalengka	0	0	0	0	0	17.423.463
162	Kab. Purwakarta	0	0	0	0	0	1.398.335
163	Kab. Subang	0	0	0	0	0	0
164	Kab. Sukabumi	0	0	0	0	0	14 850.000
165	Kab. Sumedang	0	0	0	0	0	1.594.036
166	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	0	0	1 550 471

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
167	Kota Bandung	0	0	0	0	0
168	Kota Bekasi	0	0	0	0	0
169	Kota Bogor	0	0	0	0	0
170	Kota Cirebon	0	0	0	0	0
171	Kota Depok	0	0	0	0	0
172	Kota Sukabumi	0	0	0	0	0
173	Kota Tasikmalaya	1.749.021	0	0	0	0
174	Kota Cimahi	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
167	Kota Bandung	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
168	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0
169	Kota Bogor	0	0	0	0	0	0
170	Kota Cirebon	0	0	0	0	0	0
171	Kota Depok	0	0	0	0	0	0
172	Kota Sukabumi	3.087.500	2.642.262	0	2.642.262	0	5.729.762
173	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0	0	1.749.021
174	Kota Cimahi	0	0	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
175	Kota Banjar	1.270.732	0	0	0	0
176	Kab. Bandung Barat	4.605.075	0	0	0	0
177	Kab. Pangandaran	0	0	0	0	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	1.237.687	0	18.588.104	0	18.588.104
180	Kab. Banyumas	0	6.480.584	0	0	6.480.584
181	Kab. Batang	1.876.295	0	0	0	0
182	Kab. Blora	1.246.339	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
175	Kota Banjar	0	0	0	0	0	1.270.732
176	Kab. Bandung Barat	506.738	0	0	0	0	5.111.813
177	Kab. Pangandaran	0	0	0	0	0	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	0	0	0	0	1.190.651	21.016.442
180	Kab. Banyumas	0	0	0	0	0	6.480.584
181	Kab. Batang	0	0	0	0	0	1.876.295
182	Kab. Blora	0	0	0	0	0	1.246 339

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
183	Kab. Boyolali	0	0	0	0	0
184	Kab. Brebes	17.250.000	15.597.998	0	0	15.597.998
185	Kab. Cilacap	0	22.749.000	0	0	22.749.000
186	Kab. Demak	0	0	0	0	0
187	Kab. Grobogan	41.424.761	16.613.069	13.887.861	0	30.500.930
188	Kab. Jepara	0	9.378.312	0	0	9.378.312
189	Kab. Karanganyar	1.038.118	48.846.000	0	0	48.846.000
190	Kab. Kebumen	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
183	Kab. Boyolali	0	0	0	0	0	0
184	Kab. Brebes	0	0	0	0	0	32.847.998
185	Kab. Cilacap	0	0	0	0	0	22.749.000
186	Kab. Demak	0	0	0	0	0	0
187	Kab. Grobogan	5.669.349	2.719.032	0	2.719.032	10.261.303	90.575.375
188	Kab. Jepara	0	0	0	0	0	9.378.312
189	Kab. Karanganyar	0	0	0	0	0	49.884.118
190	Kab. Kebumen	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
191	Kab. Kendal	0	0	0	0	0
192	Kab. Klaten	0	15.050.000	0	9.386.698	24.436.698
193	Kab. Kudus	0	0	0	0	0
194	Kab. Magelang	2.487.453	0	0	8.402.764	8.402.764
195	Kab. Pati	0	0	0	0	0
196	Kab. Pekalongan	1.245.742	0	0	0	0
197	Kab. Pemalang	0	29.838.358	0	0	29.838.358
198	Kab. Purbalingga	17.450.339	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
191	Kab. Kendal	0	0	0	0	0	0
192	Kab. Klaten	0	0	650.000	650.000	0	25.086.698
193	Kab. Kudus	0	0	0	0	0	0
194	Kab. Magelang	3.930.006	0	660.833	660.833	0	15.481.056
195	Kab. Pati	0	0	0	0	6.985.545	6.985.545
196	Kab. Pekalongan	0	0	0	0	0	1.245.742
197	Kab. Pemalang	0	0	0	0	0	29.838.358
198	Kab. Purbalingga	0	0	0	0	0	17.450.339

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
199	Kab. Purworejo	0	0	0	0	0
200	Kab. Rembang	2.802.919	15.010.717	0	0	15.010.717
201	Kab. Semarang	0	14.573.354	0	0	14.573.354
202	Kab. Sragen	2.387.671	0	0	0	0
203	Kab. Sukoharjo	0	0	0	0	0
204	Kab. Tegal	17.668.695	44.993.967	0	0	44.993.967
205	Kab. Temanggung	0	0	18.987.631	0	18.987.631
206	Kab. Wonogiri	0	12.187.000	0	0	12.187.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
199	Kab. Purworejo	0	0	0	0	0	0
200	Kab. Rembang	0	0	0	0	0	17.813.636
201	Kab. Semarang	0	0	0	0	0	14.573.354
202	Kab. Sragen	0	0	0	0	0	2.387.671
203	Kab. Sukoharjo	0	0	0	0	0	0
204	Kab. Tegal	0	0	0	0	0	62.662.662
205	Kab. Temanggung	3.290.533	2.509.961	0	2.509.961	1.583.625	26.371.750
206	Kab. Wonogiri	0	0	0	0	0	12.167.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
207	Kab. Wonosobo	1.306.250	0	0	8.138.565	8.138.565
208	Kota Magelang	0	0	0	0	0
209	Kota Pekalongan	0	0	0	0	0
210	Kota Salatiga	0	0	0	0	0
211	Kota Semarang	0	0	0	0	0
212	Kota Surakarta	1.260.000	0	0	0	0
213	Kota Tegal	0	0	0	0	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
207	Kab. Wonosobo	3.650.097	2.979.524	650.000	3.629.524	0	16.724.436
208	Kota Magelang	0	0	0	0	0	0
209	Kota Pekalongan	0	0	0	0	0	0
210	Kota Salatiga	0	0	0	0	0	0
211	Kota Semarang	0	0	0	0	0	0
212	Kota Surakarta	0	0	0	0	0	1.260.000
213	Kota Tegal	2.500.000	540.001	0	540.001	0	3.040.001
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
215	Kab. Bantul	0	14.987.070	0	0	14.987.070
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	5.904.243	0	0	0	0
221	Kab. Bangkalan	0	2.000.000	35.578.516	0	37.578.516
222	Kab. Banyuwangi	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
215	Kab. Bantul	0	0	0	0	0	14.987.070
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0	0	0
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0	0	5.904.243
221	Kab. Bangkalan	0	0	0	0	4.942.047	42.520.563
222	Kab. Banyuwangi	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
223	Kab. Blitar	0	0	0	0	0
224	Kab. Bojonegoro	1.741.629	37.450.000	0	0	37.450.000
225	Kab. Bondowoso	0	0	0	0	0
226	Kab. Gresik	0	19.500.000	0	0	19.500.000
227	Kab. Jember	39.485.913	43.744.579	0	0	43.744.579
228	Kab. Jombang	3.959.000	0	0	0	0
229	Kab. Kediri	2.211.176	0	0	0	0
230	Kab. Lamongan	0	34.544.000	0	0	34.544.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
223	Kab. Blitar	0	0	0	0	0	0
224	Kab. Bojonegoro	0	0	0	0	0	39.191.629
225	Kab. Bondowoso	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
226	Kab. Gresik	0	0	0	0	0	19.500.000
227	Kab. Jember	3.184.100	2.975.393	0	2.975.393	0	89.389.985
228	Kab. Jombang	0	0	0	0	0	3.959.000
229	Kab. Kediri	0	0	0	0	0	2.211.176
230	Kab. Lamongan	0	0	0	0	0	34.544.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
231	Kab. Lumajang	0	14.875.000	0	0	14.875.000
232	Kab. Madiun	1.158.527	0	0	0	0
233	Kab. Magetan	2.523.254	0	0	7.136.799	7.136.799
234	Kab. Malang	0	0	0	10.258.340	10.258.340
235	Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0
236	Kab. Nganjuk	0	0	16.111.790	0	16.111.790
237	Kab. Ngawi	3.652.099	14.770.000	0	0	14.770.000
238	Kab. Pacitan	2.753.435	14.200.000	0	8.843.607	23.043.607

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
231	Kab. Lumajang	0	0	0	0	0	14.875.000
232	Kab. Madiun	0	0	0	0	0	1.158.527
233	Kab. Magetan	1.250.000	1.500.000	650.000	2.150.000	0	13.060.053
234	Kab. Malang	0	0	650.000	650 000	0	10.908.340
235	Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0	0
236	Kab. Nganjuk	0	0	0	0	2.574.857	18.686.647
237	Kab. Ngawi	0	0	0	0	0	18.422.099
238	Kab. Pacitan	0	0	617.500	617.500	0	26.414.542

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
239	Kab. Pamekasan	23.737.390	0	0	0	0
240	Kab. Pasuruan	0	15.675.000	0	0	15.675.000
241	Kab. Ponorogo	3.830.656	22.740.421	0	7.441.016	30.181.437
242	Kab. Probolinggo	4.112.598	0	16.574.091	0	16.574.091
243	Kab. Sampang	0	0	0	0	0
244	Kab. Sidoarjo	0	0	0	0	0
245	Kab. Situbondo	3.830.904	0	0	0	0
246	Kab. Sumenep	0	35.757.500	13.610.620	0	49.368.120

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
239	Kab. Pamekasan	3.824.750	0	0	0	0	27.562.140
240	Kab. Pasuruan	4.099.598	0	0	0	0	19.774.598
241	Kab. Ponorogo	0	0	660.833	660.833	0	34.672.926
242	Kab. Probolinggo	4.052.347	3.357.877	0	3.357.877	5.806.625	33.903.538
243	Kab. Sampang	0	0	0	0	0	0
244	Kab. Sidoarjo	0	0	0	0	0	0
245	Kab. Situbondo	0	0	0	0	0	3.830.904
246	Kab. Sumenep	2.500.000	1.500.000	0	1.500.000	3.695.125	57.063.245

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
247	Kab. Trenggalek	3.350.000	19.700.000	0	0	19.700.000
248	Kab. Tuban	0	14.850.000	0	0	14.850.000
249	Kab. Tulungagung	1.335.000	14.790.000	19.561.368	0	34.351.368
250	Kota Blitar	0	0	0	0	0
251	Kota Kediri	0	0	0	0	0
252	Kota Madiun	0	0	0	0	0
253	Kota Malang	2.823.400	14.968.000	0	0	14.968.000
254	Kota Mojokerto	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
247	Kab. Trenggalek	2.499.890	0	0	0	1.800.000	27.349.890
248	Kab. Tuban	0	0	0	0	0	14.850.000
249	Kab. Tulungagung	0	0	0	0	2.850.525	38.536.893
250	Kota Blitar	0	0	0	0	0	0
251	Kota Kediri	0	0	0	0	0	0
252	Kota Madiun	0	0	0	0	0	0
253	Kota Malang	0	0	0	0	0	17.791.400
254	Kota Mojokerto	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
255	Kota Pasuruan	3.207.271	0	0	0	0
256	Kota Probolinggo	1.300.000	0	0	0	0
257	Kota Surabaya	0	0	0	0	0
258	Kota Batu	0	0	0	0	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	46.439.924	25.701.394	0	0	25.701.394
261	Kab. Landak	3.771.515	0	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
255	Kota Pasuruan	0	0	0	0	0	3.207.271
256	Kota Probolinggo	1.159.927	3.215.833	0	3.215.833	0	5.675.760
257	Kota Surabaya	0	0	0	0	0	0
258	Kota Batu	0	0	0	0	0	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0	0	0	72.141.318
261	Kab. Landak	4.629.615	3.289.116	0	3.289.116	0	11 690 246
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0	0	0
265	Kab. Sambas	5.200.000	8.369.658	0	0	8.369.658
266	Kab. Sanggau	8.835.000	9.555.293	0	0	9.555.293
267	Kab. Sintang	2.430.000	0	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	3.685.319	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	3.562.500	0	0	0	0	3.562.500
265	Kab. Sambas	5.248.203	3.416.189	0	3.416.189	0	22.234.050
266	Kab. Sanggau	0	0	0	0	0	18.390.293
267	Kab. Sintang	0	0	0	0	0	2.430.000
268	Kota Pontianak	0	0	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0	0	0	3.685.319

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
271	Kab. Melawi	4.544.132	0	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	3.541.300	0	0	0	0
273	Kab. Kubu Raya	0	33.130.000	0	0	33.130.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	2.500.000	0	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	0	0
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
271	Kab. Melawi	0	0	0	0	0	4.544.132
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	0	0	3.541.300
273	Kab. Kubu Raya	4.533.011	0	0	0	0	37.663.011
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	2.340.527	0	2.340.527	0	4.840.527
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	0	0	0
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	29.057.944	0	0	0	0
281	Kab. Katingan	2.200.000	0	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0	0	0
283	Kab. Sukamara	494.000	0	0	0	0
284	Kab. Lamandau	2.281.300	0	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	3.050.000	0	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	1.260.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	2.515.841	0	2.515.841	0	2.515.841
280	Kota Palangkaraya	0	0	0	0	0	29.057.944
281	Kab. Katingan	0	0	0	0	0	2.200.000
282	Kab. Seruyan	0	2.415.717	0	2.415.717	0	2.415.717
283	Kab. Sukamara	0	0	0	0	0	494.000
284	Kab. Lamandau	0	0	0	0	0	2.281.300
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	0	0	3.050.000
286	Kab. Pulang Pisau	3.690.000	0	0	0	0	4.950.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	2.300.000	14.800.000	0	0	14.800.000
291	Kab. Barito Kuala	2.147.000	0	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	2.046.800	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0	0	0
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	3.577.452	2.473.557	0	2.473.557	0	23.151.009
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	0	0	2.147.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.615.810	2.760.044	0	2.760.044	0	6.375.854
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	3.407.529	0	3.407.529	0	5.454.329

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	0	0
296	Kab. Tabalong	1.425.000	0	0	0	0
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	0	0
298	Kab. Tapin	1.403.299	0	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	3.400.000	0	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	0	0
301	Kab. Balangan	0	0	0	0	0
302	Kab. Tanah Bumbu	1.502.625	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	0	0	0
296	Kab. Tabalong	0	0	0	0	0	1.425.000
297	Kab. Tanah Laut	0	3.176.955	0	3.176.955	0	3.176.955
298	Kab. Tapin	0	0	0	0	0	1.403.299
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	0	0	3.400.000
300	Kota Banjarmasin	0	2.349.920	0	2.349.920	0	2.349.920
301	Kab. Balangan	2.712.793	3.211.142	0	3.211.142	0	5.923.935
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	0	0	1.502.625

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	0	0
304	Kab. Berau	0	10.868.566	0	0	10.868.566
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0
306	Kab. Kutai Barat	2.755.000	0	0	0	0
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	0	0
308	Kab. Paser	0	0	0	0	0
309	Kota Balikpapan	0	0	0	0	0
310	Kota Bontang	0	6.500.000	0	0	6.500.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
304	Kab. Berau	0	0	0	0	0	10.868.566
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	0	0	0
306	Kab. Kutai Barat	0	2.949.280	0	2.949.280	0	5.704.280
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	0	0	0
308	Kab. Paser	0	0	0	0	0	0
309	Kota Balikpapan	0	0	0	0	0	0
310	Kota Bontang	0	0	0	0	0	6.500.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
311	Kota Samarinda	0	0	0	0	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	0	0
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	5.820.000	0	0	0	0
316	Kab. Minahasa	1.260.000	0	0	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	29.269.877	0	0	0	0
318	Kota Bitung	6.187.973	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
311	Kota Samarinda	0	0	0	0	0	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	1.539.925	0	1.539.925	0	1.539.925
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	0	0	5.820.000
316	Kab. Minahasa	0	0	0	0	0	1.260.000
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	0	0	0	29.269.877
318	Kota Bitung	0	1.076.238	0	1.076.238	0	7.264.211

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
319	Kota Manado	4.950.000	0	0	0	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	13.513.000	0	0	0	0
321	Kab. Minahasa Selatan	11.137.550	0	0	0	0
322	Kota Tomohon	4.117.464	0	0	0	0
323	Kab. Minahasa Utara	1.308.029	0	0	0	0
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	4.196.000	14.739.998	0	0	14.739.998
325	Kota Kotamobagu	3.991.000	3.069.000	0	0	3.069.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
319	Kota Manado	0	0	0	0	0	4.950.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0	0	0	13.513.000
321	Kab. Minahasa Selatan	0	0	0	0	0	11.137.550
322	Kota Tomohon	0	0	0	0	0	4.117.464
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	0	0	1.308.029
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	0	0	0	0	18.935.998
325	Kota Kotamobagu	0	0	0	0	0	7.060.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	13.012.807	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0	0	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	13.012.807

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
331	Kab. Banggai	8.500.000	0	0	0	0
332	Kab. Banggai Kepulauan	2.780.328	0	0	0	0
333	Kab. Buol	1.312.181	13.041.460	0	0	13.041.460
334	Kab. Toli-Toli	1.308.029	0	0	0	0
335	Kab. Donggala	2.292.500	0	0	0	0
336	Kab. Morowali	1.197.000	0	0	0	0
337	Kab. Poso	0	0	0	0	0
338	Kota Palu	52.908.345	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
331	Kab. Banggai	2.220.000	0	0	0	0	10.720.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	2.780.328
333	Kab. Buol	4.620.561	0	0	0	0	18.974.202
334	Kab. Toli-Toli	4.553.689	0	0	0	0	5.861.718
335	Kab. Donggala	4.777.197	0	0	0	0	7.069.697
336	Kab. Morowali	0	0	0	0	0	1.197.000
337	Kab. Poso	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	900.000	3.900.000
338	Kota Palu	4.300.000	3.449.568	0	3.449.568	600.000	61.257.913

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
339	Kab. Parigi Moutong	1.282.500	0	0	0	0
340	Kab. Tojo Una Una	5.258.800	0	0	0	0
341	Kab. Sigi	44.842.358	7.911.800	0	0	7.911.800
342	Kab. Banggai Laut	1.868.484	0	0	0	0
343	Kab. Morowali Utara	3.541.300	0	0	0	0
344	Provinsi Sulawesi Selatan	20.340.746	0	0	0	0
345	Kab. Bantaeng	3.325.000	15.150.000	0	0	15.150.000
346	Kab. Barru	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
339	Kab. Parigi Moutong	1.400.000	0	0	0	900.000	3.582.500
340	Kab. Tojo Una Una	1.495.660	1.500.000	0	1.500.000	600.000	8.854.460
341	Kab. Sigi	1.500.000	3.389.899	0	3.389.899	0	57.644.057
342	Kab. Banggai Laut	0	0	0	0	0	1.868.484
343	Kab. Morowali Utara	0	0	0	0	0	3.541.300
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0	0	0	20.340.746
345	Kab. Bantaeng	0	0	0	0	0	18.475.000
346	Kab. Barru	1.360.000	3.362.505	0	3.362.505	0	4.722.505

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
347	Kab. Bone	2.111.884	0	15.505.195	0	15.505.195
348	Kab. Bulukumba	13.817.464	5.998.969	0	0	5.998.969
349	Kab. Enrekang	3.080.090	0	0	0	0
350	Kab. Gowa	0	0	0	0	0
351	Kab. Jeneponto	0	0	0	0	0
352	Kab. Luwu	0	0	0	0	0
353	Kab. Luwu Utara	2.747.987	0	0	0	0
354	Kab. Maros	20.452.576	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
347	Kab. Bone	0	3.504.723	0	3.504.723	7.301.655	28.423.457
348	Kab. Bulukumba	5.099.596	3.416.189	0	3.416.189	0	28.332.218
349	Kab. Enrekang	0	0	0	0	0	3.080.090
350	Kab. Gowa	0	0	0	0	0	0
351	Kab. Jeneponto	0	3.076.378	0	3.076.378	0	3.076.378
352	Kab. Luwu	0	0	0	0	0	0
353	Kab. Luwu Utara	0	0	0	0	0	2.747.987
354	Kab. Maros	0	3.384.544	0	3.384.544	0	23.837.120

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.401.459	9.500.000	0	0	9.500.000
356	Kota Palopo	0	0	0	0	0
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	0	0
358	Kab. Pinrang	3.619.900	0	18.433.445	0	18.433.445
359	Kab. Sinjai	3.538.280	0	0	0	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	2.751.013	0	0	0	0
361	Kab. Sidenreng Rappang	3.840.346	15.595.560	0	0	15.595.560
362	Kab. Soppeng	1.260.000	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	0	0	0	0	10.901.459
356	Kota Palopo	0	0	0	0	0	0
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	0	0	0
358	Kab. Pinrang	0	0	0	0	2.451.686	24.505.031
359	Kab. Sinjai	4.015.300	3.032.175	0	3.032.175	0	10.585.755
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	1.949.568	0	1.949.568	0	4.700.581
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	3.369.179	0	3 369.179	0	22.805.085
362	Kab. Soppeng	0	3.502.426	0	3.502.426	0	4.762.426

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
363	Kab. Takalar	2.927.000	0	0	0	0
364	Kab. Tana Toraja	10.416.678	0	0	0	0
365	Kab. Wajo	0	0	16.365.974	0	16.365.974
366	Kota Pare-pare	24.109.180	3.277.750	0	0	3.277.750
367	Kota Makassar	0	0	0	0	0
368	Kab. Toraja Utara	8.834.288	0	0	0	0
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.660.000	0	0	0	0
370	Kab. Buton	2.272.588	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
363	Kab. Takalar	0	3.427.267	0	3.427.267	0	6.354.267
364	Kab. Tana Toraja	0	3.504.723	0	3.504.723	0	13.921.401
365	Kab. Wajo	0	0	0	0	1.741.837	18.107.811
366	Kota Pure pure	3.600.000	1.076.238	0	1.076.238	0	32.063.168
367	Kota Makassar	0	0	0	0	0	0
368	Kab. Toraja Utara	0	0	0	0	0	8.834.288
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	2.660.000
370	Kab. Buton	0	0	0	0	0	2.272.588

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
371	Kab. Konawe	0	0	17.834.871	0	17.834.871
372	Kab. Kolaka	0	0	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0	0
375	Kota Bau-bau	8.661.863	0	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	9.300.000	0	0	0	0
377	Kab. Bombana	0	10.916.637	0	0	10.916.637
378	Kab. Wakatobi	1.652.136	0	0	9.244.656	9.244.656

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
371	Kab. Konawe	0	1.867.557	0	1.867.557	3.035.281	22.737.709
372	Kab. Kolaka	0	3.165.680	0	3.165.680	0	3.165.680
373	Kab. Muna	0	0	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0	0	0
375	Kota Bau-bau	1.083.450	2.872.565	0	2.872.565	0	12.617.878
376	Kab. Konawe Selatan	0	3.410.233	0	3.410.233	0	12.710.233
377	Kab. Bombana	0	0	0	0	0	10.916.637
378	Kab. Wakatobi	0	0	650.000	650.000	0	11.546.792

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
379	Kab. Kolaka Utara	3.425.789	15.750.000	0	0	15.750.000
380	Kab. Konawe Utara	0	9.600.659	0	0	9.600.659
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	4.670.801	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
379	Kab. Kolaka Utara	0	2.797.499	0	2.797.499	0	21.973.288
380	Kab. Konawe Utara	0	3.168.269	0	3.168.269	0	12.768.928
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0	0	0
385	Kab. Buton Tengah	0	3.408.572	0	3.408.572	0	3.408.572
386	Kab. Buton Selatan	0	1.949.568	0	1.949.568	0	6.620.369

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
387	Provinsi Bali	0	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0	8.880.688	8.880.688
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	2.500.000	0	0	0	0
393	Kab. Karangasem	2.429.196	0	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	15.000.000	0	9.457.617	24.457.617

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
387	Provinsi Bali	0	0	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	600.001	600.001	0	9.480.689
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0	0	0
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0	0	0	2.500.000
393	Kab. Karangasem	0	0	0	0	0	2.429.196
394	Kab. Klungkung	0	0	648.000	648.000	0	25.105.617

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0
398	Kab. Bima	4.453.964	0	0	0	0
399	Kab. Dompu	4.374.885	0	0	0	0
400	Kab. Lombok Barat	1.121.167	0	0	0	0
401	Kab. Lombok Tengah	7.747.391	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
398	Kab. Bima	8.353.461	1.539.300	0	1.539.300	3.000.000	17.346.725
399	Kab. Dompu	0	0	0	0	0	4.374.885
400	Kab. Lombok Barat	0	0	0	0	0	1.121.167
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0	0	7.747.391

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402	Kab. Lombok Timur	6.295.800	0	0	7.688.713	7.688.713
403	Kab. Sumbawa	0	0	0	0	0
404	Kota Mataram	0	0	0	0	0
405	Kota Bima	0	0	0	0	0
406	Kab. Sumbawa Barat	2.448.266	0	0	0	0
407	Kab. Lombok Utara	3.100.000	0	0	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	20.900.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
402	Kab. Lombok Timur	4.640.180	2.951.497	0	2.951.497	0	21.576.190
403	Kab. Sumbawa	5.617.381	2.994.390	0	2.994.390	0	8.611.771
404	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0
405	Kota Bima	5.142.955	1.529.557	0	1.529.557	0	6.672.512
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0	0	2.448.266
407	Kab. Lombok Utara	3.974.044	1.511.643	0	1.511.643	0	8.585.687
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	20.900.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
409	Kab. Alor	3.723.828	8.951.797	0	0	8.951.797
410	Kab. Belu	0	10.095.414	0	0	10.095.414
411	Kab. Ende	1.446.052	0	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	1.203.802	0	0	0	0
413	Kab. Kupang	3.610.000	11.200.188	0	0	11.200.188
414	Kab. Lembata	15.549.011	0	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	953.329	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.12 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
409	Kab. Alor	0	0	0	0	0	12.675.625
410	Kab. Belu	0	2.432.955	0	2.432.955	0	12.528.369
411	Kab. Ende	0	0	0	0	0	1.446.052
412	Kab. Flores Timur	0	2.116.970	0	2.116.970	0	3.320.772
413	Kab. Kupang	0	0	0	0	0	14.810.188
414	Kab. Lembata	0	0	0	0	0	15.549.011
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0	0	0	953.329

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
417	Kab. Sikka	9.211.630	0	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	2.778.144	11.115.555	0	0	11.115.555
419	Kab. Sumba Timur	0	9.129.107	0	0	9.129.107
420	Kab. Timor Tengah Selatan	11.656.093	12.299.852	0	0	12.299.852
421	Kab. Timor Tengah Utara	11.572.396	6.156.724	0	0	6.156.724
422	Kota Kupang	0	0	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	3.562.193	9.843.407	0	0	9.843.407
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
417	Kab. Sikka	0	0	0	0	0	9.211.630
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	0	0	13.893.699
419	Kab. Sumba Timur	0	2.439.638	0	2.439.638	0	11.568.745
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	1.061.368	0	1.061.368	0	25.017.313
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	17.729.120
422	Kota Kupang	0	2.497.624	0	2.497.624	0	2.497.624
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0	0	0	13.405.600
424	Kab. Manggarai Barat	0	2.401.804	0	2.401.804	0	2.401.804

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
425	Kab. Nagekeo	3.421.950	0	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	11.714.412	0	0	11.714.412
427	Kab. Sumba Tengah	4.117.000	11.181.711	0	0	11.181.711
428	Kab. Manggarai Timur	18.065.847	14.700.000	0	0	14.700.000
429	Kab. Sabu Raijua	0	7.645.798	0	0	7.645.798
430	Kab. Malaka	7.400.000	10.373.885	0	0	10.373.885
431	Provinsi Maluku	0	0	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	11.468.947	9.525.535	0	0	9.525.535

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
425	Kab. Nagekeo	0	0	0	0	0	3.421.950
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	600.000	600.000	0	12.314.412
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0	0	15.298.711
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0	0	32.765.847
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	0	0	7.645.798
430	Kab. Malaka	0	0	0	0	0	17.773.885
431	Provinsi Maluku	0	0	0	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.567.958	0	0	0	0	25.562.440

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
433	Kab. Maluku Tengah	5.800.000	0	0	0	0
434	Kab. Maluku Tenggara	1.330.000	8.556.344	0	0	8.556.344
435	Kab. Buru	0	0	0	0	0
436	Kota Ambon	0	0	0	0	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	989.313	8.667.100	0	0	8.667.100
438	Kab. Seram Bagian Timur	12.457.416	0	0	0	0
439	Kab. Kepulauan Aru	0	8.314.389	0	0	8.314.389
440	Kota Tual	0	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
433	Kab. Maluku Tengah	4.084.208	2.412.561	0	2.412.561	0	12.296.769
434	Kab. Maluku Tenggara	3.572.087	2.541.147	0	2.541.147	0	15.999.578
435	Kab. Buru	4.970.546	0	0	0	0	4.970.546
436	Kota Ambon	0	0	0	0	0	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	4.868.157	2.412.539	0	2.412.539	0	16.937.109
438	Kab. Seram Bagian Timur	4.509.436	0	0	0	0	16.966.852
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0	0	8.314.389
440	Kota Tual	3.827.946	2.376.951	0	2.376.951	0	6.204.897

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	26.026.222	0	0	26.026.222
442	Kab. Buru Selatan	0	10.010.612	0	0	10.010.612
443	Provinsi Papua	0	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	10.487.918	0	0	10.487.918
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	47.225.985	15.600.000	0	0	15,600.000
447	Kota Jayapura	0	15.825.469	0	0	15.825.469
448	Kab. Sarmi	0	9.046.829	0	0	9.046.829

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	0	0	26.026.222
442	Kab. Buru Selatan	3.717.869	0	0	0	0	13.728.481
443	Provinsi Papua	0	0	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	4.230.205	0	0	0	0	14.718.123
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	0	0	62.825.983
447	Kota Jayapura	0	0	0	0	0	15.825.469
448	Kab. Sarmi	0	0	0	0	0	9.046.829

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
449	Kab. Keerom	14.335.300	8.508.126	0	0	8.508.126
450	Kab. Waropen	0	8.766.117	0	0	8.766.117
451	Kab. Supiori	0	24.673.486	0	0	24.673.486
452	Kab. Mamberamo Raya	0	9.538.444	0	0	9.538.444
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	10.404.747	0	0	10.404.747
455	Kota Ternate	0	0	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	2.565.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
449	Kab. Keerom	0	0	0	0	0	22.843.426
450	Kab. Waropen	0	0	0	0	0	8.766.117
451	Kab. Supiori	0	0	0	0	0	24.673.486
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0	0	9.538.444
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	1.076.238	0	1.076.238	0	11.480.985
455	Kota Ternate	0	0	0	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	0	0	0	0	0	2.565.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	1.900.000	0	0	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	0	0
461	Kota Tidore Kepulauan	4.040.083	0	0	4.839.855	4.839.855
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	1.747.041	0	1.747.041	0	3.647.041
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	0	0	0
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	0	0	8.879.938
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	0	0
464	Provinsi Banten	11.285.352	0	0	0	0
465	Kab. Lebak	4.890.885	0	0	0	0
466	Kab. Pandeglang	8.503.277	0	0	0	0
467	Kab. Serang	0	0	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0	0	0
470	Kota Tangerang	1.844.186	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	0	0	0
464	Provinsi Banten	0	0	0	0	0	11.285.352
465	Kab. Lebak	4.371.596	2.495.819	0	2.495.819	0	11.758.300
466	Kab. Pandeglang	4.837.888	0	0	0	0	13.341.165
467	Kab. Serang	0	0	0	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0	0	0	0
470	Kota Tangerang	0	0	0	0	0	1.844.186

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
471	Kota Serang	3.249.309	0	0	0	0
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	0	0
475	Kab. Belitung	0	0	0	9.941.969	9.941.969
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0
477	Kab. Bangka Selatan	5.105.564	14.850.000	0	0	14.850.000
478	Kab. Bangka Tengah	3.700.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
471	Kota Serang	1.417.500	0	0	0	3.000.000	7.666.809
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0	0	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	0	0	0
475	Kab. Belitung	0	0	600.000	600.000	0	10.541.969
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0	0	0
477	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	0	0	19.955.564
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	0	0	3.700.000

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0	0
480	Kab. Belitung Timur	4.838.342	0	0	0	0
481	Provinsi Gorontalo	44.437.652	0	0	0	0
482	Kab. Boalemo	1.577.939	15.750.000	0	0	15.750.000
483	Kab. Gorontalo	0	0	0	0	0
484	Kota Gorontalo	0	0	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	3.695.700	0	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	3.114.354	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0	0	0
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	0	0	4.838.342
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0	0	44.437.652
482	Kab. Boalemo	0	0	0	0	0	17.327.939
483	Kab. Gorontalo	780.562	1.949.568	0	1.949.568	0	2.730.130
484	Kota Gorontalo	1.789.419	1.000.000	0	1.000.000	0	2.789.419
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	0	0	3.695.700
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0	0	3.114.354

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
487	Kab. Gorontalo Utara	4.351.064	0	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	176.500	0	0	0	0
489	Kab. Natuna	2.283.860	0	0	0	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	8.339.984	0	0	8.339.984
491	Kab. Karimun	0	0	0	0	0
492	Kota Batam	0	0	0	0	0
493	Kota Tanjung Pinang	3.316.787	0	0	4.520.502	4.520.502
494	Kab. Lingga	2.167.500	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
487	Kab. Gorontalo Utara	4.296.436	1.076.238	0	1.076.238	0	9.723.738
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	176.500
489	Kab. Natuna	0	0	0	0	0	2.283.860
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	0	0	8.339.984
491	Kab. Karimun	0	0	0	0	0	0
492	Kota Batam	0	0	0	0	0	0
493	Kota Tanjung Pinang	0	0	615.430	615.430	0	8.452.719
494	Kab. Lingga	0	0	0	0	0	2.167.500

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
495	Kab. Bintan	0	0	0	0	0
496	Provinsi Papua Barat	4.202.196	0	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	9.991.977	0	0	0	0
498	Kab. Manokwari	10.027.250	0	0	0	0
499	Kab. Teluk Bintuni	0	10.515.058	0	0	10.515.058
500	Kab. Teluk Wondama	4.227.690	10.110.932	0	0	10.110.932
501	Kab. Kaimana	3.424.902	9.300.594	0	0	9.300.594
502	Kab. Manokwari Selatan	4.852.152	10.561.753	0	0	10.561.753

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
495	Kab. Bintan	0	0	0	0	0	0
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	0	0	4.202.196
497	Kab. Fak Fak	0	0	0	0	0	9.991.977
498	Kab. Manokwari	0	0	0	0	0	10.027.250
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	0	0	10.515.058
500	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	0	0	14.338.622
501	Kab. Kaimana	0	0	0	0	0	12.725.496
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	0	0	15.413.905

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	11.516.327	0	0	11.516.327
504	Provinsi Sulawesi Barat	2.430.000	0	0	0	0
505	Kab. Majene	1.308.029	0	0	0	0
506	Kab. Mamuju	9.719.468	0	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	2.430.000	0	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	8.449.500	0	0	8.449.500
509	Kab. Pasangkayu	0	25.225.196	0	0	25.225.196
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0	0	11.516.327
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	2.430.000
505	Kab. Majene	0	2.346.508	0	2.346.508	0	3.654.537
506	Kab. Mamuju	0	1.947.220	0	1.947.220	0	11.666.688
507	Kab. Polewali Mandar	0	2.593.659	0	2.593.659	0	5.023.659
508	Kab. Mamasa	0	1.661.974	0	1.661.974	0	10.111.474
509	Kab. Pasangkayu	0	2.244.704	0	2.244.704	0	27.469.900
510	Kab. Mamuju Tengah	0	2.378.998	0	2.378.998	0	2.378.998

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511	Provinsi Kalimantan Utara	50.413.937	0	0	0	0
512	Kab. Bulungan	2.295.680	0	0	0	0
513	Kab. Malinau	0	11.352.485	0	0	11.352.485
514	Kab. Nunukan	1.057.744	9.690.403	0	0	9.690.403
515	Kota Tarakan	3.357.162	0	0	0	0
516	Kab. Tana Tidung	0	10.805.309	0	0	10.805.309
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	25.132.666	0	0	25.132.666

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	30.413.937
512	Kab. Bulungan	0	0	0	0	0	2.295.680
513	Kab. Malinau	0	0	0	0	0	11.352.485
514	Kab. Nunukan	0	0	0	0	0	10.748.147
515	Kota Tarakan	0	0	0	0	0	3.357.162
516	Kab. Tana Tidung	0	0	0	0	0	10.805.309
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	0	0	25.132.666

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	8.885.093	0	0	8.885.093
521	Kab. Asmat	0	10.349.371	0	0	10.349.371
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	950.000	0	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	3.193.235	0	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	12.428.165	0	0	12.428.165

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0	0	0	8.885.093
521	Kab. Asmat	2.419.848	0	0	0	0	12.769.219
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0	0	0	950.000
524	Kab. Nabire	0	0	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0	0	0	3.193.235
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0	0	12.428.165

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
527	Kab. Dogiyai	0	10.376.390	0	0	10.376.390
528	Kab. Puncak	0	12.783.991	0	0	12.783.991
529	Kab. Intan Jaya	0	11.783.363	0	0	11.783.363
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	10.781.831	0	0	10.781.831
533	Kab. Yahukimo	0	10.146.250	0	0	10.146.250
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	12.572.074	0	0	12.572.074

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	0	0	10.376.390
528	Kab. Puncak	0	0	0	0	0	12.783.991
529	Kab. Intan Jaya	5.147.379	0	0	0	0	16.930.742
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	4.532.376	0	0	0	0	15.314.207
533	Kab. Yahukimo	4.358.718	0	0	0	0	14.504.968
534	Kab. Pegunungan Bintang	5.228.929	0	0	0	0	17.801.003

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
535	Kab. Tolikara	0	10.459.917	0	0	10.459.917
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	10.962.200	0	0	10.962.200
537	Kab. Yalimo	0	11.428.464	0	0	11.428.464
538	Kab. Lanny Jaya	0	11.168.358	0	0	11.168.358
539	Kab. Nduga	0	12.207.435	0	0	12.207.435
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0	0
541	Kab. Sorong	3.570.000	0	0	0	0
542	Kota Sorong	2.200.000	0	0	0	0

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
535	Kab. Tolikara	5.273.687	0	0	0	0	15.733.604
536	Kab. Mamberamo Tengah	5.173.860	0	0	0	0	16.136.060
537	Kab. Yalimo	4.365.982	0	0	0	0	15.794.446
538	Kab. Lanny Jaya	3.973.850	0	0	0	0	15.142.208
539	Kab. Nduga	5.280.014	0	0	0	0	17.487.449
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0	0	0
541	Kab. Sorong	0	1.076.238	0	1.076.238	0	4.646.238
542	Kota Sorong	0	1.076.238	0	1.076.238	0	3.276.238

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	KESEHATAN	KONEKTIVITAS			
		PENGUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN	JALAN	JALAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	JALAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL KONEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
543	Kab. Raja Ampat	0	9.473.827	0	0	9.473.827
544	Kab. Sorong Selatan	3.750.059	11.072.414	0	0	11.072.414
545	Kab. Maybrat	0	11.607.552	0	0	11.607.552
546	Kab. Tambrauw	20.000.000	0	0	0	0
	JUMLAH NASIONAL	1.874.490.454	1.948.095.506	286.020.832	141.928.352	2.376.044.690

V.12. RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	NAMA PEMDA	AIR MINUM	SANITASI			PANGAN PERTANIAN	TOTAL DAK FISIK
		AIR MINUM - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	AIR LIMBAH DOMESTIK - TEMATIK PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN - TEMATIK PARIWISATA	SUBTOTAL SANITASI	PERTANIAN - TEMATIK KAWASAN PRODUKSI PANGAN NASIONAL (KPPN)	
(1)	*(2)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
543	Kab. Raja Ampat	0	1.512.903	0	1.512.903	0	10.986.730
544	Kab. Sorong Selatan	0	1.076.238	0	1.076.238	0	15.898.711
545	Kab. Maybrat	0	0	0	0	0	11.607.552
546	Kab. Tambrauw	2.500.000	0	0	0	1.200 000	23.700.000
	JUMLAH NASIONAL	367.302.311	261.922.397	8 913.430	270.835.827	111.326.718	5.000.000.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Aceh	349.793.820	7.598.000	413.000	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	24.121.740	732.000	460.000	2.809.840	82.500	100.000
3	Kab. Aceh Besar	45.498.680	810.000	160.000	5.910.600	82.500	25.000
4	Kab. Aceh Selatan	30.628.660	717.500	760.000	6.265.200	82.500	575.000
5	Kab. Aceh Singkil	25.000.140	480.000	625.000	2.896.020	82.500	325.000
6	Kab. Aceh Tengah	28.440.540	682.500	315.000	3.596.670	82.500	125.000
7	Kab. Aceh Tenggara	35.612.080	742.500	320.000	5.247.600	82.500	200.000
8	Kab. Aceh Timur	62.038.560	967.500	470.000	7.394.740	82.500	100.000
9	Kab. Aceh Utara	86.515.060	1.504.500	2.215.000	9.600.000	82.500	1.775.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Provinsi Aceh	0	0	0	714.515.369	798.000	4.447.070
2	Kab. Aceh Barat	810.820	90.000	0	79.243.887	49.750	6.370.647
3	Kab. Aceh Besar	3.005.300	135.000	0	100.751.365	189.000	3.171.065
4	Kab. Aceh Selatan	510.900	90.000	31.000	82.702.028	44.250	6.876.604
5	Kab. Aceh Singkil	416.320	90.000	0	57.005.711	27.000	6.413.709
6	Kab. Aceh Tengah	257.360	45.000	0	96.107.364	78.000	3.877.424
7	Kab. Aceh Tenggara	2.363.200	135.000	0	76.696.068	90.000	1.377.031
8	Kab. Aceh Timur	11.139.620	180.000	31.000	151.999.579	291.000	5.588.827
9	Kab. Aceh Utara	11.670.500	225.000	93.000	201.850.743	264.000	26.929.700

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
1	Provinsi Aceh	700.000	3.000.000	1.500.000	0
2	Kab. Aceh Barat	500.000	0	0	3.319.489
3	Kab. Aceh Besar	500.000	0	0	5.875.084
4	Kab. Aceh Selatan	0	0	0	3.002.157
5	Kab. Aceh Singkil	498.545	0	0	1.704.442
6	Kab. Aceh Tengah	498.545	500.000	0	3.416.939
7	Kab. Aceh Tenggara	0	0	0	4.399.847
8	Kab. Aceh Timur	498.545	0	0	6.004.089
9	Kab. Aceh Utara	398.545	0	0	7.405.121

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
1	Provinsi Aceh	7.772.868	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	0	6 416 920	10.503.984	111.247
3	Kab. Aceh Besar	0	9 483 350	18.756.224	445.647
4	Kab. Aceh Selatan	0	7.133.271	17.664.329	86.359
5	Kab. Aceh Singkil	0	8.032.740	11.619.237	477.187
6	Kab. Aceh Tengah	0	6 680 627	9.011.241	383.982
7	Kab. Aceh Tenggara	0	7.976.077	16.822.920	209.986
8	Kab. Aceh Timur	0	9 715 134	17.364.888	203.917
9	Kab. Aceh Utara	0	9.962 700	28.644.493	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
1	Provinsi Aceh	0	408.000	1.090.946.127
2	Kab. Aceh Barat	0	408.000	136.150.824
3	Kab. Aceh Besar	0	0	194.798.815
4	Kab. Aceh Selatan	0	0	157.169.758
5	Kab. Aceh Singkil	7.202.880	0	122.896.431
6	Kab. Aceh Tengah	0	507.000	154.605.692
7	Kab. Aceh Tenggara	0	0	152.474.809
8	Kab. Aceh Timur	0	0	274.069.899
9	Kab. Aceh Utara	0	408.000	389.543.862

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Kab. Bireuen	56.682.680	925.000	1.090.000	6.834.260	82.500	525.000
11	Kab. Pidie	46.894.920	932.500	220.000	4.068.600	82.500	50.000
12	Kab. Simeulue	15.527.060	445.000	130.000	1.484.600	82.500	25.000
13	Kota Banda Aceh	37.957.100	365.000	0	5.380.050	82.500	0
14	Kota Sabang	5.664.400	102.500	0	758.200	82.500	0
15	Kota Langsa	19.807.000	262.500	0	3.010.200	82.500	0
16	Kota Lhokseumawe	26.660.890	320.000	0	2.272.410	82.500	0
17	Kab. Gayo Lues	16.529.850	400.000	95.000	1.987.220	82.500	25.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	18.422.080	410.000	0	3.882.600	82.500	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	Kab. Bireuen	7.104.190	135.000	93.000	130.869.251	57.000	15.404.107
11	Kab. Pidie	1.088.200	90.000	0	114.534.389	51.000	3.182.152
12	Kab. Simeulue	111.940	90.000	0	57.663.522	45.000	1.342.791
13	Kota Banda Aceh	3.122.970	90.000	0	64.619.228	21.000	0
14	Kota Sabang	463.560	90.000	0	19.828.543	21.000	0
15	Kota Langsa	2.113.900	135.000	0	44.014.212	15.000	0
16	Kota Lhokseumawe	471.020	45.000	0	54.682.822	84.000	0
17	Kab. Gayo Lues	380.900	45.000	31.000	51.584.304	57.000	2.238.919
18	Kab. Aceh Barat Daya	450.000	90.000	0	52.577.664	66.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
10	Kab. Bireuen	398.545	0	0	5.604.337
11	Kab. Pidie	498.545	0	0	7.024.933
12	Kab. Simeulue	0	0	0	1.859.499
13	Kota Banda Aceh	0	0	0	1.351.568
14	Kota Sabang	0	0	0	292.114
15	Kota Langsa	0	0	0	793.469
16	Kota Lhokseumawe	500.000	500.000	0	837.037
17	Kab. Gayo Lues	0	0	0	2.324.465
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	0	1.883.487

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	Kab. Bireuen	0	10.177.087	13.410.313	320.158
11	Kab. Pidie	0	8.480.816	18.640.118	596.125
12	Kab. Simeulue	0	6.159.402	10.067.468	189.710
13	Kota Banda Aceh	0	3.106.660	6.550.300	0
14	Kota Sabang	0	7.237.903	3.722.587	239.319
15	Kota Langsa	0	2.328.383	4.044.805	212.796
16	Kota Lhokseumawe	0	5.094.665	3.793.357	510.409
17	Kab. Gayo Lues	0	6.075.946	10.200.047	0
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	5.243.351	8.160.885	224.976

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
10	Kab. Bireuen	0	408.000	250.120.428
11	Kab. Pidie	0	0	206.434.798
12	Kab. Simeulue	5.762.304	0	100.985.796
13	Kota Banda Aceh	0	507.000	123.153.376
14	Kota Sabang	0	507.000	39.009.626
15	Kota Langsa	0	507.000	77.326.765
16	Kota Lhokseumawe	0	507.000	96.361.110
17	Kab. Gayo Lues	0	0	92.057.151
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	91.493.543

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Kab. Aceh Jaya	13.384.420	365.000	155.000	3.051.000	82.500	125.000
20	Kab. Nagan Raya	24.707.440	490 000	185.000	3.258 880	82.500	175 000
21	Kab. Aceh Tamiang	38.103.300	650 000	0	3.066 600	82.500	0
22	Kab. Bener Meriah	24.940.640	525 000	250.000	3.514 800	82.500	175 000
23	Kab. Pidie Jaya	17.647.820	365.000	125.000	2.559 000	82.500	25 000
24	Kota Subulussalam	17.865.220	415 000	155.000	2 860 200	82.500	125 000
25	Provinsi Sumatera Utara	1.083.750.170	13.167.000	5.705.000	0	0	0
26	Kab. Asahan	86.334.600	1 397 500	0	5.856.600	82.500	0
27	Kab. Dairi	54.909.890	852.500	120.000	1.841.490	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
19	Kab. Aceh Jaya	3.947.000	135.000	0	56.576.737	24.000	1.876.291
20	Kab. Nagan Raya	1.077.550	90.000	0	68.661.969	51.000	2.000.220
21	Kab. Aceh Tamiang	1.293.700	135.000	0	93.584.955	63.000	0
22	Kab. Bener Meriah	1.001.100	90.000	0	84.664.640	111.000	3.152.368
23	Kab. Pidie Jaya	1.190.400	90.000	0	48.464.081	12.000	1.474.928
24	Kota Subulussalam	799.300	90.000	0	34.756.977	12.000	2.003.794
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	650.819.443	147.000	50.105.485
26	Kab. Asahan	2.713.900	45.000	0	110.413.423	150.000	0
27	Kab. Dairi	161.140	45.000	0	109.137.384	52.250	469.874

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
19	Kab. Aceh Jaya	398.545	0	0	1.886.222
20	Kab. Nagan Raya	400.000	0	0	2.689.269
21	Kab. Aceh Tamiang	500.000	0	0	2.932.104
22	Kab. Bener Meriah	398.545	0	0	3.139.597
23	Kab. Pidie Jaya	0	600.000	0	3.022.759
24	Kota Subulussalam	0	0	0	1.019.349
25	Provinsi Sumatera Utara	400.000	1.300.000	1 700 000	0
26	Kab. Asahan	0	0	0	5.864.316
27	Kab. Dairi	398.545	0	0	3.043.340

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
19	Kab. Aceh Jaya	0	6.819.603	6.845.635	711.147
20	Kab. Nagan Raya	0	7.194.037	13.302.784	375.812
21	Kab. Aceh Tamiang	0	6.488.947	9.388.487	419.634
22	Kab. Bener Meriah	0	6.536.104	7.307.313	713.319
23	Kab. Pidie Jaya	0	5.418.695	8.149.532	311.416
24	Kota Subulussalam	0	5.181.681	4.790.328	60.828
25	Provinsi Sumatera Utara	16.121.097	0	0	0
26	Kab. Asahan	0	12.362.614	16.029.374	340.649
27	Kab. Dairi	0	7.235.069	12.786.130	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
19	Kab. Aceh Jaya	0	0	96.383.100
20	Kab. Nagan Raya	0	408.000	125.149.461
21	Kab. Aceh Tamiang	0	0	156.708.227
22	Kab. Bener Meriah	0	307.000	137.108.926
23	Kab. Pidie Jaya	0	0	89.538.131
24	Kota Subulussalam	0	0	70.217.177
25	Provinsi Sumatera Utara	0	408.000	1.823.623.195
26	Kab. Asahan	0	408.000	241.998.476
27	Kab. Dairi	0	408.000	191.543.112

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	Kab. Deli Serdang	252.616.690	3.327.500	0	14.784.570	82.500	0
29	Kab. Karo	57.524.900	875.000	0	2.576.100	82.500	0
30	Kab. Labuhanbatu	61.696.710	897.500	0	4.855.040	82.500	0
31	Kab. Langkat	121.197.860	2.115.000	95.000	7.750.200	82.500	75.000
32	Kab. Mandailing Natal	70.568.850	1.237.500	2.710.000	4.858.800	82.500	925.000
33	Kab. Nias	29.914.680	679.500	3.300.000	1.469.700	82.500	800.000
34	Kab. Simalungun	109.339.800	2.190.000	30.000	6.141.600	82.500	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	43.429.730	862.500	940.000	3.468.150	82.500	250.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	48.665.800	1.057.500	1.360.000	2.542.800	82.500	325.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
28	Kab. Deli Serdang	16.809.910	405.000	0	247.245.003	222.000	0
29	Kab. Karo	277.180	45.000	0	97.713.160	129.000	0
30	Kab. Labuhanbatu	2.951.510	90.000	0	102.928.557	240.000	0
31	Kab. Langkat	3.899.900	180.000	31.000	227.457.097	588.000	791.873
32	Kab. Mandailing Natal	922.110	90.000	31.000	197.484.218	402.000	31.872.031
33	Kab. Nias	1.037.960	135.000	124.000	65.478.788	141.000	32.511.857
34	Kab. Simalungun	430.500	45.000	0	233.220.415	324.000	213.920
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.318.300	45.000	0	92.622.428	147.000	7.722.224
36	Kab. Tapanuli Tengah	253.360	90.000	0	78.398.003	150.000	9.955.670

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
28	Kab. Deli Serdang	0	600.000	0	10.311.194
29	Kab. Karo	398.545	0	0	3.321.707
30	Kab. Labuhanbatu	0	0	0	3.513.920
31	Kab. Langkat	500.000	600.000	0	7.298.717
32	Kab. Mandailing Natal	498.545	0	0	6.326.900
33	Kab. Nias	0	0	0	2.103.080
34	Kab. Simalungun	398.545	0	0	6.836.628
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	0	0	3.522.874
36	Kab. Tapanuli Tengah	398.545	0	0	3.766.883

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
28	Kab. Deli Serdang	0	13.145.838	34.322.950	887.974
29	Kab. Karo	0	8.631.282	10.958.656	225.193
30	Kab. Labuhanbatu	0	8.749.717	10.736.091	338.507
31	Kab. Langkat	0	13.843.922	18.549.031	280.631
32	Kab. Mandailing Natal	0	10.921.839	26.362.919	319.374
33	Kab. Nias	0	7.704.672	7.707.298	317.787
34	Kab. Simalungun	0	13.110.091	24.323.747	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	6.565.197	12.840.010	336.655
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	8.071.946	17.497.949	383.803

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
28	Kab. Deli Serdang	0	408.000	595.169.129
29	Kab. Karo	0	0	182.758.223
30	Kab. Labuhanbatu	0	408.000	197.488.052
31	Kab. Langkat	0	0	405.335.751
32	Kab. Mandailing Natal	0	0	355.613.586
33	Kab. Nias	7.563.024	0	161.070.846
34	Kab. Simalungun	0	408.000	397.094.746
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	408.000	174.560.568
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	172.999.759

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Kab. Tapanuli Utara	59.245.410	1.157.500	985.000	3.676.680	82.500	225.000
38	Kab. Toba	36.973.950	727.500	670.000	2.413.160	82.500	200.000
39	Kota Binjai	43.956.790	592.500	0	2.192 400	82.500	0
40	Kota Medan	268.369.000	3.025.000	0	11.937.700	82.500	0
41	Kota Pematang Siantar	38.262.200	445.000	0	2.409.600	82.500	0
42	Kota Sibolga	13.666.120	160.000	0	1.380 600	82.500	0
43	Kota Tanjung Balai	21.513.400	285.000	0	1.315.200	82.500	0
44	Kota Tebing Tinggi	26.234.700	330.000	0	1.608.000	82.500	0
45	Kota Padang Sidempuan	30.179.360	477.000	0	1.514.630	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
37	Kab. Tapanuli Utara	756.680	45.000	0	120.530.697	66.000	6.229.778
38	Kab. Toba	54.270	0	0	88.592.289	54.000	5.335.286
39	Kota Binjai	1.658.260	45.000	0	69.195.994	30.000	0
40	Kota Medan	8.308.670	225.000	0	228.362.802	357.000	0
41	Kota Pematang Siantar	794.800	45.000	0	53.883.489	36.000	0
42	Kota Sibolga	325.200	45.000	0	26.067.618	18.000	0
43	Kota Tanjung Balai	987.400	90.000	0	33.646.799	12.000	0
44	Kota Tebing Tinggi	766.000	45.000	0	42.274.183	78.000	0
45	Kota Padang Sidempuan	796.360	90.000	0	53.067.671	36.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
37	Kab. Tapanuli Utara	498.545	0	0	3.874.094
38	Kab. Toba	400.000	0	0	3.107.394
39	Kota Binjai	500.000	0	0	2.052.253
40	Kota Medan	0	0	0	9.277.078
41	Kota Pematang Siantar	398.545	0	0	2.110.574
42	Kota Sibolga	0	0	0	483.550
43	Kota Tanjung Balai	0	0	0	1.087.931
44	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	1.447.236
45	Kota Padang Sidempuan	0	0	0	2.054.415

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
37	Kab. Tapanuli Utara	0	11.509.467	17.846.054	338.599
38	Kab. Toba	0	6.204.574	5.091.620	321.892
39	Kota Binjai	0	8.632.393	4.653.757	306.623
40	Kota Medan	0	17.278.886	5.013.747	506.015
41	Kota Pematang Siantar	0	6.066.601	8.934.004	0
42	Kota Sibolga	0	1.747.076	3.364.370	268.206
43	Kota Tanjung Balai	0	5.087.670	2.770.921	264.505
44	Kota Tebing Tinggi	0	4.711.102	3.126.840	0
45	Kota Padang Sidempuan	0	5.665.842	7.556.867	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
37	Kab. Tapanuli Utara	0	408.000	227.475.004
38	Kab. Toba	0	0	150.228.435
39	Kota Binjai	0	408.000	134.306.470
40	Kota Medan	0	408.000	553.151.395
41	Kota Pematang Siantar	0	0	113.468.313
42	Kota Sibolga	0	408.000	48.016.240
43	Kota Tanjung Balai	0	507.000	67.650.326
44	Kota Tebing Tinggi	0	507.000	81.210.561
45	Kota Padang Sidempuan	0	408.000	101.928.645

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	Kab. Pakpak Bharat	8.883.840	240.000	30.000	945.500	82.500	0
47	Kab. Nias Selatan	58 717 130	1 335.000	10.550.000	5 361.300	82.500	3.850.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	37.466.870	757.000	185.000	2 498.400	82.500	75.000
49	Kab. Serdang Bedagai	80.858.100	1.362.500	0	5 124.000	82.500	0
50	Kab. Samosir	26.978.640	590.000	120.000	1 607.680	82.500	0
51	Kab. Batu Bara	57.650.800	772.500	0	4.116.600	82.500	0
52	Kab. Padang Lawas	37.068.970	590.000	640.000	3.904.140	82.500	200.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	35.962.000	635.000	1.210.000	2 625.840	82.500	100 000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	44.967.450	682.500	0	2.765.100	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
46	Kab. Pakpak Bharat	309.660	45.000	0	32.137.185	32.250	376.740
47	Kab. Nias Selatan	848.250	45.000	93.000	59.693.736	69.000	61.960.495
48	Kab. Humbang Hasundutan	14.480	45.000	0	85.481.314	63.000	1.325.601
49	Kab. Serdang Bedagai	7.207.200	135.000	0	123.834.069	144.000	0
50	Kab. Samosir	22.830	45.000	0	60.406.143	30.000	1.018.208
51	Kab. Batu Bara	1.983.200	90.000	0	84.948.746	45.000	0
52	Kab. Padang Lawas	1.434.990	90.000	0	83.138.960	18.000	9.746.185
53	Kab. Padang Lawas Utara	1.438.360	45.000	0	63.674.228	66.000	10.737.027
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.445.860	45.000	0	63.075.788	57.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
46	Kab. Pakpak Bharat	0	0	0	796.374
47	Kab. Nias Selatan	0	0	0	5.517.028
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	2.102.044
49	Kab. Serdang Bedagai	500.000	0	0	5.017.305
50	Kab. Samosir	0	0	0	1.981.477
51	Kab. Batu Bara	400.000	0	0	3.165.990
52	Kab. Padang Lawas	398.545	0	0	3.804.352
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	4.279.846
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	1.421.899

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	Kab. Pakpak Bharat	0	3.623.421	3.678.628	0
47	Kab. Nias Selatan	0	22.399.194	38.251.774	366.749
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	8.076.685	10.450.619	0
49	Kab. Serdang Bedagai	0	9.984.848	15.159.000	0
50	Kab. Samosir	0	5.878.244	6.664.024	664.075
51	Kab. Batu Bara	0	9.216.244	10.506.429	377.741
52	Kab. Padang Lawas	0	8.099.967	12.643.469	347.086
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	6.616.985	17.369.367	199.753
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	6.195.858	4.015.596	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
46	Kab. Pakpak Bharat	0	0	51.181.098
47	Kab. Nias Selatan	3.241.296	0	272.381.452
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	148.623.513
49	Kab. Serdang Bedagai	0	0	249.408.522
50	Kab. Samosir	0	0	106.088.821
51	Kab. Batu Bara	0	408.000	173.763.750
52	Kab. Padang Lawas	0	0	162.207.164
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	408.000	145.449.906
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	408.000	125.162.551

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	Kab. Labuhanbatu Utara	46.316.360	885.000	340.000	2.726.090	82.500	125.000
56	Kab. Nias Utara	26.563.930	592.500	3.125.000	2.085.710	82.500	1.350.000
57	Kab. Nias Barat	18.086.500	387.500	4.485.000	1.211.100	82.500	2.550.000
58	Kota Gunungsitoli	25.454.740	387.500	310.000	2.128.640	82.500	125.000
59	Provinsi Sumatera Barat	419.583.550	6.119.500	210.000	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	50.008.520	1.187.000	0	5.100.600	82.500	0
61	Kab. Agam	59.707.600	1.257.500	0	5.229.000	82.500	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	20.836.760	455.000	2.865.000	1.231.230	82.500	1.375.000
63	Kab. Padang Pariaman	56.186.100	1.277.000	0	3.937.800	82.500	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	276.900	45.000	0	102.756.662	30.000	2.798.184
56	Kab. Nias Utara	432.820	45.000	93.000	65.350.768	342.000	34.231.665
57	Kab. Nias Barat	281.930	45.000	62.000	48.163.553	30.000	64.789.832
58	Kota Gunungsitoli	1.280.410	45.000	31.000	49.051.924	18.000	3.008.296
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	545.629.116	264.000	3.591.619
60	Kab. Lima Puluh Kota	4.498.300	135.000	0	150.288.128	78.000	0
61	Kab. Agam	3.545.300	135.000	0	157.300.277	72.000	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	1.368.290	90.000	124.000	45.878.828	57.000	30.877.247
63	Kab. Padang Pariaman	1.535.400	45.000	0	153.367.186	132.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	2.662.249
56	Kab. Nias Utara	0	0	0	1.754.402
57	Kab. Nias Barat	0	0	0	1.186.237
58	Kota Gunungsitoli	398.545	0	0	1.425.781
59	Provinsi Sumatera Barat	500.000	1.300.000	2.500.000	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	600.000	0	0	2.729.385
61	Kab. Agam	0	800.000	0	3.534.504
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	819.304
63	Kab. Padang Pariaman	498.545	0	0	3.014.967

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	8.635.357	10.762.619	183.646
56	Kab. Nias Utara	0	7.744.475	6.567.042	208.916
57	Kab. Nias Barat	0	5.852.778	9.783.330	310.251
58	Kota Gunungsitoli	0	7.336.012	5.664.542	317.335
59	Provinsi Sumatera Barat	7.908.348	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	8.256.348	9.796.449	345.133
61	Kab. Agam	0	13.255.055	11.489.180	685.688
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	7.784.760	9.217.633	325.489
63	Kab. Padang Pariaman	0	10.893.159	15.413.695	377.857

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	178.625.567
56	Kab. Nias Utara	1.440.576	0	152.010.304
57	Kab. Nias Barat	2.521.008	0	159.828.519
58	Kota Gunungsitoli	0	507.000	97.572.225
59	Provinsi Sumatera Barat	0	408.000	988.014.133
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	408.000	233.513.363
61	Kab. Agam	0	507.000	257.600.604
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2.881.152	0	126.269.193
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	246.761.209

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64	Kab. Pasaman	40.037.900	725.000	0	5.165.400	82.500	0
65	Kab. Pesisir Selatan	68.100.700	1.337.500	125.000	6.676.200	82.500	25.000
66	Kab. Sijunjung	35.797.420	792.000	0	4.828.800	82.500	0
67	Kab. Solok	57.127.140	1.312.500	680.000	5.135.400	82.500	500.000
68	Kab. Tanah Datar	39.883.300	994.500	0	4.180.200	82.500	0
69	Kota Bukit Tinggi	21.819.910	372.500	0	2.457.080	82.500	0
70	Kota Padang Panjang	9.025.900	247.000	0	1.370.400	82.500	0
71	Kota Padang	121.185.500	1.606.500	0	8.565.600	82.500	0
72	Kota Payakumbuh	24.042.500	359.500	0	2.851.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
64	Kab. Pasaman	4.831.900	135.000	0	108.709.393	174.000	0
65	Kab. Pesisir Selatan	7.843.600	135.000	0	186.991.616	60.000	1.741.629
66	Kab. Sijunjung	2.293.900	90.000	0	99.202.601	75.000	0
67	Kab. Solok	5.344.300	90.000	0	127.190.404	195 000	6.138.433
68	Kab. Tanah Datar	1.536.300	45.000	0	111.482.067	96 000	0
69	Kota Bukit Tinggi	1.166.880	90.000	0	31.816.065	27 000	0
70	Kota Padang Panjang	422.300	0	0	19.128.761	6 000	0
71	Kota Padang	4.972.200	135.000	0	193.923.002	186 000	0
72	Kota Payakumbuh	1.916.000	90.000	0	40.591.385	15.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
64	Kab. Pasaman	498.545	600.000	0	1.798.194
65	Kab. Pesisir Selatan	600.000	0	0	3.502.895
66	Kab. Sijunjung	600.000	0	0	1.758.607
67	Kab. Solok	498.545	0	0	2.482.667
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0	2.580.510
69	Kota Bukit Tinggi	0	1.200.000	0	738.944
70	Kota Padang Panjang	600.000	0	0	427.075
71	Kota Padang	0	0	0	4.610.114
72	Kota Payakumbuh	398.545	0	0	966.142

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
64	Kab. Pasaman	0	8.116.738	8.835.022	315.702
65	Kab. Pesisir Selatan	0	8 946.750	11.009.234	161.105
66	Kab. Sijunjung	0	6.585.143	8.590.509	541.401
67	Kab. Solok	0	10 040.488	10.033.892	471.240
68	Kab. Tanah Datar	0	8 287.314	9.332.066	461.908
69	Kota Bukit Tinggi	0	3 486 481	3.302.589	332.402
70	Kota Padang Panjang	0	2 989.348	2.224.773	391.404
71	Kota Padang	0	9.039.037	10.819.918	609.034
72	Kota Payakumbuh	0	5.616.659	3.801.177	282.418

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
64	Kab. Pasaman	0	408.000	180.433.294
65	Kab. Pesisir Selatan	0	408.000	297.746.729
66	Kab. Sijunjung	0	408.000	161.645.881
67	Kab. Solok	0	0	227.122.509
68	Kab. Tanah Datar	0	408.000	179.369.665
69	Kota Bukit Tinggi	0	507.000	67.399.353
70	Kota Padang Panjang	0	507.000	37.422.461
71	Kota Padang	0	0	355.734.405
72	Kota Payakumbuh	0	507.000	81.520.626

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
73	Kota Sawahlunto	7.858.520	387.500	0	1.127.400	82.500	0
74	Kota Solok	12.634.000	147.500	0	1.153.200	82.500	0
75	Kota Pariaman	13.868.700	272.500	0	1.758.600	82.500	0
76	Kab. Pasaman Barat	63.239.400	997.000	0	5.183.400	82.500	0
77	Kab. Dharmasraya	34.044.600	522.500	275.000	3.618.000	82.500	225.000
78	Kab. Solok Selatan	23.764.580	455.000	465.000	2.239.800	82.500	175.000
79	Provinsi Riau	470.293.720	6.982.750	1.344.000	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	97.213.800	1.360.000	220.000	7.527.600	82.500	50.000
81	Kab. Indragiri Hilir	84.309.880	1.839.500	7.780.000	5.997.000	82.500	2.775.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
73	Kota Sawahlunto	302.100	45.000	0	27.079.323	27.000	0
74	Kota Solok	454.600	0	0	28.140.344	33.000	0
75	Kota Pariaman	1.268.900	45.000	0	38.796.863	63.000	0
76	Kab. Pasaman Barat	4.117.400	135.000	0	147.794.833	72.000	0
77	Kab. Dharmasraya	1.154.700	90.000	0	90.831.189	57.000	3.505.624
78	Kab. Solok Selatan	1.921.100	90.000	0	65.681.565	9.000	5.221.711
79	Provinsi Riau	0	0	0	550.978.158	294.000	8.126.788
80	Kab. Bengkalis	1.577.700	90.000	0	185.967.168	132.000	2.409.115
81	Kab. Indragiri Hilir	2.011.100	90.000	93.000	157.650.781	93.000	45.456.782

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
73	Kota Sawahlunto	500.000	2.200.000	0	512.066
74	Kota Solok	0	0	0	632.698
75	Kota Pariaman	498.545	0	0	870.718
76	Kab. Pasaman Barat	500.000	0	0	2.518.558
77	Kab. Dharmasraya	600.000	0	0	1.989.544
78	Kab. Solok Selatan	398.545	0	0	1.214.186
79	Provinsi Riau	500.000	0	1.000.000	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	3.475.285
81	Kab. Indragiri Hilir	400.000	0	0	3.285.253

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
73	Kota Sawahlunto	0	3.253.751	3.019.157	397.339
74	Kota Solok	0	4.528.770	2.014.877	292.229
75	Kota Pariaman	0	5.038.529	5.689.878	414.644
76	Kab. Pasaman Barat	0	8.348.826	5.660.993	245.135
77	Kab. Dharmasraya	0	7.430.655	12.917.290	286.348
78	Kab. Solok Selatan	0	5.900.717	2.284.851	156.618
79	Provinsi Riau	9.137.629	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	10.727.445	13.066.053	809.175
81	Kab. Indragiri Hilir	0	11.281.749	17.019.346	210.052

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
73	Kota Sawahlunto	0	507.000	47.298.656
74	Kota Solok	0	507.000	50.620.718
75	Kota Pariaman	0	507.000	69.175.377
76	Kab. Pasaman Barat	0	408.000	239.303.045
77	Kab. Dharmasraya	0	507.000	158.136.950
78	Kab. Solok Selatan	0	0	110.060.173
79	Provinsi Riau	0	408.000	1.049.065.045
80	Kab. Bengkalis	10.084.032	408.000	335.199.873
81	Kab. Indragiri Hilir	0	408.000	340.782.943

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
82	Kab. Indragiri Hulu	71.018.400	1.035.000	180.000	3.939.000	82.500	0
83	Kab. Kampar	128.731.200	1.986.500	1.215.000	11.025.000	82.500	250.000
84	Kab. Kuantan Singingi	45.201.800	952.000	185.000	5.493.000	82.500	200.000
85	Kab. Pelalawan	70.636.500	1.037.000	1.250.000	4.050.000	82.500	300.000
86	Kab. Rokan Hilir	101.459.470	1.332.500	375.000	6.469.050	82.500	175.000
87	Kab. Rokan Hulu	90.689.100	1.345.000	990.000	7.543.800	82.500	525.000
88	Kab. Siak	71.273.900	1.156.500	65.000	6.963.600	82.500	50.000
89	Kota Dumai	51.292.840	445.000	0	2.948.740	82.500	0
90	Kota Pekanbaru	150.762.200	1.699.500	0	8.586.600	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
82	Kab. Indragiri Hulu	1.542.400	45.000	0	134.394.160	171.000	1.747.224
83	Kab. Kampar	4.611.600	135.000	0	223.829.617	276.000	9.815.458
84	Kab. Kuantan Singingi	430.500	90.000	0	129.562.526	573.000	2 584.058
85	Kab. Pelalawan	1.079.500	45.000	0	119.838.289	114.000	12 379.318
86	Kab. Rokan Hilir	4.317.820	135.000	0	197.577.819	336.000	4 362 553
87	Kab. Rokan Hulu	2.430.900	135.000	0	167.716.027	269.250	8 607 432
88	Kab. Siak	2.788.500	45.000	0	157.162.988	90.000	811.827
89	Kota Dumai	3.740.790	135.000	0	86.609.240	18.000	0
90	Kota Pekanbaru	12.357.100	225.000	0	140.096.219	126.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
82	Kab. Indragiri Hulu	400.000	0	0	3.041.561
83	Kab. Kampar	500.000	0	0	4.794.422
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	2.747.155
85	Kab. Pelalawan	0	0	0	2.194.293
86	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	3.451.523
87	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	3.634.120
88	Kab. Siak	0	500.000	0	2.740.050
89	Kota Dumai	300.000	0	0	1.874.525
90	Kota Pekanbaru	300.000	0	0	4.087.794

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
82	Kab. Indragiri Hulu	0	9.960.320	10.339.352	193.370
83	Kab. Kampar	0	14.730.512	20.123.966	212.884
84	Kab. Kuantan Singingi	0	9.243.922	11.279.469	183.068
85	Kab. Pelalawan	0	7.156.056	4.103.233	411.549
86	Kab. Rokan Hilir	0	11.308.533	14.547.501	251.071
87	Kab. Rokan Hulu	0	10.300.495	13.210.080	564.325
88	Kab. Siak	0	9.550 214	7.255.577	179.630
89	Kota Dumai	0	5.918.340	5.024.283	252.933
90	Kota Pekanbaru	0	9.509.799	10.102.379	289.706

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
82	Kab. Indragiri Hulu	0	408.000	238.497.287
83	Kab. Kampar	0	408.000	422.727.659
84	Kab. Kuantan Singingi	0	408.000	209.215.998
85	Kab. Pelalawan	0	408.000	225.085.238
86	Kab. Rokan Hilir	0	408.000	346.589.340
87	Kab. Rokan Hulu	0	408.000	308.451.029
88	Kab. Siak	0	408.000	261.123.286
89	Kota Dumai	0	507.000	159.149.191
90	Kota Pekanbaru	0	507.000	338.731.797

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
91	Kab. Kepulauan Meranti	28.812.160	592.500	2.370.000	3.551.000	82.500	1.650.000
92	Provinsi Jambi	218.961.870	4.454.750	126.000	0	0	0
93	Kab. Batang Hari	39.094.900	740 000	65.000	6.108.600	82 500	50.000
94	Kab. Bungo	46.726.600	894.500	0	4.936.800	82.500	0
95	Kab. Kerinci	27.658.080	814.500	30.000	5.949.600	82.500	25.000
96	Kab. Merangin	51.468.760	1.092 500	590.000	6.256.800	82.500	200.000
97	Kab. Muaro Jambi	51.702.400	1 096 500	30.000	5.107.200	82.500	0
98	Kab. Sarolangun	43.058.620	877 500	475.000	7.123.800	82.500	200.000
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	45.429.600	740 000	470.000	5.349.760	82.500	250.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
91	Kab. Kepulauan Meranti	638.380	90.000	62.000	67.944.987	75.000	26.023.861
92	Provinsi Jambi	0	0	0	267.405.918	333.000	245.196
93	Kab. Batang Hari	2.125.600	135.000	0	106.228.088	60.000	531.572
94	Kab. Bungo	1.773.700	135.000	0	94.482.073	268.250	0
95	Kab. Kerinci	1.629.200	135.000	0	89.583.591	61.750	298.238
96	Kab. Merangin	2.758.700	90.000	0	136.242.583	279.000	4.471.895
97	Kab. Muaro Jambi	708.400	90.000	0	117.582.393	213.000	56.799
98	Kab. Sarolangun	1.244.400	135.000	0	91.950.133	178.750	2.459.361
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.221.850	135.000	31.000	82.353.985	78.000	5.023.729

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	2.177.332
92	Provinsi Jambi	500.000	2.250.000	3.000.000	0
93	Kab. Batang Hari	0	0	0	1.877.437
94	Kab. Bungo	400.000	0	0	2.566.720
95	Kab. Kerinci	398.545	0	0	2.893.137
96	Kab. Merangin	398.545	0	0	3.378.532
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	2.625.391
98	Kab. Sarolangun	400.000	0	0	2.508.020
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	2.248.208

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	2.929.828	6.247.732	429.486
92	Provinsi Jambi	3.356.485	0	0	0
93	Kab. Batang Hari	0	4.384.750	11.502.103	577.648
94	Kab. Bungo	0	6.828.870	11.942.415	240.305
95	Kab. Kerinci	0	7.066.691	17.966.435	362.023
96	Kab. Merangin	0	10.011.321	18.699.481	569.932
97	Kab. Muaro Jambi	0	8.205.810	16.995.729	511.186
98	Kab. Sarolangun	0	7.098.705	10.281.623	268.460
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	7.270.137	10.280.277	497.366

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
91	Kab. Kepulauan Meranti	4.681.872	408.000	148.766.638
92	Provinsi Jambi	0	408.000	501.041.219
93	Kab. Batang Hari	0	408.000	173.971.198
94	Kab. Bungo	0	0	171.277.733
95	Kab. Kerinci	0	0	154.954.290
96	Kab. Merangin	0	408.000	236.998.549
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	205.007.308
98	Kab. Sarolangun	0	408.000	168.749.872
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	408.000	163.869.412

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	29.822.150	682.500	250.000	4.221.200	82.500	150.000
101	Kab. Tebo	48.493.420	865.000	65.000	4.242.000	82.500	25.000
102	Kota Jambi	79.612.700	1.137.500	0	7.054.800	82.500	0
103	Kota Sungai Penuh	11.493.500	250.000	0	2.068.200	82.500	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	545.597.900	7.394.500	252.000	0	0	0
105	Kab. Lahat	54.594.600	977.500	90.000	4.702.200	82.500	75.000
106	Kab. Musi Banyuasin	109.272.400	1.819.500	1.315.000	10.102.200	82.500	850.000
107	Kab. Musi Rawas	55.606.300	1.247.000	250.000	3.865.800	82.500	150.000
108	Kab. Muara Enim	89.063.600	1.195.000	0	6.558.000	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	626.450	90.000	0	67.202.022	64.750	2.369.063
101	Kab. Tebo	2.384.900	135.000	0	74.106.684	84.000	402.170
102	Kota Jambi	2.796.400	90.000	0	98.822.969	134.750	0
103	Kota Sungai Penuh	413.200	45.000	0	43.120.328	99.000	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	571.230.849	96.000	0
105	Kab. Lahat	821.800	90.000	0	139.752.654	27.000	947.902
106	Kab. Musi Banyuasin	1.864.800	90.000	0	219.720.161	114.000	12.204.122
107	Kab. Musi Rawas	1.372.100	45.000	0	98.931.048	42.000	2.017.475
108	Kab. Muara Enim	1.588.300	45.000	0	192.846.926	171.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	1.994.100
101	Kab. Tebo	0	0	0	2.868.640
102	Kota Jambi	0	0	0	2.645.857
103	Kota Sungai Penuh	398.545	0	0	1.531.900
104	Provinsi Sumatera Selatan	500.000	2.300.000	2.000.000	0
105	Kab. Lahat	0	0	0	4.405.482
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	3.899.425
107	Kab. Musi Rawas	400.000	0	0	3.451.673
108	Kab. Muara Enim	0	0	0	4.436.085

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	7.335.877	11.163.349	627.704
101	Kab. Tebo	0	7.049.958	12.929.654	306.077
102	Kota Jambi	0	5.311.462	8.233.044	500.861
103	Kota Sungai Penuh	0	5.197.567	7.660.764	439.552
104	Provinsi Sumatera Selatan	8.642.529	0	0	0
105	Kab. Lahat	0	10.858.271	40.007.093	404.175
106	Kab. Musi Banyuasin	0	10.218.214	12.295.368	0
107	Kab. Musi Rawas	0	7.095.199	12.210.523	207.994
108	Kab. Muara Enim	0	7.122.877	14.337.845	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	126.681.665
101	Kab. Tebo	0	0	154.040.003
102	Kota Jambi	0	507.000	206.929.843
103	Kota Sungai Penuh	0	507.000	73.307.056
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	354.000	1.138.367.778
105	Kab. Lahat	0	408.000	258.244.177
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	383.847.690
107	Kab. Musi Rawas	0	0	186.974.612
108	Kab. Muara Enim	0	408.000	317.855.133

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	105.111.900	1.605.000	1.340.000	10.698.000	82.500	725.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	50.080.300	752.500	60.000	3.268.200	82.500	100.000
111	Kota Palembang	215.022.600	1.714.500	0	12.837.600	82.500	0
112	Kota Prabumulih	29.924.500	352.500	0	1.934.400	82.500	0
113	Kota Pagar Alam	18.482.700	285.000	0	1.419.600	82.500	0
114	Kota Lubuk Linggau	34.619.100	387.500	0	1.747.800	82.500	0
115	Kab. Banyuasin	120.083.100	1.660.000	490.000	10.784.400	82.500	225.000
116	Kab. Ogan Ilir	56.345.400	922.500	0	7.932.600	82.500	0
117	Kab. OKU Timur	80.468.000	1.482.500	0	8.769.600	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	1.675.500	90.000	0	219.270.558	165.000	10.975.830
110	Kab. Ogan Komering Ulu	909.300	90.000	0	103.513.969	102.000	0
111	Kota Palembang	3.841.400	180.000	0	295.495.539	124.250	0
112	Kota Prabumulih	1.322.400	135.000	0	62.853.386	42.000	0
113	Kota Pagar Alam	523.100	45.000	0	38.012.568	15.000	0
114	Kota Lubuk Linggau	651.500	45.000	0	54.096.527	15.000	0
115	Kab. Banyuasin	6.113.900	180.000	0	257.086.254	155.500	4.966.703
116	Kab. Ogan Ilir	2.498.000	90.000	0	129.932.253	75.000	0
117	Kab. OKU Timur	1.994.100	90.000	0	167.124.832	350.750	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	400.000	0	0	5.705.395
110	Kab. Ogan Komering Ulu	398.545	0	0	2.724.756
111	Kota Palembang	400.000	900.000	0	8.167.441
112	Kota Prabumulih	398.545	0	0	1.336.645
113	Kota Pagar Alam	0	0	0	1.339.230
114	Kota Lubuk Linggau	500.000	0	0	2.122.032
115	Kab. Banyuasin	0	0	0	5.424.003
116	Kab. Ogan Ilir	400.000	0	0	3.729.136
117	Kab. OKU Timur	500.000	0	0	5.348.791

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(3)	(19)	(20)	(21)	(22)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	9.566.072	30.792.030	162.961
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	8.337.909	15.449.530	197.454
111	Kota Palembang	0	11.167.445	30.694.408	490.688
112	Kota Prabumulih	0	5.917.545	5.101.321	290.638
113	Kota Pagar Alam	0	5.234.388	4.803.156	128.167
114	Kota Lubuk Linggau	0	5.885.136	7.044.013	225.807
115	Kab. Banyuasin	0	12.402.023	23.473.866	360.365
116	Kab. Ogan Ilir	0	10.981.312	15.319.921	0
117	Kab. OKU Timur	0	10.227.172	18.041.118	466.841

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0	398.365.746
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	408.000	186.474.963
111	Kota Palembang	0	0	581.118.371
112	Kota Prabumulih	0	0	109.691.380
113	Kota Pagar Alam	0	408.000	70.778.409
114	Kota Lubuk Linggau	0	408.000	107.829.915
115	Kab. Banyuasin	0	0	443.487.634
116	Kab. Ogan Ilir	0	408.000	228.716.622
117	Kab. OKU Timur	0	0	294.946.204

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
118	Kab. OKU Selatan	46.316.700	875.000	795.000	4.047.600	82.500	375.000
119	Kab. Empat Lawang	31.393.100	567.500	0	2.039.400	82.500	0
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	32.767.700	554.500	60.000	2.313.000	82.500	75.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	26.962.800	432.500	30.000	2.507.400	82.500	75.000
122	Provinsi Bengkulu	138.034.770	2.799.000	0	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	21.605.700	497.000	0	3.063.600	82.500	0
124	Kab. Bengkulu Utara	41.386.220	994.000	30.000	3.943.800	82.500	0
125	Kab. Rejang Lebong	35.806.400	615.000	90.000	2.645.400	82.500	0
126	Kota Bengkulu	52.098.000	727.000	0	5.044.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
118	Kab. OKU Selatan	760.500	90.000	0	95.257.282	45.000	8.128.755
119	Kab. Empat Lawang	273.600	45.000	0	69.890.747	78.000	0
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2.212.270	90.000	0	70.748.487	60.000	1.072.640
121	Kab. Musi Rawas Utara	602.500	90.000	0	41.795.522	21.000	482.247
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0	196.351.421	48.000	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	432.800	90.000	0	75.925.645	21.000	0
124	Kab. Bengkulu Utara	1.414.300	45.000	0	95.991.886	66.000	0
125	Kab. Rejang Lebong	1.237.200	90.000	0	81.986.280	123.000	38.444
126	Kota Bengkulu	4.338.100	225.000	0	87.489.080	49.750	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
118	Kab. OKU Selatan	0	0	0	3.709.617
119	Kab. Empat Lawang	0	0	0	2.431.617
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	1.984.299
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	0	1.872.990
122	Provinsi Bengkulu	600.000	1.000.000	2.000.000	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	1.876.715
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	2.925.135
125	Kab. Rejang Lebong	398.545	0	0	2.434.674
126	Kota Bengkulu	398.545	0	0	2.005.072

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
118	Kab. OKU Selatan	0	4.718.871	11.379.727	0
119	Kab. Empat Lawang	0	7.761.472	7.398.363	478.114
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	6.397.111	4.448.862	0
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	6.996.214	76.430.406	152.602
122	Provinsi Bengkulu	5.440.264	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	6.861.872	9.041.146	545.847
124	Kab. Bengkulu Utara	0	7.669.320	9.747.091	0
125	Kab. Rejang Lebong	0	7.746.860	8.094.549	0
126	Kota Bengkulu	0	5.352.635	7.039.395	304.337

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
118	Kab. OKU Selatan	0	0	176.581.552
119	Kab. Empat Lawang	0	0	122.439.413
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	408.000	123.274.369
121	Kab. Musi Rawas Utara	6.842.736	0	165.376.417
122	Provinsi Bengkulu	0	408.000	346.681.455
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	408.000	120.451.825
124	Kab. Bengkulu Utara	0	408.000	164.703.252
125	Kab. Rejang Lebong	0	408.000	141.796.852
126	Kota Bengkulu	0	0	165.154.214

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
127	Kab. Kaur	18.556.300	490.000	125.000	1.837.800	82.500	75.000
128	Kab. Seluma	25.628.900	602.500	95.000	2.122.200	82.500	100.000
129	Kab. Mukomuko	28.270.800	547.500	0	3.246.600	82.500	0
130	Kab. Lebong	14.528.520	490.000	30.000	1.539.600	82.500	25.000
131	Kab. Kepahiang	17.187.120	452.500	0	1.758.600	82.500	50.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	15.349.740	365.000	30.000	1.724.400	82.500	25.000
133	Provinsi Lampung	544.044.180	7.434.750	210.000	0	0	0
134	Kab. Lampung Barat	37.621.540	827.000	65.000	2.806.000	82.500	0
135	Kab. Lampung Selatan	129.689.600	1.742.500	0	15.070.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
127	Kab. Kaur	801.200	45.000	0	66.332.030	60.000	1.774.795
128	Kab. Seluma	599.500	90.000	0	80.018.667	39.000	992.597
129	Kab. Mukomuko	720.800	90.000	0	67.376.019	12.000	0
130	Kab. Lebong	1.306.200	45.000	0	41.018.928	27.000	275.098
131	Kab. Kepahiang	1.078.300	90.000	0	53.071.774	15.000	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	579.700	45.000	0	58.897.228	133.250	111.373
133	Provinsi Lampung	0	0	0	468.545.502	270.000	932.072
134	Kab. Lampung Barat	612.350	90.000	0	87.152.237	45.000	423.297
135	Kab. Lampung Selatan	6.807.500	180.000	0	133.635.686	60.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
127	Kab. Kaur	400 000	0	0	1.860 422
128	Kab. Seluma	398 545	0	0	2.378.064
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	1.811.277
130	Kab. Lebong	0	0	0	1.329.577
131	Kab. Kepahiang	498.545	0	0	1.362.141
132	Kab. Bengkulu Tengah	400.000	0	0	1.743.977
133	Provinsi Lampung	400.000	2.500.000	2.500.000	0
134	Kab. Lampung Barat	500.000	0	0	2.284.527
135	Kab. Lampung Selatan	400.000	0	0	6.401.572

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
127	Kab. Kaur	0	4.524.876	10.966.049	484.310
128	Kab. Seluma	0	8.002.054	18.199.179	359.914
129	Kab. Mukomuko	0	6.612.184	6.850.677	244.273
130	Kab. Lebong	0	4.397.644	7.818.643	249.485
131	Kab. Kepahiang	0	5.096.176	7.733.085	197.030
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	5.497.517	10.989.047	278.997
133	Provinsi Lampung	9.425.616	0	0	0
134	Kab. Lampung Barat	0	6.733.610	17.781.965	443.899
135	Kab. Lampung Selatan	0	11.890.086	25.062.130	567.339

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
127	Kab. Kaur	0	408.000	108.823.282
128	Kab. Seluma	0	408.000	140.116.620
129	Kab. Mukomuko	0	0	115.864.630
130	Kab. Lebong	0	0	73.163.195
131	Kab. Kepahiang	0	408.000	89.080.771
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	408.000	96.660.729
133	Provinsi Lampung	0	408.000	1.036.670.120
134	Kab. Lampung Barat	0	408.000	157.876.925
135	Kab. Lampung Selatan	0	408.000	331.997.713

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
136	Kab. Lampung Tengah	171.539.820	2.480.000	0	16.896.600	82.500	0
137	Kab. Lampung Utara	79.900.580	1.387.500	0	6.070.800	82.500	0
138	Kab. Lampung Timur	119.740.200	2.144.000	0	16.366.800	82.500	0
139	Kab. Tanggamus	71.531.200	1.237.500	685.000	9.264.000	82.500	550.000
140	Kab. Tulang Bawang	60.020.160	917.500	345.000	5.686.200	82.500	100.000
141	Kab. Way Kanan	65.994.240	1.105.000	250.000	6.837.000	82.500	175.000
142	Kota Bandar Lampung	125.109.200	1.342.000	0	12.111.600	82.500	0
143	Kota Metro	27.738.100	809.500	0	3.612.600	82.500	0
144	Kab. Pesawaran	54.694.700	977.500	155.000	6.138.000	82.500	25.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
136	Kab. Lampung Tengah	4.982.900	90.000	0	264.988.985	167.000	0
137	Kab. Lampung Utara	2.592.500	90.000	0	133.582.675	112.000	0
138	Kab. Lampung Timur	2.779.100	135.000	0	164.985.706	126.000	0
139	Kab. Tanggamus	2.619.300	135.000	0	150.828.012	57.000	5.392.564
140	Kab. Tulang Bawang	525.800	45.000	0	86.698.713	93.000	3.094.040
141	Kab. Way Kanan	2.703.500	90.000	0	116.929.926	117.000	2.820.021
142	Kota Bandar Lampung	6.241.100	180.000	0	150.761.484	87.000	0
143	Kota Metro	1.883.400	45.000	0	43 926.212	63.000	0
144	Kab. Pesawaran	1.281.100	90.000	0	85.573.182	72 000	763.816

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
136	Kab. Lampung Tengah	600.000	0	0	6.933.631
137	Kab. Lampung Utara	498.545	0	0	4.245.470
138	Kab. Lampung Timur	398.545	0	0	6.914.832
139	Kab. Tanggamus	398.545	0	0	4.422.730
140	Kab. Tulang Bawang	398.545	0	0	2.846.915
141	Kab. Way Kanan	398.545	0	0	3.587.600
142	Kota Bandar Lampung	0	0	0	5.617.220
143	Kota Metro	0	0	0	1.086.000
144	Kab. Pesawaran	398.545	0	0	2.293.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
136	Kab. Lampung Tengah	0	13.800.301	12.950.059	421.593
137	Kab. Lampung Utara	0	8.017.416	14.929.786	256.038
138	Kab. Lampung Timur	0	12.995.860	21.068.103	619.192
139	Kab. Tanggamus	0	12.771.491	17.920.407	0
140	Kab. Tulang Bawang	0	9.252.037	16.773.649	340.584
141	Kab. Way Kanan	0	9.426.330	18.100.187	322.068
142	Kota Bandar Lampung	0	11.933.828	21.291.850	659.898
143	Kota Metro	0	2.892.374	6.067.344	226.112
144	Kab. Pesawaran	0	7.118.071	11.433.907	256.688

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
136	Kab. Lampung Tengah	0	408.000	496.341.389
137	Kab. Lampung Utara	0	408.000	252.173.810
138	Kab. Lampung Timur	0	408.000	348.763.838
139	Kab. Tanggamus	0	0	277.895.249
140	Kab. Tulang Bawang	0	408.000	187.627.643
141	Kab. Way Kanan	0	408.000	229.346.917
142	Kota Bandar Lampung	0	507.000	335.924.680
143	Kota Metro	0	408.000	88.840.142
144	Kab. Pesawaran	0	408.000	171.761.509

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
145	Kab. Pringsewu	54.367.400	852.500	0	5.541.000	82.500	0
146	Kab. Mesuji	33.386.830	525.000	315.000	4.002.820	82.500	175.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	39.925.300	650.000	0	3.547.200	82.500	0
148	Kab. Pesisir Barat	25.445.190	432.500	405.000	1.918.280	82.500	100.000
149	Provinsi DKI Jakarta	1.802.134.620	19.803.250	0	74.527.790	495.000	0
150	Provinsi Jawa Barat	3.240.825.330	28.567.250	42.000	0	0	0
151	Kab. Bandung	502.022.010	4.810.000	0	42.204.800	82.500	0
152	Kab. Bekasi	497.295.620	3.842.500	0	34.929.700	82.500	0
153	Kab. Bogor	891.280.940	6.960.000	0	77.536.970	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
145	Kab. Pringsewu	904.100	45.000	0	105.684.908	57.250	0
146	Kab. Mesuji	833.250	90.000	0	67.227.686	51.000	3.592.572
147	Kab. Tulang Bawang Barat	1.108.700	45.000	0	67.925.129	69.000	0
148	Kab. Pesisir Barat	162.130	45.000	0	65.244.867	102.000	4.010.285
149	Provinsi DKI Jakarta	45.835.160	1.350.000	0	1.398.189.746	459.000	0
150	Provinsi Jawa Barat	0	0	0	1.476.461.619	246.000	0
151	Kab. Bandung	22.604.210	450.000	0	425.075.469	465.000	0
152	Kab. Bekasi	9.198.580	270.000	0	437.019.388	1.674.500	0
153	Kab. Bogor	86.445.440	945.000	0	559.428.626	588.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
145	Kab. Pringsewu	498.545	0	0	2.813.315
146	Kab. Mesuji	0	0	0	1.601.651
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	2.752.720
148	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	1.784.050
149	Provinsi DKI Jakarta	0	5.200.000	0	3.088.832
150	Provinsi Jawa Barat	500.000	2.000.000	3.000.000	0
151	Kab. Bandung	300.000	0	0	25.480.157
152	Kab. Bekasi	180.982	0	0	18.421.476
153	Kab. Bogor	0	0	0	31.014.379

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
145	Kab. Pringsewu	0	6.919.652	10.798.805	427.049
146	Kab. Mesuji	0	7.101.079	7.096.522	538.655
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	7.842.122	6.263.272	54.042
148	Kab. Pesisir Barat	0	6.080.882	8.704.436	0
149	Provinsi DKI Jakarta	0	0	0	0
150	Provinsi Jawa Barat	33.473.420	0	0	0
151	Kab. Bandung	0	19.294.396	26.943.121	994.599
152	Kab. Bekasi	0	12.329.752	17.227.590	0
153	Kab. Bogor	0	42.672.499	53.900.110	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
145	Kab. Pringsewu	0	0	188.992.024
146	Kab. Mesuji	0	0	126.619.565
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	408.000	130.672.985
148	Kab. Pesisir Barat	2.521.008	408.000	117.446.128
149	Provinsi DKI Jakarta	0	408.000	3.351.491.398
150	Provinsi Jawa Barat	0	354.000	4.785.469.619
151	Kab. Bandung	0	0	1.070.726.262
152	Kab. Bekasi	0	408.000	1.032.880.588
153	Kab. Bogor	0	0	1.750.854.464

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
154	Kab. Ciamis	118.694.700	2.277.500	0	15.589.800	82.500	0
155	Kab. Cianjur	342.566.210	4.465.000	95.000	35.465.400	82.500	75.000
156	Kab. Cirebon	275.615.800	2.724.500	0	21.781.270	82.500	0
157	Kab. Garut	356.722.500	5.257.000	0	47.696.400	82.500	0
158	Kab. Indramayu	240.331.190	2.727.500	0	24.767.160	82.500	0
159	Kab. Karawang	328.293.780	3.052.500	0	31.921.910	82 500	0
160	Kab. Kuningan	136.071.160	1.992.000	0	19.897.590	82.500	0
161	Kab. Majalengka	151.152.400	1.985.000	0	16.332.140	82.500	0
162	Kab. Purwakarta	143.710.340	1.422.500	0	10.378.180	82 500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
154	Kab. Ciamis	8.932.400	225.000	0	226.293.225	117.000	0
155	Kab. Cianjur	68.488.120	1.620.000	31.000	426.152.021	1.772.250	538.632
156	Kab. Cirebon	17.941.710	405.000	0	361.974.531	201.000	0
157	Kab. Garut	42.826.300	1.260.000	0	392.771.442	699.000	0
158	Kab. Indramayu	10.691.890	360.000	0	207.981.115	88.000	0
159	Kab. Karawang	20.034.680	270.000	0	272.677.111	390.000	0
160	Kab. Kuningan	20.075.140	495.000	0	264.505.948	249.000	0
161	Kab. Majalengka	13.693.950	180.000	0	261.818.520	141.000	0
162	Kab. Purwakarta	7.793.800	180.000	0	147.312.959	81.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
154	Kab. Ciamis	700.000	0	0	9.968.382
155	Kab. Cianjur	0	0	0	16.130.670
156	Kab. Cirebon	500.000	600.000	0	16.603.929
157	Kab. Garut	398.545	0	0	20.193.408
158	Kab. Indramayu	500.000	0	0	13.035.075
159	Kab. Karawang	0	0	0	17.589.205
160	Kab. Kuningan	600.000	600.000	0	10.009.159
161	Kab. Majalengka	500.000	0	0	10.318.490
162	Kab. Purwakarta	0	0	0	7.877.350

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
154	Kab. Ciamis	0	15.843.320	31.650.602	452.157
155	Kab. Cianjur	0	21.560.363	42.882.822	397.676
156	Kab. Cirebon	0	24.442.371	29.706.825	0
157	Kab. Garut	0	28.545.405	77.394.046	0
158	Kab. Indramayu	0	21.008.137	15.705.498	0
159	Kab. Karawang	0	21.795.639	22.248.160	0
160	Kab. Kuningan	0	12.241.637	25.408.920	601.726
161	Kab. Majalengka	0	11.836.795	24.348.822	575.906
162	Kab. Purwakarta	0	10.740.007	12.971.893	229.572

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
154	Kab. Ciamis	0	408.000	431.234.586
155	Kab. Cianjur	0	408.000	962.730.664
156	Kab. Cirebon	0	0	752.579.436
157	Kab. Garut	0	408.000	974.254.546
158	Kab. Indramayu	0	0	537.278.065
159	Kab. Karawang	0	0	718.355.685
160	Kab. Kuningan	0	408.000	493.237.780
161	Kab. Majalengka	0	0	492.965.523
162	Kab. Purwakarta	0	0	342.780.101

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
163	Kab. Subang	206.939.140	2.587.500	0	21.584.430	82.500	0
164	Kab. Sukabumi	310.601.700	4.110.000	0	44.447.400	82.500	0
165	Kab. Sumedang	143.992.200	1.885.000	0	16.666.840	82.500	0
166	Kab. Tasikmalaya	205.272.400	3.527.500	0	26.129.400	82.500	0
167	Kota Bandung	293.610.240	2.962.500	0	25.943.280	82.500	0
168	Kota Bekasi	326.826.100	2.507.500	0	24.020.320	82.500	0
169	Kota Bogor	157.363.680	1.752.000	0	10.121.450	82.500	0
170	Kota Cirebon	50.397.450	535.000	0	4.113.080	82.500	0
171	Kota Depok	249.965.840	2.084.500	0	22.690.650	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
163	Kab. Subang	9.070.170	225.000	0	269.921.843	255.000	0
164	Kab. Sukabumi	15.095.080	360.000	0	298.081.610	570.000	0
165	Kab. Sumedang	14.863.050	405.000	0	230.765.067	156.000	0
166	Kab. Tasikmalaya	10.966.070	225.000	0	272.630.321	108.000	0
167	Kota Bandung	29.887.900	495.000	0	303.147.974	162.000	0
168	Kota Bekasi	9.875.340	270.000	0	258.734.656	534.000	0
169	Kota Bogor	20.009.030	225.000	0	131.137.299	126.000	0
170	Kota Cirebon	4.907.110	135.000	0	79.478.786	60.000	0
171	Kota Depok	23.005.880	270.000	0	131.132.773	99.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
163	Kab. Subang	400.000	600.000	0	12.521.110
164	Kab. Sukabumi	300.000	600.000	0	20.362.671
165	Kab. Sumedang	500.000	0	0	9.037.958
166	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	11.836.796
167	Kota Bandung	300.000	0	0	18.430.314
168	Kota Bekasi	0	0	0	15.327.816
169	Kota Bogor	0	0	0	6.885.761
170	Kota Cirebon	600.000	0	0	2.267.739
171	Kota Depok	0	0	0	12.542.467

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
163	Kab. Subang	0	13.128.095	23.565.295	0
164	Kab. Sukabumi	0	30.878.299	70.477.427	0
165	Kab. Sumedang	0	11.759.475	27.455.414	847.572
166	Kab. Tasikmalaya	0	21.709.639	45.952.028	869.945
167	Kota Bandung	0	18.974.306	25.638.211	0
168	Kota Bekasi	0	15.269.560	23.332.816	0
169	Kota Bogor	0	11.550.837	17.394.308	666.374
170	Kota Cirebon	0	5.848.749	14.487.631	203.033
171	Kota Depok	0	13.864.349	28.623.981	531.828

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
163	Kab. Subang	0	0	560.880.083
164	Kab. Sukabumi	0	408.000	796.374.687
165	Kab. Sumedang	0	0	458.416.076
166	Kab. Tasikmalaya	0	0	599.309.599
167	Kota Bandung	0	408.000	720.042.225
168	Kota Bekasi	0	0	676.780.608
169	Kota Bogor	0	408.000	357.722.239
170	Kota Cirebon	0	0	163.116.078
171	Kota Depok	0	408.000	485.301.768

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
172	Kota Sukabumi	49.262.430	467.500	0	3.959.320	82.500	0
173	Kota Tasikmalaya	91.113.690	932.500	0	8.823.840	82.500	0
174	Kota Cimahi	71.178.800	632.000	0	5.806.020	82.500	0
175	Kota Banjar	20.802.900	307.500	0	4.143.600	82.500	0
176	Kab. Bandung Barat	226.569.600	2.275.000	0	21.431.680	82.500	0
177	Kab. Pangandaran	42.012.400	862.500	0	4.841.400	82.500	0
178	Provinsi Jawa Tengah	2.152.073.350	19 329 000	42.000	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	98.442.200	1.845 000	0	12.757.800	82 500	0
180	Kab. Banyumas	182.323.500	2 417 500	0	19.251.000	82 500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
172	Kota Sukabumi	5.880.720	135.000	0	54.748.286	15.000	0
173	Kota Tasikmalaya	3.425.790	90.000	0	110.193.166	63.000	0
174	Kota Cimahi	4.186.600	135.000	0	80.642.078	45.000	0
175	Kota Banjar	1.222.200	135.000	0	43.930.076	6.000	0
176	Kab. Bandung Barat	11.192.730	225.000	0	204.085.866	69.000	0
177	Kab. Pangandaran	2.553.700	45.000	0	92.368.326	135.000	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	1.453.709.072	360.000	0
179	Kab. Banjarnegara	6.055.000	135.000	0	189.245.895	102.000	0
180	Kab. Banyumas	9.019.200	180.000	0	306.750.650	357.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
172	Kota Sukabumi	500.000	0	0	2.853.252
173	Kota Tasikmalaya	500.000	0	0	4.944.336
174	Kota Cimahi	0	0	0	3.665.052
175	Kota Banjar	398.545	0	0	1.791.930
176	Kab. Bandung Barat	398.545	0	0	13.694.680
177	Kab. Pangandaran	500.000	0	0	3.251.460
178	Provinsi Jawa Tengah	500.000	1.500.000	3.000.000	0
179	Kab. Banjarnegara	500.000	0	0	8.033.265
180	Kab. Banyumas	600.000	600.000	800.000	11.654.359

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
172	Kota Sukabumi	0	6.251.097	13.010.184	0
173	Kota Tasikmalaya	0	7.461.183	17.628.877	701.577
174	Kota Cimahi	0	5.578.431	4.900.560	0
175	Kota Banjar	0	4.203.079	6.389.112	254.858
176	Kab. Bandung Barat	0	17.770.074	18.278.788	784.070
177	Kab. Pangandaran	0	4.733.592	10.733.136	191.209
178	Provinsi Jawa Tengah	22.226.241	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	0	12.498.959	22.705.299	320.290
180	Kab. Banyumas	0	15.129.152	28.043.273	334.708

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
172	Kota Sukabumi	0	507.000	137.672.289
173	Kota Tasikmalaya	0	0	245.960.459
174	Kota Cimahi	0	0	176.852.041
175	Kota Banjar	0	408.000	84.075.300
176	Kab. Bandung Barat	0	0	516.857.533
177	Kab. Pangandaran	0	0	162.310.223
178	Provinsi Jawa Tengah	0	408.000	3.653.147.663
179	Kab. Banjarnegara	0	0	352.723.208
180	Kab. Banyumas	0	408.000	577.950.842

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
181	Kab. Batang	82.507.300	1.315.000	0	13.528.200	82.500	0
182	Kab. Blora	86.149.940	1.835.000	0	16.240.280	82.500	0
183	Kab. Boyolali	91.015.600	1.799.500	0	16.130.400	82.500	0
184	Kab. Brebes	205.653.270	2.597.500	0	21.936.220	82.500	0
185	Kab. Cilacap	200.161.700	3.040.000	0	20.320.800	82.500	0
186	Kab. Demak	128.164.290	1.417.500	60.000	22.597.740	82.500	50.000
187	Kab. Grobogan	146.086.310	2.412.500	0	21.374.400	82.500	0
188	Kab. Jepara	116.550.720	1.841.500	125.000	26.965.620	82.500	100.000
189	Kab. Karanganyar	88.351.300	1.495.000	0	15.259.200	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
181	Kab. Batang	5.957.000	135.000	0	154.938.012	87.000	0
182	Kab. Blora	6.040.770	135.000	0	209.423.823	114.000	0
183	Kab. Boyolali	2.999.600	90.000	0	205.185.772	684.000	0
184	Kab. Brebes	14.627.600	270.000	0	323.993.068	126.000	0
185	Kab. Cilacap	6.269.400	180.000	0	339.429.762	276.000	0
186	Kab. Demak	6.402.310	135.000	0	185.178.675	66.000	818.308
187	Kab. Grobogan	6.498.260	135.000	0	254.445.017	141.000	0
188	Kab. Jepara	7.767.430	90.000	0	212.420.596	159.000	1.359.254
189	Kab. Karanganyar	7.135.700	135.000	0	189.505.897	120.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
181	Kab. Batang	500.000	0	0	6.579.555
182	Kab. Blora	600.000	0	0	7.819.439
183	Kab. Boyolali	500.000	600.000	0	8.890.335
184	Kab. Brebes	400.000	0	0	14.642.781
185	Kab. Cilacap	500.000	0	0	11.441.937
186	Kab. Demak	400.000	600.000	0	9.280.908
187	Kab. Grobogan	500.000	600.000	0	10.866.582
188	Kab. Jepara	500.000	600.000	0	8.315.527
189	Kab. Karanganyar	600.000	0	0	7.570.420

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	Kab. Batang	0	7.967.038	14.571.331	305.193
182	Kab. Blora	0	10.947.886	23.705.216	520.313
183	Kab. Boyolali	0	7.739.583	23.182.454	356.006
184	Kab. Brebes	0	16.261.089	37.442.705	609.131
185	Kab. Cilacap	0	12.578.690	33.595.714	464.412
186	Kab. Demak	0	7.366.800	19.311.148	656.265
187	Kab. Grobogan	0	13.559.602	24.780.333	514.912
188	Kab. Jepara	0	7.580.754	17.158.044	244.304
189	Kab. Karanganyar	0	9.163.353	16.373.899	337.828

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
181	Kab. Batang	0	0	288.473.129
182	Kab. Blora	0	0	363.614.167
183	Kab. Boyolali	0	0	359.255.750
184	Kab. Brebes	0	408.000	639.049.864
185	Kab. Cilacap	0	0	628.340.915
186	Kab. Demak	0	0	382.587.444
187	Kab. Grobogan	0	0	481.996.416
188	Kab. Jepara	0	408.000	402.268.249
189	Kab. Karanganyar	0	0	336.130.097

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
190	Kab. Kebumen	136.790.500	2.107.500	0	18.780.600	82.500	0
191	Kab. Kendal	111.303.620	1.667.500	0	20.233.800	82.500	0
192	Kab. Klaten	124.116.100	2.017.500	0	15.705.600	82.500	0
193	Kab. Kudus	72.910.430	1.177.500	0	13.510.350	82.500	0
194	Kab. Magelang	109.105.800	2.012.500	30.000	15.610.200	82.500	0
195	Kab. Pati	119.243.120	1.922.500	0	23.084.820	82.500	0
196	Kab. Pekalongan	98.200.010	1.462.500	0	19.594.420	82.500	0
197	Kab. Pemalang	171.408.900	2.142.500	0	19.084.800	82.500	0
198	Kab. Purbalingga	96.156.100	1.360.000	0	10.618.800	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
190	Kab. Kebumen	3.299.700	135.000	0	278.424.643	411.000	0
191	Kab. Kendal	5.685.350	90.000	0	210.861.725	114.000	0
192	Kab. Klaten	2.444.400	45.000	0	242.663.309	372.000	0
193	Kab. Kudus	4.295.310	90.000	0	130.139.553	39.000	0
194	Kab. Magelang	7.532.100	90.000	0	209.627.427	174.000	305.920
195	Kab. Pati	2.680.930	135.000	0	240.594.492	350.000	0
196	Kab. Pekalongan	8.424.880	180.000	0	174.207.446	117.000	0
197	Kab. Pemalang	9.884.700	135.000	0	261.338.380	297.000	0
198	Kab. Purbalingga	5.796.100	90.000	0	200.628.817	258.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
190	Kab. Kebumen	600.000	0	0	10.815.176
191	Kab. Kendal	600.000	0	0	7.875.705
192	Kab. Klaten	500.000	0	0	9.211.735
193	Kab. Kudus	106.518	1.300.000	0	4.981.792
194	Kab. Magelang	600.000	0	0	10.100.000
195	Kab. Pati	500.000	0	0	8.571.795
196	Kab. Pekalongan	600.000	0	0	7.573.340
197	Kab. Pemalang	600.000	0	0	13.216.635
198	Kab. Purbalingga	600.000	600.000	0	6.639.596

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
190	Kab. Kebumen	0	13.576.222	25.765.200	647.965
191	Kab. Kendal	0	7.995.674	23.558.850	358.903
192	Kab. Klaten	0	12.033.506	28.560.735	491.875
193	Kab. Kudus	0	6.338.941	13.290.250	0
194	Kab. Magelang	0	9.870.986	17.233.185	519.819
195	Kab. Pati	0	11.089.387	19.319.998	188.279
196	Kab. Pekalongan	0	7.933.743	19.781.529	430.075
197	Kab. Pemalang	0	16.895.438	15.940.976	91.053
198	Kab. Purbalingga	0	10.202.717	17.995.061	361.531

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
190	Kab. Kebumen	0	408.000	491.844.006
191	Kab. Kendal	0	408.000	390.635.627
192	Kab. Klaten	0	0	428.244.260
193	Kab. Kudus	0	0	248.262.144
194	Kab. Magelang	0	408.000	383.302.437
195	Kab. Pati	0	408.000	428.170.821
196	Kab. Pekalongan	0	0	338.587.439
197	Kab. Pemalang	0	408.000	511.525.882
198	Kab. Purbalingga	0	408.000	351.797.222

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
199	Kab. Purworejo	79.223.200	1.517.500	0	10.996.200	82.500	0
200	Kab. Rembang	66.829.110	1.100.000	0	16.211.200	82.500	0
201	Kab. Semarang	106.539.120	1.532.500	0	16.183.440	82.500	0
202	Kab. Sragen	96.834.000	1.710.000	0	14.559.600	82.500	0
203	Kab. Sukoharjo	80.801.800	1.327.500	0	11.402.400	82.500	0
204	Kab. Tegal	168.540.300	1.972.500	335.000	22.045.200	82.500	200.000
205	Kab. Temanggung	74.036.760	1.405.000	0	11.757.750	82.500	0
206	Kab. Wonogiri	97.263.180	2.130.000	0	12.734.400	82.500	0
207	Kab. Wonosobo	90.880.410	1.420.000	65.000	14.260.800	82.500	75.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
199	Kab. Purworejo	2.014.300	90.000	0	173.135.812	72.000	0
200	Kab. Rembang	6.076.540	90.000	0	158.791.763	99.000	0
201	Kab. Semarang	6.014.710	90.000	0	192.586.133	141.000	0
202	Kab. Sragen	4.193.200	90.000	0	191.700.101	21.000	0
203	Kab. Sukoharjo	1.592.700	45.000	0	152.972.308	97.000	0
204	Kab. Tegal	9.092.600	135.000	31.000	248.955.760	291.000	3.502.353
205	Kab. Temanggung	5.863.850	180.000	0	155.637.399	69.000	0
206	Kab. Wonogiri	4.267.700	90.000	0	243.857.819	105.000	0
207	Kab. Wonosobo	6.795.640	90.000	0	174.708.257	108.000	621.987

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
199	Kab. Purworejo	500.000	700.000	0	6.153.191
200	Kab. Rembang	498.545	700.000	0	4.349.876
201	Kab. Semarang	500.000	0	0	8.283.285
202	Kab. Sragen	700.000	0	0	7.198.390
203	Kab. Sukoharjo	500.000	0	0	6.885.545
204	Kab. Tegal	400.000	0	0	10.797.557
205	Kab. Temanggung	600.000	0	0	6.345.587
206	Kab. Wonogiri	600.000	0	0	8.069.190
207	Kab. Wonosobo	500.000	0	0	7.332.535

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
199	Kab. Purworejo	0	9.778.792	12.000.574	268.346
200	Kab. Rembang	0	6.178.305	20.000.029	198.947
201	Kab. Semarang	0	8.268.962	16.328.736	540.064
202	Kab. Sragen	0	10.799.768	20.020.331	72.461
203	Kab. Sukoharjo	0	5.256.119	12.808.433	485.875
204	Kab. Tegal	0	12.499.759	28.107.286	519.965
205	Kab. Temanggung	0	10.303.035	18.746.278	464.033
206	Kab. Wonogiri	0	9.114.904	26.277.217	642.236
207	Kab. Wonosobo	0	10.215.849	17.271.373	457.073

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
199	Kab. Purworejo	0	408.000	296.940.415
200	Kab. Rembang	0	0	281.205.815
201	Kab. Semarang	0	0	357.090.450
202	Kab. Sragen	0	0	347.981.351
203	Kab. Sukoharjo	0	408.000	274.665.180
204	Kab. Tegal	0	408.000	507.915.780
205	Kab. Temanggung	0	0	285.491.192
206	Kab. Wonogiri	0	0	405.234.146
207	Kab. Wonosobo	0	408.000	325.292.424

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
208	Kota Magelang	21.905.200	695.000	0	2.523.000	82.500	0
209	Kota Pekalongan	30.364.900	352.500	0	5.642.400	82.500	0
210	Kota Salatiga	25.705.920	285.000	0	3.385.500	82.500	0
211	Kota Semarang	183.270.960	2.145.000	0	24.972.790	82.500	0
212	Kota Surakarta	81.099.500	1.064.500	0	8.688.000	82.500	0
213	Kota Tegal	36.534.370	455.000	0	4.270.000	82.500	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	267.622.230	4 751.750	0	0	0	0
215	Kab. Bantul	98.609.480	2 163 500	0	21.564.270	82.500	0
216	Kab. Gunung Kidul	68.805.590	1.542.500	0	14.832.720	82.500	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
208	Kota Magelang	2.424.100	90.000	0	36.708.883	18.000	0
209	Kota Pekalongan	3.446.700	90.000	0	48.671.148	24.000	0
210	Kota Salatiga	3.571.980	45.000	0	42.173.686	18.000	0
211	Kota Semarang	7.839.380	180.000	0	217.303.083	81.000	0
212	Kota Surakarta	4.146.300	90.000	0	93.380.373	33.000	0
213	Kota Tegal	3.059.810	45.000	0	63.426.373	63.000	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	0	0	225.261.778	18.000	0
215	Kab. Bantul	6.058.440	180.000	0	172.018.730	90.000	0
216	Kab. Gunung Kidul	2.057.440	135.000	0	192.708.715	238.250	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
208	Kota Magelang	300.000	0	0	800.875
209	Kota Pekalongan	400.000	600.000	0	2.118.615
210	Kota Salatiga	400.000	0	0	1.410.932
211	Kota Semarang	0	0	0	11.852.480
212	Kota Surakarta	300.000	1.400.000	1.500.000	3.995.402
213	Kota Tegal	600.000	0	0	2.014.759
214	Provinsi DI Yogyakarta	600.000	1.700.000	2.750.000	0
215	Kab. Bantul	0	0	0	4.916.151
216	Kab. Gunung Kidul	700.000	0	3.000.000	3.925.633

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
208	Kota Magelang	0	2.696.965	2.664.778	249.841
209	Kota Pekalongan	0	3.827.052	8.693.710	354.458
210	Kota Salatiga	0	2.761.096	3.026.756	224.575
211	Kota Semarang	0	15.161.104	29.553.392	783.305
212	Kota Surakarta	0	6.132.853	15.063.329	395.482
213	Kota Tegal	0	3.295.548	6.252.076	0
214	Provinsi DI Yogyakarta	2.265.974	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	6.665.860	21.983.685	396.757
216	Kab. Gunung Kidul	0	9.341.859	20.558.127	474.008

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
208	Kota Magelang	0	507.000	71.666.142
209	Kota Pekalongan	0	408.000	105.075.983
210	Kota Salatiga	0	0	83.090.945
211	Kota Semarang	0	408.000	493.632.994
212	Kota Surakarta	0	408.000	217.779.239
213	Kota Tegal	0	507.000	120.605.436
214	Provinsi DI Yogyakarta	0	507.000	505.476.752
215	Kab. Bantul	0	507.000	335.236.373
216	Kab. Gunung Kidul	0	507.000	318.909.342

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
217	Kab. Kulon Progo	46.807.660	1.010.000	0	9.450.660	82.500	0
218	Kab. Sleman	119.230.600	2.358.500	0	23.214.600	82.500	0
219	Kota Yogyakarta	57.866.960	1.016.500	0	6.988.020	82.500	0
220	Provinsi Jawa Timur	2.363.293.840	26.124.500	294.000	0	0	0
221	Kab. Bangkalan	144.001.710	2.635.000	0	17.338.750	82.500	0
222	Kab. Banyuwangi	159.306.380	2.900.000	0	26.887.680	82.500	0
223	Kab. Blitar	95.038.480	1.892.500	0	17.431.200	82.500	0
224	Kab. Bojonegoro	98.321.680	2.005.000	0	27.207.000	82.500	0
225	Kab. Bondowoso	65.065.260	1.477.500	90.000	18.601.800	82.500	75.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
217	Kab. Kulon Progo	1.049.220	45.000	0	112.105.674	62.250	0
218	Kab. Sleman	5.935.870	135.000	0	183.599.845	141.000	0
219	Kota Yogyakarta	2.633.010	90.000	0	67.558.074	36.000	0
220	Provinsi Jawa Timur	0	0	0	1.506.172.876	1.359.000	0
221	Kab. Bangkalan	3.705.540	135.000	0	197.134.528	300.000	0
222	Kab. Banyuwangi	20.190.260	360.000	0	235.187.028	93.000	0
223	Kab. Blitar	1.790.000	45.000	0	219.675.810	192.000	0
224	Kab. Bojonegoro	1.111.200	90.000	0	277.058.488	111.000	0
225	Kab. Bondowoso	10.292.900	270.000	31.000	168.428.563	129.000	888.393

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
217	Kab. Kulon Progo	0	0	2.500.000	3.250.940
218	Kab. Sleman	0	600.000	0	6.855.161
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	2.358.920
220	Provinsi Jawa Timur	0	1.200.000	3.000.000	0
221	Kab. Bangkalan	500.000	500.000	0	7.116.460
222	Kab. Banyuwangi	0	0	0	11.883.745
223	Kab. Blitar	400.000	600.000	0	9.239.077
224	Kab. Bojonegoro	0	0	0	8.732.379
225	Kab. Bondowoso	398.545	0	0	5.743.220

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
217	Kab. Kulon Progo	0	4.710.533	14.395.636	480.106
218	Kab. Sleman	0	7.480.879	12.881.278	473.750
219	Kota Yogyakarta	0	4.263.566	8.716.100	419.195
220	Provinsi Jawa Timur	23.001.123	0	0	0
221	Kab. Bangkalan	0	9.361.855	18.121.940	368.582
222	Kab. Banyuwangi	0	9.071.985	19.092.997	0
223	Kab. Blitar	0	9.495.785	19.719.912	280.653
224	Kab. Bojonegoro	0	10.148.603	16.076.674	0
225	Kab. Bondowoso	0	10.087.773	16.374.046	246.623

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
217	Kab. Kulon Progo	0	408.000	196.358.179
218	Kab. Sleman	0	507.000	363.495.983
219	Kota Yogyakarta	0	507.000	152.535.845
220	Provinsi Jawa Timur	0	408.000	3.924.853.339
221	Kab. Bangkalan	0	408.000	401.709.865
222	Kab. Banyuwangi	0	0	485.055.575
223	Kab. Blitar	0	408.000	376.290.917
224	Kab. Bojonegoro	0	0	440.944.524
225	Kab. Bondowoso	0	408.000	298.690.123

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
226	Kab. Gresik	134.021.360	1 612 500	0	36.183.600	82 500	0
227	Kab. Jember	238.335.340	3.861.500	0	40.971.520	82 500	0
228	Kab. Jombang	114.779.660	2.069 500	0	21.786.150	82 500	0
229	Kab. Kediri	136.493.800	2.040.000	0	27.522.600	82.500	0
230	Kab. Lamongan	94.803.730	2.000.000	0	34.676.400	82.500	0
231	Kab. Lumajang	100.054.250	1.885.000	0	20.271.360	82.500	0
232	Kab. Madiun	53.860.560	1.132.500	0	10.589.600	82.500	0
233	Kab. Magetan	57.268.080	1.132.500	0	9.701.760	82.500	0
234	Kab. Malang	259.768.020	4.205.000	0	41.878.620	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
226	Kab. Gresik	3.238.300	90.000	0	168.759.124	162.000	0
227	Kab. Jember	2.928.880	135.000	0	302.959.985	366.000	0
228	Kab. Jombang	3.787.900	135.000	0	180.103.377	186.000	0
229	Kab. Kediri	11.814.250	180.000	0	196.474.721	96.000	0
230	Kab. Lamongan	2.171.150	90.000	0	218.755.493	306.000	0
231	Kab. Lumajang	4.635.400	135.000	0	144.697.174	72.000	0
232	Kab. Madiun	3.279.150	45.000	0	131.116.376	57.000	0
233	Kab. Magetan	1.250.640	45.000	0	152.384.557	168.000	0
234	Kab. Malang	11.875.870	225.000	0	361.504.082	429.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
226	Kab. Gresik	0	600.000	0	8.514.037
227	Kab. Jember	0	0	0	17.892.421
228	Kab. Jombang	400.000	0	0	8.785.330
229	Kab. Kediri	0	0	0	12.728.655
230	Kab. Lamongan	500.000	600.000	0	9.305.470
231	Kab. Lumajang	400.000	600.000	0	7.842.591
232	Kab. Madiun	500.000	0	0	4.852.699
233	Kab. Magetan	600.000	0	0	5.169.743
234	Kab. Malang	400.000	600.000	0	22.610.785

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
226	Kab. Gresik	0	10.331.789	28.651.284	436.152
227	Kab. Jember	0	14.816.997	32.441.266	473.734
228	Kab. Jombang	0	10.647.043	19.609.735	0
229	Kab. Kediri	0	10.645.613	18.923.357	516.674
230	Kab. Lamongan	0	12.543.828	22.726.537	162.389
231	Kab. Lumajang	0	10.782.936	14.828.892	300.810
232	Kab. Madiun	0	11.043.792	15.216.628	833.307
233	Kab. Magetan	0	7.864.134	13.299.782	221.691
234	Kab. Malang	0	13.611.464	49.249.091	313.059

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
226	Kab. Gresik	0	408.000	393.090.646
227	Kab. Jember	0	408.000	655.673.143
228	Kab. Jombang	0	408.000	362.780.195
229	Kab. Kediri	0	0	417.518.170
230	Kab. Lamongan	0	0	398.723.497
231	Kab. Lumajang	0	0	306.587.913
232	Kab. Madiun	0	0	232.609.112
233	Kab. Magetan	0	0	249.188.387
234	Kab. Malang	0	408.000	767.160.491

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
235	Kab. Mojokerto	94.523.360	1.422.500	0	22.606.600	82.500	0
236	Kab. Nganjuk	100.261.080	1.722.500	0	17.355.660	82.500	0
237	Kab. Ngawi	70.872.790	1.462.500	0	11.797.380	82.500	0
238	Kab. Pacitan	44.262.400	1.225.000	0	9.101.400	82.500	0
239	Kab. Pamekasan	87.668.380	1.884.000	0	15.617.700	82.500	0
240	Kab. Pasuruan	160.095.040	2.215.000	0	24.800.620	82.500	0
241	Kab. Ponorogo	74.164.560	1.620.000	0	11.441.920	82.500	0
242	Kab. Probolinggo	98.753.780	2.217.000	0	18.052.800	82.500	0
243	Kab. Sampang	112.311.090	2.607.500	0	19.243.980	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
235	Kab. Mojokerto	2.837.430	90.000	0	165.825.472	267.000	0
236	Kab. Nganjuk	1.715.010	45.000	0	212.429.836	78.000	0
237	Kab. Ngawi	2.232.320	90.000	0	181.275.969	114.000	0
238	Kab. Pacitan	2.069.900	90.000	0	159.679.546	63.000	0
239	Kab. Pamekasan	2.428.670	90.000	0	163.206.913	77.000	0
240	Kab. Pasuruan	7.625.150	135.000	0	264.513.751	279.000	0
241	Kab. Ponorogo	1.204.550	45.000	0	189.926.237	135.000	0
242	Kab. Probolinggo	4.089.300	135.000	0	186.127.077	99.000	0
243	Kab. Sampang	6.553.040	180.000	0	159.317.099	36.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
235	Kab. Mojokerto	400.000	0	0	7.849.430
236	Kab. Nganjuk	500.000	600.000	0	8.189.730
237	Kab. Ngawi	600.000	600.000	0	5.827.613
238	Kab. Pacitan	498.545	0	0	4.407.630
239	Kab. Pamekasan	0	600.000	0	5.658.975
240	Kab. Pasuruan	0	0	0	10.903.104
241	Kab. Ponorogo	498.545	0	0	7.391.925
242	Kab. Probolinggo	398.545	0	0	8.460.112
243	Kab. Sampang	500.000	0	0	5.867.034

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
235	Kab. Mojokerto	0	8.807.981	17.837.707	0
236	Kab. Nganjuk	0	9.134.996	23.988.899	679.945
237	Kab. Ngawi	0	11.021.737	19.908.001	694.821
238	Kab. Pacitan	0	8.599.918	14.356.000	284.900
239	Kab. Pamekasan	0	15.507.869	17.636.315	590.436
240	Kab. Pasuruan	0	11.861.966	16.855.890	259.534
241	Kab. Ponorogo	0	11.389.532	20.447.466	240.457
242	Kab. Probolinggo	0	11.015.993	17.506.864	188.813
243	Kab. Sampang	0	12.290.396	15.403.629	379.872

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
235	Kab. Mojokerto	0	408.000	322.957.980
236	Kab. Nganjuk	0	0	376.783.156
237	Kab. Ngawi	0	408.000	306.987.631
238	Kab. Pacitan	0	0	244.720.739
239	Kab. Pamekasan	0	0	311.048.758
240	Kab. Pasuruan	0	0	499.626.555
241	Kab. Ponorogo	0	0	318.587.692
242	Kab. Probolinggo	0	0	347.126.784
243	Kab. Sampang	0	408.000	335.180.140

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
244	Kab. Sidoarjo	238.226.480	2.092.000	0	37.910.670	82.500	0
245	Kab. Situbondo	64.720.160	1.390.000	60.000	11.744.400	82.500	100.000
246	Kab. Sumenep	81.401.920	2.140.000	1.215.000	14.480.050	82.500	1.025.000
247	Kab. Trenggalek	62.039.750	1.305.000	0	9.996.070	82.500	0
248	Kab. Tuban	94.876.920	1.667.500	0	23.620.140	82.500	0
249	Kab. Tulungagung	95.099.700	1.962.500	0	17.595.000	82.500	0
250	Kota Blitar	20.212.500	227.500	0	3.216.000	82.500	0
251	Kota Kediri	37.213.000	477.500	0	5.624.400	82.500	0
252	Kota Madiun	24.358.840	362.500	0	3.746.160	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
244	Kab. Sidoarjo	5.259.880	135.000	0	263.423.905	351.000	0
245	Kab. Situbondo	2.415.200	135.000	0	151.356.605	171.000	517.602
246	Kab. Sumenep	3.235.020	225.000	31.000	188.443.270	99.000	7.675.508
247	Kab. Trenggalek	1.730.150	45.000	0	159.361.363	126.000	0
248	Kab. Tuban	6.800.920	180.000	0	217.954.931	114.000	0
249	Kab. Tulungagung	3.539.560	135.000	0	211 673.954	141.000	0
250	Kota Blitar	1.047.200	45.000	0	37.860.444	24.000	0
251	Kota Kediri	2 583.000	45.000	0	51 874.500	77.500	0
252	Kota Madiun	744.920	45.000	0	46 084 237	18.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
244	Kab. Sidoarjo	0	0	0	13.943.384
245	Kab. Situbondo	0	0	0	5.345.545
246	Kab. Sumenep	400.000	600.000	0	7.066.760
247	Kab. Trenggalek	600.000	0	0	4.409.555
248	Kab. Tuban	0	600.000	0	8.412.194
249	Kab. Tulungagung	600.000	600.000	0	7.349.481
250	Kota Blitar	0	0	0	1.045.906
251	Kota Kediri	0	600.000	0	2.057.744
252	Kota Madiun	400.000	0	0	1.431.575

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
244	Kab. Sidoarjo	0	10.814.288	24.490.318	529.031
245	Kab. Situbondo	0	8.109.723	14.010.909	0
246	Kab. Sumenep	0	10.246.291	21.262.212	0
247	Kab. Trenggalek	0	8.146.409	17.054.079	599.416
248	Kab. Tuban	0	8.351.939	20.944.883	293.971
249	Kab. Tulungagung	0	7.081.645	17.746.466	0
250	Kota Blitar	0	2.391.347	1.730.059	493.023
251	Kota Kediri	0	3.358.728	4.713.548	0
252	Kota Madiun	0	3.767.739	3.497.942	460.756

V 13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
244	Kab. Sidoarjo	0	408.000	597.666.456
245	Kab. Situbondo	0	408.000	260.566.644
246	Kab. Sumenep	3.601.440	0	343.229.971
247	Kab. Trenggalek	0	408.000	265.903.292
248	Kab. Tuban	0	0	383.899.898
249	Kab. Tulungagung	0	408.000	364.014.806
250	Kota Blitar	0	0	68.375.479
251	Kota Kediri	0	408.000	109.115.420
252	Kota Madiun	0	0	85.000.169

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
253	Kota Malang	98.445.000	1.072.500	0	14.412.600	82.500	0
254	Kota Mojokerto	19.321.930	205.000	0	3.134.250	82.500	0
255	Kota Pasuruan	25.548.700	262.500	0	4.619.400	82.500	0
256	Kota Probolinggo	25.933.600	307.500	0	4.749.000	82.500	0
257	Kota Surabaya	320.287.450	2.702.500	0	55.104.480	82.500	0
258	Kota Batu	23.522.520	285.000	0	3.760.800	82.500	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	386.215.040	5.558.000	1.713.600	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	51.948.870	1.032.000	2.532.000	2.732.400	82.500	570.000
261	Kab. Landak	73.047.490	1.397.500	4.956.000	4.304.910	82.500	1.260.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
253	Kota Malang	6.275.500	90.000	0	144.091.592	164.500	0
254	Kota Mojokerto	299.480	45.000	0	30.318.799	3.000	0
255	Kota Pasuruan	655.000	45.000	0	39.535.672	15.000	0
256	Kota Probolinggo	482.300	45.000	0	43.105.770	21.000	0
257	Kota Surabaya	4.844.890	180.000	0	278.977.712	300.000	0
258	Kota Batu	1.004.160	45.000	0	38.882.689	12.000	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	318.053.105	300.000	10.352.559
260	Kab. Bengkayang	1.079.370	90.000	37.200	88.239.437	63.000	15.775.963
261	Kab. Landak	574.120	45.000	37.200	107.188.832	607.000	26.195.748

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
253	Kota Malang	400.000	1.100.000	0	5.167.413
254	Kota Mojokerto	300.000	0	0	1.070.738
255	Kota Pasuruan	0	0	0	1.523.890
256	Kota Probolinggo	0	600.000	0	1.814.468
257	Kota Surabaya	300.000	1.300.000	0	17.917.764
258	Kota Batu	300.000	0	0	1.944.332
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	900.000	1.500.000	0
260	Kab. Bengkayang	500.000	0	0	2.600.000
261	Kab. Landak	398.545	0	0	3.567.205

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
253	Kota Malang	0	7.417.727	7.366.600	482.226
254	Kota Mojokerto	0	2.550.451	3.167.089	239.413
255	Kota Pasuruan	0	3.161.856	4.067.013	323.710
256	Kota Probolinggo	0	1.866.005	2.786.686	212.514
257	Kota Surabaya	0	43.549.384	35.483.772	0
258	Kota Batu	0	2.055.137	3.283.560	440.347
259	Provinsi Kalimantan Barat	6.014.111	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	9.314.058	13.667.361	487.574
261	Kab. Landak	0	10.543.273	19.259.674	190.428

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
253	Kota Malang	0	408.000	286.976.158
254	Kota Mojokerto	0	0	60.737.650
255	Kota Pasuruan	0	0	79.840.241
256	Kota Probolinggo	0	507.000	82.513.343
257	Kota Surabaya	0	408.000	761.438.452
258	Kota Batu	0	0	75.618.045
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	408.000	731.014.415
260	Kab. Bengkayang	4.681.872	408.000	195.841.605
261	Kab. Landak	0	0	253.655.425

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
262	Kab. Kapuas Hulu	51.063.400	1.307.500	4.590.000	3.629.700	82.500	1.170.000
263	Kab. Ketapang	91.152.590	1.932.500	6.870.000	7.393.750	82.500	1.200.000
264	Kab. Mempawah	36.386.400	637.500	336.000	3.818.330	82.500	90.000
265	Kab. Sambas	97.152.770	1.464.500	636.000	6.965.320	82.500	390.000
266	Kab. Sanggau	82.168.320	1.535.000	4.440.000	4.602.500	82.500	1.140.000
267	Kab. Sintang	82.638.480	1.699.000	10.680.000	3.765.330	82.500	1.800.000
268	Kota Pontianak	87.889.130	1.082.500	0	6.632.010	82.500	0
269	Kota Singkawang	40.754.600	387.500	0	2.218.350	82.500	0
270	Kab. Sekadau	37.558.910	785.000	1.884.000	2.508.480	82.500	390.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
262	Kab. Kapuas Hulu	1.027.560	45.000	0	117.580.054	150.000	19.309.343
263	Kab. Ketapang	3.692.980	135.000	37.200	180.566.323	135.000	45.584.878
264	Kab. Mempawah	3.505.300	135.000	0	71.708.081	111.000	1.793.529
265	Kab. Sambas	4.349.240	90.000	0	123.967.296	135.000	3.919.609
266	Kab. Sanggau	2.708.390	90.000	0	137.060.078	180.000	23.035.917
267	Kab. Sintang	1.969.180	45.000	37.200	127.623.066	231.000	70.999.092
268	Kota Pontianak	3.103.720	90.000	0	91.226.504	96.000	0
269	Kota Singkawang	1.098.690	45.000	0	50.561.760	33.000	0
270	Kab. Sekadau	1.179.310	45.000	0	74.333.465	99.000	9.974.567

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	4.167.217
263	Kab. Ketapang	400.000	0	0	4.187.520
264	Kab. Mempawah	400.000	0	0	1.787.219
265	Kab. Sambas	0	600.000	0	4.039.257
266	Kab. Sanggau	400.000	0	0	3.528.835
267	Kab. Sintang	0	600.000	0	5.656.505
268	Kota Pontianak	0	0	0	1.400.000
269	Kota Singkawang	500.000	0	0	1.086.203
270	Kab. Sekadau	0	0	0	1.500.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
262	Kab. Kapuas Hulu	0	8.439.416	19.643.369	0
263	Kab. Ketapang	0	11.521.678	18.323.802	376.868
264	Kab. Mempawah	0	6.441.416	9.313.043	328.329
265	Kab. Sambas	0	10.198.501	29.425.326	324.428
266	Kab. Sanggau	0	8.254.692	14.770.008	290.340
267	Kab. Sintang	0	9.505.633	16.715.394	0
268	Kota Pontianak	0	6.486.786	12.698.703	607.599
269	Kota Singkawang	0	3.517.747	6.508.121	327.553
270	Kab. Sekadau	0	7.868.532	8.763.721	342.647

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
262	Kab. Kapuas Hulu	5.762.304	0	237.967.363
263	Kab. Ketapang	0	0	373.592.589
264	Kab. Mempawah	0	0	136.873.647
265	Kab. Sambas	13.685.472	408.000	297.833.219
266	Kab. Sanggau	7.923.168	0	292.209.748
267	Kab. Sintang	12.244.896	408.000	346.700.276
268	Kota Pontianak	0	0	211.395.452
269	Kota Singkawang	0	0	107.121.024
270	Kab. Sekadau	0	0	147.315.132

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
271	Kab. Melawi	39.972.420	1.005.000	6.936.000	2.978.730	82.500	1.920.000
272	Kab. Kayong Utara	20.703.330	422.500	420.000	1.656.000	82.500	30.000
273	Kab. Kubu Raya	88.537.360	1.415.000	1.386.000	6.537.600	82.500	60.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	175.001.270	4.520.000	1.108.800	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	17.399.140	739.500	2.046.000	1.693.970	82.500	630.000
276	Kab. Barito Utara	20.941.540	580.000	960.000	2.510.380	82.500	360.000
277	Kab. Kapuas	43.418.360	1.355.000	4.338.000	6.651.600	82.500	2.280.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	41.905.970	695.000	192.000	5.382.640	82.500	30.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	72.811.840	1.449.000	2.526.000	6.226.800	82.500	720.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
271	Kab. Melawi	851.480	45.000	0	70.214.933	273.000	31.334.556
272	Kab. Kayong Utara	357.720	45.000	0	53.247.340	42.000	3.254.845
273	Kab. Kubu Raya	3.674.950	90.000	0	113.366.059	159.000	7.423.917
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	263.545.941	279.000	5.162.861
275	Kab. Barito Selatan	519.780	90.000	0	68.147.647	63.000	14.357.858
276	Kab. Barito Utara	679.340	45.000	0	81.977.230	104.000	8.052.700
277	Kab. Kapuas	2.326.900	90.000	0	147.326.360	330.000	38.187.687
278	Kab. Kotawaringin Barat	3.162.160	135.000	0	72.831.368	30.000	1.015.316
279	Kab. Kotawaringin Timur	2.535.600	90.000	0	125.908.841	183.000	12.766.789

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
271	Kab. Melawi	0	0	0	2.626.366
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	1.218.110
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0	2.921.242
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	900.000	2.000.000	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0	1.245.373
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	1.383.675
277	Kab. Kapuas	0	0	0	2.896.308
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	1.868.805
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	600.000	0	2.998.155

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
271	Kab. Melawi	0	6.554.139	7.289.261	204.368
272	Kab. Kayong Utara	0	5.946.706	9.504.785	368.970
273	Kab. Kubu Raya	0	9.011.921	20.012.349	248.384
274	Provinsi Kalimantan Tengah	5.389.050	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	5.859.710	10.693.000	177.204
276	Kab. Barito Utara	0	4.950.226	9.157.845	313.263
277	Kab. Kapuas	0	8.243.224	115.762.659	683.540
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	5.725.857	14.035.572	560.759
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	5.116.130	15.036.172	449.785

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
271	Kab. Melawi	0	0	172.287.753
272	Kab. Kayong Utara	0	0	97.299.806
273	Kab. Kubu Raya	0	408.000	255.334.282
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	408.000	458.314.922
275	Kab. Barito Selatan	0	408.000	324.152.682
276	Kab. Barito Utara	0	0	132.097.699
277	Kab. Kapuas	0	408.000	374.380.138
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	408.000	148.060.947
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	408.000	249.908.612

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
280	Kota Palangkaraya	34.268.360	600.000	156.000	3.312.910	82.500	30.000
281	Kab. Katingan	29.859.520	810.000	4.062.000	2.139.000	82.500	870.000
282	Kab. Seruyan	31.013.260	909.500	1.878.000	3.248.160	82.500	330.000
283	Kab. Sukamara	11.029.170	182.500	192.000	1.842.480	82.500	150.000
284	Kab. Lamandau	18.180.880	592.000	678.000	2.858.100	82.500	150.000
285	Kab. Gunung Mas	26.282.480	615.000	2.016.000	2.205 450	82.500	510.000
286	Kab. Pulang Pisau	20.102.940	602.500	828.000	2.525 400	82.500	300.000
287	Kab. Murung Raya	21.723.740	650.000	2.730.000	2.671 900	82.500	1.230.000
288	Kab. Barito Timur	13.801.720	477.500	78.000	1.983 000	82.500	30.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
280	Kota Palangkaraya	8.271.160	90.000	0	77.394.215	45.000	0
281	Kab. Katingan	3.019.500	90.000	37.200	90.391.473	51.000	22.909.284
282	Kab. Seruyan	1.005.630	45.000	0	55.582.286	45.000	8.623.287
283	Kab. Sukamara	468.940	45.000	0	27.816.264	12.000	1.888.555
284	Kab. Lamandau	456.040	90.000	0	43.867.117	90.000	5.359.093
285	Kab. Gunung Mas	96.700	45.000	0	87.377.809	60.000	16.479.681
286	Kab. Pulang Pisau	4.314.320	90.000	0	56.739.913	42.000	4.098.889
287	Kab. Murung Raya	1.287.190	45.000	0	77.378.945	48.000	22.006.237
288	Kab. Barito Timur	727.800	45.000	0	65.019.379	72.000	894.010

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
280	Kota Palangkaraya	400.000	0	0	2.021.410
281	Kab. Katingan	0	0	0	1.612.561
282	Kab. Seruyan	0	0	0	1.503.787
283	Kab. Sukamara	0	0	0	496.685
284	Kab. Lamandau	0	0	0	990.569
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	1.532.341
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	1.216.177
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	1.255.482
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	1.314.966

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
280	Kota Palangkaraya	0	6.374.258	7.673.017	357.915
281	Kab. Katingan	0	7.029.066	12.445.194	561.264
282	Kab. Seruyan	0	5.620.017	7.553.057	283.894
283	Kab. Sukamara	0	3.860.950	4.600.093	491.858
284	Kab. Lamandau	0	4.105.863	4.934.299	328.763
285	Kab. Gunung Mas	0	7.368.514	10.648.277	253.747
286	Kab. Pulang Pisau	0	5.884.561	9.258.361	358.960
287	Kab. Murung Raya	0	4.734.060	10.974.425	463.770
288	Kab. Barito Timur	0	5.903.494	10.920.342	125.047

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
280	Kota Palangkaraya	0	408.000	141.484.745
281	Kab. Katingan	0	408.000	176.377.562
282	Kab. Seruyan	0	0	117.723.378
283	Kab. Sukamara	0	0	53.158.995
284	Kab. Lamandau	0	0	82.763.224
285	Kab. Gunung Mas	0	408.000	155.981.499
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	106.444.521
287	Kab. Murung Raya	0	0	147.281.249
288	Kab. Barito Timur	0	0	101.474.758

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	223.358.740	4.282.250	100.800	0	0	0
290	Kab. Banjar	53.970.200	1.135.000	444.000	8.544.060	82.500	90.000
291	Kab. Barito Kuala	37.684.900	975.000	258.000	6.019.020	82.500	210.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	21.592.360	635.000	186.000	4.358.400	82.500	60.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	22.120.740	725.000	216.000	4.204.200	82.500	60.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	15.755.830	567.500	600.000	3.528.240	82.500	630.000
295	Kab. Kotabaru	42.699.100	917.000	336.000	4.986.000	82.500	90.000
296	Kab. Tabalong	32.287.470	849.500	612.000	5.534.740	82.500	150.000
297	Kab. Tanah Laut	40.193.600	772.500	36.000	6.486.000	82.500	30.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	289.192.350	219.000	906.266
290	Kab. Banjar	14.241.230	180.000	0	150.018.627	81.000	3.720.627
291	Kab. Barito Kuala	2.323.410	45.000	0	120.050.902	99.000	1.885.702
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.703.600	135.000	0	80.703.688	69.000	1.579.500
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.997.400	90.000	0	86.042.188	45.000	1.833.626
294	Kab. Hulu Sungai Utara	1.457.070	90.000	0	72.934.294	81.000	5.306.539
295	Kab. Kotabaru	2.455.300	90.000	0	71.094.684	84.000	1.365.312
296	Kab. Tabalong	2.754.770	135.000	0	100.166.688	138.000	5.280.362
297	Kab. Tanah Laut	3.016.100	90.000	0	118.181.907	51.000	347.089

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
289	Provinsi Kalimantan Selatan	400.000	2.500.000	3.000.000	0
290	Kab. Banjar	500.000	0	0	4.179.974
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	2.613.477
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	600.000	0	2.084.028
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	2.094.410
294	Kab. Hulu Sungai Utara	500.000	0	0	2.399.498
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	2.611.451
296	Kab. Tabalong	300.000	0	0	1.896.854
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	2.343.836

V 13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
289	Provinsi Kalimantan Selatan	7.012.481	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	11.153.525	23.650.086	319 963
291	Kab. Barito Kuala	0	8.139.078	13.986.263	224 982
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	6.995.176	15.267.854	62 430
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	6.280.328	9.969.337	190 916
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	5.966.731	5.381.950	0
295	Kab. Kotabaru	0	10.233.106	18.165.360	0
296	Kab. Tabalong	0	6.732.483	11.189.085	0
297	Kab. Tanah Laut	0	8.799.694	11.576.502	199 024

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	408.000	531.379.887
290	Kab. Banjar	0	408.000	272.718.792
291	Kab. Barito Kuala	0	408.000	195.005.234
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	307.000	138.621.536
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	408.000	138.359.645
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	408.000	115.689.152
295	Kab. Kotabaru	0	408.000	155.617.813
296	Kab. Tabalong	0	408.000	168.517.452
297	Kab. Tanah Laut	0	408.000	192.613.752

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
298	Kab. Tapin	20.837.340	510.000	72.000	4.104.600	82.500	60.000
299	Kota Banjarbaru	35.758.530	737.000	0	5.423.760	82.500	0
300	Kota Banjarmasin	72.303.330	1.004.000	0	8.346.240	82.500	0
301	Kab. Balangan	13.791.360	510.000	258.000	3.664.820	82.500	60.000
302	Kab. Tanah Bumbu	47.054.500	695.000	114.000	7.444.200	82.500	60.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	311.452.350	5.190.250	302.400	0	0	0
304	Kab. Berau	50.135.690	627.500	594.000	5.076.060	82.500	210.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	128.065.180	1.922.500	1.164.000	11.952.500	82.500	360.000
306	Kab. Kutai Barat	36.867.420	769.500	1.398.000	2.874.080	82.500	390.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
298	Kab. Tapin	6.948.100	135.000	0	67.530.641	54.000	589.616
299	Kota Banjarbaru	5.566.020	90.000	0	58.446.587	33.000	0
300	Kota Banjarmasin	5.426.680	90.000	0	123.535.668	24.000	0
301	Kab. Balangan	2.586.860	135.000	0	66.503.148	102.000	2.735.227
302	Kab. Tanah Bumbu	4.603.400	90.000	0	103.882.118	108.000	691.471
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	316.713.547	153.000	2.330.020
304	Kab. Berau	2.121.440	45.000	0	106.132.545	159.000	4.275.454
305	Kab. Kutai Kartanegara	6.022.650	135.000	0	230.969.227	225.000	10.077.744
306	Kab. Kutai Barat	496.690	45.000	0	80.259.792	225.000	10.045.654

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
298	Kab. Tapin	0	0	0	1.847.133
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	1.477.888
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	2.274.201
301	Kab. Balangan	0	0	0	1.488.540
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	2.627.302
303	Provinsi Kalimantan Timur	300.000	1.000.000	1.900.000	0
304	Kab. Berau	300.000	0	0	1.947.746
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	4.708.949
306	Kab. Kutai Barat	0	0	0	2.514.770

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
298	Kab. Tapin	0	5.354.080	8.075.971	427.290
299	Kota Banjarbaru	0	3.638.378	6.687.930	235.534
300	Kota Banjarmasin	0	8.434.152	14.218.723	405.326
301	Kab. Balangan	0	5.736.905	8.397.048	370.659
302	Kab. Tanah Bumbu	0	8.732.675	10.678.037	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	1.870.540	0	0	0
304	Kab. Berau	0	6.489.279	9.059.188	424.774
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	12.566.393	17.241.679	375.763
306	Kab. Kutai Barat	0	6.266.817	10.427.179	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
298	Kab. Tapin	0	408.000	117.036.271
299	Kota Banjarbaru	0	408.000	118.585.127
300	Kota Banjarmasin	0	408.000	236.552.820
301	Kab. Balangan	0	0	106.422.067
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	186.863.203
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	507.000	641.719.107
304	Kab. Berau	16.926.768	408.000	205.014.944
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	408.000	426.277.085
306	Kab. Kutai Barat	0	507.000	153.169.402

V 13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
307	Kab. Kutai Timur	83.425.460	890.000	864.000	9.722.740	82.500	420.000
308	Kab. Paser	46.334.490	919.500	1.176.000	4.119.040	82.500	210.000
309	Kota Balikpapan	103.380.540	1.168.500	0	9.704.280	82.500	0
310	Kota Bontang	27.720.180	312.500	0	4.209.660	82.500	0
311	Kota Samarinda	115.270.020	1.614.500	0	7.755.150	82.500	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	30.642.020	387.500	0	3.428.040	82.500	0
313	Kab. Mahakam Ulu	10.146.180	160.000	408.000	1.232.840	82.500	480.000
314	Provinsi Sulawesi Utara	187.140.560	4.285.250	54.600	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	30.008.570	762.500	169.000	2.461.960	82.500	32.500

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
307	Kab. Kutai Timur	3.729.500	90.000	37.200	126.893.724	102.000	6.437.530
308	Kab. Paser	948.840	45.000	0	112.316.427	144.000	6.687.663
309	Kota Balikpapan	11.276.610	45.000	0	116.565.057	102.000	0
310	Kota Bontang	1.567.670	90.000	0	32.762.283	51.000	0
311	Kota Samarinda	7.602.990	135.000	0	158.699.608	156.000	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	653.990	45.000	0	61.231.531	45.000	0
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	18.651.585	33.000	1.889.064
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	253.661.843	129.000	279.231
315	Kab. Bolaang Mongondow	1.815.520	135.000	0	90.263.254	141.000	1.099.155

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	2.204.612
308	Kab. Paser	0	600.000	0	2.363.470
309	Kota Balikpapan	0	0	0	2.301.301
310	Kota Bontang	300.000	0	0	955.450
311	Kota Samarinda	0	0	0	3.689.757
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	1.403.518
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	517.320
314	Provinsi Sulawesi Utara	500.000	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	498.545	0	0	2.167.577

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
307	Kab. Kutai Timur	0	10.010.174	16.491.341	0
308	Kab. Paser	0	3.499.753	10.134.561	0
309	Kota Balikpapan	0	8.183.896	19.675.797	794.217
310	Kota Bontang	0	4.820.263	2.170.768	135.804
311	Kota Samarinda	0	10.788.100	15.418.005	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	6.853.568	6.067.717	213.514
313	Kab. Mahakam Ulu	0	5.758.485	2.855.796	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	5.987.849	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	8.540.661	10.314.350	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
307	Kab. Kutai Timur	0	408.000	261.808.781
308	Kab. Paser	0	408.000	189.989.244
309	Kota Balikpapan	0	507.000	273.786.698
310	Kota Bontang	0	507.000	75.685.078
311	Kota Samarinda	0	507.000	321.718.630
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	408.000	111.461.898
313	Kab. Mahakam Ulu	720.288	0	42.935.058
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	507.000	452.545.333
315	Kab. Bolaang Mongondow	6.482.592	408.000	155.382.684

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
316	Kab. Minahasa	37.302.290	1.150.000	0	2.496.730	82.500	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	21.450.150	877.500	1.579.500	1.881.750	82.500	617.500
318	Kota Bitung	26.375.140	387.500	0	1.248.720	82.500	0
319	Kota Manado	57.560.150	954.500	0	3.060.480	82.500	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	17.723.040	532.000	201.500	2.038.520	82.500	162.500
321	Kab. Minahasa Selatan	27.252.080	855.000	78.000	2.222.350	82.500	97.500
322	Kota Tomohon	13.695.240	262.500	0	898.560	82.500	0
323	Kab. Minahasa Utara	30.581.820	807.500	39.000	2.379.520	82.500	32.500
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	9.316.580	439.500	78.000	679.700	82.500	32.500

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
316	Kab. Minahasa	1.275.830	90.000	0	89.697.423	102.000	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	671.900	45.000	0	59.591.586	138.000	7.191.033
318	Kota Bitung	1.401.840	90.000	0	40.463.525	18.000	0
319	Kota Manado	1.801.450	135.000	0	76.978.297	23.750	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	474.780	45.000	0	47.037.112	42.000	1.233.944
321	Kab. Minahasa Selatan	1.374.860	90.000	0	60.684.777	6.000	289.805
322	Kota Tomohon	323.600	90.000	0	29.405.945	12.000	0
323	Kab. Minahasa Utara	3.460.460	135.000	0	62.721.416	54.000	880.597
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	13.720	45.000	0	28.729.225	39.000	631.985

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
316	Kab. Minahasa	398.545	0	0	2.819.237
317	Kab. Kepulauan Sangihe	398.545	0	0	1.957.620
318	Kota Bitung	400.000	0	0	1.876.921
319	Kota Manado	0	0	0	2.844.741
320	Kab. Kepulauan Talaud	498.545	0	0	1.712.027
321	Kab. Minahasa Selatan	398.545	0	0	2.200.347
322	Kota Tomohon	400.000	0	0	913.480
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	1.936.175
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	398.545	0	0	1.011.035

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
316	Kab. Minahasa	0	10.258.732	14.008.631	169.351
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	6.725.345	8.734.128	208.477
318	Kota Bitung	0	7.024.948	3.201.777	295.977
319	Kota Manado	0	5.982.689	8.665.816	544.452
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	6.639.567	12.439.950	293.024
321	Kab. Minahasa Selatan	0	6.969.351	10.818.177	143.336
322	Kota Tomohon	0	4.999.482	5.329.297	293.665
323	Kab. Minahasa Utara	0	6.773.528	10.673.185	244.616
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	0	5.211.266	4.532.040	216.986

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
316	Kab. Minahasa	0	0	159.851.269
317	Kab. Kepulauan Sangihe	13.685.472	507.000	126.347.006
318	Kota Bitung	0	507.000	83.373.848
319	Kota Manado	0	507.000	159.130.825
320	Kab. Kepulauan Talaud	7.563.024	0	98.719.033
321	Kab. Minahasa Selatan	6.842.736	0	120.405.364
322	Kota Tomohon	0	507.000	57.213.269
323	Kab. Minahasa Utara	0	408.000	121.210.117
324	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	6.482.592	0	57.940.174

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
325	Kota Kotamobagu	14.430.240	250.000	0	1.090.560	82.500	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.162.160	295.000	0	1.560.000	82.500	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	15.281.260	400.000	0	1.669.040	82.500	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	9.478.280	262.500	0	860.740	82 500	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9.876.910	285.000	0	1.630 600	82 500	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	195.025.810	4.729.000	218.400	0	0	0
331	Kab. Banggai	47.466.300	1.230.000	318.500	6.095.400	82 500	130.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	18.675.420	592.500	247.000	2.345.400	82 500	162.500
333	Kab. Buol	22.967.640	605.000	0	2.518.200	82 500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
325	Kota Kotamobagu	434.790	90.000	0	32.235.161	27.000	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.077.000	45.000	0	33.819.171	33.000	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	786.980	90.000	0	38.525.142	63.000	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	482.310	90.000	0	33.819.122	36.000	0
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.041.760	90.000	0	31.971.362	60.000	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0	335.486.376	121.500	1.780.526
331	Kab. Banggai	1.753.800	135.000	0	128.659.469	249.000	1.341.533
332	Kab. Banggai Kepulauan	1.034.380	135.000	0	72.902.947	64.500	2.321.688
333	Kab. Buol	630.400	45.000	0	74.359.585	51.750	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
325	Kota Kotamobagu	0	0	0	1.090.755
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	398.545	0	0	1.244.251
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	1.631.820
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	398.545	0	0	1 011.149
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	1 198.304
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	1.200.000	0	0
331	Kab. Banggai	398.545	500.000	0	3 705.057
332	Kab. Banggai Kepulauan	400.000	0	0	1.892 390
333	Kab. Buol	398.545	0	0	1 503 138

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
325	Kota Kotamobagu	0	2.602.172	1.949.370	196.791
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	3.573.232	8.218.313	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	5.484.751	6.708.292	128.815
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	4.890.637	5.823.392	482.878
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	5.816.874	5.724.730	376.427
330	Provinsi Sulawesi Tengah	3.364.960	0	0	0
331	Kab. Banggai	0	11.987.302	28.561.221	412.795
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	8.022.045	12.340.934	137.092
333	Kab. Buol	0	10.053.933	9.742.309	532.278

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
325	Kota Kotamobagu	0	507.000	54.986.339
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.881.152	507.000	63.896.324
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	70.851.600
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	507.000	58.245.053
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	58.154.467
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	408.000	542.334.572
331	Kab. Banggai	0	0	233.026.422
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	121.356.296
333	Kab. Buol	2.881.152	0	126.371.430

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
334	Kab. Toli-Toli	29.970.420	762.500	604.500	3.277.800	82.500	97.500
335	Kab. Donggala	44.790.160	1.247.000	1.651.000	4.815.000	82.500	292.500
336	Kab. Morowali	30.067.560	500.000	1.534.000	5.793.000	82.500	1.007.500
337	Kab. Poso	28.490.040	820.000	370.500	2.868.600	82.500	97.500
338	Kota Palu	51.376.700	935.000	0	5.141.400	82.500	0
339	Kab. Parigi Moutong	58.561.540	1.487.500	643.500	9.639.000	82.500	97.500
340	Kab. Tojo Una Una	23.304.720	637.500	2.548.000	2.629.800	82.500	1.040.000
341	Kab. Sigi	33.560.660	852.500	2.405.000	3.680.400	82.500	780.000
342	Kab. Banggai Laut	12.208.800	342.500	1.085.500	1.532.640	82.500	455.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
334	Kab. Toli-Toli	896.200	45.000	0	72.320.974	96.000	4.122.358
335	Kab. Donggala	1.804.600	135.000	0	124.485.031	99.000	7.849.478
336	Kab. Morowali	890.900	45.000	40.300	73.887.491	93.000	10.649.496
337	Kab. Posu	743.300	90.000	0	88.813.539	18.000	2.323.212
338	Kota Palu	4.672.000	135.000	0	111.697.742	84.000	0
339	Kab. Parigi Moutong	4.298.900	135.000	40.300	168.958.580	507.000	2.159.239
340	Kab. Tojo Una Una	1.443.800	90.000	241.800	83.018.321	81.000	20.914.553
341	Kab. Sigi	3.817.500	135.000	40.300	99.045.870	93.250	11.265.353
342	Kab. Banggai Laut	562.410	90.000	0	43.426.825	39.000	8.674.987

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
334	Kab. Toli-Toli	398.545	0	0	2.025.994
335	Kab. Donggala	398.545	0	0	3.104.277
336	Kab. Morowali	0	0	0	1.825.480
337	Kab. Poso	498.545	0	0	2.255.350
338	Kota Palu	0	0	0	3.221.020
339	Kab. Parigi Moutong	500.000	0	0	4.137.177
340	Kab. Tojo Una Una	0	0	0	1.819.060
341	Kab. Sigi	500.000	0	0	2.599.036
342	Kab. Banggai Laut	0	0	0	987.053

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
334	Kab. Toli-Toli	0	8.544.095	8.856.215	148.933
335	Kab. Donggala	0	8.976.792	17.620.610	889.956
336	Kab. Morowali	0	3.557.390	9.252.423	327.131
337	Kab. Poso	0	9.405.919	16.804.718	523.582
338	Kota Palu	0	4.948.615	8.581.550	515.404
339	Kab. Parigi Moutong	0	11.002.389	22.977.338	420.456
340	Kab. Tojo Una Una	0	8.501.936	15.385.704	383.938
341	Kab. Sigi	0	9.905.915	15.388.661	682.033
342	Kab. Banggai Laut	0	6.450.507	7.023.084	225.283

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
334	Kab. Toli-Toli	6.842.736	0	139.092.270
335	Kab. Donggala	4.681.872	0	222.923.321
336	Kab. Morowali	0	0	139.553.171
337	Kab. Poso	0	408.000	154.613.305
338	Kota Palu	0	507.000	191.897.931
339	Kab. Parigi Moutong	0	408.000	286.055.919
340	Kab. Tojo Una Una	6.482.592	507.000	169.112.224
341	Kab. Sigi	5.042.016	408.000	190.284.194
342	Kab. Banggai Laut	720.288	0	83.906.377

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
343	Kab. Morowali Utara	19.432.280	635.000	1.079.000	2.784.000	82 500	325.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	562.653.120	7.990.750	600.600	0	0	0
345	Kab. Bantaeng	24.802.740	612.500	0	3.336.000	82.500	0
346	Kab. Barru	23.347.920	590.000	0	3.354.000	82 500	0
347	Kab. Bone	87.459.140	2.132.000	123.500	9.571.200	82 500	0
348	Kab. Bulukumba	51.828.560	1.032.500	0	6.340.200	82.500	0
349	Kab. Enrekang	28.350.690	692.500	357.500	3.354.820	82.500	390.000
350	Kab. Gowa	100.016.100	1.422.500	0	9.597.600	82.500	0
351	Kab. Jeneponto	50.349.680	932.500	0	5.123.400	82 500	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
343	Kab. Morowali Utara	338.200	45.000	0	63.049.300	42.000	5.624.568
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0	852.170.562	234.000	5.566.746
345	Kab. Bantaeng	4.583.300	45.000	0	80.337.719	27.000	0
346	Kab. Barru	2.462.800	45.000	0	76.613.718	48.000	0
347	Kab. Bone	5.489.900	90.000	0	253.291.394	138.000	1.223.251
348	Kab. Bulukumba	3.651.100	180.000	0	122.625.987	60.000	0
349	Kab. Enrekang	930.290	45.000	0	109.177.791	45.000	3.513.463
350	Kab. Gowa	4.508.000	135.000	0	150.986.497	57.000	0
351	Kab. Jeneponto	1.615.500	45.000	0	99.709.485	54.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
343	Kab. Morowali Utara	0	0	0	1.817.200
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	3.200.000	1.500.000	0
345	Kab. Bantaeng	0	0	0	1.966.840
346	Kab. Barru	500.000	0	0	1.813.239
347	Kab. Bone	500.000	0	0	7.551.985
348	Kab. Bulukumba	500.000	0	0	3.617.018
349	Kab. Enrekang	500.000	0	0	3.302.417
350	Kab. Gowa	400.000	600.000	0	5.969.350
351	Kab. Jeneponto	400.000	0	0	3.318.809

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
343	Kab. Morowali Utara	0	7.224.658	10.258.250	387.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	11.401.400	0	0	0
345	Kab. Bantaeng	0	3.989.596	12.511.006	0
346	Kab. Barru	0	5.689.951	7.246.268	206.596
347	Kab. Bone	0	14.076.313	28.225.297	0
348	Kab. Bulukumba	0	9.527.612	15.248.034	743.909
349	Kab. Enrekang	0	6.143.497	10.359.339	193.606
350	Kab. Gowa	0	14.436.307	21.913.790	673.745
351	Kab. Jeneponto	0	8.707.238	14.479.362	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
343	Kab. Morowali Utara	0	408.000	113.531.956
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	408.000	1.445.725.178
345	Kab. Bantaeng	0	408.000	132.702.201
346	Kab. Barru	0	408.000	122.407.992
347	Kab. Bone	0	408.000	410.362.480
348	Kab. Bulukumba	0	408.000	215.845.420
349	Kab. Enrekang	0	408.000	167.846.413
350	Kab. Gowa	0	0	310.798.389
351	Kab. Jeneponto	0	0	184.817.474

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
352	Kab. Luwu	53.022.030	1.015.000	2.632.500	4.029.440	82.500	357.500
353	Kab. Luwu Utara	41.227.990	842.500	1.878.500	3.735.680	82.500	260.000
354	Kab. Maros	60.809.740	842.500	39.000	5.307.600	82.500	0
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	49.665.500	1.047.500	2.691.000	5.665.800	82.500	1.170.000
356	Kota Palopo	25.642.600	307.500	0	1.797.000	82.500	0
357	Kab. Luwu Timur	47.930.220	615.000	84.500	4.197.410	82.500	0
358	Kab. Pinrang	51.244.900	1.027.000	728.000	4.244.400	82.500	97.500
359	Kab. Sinjai	31.822.320	737.500	78.000	5.771.400	82.500	65.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	20.500.800	547.500	1.332.500	2.502.450	82.500	585.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
352	Kab. Luwu	2.254.880	45.000	0	110.328.957	189.000	16.430.477
353	Kab. Luwu Utara	877.930	90.000	40.300	108.279.960	48.000	12.323.429
354	Kab. Maros	560.200	45.000	0	109.794.747	81.000	236.449
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.568.200	90.000	40.300	123.395.890	57.000	14.365.123
356	Kota Palopo	562.300	45.000	0	48.175.717	51.000	0
357	Kab. Luwu Timur	887.020	45.000	0	101.602.754	51.000	296.911
358	Kab. Pinrang	4.477.600	135.000	0	112.024.681	126.000	4.800.138
359	Kab. Sinjai	7.239.500	90.000	0	97.577.062	36.000	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	4.102.020	90.000	0	77.454.243	45.000	11.335.587

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
352	Kab. Luwu	398.545	0	0	3.281.990
353	Kab. Luwu Utara	398.545	0	0	3.034.606
354	Kab. Maros	400.000	600.000	0	3.178.342
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	500.000	0	0	3.715.538
356	Kota Palopo	398.545	0	0	1.869.875
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	3.045.558
358	Kab. Pinrang	400.000	0	0	4.226.730
359	Kab. Sinjai	498.545	0	0	2.153.475
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	600.000	0	1.239.430

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
352	Kab. Luwu	0	11.347.972	18.814.474	413.078
353	Kab. Luwu Utara	0	7.784.876	11.888.510	629.502
354	Kab. Maros	0	5.495.725	11.364.712	0
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	9.600.661	21.026.361	118.025
356	Kota Palopo	0	4.159.273	8.331.297	428.431
357	Kab. Luwu Timur	0	5.160.921	11.106 294	796.139
358	Kab. Pinrang	0	8.263.758	15.552.246	498.313
359	Kab. Sinjai	0	6.658.236	8.452 445	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	7.056.909	10.615 323	352.632

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
352	Kab. Luwu	0	0	224.643.343
353	Kab. Luwu Utara	0	408.000	193.830.828
354	Kab. Maros	0	408.000	199.245.515
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.961.584	408.000	240.168.982
356	Kota Palopo	0	507.000	92.358.038
357	Kab. Luwu Timur	0	0	175.901.227
358	Kab. Pinrang	0	0	207.918.766
359	Kab. Sinjai	0	408.000	161.669.983
360	Kab. Kepulauan Selayar	7.563.024	0	146.004.918

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
361	Kab. Sidenreng Rappang	39.215.200	909.500	0	5.912.400	82.500	0
362	Kab. Soppeng	24.296.160	812.000	0	2.621.400	82.500	0
363	Kab. Takalar	42.968.200	715.000	0	4.426.800	82.500	0
364	Kab. Tana Toraja	40.382.850	897.000	2.047.500	2.956.850	82.500	780.000
365	Kab. Wajo	44.391.120	1.157.500	0	6.136.200	82.500	0
366	Kota Pare-pare	21.824.600	330.000	0	1.719.600	82.500	0
367	Kota Makassar	182.257.400	2.448.500	0	11.026.200	82.500	0
368	Kab. Toraja Utara	43.148.980	730.000	481.000	1.935.990	82.500	65.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	219.255.310	5.179.250	491.400	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
361	Kab. Sidenreng Rappang	1.727.800	90.000	0	90.918.114	33.000	0
362	Kab. Soppeng	1.897.500	45.000	0	89.439.397	102.000	0
363	Kab. Takalar	6.857.200	180.000	0	76.978.106	36.000	0
364	Kab. Tana Toraja	2.337.110	90.000	0	99.578.765	78.000	13.536.030
365	Kab. Wajo	1.857.500	45.000	0	112.112.209	156.000	0
366	Kota Pare-pare	1.075.290	45.000	0	56.172.213	66.000	0
367	Kota Makassar	7.568.700	135.000	0	252.109.207	183.000	0
368	Kab. Toraja Utara	874.130	45.000	0	110.172.775	57.000	4.229.454
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	429.424.858	255.000	3.879.348

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	398.545	0	0	2.291.830
362	Kab. Soppeng	500.000	0	0	2.249.485
363	Kab. Takalar	498.545	0	0	2.181.646
364	Kab. Tana Toraja	398.545	0	0	2.952.419
365	Kab. Wajo	398.545	0	0	3.226.162
366	Kota Pare-pare	0	0	0	1.499.816
367	Kota Makassar	0	1.000.000	0	8.456.665
368	Kab. Toraja Utara	498.545	0	0	3.201.182
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	700.000	800.000	1.500.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	7.632.434	9.221.918	0
362	Kab. Soppeng	0	7.034.252	9.748.907	65.500
363	Kab. Takalar	0	5.651.157	20.868.314	0
364	Kab. Tana Toraja	0	7.337.358	13.530.166	381 139
365	Kab. Wajo	0	8.861.011	16.161.671	369 500
366	Kota Pare pare	0	1.680.589	5.136.919	0
367	Kota Makassar	0	12.318.905	22.545.815	437.107
368	Kab. Toraja Utara	0	8.590.019	18.665.932	121.598
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	6.265.695	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	158.433.241
362	Kab. Soppeng	0	408.000	139.302.101
363	Kab. Takalar	0	0	161.443.468
364	Kab. Tana Toraja	0	408.000	187.774.232
365	Kab. Wajo	0	408.000	195.362.918
366	Kota Pare-pare	0	507.000	90.139.527
367	Kota Makassar	0	507.000	501.075.999
368	Kab. Toraja Utara	0	408.000	193.307.105
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	408.000	668.158.861

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
370	Kab. Buton	21.097.130	502.500	123.500	2.450.240	82.500	65.000
371	Kab. Konawe	35.257.400	875.000	448.500	4.098.600	82.500	130.000
372	Kab. Kolaka	33.374.200	637.500	364.000	3.557.400	82.500	65.000
373	Kab. Muna	37.774.000	810.000	747.500	3.894.840	82.500	520.000
374	Kota Kendari	51.963.000	467.500	0	4.422.000	82.500	0
375	Kota Bau-bau	24.872.210	262.500	0	2.317.770	82.500	0
376	Kab. Konawe Selatan	44.801.200	1.035.000	773.500	3.566.400	82.500	162.500
377	Kab. Bombana	24.095.360	627.500	741.000	2.211.000	82.500	260.000
378	Kab. Wakatobi	17.305.200	445.000	0	2.548.480	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
370	Kab. Buton	1.326.440	90.000	0	73 131.508	27.000	587.936
371	Kab. Konawe	3.383.800	225.000	40.300	130 619.150	111.000	3.683.548
372	Kab. Kolaka	1.108.100	90.000	0	76.392.319	69.000	2.976.693
373	Kab. Muna	3.284.010	180.000	40.300	115.552.204	57.000	8.758.148
374	Kota Kendari	3.933.400	90.000	0	115.079.758	54.000	0
375	Kota Bau-bau	2.235.660	135.000	0	59.019.256	15.000	0
376	Kab. Konawe Selatan	2.666.800	180.000	80.600	116.313.964	138.000	4.275 314
377	Kab. Bombana	3.069.900	225.000	120.900	82.267.468	153.000	6.006 901
378	Kab. Wakatobi	2.544.380	90.000	0	61.988.550	45.000	628 914

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
370	Kab. Buton	398.545	0	0	1.620.553
371	Kab. Konawe	498.545	0	0	4.830.851
372	Kab. Kolaka	0	0	0	2.495.259
373	Kab. Muna	498.545	600.000	0	3.270.790
374	Kota Kendari	398.545	0	0	2.746.314
375	Kota Bau-bau	398.545	0	0	1.431.398
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	4.022.053
377	Kab. Bombana	0	0	0	2.985.299
378	Kab. Wakatobi	0	0	0	1.668.128

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(3)	(19)	(20)	(21)	(22)
370	Kab. Buton	0	7.046.326	10.693.239	392.098
371	Kab. Konawe	0	10.342.883	24.768.630	382.081
372	Kab. Kolaka	0	7.010.698	9.821.669	382.254
373	Kab. Muna	0	15.086.011	30.577.482	0
374	Kota Kendari	0	6.014.346	15.149.696	636.046
375	Kota Bau-bau	0	6.477.596	9.508.021	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	10.041.445	19.614.558	634.062
377	Kab. Bombana	0	7.566.724	15.813.330	570.929
378	Kab. Wakatobi	0	5.820.088	9.205.050	464.423

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
370	Kab. Buton	0	408.000	120.042.515
371	Kab. Konawe	0	0	219.777.788
372	Kab. Kolaka	0	0	138.426.592
373	Kab. Muna	0	0	221.733.330
374	Kota Kendari	0	408.000	201.445.105
375	Kota Bau-bau	0	507.000	107.262.456
376	Kab. Konawe Selatan	0	408.000	208.795.896
377	Kab. Bombana	0	408.000	147.204.811
378	Kab. Wakatobi	2.160.864	0	104.996.577

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
379	Kab. Kolaka Utara	17.831.960	570.000	416.000	2.077.800	82.500	357.500
380	Kab. Konawe Utara	13.690.360	387.500	253.500	1.664.690	82.500	65.000
381	Kab. Buton Utara	13.660.650	320.000	253.500	1.965.480	82.500	162.500
382	Kab. Konawe Kepulauan	6.910.570	182.500	0	1.118.880	82.500	0
383	Kab. Kolaka Timur	15.989.440	623.250	526.500	1.770.600	82.500	130.000
384	Kab. Muna Barat	15.332.010	387.500	838.500	1.587.200	82.500	325.000
385	Kab. Buton Tengah	19.553.700	365.000	208.000	2.000.880	82.500	97.500
386	Kab. Buton Selatan	17.390.820	320.000	208.000	2.253.240	82.500	325.000
387	Provinsi Bali	353.738.920	4.544.250	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
379	Kab. Kolaka Utara	2.544.500	135.000	0	50.322.437	60.000	2.707.281
380	Kab. Konawe Utara	2.969.320	135.000	40.300	49.278.991	90.000	2.089.839
381	Kab. Buton Utara	862 610	45.000	0	52.388.930	45.000	3.085.944
382	Kab. Konawe Kepulauan	1.028.820	90.000	0	23.005.333	48 000	0
383	Kab. Kolaka Timur	289.800	45.000	0	65.441.737	12.000	4.300 907
384	Kab. Muna Barat	337 420	45.000	80.600	48.955.259	42.000	5.377 781
385	Kab. Buton Tengah	1.711 370	90.000	40.300	49.249.495	24.000	3.225 325
386	Kab Buton Selatan	210 020	45.000	0	50.364.391	36 000	2.107 585
387	Provinsi Bali	0	0	0	297.283.625	66 000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
379	Kab. Kolaka Utara	500.000	0	0	1.671.460
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0	1.933.060
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	1.319.167
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	1.425.033
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	2.324.876
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	1.591.657
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	1.284.806
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0	1.051.889
387	Provinsi Bali	0	2.800.000	2.000.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
379	Kab. Kolaka Utara	0	8.518.842	14.544.016	650.164
380	Kab. Konawe Utara	0	5.745.059	18.862.705	0
381	Kab. Buton Utara	0	6.310.064	11.375.073	287.285
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	3.308.371	8.173.301	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	6.398.056	8.880.663	339.725
384	Kab. Muna Barat	0	6.409.136	14.379.171	0
385	Kab. Buton Tengah	0	5.823.466	10.934.540	306.325
386	Kab. Buton Selatan	0	7.203.889	9.559.282	177.429
387	Provinsi Bali	3.729.116	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
379	Kab. Kolaka Utara	0	408.000	103.397.460
380	Kab. Konawe Utara	0	507.000	97.794.824
381	Kab. Buton Utara	0	507.000	92.670.703
382	Kab. Konawe Kepulauan	1.440.576	0	46.813.884
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	107.155.054
384	Kab. Muna Barat	1.440.576	507.000	97.718.310
385	Kab. Buton Tengah	2.160.864	408.000	97.566.071
386	Kab. Buton Selatan	1.800.720	408.000	93.543.765
387	Provinsi Bali	0	408.000	664.569.911

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
388	Kab. Badung	101.673.730	1.200.000	0	9.985.640	82.500	0
389	Kab. Bangli	36.205.620	587.500	0	2.564.800	82.500	0
390	Kab. Buleleng	114.494.640	1.502.500	0	7.665.840	82.500	0
391	Kab. Gianyar	72.506.510	844.500	0	7.616.220	82.500	0
392	Kab. Jembrana	40.515.800	706.500	0	3.291.560	82.500	0
393	Kab. Karangasem	71.538.380	985.000	0	4.345.910	82.500	0
394	Kab. Klungkung	26.604.050	620.000	0	2.937.000	82.500	0
395	Kab. Tabanan	59.452.000	792.500	0	6.218.140	82.500	0
396	Kota Denpasar	122.550.000	1.274.000	0	10.235.360	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
388	Kab. Badung	1.816.290	45.000	0	144.715.030	69.000	0
389	Kab. Bangli	61.250	90.000	0	59.802.332	15.000	0
390	Kab. Buleleng	1.655.160	90.000	0	203.997.014	84.000	0
391	Kab. Gianyar	331.250	45.000	0	139.283.402	198.000	0
392	Kab. Jembrana	584.320	90.000	0	70.521.155	45.000	0
393	Kab. Karangasem	1.308.040	90.000	0	138.807.481	429.000	0
394	Kab. Klungkung	421.300	45.000	0	72.319.303	33.000	0
395	Kab. Tabanan	458.410	90.000	0	106.788.649	132.000	0
396	Kota Denpasar	2.430.580	90.000	0	113.549.658	51.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
388	Kab. Badung	260.100	600.000	0	3.441.681
389	Kab. Bangli	0	0	0	1.847.853
390	Kab. Buleleng	700.000	600.000	0	5.188.360
391	Kab. Gianyar	0	0	0	3.254.487
392	Kab. Jembrana	0	500.000	0	2.094.247
393	Kab. Karangasem	390.625	0	0	3.050.522
394	Kab. Klungkung	400.000	900.000	0	1.379.175
395	Kab. Tabanan	500.000	900.000	1.500.000	3.207.457
396	Kota Denpasar	0	0	0	4.375.226

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
388	Kab. Badung	0	4.782.183	5.719.137	289.078
389	Kab. Bangli	0	3.645.689	6.748.332	481.503
390	Kab. Buleleng	0	6.722.245	7.503.419	271.902
391	Kab. Gianyar	0	3.786.646	5.630.242	301.863
392	Kab. Jembrana	0	6.120.646	5.677.849	311.396
393	Kab. Karangasem	0	3.310.598	4.660.860	371.140
394	Kab. Klungkung	0	4.377.076	6 005.539	428.428
395	Kab. Tabanan	0	4.986.836	11 878 423	439.940
396	Kota Denpasar	0	5.190.955	7.759.683	298.927

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
388	Kab. Badung	0	0	274.679.369
389	Kab. Bangli	0	0	112.132.379
390	Kab. Buleleng	0	408.000	350.965.580
391	Kab. Gianyar	0	408.000	234.288.620
392	Kab. Jembrana	0	0	130.540.933
393	Kab. Karangasem	0	408.000	229.778.056
394	Kab. Klungkung	2.160.864	0	118.713.235
395	Kab. Tabanan	0	408.000	197.834.855
396	Kota Denpasar	0	408.000	268.295.889

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	344.167.820	5.972.000	352.800	0	0	0
398	Kab. Bima	67.031.680	1.435 000	1.057.000	15.345.000	82.500	700.000
399	Kab. Dompu	37.411.120	960 250	0	6.194.400	82.500	0
400	Kab. Lombok Barat	82.770.960	1.275.000	0	13.365.100	82.500	0
401	Kab. Lombok Tengah	120.417.840	2 295 750	0	25.374.600	82.500	0
402	Kab. Lombok Timur	181.000.660	2.878 250	0	30.944.640	82.500	0
403	Kab. Sumbawa	68.748 520	1 325 750	1.260.000	12.099 960	82.500	560.000
404	Kota Mataram	63.598.950	1 028 500	0	5.011 020	82 500	0
405	Kota Bima	22.833.150	307 500	0	3.836 420	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	420.588.261	117.000	2.159.491
398	Kab. Bima	2.265.320	180.000	0	187.243.358	138.000	6.217.400
399	Kab. Dompu	5.498.300	225.000	0	107.376.206	159.000	0
400	Kab. Lombok Barat	4.606.910	225.000	0	147.667.709	105.000	0
401	Kab. Lombok Tengah	5.911.300	180.000	0	253.664.569	315.000	0
402	Kab. Lombok Timur	5.533.390	225.000	0	276.264.414	264.000	0
403	Kab. Sumbawa	3.368.380	180.000	86.800	186.668.047	147.000	8.308.982
404	Kota Mataram	1.055.970	45.000	0	96.166.073	39.000	0
405	Kota Bima	2.992.700	90.000	0	64.599.615	183.750	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	500.000	1.500.000	2.000.000	0
398	Kab. Bima	498.545	0	0	4.059.000
399	Kab. Dompu	398.545	0	0	2.177.724
400	Kab. Lombok Barat	600.000	0	0	5.230.990
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	6.825.893
402	Kab. Lombok Timur	0	0	0	9.922.412
403	Kab. Sumbawa	0	0	0	4.336.693
404	Kota Mataram	0	0	0	3.303.481
405	Kota Bima	0	0	0	1.452.650

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.757.497	0	0	0
398	Kab. Bima	0	10.998.819	21.498.823	524.571
399	Kab. Dompu	0	7.606.852	12.118.205	465.073
400	Kab. Lombok Barat	0	33.099.309	17.892.160	755.574
401	Kab. Lombok Tengah	0	14.248.330	22.673.467	356.098
402	Kab. Lombok Timur	0	18.400 560	33.914.796	440.797
403	Kab. Sumbawa	0	11.089.368	16.197.813	210.062
404	Kota Mataram	0	3 964.110	4.618.502	209.725
405	Kota Bima	0	5 735.397	5.396.988	596.486

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	408.000	784.522.869
398	Kab. Bima	12.605.040	408.000	332.288.056
399	Kab. Dompu	6.482.592	507.000	187.662.767
400	Kab. Lombok Barat	0	408.000	308.084.212
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	452.345.347
402	Kab. Lombok Timur	0	408.000	560.279.419
403	Kab. Sumbawa	24.129.648	0	338.799.523
404	Kota Mataram	0	408.000	179.530.831
405	Kota Bima	6.842.736	408.000	115.357.892

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
406	Kab. Sumbawa Barat	22.191.260	648.000	0	3.652.070	82.500	0
407	Kab. Lombok Utara	33.085.420	557.500	0	4.516.200	82.500	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	476.866.890	7.336.750	3.586.800	0	0	0
409	Kab. Alor	42.411.120	1.107.500	3.472.000	2.956.850	82.500	910.000
410	Kab. Belu	33.517.600	823.000	350.000	3.251.400	82.500	350.000
411	Kab. Ende	42.047.920	1.108.250	1.659.000	2.016.000	82.500	560.000
412	Kab. Flores Timur	38.759.640	875.000	476.000	4.151.660	82.500	245.000
413	Kab. Kupang	56.635.620	1.405.000	3.465.000	4.743.600	82.500	1.610.000
414	Kab. Lembata	20.720.860	643.250	826.000	1.366.800	82.500	175.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
406	Kab. Sumbawa Barat	407.640	45.000	0	66.886.921	30.000	0
407	Kab. Lombok Utara	1.400.100	90.000	0	70.065.214	144.000	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	560.999.117	772.750	15.229.899
409	Kab. Alor	1.906.780	135.000	86.800	80.040.206	201.000	19.036.676
410	Kab. Belu	1.399.500	90.000	0	64.712.812	42.250	1.985.794
411	Kab. Ende	372.600	90.000	0	97.220.717	54.000	6.689.094
412	Kab. Flores Timur	985.770	45.000	0	97.871.805	87.000	2.820.814
413	Kab. Kupang	1.267.600	90.000	43.400	131.398.350	288.000	13.862.803
414	Kab. Lembata	401.200	45.000	0	55.330.394	24.000	5.094.730

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	1.234.512
407	Kab. Lombok Utara	0	0	0	2.313.440
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	1.000.000	1.500.000	0
409	Kab. Alor	398.545	600.000	0	2.365.810
410	Kab. Belu	398.545	0	0	2.182.305
411	Kab. Ende	0	0	0	3.204.539
412	Kab. Flores Timur	398.545	0	0	3.004.213
413	Kab. Kupang	0	0	0	3.456.567
414	Kab. Lembata	600.000	0	0	2.377.928

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
406	Kab. Sumbawa Barat	0	6.845.605	5.894.082	162.625
407	Kab. Lombok Utara	0	6 088 652	6.692.120	254.156
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	7 111.811	0	0	0
409	Kab. Alor	0	7 761 297	20.884.862	468.769
410	Kab. Belu	0	8.286 621	14.414.186	409.580
411	Kab. Ende	0	10 058 767	18.379.052	346.464
412	Kab. Flores Timur	0	8 671 484	19.172.171	670.992
413	Kab. Kupang	0	11 126 312	25.880 210	200 337
414	Kab. Lembata	0	7.057 572	11.938.654	272.256

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
406	Kab. Sumbawa Barat	5.762.304	0	113.842.519
407	Kab. Lombok Utara	7.923.168	507.000	133.719.470
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	408.000	1.074.812.017
409	Kab. Alor	1.440.576	0	186.266.291
410	Kab. Belu	5.402.160	0	137.698.253
411	Kab. Ende	3.601.440	0	187.490.343
412	Kab. Flores Timur	3.961.584	0	182.279.178
413	Kab. Kupang	3.241.296	0	258.796.595
414	Kab. Lembata	720.288	0	107.676.432

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
415	Kab. Manggarai	66.685.850	972.500	1.351.000	5.925.030	82.500	630.000
416	Kab. Ngada	25.362.700	797.000	525.000	1.656.000	82.500	175.000
417	Kab. Sikka	48.519.300	1.187.500	3.813.000	4.067.400	82.500	1.925.000
418	Kab. Sumba Barat	24.262.530	365.000	217.000	2.947.480	82.500	140.000
419	Kab. Sumba Timur	44.596.700	887.500	1.288.000	4.015.200	82.500	490.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	78.849.600	1.902.500	4.606.000	4.914.000	82.500	1.855.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	45.949.300	980.000	1.477.000	3.503.400	82.500	490.000
422	Kota Kupang	59.094.490	1.075.500	0	4.115.670	82.500	0
423	Kab. Rote Ndao	26.356.340	732.750	1.953.000	2.118.000	82.500	700.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
415	Kab. Manggarai	2.259.260	90.000	43.400	114.758.201	210.000	7.537.549
416	Kab. Ngada	744.700	90.000	0	75.334.888	75.000	3.391.849
417	Kab. Sikka	841.800	90.000	0	106.122.699	66.000	18.908.402
418	Kab. Sumba Barat	152.310	45.000	0	49.375.999	27.000	1.456.659
419	Kab. Sumba Timur	697.800	45.000	0	106.259.096	255.000	6.350.518
420	Kab. Timor Tengah Selatan	1.323.700	135.000	86.800	180.415.650	438.000	20.353.913
421	Kab. Timor Tengah Utara	227.700	90.000	0	104.079.452	147.000	7.797.048
422	Kota Kupang	1.809.460	90.000	0	104.661.146	78.000	0
423	Kab. Rote Ndao	2.282.000	45.000	43.400	76.817.543	68.500	15.757.710

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
415	Kab. Manggarai	398.545	0	0	2.990.260
416	Kab. Ngada	0	0	0	1.795.466
417	Kab. Sikka	0	0	0	2.755.555
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	1.610.351
419	Kab. Sumba Timur	0	400.000	0	2.863.550
420	Kab. Timor Tengah Selatan	498.545	0	0	4.177.710
421	Kab. Timor Tengah Utara	498.545	0	0	2.929.965
422	Kota Kupang	398.545	0	0	3.572.565
423	Kab. Rote Ndao	398.545	0	0	1.919.416

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
415	Kab. Manggarai	0	12.682.004	13.792.436	353.587
416	Kab. Ngada	0	7.318.410	16.930.898	310.038
417	Kab. Sikka	0	13.529.251	22.500.621	544.249
418	Kab. Sumba Barat	0	5.639.261	9.323.758	0
419	Kab. Sumba Timur	0	8.743.580	17.215.529	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	13.270.870	28.281.420	262.223
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	10.117.905	22.175.847	0
422	Kota Kupang	0	7.632.320	12.250.235	271.686
423	Kab. Rote Ndao	0	7.488.865	8.434.854	381.776

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
415	Kab. Manggarai	6.482.592	408.000	237.652.714
416	Kab. Ngada	3.241.296	408.000	138.238.745
417	Kab. Sikka	9.363.744	408.000	232.727.021
418	Kab. Sumba Barat	7.563.024	408.000	103.615.872
419	Kab. Sumba Timur	6.482.592	0	200.672.565
420	Kab. Timor Tengah Selatan	2.881.152	408.000	344.742.583
421	Kab. Timor Tengah Utara	5.042.016	0	205.587.678
422	Kota Kupang	0	507.000	195.639.117
423	Kab. Rote Ndao	2.881.152	0	148.461.351

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
424	Kab. Manggarai Barat	46.320.510	1.039.000	2.625.000	4.005.760	82.500	1.050.000
425	Kab. Nagekeo	24.756.980	665.750	483.000	1.980.600	82.500	315.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	70.000.350	1.120.000	2.849.000	5.159.680	82.500	1.295.000
427	Kab. Sumba Tengah	13.744.850	365.000	1.001.000	2.043.500	82.500	875.000
428	Kab. Manggarai Timur	52.254.550	1.340.750	3.955.000	3.019.400	82.500	945.000
429	Kab. Sabu Raijua	21.217.140	285.000	553.000	2.555.960	82.500	805.000
430	Kab. Malaka	33.087.120	752.500	2.142.000	3.333.600	82.500	1.120.000
431	Provinsi Maluku	175.239.860	4.684.500	2.812.600	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	26.174.160	515.000	1.603.000	1.288.200	82.500	245.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
424	Kab. Manggarai Barat	1.057.820	45.000	86.800	102.055.833	162.000	11.150.685
425	Kab. Nagekeo	687 000	90.000	0	73.861.245	36.000	2.739 623
426	Kab. Sumba Barat Daya	981 050	45.000	86.800	89.803.096	105 750	16.111 270
427	Kab. Sumba Tengah	213 690	45.000	0	45.646.955	57 000	8.729 870
428	Kab. Manggarai Timur	287.570	45.000	0	90.952.371	174.000	24.656 960
429	Kab. Sabu Raijua	121 170	45.000	0	37.808.892	30.000	5.714.714
430	Kab. Malaka	911.800	90.000	130.200	56.237.121	99.000	11.093.084
431	Provinsi Maluku	0	0	0	256.951.471	135.000	16.841.171
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.186.450	90.000	130.200	48.648.942	53.500	7 509.193

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	2.309.733
425	Kab. Nagekeo	498.545	0	0	1.499.235
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	3.615.405
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	882.330
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	2.954.050
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	1.068.640
430	Kab. Malaka	0	0	0	1.827.459
431	Provinsi Maluku	500.000	1.000.000	2.500.000	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	1.152.402

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
424	Kab. Manggarai Barat	0	5.497.727	23.192.390	542.941
425	Kab. Nagekeo	0	5.580.410	7.666.365	449.067
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	7.146.342	14.545.546	381.122
427	Kab. Sumba Tengah	0	7.313.037	9.782.617	224.945
428	Kab. Manggarai Timur	0	12.208.699	27.012.775	429.070
429	Kab. Sabu Raijua	0	4.092.965	8.352.079	240.077
430	Kab. Malaka	0	7.699.300	23.921.504	243.742
431	Provinsi Maluku	4.535.146	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	11.936.519	14.434.625	310.134

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	201.243.699
425	Kab. Nagekeo	3.241.296	0	124.632.616
426	Kab. Sumba Barat Daya	1.080.432	0	214.408.343
427	Kab. Sumba Tengah	2.521.008	0	93.528.302
428	Kab. Manggarai Timur	1.440.576	0	221.758.271
429	Kab. Sabu Raijua	1.440.576	507.000	84.919.713
430	Kab. Malaka	2.521.008	0	145.291.938
431	Provinsi Maluku	0	408.000	465.607.748
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	3.601.440	0	121.961.265

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
433	Kab. Maluku Tengah	64.520.400	1.512.000	1.540.000	4.760.680	82.500	490.000
434	Kab. Maluku Tenggara	22.574.260	766.250	2.212.000	2.445.000	82.500	840.000
435	Kab Buru	32.494.180	547.500	2.268.000	3.682.560	82.500	665.000
436	Kota Ambon	50.311.550	1.198.250	0	3.576.120	82.500	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	38.297.610	822.500	2.562.000	4.564.700	82.500	1.295.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	23.563.700	620.750	5.390.000	2.711.800	82.500	1.785.000
439	Kab. Kepulauan Aru	27.652.620	557.500	7.602.000	1.657.810	82.500	2.170.000
440	Kota Tual	13.685.320	290.750	399.000	1.634.760	82.500	175.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	26.097.340	620.750	3.325.000	1.771.180	82.500	1.225.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	*(2)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
433	Kab. Maluku Tengah	585.180	90.000	0	172.968.118	363.000	5 374 980
434	Kab. Maluku Tenggara	631.030	45.000	130.200	41 451.947	66.000	10 120 490
435	Kab. Buru	370.120	90.000	43.400	65.619 471	48.000	11.559 887
436	Kota Ambon	2.223 760	90.000	0	109.469.819	78.000	0
437	Kab. Seram Bagian Barat	178 100	45.000	0	71.313.670	36.000	15.234.179
438	Kab. Seram Bagian Timur	56 430	90.000	0	54.280.882	315.000	36.317.172
439	Kab. Kepulauan Aru	116.660	45.000	0	46.624.772	57.000	30.604.155
440	Kota Tual	132.830	90.000	0	30.691.411	123.000	3.565.865
441	Kab. Maluku Barat Daya	111.440	45.000	0	47.757.754	81.000	14.103.783

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
433	Kab. Maluku Tengah	500.000	0	0	3.188.493
434	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	2.193.301
435	Kab. Buru	398.545	0	0	1.798.127
436	Kota Ambon	0	0	0	2.120.440
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	0	0	1.358.472
438	Kab. Seram Bagian Timur	398.545	0	0	2.158.786
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	1.375.530
440	Kota Tual	0	0	0	626.494
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	1.295.853

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
433	Kab. Maluku Tengah	0	13.134.906	35.565.988	989.718
434	Kab. Maluku Tenggara	0	8.744.868	20.968.213	399.247
435	Kab. Buru	0	6.363.053	12.849.567	294.521
436	Kota Ambon	0	9.211.478	13.105.718	386.088
437	Kab. Seram Bagian Barat	0	10.256.718	21.972.549	0
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	8.689.854	28.262.615	464.782
439	Kab. Kepulauan Aru	0	10.199.650	20.378.867	631.334
440	Kota Tual	0	6.974.339	10.562.446	211.038
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	8.402.938	12.168.397	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
433	Kab. Maluku Tengah	11.524.608	0	317.190.571
434	Kab. Maluku Tenggara	5.042.016	0	118.712.322
435	Kab. Buru	4.681.872	0	143.856.303
436	Kota Ambon	0	408.000	192.261.723
437	Kab. Seram Bagian Barat	4.321.728	0	172.340.726
438	Kab. Seram Bagian Timur	4.321.728	0	169.509.544
439	Kab. Kepulauan Aru	4.321.728	0	154.077.126
440	Kota Tual	5.762.304	0	75.007.057
441	Kab. Maluku Barat Daya	720.288	0	117.808.223

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
442	Kab. Buru Selatan	19.750.650	422.500	3.451.000	2.816.350	82.500	2.135.000
443	Provinsi Papua	5.930.420	393.500	63.000	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	52.694.260	865.250	3.705.000	2.084.020	82.500	450.000
445	Kab. Jayapura	52.320.380	1.178.500	1.218.000	2.908.940	82.500	112.500
446	Kab. Kepulauan Yapen	43.353.530	654.500	4.212.000	1.656.000	82.500	750.000
447	Kota Jayapura	75.668.510	1.993.250	0	2.641.140	82.500	0
448	Kab. Sarmi	18.606.630	352.500	1.413.000	885.660	82.500	225.000
449	Kab. Keerom	22.314.180	441.500	2.143.500	1.367.650	82.500	525.000
450	Kab. Waropen	16.104.490	432.750	1.929.000	708.640	82.500	450.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
442	Kab. Buru Selatan	1.022.940	45.000	86.800	46.030.722	117.000	20.952.837
443	Provinsi Papua	0	0	0	4.273.396	0	0
444	Kab. Biak Numfor	1.067.120	135.000	139.500	63.568.779	215.250	13.833.270
445	Kab. Jayapura	3.066.370	90.000	0	65.012.587	66.000	2.657.420
446	Kab. Kepulauan Yapen	451.620	90.000	46.500	38.166.134	30.000	13.606.523
447	Kota Jayapura	2.231.340	90.000	0	89.780.233	145.000	0
448	Kab. Sarmi	604.030	45.000	46.500	18.602.403	6.000	3.971.435
449	Kab. Keerom	915.910	90.000	279.000	34.581.382	27.000	13.270.718
450	Kab. Waropen	85.980	45.000	46.500	14.996.603	9.000	5.104.099

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
442	Kab. Buru Selatan	0	0	0	894.347
443	Provinsi Papua	0	0	1.500.000	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0	2.543.320
445	Kab. Jayapura	0	0	0	1.555.250
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	1.700.293
447	Kota Jayapura	398.545	0	0	2.457.289
448	Kab. Sarmi	0	0	0	1.070.465
449	Kab. Keerom	0	0	0	985.843
450	Kab. Waropen	0	0	0	1.003.380

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
442	Kab. Buru Selatan	0	4.108.985	11.529.628	250.597
443	Provinsi Papua	4.130.945	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	5.872.839	18.749.136	352.863
445	Kab. Jayapura	0	15.401.734	27.127.642	212.862
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	9.389.369	19.013.182	866.351
447	Kota Jayapura	0	13.968.449	13.834.753	778.041
448	Kab. Sarmi	0	6.965.286	13.992.775	0
449	Kab. Keerom	0	6.674.458	8.590.000	254.148
450	Kab. Waropen	0	5.989.764	12.510.238	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
442	Kab. Buru Selatan	2.881.152	0	116.578.008
443	Provinsi Papua	0	408.000	16.699.261
444	Kab. Biak Numfor	5.762.304	408.000	172.528.411
445	Kab. Jayapura	9.723.888	0	182.734.573
446	Kab. Kepulauan Yapen	3.961.584	0	138.030.086
447	Kota Jayapura	0	408.000	204.447.050
448	Kab. Sarmi	2.160.864	0	69.030.048
449	Kab. Keerom	2.160.864	507.000	95.210.653
450	Kab. Waropen	360.144	0	59.858.088

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
451	Kab. Supiori	11.997.330	322.500	1.011.000	314.760	82.500	262.500
452	Kab. Mamberamo Raya	20.168.330	375.000	3.363.000	516.200	82.500	300.000
453	Provinsi Maluku Utara	129.233.670	3.348.500	3.273.200	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	15.295.620	262.500	714.000	1.384.500	82.500	280.000
455	Kota Ternate	32.232.480	964.250	0	1.860.480	82.500	0
456	Kab. Halmahera Barat	23.207.380	650.000	2.723.000	1.563.420	82.500	980.000
457	Kab. Halmahera Timur	17.000.730	422.500	1.862.000	1.656.430	82.500	455.000
458	Kab. Halmahera Selatan	46.457.040	1.130.000	8.085.000	4.738.920	82.500	3.430.000
459	Kab. Halmahera Utara	33.035.010	775.000	2.128.000	3.804.260	82.500	770.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
451	Kab. Supiori	187.520	90.000	0	15.681.817	36.000	5.015.021
452	Kab. Mamberamo Raya	488.550	45.000	46.500	6.459.769	6.000	4.278.611
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	173.867.924	117.000	14.180.666
454	Kab. Halmahera Tengah	417.470	90.000	0	38.477.609	114.000	5.768.493
455	Kota Ternate	537.960	90.000	0	65.911.976	24.000	0
456	Kab. Halmahera Barat	598.630	45.000	86 800	68.446.056	30 000	17.213.440
457	Kab. Halmahera Timur	572.780	45.000	86 800	47.068.428	60 000	9.936.205
458	Kab. Halmahera Selatan	5.461.370	180.000	520 800	94.313.623	126.000	27.838.542
459	Kab. Halmahera Utara	5.856.540	225.000	43 400	63.198.769	93.000	9.644.345

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
451	Kab. Supiori	0	0	0	561.816
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	628.213
453	Provinsi Maluku Utara	398.545	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	1.032.960
455	Kota Ternate	500 000	0	0	1.598.574
456	Kab. Halmahera Barat	398 545	0	0	2.113.390
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	1.352.957
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0	3.000.000
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	2.392.480

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V 13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
451	Kab. Supiori	0	4.465.163	8.674.106	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	7.663.183	11.996.957	0
453	Provinsi Maluku Utara	3.226.342	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	3.849.624	37.851.026	0
455	Kota Ternate	0	6.498.083	10.152.251	152.574
456	Kab. Halmahera Barat	0	5.523.624	15.223.380	574.291
457	Kab. Halmahera Timur	0	7.374.259	13.099.723	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	10.514.374	33.538.994	586.470
459	Kab. Halmahera Utara	0	6.578.504	13.293.489	161.136

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
451	Kab. Supiori	3.961.584	0	52.663.617
452	Kab. Mamberamo Raya	360.144	0	56.777.957
453	Provinsi Maluku Utara	0	507.000	328.152.847
454	Kab. Halmahera Tengah	1.800.720	408.000	107.829.022
455	Kota Ternate	0	507.000	121.112.128
456	Kab. Halmahera Barat	5.762.304	507.000	145.728.760
457	Kab. Halmahera Timur	1.080.432	507.000	102.662.744
458	Kab. Halmahera Selatan	5.762.304	408.000	246.173.937
459	Kab. Halmahera Utara	9.723.888	408.000	152.213.321

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
460	Kab. Kepulauan Sula	19.005.920	655.250	1.827.000	2.515.360	82.500	1.120.000
461	Kota Tidore Kepulauan	17.640.280	438.250	42.000	2.368.080	82.500	70.000
462	Kab. Pulau Morotai	11.455.000	285.000	308.000	2.155.300	82.500	280.000
463	Kab. Pulau Taliabu	16.877.820	377.500	3.591.000	3.259.540	82.500	2.415.000
464	Provinsi Banten	787.285.320	8.607.250	168.000	0	0	0
465	Kab. Lebak	181.733.600	2.727.500	1.335.000	18.357.000	82.500	825.000
466	Kab. Pandeglang	167.490.900	2.697.000	895.000	14.745.000	82.500	300.000
467	Kab. Serang	216.552.700	2.422.500	0	24.808.800	82.500	0
468	Kab. Tangerang	451.136.390	3.992.500	0	30.118.140	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
460	Kab. Kepulauan Sula	240.840	90.000	43.400	37.356.026	111.000	9.800.030
461	Kota Tidore Kepulauan	731.760	90.000	0	57.697.647	48.000	244.278
462	Kab. Pulau Morotai	112.360	45.000	0	25.823.462	27.000	2.852.922
463	Kab. Pulau Taliabu	2.112.140	90.000	130.200	48.716.797	90.000	18.397.231
464	Provinsi Banten	0	0	0	458.236.407	738.000	558.817
465	Kab. Lebak	7.203.600	180.000	31.000	295.943.729	201.000	11.608.812
466	Kab. Pandeglang	11.019.900	270.000	0	297.748.938	231.000	8.881.448
467	Kab. Serang	15.256.000	405.000	0	235.951.807	414.000	0
468	Kab. Tangerang	16.815.880	405.000	0	336.476.806	199.500	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	1.016.090
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	1.311.355
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	1.066.984
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	1.081.410
464	Provinsi Banten	400.000	0	0	0
465	Kab. Lebak	500.000	600.000	0	11.236.206
466	Kab. Pandeglang	498.545	0	0	11.446.241
467	Kab. Serang	0	0	0	12.425.540
468	Kab. Tangerang	300.000	0	0	19.547.243

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
460	Kab. Kepulauan Sula	0	5.328.296	11.248.929	0
461	Kota Tidore Kepulauan	0	5.875.054	5.841.968	0
462	Kab. Pulau Morotai	0	7.979.920	9.548.494	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	6.228.699	7.538.485	0
464	Provinsi Banten	4.842.175	0	0	0
465	Kab. Lebak	0	15.397.608	25.639.163	679.098
466	Kab. Pandeglang	0	18.728.109	26.758.972	363.135
467	Kab. Serang	0	13.073.657	22.772.134	344.968
468	Kab. Tangerang	0	25.061.255	36.296.483	825.179

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
460	Kab. Kepulauan Sula	2.881.152	0	93.321.793
461	Kota Tidore Kepulauan	10.444.176	507.000	103.432.348
462	Kab. Pulau Morotai	1.800.720	408.000	64.230.662
463	Kab. Pulau Taliabu	1.800.720	0	112.789.042
464	Provinsi Banten	0	354.000	1.261.189.969
465	Kab. Lebak	0	408.000	574.688.816
466	Kab. Pandeglang	0	408.000	562.564.688
467	Kab. Serang	0	408.000	544.917.606
468	Kab. Tangerang	0	0	921.256.876

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
469	Kota Cilegon	63.343.120	1.047.500	0	7.110.770	82.500	0
470	Kota Tangerang	219.907.650	2.231.000	0	13.571.840	82.500	0
471	Kota Serang	104.490.800	974.500	0	8.417.400	82.500	0
472	Kota Tangerang Selatan	184.751.560	1.449.500	0	14.702.160	82.500	0
473	Provinsi Bangka Belitung	96.941.590	2.520.750	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	45.795.900	737.500	0	3.415.800	82.500	0
475	Kab. Belitung	26.185.680	557.500	0	1.962.920	82.500	0
476	Kota Pangkal Pinang	34.965.260	380.000	0	2.552.240	82.500	0
477	Kab. Bangka Selatan	31.272.520	525.000	0	2.220.400	82.500	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
469	Kota Cilegon	2.379.540	90.000	0	93.854.626	123.000	0
470	Kota Tangerang	5.281.580	180.000	0	296.676.418	975.000	0
471	Kota Serang	8.739.900	180.000	0	128.668.904	162.000	0
472	Kota Tangerang Selatan	11.179.710	315.000	0	158.969.799	77.250	0
473	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0	104.709.758	33.000	0
474	Kab. Bangka	1.102.100	45.000	0	70.464.614	42.000	0
475	Kab. Belitung	1.284.570	45.000	0	52.975.452	42.000	0
476	Kota Pangkal Pinang	2.801.370	45.000	0	42.228.897	57.000	0
477	Kab. Bangka Selatan	1.033.370	45.000	0	62.854.274	42.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
469	Kota Cilegon	400.000	0	0	2.808.866
470	Kota Tangerang	0	0	0	6.023.046
471	Kota Serang	398.545	0	0	4.890.848
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	8.071.019
473	Provinsi Bangka Belitung	500.000	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	2.212.656
475	Kab. Belitung	0	0	0	1.215.325
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	1.443.545
477	Kab. Bangka Selatan	400.000	0	0	1.386.166

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
469	Kota Cilegon	0	4.740.706	5.928.155	648.430
470	Kota Tangerang	0	14.225.485	18.519.191	0
471	Kota Serang	0	7.826.237	15.772.324	417.263
472	Kota Tangerang Selatan	0	14.834.877	17.011.422	336.384
473	Provinsi Bangka Belitung	2.646.530	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	4.848.841	7.279.647	201.789
475	Kab. Belitung	0	5.553.742	5.554.601	338.102
476	Kota Pangkal Pinang	0	3.726.426	6.589.290	282.877
477	Kab. Bangka Selatan	0	5.300.728	4.586.036	140.168

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
469	Kota Cilegon	0	507.000	183.064.213
470	Kota Tangerang	0	408.000	578.081.710
471	Kota Serang	0	408.000	281.429.221
472	Kota Tangerang Selatan	0	408.000	412.189.181
473	Provinsi Bangka Belitung	0	408.000	207.759.628
474	Kab. Bangka	0	0	136.228.347
475	Kab. Belitung	0	408.000	96.205.392
476	Kota Pangkal Pinang	0	507.000	95.661.405
477	Kab. Bangka Selatan	3.961.584	408.000	114.257.746

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
478	Kab. Bangka Tengah	28.591.200	402.500	0	2.922.600	82.500	0
479	Kab. Bangka Barat	31.221.270	629.000	0	3.616.460	82.500	0
480	Kab. Belitung Timur	18 139.140	352.500	0	2.063.360	82.500	0
481	Provinsi Gorontalo	73 840.130	2.175.250	54.600	0	0	0
482	Kab. Boalemo	18 448.010	525.000	539.500	3.604.490	82.500	422.500
483	Kab. Gorontalo	48.214.920	1.194.500	84.500	6.875.400	82.500	32.500
484	Kota Gorontalo	23.440.700	522.000	0	2.844.000	82.500	0
485	Kab. Pohuwato	20 275.500	467.500	0	3 922.200	82 500	0
486	Kab. Bone Bolango	20 188.060	637.000	0	4.561.200	82.500	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
478	Kab. Bangka Tengah	1.691.800	90.000	0	60.588.734	18.000	0
479	Kab. Bangka Barat	970.110	45.000	0	55.992.718	66.000	0
480	Kab. Belitung Timur	580.240	90.000	0	49.968.873	33.000	0
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	132.005.975	36.000	495.643
482	Kab. Boalemo	505.620	90.000	0	64.635.002	51.000	3.927.969
483	Kab. Gorontalo	5.524.800	180.000	0	107.196.952	147.000	440.174
484	Kota Gorontalo	1.809.400	45.000	0	57.034.823	75.000	0
485	Kab. Pohuwato	1.122.900	45.000	0	67.704.771	75.000	0
486	Kab. Bone Bolango	1.011.200	90.000	0	65.917.476	114.000	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	1.416.232
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	1.371.215
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	957.756
481	Provinsi Gorontalo	600.000	1.000.000	0	0
482	Kab. Boalemo	300.000	0	0	1.441.429
483	Kab. Gorontalo	600.000	0	0	4.528.210
484	Kota Gorontalo	400.000	0	0	2.140.565
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	1.569.951
486	Kab. Bone Bolango	500.000	0	0	2.692.363

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
478	Kab. Bangka Tengah	0	5.808.914	4.705.422	447.551
479	Kab. Bangka Barat	0	5.132.142	5.267.722	192.472
480	Kab. Belitung Timur	0	5.153.887	4.300.188	0
481	Provinsi Gorontalo	3.533.305	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	7.389.464	8.318.822	201.838
483	Kab. Gorontalo	0	12.543.247	16.428.452	842.715
484	Kota Gorontalo	0	4.882.453	5.072.476	451.006
485	Kab. Pohuwato	0	7.278.733	11.772.841	344.061
486	Kab. Bone Bolango	0	8.237.327	10.456.046	289.547

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
478	Kab. Bangka Tengah	9.003.600	0	115.769.053
479	Kab. Bangka Barat	6.842.736	408.000	111.837.345
480	Kab. Belitung Timur	8.283.312	507.000	90.511.756
481	Provinsi Gorontalo	0	408.000	214.148.903
482	Kab. Boalemo	0	0	110.483.144
483	Kab. Gorontalo	0	408.000	205.323.870
484	Kota Gorontalo	0	0	98.799.923
485	Kab. Pohuwato	0	507.000	115.167.957
486	Kab. Bone Bolango	0	408.000	115.184.719

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
487	Kab. Gorontalo Utara	17.018.900	490.000	279.500	2.591.400	82.500	130.000
488	Provinsi Kepulauan Riau	207.299.630	3.090.250	126.000	0	0	0
489	Kab. Natuna	15.228.080	307.500	60.000	2.132.520	82.500	50.000
490	Kab. Kepulauan Anambas	11.332.460	262.500	655.000	1.424.890	82.500	225.000
491	Kab. Karimun	45.474.090	647.500	485.000	3.370.700	82.500	100.000
492	Kota Batam	235.280.460	1.619.500	315.000	10.226.060	82.500	50.000
493	Kota Tanjung Pinang	38.599.260	740.000	0	2.081.250	82.500	0
494	Kab. Lingga	19.122.020	542.000	1.065.000	1.811.080	82.500	275.000
495	Kab. Bintan	29.949.920	452.000	220.000	2.780.570	82.500	200.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
487	Kab. Gorontalo Utara	1.052.900	90.000	0	68.121.270	120.000	2.285.367
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	148.075.256	48.000	1.405.225
489	Kab. Natuna	356.850	0	0	42.121.790	54.000	1.668.004
490	Kab. Kepulauan Anambas	303.340	45.000	31.000	33.395.691	18.000	6.037.018
491	Kab. Karimun	1.177.060	90.000	0	83.000.236	24.000	6.304.828
492	Kota Batam	7.933.140	225.000	0	163.797.979	81.000	0
493	Kota Tanjung Pinang	476.530	90.000	0	46.343.192	39.000	0
494	Kab. Lingga	310.130	90.000	0	54 055.682	24.000	10.786.973
495	Kab. Bintan	957.430	90.000	31 000	54 979.786	30.000	2.704.190

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
487	Kab. Gorontalo Utara	600.000	0	0	2.200.870
488	Provinsi Kepulauan Riau	600.000	0	0	0
489	Kab. Natuna	398.545	0	0	1.190.592
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	858.880
491	Kab. Karimun	0	0	0	1.886.475
492	Kota Batam	0	600.000	0	5.123.523
493	Kota Tanjung Pinang	600.000	700.000	0	957.530
494	Kab. Lingga	0	600.000	0	1.094.245
495	Kab. Bintan	398.545	600.000	0	1.355.946

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
487	Kab. Gorontalo Utara	0	7.569.595	10.788.972	216.165
488	Provinsi Kepulauan Riau	4.210.510	0	0	0
489	Kab. Natuna	0	7.624.840	5.945.358	179.338
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	6.241.058	4.867.193	0
491	Kab. Karimun	0	3.664.896	7.593.710	720.327
492	Kota Batam	0	11.609.414	13.270.795	415.207
493	Kota Tanjung Pinang	0	3.785.507	5.536.147	176.016
494	Kab. Lingga	0	5.876.817	5.334.022	383.835
495	Kab. Bintan	0	4.432.626	5.831.233	388.452

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
487	Kab. Gorontalo Utara	3.241.296	0	116.878.735
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	408.000	365.262.871
489	Kab. Natuna	3.241.296	507.000	81.148.213
490	Kab. Kepulauan Anambas	5.762.304	0	71.541.834
491	Kab. Karimun	0	408.000	155.029.322
492	Kota Batam	0	408.000	451.037.598
493	Kota Tanjung Pinang	0	507.000	100.713.932
494	Kab. Lingga	3.601.440	507.000	105.561.744
495	Kab. Bintan	0	507.000	105.991.198

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
496	Provinsi Papua Barat	1.249.200	147.000	0	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	29.841.060	612.000	2.053.500	1.751.310	82.500	337.500
498	Kab. Manokwari	53.791.320	997.500	1.300.500	2.126.160	82.500	225.000
499	Kab. Teluk Bintuni	31.108.000	588.250	3.643.500	1.697.640	82.500	787.500
500	Kab. Teluk Wondama	15.336.290	345.750	1.668.000	555.560	82.500	712.500
501	Kab. Kaimana	22.439.240	413.250	3.393.000	975.320	82.500	300.000
502	Kab. Manokwari Selatan	12.350.790	250.000	823.500	628.320	82.500	150.000
503	Kab. Pegunungan Arfak	13.551.340	317.500	4.305.000	373.520	82.500	637.500
504	Provinsi Sulawesi Barat	91.510.650	2.991.250	755.300	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	513.348	0	0
497	Kab. Fak Fak	921.870	45.000	46.500	50.944.789	63.000	11.467.518
498	Kab. Manokwari	1.758.120	135.000	93.000	67.771.235	36.000	5.967.975
499	Kab. Teluk Bintuni	695.590	90.000	46.500	41.338.439	60.000	13.286.134
500	Kab. Teluk Wondama	331.420	45.000	0	19.047.050	55.000	5.241.587
501	Kab. Kaimana	524.940	45.000	0	35.494.480	30.000	13.147.851
502	Kab. Manokwari Selatan	49.230	45.000	0	15.099.032	6.000	2.887.163
503	Kab. Pegunungan Arfak	34.700	45.000	46.500	17.184.760	27.000	14.230.860
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	131.984.714	30.000	3.208.842

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	0	0	0	1.981.941
498	Kab. Manokwari	400.000	0	0	1.985.317
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	1.391.254
500	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	742.042
501	Kab. Kaimana	0	0	0	850.000
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	752.313
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	1.415.736
504	Provinsi Sulawesi Barat	600.000	0	2.000.000	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
496	Provinsi Papua Barat	2 872 382	0	0	0
497	Kab. Fak Fak	0	8.800.204	8.785.461	0
498	Kab. Manokwari	0	9.067.175	11.695.505	596.991
499	Kab. Teluk Bintuni	0	23.857.264	11.586.243	0
500	Kab. Teluk Wondama	0	4.315.496	8 701.243	0
501	Kab. Kaimana	0	5.650.114	8 257 013	158.809
502	Kab. Manokwari Selatan	0	5.515.056	7 256 891	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	5.438.687	6 742 479	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	4.241.173	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
496	Provinsi Papua Barat	0	507.000	5.288.930
497	Kab. Fak Fak	0	507.000	118.241.153
498	Kab. Manokwari	0	507.000	158.536.298
499	Kab. Teluk Bintuni	3.601.440	0	133.860.251
500	Kab. Teluk Wondama	2.881.152	0	60.060.590
501	Kab. Kaimana	0	0	91.761.517
502	Kab. Manokwari Selatan	2.521.008	0	48.416.803
503	Kab. Pegunungan Arfak	360.144	0	64.793.226
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	408.000	237.729.929

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
505	Kab. Majene	25.490.000	792.000	1.014.000	4.455.000	82.500	422.500
506	Kab. Mamuju	41.857.120	1.373.000	2.216.500	3.433.800	82.500	260.000
507	Kab. Polewali Mandar	56.808.800	1 080 000	741.000	9.948.000	82.500	357.500
508	Kab. Mamasa	27.859.660	935 000	7.202.000	2.845.800	82.500	3.932.500
509	Kab. Pasangkayu	25.701.600	525 000	162.500	2.156.400	82.500	0
510	Kab. Mamuju Tengah	19.041.960	410.000	279.500	2.784.000	82.500	65.000
511	Provinsi Kalimantan Utara	60.701.040	1.846.000	201.600	0	0	0
512	Kab. Bulungan	29.893.540	655.000	156.000	3.160.640	82.500	60.000
513	Kab. Malinau	17.653.160	387.500	1 524.000	1.634.750	82.500	690.000

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
505	Kab. Majene	3.510.100	135.000	80.600	101.712.855	234.000	9.413.660
506	Kab. Mamuju	4.155.300	135.000	80.600	103.597.436	228.000	11.772.300
507	Kab. Polewali Mandar	4.040.600	90.000	0	143.914.149	132.000	5.089.214
508	Kab. Mamasa	2.057.920	225.000	403.000	57.465.493	75.000	28.083.819
509	Kab. Pasangkayu	864.600	45.000	0	45.321.642	45.000	839.601
510	Kab. Mamuju Tengah	4.102.500	135.000	40.300	49.295.807	96.000	1.720.125
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	70.954.274	30.000	1.784.727
512	Kab. Bulungan	1.019.410	45.000	0	68.923.854	267.000	845.399
513	Kab. Malinau	759.420	45.000	0	50.238.788	21.000	10.203.841

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
505	Kab. Majene	500.000	600.000	0	1.488.327
506	Kab. Mamuju	0	0	0	2 290.899
507	Kab. Polewali Mandar	700.000	0	0	3.284.209
508	Kab. Mamasa	600.000	0	0	2 325.152
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0	1 609.660
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	1 186 169
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0
512	Kab. Bulungan	0	0	0	1.248.997
513	Kab. Malinau	0	0	0	1 007.250

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
505	Kab. Majene	0	6.997.938	12.266.274	0
506	Kab. Mamuju	0	8.927.955	19.412.482	324.018
507	Kab. Polewali Mandar	0	8.785.120	15.932.621	225.904
508	Kab. Mamasa	0	5.499.560	17.033.749	65.263
509	Kab. Pasangkayu	0	7.338.071	11.142.345	353.328
510	Kab. Mamuju Tengah	0	5.712.106	7.619.040	262.559
511	Provinsi Kalimantan Utara	3.367.083	0	0	0
512	Kab. Bulungan	0	6.709.504	9.133.120	388.773
513	Kab. Malinau	0	7.029.312	9.916.518	200.483

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
505	Kab. Majene	0	408.000	169.602.754
506	Kab. Mamuju	0	0	200.146.910
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	251.211.617
508	Kab. Mamasa	0	0	156.691.416
509	Kab. Pasangkayu	0	0	96.187.247
510	Kab. Mamuju Tengah	0	408.000	93.240.566
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	507.000	139.391.724
512	Kab. Bulungan	11.524.608	408.000	134.521.345
513	Kab. Malinau	7.563.024	0	108.956.546

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
514	Kab. Nunukan	37.824.100	694.500	1.242.000	3.893.250	82.500	360.000
515	Kota Tarakan	39.230.480	349.500	0	3.013.920	82.500	0
516	Kab. Tana Tidung	6.135.800	249.500	156.000	929.520	82.500	60.000
517	Provinsi Papua Selatan	1.114.880	147.000	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	90.748.290	1.936.000	3.816.000	4.581.600	82.500	375.000
519	Kab. Boven Digoel	31.280.090	595.250	2.995.500	906.500	82.500	375.000
520	Kab. Mappi	51.037.680	874.000	6.126.000	1.095.640	82.500	712.500
521	Kab. Asmat	49.639.020	1.045.470	6.654.000	3.380.400	82.500	1.200.000
522	Provinsi Papua Tengah	4.762.530	159.500	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
514	Kab. Nunukan	2.184.270	135.000	0	74.255.488	192.000	9.899.497
515	Kota Tarakan	2.205.660	90.000	0	47.737.293	24.000	0
516	Kab. Tana Tidung	276.230	45.000	0	16.482.898	9.000	1.222.573
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	2.815.641	0	0
518	Kab. Merauke	4.179.870	135.000	0	88.822.431	66.000	14.599.657
519	Kab. Boven Digoel	1.522.220	90.000	232.500	19.662.355	9.000	5.532.115
520	Kab. Mappi	945.440	45.000	139.500	30.515.840	15.000	24.469.152
521	Kab. Asmat	8.282.000	135.000	651.000	22.902.721	12.000	23.237.651
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	2.549.552	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
514	Kab. Nunukan	0	0	0	2.532.875
515	Kota Tarakan	0	700.000	0	1.114.598
516	Kab. Tana Tidung	0	0	0	407.340
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	2.102.125
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	1.136.870
520	Kab. Mappi	0	0	0	1.574.010
521	Kab. Asmat	0	0	0	2.026.197
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
514	Kab. Nunukan	0	8.818.269	13.751.422	590.116
515	Kota Tarakan	0	5.394.581	3.679.607	319.263
516	Kab. Tana Tidung	0	4.272.906	3.513.724	236.056
517	Provinsi Papua Selatan	1.858.220	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	13.910.510	25.096.671	586.623
519	Kab. Boven Digoel	0	10.140.849	16.744.811	636.493
520	Kab. Mappi	0	10.498.095	12.394.340	0
521	Kab. Asmat	0	7.558.139	15.572.101	0
522	Provinsi Papua Tengah	2.831.663	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
514	Kab. Nunukan	9.723.888	0	166.179.175
515	Kota Tarakan	0	0	103.941.402
516	Kab. Tana Tidung	1.800.720	0	35.879.767
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	5.935.741
518	Kab. Merauke	11.524.608	507.000	263.069.885
519	Kab. Boven Digoel	4.681.872	0	96.623.925
520	Kab. Mappi	2.160.864	0	142.685.561
521	Kab. Asmat	5.042.016	0	147.420.215
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	10.303.245

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
523	Kab. Mimika	85.507.030	1.315.500	2.680.500	3.102.400	82.500	450.000
524	Kab. Nabire	67.275.750	1.893.750	1.237.500	3.175.520	82.500	187.500
525	Kab. Paniai	55.832.600	340.000	2.977.500	10.167.600	82.500	1.650.000
526	Kab. Puncak Jaya	15.737.630	192.500	868.500	327.600	82.500	112.500
527	Kab. Dogiyai	35.810.650	317.500	2.793.000	330.000	82.500	300.000
528	Kab. Puncak	6.407.750	192.500	1.627.500	30.000	82.500	37.500
529	Kab. Intan Jaya	8.441.900	147.500	1.735.500	21.600	82.500	75.000
530	Kab. Deiyai	40.252.000	260.000	225.000	2.385.600	82.500	37.500
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
523	Kab. Mimika	3.770.450	90.000	279.000	70.534.948	48.000	12.709.724
524	Kab. Nabire	18.743.770	360.000	511.500	62.089.565	54.000	2.059.576
525	Kab. Paniai	21.859.000	180.000	1.023.000	13.211.387	21.000	6.004.722
526	Kab. Puncak Jaya	1.025.800	45.000	46.500	7.124.309	9.000	4.143.495
527	Kab. Dogiyai	333.800	45 000	93.000	7.987.869	6.000	5.122.213
528	Kab. Puncak	1.107.600	45 000	139.500	4.579.255	9.000	4.217.864
529	Kab. Intan Jaya	1.448.600	45 000	232.500	4.318.563	6.000	6.164.584
530	Kab. Deiyai	157.200	90.000	0	9.737.515	9.000	272.252
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)
523	Kab. Mimika	0	0	0	1 563.626
524	Kab. Nabire	0	0	0	1 071 453
525	Kab. Paniai	0	0	0	2.424.736
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	2 696.856
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	790.458
528	Kab. Puncak	0	0	0	1 825 286
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0	826.251
530	Kab. Deiyai	0	0	0	924.952
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
523	Kab. Mimika	0	16.565.030	21.193.227	0
524	Kab. Nabire	0	11.335.485	30.448.309	398.320
525	Kab. Paniai	0	9.663.610	35.723.761	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	2.167.656	11.836.163	0
527	Kab. Dogiyai	0	2.453.428	1.318.500	0
528	Kab. Puncak	0	6.754.914	13.153.063	0
529	Kab. Intan Jaya	0	7.384.706	7.357.953	0
530	Kab. Deiyai	0	11.684.938	13.717.609	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	4.279.350	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
523	Kab. Mimika	0	0	219.891.935
524	Kab. Nabire	7.923.168	0	208.847.666
525	Kab. Paniai	3.961.584	0	165.123.000
526	Kab. Puncak Jaya	2.521.008	0	48.937.016
527	Kab. Dogiyai	2.521.008	0	60.304.926
528	Kab. Puncak	1.080.432	0	41.289.664
529	Kab. Intan Jaya	2.160.864	0	40.449.021
530	Kab. Deiyai	1.800.720	0	81.636.786
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	4.279.350

V 13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
532	Kab. Jayawijaya	73.419.200	1.450.000	2.410.500	4.036.800	82.500	637.500
533	Kab. Yahukimo	96.361.240	670.000	8.046.000	1.922.400	82.500	675.000
534	Kab. Pegunungan Bintang	27.617.680	465.000	5.673.000	1.922.400	82.500	600.000
535	Kab. Tolikara	37.030.940	375.000	2.686.500	300.000	82.500	75.000
536	Kab. Mamberamo Tengah	11.923.730	170.000	1.674.000	217.200	82.500	150.000
537	Kab. Yalimo	17.811.760	330.000	3.819.000	176.400	82.500	187.500
538	Kab. Lanny Jaya	55.030.780	420.000	3.910.500	784.800	82.500	487.500
539	Kab. Nduga	11.974.890	192.500	1.405.500	183.600	82.500	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	1.457.540	108.750	0	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
532	Kab. Jayawijaya	19.740.400	405.000	279.000	29.149.791	12.000	9.667.183
533	Kab. Yahukimo	3.637.000	45.000	279.000	11.466.446	12.000	7.028.610
534	Kab. Pegunungan Bintang	2.513.400	90.000	418.500	10.764.912	6.000	10.741.555
535	Kab. Tolikara	5.574.400	90.000	279.000	6.746.183	6.000	3.427.747
536	Kab. Mamberamo Tengah	90.200	45.000	46.500	6.892.187	24.000	4.505.830
537	Kab. Yalimo	66.000	45.000	46.500	11 002.686	18.000	11.618.055
538	Kab. Lanny Jaya	8.205.800	180.000	1.302.000	11 620.795	3.000	12 829 639
539	Kab. Nduga	0	0	0	5 809 269	6.000	2.722 014
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	5 451.303	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	3.034.798
533	Kab. Yahukimo	0	0	0	4.474.348
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	2.473.665
535	Kab. Tolikara	0	0	0	4.657.129
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	626.613
537	Kab. Yalimo	0	0	0	2.719.280
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	3.126.666
539	Kab. Nduga	0	0	0	2.117.608
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
532	Kab. Jayawijaya	0	6.154.897	25.238.916	0
533	Kab. Yahukimo	0	7.046.380	42.845.808	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	13.537.020	45.898.088	0
535	Kab. Tolikara	0	9.344.997	23.188.268	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	5.172.214	9.914.601	0
537	Kab. Yalimo	0	4.440.227	6.306.742	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	4.394.330	18.612.473	0
539	Kab. Nduga	0	3.347.454	9.531.151	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	3.982.643	0	0	0

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	(2)	(23)	(24)	(25)
532	Kab. Jayawijaya	8.283.312	0	184.001.797
533	Kab. Yahukimo	2.881.152	0	187.472.884
534	Kab. Pegunungan Bintang	3.961.584	0	124.765.304
535	Kab. Tolikara	2.521.008	408.000	96.792.672
536	Kab. Mamberamo Tengah	1.080.432	0	42.615.007
537	Kab. Yalimo	1.800.720	0	60.470.370
538	Kab. Lanny Jaya	1.080.432	0	122.071.015
539	Kab. Nduga	360.144	0	37.732.630
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	9.000.236

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)					
		BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD		
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI	REGULER	KINERJA	AFIRMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
541	Kab. Sorong	37.710.830	932.000	4.269.000	1.352.520	82.500	225.000
542	Kota Sorong	51.495.090	1.550.250	240.000	1.395.180	82.500	37.500
543	Kab. Raja Ampat	26.158.020	522.500	3.708.000	652.540	82.500	675.000
544	Kab. Sorong Selatan	21.482.600	587.000	4.698.000	573.180	82.500	375.000
545	Kab. Maybrat	9.707.540	317.500	1.959.000	208.740	82.500	225.000
546	Kab. Tambrauw	10.496.840	295.000	3.669.000	257.550	82.500	412.500
	NASIONAL	52.215.847.710	781.662.470	435.536.500	3.769.058.850	42.405.000	127.742.500

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)			TUNJANGAN GURU ASN DAERAH		
		BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN			TUNJANGAN PROFESI GURU	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	TUNJANGAN KHUSUS GURU
		REGULER	KINERJA	AFIRMASI			
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
541	Kab. Sorong	469.560	45.000	46.500	72.481.310	72.000	21.593.328
542	Kota Sorong	508.870	45.000	0	63.487.812	27.000	900.411
543	Kab. Raja Ampat	401.690	45.000	46.500	47.194.267	84.000	15.587.506
544	Kab. Sorong Selatan	892.200	45.000	232.500	37.165.165	63.000	24.882.916
545	Kab. Maybrat	210.140	45.000	139.500	19.005.671	39.000	9.996.283
546	Kab. Tambrauw	348.060	45.000	46.500	14.476.122	21.000	15.418.013
	NASIONAL	1.852.797.820	57.735.000	12.328.700	72.201.044.402	68.112.250	2.494.175.431

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
			MUSEUM	TAMAN BUDAYA	
(1)	*(2)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*
541	Kab. Sorong	400.000	0	0	3.002.831
542	Kota Sorong	0	0	0	1.526.430
543	Kab. Raja Ampat	0	0	0	1.268.840
544	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	1.389.636
545	Kab. Maybrat	0	0	0	2.323.392
546	Kab. Tambrauw	0	0	0	2.113.048
	NASIONAL	125.000.000	89.850.000	60.150.000	1.999.172.116

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)			
		BOK DINAS		BOK PUSKESMAS	BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
		BOK PROVINSI	BOK KABUPATEN/KOTA		
(1)	*(2)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*
541	Kab. Sorong	0	9.071.634	21.341.506	0
542	Kota Sorong	0	7.152.028	8.124.442	0
543	Kab. Raja Ampat	0	4.882.917	17.875.165	0
544	Kab. Sorong Selatan	0	6.979.784	19.896.535	0
545	Kab. Maybrat	0	5.499.626	16.766.821	0
546	Kab. Tambrauw	0	2.890.542	9.735.542	0
	NASIONAL	262.233.571	4.320.188.182	7.507.715.087	150.000.000

V.13 RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOTAL DAK NONFISIK T.A. 2026
		TUNJANGAN KHUSUS BAGI DOKTER SPESIALIS, DOKTER SUBSPESIALIS, DOKTER GIGI SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI SUBSPESIALIS YANG BERTUGAS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN		
(1)	*(2)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
541	Kab. Sorong	11.524.608	507.000	185.127.127
542	Kota Sorong	0	408.000	136.980 513
543	Kab. Raja Ampat	2.521.008	0	121.705.453
544	Kab. Sorong Selatan	2.521.008	0	121.866 024
545	Kab. Maybrat	720.288	0	67.246 001
546	Kab. Tambrauw	1.440.576	0	61.747 793
	NASIONAL	638.535.312	132.000.000	149.343.290.901

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
1	Provinsi Aceh	0	0	0	0
2	Kab. Aceh Barat	0	0	0	0
3	Kab. Aceh Besar	0	0	0	0
4	Kab. Aceh Selatan	0	0	0	0
5	Kab. Aceh Singkil	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	0
7	Kab. Aceh Tenggara	0	0	0	0
8	Kab. Aceh Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
9	Kab. Aceh Utara	0	0	0	0
10	Kab. Bireuen	0	0	0	0
11	Kab. Pidie	0	0	0	0
12	Kab. Simeulue	0	0	0	0
13	Kota Banda Aceh	0	0	0	0
14	Kota Sabang	0	0	0	0
15	Kota Langsa	0	0	0	0
16	Kota Lhokseumawe	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO OF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
17	Kab. Gayo Lues	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat Daya	0	0	0	0
19	Kab. Aceh Jaya	0	0	0	0
20	Kab. Nagan Raya	0	0	0	0
21	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	0
22	Kab. Bener Meriah	0	0	0	0
23	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	0
24	Kota Subulussalam	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF (SFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
25	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0	0
26	Kab. Asahan	0	0	0	0
27	Kab. Dairi	0	0	0	0
28	Kab. Deli Serdang	0	0	0	0
29	Kab. Karo	0	0	0	0
30	Kab. Labuhanbatu	0	0	0	0
31	Kab. Langkat	0	0	0	0
32	Kab. Mandailing Natal	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
33	Kab. Nias	0	0	0	0
34	Kab. Simalungun	0	0	0	0
35	Kab. Tapanuli Selatan	0	0	0	0
36	Kab. Tapanuli Tengah	0	0	0	0
37	Kab. Tapanuli Utara	0	0	0	0
38	Kab Toba	0	0	0	0
39	Kota Binjai	0	0	0	0
40	Kota Medan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
41	Kota Pematang Siantar	0	0	0	0
42	Kota Sibolga	0	0	0	0
43	Kota Tanjung Balai	0	0	0	0
44	Kota Tebing Tinggi	0	0	0	0
45	Kota Padangsidimpuan	0	0	0	0
46	Kab. Pakpak Bharat	0	0	0	0
47	Kab. Nias Selatan	0	0	0	0
48	Kab. Humbang Hasundutan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
49	Kab. Serdang Bedagai	0	0	0	0
50	Kab. Samosir	0	0	0	0
51	Kab. Batu Bara	0	0	0	0
52	Kab. Padang Lawas	0	0	0	0
53	Kab. Padang Lawas Utara	0	0	0	0
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0
55	Kab. Labuhanbatu Utara	0	0	0	0
56	Kab. Nias Utara	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
57	Kab. Nias Barat	0	0	0	0
58	Kota Gunungsitoli	0	0	0	0
59	Provinsi Sumatera Barat	0	0	0	0
60	Kab. Lima Puluh Kota	0	0	0	0
61	Kab. Agam	0	0	0	0
62	Kab. Kepulauan Mentawai	0	0	0	0
63	Kab. Padang Pariaman	0	0	0	0
64	Kab. Pasaman	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
65	Kab. Pesisir Selatan	0	0	0	0
66	Kab. Sijunjung	0	0	0	0
67	Kab. Solok	0	0	0	0
68	Kab. Tanah Datar	0	0	0	0
69	Kota Bukittinggi	0	0	0	0
70	Kota Padang Panjang	0	0	0	0
71	Kota Padang	0	0	0	0
72	Kota Payakumbuh	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
73	Kota Sawahlunto	0	0	0	0
74	Kota Solok	0	0	0	0
75	Kota Pariaman	0	0	0	0
76	Kab. Pasaman Barat	0	0	0	0
77	Kab. Dharmasraya	0	0	0	0
78	Kab. Solok Selatan	0	0	0	0
79	Provinsi Riau	0	0	0	0
80	Kab. Bengkalis	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
81	Kab. Indragiri Hilir	0	0	0	0
82	Kab. Indragiri Hulu	0	0	0	0
83	Kab. Kampar	0	0	0	0
84	Kab. Kuantan Singingi	0	0	0	0
85	Kab. Pelalawan	0	0	0	0
86	Kab. Rokan Hilir	0	0	0	0
87	Kab. Rokan Hulu	0	0	0	0
88	Kab. Siak	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
89	Kota Dumai	0	0	0	0
90	Kota Pekanbaru	0	0	0	0
91	Kab. Kepulauan Meranti	0	0	0	0
92	Provinsi Jambi	0	0	6.000.000	6.000.000
93	Kab. Batanghari	0	0	0	0
94	Kab. Bungo	0	0	0	0
95	Kab. Kerinci	0	0	0	0
96	Kab. Merangin	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
97	Kab. Muaro Jambi	0	0	0	0
98	Kab. Sarolangun	0	0	0	0
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	0	0	0	0
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	0	0	0	0
101	Kab. Tebo	0	0	0	0
102	Kota Jambi	0	0	0	0
103	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0
104	Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
105	Kab. Lahat	0	0	0	0
106	Kab. Musi Banyuasin	0	0	0	0
107	Kab. Musi Rawas	0	0	0	0
108	Kab. Muara Enim	0	0	0	0
109	Kab. Ogan Komering Ilir	0	0	0	0
110	Kab. Ogan Komering Ulu	0	0	0	0
111	Kota Palembang	0	0	0	0
112	Kota Prabumulih	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
113	Kota Pagar Alam	0	0	0	0
114	Kota Lubuk Linggau	0	0	0	0
115	Kab. Banyuasin	0	0	0	0
116	Kab. Ogan Ilir	0	0	0	0
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	0	0	0	0
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	0	0	0	0
119	Kab. Empat Lawang	0	0	0	0
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
121	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	0	0
122	Provinsi Bengkulu	0	0	0	0
123	Kab. Bengkulu Selatan	0	0	0	0
124	Kab. Bengkulu Utara	0	0	0	0
125	Kab. Rejang Lebong	0	0	0	0
126	Kota Bengkulu	0	0	0	0
127	Kab. Kaur	0	0	0	0
128	Kab. Seluma	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
129	Kab. Mukomuko	0	0	0	0
130	Kab. Lebong	0	0	0	0
131	Kab. Kepahiang	0	0	0	0
132	Kab. Bengkulu Tengah	0	0	0	0
133	Provinsi Lampung	0	0	0	0
134	Kab. Lampung Barat	0	0	0	0
135	Kab. Lampung Selatan	0	0	0	0
136	Kab. Lampung Tengah	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
137	Kab. Lampung Utara	0	0	0	0
138	Kab. Lampung Timur	0	0	0	0
139	Kab. Tanggamus	0	0	0	0
140	Kab. Tulang Bawang	0	0	0	0
141	Kab. Way Kanan	0	0	0	0
142	Kota Bandar Lampung	0	0	0	0
143	Kota Metro	0	0	0	0
144	Kab. Pesawaran	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
145	Kab. Pringsewu	0	0	0	0
146	Kab. Mesuji	0	0	0	0
147	Kab. Tulang Bawang Barat	0	0	0	0
148	Kab. Pesisir Barat	0	0	0	0
149	Provinsi DKI Jakarta	2.607.618.000	0	0	2.607.618.000
150	Provinsi Jawa Barat	0	0	0	0
151	Kab. Bandung	0	0	0	0
152	Kab. Bekasi	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
153	Kab. Bogor	0	0	0	0
154	Kab. Ciamis	0	0	0	0
155	Kab. Cianjur	0	0	0	0
156	Kab. Cirebon	0	6.560.960	0	6.560.960
157	Kab. Garut	0	20.396.050	0	20.396.050
158	Kab. Indramayu	0	0	0	0
159	Kab. Karawang	0	0	0	0
160	Kab. Kuningan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO OF (SFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
161	Kab. Majalengka	0	0	0	0
162	Kab. Purwakarta	0	0	0	0
163	Kab. Subang	0	3.211.750	0	3.211.750
164	Kab. Sukabumi	0	0	0	0
165	Kab. Sumedang	0	0	0	0
166	Kab. Tasikmalaya	0	19.885.250	0	19.885.250
167	Kota Bandung	0	0	0	0
168	Kota Bekasi	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FORESE LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
169	Kota Bogor	0	0	0	0
170	Kota Cirebon	0	0	0	0
171	Kota Depok	0	0	0	0
172	Kota Sukabumi	0	0	0	0
173	Kota Tasikmalaya	0	0	0	0
174	Kota Cimahi	0	0	0	0
175	Kota Banjar	0	0	0	0
176	Kab. Bandung Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
177	Kab. Pangandaran	0	0	0	0
178	Provinsi Jawa Tengah	0	0	0	0
179	Kab. Banjarnegara	0	16.870.500	0	16.870.500
180	Kab. Banyumas	0	0	0	0
181	Kab. Batang	0	0	0	0
182	Kab. Blora	0	0	0	0
183	Kab. Boyolali	0	0	0	0
184	Kab. Brebes	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
185	Kab. Cilacap	0	0	0	0
186	Kab. Demak	0	0	0	0
187	Kab. Grobogan	0	0	0	0
188	Kab. Jepara	0	0	0	0
189	Kab. Karanganyar	0	0	0	0
190	Kab. Kebumen	0	0	0	0
191	Kab. Kendal	0	0	0	0
192	Kab. Klaten	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
193	Kab. Kudus	0	0	0	0
194	Kab. Magelang	0	6.465.000	0	6.465.000
195	Kab. Pati	0	0	0	0
196	Kab. Pekalongan	0	0	0	0
197	Kab. Pemalang	0	0	0	0
198	Kab. Purbalingga	0	12.915.000	0	12.915.000
199	Kab. Purworejo	0	0	0	0
200	Kab. Rembang	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
201	Kab. Semarang	0	0	0	0
202	Kab. Sragen	0	0	0	0
203	Kab. Sukoharjo	0	0	0	0
204	Kab. Tegal	0	0	0	0
205	Kab. Temanggung	0	0	0	0
206	Kab. Wonogiri	0	0	0	0
207	Kab. Wonosobo	0	0	0	0
208	Kota Magelang	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
209	Kota Pekalongan	0	0	0	0
210	Kota Salatiga	0	0	0	0
211	Kota Semarang	0	0	0	0
212	Kota Surakarta	0	0	0	0
213	Kota Tegal	0	0	0	0
214	Provinsi Di Yogyakarta	0	0	0	0
215	Kab. Bantul	0	0	0	0
216	Kab. Gunung Kidul	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
217	Kab. Kulon Progo	0	0	0	0
218	Kab. Sleman	0	0	0	0
219	Kota Yogyakarta	0	0	0	0
220	Provinsi Jawa Timur	0	0	0	0
221	Kab. Bangkalan	0	0	0	0
222	Kab. Banyuwangi	0	0	0	0
223	Kab. Blitar	0	0	0	0
224	Kab. Bojonegoro	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
225	Kab. Bondowoso	0	0	0	0
226	Kab. Gresik	0	0	0	0
227	Kab. Jember	0	0	0	0
228	Kab. Jombang	0	0	0	0
229	Kab. Kediri	0	0	0	0
230	Kab. Lamongan	0	0	0	0
231	Kab. Lumajang	0	0	0	0
232	Kab. Madiun	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
233	Kab. Magetan	0	0	0	0
234	Kab. Malang	0	9.204.000	0	9.204.000
235	Kab. Mojokerto	0	0	0	0
236	Kab. Nganjuk	0	0	0	0
237	Kab. Ngawi	0	0	0	0
238	Kab. Pacitan	0	0	0	0
239	Kab. Pamekasan	0	0	0	0
240	Kab. Pasuruan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
241	Kab. Ponorogo	0	0	0	0
242	Kab. Probolinggo	0	0	0	0
243	Kab. Sampang	0	0	0	0
244	Kab. Sidoarjo	0	0	0	0
245	Kab. Situbondo	0	0	0	0
246	Kab. Sumenep	0	10.751.000	0	10.751.000
247	Kab. Trenggalek	0	0	0	0
248	Kab. Tuban	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO OF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
249	Kab. Tulungagung	0	0	0	0
250	Kota Blitar	0	0	0	0
251	Kota Kediri	0	0	0	0
252	Kota Madiun	0	0	0	0
253	Kota Malang	0	0	0	0
254	Kota Mojokerto	0	0	0	0
255	Kota Pasuruan	0	0	0	0
256	Kota Probolinggo	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
257	Kota Surabaya	0	0	0	0
258	Kota Batu	0	0	0	0
259	Provinsi Kalimantan Barat	0	0	0	0
260	Kab. Bengkayang	0	0	0	0
261	Kab. Landak	0	0	0	0
262	Kab. Kapuas Hulu	0	0	0	0
263	Kab. Ketapang	0	0	0	0
264	Kab. Mempawah	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
265	Kab. Sambas	0	0	0	0
266	Kab. Sanggau	0	0	0	0
267	Kab. Sintang	0	0	0	0
268	Kota Pontianak	0	0	0	0
269	Kota Singkawang	0	0	0	0
270	Kab. Sekadau	0	0	0	0
271	Kab. Melawi	0	0	0	0
272	Kab. Kayong Utara	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
273	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0
274	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0	0
275	Kab. Barito Selatan	0	0	0	0
276	Kab. Barito Utara	0	0	0	0
277	Kab. Kapuas	0	0	0	0
278	Kab. Kotawaringin Barat	0	0	0	0
279	Kab. Kotawaringin Timur	0	0	0	0
280	Kota Palangkaraya	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
281	Kab. Katingan	0	0	0	0
282	Kab. Seruyan	0	0	0	0
283	Kab. Sukamara	0	0	0	0
284	Kab. Lamandau	0	0	0	0
285	Kab. Gunung Mas	0	0	0	0
286	Kab. Pulang Pisau	0	0	0	0
287	Kab. Murung Raya	0	0	0	0
288	Kab. Barito Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
289	Provinsi Kalimantan Selatan	0	0	0	0
290	Kab. Banjar	0	0	0	0
291	Kab. Barito Kuala	0	0	0	0
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0
294	Kab. Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
295	Kab. Kotabaru	0	0	0	0
296	Kab. Tabalong	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
297	Kab. Tanah Laut	0	0	0	0
298	Kab. Tapin	0	0	0	0
299	Kota Banjarbaru	0	0	0	0
300	Kota Banjarmasin	0	0	0	0
301	Kab. Balangan	0	0	0	0
302	Kab. Tanah Bumbu	0	0	0	0
303	Provinsi Kalimantan Timur	0	0	0	0
304	Kab. Berau	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
305	Kab. Kutai Kartanegara	0	0	0	0
306	Kab. Kutai Barat	0	0	0	0
307	Kab. Kutai Timur	0	0	0	0
308	Kab. Paser	0	0	0	0
309	Kota Balikpapan	0	0	0	0
310	Kota Bontang	0	0	0	0
311	Kota Samarinda	0	0	0	0
312	Kab. Penajam Paser Utara	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
313	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	0
314	Provinsi Sulawesi Utara	0	0	0	0
315	Kab. Bolaang Mongondow	0	0	0	0
316	Kab. Minahasa	0	0	0	0
317	Kab. Kepulauan Sangihe	0	0	0	0
318	Kota Bitung	0	0	0	0
319	Kota Manado	0	0	0	0
320	Kab. Kepulauan Talaud	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
321	Kab. Minahasa Selatan	0	7.587.850	0	7.587.850
322	Kota Tomohon	0	0	0	0
323	Kab. Minahasa Utara	0	0	0	0
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0	0	0	0
325	Kota Kotamobagu	0	0	0	0
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0
327	Kab. Minahasa Tenggara	0	0	0	0
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0
330	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0	0
331	Kab. Banggai	0	0	0	0
332	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0
333	Kab. Buol	0	0	0	0
334	Kab. Toli-Toli	0	0	0	0
335	Kab. Donggala	0	0	0	0
336	Kab. Morowali	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
337	Kab. Poso	0	0	0	0
338	Kota Palu	0	0	0	0
339	Kab. Parigi Moutong	0	0	0	0
340	Kab. Tojo Una Una	0	0	0	0
341	Kab. Sigi	0	0	0	0
342	Kab. Banggai Laut	0	0	0	0
343	Kab. Morowali Utara	0	0	0	0
344	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
345	Kab. Bantaeng	0	0	0	0
346	Kab Barru	0	0	0	0
347	Kab. Bone	0	0	0	0
348	Kab Bulukumba	0	0	0	0
349	Kab. Enrekang	0	0	0	0
350	Kab. Gowa	0	0	0	0
351	Kab Jeneponto	0	0	0	0
352	Kab. Luwu	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
353	Kab. Luwu Utara	0	0	0	0
354	Kab. Maros	0	0	0	0
355	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	0	0	0	0
356	Kota Palopo	0	0	0	0
357	Kab. Luwu Timur	0	0	0	0
358	Kab. Pinrang	0	0	0	0
359	Kab. Sinjai	0	0	0	0
360	Kab. Kepulauan Selayar	0	0	0	0

V 14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PENJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
361	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	0	0
362	Kab. Soppeng	0	0	0	0
363	Kab. Takalar	0	0	0	0
364	Kab. Tana Toraja	0	0	0	0
365	Kab. Wajo	0	0	0	0
366	Kota Parepare	0	0	0	0
367	Kota Makassar	0	0	0	0
368	Kab. Toraja Utara	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (CPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	0	0	0	0
370	Kab. Buton	0	0	0	0
371	Kab. Konawe	0	0	0	0
372	Kab. Kolaka	0	0	0	0
373	Kab. Muna	0	0	0	0
374	Kota Kendari	0	0	0	0
375	Kota Baubau	0	0	0	0
376	Kab. Konawe Selatan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
377	Kab. Bombana	0	0	0	0
378	Kab. Wakatobi	0	0	0	0
379	Kab. Kolaka Utara	0	0	0	0
380	Kab. Konawe Utara	0	0	0	0
381	Kab. Buton Utara	0	0	0	0
382	Kab. Konawe Kepulauan	0	0	0	0
383	Kab. Kolaka Timur	0	0	0	0
384	Kab. Muna Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
385	Kab. Buton Tengah	0	0	0	0
386	Kab. Buton Selatan	0	0	0	0
387	Provinsi Bali	0	0	0	0
388	Kab. Badung	0	0	0	0
389	Kab. Bangli	0	0	0	0
390	Kab. Buleleng	0	0	0	0
391	Kab. Gianyar	0	0	0	0
392	Kab. Jembrana	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF (SFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
393	Kab. Karangasem	0	0	0	0
394	Kab. Klungkung	0	0	0	0
395	Kab. Tabanan	0	0	0	0
396	Kota Denpasar	0	0	0	0
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
398	Kab. Bima	0	0	0	0
399	Kab. Dompu	0	0	0	0
400	Kab. Lombok Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
401	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0
402	Kab. Lombok Timur	0	0	0	0
403	Kab. Sumbawa	0	12.008.950	0	12.008.950
404	Kota Mataram	0	0	0	0
405	Kota Bima	0	0	0	0
406	Kab. Sumbawa Barat	0	0	0	0
407	Kab. Lombok Utara	0	0	0	0
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO OF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
409	Kab. Alor	0	0	0	0
410	Kab. Belu	0	0	0	0
411	Kab. Ende	0	0	0	0
412	Kab. Flores Timur	0	0	0	0
413	Kab. Kupang	0	0	0	0
414	Kab. Lembata	0	0	0	0
415	Kab. Manggarai	0	0	0	0
416	Kab. Ngada	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
417	Kab. Sikka	0	0	0	0
418	Kab. Sumba Barat	0	0	0	0
419	Kab. Sumba Timur	0	0	0	0
420	Kab. Timor Tengah Selatan	0	0	0	0
421	Kab. Timor Tengah Utara	0	0	0	0
422	Kota Kupang	0	0	0	0
423	Kab. Rote Ndao	0	0	0	0
424	Kab. Manggarai Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
425	Kab. Nagekeo	0	0	0	0
426	Kab. Sumba Barat Daya	0	0	0	0
427	Kab. Sumba Tengah	0	0	0	0
428	Kab. Manggarai Timur	0	0	0	0
429	Kab. Sabu Raijua	0	0	0	0
430	Kab. Malaka	0	0	0	0
431	Provinsi Maluku	0	0	0	0
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
433	Kab. Maluku Tengah	0	0	0	0
434	Kab. Maluku Tenggara	0	0	0	0
435	Kab. Buru	0	0	0	0
436	Kota Ambon	0	0	0	0
437	Kab Seram Bagian Barat	0	0	0	0
438	Kab. Seram Bagian Timur	0	0	0	0
439	Kab. Kepulauan Aru	0	0	0	0
440	Kota Tual	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
441	Kab. Maluku Barat Daya	0	0	0	0
442	Kab. Buru Selatan	0	0	0	0
443	Provinsi Papua	0	0	0	0
444	Kab. Biak Numfor	0	0	0	0
445	Kab. Jayapura	0	0	0	0
446	Kab. Kepulauan Yapen	0	0	0	0
447	Kota Jayapura	0	0	0	0
448	Kab. Sarmi	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
449	Kab. Keerom	0	0	0	0
450	Kab. Waropen	0	0	0	0
451	Kab. Supiori	0	0	0	0
452	Kab. Mamberamo Raya	0	0	0	0
453	Provinsi Maluku Utara	0	0	0	0
454	Kab. Halmahera Tengah	0	0	0	0
455	Kota Ternate	0	0	0	0
456	Kab. Halmahera Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
457	Kab. Halmahera Timur	0	0	0	0
458	Kab. Halmahera Selatan	0	0	0	0
459	Kab. Halmahera Utara	0	0	0	0
460	Kab. Kepulauan Sula	0	0	0	0
461	Kota Tidore Kepulauan	0	0	0	0
462	Kab. Pulau Morotai	0	0	0	0
463	Kab. Pulau Taliabu	0	0	0	0
464	Provinsi Banten	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
465	Kab. Lebak	0	5.485.000	0	5.485.000
466	Kab. Pandeglang	0	0	0	0
467	Kab. Serang	0	0	0	0
468	Kab. Tangerang	0	0	0	0
469	Kota Cilegon	0	0	0	0
470	Kota Tangerang	0	0	0	0
471	Kota Serang	0	0	0	0
472	Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
473	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0
474	Kab. Bangka	0	0	0	0
475	Kab. Belitung	0	0	0	0
476	Kota Pangkal Pinang	0	0	0	0
477	Kab. Bangka Selatan	0	0	0	0
478	Kab. Bangka Tengah	0	0	0	0
479	Kab. Bangka Barat	0	0	0	0
480	Kab. Belitung Timur	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO OF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
481	Provinsi Gorontalo	0	0	0	0
482	Kab. Boalemo	0	0	0	0
483	Kab. Gorontalo	0	1.728.500	0	1.728.500
484	Kota Gorontalo	0	0	0	0
485	Kab. Pohuwato	0	0	0	0
486	Kab. Bone Bolango	0	0	0	0
487	Kab. Gorontalo Utara	0	0	0	0
488	Provinsi Kepulauan Riau	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO OF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
489	Kab. Natuna	0	0	0	0
490	Kab. Kepulauan Anambas	0	0	0	0
491	Kab. Karimun	0	0	0	0
492	Kota Batam	0	0	0	0
493	Kota Tanjung Pinang	0	0	0	0
494	Kab. Lingga	0	0	0	0
495	Kab. Bintan	0	0	0	0
496	Provinsi Papua Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSKANKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSKANKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
497	Kab. Fakfak	0	0	0	0
498	Kab. Manokwari	0	0	0	0
499	Kab. Teluk Bintuni	0	0	0	0
500	Kab. Teluk Wondama	0	0	0	0
501	Kab. Kaimana	0	0	0	0
502	Kab. Manokwari Selatan	0	0	0	0
503	Kab. Pegunungan Arfak	0	0	0	0
504	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO OF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
505	Kab. Majene	0	0	0	0
506	Kab. Mamuju	0	0	0	0
507	Kab. Polewali Mandar	0	0	0	0
508	Kab. Mamasa	0	0	0	0
509	Kab. Pasangkayu	0	0	0	0
510	Kab. Mamuju Tengah	0	0	0	0
511	Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	0
512	Kab. Bulungan	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
513	Kab. Malinau	0	0	0	0
514	Kab. Nunukan	0	0	0	0
515	Kota Tarakan	0	0	0	0
516	Kab. Tana Tidung	0	0	0	0
517	Provinsi Papua Selatan	0	0	0	0
518	Kab. Merauke	0	0	0	0
519	Kab. Boven Digoel	0	0	0	0
520	Kab. Mappi	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
521	Kab. Asmat	0	0	0	0
522	Provinsi Papua Tengah	0	0	0	0
523	Kab. Mimika	0	0	0	0
524	Kab. Nabire	0	0	0	0
525	Kab. Paniai	0	0	0	0
526	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0
527	Kab. Dogiyai	0	0	0	0
528	Kab. Puncak	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
529	Kab. Intan Jaya	0	0	0	0
530	Kab. Deiyai	0	0	0	0
531	Provinsi Papua Pegunungan	0	0	0	0
532	Kab. Jayawijaya	0	0	0	0
533	Kab. Yahukimo	0	0	0	0
534	Kab. Pegunungan Bintang	0	0	0	0
535	Kab. Tolikara	0	0	0	0
536	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
537	Kab. Yalimo	0	0	0	0
538	Kab. Lanny Jaya	0	0	0	0
539	Kab. Nduga	0	0	0	0
540	Provinsi Papua Barat Daya	0	0	0	0
541	Kab. Sorong	0	0	0	0
542	Kota Sorong	0	0	0	0
543	Kab. Raja Ampat	0	0	0	0
544	Kab. Tambrauw	0	0	0	0

V.14. RINCIAN HIBAH KEPADA DAERAH MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	PINJAMAN LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN		HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAHKAN	TOTAL HIBAH KEPADA DAERAH
		MASS RAPID TRANSIT (MRT) PROJECT	THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED FARMING SYSTEM AT UPLAND AREAS PROJECT (UPLAND)	BIO CARBON FUND INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FOREST LANDSCAPE (BIO CF ISFL)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)
545	Kab. Maybrat	0	0	0	0
546	Kab. Sorong Selatan	0	0	0	0
	JUMLAH NASIONAL	2.607.618.000	133.069.810	6.000.000	2.746.687.810

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Provinsi Aceh	1.336.817.102	1.792.985.129	-	-	-	-
2	Kab. Aceh Barat	-	38.440.784	-	-	-	-
3	Kab. Aceh Besar	-	45.012.070	-	-	-	-
4	Kab. Aceh Selatan		38.966.830				
5	Kab. Aceh Singkil	-	31.517.803	-	-	-	-
6	Kab. Aceh Tengah	-	38.634.066	-	-	-	-
7	Kab. Aceh Tenggara		38.549.140			-	-
8	Kab. Aceh Timur	-	51.082.553	-	-	-	-
9	Kab. Aceh Utara	-	50.610.014	-	-	-	-
10	Kab. Bireuen	-	40.173.283				
11	Kab. Pidie	-	46.201.624	-	-	-	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Kab. Simeulue		34.002.156	-	-	-	-
13	Kota Banda Aceh	-	49.050.501	-	-	-	-
14	Kota Sabang	-	28.059.947	-			-
15	Kota Langsa	-	28.331.056	-	-	-	-
16	Kota Lhokseumawe	-	28.371.931	-	-	-	
17	Kab. Gayo Lues	-	38.375.671	-		-	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	32.056.363	-	-	-	-
19	Kab. Aceh Jaya	-	38.020.353	-	-	-	-
20	Kab. Nagan Raya	-	39.215.516	-		-	-
21	Kab. Aceh Tamiang		36.830.412	-	-	-	-
22	Kab. Bener Meriah	-	35.879.660	-	-	-	

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	Kab. Pidie Jaya	-	33.357.125	-	-	-	-
24	Kota Subulussalam	-	29.652.616	-	-	-	-
25	Provinsi Di Yogyakarta	-	-	-	-	-	1.000.000.000
26	Provinsi Papua	-	-	196.504.108	251.193.501	106.928.086	-
27	Kab. Biak Numfor	-	-	67.496.755	96.955.066	6.034.077	-
28	Kab. Jayapura	-	-	62.399.401	90.902.132	11.399.973	
29	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	47.997.200	56.183.640	9.260.894	-
30	Kota Jayapura	-	-	71.793.177	91.874.508	5.102.380	-
31	Kab. Sarmi	-		45.565.941	58.999.002	5.582.962	
32	Kab. Keerom	-	-	33.251.085	35.158.987	7.923.179	-
33	Kab. Waropen	-	-	45.673.361	58.905.510	4.463.016	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	Kab. Supiori	-	-	34.639.744	46.107.243	5.143.900	-
35	Kab. Mamberamo Raya			49.692.921	51.032.082	16.375.009	-
36	Provinsi Papua Barat	-	-	139.593.087	160.564.812	102.207.662	
37	Kab. Fak Fak	-	-	47.793.842	69.898.378	5.294.723	-
38	Kab. Manokwari	-		40.776.074	44.052.042	4.996.764	-
39	Kab. Teluk Bintuni	-	-	55.052.003	67.235.039	7.921.259	
40	Kab. Teluk Wondama	-	-	47.280.354	62.249.811	8.595.706	-
41	Kab. Kaimana	-	-	40.334.860	56.437.321	5.786.065	-
42	Kab. Manokwari Selatan	-	-	39.165.401	20.853.031	3.478.221	
43	Kab. Pegunungan Arfak	-	-	55.314.668	53.925.607	7.730.546	-
44	Provinsi Papua Selatan		-	65.551.436	129.360.827	110.297.631	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Kab. Merauke	-	-	119.820.935	145.150.980	8.127.866	-
46	Kab. Boven Digoel	-	-	100.128.641	100.639.190	7.696.292	-
47	Kab. Mappi			97.173.402	109.919.838	22.968.009	-
48	Kab. Asmat	-	-	139.637.246	158.223.649	8.478.247	-
49	Provinsi Papua Tengah	-	-	92.903.936	119.907.122	92.428.433	
50	Kab. Mimika	-		69.008.385	117.860.917	9.266.360	-
51	Kab. Nabire	-	-	105.392.399	112.797.679	8.049.795	-
52	Kab. Paniai	-	-	103.159.091	111.868.583	8.218.927	-
53	Kab. Puncak Jaya	-	-	84.364.313	122.026.234	12.264.246	-
54	Kab. Dogiyai	-	-	64.696.504	72.119.959	11.633.624	-
55	Kab. Puncak	-	-	100.305.819	143.005.026	28.479.319	

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
56	Kab. Intan Jaya	-	-	77.496.537	90.319.586	9.691.024	
57	Kab. Deiyai	-	-	70.203.086	84.790.983	4.825.139	
58	Provinsi Papua Pegunungan		-	113.797.557	314.014.859	135.796.890	-
59	Kab. Jayawijaya	-	-	136.608.372	151.519.276	2.033.580	-
60	Kab. Yahukimo	-	-	216.077.936	234.806.992	22.675.785	-
61	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	139.422.013	166.053.473	10.878.221	-
62	Kab. Tolikara	-	-	133.176.669	180.717.635	6.037.698	
63	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	63.586.646	87.708.490	3.376.203	-
64	Kab. Yalimo	-	-	99.952.602	95.154.207	2.327.329	-
65	Kab. Lanny Jaya	-	-	120.182.174	133.235.733	3.930.167	-
66	Kab. Nduga	-	-	82.911.361	96.948.241	6.939.684	-

V.15. RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	DANA OTONOMI KHUSUS				DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS	DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
		DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA	DANA OTSUS ACEH BAGIAN PROVINSI DAN KAB/KOTA	DANA OTSUS PAPUA BERSIFAT UMUM	DANA OTSUS PAPUA TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
67	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	120.859.697	119.394.676	41.806.533	-
68	Kab. Sorong	-	-	65.133.202	79.850.323	13.746.268	-
69	Kota Sorong	-	-	71.565.211	39.173.239	5.155.123	-
70	Kab. Raja Ampat	-		71.563.352	107.452.335	24.921.981	-
71	Kab. Sorong Selatan	-	-	43.500.505	55.998.725	19.810.185	-
72	Kab. Maybrat	-	-	48.688.222	64.541.111	17.956.911	-
73	Kab. Tambrauw	-		63.002.474	83.154.530	15.958.108	-
JUMLAH		1.336.817.102	2.663.376.603	4.000.193.705	5.000.242.130	1.000.000.000	1.000.000.000

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Kab. Aceh Barat	321	139.324.275	8.748.950
2	Kab. Aceh Besar	603	268.063.520	14.105.450
3	Kab. Aceh Selatan	260	119.368.050	8.927.520
4	Kab. Aceh Singkil	116	55.016.795	3.213.900
5	Kab. Aceh Tengah	295	132.883.370	10.043.460
6	Kab. Aceh Tenggara	385	169.393.755	12.944.904
7	Kab. Aceh Timur	513	234.728.320	14.953.596
8	Kab. Aceh Utara	852	381.735.665	19.819.050
9	Kab. Bireuen	609	274.896.580	17.855.040
10	Kab. Pidie	730	321.329.115	16.962.250
11	Kab. Simeulue	138	61.443.800	4.686.948
12	Kota Banda Aceh	90	49.037.575	3.347.820

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
1	Kab. Aceh Barat	1.930.789	47.471.060	197.475.074
2	Kab. Aceh Besar	165.976	78.591.272	360.926.218
3	Kab. Aceh Selatan	2.874.020	38.313.290	169.482.880
4	Kab. Aceh Singkil	1.767.642	21.461.630	81.459.967
5	Kab. Aceh Tengah	414.940	43.463.896	186.805.666
6	Kab. Aceh Tenggara	331.952	51.142.958	233.813.569
7	Kab. Aceh Timur	1.507.551	79.161.662	330.351.129
8	Kab. Aceh Utara	6.331.982	119.515.740	527.402.437
9	Kab. Bireuen	3.261.426	81.353.336	377.366.382
10	Kab. Pidie	1.197.664	94.093.556	433.582.585
11	Kab. Simeulue	677.671	21.353.532	88.161.951
12	Kota Banda Aceh	-	15.546.816	67.932.211

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
13	Kota Sabang	18	9.299.500	714.200
14	Kota Langsa	66	34.925.620	1.964.050
15	Kota Lhokseumawe	68	36.664.460	2.455.068
16	Kab. Gayo Lues	136	61.090.450	4.686.948
17	Kab. Aceh Barat Daya	152	71.191.235	4.106.650
18	Kab. Aceh Jaya	172	75.359.765	5.802.888
19	Kab Nagan Raya	222	99.896.065	6.070.700
20	Kab. Aceh Tamiang	215	103.508.580	7.365.204
21	Kab. Bener Meriah	232	104.260.690	7.811.580
22	Kab. Pidie Jaya	222	100.127.000	7.588.392
23	Kota Subulussalam	82	39.022 585	2.499.700
24	Kab. Asahan	177	98.468.705	6.026.076

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
13	Kota Sabang	-	3.495.024	13.508.724
14	Kota Langsa	82.988	13.309.462	50.282.120
15	Kota Lhokseumawe	-	13.743.964	52.863.492
16	Kab. Gayo Lues	746.892	23.627.444	90.151.734
17	Kab. Aceh Barat Daya	580.916	23.008.836	98.887.637
18	Kab. Aceh Jaya	414.940	22.869.010	104.446.603
19	Kab. Nagan Raya	829.880	33.992.508	140.789.153
20	Kab. Aceh Tamiang	1.327.808	36.357.112	148.558.704
21	Kab. Bener Meriah	912.868	33.684.896	146.670.034
22	Kab. Pidie Jaya	437.005	29.175.210	137.327.607
23	Kota Subulussalam	589.214	15.500.984	57.612.483
24	Kab. Asahan	497.928	44.159.528	149.152.237

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
25	Kab. Dairi	161	80.632.525	5.579.700
26	Kab. Deli Serdang	380	207.072.885	12.944.904
27	Kab. Karo	259	123.636.485	8.704.332
28	Kab. Labuhanbatu	75	42.230.840	2.142.600
29	Kab. Langkat	240	134.076.590	8.257.956
30	Kab. Mandailing Natal	377	176.293.425	10.177.350
31	Kab. Nias	170	77.488.805	5.802.888
32	Kab. Simalungun	386	198.896.910	12.944.904
33	Kab. Tapanuli Selatan	211	99.107.240	5.713.600
34	Kab. Tapanuli Tengah	159	76.411.300	5.356.512
35	Kab. Tapanuli Utara	241	115.607.080	6.606.350
36	Kab. Toba	231	105.815.905	7.811.580

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
25	Kab. Dairi	912.868	28.252.668	115.377.761
26	Kab. Deli Serdang	82.988	98.451.110	318.551.887
27	Kab. Karo	-	36.182.608	168.523.425
28	Kab. Labuhanbatu	-	22.446.434	66.819.874
29	Kab. Langkat	-	62.477.860	204.812.406
30	Kab. Mandailing Natal	6.904.198	60.755.284	254.130.257
31	Kab. Nias	6.497.942	30.138.614	119.928.249
32	Kab. Simalungun	248.964	69.482.876	281.573.654
33	Kab. Tapanuli Selatan	82.988	30.646.012	135.549.840
34	Kab. Tapanuli Tengah	5.444.000	28.084.352	115.296.164
35	Kab. Tapanuli Utara	1.109.207	40.913.182	164.235.819
36	Kab. Toba	1.361.000	33.890.204	148.878.689

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
37	Kota Padang Sidempuan	42	20.409.585	1.428.400
38	Kab. Pakpak Bharat	52	24.485.545	2.008.692
39	Kab. Nias Selatan	459	207.637.990	11.605.750
40	Kab. Humbang Hasundutan	153	73.850.295	5.133.324
41	Kab. Serdang Bedagai	237	123.674.915	6.427.800
42	Kab. Samosir	128	60.312.085	4.463.760
43	Kab. Batu Bara	141	76.983.315	3.928.100
44	Kab. Padang Lawas	303	136.086.420	8.213.300
45	Kab. Padang Lawas Utara	386	167.954.075	10.355.900
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	52	30.720.175	1.606.950
47	Kab. Labuhanbatu Utara	82	46.354.060	3.124.632
48	Kab. Nias Utara	112	53.906.000	3.035.350

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
37	Kota Padang Sidempuan		5.550.788	27.388.773
38	Kab. Pakpak Bharat	165.976	8.023.776	34.683.989
39	Kab. Nias Selatan	25.775.846	87.584.766	332.604.352
40	Kab. Humbang Hasundutan	1.161.832	25.652.496	105 797 947
41	Kab. Serdang Bedagai	-	48 793.934	178.896.649
42	Kab. Samosir	663.904	19.764.708	85.204.457
43	Kab. Batu Bara	-	31.168.408	112.079.823
44	Kab. Padang Lawas	3.590.541	44.627.828	192.518 089
45	Kab. Padang Lawas Utara	3.479.830	60.657.294	242.447.099
46	Kab. Labuhanbatu Selatan	-	19.003.840	51.330.965
47	Kab. Labuhanbatu Utara	331.952	24.277.496	74.088.140
48	Kab. Nias Utara	4.890.618	24.447.302	86.279.270

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
49	Kab. Nias Barat	105	48.628.205	3.571.008
50	Kota Gunungsitoli	98	47.045.080	2.856.800
51	Kab. Lima Puluh Kota	79	47.094.025	2.321.150
52	Kab. Agam	92	54.297.800	3.347.820
53	Kab. Kepulauan Mentawai	43	22.144.945	1.785.504
54	Kab. Padang Pariaman	103	59.243.215	3.571.008
55	Kab. Pasaman	62	36.989.810	2.231.880
56	Kab. Pesisir Selatan	182	97.851.270	6.249.264
57	Kab. Sijunjung	62	34.911.635	1.785.500
58	Kab. Solok	74	42.689.175	2.678.256
59	Kab. Tanah Datar	75	43.847.245	2.678.256
60	Kota Sawahlunto	27	13.718.355	1.115.940

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
49	Kab. Nias Barat	5.856.103	18.737.280	76.792.596
50	Kota Gunungsitoli	746.892	16.677.034	67.325.806
51	Kab. Lima Puluh Kota	-	24.754.332	74.169.507
52	Kab. Agam		28.416.536	86.062.156
53	Kab. Kepulauan Mentawai	884.948	15.972.974	40.788.371
54	Kab. Padang Pariaman	-	25.981.234	88.795.457
55	Kab. Pasaman	-	21.043.302	60.264.992
56	Kab. Pesisir Selatan		41.531.716	145.632.250
57	Kab. Sijunjung	-	17.461.426	54.158.561
58	Kab. Solok	179.743	25.635.316	71.182.490
59	Kab. Tanah Datar	-	19.769.136	66.294.637
60	Kota Sawahlunto	-	3.885.826	18.720.121

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
61	Kota Pariaman	55	27.093.835	2.008.692
62	Kab. Pasaman Barat	90	53.598.035	3.347.820
63	Kab. Dharmasraya	52	30.316.075	2.008.692
64	Kab. Solok Selatan	39	22.246.375	1.562.316
65	Kab. Bengkalis	136	73.675.350	4.686.948
66	Kab. Indragiri Hilir	197	101.598.310	6.695.640
67	Kab. Indragiri Hulu	178	91.371.685	6.026.076
68	Kab. Kampar	242	130.562.175	6.606.350
69	Kab. Kuantan Singingi	218	106.809.605	5.892.150
70	Kab. Pelalawan	104	55.321.245	2.856.800
71	Kab. Rokan Hilir	159	87.956.955	5.356.512
72	Kab. Rokan Hulu	139	77.611.330	3.749.550

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
61	Kota Pariaman		7.021.230	36.123.757
62	Kab. Pasaman Barat	82.988	29.033 224	86.062.067
63	Kab. Dharmasraya	-	16.211.682	48.536.449
64	Kab. Solok Selatan	-	13.062.846	36.871.537
65	Kab. Bengkalis		38.785.824	117.148.122
66	Kab. Indragiri Hilir	-	47.174.428	155.468.378
67	Kab. Indragiri Hulu	-	38.171.876	135 569.637
68	Kab. Kampar	-	63.280.904	200.449.429
69	Kab. Kuantan Singingi		39.044.574	151.746.329
70	Kab Pelalawan	-	32.199.442	90.377.487
71	Kab Rokan Hilir	96.755	42.807.572	136.217.794
72	Kab. Rokan Hulu	-	40.453.726	121.814.606

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
73	Kab. Siak	122	65.313.485	4.240.572
74	Kab. Kepulauan Meranti	96	47.846.315	2.856.800
75	Kab. Batang Hari	110	56.323.645	3.035.350
76	Kab. Bungo	141	72.365.070	4.910.136
77	Kab. Kerinci	285	132.617.630	9.597.084
78	Kab. Merangin	205	99.952.190	6.918.828
79	Kab. Muaro Jambi	150	79.554.865	5.133.324
80	Kab. Sarolangun	149	74.298.095	4.106.650
81	Kab. Tanjung Jabung Barat	114	57.607.625	3.213.900
82	Kab. Tanjung Jabung Timur	73	37.663.360	2.142.600
83	Kab. Tebo	122	65.255.730	4.240.572
84	Kota Sungai Penuh	65	31.631.630	2.455.068

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
73	Kab. Siak	-	31.240.702	100.794.759
74	Kab. Kepulauan Meranti	-	25.864.850	76.567.965
75	Kab. Batang Hari	-	24.417.530	83.776.525
76	Kab. Bungo	82.988	27.778.646	105 136.840
77	Kab. Kerinci	359.486	38.158.030	180 732.230
78	Kab. Merangin	82.988	39.637.366	146.591.372
79	Kab. Muaro Jambi		31.913.834	116.602.023
80	Kab. Sarolangun	331.952	30.138.636	108.875.333
81	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	24.035.630	84.857 155
82	Kab. Tanjung Jabung Timur	580.916	18.288.662	58.675.538
83	Kab. Tebo	-	28.501.326	97.997.628
84	Kota Sungai Penuh	-	7 909.986	41.996.684

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
85	Kab. Lahat	360	166.651.005	9.820.250
86	Kab. Musi Banyuasin	229	122.261.600	7.811.580
87	Kab. Musi Rawas	186	95.382.990	6.249.264
88	Kab. Muara Enim	246	127.170.275	8.257.956
89	Kab. Ogan Komering Ilir	314	163.026.560	10.713.024
90	Kab. Ogan Komering Ulu	143	72.314.340	4.910.136
91	Kota Prabumulih	12	6.161.190	669.564
92	Kab. Banyuasin	288	149.888.995	9.820.272
93	Kab. Ogan Ilir	227	113.364.515	6.249.250
94	Kab. OKU Timur	305	158.030.485	10.266.648
95	Kab. OKU Selatan	252	122.515.245	8.481.144
96	Kab. Empat Lawang	147	74.637.500	5.133.324

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
85	Kab. Lahat		55.282.542	231.753.797
86	Kab. Musi Banyuasin	82.988	65.007.132	195.163.300
87	Kab. Musi Rawas	-	41.272.762	142.905.016
88	Kab. Muara Enim	-	53.283.878	188.712.109
89	Kab. Ogan Komering Ilir	-	81.460.422	255.200.006
90	Kab. Ogan Komering Ulu	248.964	29.875.564	107.349.004
91	Kota Prabumulih	-	2.245.202	9.075.956
92	Kab. Banyuasin	-	69.639.182	229.348.449
93	Kab. Ogan Ilir	82.988	43.326.866	163.023.619
94	Kab. OKU Timur	-	58.411.364	226.708.497
95	Kab. OKU Selatan	1.327.808	43.698.160	176.022.357
96	Kab. Empat Lawang	-	27.822.018	107.592.842

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
97	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	65	34.518.025	2.455.068
98	Kab. Musi Rawas Utara	82	42.428.600	2.499.700
99	Kab. Bengkulu Selatan	142	65.556.575	4.910.136
100	Kab. Bengkulu Utara	215	102.931.270	7.365.204
101	Kab. Rejang Lebong	122	59.944.760	4.240.572
102	Kab. Kaur	192	85.763.140	6.472.452
103	Kab. Seluma	182	84.862.335	6.249.264
104	Kab. Mukomuko	148	71.061.815	5.133.324
105	Kab. Lebong	93	43.621.605	2.678.250
106	Kab. Kepahiang	105	49.378.690	3.571.008
107	Kab. Bengkulu Tengah	142	65.036.990	4.910.136
108	Kab. Lampung Barat	131	67.250.005	4.463.760

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
97	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	14.699.814	51.672.907
98	Kab. Musi Rawas Utara	-	22.453.568	67.381.868
99	Kab Bengkulu Selatan		22.736.182	93.202.893
100	Kab. Bengkulu Utara	165.976	38.489.798	148.952.248
101	Kab. Rejang Lebong	248.964	23.253.804	87.688.100
102	Kab. Kaur	248.964	27.967.190	120.451.746
103	Kab. Seluma	843.647	31.914.432	123.869.678
104	Kab. Mukomuko	-	26.351.972	102.547.111
105	Kab. Lebong	82.988	14.633.086	61.015.929
106	Kab. Kepahiang	-	16.323.982	69.273.680
107	Kab. Bengkulu Tengah		21.605.762	91.552.888
108	Kab. Lampung Barat	-	26.484.310	98.198.075

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
109	Kab. Lampung Selatan	256	145.620.485	8.704.332
110	Kab. Lampung Tengah	301	174.411.055	8.213.300
111	Kab. Lampung Utara	232	120.944.350	7.811.580
112	Kab. Lampung Timur	264	153.037.620	7.142.000
113	Kab. Tanggamus	299	153.275.770	10.043.460
114	Kab. Tulang Bawang	147	78.274.375	4.106.650
115	Kab. Way Kanan	221	113.689.830	7.588.392
116	Kab. Pesawaran	148	81.914.720	5.133.324
117	Kab. Pringsewu	126	69.657.075	4.240.572
118	Kab. Mesuji	105	54.747.480	3.571.008
119	Kab. Tulang Bawang Barat	100	54.268.125	3.571.008
120	Kab. Pesisir Barat	116	56.113.665	4.017.384

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
109	Kab. Lampung Selatan	-	76.494.736	230.819.553
110	Kab. Lampung Tengah	-	84.372.918	266.997.273
111	Kab. Lampung Utara	-	54.638.544	183.394.474
112	Kab. Lampung Timur	-	78.464.760	238.644.380
113	Kab. Tanggamus	-	58.905.334	222.224.564
114	Kab. Tulang Bawang	-	30.898.098	113.279.123
115	Kab. Way Kanan	-	43.751.084	165.029.306
116	Kab. Pesawaran	-	35.992.430	123.040.474
117	Kab. Pringsewu	-	27.109.726	101.007.373
118	Kab. Mesuji	-	20.195.674	78.514.162
119	Kab. Tulang Bawang Barat	-	20.331.876	78.171.009
120	Kab. Pesisir Barat	96.755	21.342.808	81.570.612

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
121	Kab. Bandung	270	181.575.945	9.150.708
122	Kab. Bekasi	179	119.430.750	4.820.850
123	Kab. Bogor	416	279.300.900	13.168.092
124	Kab. Ciamis	258	153.536.160	8.704.332
125	Kab. Cianjur	354	221.587.145	12.052.152
126	Kab. Cirebon	412	253.713.855	12.944.904
127	Kab. Garut	421	262.404.650	13.168.092
128	Kab. Indramayu	309	191.122.455	8.391.850
129	Kab. Karawang	297	186.635.285	10.043.460
130	Kab. Kuningan	361	197.770.210	12.275.340
131	Kab. Majalengka	330	189.637.365	11.159.400
132	Kab. Purwakarta	183	109.227.100	6.249.264

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
121	Kab. Bandung	193.510	153.117.296	344.037.459
122	Kab. Bekasi	-	115.307.022	239.558.622
123	Kab. Bogor		237.039.162	529.508.154
124	Kab. Ciamis	-	67.710.566	229.951.058
125	Kab. Cianjur	82.988	140.979.980	374.702.265
126	Kab. Cirebon	96.755	139.298.826	406.054.340
127	Kab. Garut	96.755	148.897.956	424.567.453
128	Kab. Indramayu	-	111.942.504	311.456.809
129	Kab. Karawang	-	111.327.582	308.006.327
130	Kab. Kuningan	-	83.062.472	293.108.022
131	Kab. Majalengka		83.088.500	283.885.265
132	Kab. Purwakarta	-	50.937.446	166.413.810

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
133	Kab. Subang	245	151.931.935	8.257.956
134	Kab. Sukabumi	381	240.847.400	12.944.904
135	Kab. Sumedang	270	155.598.690	9.150.708
136	Kab. Tasikmalaya	351	216.669.835	9.463.150
137	Kota Banjar	16	9.985.235	669.564
138	Kab. Bandung Barat	165	109.683.490	5.579.700
139	Kab. Pangandaran	93	55.455.850	3.347.820
140	Kab. Banjarnegara	266	151.081.945	8.927.520
141	Kab. Banyumas	301	181.684.780	10.266.648
142	Kab. Batang	239	132.110.385	8.034.768
143	Kab. Blora	271	146.308.055	9.150.708
144	Kab. Boyolali	261	150.198.480	8.927.520

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
133	Kab. Subang	-	81.451.486	241.641.377
134	Kab. Sukabumi	-	133.240.328	387.032.632
135	Kab. Sumedang	-	69.426.170	234.175.568
136	Kab. Tasikmalaya	-	110.161.182	336.294.167
137	Kota Banjar	-	5.175.992	15.830.791
138	Kab. Bandung Barat	-	96.795.346	212.058.536
139	Kab. Pangandaran	-	25.779.274	84.582.944
140	Kab. Banjarnegara	-	76.387.908	236.397.373
141	Kab. Banyumas	-	101.632.024	293.583.452
142	Kab. Batang	-	51.751.892	191.897.045
143	Kab. Blora	-	62.389.848	217.848.611
144	Kab. Boyolali	-	65.996.888	225.122.888

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
145	Kab. Brebes	292	180.210.005	7.856.200
146	Kab. Cilacap	269	166.678.885	9.150.708
147	Kab. Demak	243	144.131.695	8.257.956
148	Kab. Grobogan	273	163.748.855	9.150.708
149	Kab. Jepara	184	113.329.280	6.249.264
150	Kab. Karanganyar	162	97.434.770	5.579.700
151	Kab. Kebumen	449	246.165.800	14.060.844
152	Kab. Kendal	266	150.562.370	8.927.520
153	Kab. Klaten	391	217.502.740	13.168.092
154	Kab. Kudus	123	76.112.035	3.392.450
155	Kab. Magelang	367	204.891.740	9.998.800
156	Kab. Pati	401	222.329.210	12.721.716

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
145	Kab. Brebes		129.937.374	318.003.579
146	Kab. Cilacap	-	106.764.292	282.593.885
147	Kab. Demak	248.964	74.608.832	227.147.447
148	Kab. Grobogan	-	86.417.652	259.317.215
149	Kab. Jepara	-	59.428.850	179.007.394
150	Kab. Karanganyar		49.658.250	152.672.720
151	Kab. Kebumen	-	113.071.146	373.297.790
152	Kab. Kendal	82.988	64.106.962	223.679.840
153	Kab. Klaten	-	87.661.774	318.332.606
154	Kab. Kudus	-	40.137.436	119.641.921
155	Kab. Magelang	-	89.287.088	304.177.628
156	Kab. Pati	-	89.333.130	324.384.056

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
157	Kab. Pekalongan	272	152.257.465	9.150.708
158	Kab. Pemalang	212	130.110.690	7.142.016
159	Kab. Purbalingga	224	130.903.190	7.588.392
160	Kab. Purworejo	469	227.762.680	14.730.408
161	Kab. Rembang	287	149.250.520	9.820.272
162	Kab. Semarang	208	119.705.710	7.142.016
163	Kab. Sragen	196	116.315.415	6.695.640
164	Kab. Sukoharjo	150	90.176.770	5.133.324
165	Kab. Tegal	281	172.955.520	9.597.084
166	Kab. Temanggung	266	143.115.505	8.927.520
167	Kab. Wonogiri	251	141.504.255	8.481.144
168	Kab. Wonosobo	236	131.118.460	6.427.800

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
157	Kab. Pekalongan		64.042.102	225.450.275
158	Kab. Pemalang	82.988	94.432.376	231.768.070
159	Kab. Purbalingga	-	69.160.826	207.652.408
160	Kab. Purworejo	248.964	74.288.720	317.030.772
161	Kab. Rembang		55.516.530	214.587.322
162	Kab. Semarang	-	50.604.008	177.451.734
163	Kab. Sragen	-	60.315.242	183.326.297
164	Kab. Sukoharjo	-	41.494.314	136.804.408
165	Kab. Tegal	594.683	88.255.684	271.402.971
166	Kab. Temanggung	-	53.106.758	205.149.783
167	Kab. Wonogiri	-	63.304.168	213.289.567
168	Kab. Wonosobo	-	63.048.372	200.594.632

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
169	Kab. Bantul	75	49.966.305	2.678.256
170	Kab. Gunung Kidul	144	86.634.350	4.910.136
171	Kab. Kulon Progo	87	51.105.270	3.124.632
172	Kab. Sleman	86	57.163.105	3.124.632
173	Kab. Bangkalan	273	151.741 430	9.150.708
174	Kab. Banyuwangi	189	120.043.155	6.472.452
175	Kab. Blitar	220	131.004.645	7.588.392
176	Kab. Bojonegoro	419	230.243.220	13.168.092
177	Kab. Bondowoso	209	117.226.940	7.142.016
178	Kab. Gresik	330	184.153.275	11.159.400
179	Kab. Jember	226	148.286.160	7.588.392
180	Kab. Jombang	302	177.012.335	10.266.648

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
169	Kab. Bantul	-	50.045.838	102.690.399
170	Kab. Gunung Kidul	-	53.077.826	144.622.312
171	Kab. Kulon Progo	-	28.403.200	82.633.102
172	Kab. Sleman	-	48.812.154	109.099.891
173	Kab. Bangkalan	-	82.536.058	243.428.196
174	Kab. Banyuwangi		72.750.696	199.266.303
175	Kab. Blitar	-	61.521.332	200.114.369
176	Kab. Bojonegoro	-	98.832.768	342.244.080
177	Kab. Bondowoso	-	51.141.520	175.510.476
178	Kab. Gresik		81.259.868	276.572.543
179	Kab. Jember	-	111.707.740	267.582.292
180	Kab. Jombang	-	76.948.354	264.227.337

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
181	Kab. Kediri	343	202.440.725	11.605.776
182	Kab. Lamongan	462	247.596.850	14.507.220
183	Kab. Lumajang	198	118.920.185	6.695.640
184	Kab. Madiun	198	111.357.875	6.695.640
185	Kab. Magetan	207	112.313.100	7.142.016
186	Kab. Malang	378	236.507.290	12.721.716
187	Kab. Mojokerto	299	170.536.270	10.043.460
188	Kab. Nganjuk	264	150.382.200	8.927.520
189	Kab. Ngawi	213	122.436.440	7.142.016
190	Kab. Pacitan	167	93.238.235	5.802.688
191	Kab. Pamekasan	178	102.917.225	6.026.076
192	Kab. Pasuruan	341	198.161.915	11.605.776

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
181	Kab. Kediri	-	100.444.136	314.490.637
182	Kab. Lamongan	-	100.038.066	362.142.136
183	Kab. Lumajang	-	60.407.460	186.023.285
184	Kab. Madiun	-	45.768.634	163.822.149
185	Kab. Magetan	-	40.823.214	160.278.330
186	Kab. Malang	-	139.599.250	388.828.256
187	Kab. Mojokerto	-	71.019.656	251.599.386
188	Kab. Nganjuk	-	67.096.922	226.406.642
189	Kab. Ngawi	-	60.996.112	190.574.568
190	Kab. Pacitan	-	41.980.524	141.021.647
191	Kab. Pamekasan	-	56.932.414	165.875.715
192	Kab. Pasuruan		89.107.470	298.875.161

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
193	Kab. Ponorogo	281	153.732.290	9.597.084
194	Kab. Probolinggo	325	183 558.450	10.936 212
195	Kab. Sampang	180	108 062.045	6.249 264
196	Kab. Sidoarjo	318	192.366.230	10.713.024
197	Kab. Situbondo	132	77.817.665	3.571.000
198	Kab. Sumenep	330	182.652.305	8.927.500
199	Kab. Trenggalek	152	89 837.415	5.133.324
200	Kab. Tuban	311	176.466.620	10.489.836
201	Kab. Tulungagung	257	148.048.505	8.704.332
202	Kota Batu	19	12.362.580	892.752
203	Kab. Bengkayang	122	62.427.035	4 240 572
204	Kab. Landak	156	82.750.980	5.356.512

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
193	Kab. Ponorogo	-	60.230.984	223.560.358
194	Kab. Probolinggo	-	90.340.690	284.835.352
195	Kab. Sampang	-	74.132.846	188.444.155
196	Kab. Sidoarjo	-	85.151.560	288.230.814
197	Kab. Situbondo	-	38.491.268	119.879.933
198	Kab. Sumenep	-	94.339.558	285.919.363
199	Kab. Trenggalek	-	43.898.890	138.869.629
200	Kab. Tuban	-	85.380.950	272.337.406
201	Kab. Tulungagung	-	60.308.686	217.061.523
202	Kota Batu	-	6.473.604	19.728.936
203	Kab. Bengkayang	96.755	28.043.604	94.807.966
204	Kab. Landak	-	43.710.454	131.817.946

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
205	Kab. Kapuas Hulu	278	128.494.395	9.373.896
206	Kab. Ketapang	253	127.136.970	8.481.144
207	Kab. Mempawah	60	34.211.890	2.231.880
208	Kab. Sambas	195	108.518.700	5.356.500
209	Kab. Sanggau	163	88.144.205	4.463.750
210	Kab. Sintang	390	181.592.175	13.168.092
211	Kab. Sekadau	94	49.224.820	3.571.008
212	Kab. Melawi	169	81.006.820	5.802.888
213	Kab. Kayong Utara	43	23.299.505	1.785.504
214	Kab. Kubu Raya	123	69.415.610	4.240.572
215	Kab. Barito Selatan	86	39.498.370	3.124.632
216	Kab. Barito Utara	93	42.524.725	2.678.250

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
205	Kab. Kapuas Hulu	-	69.735.612	207.603.903
206	Kab. Ketapang	-	77.610.064	213.228.178
207	Kab. Mempawah	-	15.578.108	52.021.878
208	Kab. Sambas		45.708.148	159.583.348
209	Kab. Sanggau	-	45.484.170	138.092.125
210	Kab. Sintang	-	91.230.836	285.991.103
211	Kab. Sekadau		24.171.030	76.966.858
212	Kab. Melawi	-	40.471.064	127.280.772
213	Kab. Kayong Utara	-	12.940.862	38.025.871
214	Kab. Kubu Raya	-	41.524.370	115.180.552
215	Kab. Barito Selatan	-	17.114.084	59.737.086
216	Kab. Barito Utara	-	21.904.176	67.107.151

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
217	Kab. Kapuas	214	103.966.930	5.892.150
218	Kab. Kotawaringin Barat	81	40.693.205	2.321.150
219	Kab. Kotawaringin Timur	168	81.926.965	5.802.888
220	Kab. Katingan	154	70.043.580	5.356.512
221	Kab. Seruyan	97	45.771.490	2.856.800
222	Kab. Sukamara	29	14.244.905	892.750
223	Kab. Lamandau	85	39.206.225	3.124.632
224	Kab. Gunung Mas	114	51.315.150	4.017.384
225	Kab. Pulang Pisau	95	45.649.100	2.856.800
226	Kab. Murung Raya	116	51.610.760	3.213.900
227	Kab. Barito Timur	100	45.955.190	3.571.008
228	Kab. Banjar	277	137.554.380	9.373.896

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
217	Kab. Kapuas	497.928	51.250.248	161.607.256
218	Kab. Kotawaringin Barat	-	19.656.322	62.670.677
219	Kab. Kotawaringin Timur	-	40.564.184	128.294.037
220	Kab. Katingan	96.755	40.659.952	116.156.799
221	Kab. Seruyan	-	28.071.318	76.699.608
222	Kab. Sukamara	-	6.511.826	21.649.481
223	Kab. Lamandau	-	17.794.190	60.125.047
224	Kab. Gunung Mas	414.940	23.196.192	78.943.666
225	Kab. Pulang Pisau	-	19.197.140	67.703.040
226	Kab. Murung Raya	248.964	31.334.348	86.407.972
227	Kab. Barito Timur	-	15.354.028	64.880.226
228	Kab. Banjar	-	45.009.828	191.938.104

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
229	Kab. Barito Kuala	195	95.529.905	6.695.640
230	Kab. Hulu Sungai Selatan	144	70.759.220	3.928.100
231	Kab. Hulu Sungai Tengah	161	79 189.320	5.579.700
232	Kab. Hulu Sungai Utara	214	100.387.765	7.365.204
233	Kab. Kotabaru	198	96.637.190	6.695.640
234	Kab. Tabalong	121	60.518.575	3.392.450
235	Kab. Tanah Laut	130	68 689.730	3 571 000
236	Kab. Tapin	126	60.016.455	3.392.450
237	Kab. Balangan	153	70.328.775	4.106.650
238	Kab. Tanah Bumbu	152	77.310.455	5.133.324
239	Kab. Berau	100	49.130.270	3 571.008
240	Kab. Kutai Kartanegara	193	102.219.320	5.177.950

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
229	Kab. Barito Kuala	-	29.982.232	132.207.777
230	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	20.719.958	95.407.278
231	Kab. Hulu Sungai Tengah		24.132.880	108.901.900
232	Kab. Hulu Sungai Utara	-	26.795.874	134.548.843
233	Kab. Kotabaru	-	41.455.732	144.788.562
234	Kab. Tabalong	-	21.118.144	85.029.169
235	Kab. Tanah Laut	-	25.507.890	97.768.620
236	Kab. Tapin	-	19.022.816	82.431.721
237	Kab. Balangan	-	20.216.892	94.652.317
238	Kab. Tanah Bumbu	-	28.822.874	111.266.653
239	Kab. Berau		34.977.878	87.679.156
240	Kab. Kutai Kartanegara	-	62.379.066	169.776.336

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
241	Kab. Kutai Barat	190	85.871.620	5.177.950
242	Kab. Kutai Timur	139	72.300.355	3.749.550
243	Kab. Paser	139	69.240.730	4.686.948
244	Kab. Penajam Paser Utara	30	16.557.515	1.339.128
245	Kab. Mahakam Ulu	50	22.458.025	1.606.950
246	Kab. Bolaang Mongondow	200	95.489.625	6.918.828
247	Kab. Minahasa	227	107.245.195	7.811.580
248	Kab. Kepulauan Sangihe	145	64.816.545	3.928.100
249	Kab. Kepulauan Talaud	142	63.131.920	3.928.100
250	Kab. Minahasa Selatan	167	79.960.745	4.642.300
251	Kab. Minahasa Utara	125	61.744.785	4.240.572
252	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	83	37.351.915	2.499.700

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
241	Kab. Kutai Barat	-	39.203.152	130 252.722
242	Kab. Kutai Timur	82.988	54.904.786	131.037.679
243	Kab. Paser	-	33.388.322	107.316.000
244	Kab. Penajam Paser Utara		7.486.750	25.380.393
245	Kab. Mahakam Ulu	-	20.675.818	44 740.793
246	Kab. Bolaang Mongondow	414.940	28.024.576	130.847.969
247	Kab. Minahasa	-	28.905.652	143.962.427
248	Kab. Kepulauan Sangihe	165.976	19.078.862	87.989.483
249	Kab. Kepulauan Talaud	-	19 722.274	86.782.294
250	Kab. Minahasa Selatan	-	23.523.350	108.126 395
251	Kab. Minahasa Utara	-	18.841.182	84.826.539
252	Kab. Kep. Sitau Tagulandang Biaro	188.041	10 005.964	50.045.620

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
253	Kota Kotamobagu	15	7.961.260	669.564
254	Kab. Bolaang Mongondow Utara	106	48.689.420	2.856.800
255	Kab. Minahasa Tenggara	135	62.068.385	4.686.948
256	Kab. Bolaang Mongondow Timur	81	38.441.810	2.901.444
257	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	81	37.287.215	2.901.444
258	Kab. Banggai	291	134.197.235	9.820.272
259	Kab. Banggai Kepulauan	141	64.802.585	4.910 136
260	Kab. Buol	108	51.294.230	3.035.350
261	Kab. Toli-Toli	103	51.623.115	2.856.800
262	Kab. Donggala	158	79.871.540	4.285.200
263	Kab. Morowali	126	60.824.625	3.392.450
264	Kab. Poso	142	68.096.665	4.910 136

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
253	Kota Kotamobagu	-	2.459.314	11.090.138
254	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	13.881.792	65.428.012
255	Kab. Minahasa Tenggara	179.743	17.227.706	84.162.782
256	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	10.196.108	51.539.362
257	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	82.988	11.757.572	52.029.219
258	Kab. Banggai	-	45.280.390	189.297.897
259	Kab. Banggai Kepulauan	-	23.027.662	92.740.383
260	Kab. Buol	-	19.501.510	73.831.090
261	Kab. Toli-Toli	-	21.231.410	75.711.325
262	Kab. Donggala	663.904	35.318.774	120.139.418
263	Kab. Morowali	290.265	25.865.074	90.372.414
264	Kab. Poso		29.757.274	102.764.075

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
265	Kab. Parigi Moutong	278	137.557.915	9.373.896
266	Kab. Tojo Una Una	134	62.064.880	4.686.948
267	Kab. Sigi	176	85.591.820	4.820.850
268	Kab. Banggai Laut	63	29.546.390	1.964.050
269	Kab. Morowali Utara	122	57.693.310	3.392.450
270	Kab. Bantaeng	46	25.041.845	1.785.504
271	Kab. Barru	40	22.249.880	1.562.316
272	Kab. Bone	328	167.347.560	11.159.400
273	Kab. Bulukumba	109	60.361.050	3.794.196
274	Kab. Enrekang	112	55.522.450	3.035.350
275	Kab. Gowa	121	69.581.805	3.392.450
276	Kab. Jeneponto	82	46.065.420	2.499.700

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
265	Kab. Pangi Moutong	262.731	53.321.838	200.516.380
266	Kab. Tojo Una Una	248.964	26.862.232	93.863.024
267	Kab. Sigi	-	35.876.496	126.289.166
268	Kab. Banggai Laut	-	9.971.748	41.482.188
269	Kab. Morowali Utara	96.755	26.688.170	87.870.685
270	Kab. Bantaeng	-	9.273.398	36.100.747
271	Kab. Barru	-	9.433.450	33.245.646
272	Kab. Bone	-	62.041.608	240.548.568
273	Kab. Bulukumba	-	21.027.404	85.182.650
274	Kab. Enrekang	91.286	19.084.642	77.733.728
275	Kab. Gowa	-	30.249.952	103.224.207
276	Kab. Jeneponto	-	19.665.854	68.230.974

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
277	Kab. Luwu	207	102.152.950	7.142.016
278	Kab. Luwu Utara	166	83.594.125	5.579.700
279	Kab. Maros	80	44.326.585	2.901.444
280	Kab. Pangkajene Kepulauan	65	34.806.680	2.455.068
281	Kab. Luwu Timur	125	65.670.380	3.392.450
282	Kab. Pinrang	69	37.822.535	2.678.256
283	Kab. Sinjai	67	36.545.520	2.455.068
284	Kab. Kepulauan Selayar	81	39.192.300	2.321.150
285	Kab. Sidenreng Rappang	68	36.029.500	2.455.068
286	Kab. Soppeng	49	26.899.645	2.008.692
287	Kab. Takalar	86	46.772.175	2.499.700
288	Kab. Tana Toraja	112	55.176.065	3.035.350

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
277	Kab. Luwu	2.586.395	37.353.058	149.234.419
278	Kab. Luwu Utara	1.100.909	35.940.962	126.215.696
279	Kab. Maros	82.988	20.419.562	67.730.579
280	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	15.965.948	53.227.696
281	Kab. Luwu Timur	-	26.899.660	95.962.490
282	Kab. Pinrang	414.940	16.070.486	56.986.217
283	Kab. Sinjai		13.405.066	52.405.654
284	Kab. Kepulauan Selayar	248.964	13.515.872	55.278.286
285	Kab. Sidenreng Rappang	-	12.983.040	51.467.608
286	Kab. Soppeng	-	10.261.998	39.170.335
287	Kab. Takalar	331.952	16.083.980	65.687.807
288	Kab. Tana Toraja	2.074.700	22.601.370	82.887.485

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
289	Kab. Wajo	142	71.444.975	4.910.136
290	Kab. Toraja Utara	111	54.826.185	3.794.196
291	Kab. Buton	83	39.199.275	2 499.700
292	Kab. Konawe	291	130.617.990	7.856.200
293	Kab Kolaka	100	48.206.660	2.856.800
294	Kab. Muna	124	59.720.840	4.240.572
295	Kab. Konawe Selatan	336	155.483.240	11.382 588
296	Kab. Bombana	121	56.823.890	3.392.450
297	Kab. Wakatobi	75	35.245.755	2.678.256
298	Kab. Kolaka Utara	127	59.384.905	4.463.760
299	Kab. Konawe Utara	159	68.040.485	4.285.200
300	Kab. Buton Utara	78	35.256.210	2.901 444

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
289	Kab. Wajo	-	22.652.402	99.007.513
290	Kab. Toraja Utara	2.766.138	20.678.120	82.064.639
291	Kab Buton	-	12.871.642	54.570.617
292	Kab. Konawe	345.719	45.137.976	183.957.885
293	Kab. Kolaka	165.976	17.672.426	68.901.862
294	Kab. Muna	1.939.087	21.070.344	86.970.843
295	Kab Konawe Selatan	96 755	51.882.238	218.844.821
296	Kab. Bombana	-	20.487.030	80.703.370
297	Kab. Wakatobi	96.755	11.846.350	49.867.116
298	Kab. Kolaka Utara	995.856	21.063.928	85.908.449
299	Kab. Konawe Utara	589 214	26.056.528	98.971.427
300	Kab. Buton Utara	-	11.749.828	49.907.482

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
301	Kab. Konawe Kepulauan	89	37.834.665	2.678.250
302	Kab. Kolaka Timur	117	53.750.265	4.017.384
303	Kab. Muna Barat	81	38.037.705	2.321.150
304	Kab. Buton Tengah	67	32.158.180	1.964.050
305	Kab. Buton Selatan	60	29.189.560	1.785.500
306	Kab. Badung	46	28.274.595	1.428.400
307	Kab. Bangli	68	37.068.560	1.964.050
308	Kab. Buleleng	129	77.691.725	4.463.760
309	Kab. Gianyar	64	40.229.570	2.455.068
310	Kab. Jembrana	41	25.139.785	1.562.316
311	Kab. Karangasem	75	46.387.255	2.142.600
312	Kab. Klungkung	53	30.204.130	2.008.692

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
301	Kab. Konawe Kepulauan	96.755	13.195.164	53.804.834
302	Kab. Kolaka Timur	82.988	21.346.138	79.196.775
303	Kab. Muna Barat	663.904	12.134.386	53.157.145
304	Kab. Buton Tengah	580.916	11.375.446	46.078.592
305	Kab. Buton Selatan	-	11.081.638	42.056.698
306	Kab. Badung	-	12.351.344	42.054.339
307	Kab. Bangli	-	13.732.750	52.765.360
308	Kab. Buleleng	-	35.490.630	117.646.115
309	Kab. Gianyar	-	18.774.688	61.459.326
310	Kab. Jembrana	-	11.677.418	38.379.519
311	Kab. Karangasem		24.009.532	72.539.387
312	Kab. Klungkung	-	10.281.622	42.494.444

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
313	Kab. Tabanan	133	73.838.005	4.463.760
314	Kota Denpasar	27	18.278.815	1.115.940
315	Kab. Bima	191	103.251.440	5.177.950
316	Kab. Dompu	72	39.911.250	2.678.256
317	Kab. Lombok Barat	119	73.615.750	4.017.384
318	Kab. Lombok Tengah	142	89.802.345	3.928.100
319	Kab. Lombok Timur	239	143.251.850	6.427.800
320	Kab. Sumbawa	157	85.698.565	5.356.512
321	Kab. Sumbawa Barat	58	29.586.665	1.785.500
322	Kab. Lombok Utara	43	26.532.250	1.785.504
323	Kab. Alor	158	74.618.215	4.285.200
324	Kab. Belu	69	35.397.965	2.142.600

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
313	Kab. Tabanan	-	26.447.720	104.749.485
314	Kota Denpasar	-	13.945.760	33.340.515
315	Kab. Bima	96.755	45.647.520	154.173.665
316	Kab. Dompu	-	18.412 654	61.002.160
317	Kab. Lombok Barat	-	44.477.146	122.110.280
318	Kab. Lombok Tengah	-	58.625.390	152.355.835
319	Kab. Lombok Timur	-	91.220.160	240.899.810
320	Kab. Sumbawa	96.755	41.694.206	132.846.038
321	Kab. Sumbawa Barat	-	11.323.422	42.695.587
322	Kab. Lombok Utara	-	23.278.092	51.595.846
323	Kab. Alor	3.692.962	32.465.408	115.061.785
324	Kab Belu	-	16.487.020	54.027.585

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
325	Kab. Ende	255	115.367.260	6.963.450
326	Kab. Flores Timur	229	107.598.545	7.811.580
327	Kab. Kupang	160	81.552.670	5.579.700
328	Kab. Lembata	144	65.159.440	3.928.100
329	Kab. Manggarai	145	73.360.560	4.910.136
330	Kab. Ngada	190	85.929.360	6.472.452
331	Kab. Sikka	181	88.726.730	6.249.264
332	Kab. Sumba Barat	63	31.624.645	1.964.050
333	Kab. Sumba Timur	140	68.147.445	4.910.136
334	Kab. Timor Tengah Selatan	266	132.378.135	8.927.520
335	Kab. Timor Tengah Utara	182	86.882.865	4.999.400
336	Kab. Rote Ndao	112	53.617.380	3.035.350

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
325	Kab. Ende	5.573.963	45.779.866	173.684.539
326	Kab. Flores Timur	248.964	37.284.458	152.943.547
327	Kab. Kupang	3.529.240	40.258.442	130.920.052
328	Kab. Lembata	760.659	25.087.206	94.935.405
329	Kab. Manggarai	1.341.575	33.156.942	112.769.213
330	Kab. Ngada	2.060.736	29.563.636	124.026.184
331	Kab. Sikka	1.590.539	33.906.160	130.472.693
332	Kab. Sumba Barat	2.710.684	17.655.528	53.954.907
333	Kab. Sumba Timur	3.147.878	38.593.430	114.798.889
334	Kab. Timor Tengah Selatan	13.609.031	65.274.148	220.188.834
335	Kab. Timor Tengah Utara	2.874.020	35.889.972	130.646.257
336	Kab. Rote Ndao	663.904	23.930.558	81.247.192

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
337	Kab. Manggarai Barat	164	81.104.850	5.579.700
338	Kab. Nagekeo	97	46.348.850	2.856.800
339	Kab. Sumba Barat Daya	173	88.871.930	5.802.888
340	Kab. Sumba Tengah	65	31.689.365	2.455.068
341	Kab. Manggarai Timur	159	78.951.420	4.285.200
342	Kab. Sabu Raijua	58	28.432.090	2.231.880
343	Kab. Malaka	127	62.906.400	3.571.000
344	Kab. Kepulauan Tanimbar	80	39.188.785	2.321.150
345	Kab. Maluku Tengah	186	93.131.480	6.249.264
346	Kab. Maluku Tenggara	190	83.273.775	5.177.950
347	Kab. Buru	82	40.003.970	2.499.700
348	Kota Ambon	30	17.481.160	1.339.128

V 16 RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
337	Kab. Manggarai Barat	2.530.941	38.336.240	127.551.731
338	Kab. Nagekeo	1.203.133	17.496.052	67.904.835
339	Kab. Sumba Barat Daya	8.832.347	49.398.508	152.905.673
340	Kab. Sumba Tengah	1.258.587	17.145.844	52.548.864
341	Kab. Manggarai Timur	428.707	38.860.420	122.525.747
342	Kab. Sabu Raijua	3.582 251	14.352.230	48.598.451
343	Kab. Malaka	580.916	25.826.192	92.884.508
344	Kab. Kepulauan Tanimbar	96.755	21.523.596	63.130.286
345	Kab. Maluku Tengah	788.193	47.605.320	147.774.257
346	Kab. Maluku Tenggara	580 916	32.652.918	121.685.559
347	Kab. Buru	810.258	20.122.456	63.436.384
348	Kota Ambon	-	10.463.204	29.283.492

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
349	Kab. Seram Bagian Barat	92	45.407.650	3.347.820
350	Kab. Seram Bagian Timur	198	87.458.190	5.356.500
351	Kab. Kepulauan Aru	117	51.152.410	3.213.900
352	Kota Tual	27	13.371.970	892.750
353	Kab. Maluku Barat Daya	117	52.076.080	3.213.900
354	Kab. Buru Selatan	81	37.460.395	2.321.150
355	Kab. Biak Numfor	254	105.953.810	8.704.332
356	Kab. Jayapura	139	62.775.055	4.686.948
357	Kab. Kepulauan Yapen	160	68.967.645	5.579.700
358	Kota Jayapura	14	7.034.105	535.650
359	Kab. Sarmi	92	38.595.640	3.347.820
360	Kab. Keerom	91	40.324.045	2.678.250

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
349	Kab. Seram Bagian Barat	1.048.284	29.209.006	79.012.760
350	Kab. Seram Bagian Timur	5.150.717	38.505.198	136.470.605
351	Kab. Kepulauan Aru	2.265.570	30.289.096	86.920.976
352	Kota Tual	-	6.839.320	21.104.040
353	Kab. Maluku Barat Daya	1.161.832	26.614.916	83.066.728
354	Kab. Buru Selatan	1.308.186	16.713.524	57.803.255
355	Kab. Biak Numfor	9.675.978	40.283.086	164.617.206
356	Kab. Jayapura	3.904.936	35.151.034	106.517.973
357	Kab. Kepulauan Yapen	1.028.662	29.639.310	105.215.317
358	Kota Jayapura	96.755	3.143.146	10.809.656
359	Kab. Sarmi	3.248.944	28.872.936	74.065.340
360	Kab. Keerom	3.821.751	25.879.728	72.703.774

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
361	Kab. Waropen	100	42.260.505	3.571.008
362	Kab. Supiori	38	17.335.965	1.249.850
363	Kab. Mamberamo Raya	60	26.707.165	1.785.500
364	Kab. Halmahera Tengah	61	29.654.845	1.785.500
365	Kab. Halmahera Barat	173	78.884.780	4.642.300
366	Kab. Halmahera Timur	102	47.232.225	3.571.008
367	Kab. Halmahera Selatan	249	115.288.570	6.784.900
368	Kab. Halmahera Utara	196	91.088.205	5.356.500
369	Kab. Kepulauan Sula	78	37.045.815	2.901.444
370	Kota Tidore Kepulauan	49	23.089.570	2.008.692
371	Kab. Pulau Morotai	88	40.775.400	2.678.250
372	Kab. Pulau Taliabu	71	32.749.420	2.142.600

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
361	Kab. Waropen	5.281.177	28.266.860	79.379.550
362	Kab. Supiori	1.120.334	6.940.394	26.646.543
363	Kab. Mamberamo Raya	3.374.391	39.185.940	71.052.996
364	Kab. Halmahera Tengah	1.050.538	12.242.702	44.733.585
365	Kab. Halmahera Barat	3.626.570	27.070.180	114.223.830
366	Kab. Halmahera Timur	1.258.587	21.478.502	73.540.322
367	Kab. Halmahera Selatan	2.378.732	48.352.090	172.804.292
368	Kab. Halmahera Utara	414.940	30.154.882	127.014.527
369	Kab. Kepulauan Sula	3.636.933	13.567.576	57.151.768
370	Kota Tidore Kepulauan	-	8.130.620	33.228.882
371	Kab. Pulau Morotai	387.020	13.387.740	57.228.410
372	Kab. Pulau Taliabu	1.717.657	14.630.206	51.239.883

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
373	Kab. Lebak	339	198.039.400	11.382.588
374	Kab. Pandeglang	326	187.314.265	8.748.950
375	Kab. Serang	326	198.571.135	8.748.950
376	Kab. Tangerang	246	163.423.160	8.257.956
377	Kab. Bangka	62	34.680.715	2.231.880
378	Kab. Belitung	42	23.065.090	1.785.504
379	Kab. Bangka Selatan	50	27.595.885	1.606.950
380	Kab. Bangka Tengah	56	30.676.480	2.008.692
381	Kab Bangka Barat	60	32.768.695	2.231.880
382	Kab. Belitung Timur	39	21.900.015	1.562.316
383	Kab. Bonalemo	82	41.735.865	3.124.632
384	Kab. Gorontalo	191	97.074.625	6.472.452

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
373	Kab. Lebak	1.078.844	92.523.522	303.024.354
374	Kab. Pandeglang	1.037.157	86.547.908	283.648.280
375	Kab. Serang	96.756	93.405.700	300.822.540
376	Kab. Tangerang	-	127.750.226	299.431.342
377	Kab. Bangka	-	15.382.180	52.294.775
378	Kab. Belitung	-	11.023.550	35.874.144
379	Kab. Bangka Selatan	-	13.196.928	42.399.763
380	Kab. Bangka Tengah	-	13.004.986	45.690.158
381	Kab. Bangka Barat	-	13.842.916	48.843.491
382	Kab. Belitung Timur	-	10.440.904	33.903.235
383	Kab. Boalemo	82.988	16.296.586	61.240.071
384	Kab. Gorontalo	-	37.910.460	141.457.537

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
385	Kab. Pohuwato	101	49.537.925	3.571.008
386	Kab. Bone Bolango	160	75.087.025	4.463.750
387	Kab. Gorontalo Utara	123	57.985.465	3.392.450
388	Kab. Natuna	70	31.418.150	2.678.256
389	Kab. Kepulauan Anambas	52	23.619.595	2.008.692
390	Kab. Karimun	42	21.390.965	1.785.504
391	Kab. Lingga	75	35.303.475	2.142.600
392	Kab. Bintan	36	18.194.920	1.249.850
393	Kab. Fak Fak	142	59.148.580	4.910.136
394	Kab. Manokwari	163	69.613.175	5.579.700
395	Kab. Teluk Bintuni	115	48.720.830	3.213.900
396	Kab. Teluk Wondama	75	32.243.795	2.678.256

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
385	Kab. Pohuwato	-	21.154.822	74.263.755
386	Kab. Bone Bolango	96.755	23.524.302	103.171.832
387	Kab. Gorontalo Utara	-	19.065.314	80.443.229
388	Kab. Natuna	-	10.591.226	44.687.632
389	Kab. Kepulauan Anambas		7.304.928	32.933.215
390	Kab. Karimun	82.988	8.017.508	31.276.965
391	Kab. Lingga	-	13.237.714	50.683.789
392	Kab. Bintan	-	7.267.892	26.712.662
393	Kab. Fak Fak	5.669.733	28.058.686	97.787.135
394	Kab. Manokwari	7.672.140	26.920.062	109.785.077
395	Kab. Teluk Bintuni	7.688.925	40.516.040	100.139.695
396	Kab. Teluk Wondama	4.117.485	17.795.012	56.834.548

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
397	Kab. Kaimana	84	35.334.855	2.499.700
398	Kab. Manokwari Selatan	57	24.964.805	1.785.500
399	Kab. Pegunungan Arfak	166	67.545.330	4.463.750
400	Kab. Majene	62	30.639.770	1.785.500
401	Kab. Mamuju	88	44.816.415	2.678.250
402	Kab. Polewali Mandar	144	76.762.940	3.928.100
403	Kab. Mamasa	168	77.135.450	5.802.888
404	Kab. Pasangkayu	59	31.264.260	1.785.500
405	Kab. Mamuju Tengah	54	28.706.725	1.606.950
406	Kab. Bulungan	74	35.415.400	2.142.600
407	Kab. Malinau	109	47.776.190	3.794.196
408	Kab. Nunukan	232	95.947.805	7.811.580

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
397	Kab. Kaimana	3.155.935	29.699.318	72.689.808
398	Kab. Manokwari Selatan	4.318.332	11.950.490	43.019.127
399	Kab. Pegunungan Arfak	11.857.113	34.656.760	118.522.953
400	Kab. Mayene	1.510.380	12.096.438	46.032.088
401	Kab. Manuju	1.576.772	21.847.856	70.919.293
402	Kab. Polewali Mandar	602.981	37.254.446	118.548.467
403	Kab. Mamasa	4.315.368	28.418.004	115 671 710
404	Kab. Pasangkayu	331.952	13.405.890	46.787 602
405	Kab. Mamuju Tengah	248.964	13.155.516	43.718.155
406	Kab. Bulungan	.	24.244.832	61.802.832
407	Kab. Malinau	96.755	43.602.854	95.269.995
408	Kab. Nunukan	82.988	48.611.216	152.453.589

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
409	Kab. Tana Tidung	32	14.601.740	1.339.128
410	Kab. Merauke	179	80.579.840	4.820.850
411	Kab. Boven Digoel	112	47.267.080	3.035.350
412	Kab. Mappi	162	71.687.920	4.463.750
413	Kab. Asmat	224	96.439.295	7.588.392
414	Kab. Mimika	133	58.539.910	3.571.000
415	Kab. Nabire	72	33.387.910	2.678.256
416	Kab. Paniai	216	90.753.935	7.365.204
417	Kab. Puncak Jaya	302	132.965.510	8.213.300
418	Kab. Dogiyai	79	39.127.600	2.321.150
419	Kab. Puncak	206	94.760.080	6.918.828
420	Kab. Intan Jaya	97	47.099.335	2.856.800

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
409	Kab. Tana Tidung	-	7.641.562	23.582.430
410	Kab. Merauke	4.976.057	71.777.798	162.154.545
411	Kab. Boven Digoel	3.172.378	44.120.474	97.595.282
412	Kab. Mappi	8.611.263	56.805.912	141.568.845
413	Kab. Asmat	11.266.863	74.335.092	189.629.642
414	Kab. Mimika	6.437.343	45.819.174	114.367.427
415	Kab. Nabire	3.025.835	24.078.996	63.170.997
416	Kab. Paniai	7.694.448	49.914.860	155.728.447
417	Kab. Puncak Jaya	17.523.692	79.505.184	238.207.686
418	Kab. Dogiyai	5.670.648	26.523.230	73.642.628
419	Kab. Puncak	15.863.183	58.117.110	175.659.201
420	Kab. Intan Jaya	7.727.775	39.823.832	97.507.742

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
421	Kab. Deiyai	67	32.331.370	1.964.050
422	Kab. Jayawijaya	328	144.602 120	11.159.400
423	Kab. Yahukimo	510	226.347 050	14.953.596
424	Kab. Pegunungan Bintang	277	116.714.040	9.373.896
425	Kab. Tolikara	541	228.360.355	12.677.050
426	Kab. Mamberamo Tengah	59	26.761.410	1.785.500
427	Kab. Yalimo	300	123.779.490	8.213.300
428	Kab. Lanny Jaya	354	154.910.950	9.641.700
429	Kab. Nduga	248	105.759.700	6.784.900
430	Kab. Sorong	227	89.002 960	6.249.250
431	Kab. Raja Ampat	117	49.478.245	3.213.900
432	Kab. Sorong Selatan	120	50.758.770	3.392.450

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
421	Kab. Deiyai	2.043.746	21.331.678	57.670.844
422	Kab. Jayawijaya	17.217.437	67.785.394	240.764.351
423	Kab. Yahukimo	33.569.756	135.005.872	409.876.274
424	Kab. Pegunungan Bintang	11.798.331	73.603.130	211.489.397
425	Kab. Tolikara	32.509.786	118.788.356	392.335.547
426	Kab. Mamberamo Tengah	4.056.554	15.889.770	48.493.234
427	Kab. Yalimo	23.380.634	63.416.488	218.789.912
428	Kab. Lanny Jaya	27.654.682	81.879.102	274.086.434
429	Kab. Nduga	19.612.233	61.941.434	194.098.267
430	Kab. Sorong	7.054.288	46.784.286	149.090.784
431	Kab. Raja Ampat	3.855.329	26.654.146	83.201.620
432	Kab. Sorong Selatan	6.915.460	25.903.114	86.969.794

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	JUMLAH DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
433	Kab. Maybrat	259	103.084.935	8.704.332
434	Kab. Tambrauw	216	82.210.330	5.892.150
Jumlah Dana Desa Nasional		75.260	38.720.498.480	2.382.798.132
Dana Desa TA Berjalan				
Total				

V.16. RINCIAN DANA DESA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO	NAMA DAERAH	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)
433	Kab. Maybrat	6.434.711	48.113.214	166.337.192
434	Kab. Tambrauw	6.839.431	48.964.102	143.906.013
Jumlah Dana Desa Nasional		595.698.272	17.871.005.116	59.570.000.000
Dana Desa TA Berjalan				1.000.000.000
Total				60.570.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

SK No 160458 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.	**Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat**	**470.462.497.909**
1.1	**Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga**	**470.462.497.909**
1.1.1	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	56.682.130.000
1.1.2	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi	61.873.870.000
1.1.3	Kementerian Kebudayaan	1.507.391.821
1.1.4	Kementerian Agama	75.621.201.484
1.1.5	Kementerian Keuangan	3.934.153.051
1.1.6	Kementerian Pertanian	238.230.496
1.1.7	Kementerian Perindustrian	685.931.252
1.1.8	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	165.156.199
1.1.9	Kementerian Perhubungan	1.702.218.515
1.1.10	Kementerian Kesehatan	2.511.295.039
1.1.11	Kementerian Kehutanan	76.000.000
1.1.12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	172.821.807
1.1.13	Kementerian Pariwisata	606.307.164
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	243.812.733
1.1.15	Kementerian Pertahanan	490.194.547
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	814.000.000
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	72.316.673
1.1.18	Kementerian Komunikasi dan Digital	57.664.448
1.1.19	Kementerian Pekerjaan Umum	23.060.554.539
1.1.20	Kementerian Perdagangan	12.550.000

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

NO.	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.1.21	Kementerian Sosial	15.946.576.833
1.1.22	Badan Riset dan Inovasi Nasional	429.160.818
1.1.23	Badan Gizi Nasional	223.558.960.490
1.2	**Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian/Lembaga**	-
2.	**Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah**	**264.624.371.415**
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	128.190.823.087
2.2	Dana Alokasi Khusus	134.333.446.633
2.2.1	DAK Non Fisik	134.333.446.633
2.2.1.1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.295.114.550
2.2.1.2	Tunjangan Guru ASN Daerah	74 763.332.083
2.2.1.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	150.000.000
2.2.1.4	Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	125.000.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.100.101.695
3.	**Anggaran Pendidikan Melalui Pembiayaan**	**34.000.000.000**
3.1	Dana Abadi di Bidang Pendidikan	25.000.000.000
3.2	Pembiayaan Pendidikan	9.000.000.000
	JUMLAH	**769.086.869.324**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 275664 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
A. Pembiayaan Utang	**832.208.898.829**
I. Surat Berharga Negara (Neto)	799.534.753.376
II. Pinjaman (Neto)	32.674.145.453
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	(6.536.498.992)
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	7.334.804.888
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(13.871.303.880)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	39.210.644.445
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	144.543.404.779
i. Pinjaman Tunai	41.929.930.000
ii. Pinjaman Kegiatan	102.613.474.779
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	97.953.677.465
(1) Pinjaman Kegiatan K/L	95.212.989.655
(2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	2.740.687.810
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	4.659.797.314
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(105.332.760.334)
B. Pembiayaan Investasi	**(203.056.843.566)**
I. Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Layanan Umum	(41.456.239.736)
II. Investasi Kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(1.960.281.244)
III. Investasi Pemerintah oleh BUN (Non Permanen)	(51.795.700.000)

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
IV. Investasi Lainnya	(111.839.303.957)
1. Pembiayaan Pendidikan	(9.000.000.000)
2. Cadangan Pembiayaan Investasi	(42.074.303.957)
3. Cadangan Pembiayaan Lainnya	(60.765.000.000)
V. Penerimaan Kembali Investasi	3.994.681.371
C. Pemberian Pinjaman	**(404.152.655)**
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	(404.152.655)
1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(4.659.797.314)
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	4.255.644.659
D. Pembiayaan Lainnya	**60.400.000.000**
I. Saldo Anggaran Lebih	60.000.000.000
II. Hasil Pengelolaan Aset	400.000.000
JUMLAH	**689.147.902.608**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 275663 A